



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

Buku I
Ringkasan Eksekutif
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester II Tahun 2012	1
BAB 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	3
BAB 2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012	5
BAB 3 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35
BAB 4 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	39

DAFTAR TABEL

- 2.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2012
- 2.2 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
- 2.3 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 2.4 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Tingkat Provinsi
- 2.5 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten
- 2.6 Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota
- 2.7 Opini atas LK PDAM Tahun 2011
- 2.8 Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD dan BUMD
- 2.9 Kelompok Temuan Ketidapatuhan dalam Pemeriksaan Keuangan
- 2.10 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada 5 Pemerintah Tingkat Provinsi
- 2.11 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.12 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada BUMD
- 2.13 Kelompok Temuan 3E Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012
- 2.14 Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012
- 2.15 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.16 Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012
- 2.17 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012
- 2.18 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012
- 2.19 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012
- 2.20 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012
- 2.21 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012
- 3.1 Data TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012
- 3.2 Perkembangan Data TLRHP Selama Semester II Tahun 2012 atas data TLRHP sejak Tahun 2008

- 3.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012
- 3.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2012
- 4.1 Temuan Pemeriksaan atas Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum Dalam Semester II Tahun 2012
- 4.2 Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012
- 4.3 Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

DAFTAR GRAFIK

- 1 Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 2 Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011
- 3 Belanja Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Belanja Modal untuk Fasilitas Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II Tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas 709 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain memuat hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, IHPS II Tahun 2012 juga memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2011 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada Semester I Tahun 2012 (LKPD belum diserahkan kepada BPK atau pemeriksaan masih berlangsung), dan pemeriksaan atas LK BUMD yang semuanya merupakan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Selama Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, melalui pemeriksaan kinerja terhadap 154 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 450 objek pemeriksaan. Bidang-bidang prioritas pemeriksaan antara lain ketahanan pangan, kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata laksana.

Hasil pemeriksaan BPK atas 105 laporan keuangan yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan bahwa sebagian besar entitas memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Namun, secara umum kualitas penyajian laporan keuangan seluruh entitas yang diperiksa selama periode Tahun 2007 s.d. 2011 cenderung meningkat yang ditandai dengan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK mencatat sejumlah temuan yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai relatif besar. Temuan tersebut antara lain adalah terkait pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; temuan kekurangan penerimaan baik yang berasal dari denda keterlambatan

pekerjaan maupun penerimaan lain yang belum dipungut/disetor; serta temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS; dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aspek pelayanan masyarakat. Pada Semester II Tahun 2012 terdapat lima tema hasil pemeriksaan signifikan yakni belanja modal untuk fasilitas umum; swasembada beras; pelayanan kesehatan rumah sakit serta pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda); penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS), serta swasembada daging sapi (pengendalian impor daging sapi) Tahun 2010 s.d. 2012. BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS II Tahun 2012 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disk (CD)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, 28 Maret 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester II Tahun 2012

- **Pemeriksaan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kepatuhan.**
Pada Semester II Tahun 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan PDTT. Pemeriksaan kinerja dilaksanakan terhadap 154 objek pemeriksaan, sedangkan PDTT terhadap 450 objek pemeriksaan. Bidang-bidang pemeriksaan yang telah dilakukan antara lain bidang ketahanan pangan, bidang kesehatan, dan bidang reformasi birokrasi dan tata laksana.

- **Penyelamatan uang/aset.**
Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

- **Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.**
Selama periode Tahun 2008 s.d. 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 199.302 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54,89% atau 109.391 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran, dan diantaranya sebanyak 14.702 rekomendasi (13,43%) ditindaklanjuti pada periode Semester II Tahun 2012. Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama Semester II Tahun 2012 adalah sebesar Rp611,23 miliar dan secara kumulatif dari Tahun 2008 s.d. akhir Tahun 2012 adalah sebesar Rp17,51 triliun.
- **Pemantauan kerugian negara.**
Selama periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun.

Atas kerugian tersebut s.d. akhir Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar, dan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar telah dihapuskan. Sisa kasus kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan adalah 10.249 kasus senilai Rp3,37 triliun. Selama periode Semester II Tahun 2012 telah dilakukan angsuran kerugian negara sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar, dan penghapusan sebanyak 2 kasus.

- **Penegakan hukum.**

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah menyampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 13 temuan yang mengandung unsur pidana senilai Rp195,37 miliar. Dengan demikian sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 332 temuan senilai Rp34,35 triliun.

Melalui hasil pemeriksaan tersebut di atas, BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19, BPK juga menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum) yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IHPS II Tahun 2012 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 709 objek pemeriksaan. Pada Semester II Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan PDDT. Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan, sedangkan PDDT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak memberikan opini.

Pemeriksaan kinerja dan PDDT dapat dilaksanakan sebagai pendukung atau tindak lanjut atau pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDDT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDDT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Selain hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, IHPS Semester II Tahun 2012 ini juga memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2012. Pemeriksaan laporan keuangan tersebut ditujukan untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

IHPS juga memberikan gambaran hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan petunjuk teknisnya. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya setiap semester BPK harus melaporkan hasil pemantauan TLRHP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut, pembahasan dengan entitas dan/atau pemeriksaan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memberikan 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Terkait dengan pemantauan penyelesaian kerugian negara, BPK telah melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian kerugian negara ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan meminimalkan terjadinya temuan berulang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Demikian pula dengan penyelesaian kerugian negara, selain akan berdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara.

BAB 2

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 2.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 105 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 154 objek pemeriksaan kinerja, dan 450 objek PDTT.

Tabel 2.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2012

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah Pusat	-	25	83	108
Pemerintah Daerah	96	63	268	427
- Provinsi	5	12	48	65
- Kabupaten/Kota	91	51	220	362
BUMN ^{*)}	-	8	38	46
BUMD	9	11	34	54
BLU	-	46	17	63
Badan Lainnya	-	1	10	11
Jumlah	105	154	450	709

Keterangan:

^{*)} Termasuk objek pemeriksaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Hasil pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp5,83 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.111 kasus senilai Rp1.206,02 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 990 kasus senilai Rp626,37 miliar), potensi kerugian sebanyak 605 kasus senilai Rp2.176,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.274 kasus senilai Rp2.456,30 miliar. Rekomendasi

BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan.

Adapun sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp3,88 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp46.325,22 juta, potensi kerugian senilai Rp55.929,71 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp21.883,78 juta.

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2011 atas 94 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun Anggaran 2011 (sebanyak 426 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2012) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 laporan keuangan BUMD Tahun 2011 yang semuanya merupakan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Rincian neraca atas LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Rincian LRA LKPD Tahun 2011 meliputi pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.

Rincian neraca atas LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp777,92 miliar, kewajiban senilai Rp692,70 juta, dan ekuitas senilai Rp777,23 miliar. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp961,58 miliar, belanja senilai Rp830,07 miliar, dan pembiayaan neto senilai Rp78,24 miliar.

Rincian neraca atas Laporan Keuangan (LK) BUMD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp380,74 miliar, kewajiban senilai Rp252,35 miliar, dan ekuitas senilai Rp128,39 miliar dan rincian laporan laba rugi meliputi pendapatan senilai Rp215,35 miliar, biaya senilai Rp209,80 miliar dan laba senilai Rp5,55 miliar.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 3 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 58 LKPD dan terhadap 2 LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap 9 LK PDAM Tahun 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK PDAM Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi, opini WDP atas LK PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh, dan opini TMP atas LK PDAM Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Rincian opini pemeriksaan keuangan atas LKPD dan LK PDAM disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD Tahun 2011	-	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
LKPD Tahun 2010	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%	2
LK PDAM Tahun 2011	2	22%	3	33%	-	0%	4	45%	9

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah memeriksa 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2011, sedangkan pada Semester I Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan dan melaporkan LHP atas 426 LKPD. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 520 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat 4 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku) serta Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) baru menyerahkan LKPD pada November 2012 dan Kabupaten Mamberamo Tengah (Provinsi Papua) baru menyerahkan LKPD pada Desember 2012.

Selain itu, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 2 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan November 2012 dan Pemerintah Kabupaten Puncak

baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan Desember 2011 dan baru dapat dilakukan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2012.

Opini LKPD Tahun 2011 atas 520 pemerintah daerah serta perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011 (Sem I*)	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426
2011 (Sem II)**)	0	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
2011***)	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

*) LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

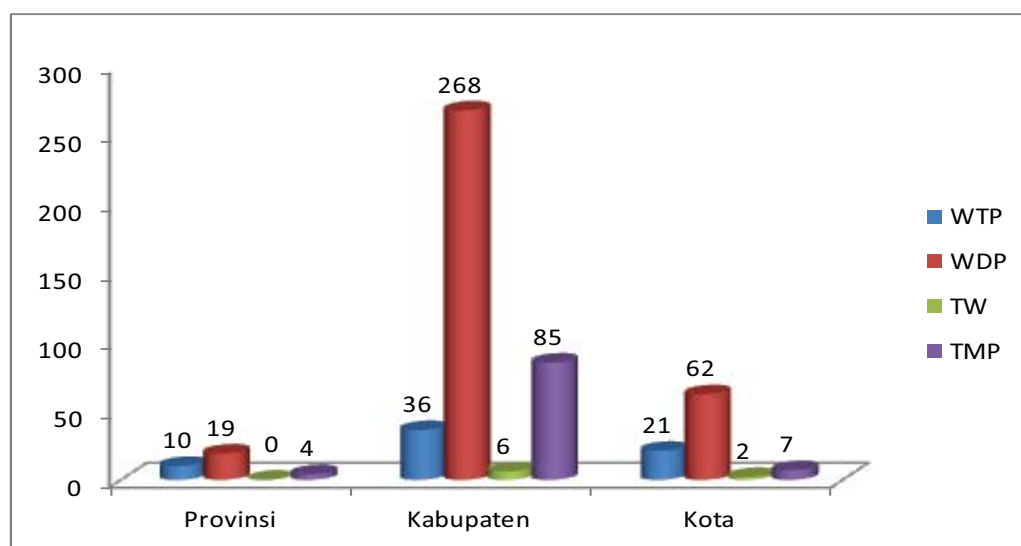
***) LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

****) Total LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa BPK telah memberikan opini atas 469 LKPD Tahun 2007, 485 LKPD Tahun 2008, 504 LKPD Tahun 2009, 522 LKPD Tahun 2010 dan 520 LKPD Tahun 2011. Untuk LKPD Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 520 LKPD Tahun 2011 dari yang seharusnya sejumlah 524 LKPD.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 terdiri atas 5 LKPD provinsi, 82 LKPD kabupaten, dan 7 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2011 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah tingkat provinsi dan kota lebih baik daripada pemerintah tingkat kabupaten. Pemerintah tingkat provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 29 LKPD atau sekitar 88% dari 33 entitas provinsi, dan pemerintah tingkat kota memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 83 LKPD atau sekitar 90% dari 92 entitas kota, dibandingkan pemerintah tingkat kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 304 LKPD atau sekitar 77% dari 395 entitas kabupaten.

Gambaran penyajian LKPD berdasarkan tingkat pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.

LKPD Provinsi

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 5 LKPD provinsi Tahun 2011 yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. Terhadap 5 LKPD provinsi Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 3 LKPD yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta opini TMP atas 2 LKPD yaitu Provinsi Maluku dan Papua Barat.

Perkembangan opini periode Tahun 2007 s.d. 2011 pada pemerintah tingkat provinsi disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Tingkat Provinsi

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	1	3%	21	64%	3	9%	8	24%	33
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33
2010	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33
2011 (Sem I) ^{*)}	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	3	60%	0	0%	2	40%	5
2011 ^{***)}	10	30%	19	58%	0	0%	4	12%	33

*) LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

***) LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

***) Total LK pemerintah tingkat provinsi Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa kualitas penyajian LKPD pemerintah provinsi cenderung meningkat sejak LKPD Tahun 2007. Perkembangan persentase opini WTP dibandingkan dengan total LKPD yang diperiksa mengalami peningkatan sekitar 27% dari Tahun 2007 ke Tahun 2011. Namun demikian, secara keseluruhan opini LKPD pemerintah tingkat provinsi masih didominasi LKPD yang memperoleh opini WDP. Peningkatan opini menjadi WTP atau ke opini yang lebih baik menggambarkan semakin andalnya data dan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tingkat provinsi.

LKPD Kabupaten

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 82 LKPD kabupaten Tahun 2011. Terhadap 82 LKPD kabupaten Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 28 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 52 LKPD.

Perkembangan opini periode Tahun 2007 s.d. 2011 pada pemerintah daerah kabupaten disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	1	1%	201	57%	45	13%	103	29%	350
2008	6	2%	235	65%	26	7%	96	26%	363
2009	7	2%	240	63%	37	10%	95	25%	379
2010	16	4%	252	64%	23	6%	105	26%	396
2011 (Sem I) ^{*)}	36	12%	240	76%	4	1%	33	11%	313
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	28	34%	2	3%	52	63%	82
2011 ^{***)}	36	9%	268	68%	6	2%	85	21%	395

^{*)} LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

^{**)} LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

^{***)} Total LK pemerintah tingkat kabupaten Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Pemerintah daerah kabupaten masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan Tabel 2.6. terlihat bahwa sejak Tahun 2007 mayoritas LKPD tingkat kabupaten belum memperoleh opini WTP. Pemerintah kabupaten terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. Hasilnya antara lain terlihat dari semakin bertambahnya persentase LKPD yang memperoleh opini WTP. Pada Tahun 2007, pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh opini WTP masih sekitar 1%, sedangkan di Tahun 2011 meningkat menjadi 9%. Ke depan, pemerintah daerah kabupaten perlu lebih mengoptimalkan upaya peningkatan keandalan dan kualitas penyajian LKPD antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

LKPD Kota

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa 7 LKPD kota Tahun 2011. Terhadap 7 LKPD kota Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WDP atas 2 LKPD yaitu Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan, opini TW atas 1 LKPD yaitu Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara, dan opini TMP atas 4 LKPD yaitu Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pare-pare di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kota Ambon dan Kota Tual di Provinsi Maluku.

Perkembangan opini atas LKPD pemerintah kota periode Tahun 2007 s.d. 2011 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	2	2%	61	71%	11	13%	12	14%	86
2008	7	8%	64	72%	4	4%	14	16%	89
2009	7	7%	66	72%	8	9%	11	12%	92
2010	12	13%	67	72%	3	3%	11	12%	93
2011 (Sem I) ^{*)}	21	25%	60	71%	1	1%	3	3%	85
2011 (Sem II) ^{**)}	0	0%	2	29%	1	14%	4	57%	7
2011 ^{***)}	21	23%	62	67%	2	2%	7	8%	92

*) LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012

**) LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012

***) Total LK pemerintah tingkat kota Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I dan IHPS II Tahun 2012

Tabel 2.6, menunjukkan bahwa kualitas opini atas LKPD tingkat kota cenderung meningkat sejak Tahun 2007. Pada Tahun 2007, LKPD pemerintah tingkat kota yang memperoleh opini WTP masih 2% dari total LKPD yang diperiksa. Pada Tahun 2011 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 23%. Namun demikian, persentase LKPD pemerintah tingkat kota yang memperoleh opini selain WTP masih relatif besar yaitu lebih dari 70%. Tingginya persentase ini menunjukkan perlunya pemerintah tingkat kota lebih mengoptimalkan upaya penyajian LKPD menjadi lebih andal dan berkualitas antara lain dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

Secara garis besar penyebab LKPD (provinsi/kabupaten/kota) tidak memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 (hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012) antara lain aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; pembatasan lingkup pemeriksaan; serta kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9 LK PDAM Tahun 2011 dan dilaksanakan pada 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 dilakukan pada 5 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Di Provinsi Banten, pemeriksaan hanya dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang. Di Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan dilakukan pada 2 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa. Adapun di Provinsi Maluku Utara, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Ternate.

Perkembangan opini LK sembilan PDAM tersebut untuk Tahun 2009 s.d. 2011 disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Opini atas LK PDAM Tahun 2011

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PDAM Kab. Pasaman*)	WTP	WTP	WTP
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan*)	WDP	WDP	WDP
3	PDAM Kota Bukittinggi*)	WTP	WTP	WTP
4	PDAM Kota Padang	WDP	WDP	WDP
5	PDAM Kota Payakumbuh*)	WTP	WTP	WDP
6	PDAM Kota Tangerang**)	WTP	WTP	TMP
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow*)	WDP	WDP	TMP
8	PDAM Kab. Minahasa*)	TMP	WDP	TMP
9	PDAM Kota Ternate*)	WDP	WDP	TMP

Keterangan:

*) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM kabupaten/kota diperiksa oleh BPKP.

***) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kota Tangerang memperoleh opini WTP dari KAP Sukardi Hasan.

Temuan Pemeriksaan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada pemerintah termasuk pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pada Semester II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.427 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD dan BUMD

No.	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten/Kota	BUMD	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	38	556	48	642
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	36	401	32	469
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	271	26	316
Jumlah		93	1.228	106	1.427

Dari total temuan kelemahan SPI sebanyak 1.427 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kelemahan SPI di pemerintah provinsi, sebanyak 1.228 kasus di pemerintah kabupaten/kota, dan sebanyak 106 kasus di lingkungan BUMD.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat atau pegawai yang lalai.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tabel 2.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan dalam Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan				Total LKPD dan LK BUMD	
		LKPD		BUMD		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>							
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	572	389.704,09	6	627,61	578	390.331,70
2	Potensi Kerugian/Daerah/Perusahaan	92	291.541,19	11	4.160,64	103	295.701,83
3	Kekurangan Penerimaan	285	128.806,49	14	3.125,64	299	131.932,13
Sub Total 1		949	810.051,77	31	7.913,89	980	817.965,66
4	Administrasi	664	-	29	-	693	-
5	Ketidakhematan	71	50.150,45	14	8.246,83	85	58.397,28
6	Ketidakefektifan	109	295.480,60	4	81,05	113	295.561,65
Sub Total 2		844	345.631,05	47	8.327,88	891	353.958,93
Total		1.793	1.155.682,82	78	16.241,77	1.871	1.171.924,59

Berdasarkan Tabel 2.9, hasil pemeriksaan keuangan Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Sub Total 1 merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 980 kasus senilai Rp817,96 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 578 kasus senilai Rp390,33 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 350 kasus senilai Rp255,32 miliar), potensi kerugian sebanyak 103 kasus senilai Rp295,70 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 299 kasus senilai Rp131,93 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset.

Sub Total 2 menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 891 kasus senilai Rp353,95 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan tindakan korektif lainnya.

Hasil pemeriksaan atas LKPD mengungkapkan 1.793 kasus senilai Rp1,15 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD, sebanyak 949 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp810,05 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 572 kasus senilai Rp389.704,09 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 346 kasus senilai Rp255.022,69 juta), potensi kerugian sebanyak 92 kasus senilai Rp291.541,19 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 285 kasus senilai Rp128.806,49 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.12.

Berikut ini adalah rincian hasil pemeriksaan atas LKPD selama Semester II Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan BUMD sebagai berikut.

1. Pemerintah provinsi

Hasil pemeriksaan atas 5 LKPD provinsi pada Semester II Tahun 2012 mengungkapkan 116 kasus senilai Rp125,62 miliar sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan tersebut, di antaranya sebanyak 60 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp115,96 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 56 kasus senilai Rp9,66 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada 5 pemerintah provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat disajikan dalam Tabel 2.10. berikut.

Tabel 2.10. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada 5 Pemerintah Tingkat Provinsi

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Provinsi	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	35	73.863,88
2	Potensi Kerugian Daerah	6	32.743,12
3	Kekurangan Penerimaan	19	9.357,10
Sub Total 1		60	115.964,10
4	Administrasi	43	-
5	Ketidakhematan	4	5.680,78
6	Ketidakefektifan	9	3.981,68
Sub Total 2		56	9.662,46
Total		116	125.626,56

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2011 pada 5 provinsi, menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan; serta terkait dengan pengadaan barang/jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

- Kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp5,26 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkannya ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 9 kasus senilai Rp4,47 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

2. Pemerintah kabupaten/kota

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 dan 2010 pada 91 kabupaten/kota mengungkapkan 1.677 kasus senilai Rp1,03 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota, sebanyak 889 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp694,08 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 788 kasus senilai Rp335,96 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada 91 pemerintah kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2010		LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2011		Total LKPD Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
1	Kerugian Daerah	11	4.717,09	526	311.123,12	537	315.840,21
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-	86	258.798,07	86	258.798,07
3	Kekurangan Penerimaan	1	467,12	265	118.982,27	266	119.449,39
Sub Total 1		12	5.184,21	877	688.903,46	889	694.087,67
4	Administrasi	13	-	608	-	621	-
5	Ketidakhematan	-	-	67	44.469,67	67	44.469,67
6	Ketidakefektifan	1	12.153,78	99	279.345,14	100	291.498,92
Sub Total 2		14	12.153,78	774	323.814,81	788	335.968,59
Total		26	17.337,99	1.651	1.012.718,27	1.677	1.030.056,26

Hasil pemeriksaan BPK atas 91 LKPD kabupaten/kota selama Semester II Tahun 2012 menemukan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan denda keterlambatan pekerjaan; serta terkait pengadaan barang dan jasa berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan.

- Kekurangan penerimaan diantaranya berasal dari penerimaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 124 kasus senilai Rp65,41 miliar dan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 119 kasus senilai Rp46,73 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*); serta segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan atas kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan.

- Belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 102 kasus senilai Rp44,26 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 94 kasus senilai Rp50,83 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

3. BUMD

Hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2011 pada 9 BUMD yakni PDAM mengungkapkan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp16,24 miliar. Dari total temuan tersebut, sebanyak 31 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,91 miliar. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 6 kasus senilai Rp627,61 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 4 kasus senilai Rp306,39 juta), potensi kerugian sebanyak 11 kasus senilai Rp4.160,64 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 14 kasus senilai Rp3.125,64 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012 pada BUMD
(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	6	627,61
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	11	4.160,64
3	Kekurangan Penerimaan	14	3.125,64
Sub Total 1		31	7.913,89
4	Administrasi	29	-
5	Ketidakhematan	14	8.246,83
6	Ketidakefektifan	4	81,05
Sub Total 2		47	8,327,88
Total		78	16.241,77

Hasil pemeriksaan BPK atas LK BUMD selama Semester II Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan serta piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan yang terjadi di PDAM sebanyak 11 kasus senilai Rp3,03 miliar. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan pejabat terkait belum mencatat, melaporkan, dan membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan serta lalai tidak segera melakukan penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong/dipungutnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar menyetorkan kewajiban titipan retribusi serta menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp4,05 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp7.779,01 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.709,43 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 154 objek pemeriksaan, terdiri atas 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 12 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 51 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 8 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), 11 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 46 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua belas tema sebagai berikut: Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Pelayanan Publik; Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); Lingkungan Hidup; Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB); Minyak dan Gas Bumi (Migas); Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); serta kinerja bidang lainnya.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2012 ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai Rp1,22 triliun, dan 36 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp56,73 miliar, serta 12 kasus ketidakefisienan senilai Rp141,34 miliar. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Kelompok Temuan 3E Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
		Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pusat	18	45.294,97	3	57,90	206	1.130.588,41	227	1.175.941,28
2	Provinsi	6	5.111,22	-	-	95	43.089,93	101	48.201,15
3	Kabupaten/ Kota	1	-	-	-	484	2.797,60	485	2.797,60
4	BUMN	8	6.295,65	8	141.104,19	71	23.979,31	87	171.379,15
5	BUMD	1	-	-	-	120	7.636,46	121	7.636,46
6	BLU	2	36,13	1	178,53	463	13.053,36	466	13.268,02
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	36	56.737,97	12	141.340,62	1.440	1.221.145,07	1.488	1.419.223,66

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan pada IHPS II Tahun 2012, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat, pertimbangan Kepala BKN yang disampaikan kepada Menteri PAN dan RB hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi PNS secara nasional. Selain itu, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi pusat. Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS yaitu terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN dan pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur. Hal itu mengakibatkan sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS belum efektif.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menunjukkan bahwa pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran yaitu tidak

ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Selain itu, bibit hasil KBR yang diserahkan belum siap tanam sehingga kegiatan KBR tidak efektif untuk menunjang rehabilitasi lahan.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB) Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut di antaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

2. Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu kualifikasi tenaga pendidik lebih rendah dari kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Selain itu, sarana prasarana pendidikan belum memadai.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit menunjukkan bahwa dari 66 rumah sakit yang diperiksa hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi, yaitu RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal.

3. BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya.

4. BUMD

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, penanggulangan kebocoran air, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi, serta pengelolaan meter air PDAM pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pada proses produksi terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Pada proses distribusi, tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung dengan menggunakan alat ukur yang akurat.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 1.411 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. Kelemahan tersebut terdiri atas 36 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 331 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.044 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 108 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp408,37 miliar yang terdiri atas 28 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.779,94 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp368,82 juta), 14 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp221.252,40 juta, 24 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp181.340,85 juta, dan 42 kasus penyimpangan administrasi. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								
		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Total Ketidapatuhan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	14	1.468,75	4	5.523,37	12	159.912,43	9	39	166.904,55
2	Provinsi	5	2.331,11	4	1.376,74	2	282,23	7	18	3.990,08
3	Kabupaten/Kota	3	552,22	-	-	2	1.828,98	19	24	2.381,20
4	BUMN dan KKKS	3	1.307,93	4	214.257,01	5	18.476,41	4	16	234.041,35
5	BUMD	3	119,93	1	48,54	2	813,59	1	7	982,06
6	BLU	-	-	1	46,74	1	27,21	2	4	73,95
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	5.779,94	14	221.252,40	24	181.340,85	42	108	408.373,19

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja entitas telah menindaklanjuti temuan ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp2,97 miliar dengan rincian temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp112,76 juta dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.859,93 juta.

Penyetoran temuan kerugian negara/daerah oleh pemerintah pusat senilai Rp103,69 juta dan pemerintah provinsi senilai Rp9,07 juta. Adapun penyerahan aset dan/atau penyetoran temuan kekurangan penerimaan oleh pemerintah pusat senilai Rp2.556,75 juta dan BUMD senilai Rp303,18 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

BPK telah melakukan PDTT atas 450 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 38 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), 34 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU, dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Cakupan pemeriksaan atas 450 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp352,07 triliun atau sekitar 44,2% dari realisasi anggaran. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Objek Pemeriksaan	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Nilai Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	83	385.481,38	346.505,54	23.708,02	6,8
Provinsi	48	89.575,76	56.983,91	32.599,70	57,2
Kabupaten/Kota	220	112.122,01	76.933,60	32.400,03	42,1
BUMN	38	261.923,82	251.254,00	235.002,63	93,5
BUMD	34	17.203,63	40.783,37	14.750,36	36,1
BLU	17	10.011,39	7.318,56	2.908,61	39,7
Badan Lainnya	10	15.670,47	16.593,83	10.704,76	64,5
Total	450	891.988,46	796.372,81	352.074,11	44,2

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PDTT dalam IHPS II Tahun 2012 dapat dikelompokkan dalam sembilan tema yaitu pengelolaan pendapatan; pelaksanaan belanja; manajemen aset; pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi; operasional BUMN; operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya; operasional BLU dan badan lainnya; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 2.16. Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.505	809.915,36
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	488	1.659.927,29
3	Kekurangan Penerimaan	951	2.143.036,78
Sub Total 1		2.944	4.612.879,43
4	Administrasi	1.166	-
5	Ketidakhematan	222	232.144,61
6	Ketidakefisienan	2	4.392,08
7	Ketidakefektifan	331	1.875.129,58
Sub Total 2		1.721	2.111.666,27
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
8	SPI	1.977	-
Total		6.642	6.724.545,70

Berdasarkan Tabel 2.16, hasil PDTT yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012 mengungkapkan adanya 1.977 kasus kelemahan SPI dan 4.665 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp6,72 triliun. Dari total kasus

hasil temuan PDDT tersebut, sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian sebanyak 1.505 kasus senilai Rp809,91 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 633 kasus senilai Rp370,69 miliar), potensi kerugian sebanyak 488 kasus senilai Rp1.659,92 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 951 kasus senilai Rp2.143,03 miliar. Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan penyimpangan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Adapun rincian hasil PDDT yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS), BUMD, serta BLU dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDDT pada 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 367 kasus kelemahan SPI dan 663 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,29 triliun. Dari total temuan PDDT di pusat tersebut, sebanyak 354 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar. Rincian temuan PDDT pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	230	44.262,05
2	Potensi Kerugian Negara	31	151.911,20
3	Kekurangan Penerimaan	93	253.967,98
Sub Total I		354	450.141,23
4	Administrasi	228	-
5	Ketidakhematan	26	13.572,63
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	54	830.938,18
Sub Total II		309	844.543,78
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
8	SPI	367	-
Total		1.030	1.294.685,01

Hasil pemeriksaan atas PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut antara lain berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya dan kekurangan penerimaan Negara, serta kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan.

- Kerugian negara karena kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp5,44 miliar serta temuan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 58 kasus senilai Rp9,26 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, dan pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang serta kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Potensi kerugian negara karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 12 kasus senilai Rp29,20 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

- Kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 48 kasus senilai Rp81,67 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 29 kasus senilai Rp17,73 miliar. Kasus-kasus tersebut sering

terjadi dalam pengadaan barang/jasa, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 158 kasus kelemahan SPI dan 508 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp499,20 miliar. Dari total temuan PDTT di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 328 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp280,93 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 651 kasus kelemahan SPI dan 2.469 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,09 triliun. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.740 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp611,55 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.18. berikut.

Tabel 2.18. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Daerah	190	188.023,35	909	309.460,77
2	Potensi Kerugian Daerah	48	50.089,93	313	179.201,98
3	Kekurangan Penerimaan	90	42.821,17	518	122.890,27
Sub Total I		328	280.934,45	1.740	611.553,02
4	Administrasi	114	-	470	-
5	Ketidakhematan	25	93.923,52	122	82.788,16
6	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	41	124.344,75	136	396.609,23
Sub Total II		180	218.268,27	729	483.756,50
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
8	SPI	158	-	651	-
Total		666	499.202,72	3.120	1.095.309,52

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus tersebut antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pekerjaan; serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 450 kasus senilai Rp136,00 miliar. Pada umumnya kasus tersebut terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ daerah sebanyak 309 kasus senilai Rp45,47 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

- Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 278 kasus senilai Rp126,87 miliar. Pada umumnya kasus tersebut terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, serta para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

3. BUMN dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)

Hasil PDDT pada 31 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan 7 objek pemeriksaan KKKS menemukan 357 kasus kelemahan SPI dan 388 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 166 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun. Rincian temuan PDDT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMN dan KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	15	25.137,38
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	24	736.291,04
3	Kekurangan Penerimaan	127	742.487,94
Sub Total I		166	1.503.916,36
4	Administrasi	168	--
5	Ketidakhematan	10	9.812,77
6	Ketidakefektifan	44	130.843,37
Sub Total II		222	140.656,14
7	SPI	357	--
Total		745	1.644.572,50

Hasil PDDT di lingkungan BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara; kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS atau perusahaan milik negara; dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara atau perusahaan milik negara sebanyak 62 kasus senilai Rp312,01 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan

penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan.

- Kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan KKKS tidak mengakomodir perubahan lingkup kerja (PLK) dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan *home office overhead* (HOO).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan dari KKKS tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp329,41 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pengelola BUMN kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

4. BUMD

Hasil PDTT pada 34 BUMD menemukan 293 kasus kelemahan SPI dan 305 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. Dari total temuan PDTT di BUMD tersebut, sebanyak 174 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar.

Tabel 2.20. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	66	173.281,84
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	51	464.193,49
3	Kekurangan Penerimaan	57	156.858,13
Sub Total I		174	794.333,46
4	Administrasi	89	--
5	Ketidakhematan	21	27.277,90
6	Ketidakefektifan	21	348.819,98
Sub Total II		131	376.097,88
7	SPI	293	-
Total		598	1.170.431,34

Hasil PDTT atas 34 BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik daerah sebanyak 45 kasus senilai Rp155,57 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

- Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 38 kasus senilai Rp461,71 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pengelola BUMD kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP

penagihan piutang serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

5. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU menemukan 75 kasus kelemahan SPI dan 173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp160,49 miliar. Dari total temuan PDTT di BLU tersebut, sebanyak 106 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp119,32 miliar.

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 76 kasus kelemahan SPI dan 159 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp859,84 miliar. Dari total temuan PDTT di badan lainnya tersebut, sebanyak 76 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp852,67 miliar. Rincian temuan PDTT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.21. berikut.

Tabel 2.21. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06
Sub Total I		106	119.323,55	76	852.677,35
4	Administrasi	37	-	60	-
5	Ketidakhematan	5	489,28	13	4.280,35
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79
Sub Total II		67	41.175,56	83	7.168,14
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
7	SPI	75	-	76	-
Total		248	160.499,11	235	859.845,49

Hasil PDTT di lingkungan BLU dan badan lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah serta kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

- Kekurangan penerimaan negara/daerah (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 42 kasus senilai Rp802,48 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp5,12 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara/daerah.

- Kerugian negara/daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 20 kasus senilai Rp6,74 miliar dan pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 17 kasus senilai Rp35,94 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan Aset atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan dengan tujuan tertentu, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp109,67 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp38.433,45 juta, potensi kerugian senilai Rp55.929,71 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.314,42 juta.

BAB 3

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012, BPK telah memberikan 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	21.983	37.493.625,34	13.515	10.185.005,49	5.167	14.501.704,41	3.242	12.554.968,35	59	251.947,09	7.903.857,83
Pemerintah Daerah	171.976	18.950.407,33	93.233	5.037.956,08	42.957	8.998.144,00	35.693	4.722.396,27	93	191.910,98	4.409.708,93
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	4.887	13.122.928,06	2.430	9.390.113,97	1.010	1.941.819,58	1.401	1.784.094,11	46	6.900,40	5.199.125,04
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, penyertaan BUMN dan otorita	456	15.983.735,08	213	8.973.878,36	88	5.235.189,09	155	1.774.667,63	-	-	-
TOTAL	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat dijelaskan bahwa sebanyak 109.391 rekomendasi (54,89%) senilai Rp33,58 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 49.222 rekomendasi (24,70%) senilai Rp30,67 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 40.491 rekomendasi (20,32%) senilai Rp20,83 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 198 rekomendasi (0,09%) senilai Rp450,75 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 9.855 rekomendasi senilai Rp8,47 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.759 rekomendasi senilai Rp928,69 miliar. Rekomendasi ini meliputi 22,10% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,89%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Adapun untuk perkembangan data TLRHP selama Semester II Tahun 2012 diketahui bahwa entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp611,23 miliar.

Tabel 3.2. Perkembangan TLRHP Selama Semester II Tahun 2012 atas data TLRHP sejak Tahun 2008

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester II Tahun 2012	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80
Semester I Tahun 2012	183.862	80.970.223,98	94.689	31.527.368,72	43.297	26.295.337,32	45.715	22.809.665,42	161	337.852,52	16.901.459,21
Perkembangan	15.440	4.580.471,83	14.702	2.059.585,18	5.925	4.381.519,76	-5.224	-1.973.539,06	37	112.905,95	611.232,59

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2012 memuat data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan cakupan sebesar 30,32% atau sejumlah 671 entitas dari 2.213 total entitas yang seharusnya dipantau.

Data kasus kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 sebanyak 17.282 kasus senilai Rp 4.710,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar serta penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester II Tahun 2012 sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3.378,72 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003
s.d. Semester II Tahun 2012**

(IDR dalam miliar, valas dalam ribu)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS 11 **)	NILAI 12
JML KASUS	NILAI			JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI		
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	3.220	443,14	970	22,00	1.226	36,48	78	2,98	1.918	381,68
	USD		60,00		-		-		60,00		-
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	10.076	829,67	2.602	178,20	3.740	104,99	35	1,52	6.320	544,96
	USD		3.023,74		6,97		-		-		3.016,77
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
PIHAK KETIGA	IDR	3.928	1.487,95	890	227,17	1.950	98,34	4	1,25	1.975	1.161,19
	USD		141.054,76		14.319,83		52.835,80		-		73.899,13
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
TOTAL	IDR	17.282	2.804,90	4.501	429,80	6.928	239,92	127	11,66	10.249	2.123,52
	USD		144.138,50		14.326,80		52.835,80		60,00		76.915,90
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TOTAL VALAS EQUIVALEN *)	IDR		1.905,46		138,54		510,92		0,80		1.255,20
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	17.282	4.710,36	4.501	568,34	6.928	750,84	127	12,46	10.249	3.378,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus yang telah tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 terdapat 399 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp11,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester II Tahun 2012 yaitu sebanyak 303 kasus senilai Rp5,40 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester II Tahun 2012**

(IDR dalam miliar)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA		
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN				
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12	
												12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	92	1,95	28	0,25	48	0,18	-	-	-	46	1,52
TGR NONBENDAHARA	IDR	288	8,77	52	0,53	67	4,97	2	-	-	238	3,27
PIHAK III	IDR	19	0,64	2	0,03	1	-	-	-	-	19	0,61
TOTAL	IDR	399	11,36	82	0,81	116	5,15	2	-	-	303	5,40

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus yang telah tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam Semester II Tahun 2012 adalah 13 temuan senilai Rp195,37 miliar. Dengan demikian, sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 BPK telah menyampaikan temuan dugaan tindak pidana sebanyak 332 temuan senilai Rp34.353,58 miliar. Dari 332 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 41 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 178 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 113 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 186 temuan atau 56,02% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 37 temuan, penyelidikan sebanyak 47 temuan, penyidikan sebanyak 8 temuan, penuntutan/proses peradilan sebanyak 13 temuan, vonis/banding/kasasi sebanyak 70 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 11 temuan. Adapun sebanyak 146 temuan atau 43,98% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 4

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Selama Semester II Tahun 2012, BPK telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain karena memuat hal-hal sebagai berikut: temuan pemeriksaan terjadi secara berulang di setiap LHP; temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas; serta hasil pemeriksaan BPK yang diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain:

- belanja modal untuk fasilitas umum;
- ketahanan pangan, yaitu upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan;
- kesehatan, yaitu: 1) pelayanan kesehatan rumah sakit; serta 2) pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- reformasi birokrasi dan tata laksana, yaitu penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS); dan
- swasembada daging sapi (pengendalian impor daging sapi) Tahun 2010 s.d. 2012.

Belanja Modal untuk Fasilitas Umum

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Di dalam belanja modal juga termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal untuk fasilitas umum di antaranya digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. Pengadaan gedung dan bangunan yaitu berupa kantor, sekolah, rumah sakit/puskesmas, pasar, dan tempat wisata. Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa temuan terkait belanja modal untuk fasilitas umum terjadi secara berulang dari tahun ke tahun serta terjadi di entitas pemerintah pusat dan daerah.

Pada IHPS Semester II Tahun 2012 ini BPK mengungkapkan kasus belanja modal untuk fasilitas umum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah serta kekurangan penerimaan.

Pengungkapan kasus belanja modal untuk fasilitas umum selama Semester II Tahun 2012 bukan merupakan hasil pemeriksaan BPK yang khusus terhadap belanja modal untuk fasilitas umum. Kasus tersebut merupakan hasil kompilasi atas kasus-kasus kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum dan dimuat dalam LHP LK, kinerja, dan PDTT.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap belanja modal untuk fasilitas umum mengungkapkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang berdampak finansial sebanyak 1.454 kasus senilai Rp818,76 miliar. Total temuan tersebut meliputi kerugian negara/daerah sebanyak 840 kasus senilai Rp461.203,45 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 203 kasus senilai Rp164,777,03 juta); potensi kerugian sebanyak 292 kasus senilai Rp269.859,89 juta; dan kekurangan penerimaan sebanyak 322 kasus senilai Rp87.703,65 juta.

Kasus-kasus belanja modal untuk fasilitas umum lebih banyak terjadi di pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat. Total ketidakpatuhan dalam pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum yang berdampak finansial di daerah sebanyak 1.309 kasus senilai Rp726.415,24 juta sedangkan di pusat sebanyak 145 kasus senilai Rp92.351,75 juta. Adapun klasifikasi temuan belanja modal untuk fasilitas umum berdasarkan jenis pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 1. Rincian temuan pemeriksaan atas belanja modal untuk fasilitas umum disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1. Temuan Pemeriksaan atas Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum
Dalam Semester II Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

Temuan Pemeriksaan dan Penyetoran	Pusat		Daerah						Total Pusat dan Daerah	
			Provinsi		Kabupaten/Kota		Total			
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Kerugian Negara/Daerah	110	43.314,10	107	116.889,59	623	300.989,76	730	417.889,35	840	461.203,45
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	57	14.317,80	78	28.700,47	350	132.775,24	428	161.475,71	485	175.793,51
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	28	6.380,02	18	5.911,42	140	57.792,94	158	63.704,36	186	70.084,38
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	10	5.463,66	6	1.923,45	47	49.108,00	53	51.031,45	63	56.495,11
Lain-Lain Kerugian Negara/Daerah	15	17.152,62	5	80.364,25	86	61.313,58	91	141.677,83	106	158.830,45
Potensi Kerugian	19	43.981,11	37	48.269,23	236	177.609,55	273	225.878,78	292	269.859,89
Kekurangan Penerimaan	16	5.056,54	42	11.583,92	264	71.063,19	306	82.647,11	322	87.703,65
Total Temuan Berdampak Finansial	145	92.351,75	186	176.752,74	1.123	549.662,50	1.309	726.415,24	1.454	818.766,99
Total Penyerahan aset dan/atau Penyetoran		2.168,98		21.748,18		15.869,13		37.617,31		39.786,29
Kerugian Negara/Daerah		2.045,83		11.159,53		11.027,26		22.186,79		24.232,62
Potensi Kerugian		87,69		7.696,63		1.285,98		8.982,61		9.070,30
Kekurangan Penerimaan		35,46		2.892,02		3.555,89		6.447,91		6.483,37

Keterangan

*) Temuan lain-lain kerugian daerah meliputi pengadaan fiktif; rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan; pemalahan harga (*mark up*); dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa, jumlah kasus kerugian negara/daerah mencapai 57,77% dari total kasus belanja modal untuk fasilitas umum yang memiliki dampak finansial. Kasus kerugian negara/daerah belanja modal untuk infrastruktur tersebut, yang sering terjadi berupa kekurangan volume pekerjaan sebanyak 485 kasus senilai Rp175.793,51 juta.

Selain kerugian negara/daerah, penyimpangan dalam pelaksanaan belanja modal untuk fasilitas umum juga mengakibatkan potensi kerugian antara lain berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya serta pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk kasus kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara/daerah.

Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum antara lain terjadi karena kelalaian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dalam kontrak; ketidakcermatan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas; serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat/pimpinan entitas.

Terhadap penyimpangan pelaksanaan belanja modal untuk fasilitas umum, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp39,78 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp24.232,62 juta, potensi kerugian senilai Rp9.070,30 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6.483,37 juta.

Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan

Beras merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam RPJMN I (Tahun 2005 s.d. 2009), pembangunan nasional antara lain diprioritaskan pada program ketahanan pangan melalui upaya pencapaian dan pemantapan swasembada beras berkelanjutan (SBB). Kemudian dalam RPJMN II (Tahun 2010 s.d. 2014), pemerintah menargetkan tercapainya produksi padi sebanyak 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Tahun 2014.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai aspek efektivitas dan

penghematan (ekonomis) dalam pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan (ketaatan) terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut terdiri atas 20 kasus ketidakefektifan, 4 kasus ketidakekonomisan/ketidakhematan, 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Temuan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan yang mempengaruhi efektivitas dan ketidakhematan antara lain yaitu:

- Upaya pemerintah dalam perluasan lahan sawah dan optimalisasi lahan belum efektif. Hal tersebut tercermin dari fakta yang menunjukkan bahwa realisasi pencetakan sawah hanya 46,38 % dari target 2010-2012. Penyebabnya antara lain kementerian pertanian belum melakukan analisis kebutuhan lahan sawah guna mencapai target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014;
- Pengembangan usaha tani padi dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI) belum efektif meningkatkan produktivitas padi. Penyebabnya kementerian pertanian lemah dalam merencanakan penerapan inovasi dan kurang melakukan penyuluhan kepada para kelompok tani;
- Bendungan/jaringan irigasi di tiga kabupaten rusak berat dan hasil pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 13 kabupaten tidak bermanfaat yang mengakibatkan peningkatan produktivitas padi tidak efektif. Penyebabnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum belum memprioritaskan pembangunan waduk dan kurangnya pemeliharaan bendungan;
- Upaya penyediaan benih varietas unggul bersertifikat belum efektif, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN) berdampak meningkatnya ketergantungan petani terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Penyebabnya antara lain pemerintah dalam merencanakan bantuan benih tidak mempertimbangkan aspek kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul;
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) belum optimal. Penyebabnya antara lain Kementerian Pertanian lemah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan dalam pengendalian OPT dan DPI; dan
- Pembangunan lumbung pangan, upaya pengurangan tingkat konsumsi beras, dan pengelolaan kegiatan penyuluhan belum sepenuhnya efektif menunjang pencapaian surplus beras 10 juta ton Tahun 2014. Penyebabnya antara lain Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak memprioritaskan pembangunan lumbung pangan di daerah yang berkategori rawan pangan; tidak mensubstitusi beras

sebagai sumber karbohidrat, dan lemahnya koordinasi kementerian pertanian dengan kabupaten kota dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar

- menghitung ulang berapa sebenarnya luasan sawah baru yang diperlukan di setiap provinsi untuk mendukung SBB dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) serta bagaimana pentahapan luasan pencetakan sawah yang efektif sampai Tahun 2014;
- mengevaluasi kembali program usaha tani metode SRI untuk keberhasilan penerapannya di kemudian hari;
- berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sistem jaringan irigasi;
- melakukan evaluasi dampak dari program BLBU dan CBN;
- meningkatkan upaya pengendalian OPT dan DPI melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah;
- menegur Kepala BKP untuk segera memberi bantuan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten rawan pangan;
- Mengkaji ulang program P2KP dan mengembangkan program peningkatan konsumsi makanan sumber protein dan lemak; dan
- Berkoordinasi dengan para gubernur dan bupati/walikota untuk pembentukan kelembagaan penyuluhan.

Selain temuan mengenai ketidakefektifan dan ketidakekonomisan/ketidakhematan, pemeriksaan BPK juga mengungkap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain Perum Bulog mengimpor beras non *public service obligation* (PSO) dengan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang pembebasan bea masuk impor beras PSO, sehingga bebas membayar bea masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari bea masuk sebesar Rp97,93 miliar. Penyebabnya adalah kesengajaan dari pihak Perum Bulog untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor beras non PSO.

Terhadap masalah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk membayar bea masuk sebesar Rp97,93 miliar.

Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Untuk itu, dalam rangka

memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu, pemerintah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Adapun hasil pemeriksaan atas bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Hasil pemeriksaan kinerja terhadap 66 rumah sakit di 26 provinsi mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Kelemahan tersebut terdiri atas 757 kasus ketidakefektifan senilai Rp13,05 miliar, 1 kasus ketidakefisienan senilai Rp178,53 juta, 2 kasus ketidakhematan/keekonomisan senilai Rp36,13 juta. Namun demikian, terhadap pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 telah efektif.

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rumah sakit lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- **Pelayanan farmasi**

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi di antaranya yaitu: instalasi farmasi belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai; pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal; serta pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena RSUD, Instalasi Farmasi dan koordinator pelayanan farmasi lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi.

- **pelayanan rawat inap**

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap di antaranya yaitu: standar pelayanan minimal (SPM) rawat inap rumah sakit belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelayanan rawat inap belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai; serta manajemen belum optimal dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan.

Hal tersebut terjadi karena RSUD tidak menyusun SPM sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, lemah dalam perencanaan, dan belum memiliki prioritas yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit.

- pelayanan rawat jalan

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat jalan di antaranya yaitu penyediaan sarana prasarana rawat jalan belum memenuhi kebutuhan; penanganan keluhan pasien pelayanan rawat jalan belum dilakukan dengan baik; serta monitoring dan evaluasi pelayanan rawat jalan belum memenuhi standar.

Hal tersebut terjadi karena RSUD belum melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, belum memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, lemah dalam pengawasan dan pengendalian, belum melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan, serta belum melakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis.

- pelayanan rumah sakit lainnya

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bedah, pelayanan gawat darurat, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, serta pengelolaan sarana prasarana di antaranya yaitu: kebutuhan sumber daya manusia pada pelayanan kesehatan RSUD belum terpenuhi; SPM pelayanan kesehatan RSUD belum tercapai; dan pelayanan kesehatan RSUD belum didukung dengan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Hal tersebut terjadi karena RSUD kurang optimal menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, kurang memahami SPM RS yang menjadi indikator pelayanan kesehatan RSUD; serta kurang mengawasi dan mengendalikan perencanaan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Pimpinan RSUD antara lain agar menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, memahami SPM rumah sakit yang menjadi indikator pelayanan kesehatan rumah sakit, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian perencanaan ketersediaan sarana dan prasarana.

Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp46,74 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp48,42 juta, 7 kasus penyimpangan administrasi dan 750 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu. Hal tersebut diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda untuk Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 (s.d. Semester I). Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas kepesertaan, pelayanan, pendanaan, verifikasi, dan monitoring serta evaluasi program. Adapun anggaran, realisasi anggaran, dan cakupan pemeriksaan untuk tiap-tiap TA disajikan pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2010		TA 2011		Semester 1 TA 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kementerian Kesehatan	25.274.803,99	22.428.341,51	30.919.269,94	26.871.294,93	30.636.024,33	14.920.350,66
Anggaran Jamkesmas	4.270.690,50	4.099.486,73	6.348.595,94	6.278.967,95	7.494.900,00	6.686.340,00
% terhadap Anggaran Kementerian Kesehatan	16,90%	18,28%	20,53%	23,37%	24,46%	44,81%
Cakupan Pemeriksaan		1.293.725,19		1.744.473,34		1.584.985,08
% terhadap Anggaran Jamkesmas		31,56%		27,78%		23,70%

Hasil pemeriksaan BPK atas Program Jamkesmas dan Jamkesda mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 15 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 18 kasus senilai Rp504.251,56 juta. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp151.832,07 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 12 kasus senilai Rp352.419,49 juta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, yaitu sebagai berikut.

- Belum adanya *database* kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik, dan adanya perbedaan dalam data masyarakat miskin antar instansi.
- Masih terdapat risiko masyarakat miskin belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda.
- Penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010 dan 2011.
- Reviu kinerja pengelola program tidak dilakukan dan umpan balik atas pelaporan yang telah dilakukan pengelola Jamkesmas di tingkat daerah tidak diberikan secara berkala oleh pengelola tingkat pusat.
- Tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyetoran sisa Jamkesmas tahun 2010 dan 2011 belum selesai dilaksanakan.

Temuan tersebut mengakibatkan antara lain Program Jamkesmas berpotensi tidak tepat sasaran, penganggaran dana Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya, dan tidak terjaminnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak terdaftar; administrasi pertanggungjawaban pelayanan sebagai dasar realisasi pembayaran klaim jamkesmas tidak dapat diyakini kebenarannya; serta masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terlayani Jamkesmas berpotensi tidak mendapatkan program pelayanan kesehatan Jamkesda.

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena hal-hal berikut.

- Kemenkes belum membuat perangkat peraturan dan perangkat panduan yang mengatur pemutakhiran data pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- Kepesertaan Jamkesda tidak memperhatikan kepesertaan Jamkesmas, dan peraturan yang disusun mengenai Jamkesda tidak mempertimbangkan dinamika di tataran pelaksanaan.
- Pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan penyusunan APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani program Jamkesmas di wilayahnya dan pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan pendataan orang miskin.
- Kepala puskesmas, direktur RS dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya mematuhi Manlak Program Jamkesmas tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan program jamkesmas di wilayahnya.
- Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS tidak mematuhi ketentuan terkait sisa dana dan jasa giro Jamkesmas yang harus dikembalikan ke kas negara pada setiap akhir tahun dan kemenkes belum melakukan evaluasi atas tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas.
- Verifikator independen dan tim pengelola lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar

- menyusun perangkat peraturan dan perangkat panduan dalam hal pemutakhiran data kepesertaan pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota sampai ke pusat serta melakukan updating data peserta Jamkesmas;
- membuat surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur rumah sakit agar tertib dalam menyetorkan sisa dana Jamkesmas dan melakukan evaluasi terhadap penerapan *Indonesia Case Base Group's (INA CBG's)* terkait dengan ketidakseimbangan/ketimpangan/kesenjangan antara tarif *INA CBG's* dan biaya riil RS;

- menginstruksikan direktur RS vertikal dan berkoordinasi dengan Mendagri agar menginstruksikan direktur RSUD untuk membuat kebijakan dan prosedur/alur pelayanan yang mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
- menetapkan mekanisme sanksi kepada verifikator independen RS dan tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan;
- membuat surat edaran kepada tim pengelola, tim koordinasi, kepala dinas kesehatan, direktur RS dan kepala puskesmas untuk mematuhi Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu; dan
- berkoordinasi dengan Mendagri untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Jamkesda.

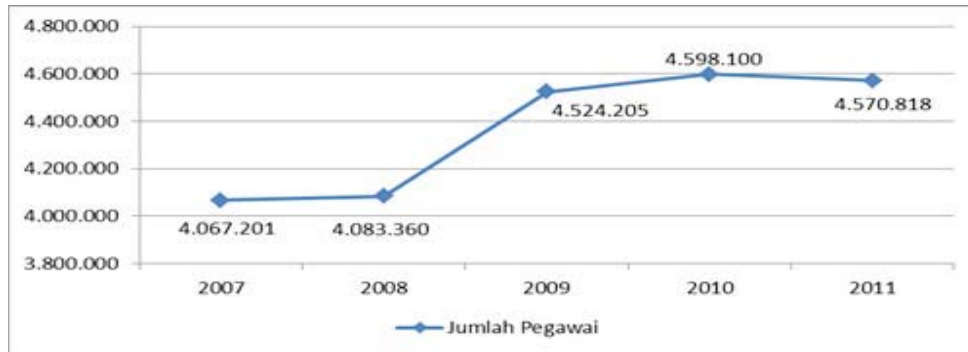
Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penetapan formasi PNS meliputi pengajuan usulan tambahan formasi dari instansi, pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penetapan formasi, pemberian pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) atas ketersediaan anggaran untuk tambahan formasi PNS, dan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi lowong yang pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Kegiatan pengadaan PNS meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan atau seleksi, pengumuman pelamar yang diterima, penetapan NIP oleh BKN dan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pengadaan PNS dan sebagai *crash program* pemerintah untuk pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer dan sekretaris desa (sekdes), selain pengadaan yang berasal dari formasi umum dan khusus.

Jumlah PNS selama Tahun 2007 s.d. 2011 menunjukkan tren meningkat walaupun pada Tahun 2011 jumlah pegawai menurun dibandingkan dengan Tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium). Dengan demikian, selama Tahun 2007 s.d. 2011, jumlah pegawai bertambah rata-rata 12,38% per tahun. Tren kenaikan jumlah PNS disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011



Sumber data: Buku data statistik PNS per 31 Desember 2011 - BKN

Belanja pegawai pada Tahun 2007 s.d. 2011 di pemerintah pusat dan daerah juga meningkat seiring dengan tren bertambahnya jumlah pegawai. Sebagai gambaran, pada Tahun 2007 belanja pegawai pemerintah pusat mencapai Rp90,42 triliun dan meningkat menjadi Rp180,62 triliun di Tahun 2011. Di tingkat pemerintah daerah, pada Tahun 2007 belanja pegawai yaitu senilai Rp119,25 triliun dan meningkat menjadi Rp226,54 triliun di Tahun 2011. Tren kenaikan belanja pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 3.

Grafik 3. Belanja Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber data: Website DJPK/Kemenkeu.go.id.

Pada Tahun 2009 dan 2010, Menteri PAN dan RB telah menetapkan formasi PNS secara nasional masing-masing sebanyak 325.000 formasi dan 185.000 formasi. Formasi ini ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mendapat pertimbangan dari kepala BKN. Formasi itu mencakup formasi PNS pusat dan daerah.

BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Hasil pemeriksaan atas penetapan formasi dan pengadaan PNS menunjukkan antara lain

- Kementerian PAN dan RB serta BKN telah berupaya melakukan perbaikan manajemen kepegawaian terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS;
- Menteri PAN dan RB telah membuat prosedur operasional standar untuk mendukung proses penetapan formasi. Sebelum menetapkan alokasi formasi untuk instansi pusat maupun daerah, Menteri PAN dan RB telah melakukan analisa perhitungan alokasi formasi masing-masing instansi; dan
- BKN telah mengembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian (SIMWASDALPEG), serta pengembangan pembangunan dan implementasi sistem seleksi CPNS dengan *computer assisted test* (CAT) beserta infrastrukturnya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 belum efektif. Masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penetapan Formasi PNS

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan informasi yang akurat. Penyusunan usulan formasi pada 42 instansi yang di-*sampling* belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan dan penyusunan *bezetting*-gambaran kekuatan pegawai dari aspek jumlah, kualifikasi, pangkat, dan jabatan tidak berdasarkan *database* pegawai yang mutakhir.
- Pertimbangan Kepala BKN hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi nasional. Penyusunan pertimbangan Kepala BKN tersebut dalam penetapan formasi tidak didukung dengan pedoman perhitungan yang standar dan tidak didokumentasikan dengan baik.
- Pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan dalam memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran formasi nasional hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS Pusat. Selain itu, Kemenkeu tidak memperoleh data dari Kementerian PAN dan RB pada saat

dibutuhkan sehingga Kemenkeu melakukan perhitungan berdasarkan asumsi jumlah pegawai yang akan pensiun dan asumsi rencana penambahan pegawai *zero growth*.

- Penetapan formasi tidak didukung dengan adanya suatu *grand design* tentang kebutuhan pegawai dalam jangka panjang dan peraturan pelaksanaan yang lengkap dan jelas, serta data dan informasi mutakhir. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat memetakan kebutuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan PNS secara nasional baik dari sisi kualifikasi pendidikan, keahlian, jumlah, distribusi menurut instansi dan kriteria lain sesuai kebutuhan pembangunan dan visi/misi pemerintah.

Pengadaan PNS

Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Jangka waktu pengumuman penerimaan PNS lebih cepat dari yang seharusnya dan tidak melalui media masa yang diketahui masyarakat luas (tidak transparan).
- Terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal, tapi dapat mengikuti ujian dan lulus serta ditetapkan NIP oleh BKN.
- Pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur, yaitu berkas pelamar tidak sesuai prasyarat kualifikasi jabatan, pendidikan dan usia yang telah ditetapkan dan penetapan kelulusan tidak berdasar daftar peringkat nilai. Selain itu, PPK menetapkan kelulusan bagi peserta ujian CPNS yang lembar jawaban komputer (LJK)-nya tidak didukung dengan data yang valid.
- Dalam proses penetapan NIP masih terdapat sejumlah kelemahan antara lain pengajuan usulan penetapan NIP tidak disertai berkas-berkas persyaratan dan jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan CPNS yang telah ditetapkan NIP-nya berbeda dengan SK Rincian Formasi Menpan.
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS terdapat beberapa kelemahan antara lain pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum sesuai urutan prioritas tenaga yang dibutuhkan, dan terdapat tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya walaupun datanya tidak sesuai dengan daftar nominatif BKN.
- Pengangkatan sekretaris desa menjadi CPNS formasi Tahun 2009 belum memadai, yaitu penyampaian usulan data dan berkas pengangkatan sekdes dari bupati/walikota kepada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya melalui gubernur.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah agar

Menteri PAN dan RB

- mengajukan usulan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas pertimbangan tertulis Kepala BKN atas formasi nasional, pusat, dan daerah;
- menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penetapan formasi terkait langkah-langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi;
- berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN untuk mereviu dan melakukan rekonsiliasi database daftar nominatif sekdes dan formasi sekdes yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan

- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB dan Menteri Dalam Negeri untuk mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah Formasi dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB untuk mengharmonisasikan jadwal permintaan pendapat ketersediaan anggaran belanja pegawai untuk rencana alokasi formasi PNS dari Kementerian PAN dan RB dengan jadwal perhitungan anggaran gaji pegawai baru yang mengacu pada siklus APBN pada Kementerian Keuangan.

Kepala BKN

- menyempurnakan Keputusan Kepala BKN yang mengatur kewajiban instansi menyampaikan lampiran pertimbangan analisa jabatan dan analisis beban kerja;
- membuat kebijakan agar instansi melakukan rekonsiliasi data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan mengupayakan menggunakan data kepegawaian di BKN sebagai data pembanding dalam melakukan analisis;
- menyusun pedoman yang mengatur formula pemberian pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengatur dokumentasi yang harus ada terkait perubahan-perubahan angka usulan tambahan formasi hasil dari pertimbangan;
- meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam hal penetapan tambahan formasi PNS; dan
- memperbaiki ketentuan dan mekanisme pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah secara memadai;

Menteri Dalam Negeri

- meningkatkan koordinasi dengan BKN untuk memonitor jumlah Sekdes yang telah ditetapkan NIP-nya; dan
- mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dalam pengangkatan sekdes menjadi CPNS yang memenuhi syarat namun tertinggal/belum diangkat.

Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Impor Daging Sapi) Tahun 2010 s.d. 2012

Pada Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan atas Program Swasembada Daging Sapi khususnya pengendalian impor daging sapi Tahun 2010 s.d. 2012. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai sistem pengendalian impor daging sapi dalam rangka pencapaian tujuan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yaitu terwujudnya volume impor daging sapi sebesar 10% pada Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 4 kasus kelemahan SPI dan 6 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terdiri atas 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,46 miliar dan 4 kasus penyimpangan administrasi.

Kasus-kasus tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pada periode s.d September 2011 penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan surat persetujuan pemasukan (SPP) atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih menjadi kewenangan Kementan. Realisasi impor daging sapi Tahun 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150% dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

(dalam ribu ton)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kebutuhan konsumsi daging	313,3	325,9	338,7	351,9	365,4
2	Produksi lokal	233,6	250,8	283,0	316,1	349,7
3	Kebutuhan impor	79,7	75,1	55,7	35,8	15,7
4	Realisasi impor	150,4	142,8	139,5	102,9	34,6

sumber: PSDS 2010-2014 dan data DJBC

- Pada periode Oktober 2011 s.d sekarang, kewenangan penetapan kebutuhan impor yang telah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian persetujuan impor (PI) oleh Menteri Perdagangan, dan kewenangan pemberian rekomendasi persetujuan pemasukan (RPP) oleh Menteri Pertanian masih ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP.
- Terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan yaitu PT. IP pada Tahun 2010 mengimpor daging sapi sebanyak 880,50 ton diindikasikan tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP), PT.IP diduga memalsukan 40 dokumen *invoice* pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), PT. KSU diduga memalsukan lima surat persetujuan impor daging sapi, Impor daging dan jeroan sapi sebanyak 22,82 ribu ton oleh 21 importir diindikasikan tanpa melalui prosedur karantina, dan dua importir diduga merubah nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah.

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Belanja Modal untuk Fasilitas Umum

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total										
		Keuangan						Kinerja						PDDT		Total								
		Keuangan		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Keugian		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan		Jml Kasus	Nilai							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai							
	Pemerintah Pusat																							
1	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,44							
2	Kejaksaan RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,75							
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.587,79							
4	Kementerian Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.871,07							
5	Mabas TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,56							
6	TNI AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.887,85							
7	TNI AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,03							
8	TNI AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476,70							
9	Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.196,25							
10	Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,44							
11	Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564,74							
12	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.513,67							
13	RRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,77							
14	TVRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,58							
15	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.081,13							
16	Kementerian ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.781,26							
17	Universitas Gadjah Mada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.208,77							
18	Universitas Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.502,95							
	Subtotal Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.351,75							
	Pemerintah Daerah																							
1	Prov. Aceh	11	4.109,23	1	18,96	2	366,04	2	366,04	3	2.316,46	4	1.376,74	2	282,23	19	1.944,69	11	1.897,68	68	14.499,43			
	1 Provinsi Aceh	8	3.791,35			1	63,99	3	2.316,46	4	1.376,74	2	282,23							18	7.830,77			
	2 Kab. Aceh Jaya															4	874,64			6	1.272,27			
	3 Kab. Aceh Tenggara															7	475,82	4	111,93	1	13,21			
	4 Kab. Bireuen	3	317,88																	3	317,88			
	5 Kab. Pidie			1	18,96	1	302,05									3	392,02	4	97,31	3	961,67			
	6 Kab. Simeuleu															2	156,91	6	1.862,72	4	428,03			
	7 Kota Lingsa															3	45,30	1	115,44	1	97,14			
2	Prov. Sumatera Utara	18	4.260,62	-	-	5	546,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.800,80	15	12.992,04	5	277,74	48	21.880,00	
	8 Provinsi Sumatera Utara																						6	5.377,02
	9 Kab. Batubara	3	340,31																				3	340,31
	10 Kab. Karo	1	27,17																				1	27,17
	11 Kab. Langkat	1	82,30																				1	82,30
	12 Kab. Nias	2	609,27																				1	62,38
	13 Kab. Nias Barat	3	623,47																				4	745,79
	14 Kab. Nias Selatan	1	105,23			1	122,32																2	164,48
	15 Kab. Nias Utara	3	855,49																				3	855,49
	16 Kab. Padang Lawas	-	-			1	133,11																1	133,11

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total					
		Keuangan						Kinerja						PDDT		Total			
		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan		Total			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
21	Prov. Kalimantan Selatan	4	1.671,65	-	-	3	1.182,62	-	-	-	-	31	22.398,88	5	7.154,23	6	1.072,13	49	33.479,51
114	Provinsi Kalimantan Selatan																		
115	Kab. Banjar	1	147,21	-	-	1	36,79	-	-	-	-	4	4.437,19	3	5.869,18	1	595,32	8	10.841,69
116	Kab. Kotabaru	3	1.524,44	-	-	1	1.095,80	-	-	-	-	5	844,31	-	-	2	75,12	9	1.103,43
117	Kab. Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.640,58	1	91,65	1	21,95	7	2.620,24
118	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.650,63	1	1.193,40	1	124,19	9	7.968,22
119	Kab. Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.826,17	-	-	1	315,55	11	6.141,72
120	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	1	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,03
22	Prov. Kalimantan Timur	3	3.109,57	2	26.621,61	5	4.796,41	-	-	-	-	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	30	53.246,36
121	Provinsi Kalimantan Timur																		
122	Kab. Berau	-	-	1	26.556,88	1	3.074,17	-	-	-	-	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	20	18.718,77
123	Kab. Bulungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Kab. Kutai Kartanegara	1	1.832,04	-	-	1	656,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.488,80
125	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kab. Malinau	-	-	-	-	1	424,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	424,50
127	Kab. Tana Tidung	2	1.277,53	-	-	1	407,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.684,90
128	Kota Samarinda	-	-	1	64,73	1	233,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	298,34
23	Prov. Sulawesi Utara	4	176,51	-	-	2	881,71	-	-	-	-	12	3.146,23	4	810,37	5	1.213,30	27	6.228,12
129	Kab. Bolaang Mongondow																		
130	Kab. Bolaang Mongondow Timur																		
131	Kab. Bolaang Mongondow Utara																		
132	Kab. Minahasa Tenggara	1	63,98	-	-	1	860,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	924,42
133	Kab. Minahasa Utara	1	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.533,08	1	-	2	316,11	8	1.875,76
134	Kota Manado	2	85,96	-	-	1	21,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107,23
24	Prov. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.339,66	5	1.146,60	2	510,90	14	5.997,16
135	Kab. Buol																		
136	Kab. Donggala											2	2.172,72	2	890,68	-	-	4	3.063,40
137	Kab. Morowali											1	1.319,58	1	36,06	-	-	2	1.355,64
138	Kab. Parigi Moutong											3	752,10	1	144,99	1	191,47	5	1.088,56
25	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	3	241,13	-	-	-	-	15	28.348,18	2	527,24	7	370,51	27	29.487,06
139	Provinsi Sulawesi Selatan																		
140	Kab. Barru											4	1.726,19	1	400,57	4	276,72	9	2.403,48
141	Kab. Bone											3	153,04	-	-	1	6,46	4	159,50
142	Kab. Enrekang											5	1.041,61	-	-	-	-	5	1.041,61
143	Kab. Takalar											-	-	-	-	-	-	1	121,24
144	Kab. Wajo											3	25.427,34	1	126,67	1	9,39	5	25.563,40
145	Kota Parepare											7	2.660,22	4	490,09	-	-	11	3.150,31
26	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	143,10	1	86,60	-	-	3	229,70
146	Kab. Buton Utara																		

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total					
		Keuangan						Kinerja						Kekurangan Penerimaan		Jml Kasus	Nilai		
		Keuangan		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan		Potensi Keugian		Kekurangan Penerimaan					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
147	Kab. Kolaka																6	198,67	
148	Kab. Konawe Utara																	2	2.721,94
27	Prov. Gorontalo																	31	5.165,44
149	Kab. Boalemo																	4	1.489,16
150	Kab. Gorontalo Utara																	4	3.676,28
28	Prov. Sulawesi Barat																	12	2.467,63
151	Mamasa	8	1.943,16			3	254,69											5	1.596,57
152	Kab. Polewali Mandar	4	386,64			2	214,64											7	871,06
29	Prov. Maluku																	43	33.440,99
153	Provinsi Maluku	6	8.709,48	1	65,73	8	13.549,26											3	1.289,12
154	Kab. Buru	1	68,49	1	65,73	1	1.154,90											3	4.219,99
155	Kab. Kepulauan Aru	1	2,44			1	4.217,55											2	4.219,99
156	Kab. Maluku Barat Daya					1	3.152,70											6	5.275,05
157	Kab. Maluku Tengah	3	8.319,28			1	3.534,11											1	3.534,11
158	Kab. Maluku Tenggara					1	306,83											4	8.626,11
159	Kab. Seram Bagian Timur					1	397,78											1	397,78
160	Kab. Seram Bagian Barat					1	210,11											1	210,11
161	Kota Ambon																	6	2.682,55
162	Kota Tual	1	319,27			1	575,28											11	2.325,31
30	Prov. Maluku Utara																	72	53.790,40
163	Provinsi Maluku Utara	3	245,63			3	253,42											17	5.063,63
164	Kab. Halmahera Barat																	1	43,40
165	Kab. Halmahera Tengah																	6	321,95
166	Kab. Halmahera Timur					1	98,31											5	202,38
167	Kab. Halmahera Utara																	2	397,07
168	Kab. Kepulauan Sula	2	141,69			1	51,36											21	46.231,24
169	Kab. Pulau Morotai																	4	707,79
170	Kota Tidore Kepulauan																	16	822,94
171	Kota Ternate	1	105,94			1	105,75											45	27.491,21
31	Prov. Papua																	45	27.491,21
173	Kab. Boven Digoel	29	32.438,94	7	76.336,59	9	7.563,75											2	2.396,46
174	Kab. Deiyai	1	20,97															2	3.966,46
175	Kab. Dogiyai	2	69,17															69	69,17
176	Kab. Intan Jaya	1	3.001,27															2	1.025,80
177	Kab. Jayawijaya	2	3.001,27															5	1.972,04
178	Kab. Keerom																	2	2.387,60
179	Kab. Lanny Jaya	4	6.362,98			1	1.066,30											5	1.972,04
180	Kab. Mamberamo Raya	1	239,71	1	3.104,67													5	3.040,33
181	Kab. Mappi																	7	3.888,72

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jenis Pemeriksaan												Total											
		Keuangan						Kinerja						Kekurangan Penerimaan		Total									
		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan		Total									
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
182	Kab. Merauke	2	126,14	-	-	1	523,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	649,49							
183	Kab. Nabire	2	330,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13.549,14						
184	Kab. Nduga	4	16.583,48	2	68.475,86	2	4.390,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	89.452,48						
185	Kab. Puncak	-	-	3	4.656,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.658,25						
186	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
187	Kab. Supiori	4	2.653,73	-	-	1	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
188	Kab. Tolikara	2	987,47	1	94,81	1	94,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.177,09						
189	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
190	Kab. Yahukimo	2	38,48	-	-	1	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
191	Kab. Yalimo	2	321,06	-	-	1	983,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
32	Prov. Papua Barat	11	16.932,85	2	299,33	11	2.165,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	100.558,98	15	9.184,35	18	4.275,28	98	133.416,69	
192	Provinsi Papua Barat	1	2.694,49	-	-	2	288,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80.905,45	2	1.953,69	2	952,03	10	86.793,72
193	Kab. Fakfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.694,76	2	4.031,07	-	-	5	5.725,83
194	Kab. Ialimena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	587,24	2	1.165,32	3	1.085,78	7	2.838,34
195	Kab. Manokwari	2	9.016,15	-	-	3	933,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.897,86	-	-	1	34,44	10	11.881,73
196	Kab. Maybrat	4	3.101,97	1	182,04	2	198,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.764,05	3	1.352,46	1	267,88	18	7.866,47
197	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.677,77	-	-	-	-	4	336,57
198	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175,66	-	-	-	-	1	198,79
199	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.242,03	1	45,21	2	426,48	5	1.713,72
200	Kab. Tambrauw	2	1.461,65	1	117,29	1	97,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.289,68	1	214,86	2	343,22	11	5.523,72
201	Kab. Teluk Bintuni	1	649,14	-	-	2	164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.169,92	1	159,82	2	554,19	9	7.697,64
202	Kab. Teluk Wondama	1	9,45	-	-	1	484,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.557,21	-	-	3	243,67	9	2.295,23
203	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107,35	3	261,92	-	-	7	369,27
	Subtotal Pemerintah Daerah	121	88.748,99	15	104.258,75	75	38.228,16	75	38.228,16	2	282,23	606	326.823,90	254	120.243,29	229	44.136,72	1.309	726.415,24						
	Total Pemerintah Pusat dan Daerah	121	88.748,99	15	104.258,75	75	38.228,16	9	3.130,91	7	5.927,01	3	1.103,23	270	159.674,13	244	48.372,26	1.454	818.766,99						
	Total Berdasarkan Jenis Pemeriksaan					211	231.235,90					19	10.161,15			1.224	577.369,94	1.454	818.766,99						

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id





**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

**Buku II
Pemeriksaan Keuangan**
(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012	7
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
BAB 4 Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah	43
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
- 2.2. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Opini LKPD Tahun 2011
- 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 3.3. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.4. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
- 3.5. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
- 3.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMD Tahun 2011
- 4.2. Opini atas LK BUMD Tahun 2009 s.d. 2011
- 4.3. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian Daerah/Perusahaan
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011
- 3.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
5. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
8. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011
12. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat (LKPP), LK kementerian/lembaga (LKKL), LK pemerintah daerah (LKPD), LK badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta LK badan lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, disertai dengan LHP atas sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/9/2012 paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan. Laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/daerah/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan SAP sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP, LKKL dan LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pemerintah pusat, BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu. Semua laporan pemeriksaan atas LKPP dan LKKL telah dilaporkan dalam IHPS Semester I Tahun 2012. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, pada tingkat pemerintah daerah, BPK baru menyelesaikan 520 pemeriksaan atas LKPD dari 524 pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD, karena masih terdapat pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 LK BUMD Tahun 2011 yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2012

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, LK BUMN dan BUMD, serta LK badan lainnya.

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 atas 94 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun 2011 (sebanyak 426 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2012) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 2 LKPD Tahun 2010 dan 9 LK BUMD Tahun 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi pemeriksaan atas neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK. Rincian neraca atas LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Rincian LRA LKPD Tahun 2011 meliputi pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.

Rincian neraca atas LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp777,92 miliar, kewajiban senilai Rp692,70 juta, dan ekuitas senilai Rp777,23 miliar. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp961,58 miliar, belanja senilai Rp830,07 miliar, dan pembiayaan neto senilai Rp78,24 miliar.

Rincian neraca atas LK BUMD Tahun 2011 yang diperiksa pada semester II Tahun 2012 adalah aset senilai Rp380,74 miliar, kewajiban senilai Rp252,35 miliar, dan ekuitas senilai Rp128,39 miliar dan rincian laporan laba rugi meliputi pendapatan senilai Rp215,35 miliar, biaya senilai Rp209,80 miliar, dan laba senilai Rp5,55 miliar.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WDP atas 33 LKPD, opini TW atas 3 LKPD, dan opini TMP atas 58 LKPD serta terhadap 2 LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini TMP.

Adapun terhadap 9 LK BUMD Tahun 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2012 yang seluruhnya merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPK memberikan opini WTP atas LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi, opini WDP atas LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh, serta opini TMP atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Rincian opini LKPD dan LK PDAM sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Opini Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD Tahun 2011	-	0%	33	35%	3	3%	58	62%	94
LKPD Tahun 2010	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%	2
LK PDAM Tahun 2011	2	22%	3	33%	-	0%	4	45%	9

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan LK Semester II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.427 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	642
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	469
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	316
	Jumlah	1.427

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan

keuangan Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Jumlah dan nilai tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan Keuangan

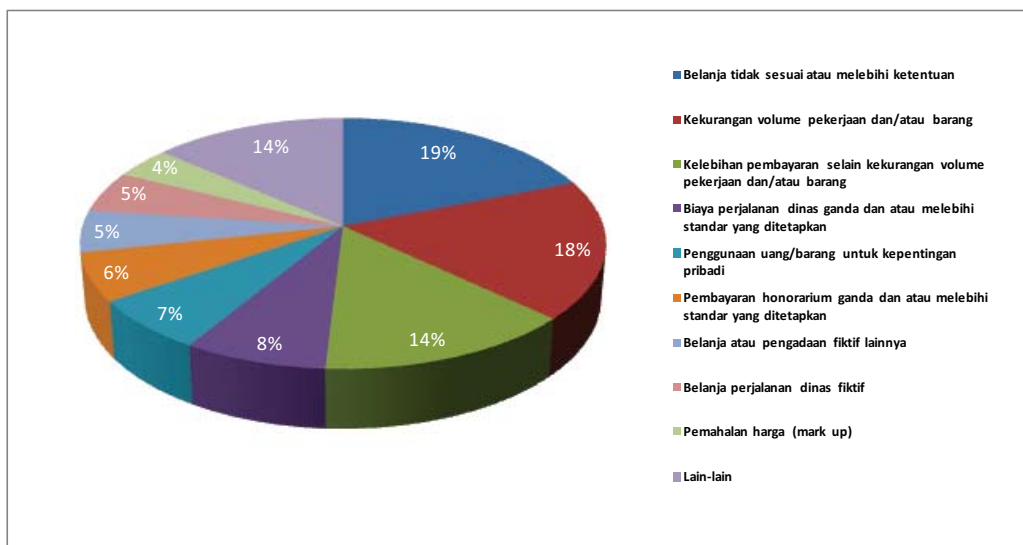
(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	578	390.331,70
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	103	295.701,83
3	Kekurangan Penerimaan	299	131.932,13
Sub Total 1		980	817.965,66
4	Administrasi	693	-
5	Ketidakhematan	85	58.397,28
6	Ketidakefektifan	113	295.561,65
Sub Total 2		891	353.958,93
Total		1.871	1.171.924,59

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 menemukan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 980 kasus senilai Rp817,96 miliar. Dari 980 kasus tersebut, di antaranya terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 211 kasus senilai Rp231,21 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 891 kasus senilai Rp353,95 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Rincian kasus kerugian daerah/perusahaan sebanyak 578 kasus senilai Rp390,33 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 350 kasus senilai Rp255,32 miliar, disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian daerah/perusahaan meliputi belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, pemahalan harga (*mark up*), dan kasus kerugian daerah/perusahaan milik daerah lainnya. Persentase kasus kerugian daerah/perusahaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian Daerah/Perusahaan



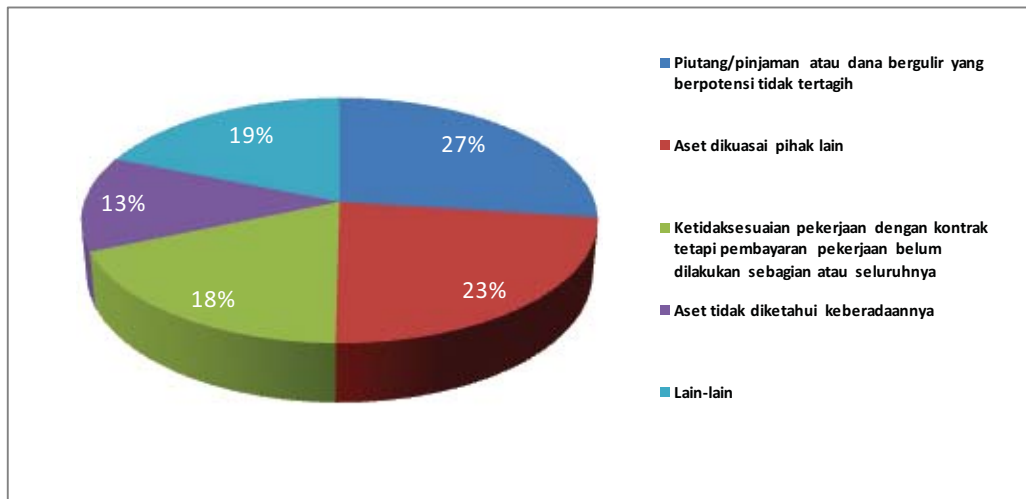
Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 110 kasus (19% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp44.845,09 juta;
- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 104 kasus (18% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp55.333,50 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 77 kasus (14% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.548,47 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 45 kasus (8% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp14.070,52 juta;
- kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 39 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp9.301,65 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 36 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp30.693,30 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 31 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp38.927,81 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 31 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp30.282,92 juta;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 26 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.751,29 juta; dan

- kasus kerugian daerah/perusahaan milik daerah lainnya sebanyak 79 kasus (14% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp109.577,15 juta di antaranya rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

Rincian kasus potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 103 kasus senilai Rp295,70 miliar disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian daerah/perusahaan meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset tidak diketahui keberadaannya, dan kasus potensi kerugian daerah/perusahaan lainnya. Persentase kasus potensi kerugian daerah/perusahaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan



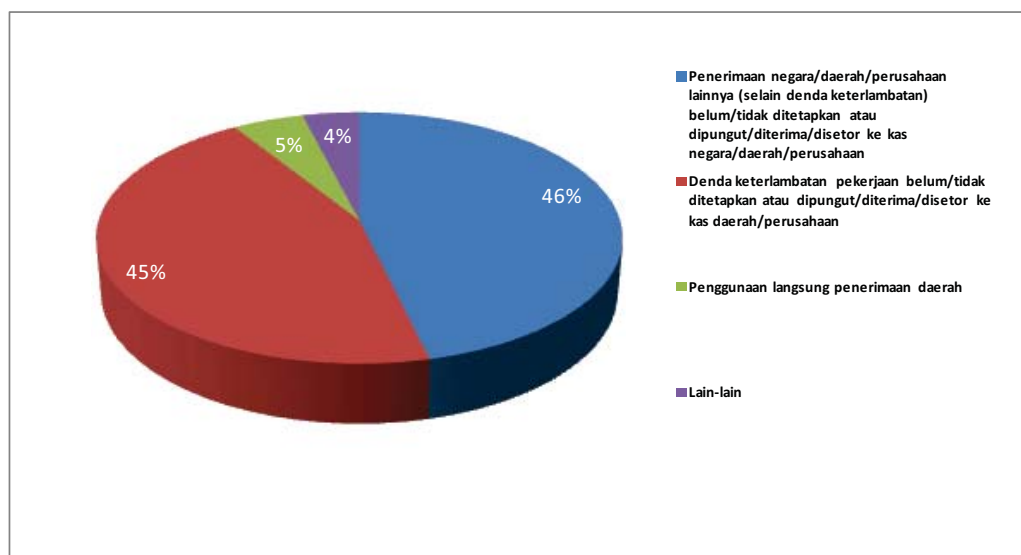
Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 28 kasus (27% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp46.104,22 juta;
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 24 kasus (23% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp47.237,90 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 19 kasus (18% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp90.895,51 juta;
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 13 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp52.870,27 juta; dan

- kasus potensi kerugian daerah/perusahaan lainnya sebanyak 19 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp58.593,93 juta di antaranya penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 299 kasus senilai Rp131,93 miliar disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah/perusahaan termasuk denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 139 kasus (46% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp69.569,84 juta;
- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan sebanyak 133 kasus (45% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp52.082,17 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan daerah sebanyak 15 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp6.060,65 juta; dan

- kasus kekurangan penerimaan lainnya, sebanyak 12 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.219,47 juta di antaranya penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari 1.871 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar dengan rincian temuan kerugian daerah/perusahaan senilai Rp7,77 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,71 miliar.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah memeriksa 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2011, sedangkan pada Semester I Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan dan melaporkan LHP atas 426 LKPD. Dengan demikian, dalam Tahun 2012 BPK telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat empat pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK. Rincian pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku), Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) yang baru menyerahkan LKPD pada November 2012, dan Kabupaten Mamberamo Tengah (Provinsi Papua) yang baru menyerahkan LKPD pada Desember 2012.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 94 LKPD tersebut meliputi neraca, LRA, laporan arus kas, dan CaLK. Rekapitulasi neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp195,69 triliun, kewajiban senilai Rp1,79 triliun, dan ekuitas senilai Rp193,94 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp86,43 triliun, belanja senilai Rp70,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp7,57 triliun.
- 3.4 Selain itu, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas dua LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan November 2012. Adapun Pemerintah Kabupaten Puncak menyerahkan LKPD Tahun 2010 pada bulan Desember 2011 dan baru dapat dilakukan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2012 karena pada Semester I Tahun 2012 kondisi keamanan di Kabupaten Puncak tidak kondusif.

Hasil Pemeriksaan

- 3.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian

daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

LKPD Tahun 2011

Opini

- 3.7 Terhadap 94 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WDP atas 33 entitas, opini TW atas 3 entitas, dan opini TMP atas 58 entitas. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 4.
- 3.8 Opini LKPD Tahun 2011 atas 520 pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 5.

Tabel 3.1. Opini LKPD Tahun 2011

Opini	LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I 2012		LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II 2012		Total LKPD Tahun 2011	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
WTP	67	16%	0	0%	67	13%
WDP	316	74%	33	35%	349	67%
TW	5	1%	3	3%	8	2%
TMP	38	9%	58	62%	96	18%
Jumlah	426	100%	94	100%	520	100%

- 3.9 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

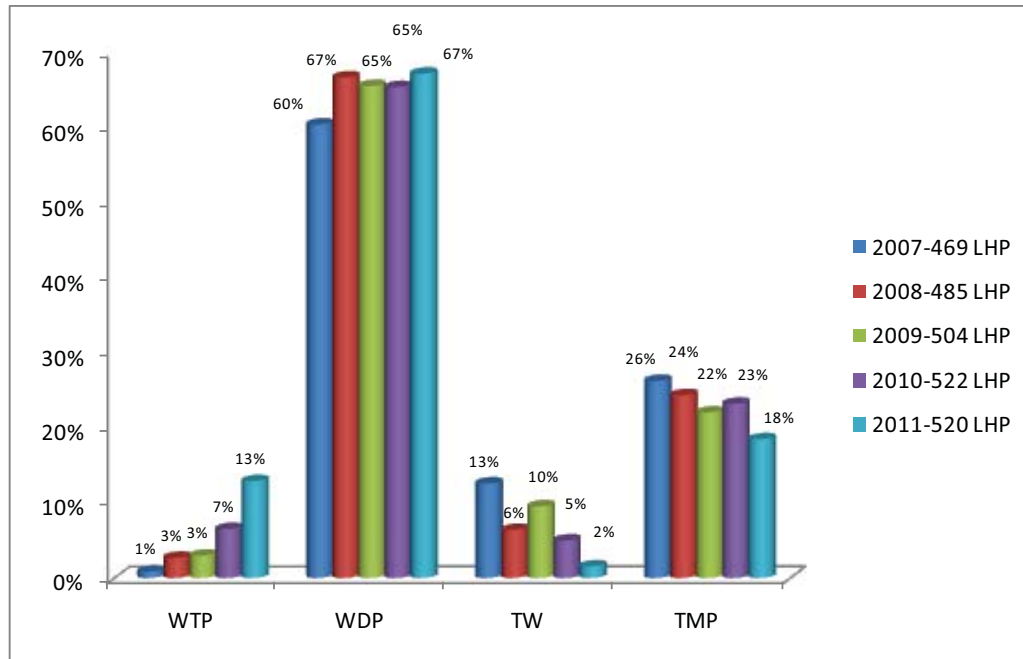
Tabel 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121*	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

*) Pemeriksaan 2 LKPD Tahun 2010 yaitu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012.

3.10 Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa BPK telah memberikan opini atas 469 LKPD Tahun 2007, 485 LKPD Tahun 2008, 504 LKPD Tahun 2009, 522 LKPD Tahun 2010, dan 520 LKPD Tahun 2011. Untuk LKPD Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya karena terdapat 4 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD. Sampai dengan Semester II Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 520 LKPD Tahun 2011. Grafik 3.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2011



3.11 Dari Grafik 3.1 diketahui bahwa

- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 13%, meningkat 6% dari Tahun 2010 sebanyak 7%;
- persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 67%, meningkat 2% dari Tahun 2010 sebanyak 65%;
- persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2011 adalah sebanyak 2%, menurun 3% dari Tahun 2010 sebanyak 5%; dan
- persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 18%, menurun 5% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.

3.12 Adanya kenaikan persentase opini WTP dan WDP, serta penurunan persentase opini TW dan TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari

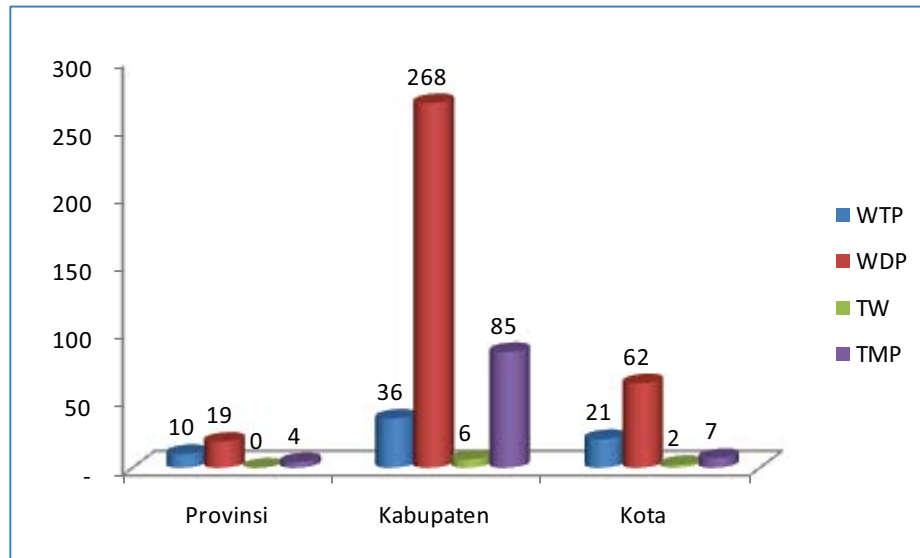
pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

- 3.13 Atas 349 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, di antaranya sebanyak 33 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, dan penatausahaan persediaan tidak memadai.
- 3.14 Atas 8 LKPD yang memperoleh opini TW, di antaranya sebanyak 3 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun kas, persediaan, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal.
- 3.15 Atas 96 LKPD yang memperoleh opini TMP, di antaranya sebanyak 58 LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012, pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.
- 3.16 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2012 terdiri atas 5 LKPD provinsi, 82 LKPD kabupaten, dan 7 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2011 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS II 2012					LHP LKPD Tahun 2011 yang dilaporkan pada IHPS I 2012					Total LKPD Tahun 2011				
	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah
Provinsi	-	3	-	2	5	10	16	-	2	28	10	19	-	4	33
Kabupaten	-	28	2	52	82	36	240	4	33	313	36	268	6	85	395
Kota	-	2	1	4	7	21	60	1	3	85	21	62	2	7	92
Jumlah	-	33	3	58	94	67	316	5	38	426	67	349	8	96	520

- 3.17 Grafik 3.2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2011 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 3.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 3.18 Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.2 di atas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah tingkat provinsi dan kota lebih baik daripada pemerintah tingkat kabupaten. Pemerintah tingkat provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 29 LKPD atau sekitar 88% dari 33 entitas provinsi dan pemerintah tingkat kota memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 83 LKPD atau sekitar 90% dari 92 entitas kota, dibandingkan pemerintah tingkat kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sebanyak 304 LKPD atau sekitar 77% dari 395 entitas kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern (1.306 kasus)

- 3.19 Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- 6.20 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3.21 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.22 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.

- 3.23 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan LHP LK yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.24 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal kualitas penyajian laporan keuangan. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP menunjukkan bahwa unsur SPI belum dilaksanakan secara maksimal, terutama penilaian risiko baik dari segi identifikasi maupun analisis risiko.
- 3.25 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam penilaian risiko instansi disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.26 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.27 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidu lain yang ditetapkan.
- 3.28 Hasil pemeriksaan atas 94 LKPD menunjukkan terdapat 1.306 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4, sedangkan rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.4. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	433
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	287
Jumlah		1.306

- 3.29 Hasil evaluasi SPI menunjukkan terdapat kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan menjadi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.30 Hasil evaluasi SPI pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 3.5, rincian jenis temuan pada Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah tingkat daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	38	548	586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	36	397	433
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	268	287
Jumlah		93	1.213	1.306

- 3.31 Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.32 Sebanyak 586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 296 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 237 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 49 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

- 3.33 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 94 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.34 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, penatausahaan aset tetap tidak tertib, yaitu tidak membuat laporan barang inventaris Tahun 2011 yang mendukung penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp9,71 miliar, aset tetap dibawah penguasaan pihak ketiga yang tidak berhak senilai Rp2,77 miliar, dan aset tetap tidak dilengkapi bukti kepemilikan senilai Rp116,26 miliar sehingga saldo aset tetap senilai Rp1,38 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pengelolaan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib dan penyajian saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 tidak didukung dengan daftar aset tetap yang memadai mengakibatkan penyajian aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 senilai Rp1,07 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Kalimantan Timur, penyajian piutang lainnya untuk perusahaan penabrak jembatan Mahulu senilai Rp8,39 miliar dan piutang atas kompensasi divestasi PT Kaltim Prima Coal senilai Rp280,00 miliar tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan penyajian saldo piutang lain-lain senilai Rp288,39 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pengkonsolidasian neraca Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit per 31 Desember 2011 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 senilai Rp16,67 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, penyajian saldo persediaan pada neraca tidak didasarkan pada perhitungan fisik persediaan, yang mengakibatkan nilai persediaan obat tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp2,93 miliar.
- 3.35 Sebanyak 433 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 158 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 58 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 116 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 24 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 56 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 13 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya penatausahaan aset tetap tidak tertib.
- 3.36 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.37 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, penganggaran dan realisasi belanja pemeliharaan jalan senilai Rp15,13 miliar tidak tepat dikategorikan sebagai pemeliharaan jalan, karena sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dipergunakan untuk memperoleh aset tetap sehingga lebih tepat dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja modal.
 - Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, realisasi belanja tidak terduga senilai Rp2,06 miliar belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan tidak diberitahukan kepada DPRD sehingga berpotensi disalahgunakan serta belanja tidak terduga senilai Rp1,43 miliar diberikan dalam bentuk uang tunai dan tidak didukung pertanggungjawaban dari penerima bantuan sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, penyusunan APBD Tahun 2011 dan APBD perubahan Tahun 2011 terlambat ditetapkan dan dilaksanakan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD dan perubahan APBD terhambat dan terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
 - Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum tertib, yaitu adanya penganggaran dan pemungutan retribusi atas pemanfaatan hasil hutan yang tidak memiliki dasar hukum, mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tidak diterbitkan.

- Di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tugas pokok dan fungsi seksi di bidang pendapatan belum dilaksanakan dengan optimal, penerimaan retribusi mendahului penetapan SKRD, bendahara penerimaan tidak melakukan verifikasi penerimaan dari juru pungut, keterlambatan penyetoran pajak/retribusi ke kas daerah dan harga satuan penjualan hasil pertanian belum ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan risiko piutang retribusi tidak tertagih di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tidak dilaporkannya pendapatan secara keseluruhan oleh juru pungut dan penyalahgunaan uang penerimaan yang tidak disetor pada akhir hari kerja.
- 3.38 Sebanyak 287 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 177 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 82 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 20 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 8 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 3.39 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 pemerintah daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penetapan Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp252,48 miliar tidak berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mengakibatkan pengakuan Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak mempunyai dasar hukum yang definitif.
 - Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, penganggaran penyertaan modal Tahun 2011 senilai Rp1,00 miliar belum ditetapkan dengan peraturan daerah mengakibatkan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada PT Bank Sumut belum memiliki dasar hukum dan kepemilikan yang sah.
 - Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan investasi non permanen-dana perguliran masih belum memadai, yaitu penyajian saldo kredit usaha kecil pedesaan Tahun 2001, 2002, dan 2006 tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perguliran kembali dana usaha kecil pedesaan Tahun 2001 dan 2002 senilai Rp3,81 miliar melebihi batas maksimal pemberian kredit kepada debitur mengakibatkan nilai investasi non permanen senilai Rp32,95 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama belum menyusun peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, mengakibatkan penatausahaan keuangan di unit-unit akuntansi/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda dalam hal pengakuan, pencatatan, dan pelaporan.
- Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sisa kasbon Tahun 2009 senilai Rp2,26 miliar dan Tahun 2010 senilai Rp685,98 juta serta selisih kurang saldo kas Tahun 2010 senilai Rp1,92 miliar belum ditetapkan proses penyelesaiannya, mengakibatkan sisa kasbon tidak dapat segera dimanfaatkan, dan selisih kurang kas daerah berpotensi merugikan daerah.
- Di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat pembuat komitmen SKPD tidak meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran dan pengguna anggaran tidak menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, mengakibatkan belanja pegawai senilai Rp2,87 miliar serta belanja barang dan jasa senilai Rp5,61 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab

- 3.41 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 3.42 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan suatu sistem yang memadai, kebijakan formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 3.43 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 3.44 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.45 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan atas LK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6, sedangkan rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 7 dan rincian temuan menurut pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	561	384.987,00
2	Potensi Kerugian Daerah	92	291.541,19
3	Kekurangan Penerimaan	284	128.339,37
Sub Total 1		937	804.867,56
4	Administrasi	651	-
5	Ketidakhematan	71	50.150,45
6	Ketidakefektifan	108	283.326,82
Sub Total 2		830	333.477,27
Total		1.767	1.138.344,83

- 3.46 Berdasarkan Tabel 3.6, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.767 kasus senilai Rp1,13 triliun sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 94 entitas.
- 3.47 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 3.7, sedangkan rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 7 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>							
1	Kerugian Daerah	35	73.863,88	526	311.123,12	561	384.987,00
2	Potensi Kerugian Daerah	6	32.743,12	86	258.798,07	92	291.541,19
3	Kekurangan Penerimaan	19	9.357,10	265	118.982,27	284	128.339,37
Sub Total 1		60	115.964,10	877	688.903,46	937	804.867,56
4	Administrasi	43	-	608	-	651	-
5	Ketidakhematan	4	5.680,78	67	44.469,67	71	50.150,45
6	Ketidakefektifan	9	3.981,68	99	279.345,14	108	283.326,82
Sub Total 2		56	9.662,46	774	323.814,81	830	333.477,27
Jumlah		116	125.626,56	1.651	1.012.718,27	1.767	1.138.344,83

Kerugian Daerah (561 kasus senilai Rp384,98 miliar)

- 3.48 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.49 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

- 3.50 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 561 kasus senilai Rp384,98 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 339 kasus senilai Rp252,19 miliar. Rincian kerugian daerah sebagai berikut

- sebanyak 31 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp30.282,92 juta;
- sebanyak 29 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp38.358,79 juta;
- sebanyak 8 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp4.012,38 juta;
- sebanyak 100 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp53.557,68 juta;
- sebanyak 76 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp31.422,76 juta;
- sebanyak 26 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp25.751,29 juta;
- sebanyak 39 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp9.301,65 juta;
- sebanyak 45 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp14.070,52 juta;

- sebanyak 35 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp30.609,60 juta;
 - sebanyak 15 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp4.380,70 juta;
 - sebanyak 104 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp43.604,43 juta;
 - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp950,00 juta; dan
 - sebanyak 52 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp98.684,28 juta di antaranya kerugian daerah dari kehilangan aset tetap berupa kendaraan belum diproses tuntutan ganti ruginya dan pemutusan kontrak, pencairan jaminan, dan pengenaan denda tidak dilakukan dalam pelaksanaan paket pekerjaan yang wanprestasi.
- 3.51 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.52 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Tual, Provinsi Maluku, pengendalian belanja perjalanan dinas luar daerah lemah yaitu berdasarkan data manifes keberangkatan penumpang dan tiket keberangkatan pegawai yang melakukan perjalanan dinas, ditemukan 812 tiket yang tidak tercantum dalam daftar manifes keberangkatan penumpang pada tanggal tiket tersebut, namun digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sehingga mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp12,40 miliar.
 - Di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat realisasi belanja atas klaim proyek pembangunan pelabuhan laut Segitung meskipun berdasarkan kontrak dan dokumen pembayaran tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk membayar klaim tersebut, karena nilai kontrak sudah lunas terbayar seluruhnya sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp12,00 miliar.
 - Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan atas pekerjaan pembangunan Jalan Sidey dan Warikon di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp8,86 miliar.
 - Di Provinsi Aceh, terdapat pelaksanaan 12 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pendidikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta tagihan pembayaran tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp3,13 miliar.

- 3.53 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 121 kasus senilai Rp88,74 miliar dari seluruh kasus kerugian daerah pada LHP LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 10 kasus senilai Rp6,55 miliar, di antaranya sebanyak 6 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3,87 miliar dan sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp1,79 miliar. Selain itu temuan belanja modal untuk fasilitas umum juga terjadi pada LKPD kabupaten/kota sebanyak 111 kasus senilai Rp82,19 miliar, di antaranya sebanyak 54 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp32,71 miliar dan sebanyak 35 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp22,04 miliar.
- 3.54 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp384,98 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp7,77 miliar, di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, senilai Rp4,00 miliar, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp389,61 juta, dan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, senilai Rp364,42 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

Penyebab

- 3.55 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.56 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (92 kasus senilai Rp291,54 miliar)

- 3.57 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.58 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa

pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

3.59 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 92 kasus senilai Rp291,54 miliar, dengan rincian sebagai berikut

- sebanyak 18 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp90.891,06 juta;
- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp12,43 juta;
- sebanyak 24 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp47.237,90 juta;
- sebanyak 12 kasus aset di antaranya peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp52.847,17 juta;
- sebanyak 2 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp24,64 juta;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah;
- sebanyak 20 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp42.047,63 juta;
- sebanyak 3 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp6.710,28 juta; dan
- sebanyak 11 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp51.770,08 juta di antaranya pengembalian penyertaan modal pemerintah yang tidak dilanjutkan berpotensi tidak tertagih dan masa kadaluarsa pada pengadaan vaksin tidak sesuai perjanjian.

3.60 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 60 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

3.61 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat realisasi belanja modal pada Dinas Perhubungan yang pembayarannya melebihi prestasi pekerjaan senilai Rp26,55 miliar dan berpotensi merugikan daerah.

- Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terdapat tunggakan pokok dan tunggakan bunga atas investasi non permanen *Inhil Revolving Fund* di Bank Riau Cabang Tembilahan senilai Rp7,26 miliar yang berpotensi tidak tertagih.
 - Di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp5,15 miliar atas empat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah.
 - Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terdapat penghapusan piutang pajak penerangan jalan non PLN oleh PT LPPPI yang berasal dari surat ketetapan pajak daerah Tahun 2011 senilai Rp2,39 miliar dilakukan tanpa persetujuan Bupati Tanjung Jabung Barat yang berindikasi merugikan daerah.
- 3.62 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 15 kasus senilai Rp104,25 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian daerah pada LHP LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 2 kasus senilai Rp26,62 miliar dan pada LKPD tingkat kabupaten/kota sebanyak 13 kasus senilai Rp77,63 miliar.

Penyebab

- 3.63 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.64 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, serta tetap memedomani ketentuan yang berlaku.
- 3.65 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan pembangunan, mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetero ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (284 kasus senilai Rp128,33 miliar)

- 3.66 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.67 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 3.68 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 284 kasus senilai Rp128,33 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 130 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp51.530,17 juta;
 - sebanyak 128 kasus penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp66.533,38 juta;
 - sebanyak 15 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp6.060,65 juta;
 - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp203,28 juta;
 - sebanyak 4 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp479,91 juta; dan
 - sebanyak 6 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp3.531,98 juta, di antaranya jasa giro rekening bendahara umum daerah dikenakan PPh.
- 3.69 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 91 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.70 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp4,21 miliar atas pekerjaan peningkatan jalan Hotmix dan kelengkapan ruas Mako-Modanmohe-Ilath dan peningkatan jalan hotmix dalam kota tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

- Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat tunggakan sewa beli ruko, toko, kios, dan lods pada Pasar baru Polewali dari Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 senilai Rp3,53 miliar, dan belum dikenakan denda minimal senilai Rp17,68 juta.
 - Di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pagar dinas rumah bupati dan konstruksi gedung olah raga tahap II pada Dinas PU belum dikenakan denda senilai Rp3,21 miliar.
 - Di Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan arsitektur pelabuhan pada pembangunan terminal dan pekerjaan sipil sisi darat yang merupakan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Kariangau terlambat diselesaikan tetapi rekanan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan senilai Rp3,07 miliar.
- 3.71 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 75 kasus senilai Rp38,22 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada LKPD Tahun 2011 pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas temuan pada LKPD tingkat provinsi sebanyak 5 kasus senilai Rp4,58 miliar dan pada LKPD tingkat kabupaten/kota sebanyak 70 kasus senilai Rp33,64 miliar.
- 3.72 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp128,33 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp3,70 miliar, di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp2,03 miliar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, senilai Rp428,72 juta, dan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, senilai Rp329,24 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.

Penyebab

- 3.73 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena tim anggaran pemerintah daerah tidak cermat dalam menyusun APBD Tahun 2011, pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.74 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan koordinasi, dan menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (651 kasus)

- 3.75 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.76 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 3.77 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.78 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 651 kasus, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 29 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 248 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 10 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 31 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;

- sebanyak 86 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan;
 - sebanyak 29 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 37 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 26 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 49 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
 - sebanyak 24 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 53 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 8 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
 - sebanyak 10 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atas kegiatan pengadaan tidak memperhatikan belanja yang telah direalisasikan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan dan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan.
- 3.79 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 94 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.80 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penyetoran dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan penyedia bahan bakar senilai Rp1,09 triliun terlambat disetor ke kas daerah dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, penggunaan belanja daerah senilai Rp92,09 miliar pada delapan SKPD tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

- Di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, terdapat sebanyak 110 unit kendaraan senilai Rp28,01 miliar tidak didukung bukti kepemilikan kendaraan, di antaranya pembelian pesawat penumpang jenis Pilatus Porter senilai Rp20,00 miliar pada Tahun 2009.
- Di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada tiga perusahaan daerah, yaitu PT Bank Aceh, PT BPR Syariah Kota Juang, dan PDAM Tirta Krueng Peusangan seluruhnya senilai Rp26,05 miliar, tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat investasi (saham).
- Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sisa uang persediaan tahun 2011 senilai Rp2,66 miliar terlambat disetor ke kas daerah dan sisa uang persediaan Tahun 2007 s.d. 2010 senilai Rp3,34 miliar belum disetorkan ke kas daerah.

Penyebab

- 3.81 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, perencanaan maupun pelaksanaan anggaran belum memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.82 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian termasuk terhadap pengelolaan dan pelaporan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai serta melakukan penertiban administrasi pertanggungjawaban.

Ketidakhematan (71 kasus senilai Rp50,15 miliar)

- 3.83 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.84 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga, dan lain-lain kasus ketidakhematan.

- 3.85 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 71 kasus senilai Rp50,15 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 2 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1.330,28 juta;
 - sebanyak 67 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp47.597,91 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus ketidakhematan lainnya senilai Rp1.222,26 juta di antaranya pembayaran tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan tunjangan penghasilan anggota badan permusyawaratan desa tidak sesuai ketentuan.
- 3.86 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut terjadi di 44 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.87 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pemesanan dan pembayaran pengadaan laptop tidak langsung ke *principle*/pabrik yang memboroskan keuangan daerah senilai Rp11,93 miliar.
 - Di Provinsi Maluku, pemberian honor forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Maluku tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp2,10 miliar.
 - Di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang melebihi standar harga sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp1,91 miliar.
 - Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, terdapat realisasi belanja jasa penyelesaian administrasi kegiatan pada kegiatan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah senilai Rp1,49 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penunjang operasional dan protokol yang diberikan secara tunai atas dasar disposisi kepala daerah/wakil kepala daerah sehingga menimbulkan pemborosan keuangan daerah.
 - Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat penetapan kualitas barang yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1,12 miliar. Penetapan kualitas yang tidak sesuai standar terjadi pada proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pada Bagian Umum dan Protokoler, dimana yang dibeli adalah mobil Toyota Land Cruiser Prado TX Audio Less dengan kapasitas/isi silinder 4.000 cc sedangkan sesuai dengan ketentuan untuk kendaraan dinas kepala daerah kapasitas/isi silinder jenis jeep adalah 3.500 cc .

Penyebab

- 3.88 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kurang cermat dalam merencanakan kegiatan, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.89 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pengadaan barang dan jasa secara optimal, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan, membuat kebijakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (108 kasus senilai Rp283,32 miliar)

- 3.90 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.91 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.92 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 108 kasus senilai Rp283,32 miliar dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 69 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp216.722,70 juta;
 - sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp154,57 juta;
 - sebanyak 23 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp65.824,40 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;

- sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp625,15 juta;
 - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - sebanyak 7 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.93 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi di 60 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 8.
- 3.94 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, anggaran dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang bukan merupakan peruntukkan DAK senilai Rp32,78 miliar sehingga tujuan penggunaan DAK untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar tidak tercapai.
 - Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, anggaran DAK digunakan untuk membiayai kegiatan lain sehingga terjadi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan minimal senilai Rp12,00 miliar.
 - Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sekretariat daerah menganggarkan belanja insentif pada kegiatan peningkatan pendidikan bagi putra putri asli Papua dan operasional asrama namun direalisasikan untuk pemberian bantuan sosial kepada pegawai sekretariat daerah dan masyarakat senilai Rp4,57 miliar.
 - Di Provinsi Maluku, terdapat alat kesehatan hasil pengadaan kesehatan yang belum dimanfaatkan dan masih tersimpan dalam kemasan di laboratorium RSUD Dr. M. Haulussy senilai Rp1,29 miliar.
 - Di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat hasil pekerjaan senilai Rp525,76 juta pada gedung kantor Desa Kaasar dan pembangunan Terminal Tatelu belum dapat dimanfaatkan.

Penyebab

- 3.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 3.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan

yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku, dan lebih optimal dalam melakukan perencanaan.

LKPD Tahun 2010

- 3.97 Pada Semester II Tahun 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 2 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah baru menyerahkan LKPD pada bulan November 2012 dan Pemerintah Kabupaten Puncak baru menyerahkan LKPD pada bulan Desember 2011. BPK baru dapat melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Puncak pada Semester II Tahun 2012 karena pada Semester I Tahun 2012 kondisi keamanan di Kabupaten Puncak tidak kondusif.

Opini

- 3.98 Terhadap 2 LKPD Tahun 2010, BPK memberikan opini TMP atas LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.99 Hasil pemeriksaan atas 2 LKPD Tahun 2010 menunjukkan terdapat 15 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.100 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan sebanyak 26 kasus senilai Rp17,33 miliar, dengan rincian sebagai berikut
- sebanyak 11 kasus kerugian daerah senilai Rp4.717,09 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp2.832,10 juta;
 - sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp467,12 juta;
 - sebanyak 13 kasus penyimpangan administrasi; dan
 - sebanyak 1 kasus ketidakefektifan senilai Rp12.153,78 juta.
- 3.101 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, terdapat realisasi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp53,61 miliar yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, terdapat indikasi kerugian daerah senilai Rp1,42 miliar karena terdapat kelebihan pembayaran atas dua pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta adanya realisasi pembayaran untuk tiga kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.
 - Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, terdapat empat paket pekerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas PU dan Perhubungan yang denda keterlambatannya belum dikenakan senilai Rp467,12 juta.
- 3.102 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 4

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

- 4.1 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9 LK BUMD, yang seluruhnya merupakan LK PDAM Tahun 2011 dan dilaksanakan pada 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 dilakukan pada 5 satuan kerja, yaitu PDAM Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Di Provinsi Banten, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang. Di Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan dilakukan pada 2 satuan kerja, yaitu LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa. Adapun di Provinsi Maluku Utara, pemeriksaan dilakukan atas LK PDAM Tahun 2011 Kota Ternate.
- 4.2 Pemeriksaan keuangan atas LK PDAM Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan yang tercermin pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang pedoman akuntansi PDAM yang diterapkan secara konsisten dan/atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan efektivitas SPI.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK PDAM tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMD Tahun 2011

(dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1	PDAM Kab. Pasaman	13.042,91	881,30	12.161,61	6.785,57	6.644,26	141,31
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan	14.061,54	1.934,00	12.127,54	4.010,49	5.980,16	(1.969,67)
3	PDAM Kota Bukittinggi	8.202,87	1.769,90	6.432,97	7.077,03	6.457,30	619,73
4	PDAM Kota Padang	133.351,02	124.733,21	8.617,81	82.152,91	82.642,45	(489,54)
5	PDAM Kota Payakumbuh	24.830,67	2.368,17	22.462,50	14.526,83	13.618,20	908,63
6	PDAM Kota Tangerang	114.509,01	19.200,62	95.308,39	55.111,78	48.282,25	6.829,53
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow	15.057,09	35.041,96	(19.984,87)	9.184,93	12.722,43	(3.537,50)
8	PDAM Kab. Minahasa	24.206,14	43.344,01	(19.137,87)	9.327,08	9.281,85	45,23
9	PDAM Kota Ternate	33.480,09	23.083,09	10.397,00	27.177,09	24.174,47	3.002,62

Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK PDAM Tahun 2011 disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini; temuan; kesimpulan; dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan daerah, potensi kerugian daerah/perusahaan daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Istilah kasus tersebut dapat berimplikasi hukum dan/atau berdampak finansial atau tidak berimplikasi hukum tergantung permasalahannya.

Opini

- 4.6 BPK memberikan opini WTP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi serta opini WDP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Selain itu, BPK juga telah memberikan opini TMP untuk LK PDAM Tahun 2011 Kota Tangerang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Ternate. Perkembangan opini LK 9 PDAM tersebut untuk Tahun 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Opini atas LK BUMD Tahun 2009 s.d. 2011

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PDAM Kab. Pasaman*)	WTP	WTP	WTP
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan*)	WDP	WDP	WDP
3	PDAM Kota Bukittinggi*)	WTP	WTP	WTP
4	PDAM Kota Padang	WDP	WDP	WDP
5	PDAM Kota Payakumbuh*)	WTP	WTP	WDP
6	PDAM Kota Tangerang**)	WTP	WTP	TMP
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow*)	WDP	WDP	TMP
8	PDAM Kab. Minahasa*)	TMP	WDP	TMP
9	PDAM Kota Ternate*)	WDP	WDP	TMP

Keterangan:

*) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kabupaten/Kota diperiksa oleh BPKP.

**) Pada Tahun 2009 dan 2010, LK PDAM Kota Tangerang mendapat opini WTP dari KAP Sukardi Hasan.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah/perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan PDAM wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan perusahaan.
- 4.8 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.9 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Sesuai ketentuan tersebut, selain menerbitkan LHP LK yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK PDAM Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.10 Hasil pemeriksaan atas LK PDAM Tahun 2011 menunjukkan adanya 106 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3. Rincian jenis temuan disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	32
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26
Jumlah		106

4.11 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kabupaten Minahasa, perusahaan belum melakukan pembayaran angsuran pokok atas pinjaman dari pemerintah pusat dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2011 mengakibatkan perusahaan menanggung denda keterlambatan sampai dengan 31 Desember 2011 minimal senilai Rp19,47 miliar yang sangat mempengaruhi likuiditas perusahaan.
- Di PDAM Kota Padang, tingkat kebocoran air PDAM Kota Padang Tahun Buku 2011 melebihi batas toleransi yang ditetapkan sehingga perusahaan kehilangan potensi pendapatan minimal senilai Rp12,31 miliar.
- Di PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow, adanya tingkat kehilangan air pada saat proses produksi dan distribusi kepada pelanggan yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan mengakibatkan perusahaan kehilangan potensi pendapatan dari produksi air bersih yang hilang senilai Rp5,89 miliar.
- Di PDAM Kota Payakumbuh, penetapan besaran tunjangan yang diberikan kepada direktur dan pegawai perusahaan tidak diatur dengan peraturan walikota sehingga membebani keuangan perusahaan senilai Rp1,91 miliar.
- Di PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, perusahaan belum menetapkan SOP untuk semua kegiatan yang dilakukan perusahaan mengakibatkan pengendalian manajemen terhadap operasional perusahaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
- Di PDAM Kabupaten Pasaman, pengelolaan persediaan belum dilakukan secara tertib termasuk adanya persediaan pipa yang tidak dilaporkan sebagai persediaan perusahaan mengakibatkan persediaan pipa senilai Rp345,40 juta tersebut belum jelas statusnya dan belum tercatat dalam neraca perusahaan.

Penyebab

- 4.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.13 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, memberikan sanksi sesuai ketentuan, menyempurnakan sistem informasi akuntansi dan pelaporan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.14 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pemeriksaan LK BUMD Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	6	627,61
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	11	4.160,64
3	Kekurangan Penerimaan	14	3.125,64
4	Administrasi	29	-
5	Ketidakhematan	14	8.246,83
6	Ketidakefektifan	4	81,05
Jumlah		78	16.241,77

- 4.15 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 78 kasus senilai Rp16,24 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 9 entitas.
- 4.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kota Payakumbuh, terdapat beberapa pengeluaran biaya umum dan administrasi Tahun Buku 2011 yang tidak sesuai ketentuan dan tidak ada dasar hukumnya sehingga mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan perusahaan senilai Rp141,39 juta.
 - Di PDAM Kabupaten Pasaman, perusahaan belum mengenakan sanksi pemutusan sambungan air atas pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian senilai Rp1,67 miliar.
 - Di PDAM Kabupaten Minahasa, terdapat pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PDAM Kabupaten Minahasa yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan penerimaan negara dari pajak senilai Rp577,99 juta tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
 - Di PDAM Kota Padang, realisasi biaya tenaga kerja PDAM Kota Padang Tahun Buku 2011 melebihi ketentuan internal PDAM mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan minimal senilai Rp3,12 miliar.
- 4.17 Dari 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp16,24 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,74 juta, yaitu penyetoran dari PDAM Kabupaten Pasaman senilai Rp5,40 juta dan PDAM Kota Ternate senilai Rp6,34 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak cermat dalam membuat kebijakan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 4.19 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- 3.20 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara

C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

D

- DAK : Dana Alokasi Khusus
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

K

- KAP : Kantor Akuntan Publik

L

- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LK : Laporan Keuangan
LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LRA : Laporan Realisasi Anggaran

M

- MAK : Mata Anggaran Kegiatan

P

- PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

S

- SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SPAP : Standar Profesional Akuntan Publik
SPI : Sistem Pengendalian Intern
SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SOP : *Standard Operating Procedure*

T

- TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

W

- WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidaspastuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengalibatkan Kerugian Daerah atau Perusahaan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditransferkan dalam Proses Pemeriksaan																
		Total Kerugian Daerah atau Perusahaan		Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif		Relevansi Pengadaan Barang/Jasa Tidak Mempelajari Pekerjaan		Kekurangan Volume Pekerjaan atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pembayaran Harga (Mark up)		Penggunaan Uang/Keperawatan Pribadi		Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan		Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Pengembalian Pinjaman/Putang atau Dana bergalur Miacet		Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditransferkan dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Perjalanan Dinas)						
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	UPPD Tahun 2011	564	384.987,00	31	30.282,92	29	36.358,79	8	4.012,38	100	53.557,68	76	31.422,76	45	14.070,52	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
2	IK BUMD Tahun 2011	6	627,61	-	-	1	300,00	-	-	1	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.604,43	104	43.604,43	1	950,00	52	98.684,28	1.043,16	6.731,45	
3	UPPD Tahun 2010	11	4.717,09	-	-	3	269,02	1	1.136,47	3	1.760,09	1	125,71	-	-	-	1	83,70	1	392,10	3	950,00	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Jumlah		578	390.331,70	31	30.282,92	31	36.927,81	9	5.148,85	104	55.333,50	77	31.548,47	45	14.070,52	36	30.693,30	16	4.772,80	110	44.845,09	1	950,00	53	98.705,50	1.044,16	6.736,85			

(nilai dalam juta rupiah)

Lampiran 2

**Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atau Perusahaan																			
		Total Potensi Kerugian Daerah atau Perusahaan		Ketidaksiuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya		Rekanan Belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan		Aset dikuasai Pihak Lain		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Pemberian Jaminan dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Pemanfaatan Barang dan Pemberian Fasilitas Tidak Sesuai Ketentuan		Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban untuk Menyerahkan Aset Kepada Daerah		Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih		Penghapusan Piutang Tidak Sesuai Ketentuan		Lain-Lain	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	LKPD Tahun 2011	92	291.541,19	18	90.891,06	1	12,43	24	47.237,90	12	52.847,17	2	24,64	1	-	20	42.047,63	3	6.710,28	11	51.770,08
2	LK BUMD Tahun 2011	11	4.160,64	1	4,45	-	-	-	-	1	23,10	-	-	-	-	8	4.056,59	1	76,50	-	-
3	LKPD Tahun 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		103	295.701,83	19	90.895,51	1	12,43	24	47.237,90	13	52.870,27	2	24,64	1	-	28	46.104,22	4	6.786,78	11	51.770,08

Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan		Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan Lainnya (Selain Denda keterlambatan) Belum/ Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/ Disetor ke Kas Daerah atau Perusahaan		Penerimaan Daerah Diterima atau Digunakan oleh Instansi yang Tidak Berhak		Penaanan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-Lain		Nilai	Nilai		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	LKPD Tahun 2011	284	128.339,37	130	51.530,17	128	66.533,38	15	6.060,65	1	203,28	4	479,91	6	3.531,98	2.810,33	892,76
2	LK BUMD Tahun 2011	14	3.125,64	2	84,88	11	3.036,46	-	-	1	4,30	-	-	-	-	-	6,34
3	LKPD Tahun 2010	1	467,12	1	467,12	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	299	131.932,13	133	52.082,17	139	69.569,84	15	6.060,65	2	207,58	4	479,91	6	3.531,98	2.810,33	899,10

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
1	Prov. Aceh					
	LKPD		19		5	
1	1	Prov. Aceh			1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP		
3	3	Kab. Aceh Barat Daya			1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP		
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP		
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP		
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP		
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP		
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP		
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP		
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP		
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP		
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP		
14	14	Kab. Bireuen			1	WDP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP		
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP		
17	17	Kab. Pidie			1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP		
19	19	Kab. Simeulue			1	WDP
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP		
21	21	Kota Langsa	1	WDP		
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP		
23	23	Kota Sabang	1	WDP		
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP		
2	Prov. Sumatera Utara					
	LKPD		24		10	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP		
2	26	Kab. Asahan	1	WDP		
3	27	Kab. Batubara			1	TMP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP		
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP		
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP		
7	31	Kab. Karo			1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP		
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP		
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP		
11	35	Kab. Langkat			1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP		
13	37	Kab. Nias			1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat			1	TMP

Halaman 2 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012		
	15	39	Kab. Nias Selatan			1	TMP
	16	40	Kab. Nias Utara			1	TMP
	17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP		
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP		
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP		
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP		
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP		
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP		
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP		
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP		
	27	51	Kota Binjai	1	WDP		
	28	52	Kota Gunung Sitoli			1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP		
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP		
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP		
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP DPP		
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP		
	34	58	Kota Tebingtinggi	1	WDP		
	3	Prov. Sumatera Barat					
		LKPD		19		1	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP		
	2	60	Kab. Agam	1	WDP		
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP		
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP		
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP		
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP		
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP		
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP		
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP		
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP		
	11	69	Kab. Solok	1	WDP		
	12	70	Kab. Solok Selatan			1	TMP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP		
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP		
	15	73	Kota Padang	1	WDP		
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP		
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP		
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP		
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP		
	20	78	Kota Solok	1	WDP		

Halaman 3 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
4	Prov. Riau					
	LKPD		11		2	
1	79	Prov. Riau	1	WDP		
2	80	Kab. Bengkalis	1	TMP		
3	81	Kab. Indragiri Hilir	0		1	WDP
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP		
5	83	Kab. Kampar	1	WDP		
6	84	Kab. Kepulauan Meranti	0		1	WDP
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP DPP		
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP		
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP		
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP		
11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP		
12	90	Kota Dumai	1	WDP		
13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP		
5	Prov. Jambi					
	LKPD		11		1	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP		
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP		
3	94	Kab. Bungo	1	WDP		
4	95	Kab. Kerinci	1	WDP		
5	96	Kab. Merangin	1	WDP		
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP		
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP		
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat			1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP		
10	101	Kab. Tebo	1	WDP		
11	102	Kota Jambi	1	WDP		
12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP		
6	Prov. Sumatera Selatan					
	LKPD		16		0	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP		
2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP DPP		
3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP		
4	107	Kab. Lahat	1	WDP		
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP		
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP		
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP		
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP		
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP		
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP		
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP		

Halaman 4 - Lampiran 4

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WTP	
	14	117	Kota Pagaralam	1	WDP	
	15	118	Kota Palembang	1	WTP	
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	
7	Prov. Bengkulu					
	LKPD		11		0	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WTP	
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	
	5	124	Kab. Kaur	1	WTP	
	6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	
	7	126	Kab. Lebong	1	WDP	
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	
	10	129	Kab. Seluma	1	TW	
	11	130	Kota Bengkulu	1	WTP	
8	Prov. Lampung					
	LKPD		15		0	
	1	131	Prov. Lampung	1	WTP DPP	
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WTP DPP	
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WTP DPP	
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	
	7	137	Kab. Mesuji	1	TMP	
	8	138	Kab. Pesawaran	1	WDP	
	9	139	Kab. Pringsewu	1	WDP	
	10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	
	11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	
	13	143	Kab. Way Kanan	1	WTP	
	14	144	Kota Bandar Lampung	1	WTP DPP	
	15	145	Kota Metro	1	WTP	
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung					
	LKPD		8		0	
	1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	
	2	147	Kab. Bangka	1	WTP	
	3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP	
	4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP		
	6	151	Kab. Belitung	1	WDP		
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP		
	8	153	Kota Pangkal Pinang	1	WDP		
10	Prov. Kepulauan Riau						
	LKPD			8		0	
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP		
	2	155	Kab. Bintan	1	WTP		
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP		
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP		
	5	158	Kab. Lingga	1	WDP		
	6	159	Kab. Natuna	1	WDP		
	7	160	Kota Batam	1	WDP		
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP		
11	Prov. DKI Jakarta						
	LKPD			1		0	
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP		
12	Prov. Jawa Barat						
	LKPD			27		0	
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WTP		
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP		
	3	165	Kab. Bandung Barat	1	WDP		
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP		
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP		
	6	168	Kab. Ciamis	1	WDP		
	7	169	Kab. Cianjur	1	WDP		
	8	170	Kab. Cirebon	1	WDP		
	9	171	Kab. Garut	1	WDP		
	10	172	Kab. Indramayu	1	WDP		
	11	173	Kab. Karawang	1	WDP		
	12	174	Kab. Kuningan	1	WDP		
	13	175	Kab. Majalengka	1	WDP		
	14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP		
	15	177	Kab. Subang	1	WDP		
	16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP		
	17	179	Kab. Sumedang	1	WDP		
	18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP		
	19	181	Kota Bandung	1	WDP		
	20	182	Kota Banjar	1	WTP		
	21	183	Kota Bekasi	1	WDP		
	22	184	Kota Bogor	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
23	185	Kota Cimahi	1	WDP		
24	186	Kota Cirebon	1	WDP		
25	187	Kota Depok	1	WTP DPP		
26	188	Kota Sukabumi	1	WDP		
27	189	Kota Tasikmalaya	1	WDP		
13	Prov. Jawa Tengah					
	LKPD		36		0	
1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WTP DPP		
2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP		
3	192	Kab. Banyumas	1	WTP		
4	193	Kab. Batang	1	WDP		
5	194	Kab. Blora	1	WDP		
6	195	Kab. Boyolali	1	WTP		
7	196	Kab. Brebes	1	WDP		
8	197	Kab. Cilacap	1	WDP		
9	198	Kab. Demak	1	WDP		
10	199	Kab. Grobogan	1	WDP		
11	200	Kab. Jepara	1	WTP		
12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP		
13	202	Kab. Kebumen	1	WTP		
14	203	Kab. Kendal	1	WDP		
15	204	Kab. Klaten	1	WDP		
16	205	Kab. Kudus	1	WDP		
17	206	Kab. Magelang	1	WDP		
18	207	Kab. Pati	1	WDP		
19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP		
20	209	Kab. Pemasang	1	WDP		
21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP		
22	211	Kab. Purworejo	1	WDP		
23	212	Kab. Rembang	1	WDP		
24	213	Kab. Semarang	1	WTP		
25	214	Kab. Sragen	1	WDP		
26	215	Kab. Sukoharjo	1	WDP		
27	216	Kab. Tegal	1	WDP		
28	217	Kab. Temanggung	1	WDP		
29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP		
30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP		
31	220	Kota Magelang	1	WDP		
32	221	Kota Pekalongan	1	WDP		
33	222	Kota Salatiga	1	WDP		
34	223	Kota Semarang	1	WDP		
35	224	Kota Surakarta	1	WTP		
36	225	Kota Tegal	1	WTP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
14	Prov. D.I. Yogyakarta					
	LKPD		6		0	
1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP		
2	227	Kab. Bantul	1	WDP		
3	228	Kab. Gunung Kidul	1	WDP		
4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP		
5	230	Kab. Sleman	1	WTP DPP		
6	231	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP		
15	Prov. Jawa Timur					
	LKPD		39		0	
1	232	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP		
2	233	Kab. Bangkalan	1	WTP		
3	234	Kab. Banyuwangi	1	WDP		
4	235	Kab. Blitar	1	WDP		
5	236	Kab. Bojonegoro	1	WDP		
6	237	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP		
7	238	Kab. Gresik	1	WDP		
8	239	Kab. Jember	1	WDP		
9	240	Kab. Jombang	1	WDP		
10	241	Kab. Kediri	1	WDP		
11	242	Kab. Lamongan	1	WDP		
12	243	Kab. Lumajang	1	WDP		
13	244	Kab. Madiun	1	WDP		
14	245	Kab. Magetan	1	WDP		
15	246	Kab. Malang	1	WDP		
16	247	Kab. Mojokerto	1	TMP		
17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP		
18	249	Kab. Ngawi	1	WDP		
19	250	Kab. Pacitan	1	WTP DPP		
20	251	Kab. Pamekasan	1	WTP DPP		
21	252	Kab. Pasuruan	1	WDP		
22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP		
23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP		
24	255	Kab. Sampang	1	WDP		
25	256	Kab. Sidoarjo	1	WDP		
26	257	Kab. Situbondo	1	WDP		
27	258	Kab. Sumenep	1	WDP		
28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP		
29	260	Kab. Tuban	1	WTP DPP		
30	261	Kab. Tulungagung	1	WTP DPP		
31	262	Kota Batu	1	WDP		
32	263	Kota Blitar	1	WTP DPP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	33	264 Kota Kediri	1	WDP		
	34	265 Kota Madiun	1	WDP		
	35	266 Kota Malang	1	WTP DPP		
	36	267 Kota Mojokerto	1	WTP DPP		
	37	268 Kota Pasuruan	1	WDP		
	38	269 Kota Probolinggo	1	WTP DPP		
	39	270 Kota Surabaya	1	WDP		
16	Prov. Banten					
	LKPD		9		0	
	1	271 Prov. Banten	1	WDP		
	2	272 Kab. Lebak	1	WDP		
	3	273 Kab. Pandeglang	1	WDP		
	4	274 Kab. Serang	1	WTP DPP		
	5	275 Kab. Tangerang	1	WTP		
	6	276 Kota Cilegon	1	WDP		
	7	277 Kota Serang	1	WDP		
	8	278 Kota Tangerang	1	WTP		
	9	279 Kota Tangerang Selatan	1	WTP		
17	Prov. Bali					
	LKPD		10		0	
	1	280 Prov. Bali	1	WDP		
	2	281 Kab. Badung	1	WTP DPP		
	3	282 Kab. Bangli	1	WDP		
	4	283 Kab. Buleleng	1	WDP		
	5	284 Kab. Gianyar	1	WDP		
	6	285 Kab. Jembrana	1	WDP		
	7	286 Kab. Karangasem	1	WDP		
	8	287 Kab. Klungkung	1	WDP		
	9	288 Kab. Tabanan	1	WDP		
	10	289 Kota Denpasar	1	WDP		
18	Prov. Nusa Tenggara Barat					
	LKPD		10		1	
	1	290 Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP		
	2	291 Kab. Bima			1	TMP
	3	292 Kab. Dompu	1	TMP		
	4	293 Kab. Lombok Barat	1	WDP		
	5	294 Kab. Lombok Tengah	1	WDP		
	6	295 Kab. Lombok Timur	1	WDP		
	7	296 Kab. Lombok Utara	1	WDP		
	8	297 Kab. Sumbawa	1	WDP		
	9	298 Kab. Sumbawa Barat	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
10	299	Kota Bima	1	WDP			
11	300	Kota Mataram	1	WDP			
19	Prov. Nusa Tenggara Timur						
	LKPD			9		13	
1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP			
2	302	Kab. Alor	1	TMP			
3	303	Kab. Belu	1	WDP			
4	304	Kab. Ende			1	WDP	
5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP			
6	306	Kab. Kupang			1	TMP	
7	307	Kab. Lembata			1	TMP	
8	308	Kab. Manggarai			1	WDP	
9	309	Kab. Manggarai Barat			1	WDP	
10	310	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	
11	311	Kab. Nagekeo	1	WDP			
12	312	Kab. Ngada			1	TMP	
13	313	Kab. Rote Ndao			1	TMP	
14	314	Kab. Sabu Raijua			1	WDP	
15	315	Kab. Sikka			1	WDP	
16	316	Kab. Sumba Barat			1	WDP	
17	317	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP			
18	318	Kab. Sumba Tengah	1	WDP			
19	319	Kab. Sumba Timur			1	WDP	
20	320	Kab. Timor Tengah Selatan			1	WDP	
21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP			
22	322	Kota Kupang	1	WDP			
20	Prov. Kalimantan Barat						
	LKPD			15		0	
1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP			
2	324	Kab. Bengkayang	1	WDP			
3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP			
4	326	Kab. Kayong Utara	1	WDP			
5	327	Kab. Ketapang	1	WDP			
6	328	Kab. Kubu Raya	1	WDP			
7	329	Kab. Landak	1	WDP			
8	330	Kab. Melawi	1	TW			
9	331	Kab. Pontianak	1	WDP			
10	332	Kab. Sambas	1	WDP			
11	333	Kab. Sanggau	1	WDP			
12	334	Kab. Sekadau	1	WDP			
13	335	Kab. Sintang	1	WDP			
14	336	Kota Pontianak	1	WTP DPP			

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	15	337 Kota Singkawang	1	WDP		
21	Prov. Kalimantan Tengah					
	LKPD		9		6	
	1	338 Prov. Kalimantan Tengah			1	WDP
	2	339 Kab. Barito Selatan	1	TMP		
	3	340 Kab. Barito Timur			1	TMP
	4	341 Kab. Barito Utara			1	TMP
	5	342 Kab. Gunung Mas	1	WDP		
	6	343 Kab. Kapuas	1	WDP		
	7	344 Kab. Katingan			1	TMP
	8	345 Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP		
	9	346 Kab. Kotawaringin Timur	1	WDP		
	10	347 Kab. Lamandau	1	WDP		
	11	348 Kab. Murung Raya	1	WDP		
	12	349 Kab. Pulang Pisau	1	TW		
	13	350 Kab. Seruyan			1	TMP
	14	351 Kab. Sukamara			1	WDP
	15	352 Kota Palangkaraya	1	WDP		
22	Prov. Kalimantan Selatan					
	LKPD		10		4	
	1	353 Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP		
	2	354 Kab. Balangan	1	WDP		
	3	355 Kab. Banjar			1	WDP
	4	356 Kab. Barito Kuala	1	WDP		
	5	357 Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP		
	6	358 Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP		
	7	359 Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP		
	8	360 Kab. Kotabaru			1	WDP
	9	361 Kab. Tabalong			1	TMP
	10	362 Kab. Tanah Bumbu	1	WDP		
	11	363 Kab. Tanah Laut	1	WDP		
	12	364 Kab. Tapin	1	WDP		
	13	365 Kota Banjarbaru			1	WDP
	14	366 Kota Banjarmasin	1	WDP		
23	Prov. Kalimantan Timur					
	LKPD		8		7	
	1	367 Prov. Kalimantan Timur			1	WDP
	2	368 Kab. Berau	1	WDP		
	3	369 Kab. Bulungan			1	WDP
	4	370 Kab. Kutai Barat	1	WDP		
	5	371 Kab. Kutai Kartanegara			1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
	6	372	Kab. Kutai Timur			1	TW
	7	373	Kab. Malinau			1	WDP
	8	374	Kab. Nunukan	1	WDP		
	9	375	Kab. Paser	1	WDP		
	10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP		
	11	377	Kab. Tana Tidung			1	TMP
	12	378	Kota Balikpapan	1	WDP		
	13	379	Kota Bontang	1	WDP		
	14	380	Kota Samarinda			1	TMP
	15	381	Kota Tarakan	1	WDP		
24	Prov. Sulawesi Utara						
	LKPD			13		3	
	1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP		
	2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP		
	3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP		
	4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP		
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP		
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP		
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP		
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP		
	9	390	Kab. Minahasa	1	WDP		
	10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP		
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara			1	TMP
	13	394	Kota Bitung	1	WTP DPP		
	14	395	Kota Kotamobagu	1	TW		
	15	396	Kota Manado			1	TW
	16	397	Kota Tomohon	1	TMP		
25	Prov. Sulawesi Tengah						
	LKPD			12		0	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP		
	2	399	Kab. Banggai	1	WDP		
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP DPP		
	4	401	Kab. Buol	1	WDP		
	5	402	Kab. Donggala	1	WTP DPP		
	6	403	Kab. Morowali	1	WDP		
	7	404	Kab. Parigi Moutong	1	WDP		
	8	405	Kab. Poso	1	WDP		
	9	406	Kab. Sigi	1	WTP DPP		
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP		
	11	408	Kab. Toli-Toli	1	WDP		
	12	409	Kota Palu	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
26	Prov. Sulawesi Selatan					
	LKPD		23		2	
1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP		
2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP		
3	412	Kab. Barru	1	WDP		
4	413	Kab. Bone	1	WDP		
5	414	Kab. Bulukumba	1	WDP		
6	415	Kab. Enrekang	1	WDP		
7	416	Kab. Gowa	1	WTP		
8	417	Kab. Jeneponto	1	TMP		
9	418	Kab. Kep. Selayar	1	TMP		
10	419	Kab. Luwu	1	WDP		
11	420	Kab. Luwu Timur	1	WTP		
12	421	Kab. Luwu Utara	1	WDP		
13	422	Kab. Maros	1	WDP		
14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP		
15	424	Kab. Pinrang	1	WDP		
16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP		
17	426	Kab. Sinjai	1	WDP		
18	427	Kab. Soppeng	1	WDP		
19	428	Kab. Takalar			1	TMP
20	429	Kab. Tana Toraja	1	TMP		
21	430	Kab. Toraja Utara	1	WDP		
22	431	Kab. Wajo	1	WDP		
23	432	Kota Makassar	1	WDP		
24	433	Kota Palopo	1	TMP		
25	434	Kota Pare-Pare			1	TMP
27	Prov. Sulawesi Tenggara					
	LKPD		12		1	
1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP		
2	436	Kab. Bombana	1	TMP		
3	437	Kab. Buton	1	WDP		
4	438	Kab. Buton Utara	1	TMP		
5	439	Kab. Kolaka	1	WDP		
6	440	Kab. Kolaka Utara	1	WDP		
7	441	Kab. Konawe	1	WDP		
8	442	Kab. Konawe Selatan	1	WDP		
9	443	Kab. Konawe Utara			1	TMP
10	444	Kab. Muna	1	WDP		
11	445	Kab. Wakatobi	1	WDP		
12	446	Kota Baubau	1	WDP		
13	447	Kota Kendari	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
28	Prov. Gorontalo						
	LKPD			7		0	
1	448	Prov. Gorontalo		1	WDP		
2	449	Kab. Boalemo		1	WDP		
3	450	Kab. Bone Bolango		1	WDP		
4	451	Kab. Gorontalo		1	WDP		
5	452	Kab. Gorontalo Utara		1	WDP		
6	453	Kab. Pohuwato		1	WDP		
7	454	Kota Gorontalo		1	WDP		
29	Prov. Sulawesi Barat						
	LKPD			4		2	
1	455	Prov. Sulawesi Barat		1	WDP		
2	456	Kab. Majene		1	WDP		
3	457	Kab. Mamasa				1	WDP
4	458	Kab. Mamuju		1	WDP		
5	459	Kab. Mamuju Utara		1	WDP		
6	460	Kab. Polewali Mandar				1	WDP
30	Prov. Maluku						
	LKPD			1		9	
1	461	Prov. Maluku				1	TMP
2	462	Kab. Buru				1	TMP
3	463	Kab. Buru Selatan					*
4	464	Kab. Kepulauan Aru				1	TMP
5	465	Kab. Maluku Barat Daya				1	TMP
6	466	Kab. Maluku Tengah				1	TMP
7	467	Kab. Maluku Tenggara				1	WDP
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat		1	TMP		
9	469	Kab. Seram Bagian Barat					*
10	470	Kab. Seram Bagian Timur				1	TMP
11	471	Kota Ambon				1	TMP
12	472	Kota Tual				1	TMP
31	Prov. Maluku Utara						
	LKPD			6		4	
1	473	Prov. Maluku Utara		1	TMP		
2	474	Kab. Halmahera Barat		1	TMP		
3	475	Kab. Halmahera Selatan		1	WDP		
4	476	Kab. Halmahera Tengah		1	TMP		
5	477	Kab. Halmahera Timur				1	TMP
6	478	Kab. Halmahera Utara		1	TMP		
7	479	Kab. Kepulauan Sula				1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
8	480	Kab. Pulau Morotai			1	TMP
9	481	Kota Ternate			1	WDP
10	482	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP		
32	Prov. Papua					
	LKPD		12		16	
1	483	Prov. Papua	1	TMP		
2	484	Kab. Asmat	1	WDP		
3	485	Kab. Biak Numfor	1	TMP		
4	486	Kab. Boven Digoel			1	TMP
5	487	Kab. Deiyai			1	TMP
6	488	Kab. Dogiyai			1	TMP
7	489	Kab. Intan Jaya			1	TMP
8	490	Kab. Jayapura	1	WDP		
9	491	Kab. Jayawijaya	1	WDP		
10	492	Kab. Keerom			1	TMP
11	493	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP		
12	494	Kab. Lanny Jaya			1	TMP
13	495	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP
14	496	Kab. Mamberamo Tengah				*
15	497	Kab. Mappi	1	TMP		
16	498	Kab. Merauke			1	TMP
17	499	Kab. Mimika	1	WDP		
18	500	Kab. Nabire			1	TW
19	501	Kab. Nduga			1	TMP
20	502	Kab. Paniai	1	TMP		
21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	TW		
22	504	Kab. Puncak			1	TMP
23	505	Kab. Puncak Jaya	1	WDP		
24	506	Kab. Sarmi			1	TMP
25	507	Kab. Supiori			1	TMP
26	508	Kab. Tolikara			1	TMP
27	509	Kab. Waropen				*
28	510	Kab. Yahukimo			1	TMP
29	511	Kab. Yalimo			1	TMP
30	512	Kota Jayapura	1	WDP		
33	Prov. Papua Barat					
	LKPD		5		7	
1	513	Prov. Papua Barat			1	TMP
2	514	Kab. Fakfak			1	TMP
3	515	Kab. Kaimana	1	TMP		
4	516	Kab. Manokwari			1	TMP
5	517	Kab. Maybrat			1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012		Dilaporkan pada IHPS II Tahun 2012	
6	518	Kab. Raja Ampat	1	TMP			
7	519	Kab. Sorong	1	TMP			
8	520	Kab. Sorong Selatan	1	WDP			
9	521	Kab. Tambrauw			1	TMP	
10	522	Kab. Teluk Bintuni			1	WDP	
11	523	Kab. Teluk Wondama			1	TMP	
12	524	Kota Sorong	1	TMP			
		Jumlah	426		94		

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)TW : Tidak Wajar (*adverse opinion*)TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Dalam proses penyusunan laporan

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2007 s.d. 2011**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		22		24		24		24		24	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
20	20	Kota Banda Aceh	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
24	24	Kota Subulussalam			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		27		27		29		34		34	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	28	Kab. Dairi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	31	Kab. Karo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan							1	WDP	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara							1	TMP	1	TMP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat							1	TMP	1	TMP
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	40	Kab. Nias Utara							1	TMP	1	TMP
17	41	Kab. Padang Lawas					1	TMP	1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 3 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5 Prov. Jambi												
	LKPD			11		11		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh					1	WTP	1	WDP	1	WDP
	6 Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			15		16		16		16		16	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP
	3	106	Kab. Empat Lawang			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7 Prov. Bengkulu												
	LKPD			10		10		11		11		11	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	126	Kab. Lebong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

Halaman 4 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
8	Prov. Lampung												
	LKPD		11		11		12		15		15		
	1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	137	Kab. Mesuji							1	WDP	1	TMP
	8	138	Kab. Pesawaran					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pringsewu							1	TMP	1	WDP
	10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat							1	WDP	1	WTP
	13	143	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	15	145	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD		8		8		8		8		8		
	1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	147	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	151	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	153	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD		7		7		8		8		8		
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	155	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas					1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	158	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	159	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	160	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD		1		1		1		1		1		
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD		26		27		27		27		27		
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	165	Kab. Bandung Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 5 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
6	168	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	169	Kab. Cianjur	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	170	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	171	Kab. Garut	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	172	Kab. Indramayu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	173	Kab. Karawang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	174	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	175	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	177	Kab. Subang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	179	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	181	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
20	182	Kota Banjar	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
21	183	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
22	184	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	185	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	186	Kota Cirebon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	187	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	189	Kota Tasikmalaya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13 Prov. Jawa Tengah												
	LKPD		36		36		36		36		36	
1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	192	Kab. Banyumas	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	193	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	194	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	195	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	196	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	198	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	200	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	202	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	203	Kab. Kendal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	204	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	205	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	206	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	207	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	209	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	211	Kab. Purworejo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	212	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	213	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
25	214	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	215	Kab. Sukoharjo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	27	216	Kab. Tegal	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	224	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	36	225	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	227	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	230	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	231	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	232	Prov. Jawa Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	233	Kab. Bangkalan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	234	Kab. Banyuwangi	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	235	Kab. Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	236	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	237	Kab. Bondowoso	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	238	Kab. Gresik	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	239	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	240	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	241	Kab. Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	242	Kab. Lamongan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	243	Kab. Lumajang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	244	Kab. Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	245	Kab. Magetan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	246	Kab. Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	247	Kab. Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	248	Kab. Nganjuk	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	249	Kab. Ngawi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	250	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	20	251	Kab. Pamekasan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	21	252	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	253	Kab. Ponorogo	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	254	Kab. Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	255	Kab. Sampang	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	256	Kab. Sidoarjo	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	26	257	Kab. Situbondo	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	258	Kab. Sumenep	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	259	Kab. Trenggalek	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	260	Kab. Tuban	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP

Halaman 7 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	30	261	Kab. Tulungagung	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	31	262	Kota Batu	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	32	263	Kota Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	33	264	Kota Kediri	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	265	Kota Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	266	Kota Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	36	267	Kota Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	37	268	Kota Pasuruan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	269	Kota Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	39	270	Kota Surabaya	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	16	Prov. Banten											
		LKPD		7		8		9		9		9	
	1	271	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	272	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	273	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	274	Kab. Serang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	275	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	276	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	277	Kota Serang			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	278	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	279	Kota Tangerang Selatan					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	Prov. Bali											
		LKPD		10		10		10		10		10	
	1	280	Prov. Bali	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	281	Kab. Badung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	282	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	283	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	284	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	285	Kab. Jembrana	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	286	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	287	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	288	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	289	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	Prov. Nusa Tenggara Barat											
		LKPD		10		10		11		11		11	
	1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP
	2	291	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	292	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	293	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	296	Kab. Lombok Utara					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	297	Kab. Sumbawa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	298	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	299	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	300	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 8 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD		17		20		21		22		22		
	1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	302	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	303	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	304	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	306	Kab. Kupang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	307	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	308	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	309	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	310	Kab. Manggarai Timur					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	311	Kab. Nagekeo			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	312	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	13	313	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	314	Kab. Sabu Raijua						1	WDP	1	WDP	
	15	315	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	16	316	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	17	317	Kab. Sumba Barat Daya			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	18	318	Kab. Sumba Tengah			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	19	319	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	22	322	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD		13		14		15		15		15		
	1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	324	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	326	Kab. Kayong Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	327	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	328	Kab. Kubu Raya					1	TW	1	TW	1	WDP
	7	329	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	330	Kab. Melawi	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW
	9	331	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	332	Kab. Sambas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	333	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	334	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	335	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	336	Kota Pontianak	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	337	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD		15		15		15		15		15		
	1	338	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	2	339	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
	3	340	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	4	341	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
	5	342	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	343	Kab. Kapuas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 9 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
7	344	Kab. Katingan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
8	345	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
9	346	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
10	347	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
11	348	Kab. Murung Raya	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
12	349	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW
13	350	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	351	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
15	352	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
22 Prov. Kalimantan Selatan												
LKPD			14		14		14		14		14	
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	354	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	355	Kab. Banjar	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
4	356	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	360	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	361	Kab. Tabalong	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
10	362	Kab. Tanah Bumbu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	363	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	364	Kab. Tapin	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	365	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23 Prov. Kalimantan Timur												
LKPD			14		14		15		15		15	
1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
2	368	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
3	369	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
4	370	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
5	371	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
6	372	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW
7	373	Kab. Malinau	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP
8	374	Kab. Nunukan	1	TW	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
9	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
11	377	Kab. Tana Tidung					1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	378	Kota Balikpapan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	379	Kota Bontang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	380	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
15	381	Kota Tarakan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24 Prov. Sulawesi Utara												
LKPD			10		14		16		16		16	
1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan					1	WDP	1	TMP	1	TMP
4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur					1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
	9	390	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	13	394	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	14	395	Kota Kotamobagu			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW
	15	396	Kota Manado	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW
	16	397	Kota Tomohon	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
	25	Prov. Sulawesi Tengah											
		LKPD		11		11		12		12		12	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	399	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	401	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	402	Kab. Donggala	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	403	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	404	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	405	Kab. Poso	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	406	Kab. Sigi					1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	408	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	409	Kota Palu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	26	Prov. Sulawesi Selatan											
		LKPD		24		24		25		25		25	
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	412	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	413	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	414	Kab. Bulukumba	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	415	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	416	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	417	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	418	Kab. Kep. Selayar	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	10	419	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	420	Kab. Luwu Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	421	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	13	422	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	424	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	426	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	427	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	428	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	20	429	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	21	430	Kab. Toraja Utara					1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 11 - Lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	22	431	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	432	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	433	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	434	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	27	Prov. Sulawesi Tenggara											
		LKPD		11		13		13		13		13	
	1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	436	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	437	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	4	438	Kab. Buton Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	439	Kab. Kolaka	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	440	Kab. Kolaka Utara	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	441	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	442	Kab. Konawe Selatan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	443	Kab. Konawe Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	444	Kab. Muna	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	445	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	446	Kota Baubau	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	13	447	Kota Kendari	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	Prov. Gorontalo											
		LKPD		7		7		7		7		7	
	1	448	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	449	Kab. Boalemo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	451	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	452	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	454	Kota Gorontalo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	Prov. Sulawesi Barat											
		LKPD		6		6		6		6		6	
	1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	456	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	457	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	458	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	460	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	Prov. Maluku											
		LKPD		9		9		12		12		10	
	1	461	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	2	462	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	463	Kab. Buru Selatan					1	TMP	1	TMP		**
	4	464	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	465	Kab. Maluku Barat Daya					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	466	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	467	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	469	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		
	10	470	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	471	Kota Ambon	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	12	472	Kota Tual					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	31	Prov. Maluku Utara											
		LKPD		9		9		9		10		10	
	1	473	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	2	474	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	3	475	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	4	476	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	5	477	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	6	478	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	7	479	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	8	480	Kab. Pulau Morotai							1	TMP	1	TMP
	9	481	Kota Ternate	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	10	482	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	Prov. Papua											
		LKPD		21		22		23		28		28	
	1	483	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	484	Kab. Asmat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	485	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	4	486	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	487	Kab. Deiyai									1	TMP
	6	488	Kab. Dogiyai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	489	Kab. Intan Jaya									1	TMP
	8	490	Kab. Jayapura	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	491	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	492	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	493	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	494	Kab. Lanny Jaya							1	TMP	1	TMP
	13	495	Kab. Mamberamo Raya					1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	496	Kab. Mamberamo Tengah							1	TMP*		**
	15	497	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	498	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	17	499	Kab. Mimika	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	500	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	19	501	Kab. Nduga							1	TMP	1	TMP
	20	502	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	22	504	Kab. Puncak							1	TMP*	1	TMP
	23	505	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	24	506	Kab. Sarmi	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	507	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	26	508	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	27	509	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		**
	28	510	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	29	511	Kab. Yalimo							1	TMP	1	TMP
	30	512	Kota Jayapura	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
33	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		10		12		12	
	1	513 Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	2	514 Kab. Fakfak	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	515 Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	4	516 Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	517 Kab. Maybrat							1	TMP	1	TMP
	6	518 Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	7	519 Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	520 Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	521 Kab. Tambrau							1	TMP	1	TMP
	10	522 Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	523 Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	12	524 Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
		Jumlah	469		485		504		522		520	

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)TW : Tidak Wajar (*adverse opinion*)TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Pemeriksaan LKPD Tahun 2010 yaitu Kab. Mamberamo Tengah dan Kab. Puncak dilakukan pada Semester II Tahun 2012

** : Dalam proses penyusunan laporan

Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Tingkat Pemerintahan		Total
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	38	548	586
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18	278	296
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	13	224	237
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	1	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	6	43	49
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	2	3
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	36	397	433
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12	146	158
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	5	53	58
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	108	116
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	20	24
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	50	56
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	12	13
7	Lain-lain	-	8	8
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	268	287
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	170	177
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11	71	82
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	19	20
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	8	8
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		93	1.213	1.306

Halaman 1 - Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	35	73.863,88	526	311.123,12	561	384.987,00
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2	2.970,58	29	27.312,34	31	30.282,92
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	29	38.358,79	29	38.358,79
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	8	4.012,38	8	4.012,38
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	9	4.478,96	91	49.078,72	100	53.557,68
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5	2.170,61	71	29.252,15	76	31.422,76
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2	611,06	24	25.140,23	26	25.751,29
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	39	9.301,65	39	9.301,65
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	1.073,08	42	12.997,44	45	14.070,52
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	4	17.236,65	31	13.372,95	35	30.609,60
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	868,57	13	3.512,13	15	4.380,70
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	293,29	99	43.311,14	104	43.604,43
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	1	950,00	1	950,00
13	Lain-lain	3	44.161,08	49	54.523,20	52	98.684,28
II	Potensi Kerugian Daerah	6	32.743,12	86	258.798,07	92	291.541,19
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	18	90.891,06	18	90.891,06
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	1	12,43	1	12,43
3	Aset dikuasai pihak lain	1	839,40	23	46.398,50	24	47.237,90
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	12	52.847,17	12	52.847,17
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	2	24,64	2	24,64
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	-	-	1	-	1	-
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	5.281,11	17	36.766,52	20	42.047,63
8	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	3	6.710,28	3	6.710,28
9	Lain-lain	2	26.622,61	9	25.147,47	11	51.770,08
III	Kekurangan Penerimaan	19	9.357,10	265	118.982,27	284	128.339,37
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan	12	5.262,17	118	46.268,00	130	51.530,17
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan	4	1.116,64	124	65.416,74	128	66.533,38
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	2	2.906,69	13	3.153,96	15	6.060,65
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	-	-	1	203,28	1	203,28
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	71,60	3	408,31	4	479,91
6	Lain-lain	-	-	6	3.531,98	6	3.531,98
IV	Administrasi	43	-	608	-	651	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3	-	26	-	29	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	13	-	235	-	248	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	9	-	10	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1	-	30	-	31	-

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	1	-	1	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	-	-	8	-	8	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	8	-	78	-	86	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	-	25	-	29	-
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-	-	2	-	2	-
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	-	32	-	37	-
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	3	-	23	-	26	-
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	1	-	48	-	49	-
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	24	-	24	-
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-	51	-	53	-
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2	-	6	-	8	-
16	Lain-lain	-	-	10	-	10	-
V	Ketidakhematan	4	5.680,78	67	44.469,67	71	50.150,45
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	2	1.330,28	2	1.330,28
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4	5.680,78	63	41.917,13	67	47.597,91
3	Lain-lain	-	-	2	1.222,26	2	1.222,26
VI	Ketidakefektifan	9	3.981,68	99	279.345,14	108	283.326,82
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	4	1.407,74	65	215.314,96	69	216.722,70
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-	2	154,57	3	154,57
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	2.573,94	19	63.250,46	23	65.824,40
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	625,15	4	625,15
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	1	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	7	-	7	-
	Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	116	125.626,56	1.651	1.012.718,27	1.767	1.138.344,83

Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Prov. Aceh	103	37	35	31	81	52.248,19	22	40.934,31	5	1.126,63	12	1.782,01	30	3.677,39	9	4.727,77	-	-	-	-	-	-
1	1 Prov. Aceh	28	10	9	9	24	41.519,28	9	37.571,81	1	44,42	3	186,66	6	1.766,56	4	1.949,80	-	-	-	-	-	-
2	2 Kab. Aceh Barat Daya	24	6	10	8	19	6.725,47	3	1.842,06	1	0,12	3	346,87	7	1.910,83	3	2.625,57	-	-	-	-	-	-
3	3 Kab. Bireuen	22	12	5	5	19	2.519,55	8	1.428,07	-	-	3	939,06	7	-	1	152,40	-	-	-	-	-	-
4	4 Kab. Pidie	20	7	7	6	9	413,39	2	92,37	1	18,96	1	302,05	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	5 Kab. Simeulue	9	2	4	3	10	1.070,50	-	-	2	1.063,13	2	7,37	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prov. Sumatera Utara	95	45	33	17	158	47.554,06	57	21.587,07	10	9.377,87	23	4.455,59	55	1.320,76	7	10.812,54	6	441,70	2	51,21	-	-
1	6 Kab. Batubara	10	5	5	-	14	10.431,76	7	1.603,52	1	150,06	2	442,54	3	-	1	8.235,62	-	-	-	-	-	-
2	7 Kab. Karo	7	3	4	-	17	2.066,69	7	266,38	2	950,61	2	849,67	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8 Kab. Langkat	11	5	3	3	14	2.039,15	5	1.062,31	-	-	3	193,33	5	1	783,50	-	-	1	41,00	2	51,21	
4	9 Kab. Nias	14	7	3	4	17	8.362,70	5	892,26	2	6.000,00	1	403,13	4	3	241,06	2	826,22	-	-	-	-	-
5	10 Kab. Nias Barat	8	3	4	1	16	2.877,84	6	926,37	-	-	3	700,75	5	-	2	1.250,70	2	79,27	-	-	-	-
6	11 Kab. Nias Selatan	7	4	3	-	12	4.600,70	3	3.991,60	1	45,00	3	358,60	4	1	205,48	-	-	-	-	-	-	-
7	12 Kab. Nias Utara	8	5	2	1	16	2.615,49	7	2.115,48	-	-	-	-	7	-	2	500,00	-	-	-	-	-	-
8	13 Kab. Padang Lawas	12	6	4	2	23	10.613,89	10	7.869,25	3	1.964,20	4	689,67	5	1	90,72	-	-	2	139,04	-	-	-
9	14 Kab. Padang Lawas Utara	12	6	3	3	17	2.386,95	4	2.115,29	-	-	3	271,63	10	-	-	-	1	182,39	-	-	-	-
10	15 Kota Gunung Sitoli	6	1	2	3	12	1.558,89	3	744,61	1	268,00	2	546,27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kedakiaptuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai perubahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibudayakan/jut dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Stuktur Organisasi dan Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendatkematan		Ketida lefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
3	Prov. Sumatera Barat	14	9	-	5	28	13.070,90	12	827,15	1	-	5	12.118,68	6	1	52,53	3	72,49	1	20,00	1	18,35			
1	Kab. Solok Selatan	14	9	-	5	28	13.070,90	12	827,15	1	-	5	12.118,68	6	1	52,53	3	72,49	1	20,00	1	18,35			
4	Prov. Riau	21	6	11	4	46	28.311,24	18	5.737,64	3	7.266,09	7	9.479,28	13	3	307,16	2	5.521,01	2	69,18	1	38,79			
1	Kab. Indragiri Hilir	10	3	7	-	23	23.995,77	8	4.724,95	3	7.266,09	5	6.775,64	5	1	123,50	1	5.105,55	-	-	-	1	38,79		
2	Kab. Kepulauan Meranti	11	3	4	4	23	4.315,47	10	1.012,69	-	-	2	2.703,64	8	2	183,66	1	415,46	2	69,18	-	-			
5	Prov. Jambi	21	10	8	3	22	5.910,91	6	2.074,02	2	2.390,25	3	1.310,11	10	-	-	-	136,50	-	-	1	4,48			
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	21	10	8	3	22	5.910,91	6	2.074,02	2	2.390,25	3	1.310,11	10	-	-	-	136,50	-	-	1	4,48			
6	Prov. Nusa Tenggara Barat	6	3	3	-	21	1.614,60	6	1.366,77	1	132,36	3	115,45	11	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-		
1	Kab. Bima	6	3	3	-	21	1.614,60	6	1.366,77	1	132,36	3	115,45	11	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-		
7	Prov. Nusa Tenggara Timur	130	50	37	43	208	62.651,86	48	27.032,52	14	11.678,24	48	8.763,19	76	7	2.771,92	15	12.405,68	6	578,37	8	387,17			
1	Kab. Ende	10	4	4	2	16	2.334,81	3	1.130,45	-	-	4	578,14	7	2	626,20	-	-	1	68,08	1	48,83			
2	Kab. Kupang	13	6	3	4	13	1.995,75	4	1.209,74	2	640,97	2	145,03	5	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Lembata	7	2	4	1	13	2.548,67	4	2.043,21	1	287,98	3	217,45	4	-	-	-	-	-	-	-	1	32,14		
4	Kab. Manggarai	6	3	2	1	19	2.320,17	2	334,07	3	449,40	7	1.440,67	6	1	96,00	-	-	2	328,61	4	209,09			
5	Kab. Manggarai Barat	6	3	-	3	18	3.948,14	8	1.597,55	2	1.135,12	1	907,68	6	-	-	-	-	1	151,72	2	-			
6	Kab. Manggarai Timur	9	3	2	4	14	2.168,01	2	54,78	2	825,72	2	1.153,25	6	1	72,00	1	62,25	-	-	-	-			
7	Kab. Ngada	13	4	5	4	22	21.571,43	4	18.073,46	1	103,99	5	369,41	9	1	1.815,34	2	1.209,19	-	-	-	-			

Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	Kab. Rote Ndao	21	7	5	9	24	14.744,93	3	401,83	1	4.295,19	4	361,91	11	-	5	9.685,97	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Sabu Raijua	8	3	2	3	12	1.430,89	4	494,87	-	-	2	749,79	4	-	2	186,20	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Sikka	9	2	3	4	11	1.996,41	-	-	-	-	7	1.996,41	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Sumba Barat	10	3	4	3	16	2.195,06	6	379,96	1	1.373,12	4	351,59	4	1	90,38	-	-	1	29,96	2	97,11	-
12	Kab. Sumba Timur	11	5	3	3	14	977,25	4	79,33	-	-	1	26,14	7	1	72,00	1	799,75	-	-	-	-	-
13	Kab. Timor Tengah Selatan	7	5	-	2	16	4.420,34	4	1.233,27	1	2.566,75	6	465,72	4	-	-	1	154,57	-	-	-	-	-
8	Prov. Kalimantan Tengah	94	44	37	13	113	81.002,31	38	17.470,41	6	48.943,11	12	1.846,88	42	5	4.943,59	10	7.798,18	12	551,53	2	17,75	-
1	Prov. Kalimantan Tengah	10	6	4	-	18	2.170,42	7	373,94	1	839,40	5	957,04	4	1	-	-	-	4	303,69	1	4,43	-
2	Kab. Barito Timur	20	6	9	5	26	8.295,37	11	2.569,70	1	-	2	263,53	8	2	4.625,28	2	836,84	2	85,46	-	-	-
3	Kab. Barito Utara	14	6	7	1	21	5.636,25	9	1.086,98	1	-	2	44,76	6	1	295,50	2	4.208,97	4	152,24	1	13,32	-
4	Kab. Katingan	11	9	2	-	15	51.317,41	4	878,99	1	48.079,07	1	161,36	7	-	-	2	2.197,97	2	10,14	-	-	-
5	Kab. Seruyan	25	14	10	1	19	13.217,28	3	12.272,43	2	24,64	2	420,19	11	-	-	1	500,00	-	-	-	-	-
6	Kab. Sukamara	14	3	5	6	14	365,58	4	288,37	-	-	-	-	6	1	22,81	3	54,40	-	-	-	-	-
9	Prov. Kalimantan Selatan	44	12	21	11	51	18.015,18	13	3.505,20	2	487,65	12	8.288,52	21	-	-	3	5.733,74	1	80,62	-	-	-
1	Kab. Banjar	17	4	9	4	13	633,99	2	161,21	1	156,75	4	316,02	6	-	-	-	-	1	80,62	-	-	-
2	Kab. Kolabaru	11	4	5	2	13	3.295,73	5	1.878,77	-	-	3	1.329,52	4	-	-	1	87,42	-	-	-	-	-
3	Kab. Tabalong	10	2	4	4	17	7.533,61	4	1.408,16	1	330,90	3	559,45	8	-	-	1	5.235,07	-	-	-	-	-
4	Kota Banjarbaru	6	2	3	1	8	6.551,85	2	57,06	-	-	2	6.083,53	3	-	-	1	411,25	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kedaikepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibudayakan/jut dalam proses pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10	Prov. Kalimantan Timur	101	37	43	21	109	93.106,78	23	35.405,08	8	30.944,92	17	6.597,98	53	14.173,38	3	5.985,28	2	440,12	3	2.167,14		
1	44 Prov. Kalimantan Timur	16	4	8	4	20	49.153,07	5	17.504,25	1	26.556,88	2	3.277,69	11	1.814,22	-	-	-	1	389,61	1	2.034,70	
2	45 Kab. Bulungan	10	5	4	1	12	814,11	1	447,68	2	289,19	2	77,23	7	-	-	-	-	-	-	1	69,81	
3	46 Kab. Kutai Kartanegara	25	6	8	11	18	24.437,40	3	5.469,54	1	2.228,20	2	907,08	9	12.165,78	1	3.666,78	1	50,51	-	-	-	
4	47 Kab. Kutai Timur	9	5	4	-	11	10.780,98	1	6.619,31	1	1.242,86	3	618,77	5	-	-	2.300,00	-	-	1	62,63		
5	48 Kab. Malinau	13	4	7	2	15	4.397,33	6	3.609,68	1	1,62	3	786,02	5	-	-	-	-	-	-	-		
6	49 Kab. Tana Tidung	11	4	5	2	17	2.355,40	7	1.754,62	-	-	1	407,37	7	193,38	-	-	-	-	-	-		
7	50 Kota Samarinda	17	9	7	1	16	1.168,49	-	-	2	626,17	4	523,82	9	-	-	18,50	-	-	-	-		
11	Prov. Sulawesi Utara	49	12	27	10	113	112.781,46	47	11.837,40	5	1.802,37	15	5.757,65	26	8.638,32	9	84.745,57	3	89,34	3	337,46		
1	51 Kab. Minahasa Tenggara	21	6	8	7	41	13.044,08	20	6.339,54	3	292,66	6	1.455,36	8	2.766,30	1	2.190,16	1	5,10	2	329,24		
2	52 Kab. Minahasa Utara	16	3	10	3	35	11.711,57	8	971,49	1	72,96	5	3.664,97	9	5.808,79	5	1.193,32	-	-	-	-		
3	53 Kota Manado	12	3	9	-	37	88.025,81	19	4.526,37	1	1.436,75	4	637,32	9	63,23	3	81.362,09	2	84,24	1	8,22		
12	Prov. Sulawesi Selatan	32	16	8	8	24	26.893,45	4	920,13	-	-	5	1.815,23	8	699,34	5	23.458,71	2	221,15	1	3,45		
1	54 Kab. Takalar	14	7	4	3	12	2.729,28	3	913,19	-	-	2	1.305,31	5	510,76	1	-	2	221,15	-	-		
2	55 Kota Pare-Pare	18	9	4	5	12	24.164,17	1	6,94	-	-	3	509,92	3	188,58	4	23.458,71	-	-	1	3,45		
13	Prov. Sulawesi Tenggara	11	9	2	-	19	5.944,77	10	3.157,49	-	-	3	956,48	3	1.830,77	-	-	1	75,00	-	-		
1	56 Kab. Konawe Utara	11	9	2	-	19	5.944,77	10	3.157,49	-	-	3	956,48	3	1.830,77	-	-	1	75,00	-	-		

Halaman 5 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksihan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penertamaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
14	Prov. Sulawesi Barat	25	15	9	1	57	55.741,22	19	2.947,26	2	232,00	12	6.109,32	17	3	1.280,63	4	45.171,93	2	51,09	3	38,75				
1	57 Kab. Mamasa	13	10	3	-	29	37.624,96	10	1.935,51	2	232,00	5	2.230,89	8	2	446,08	2	32.780,44	-	-	-	-				
2	58 Kab. Polewali Mandar	12	5	6	1	28	18.116,26	9	1.011,75	-	-	7	3.878,43	9	1	834,55	2	12.391,49	2	51,09	3	38,75				
15	Prov. Maluku	209	116	59	34	237	134.893,19	67	63.859,20	13	28.928,47	39	29.783,19	97	5	4.402,44	16	7.919,64	3	116,66	2	428,72				
1	59 Prov. Maluku	31	16	12	3	40	26.515,27	9	12.433,26	3	5.302,42	7	4.647,65	15	1	2.100,00	5	2.031,88	-	-	-	-				
2	60 Kab. Buru	18	12	2	4	18	7.182,43	5	906,63	1	1.669,11	4	4.606,68	8	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	61 Kab. Kepulauan Aru	21	15	5	1	24	21.613,36	10	15.372,59	2	444,11	4	3.483,01	5	2	2.182,07	1	131,55	-	-	-	-				
4	62 Kab. Maluku Barat Daya	19	15	4	-	12	4.392,88	2	848,46	-	-	3	3.544,41	7	-	-	-	-	2	16,66	2	428,72				
5	63 Kab. Maluku Tengah	18	11	6	1	19	22.732,49	6	9.182,35	2	13.243,29	1	306,83	7	1	-	-	-	-	-	-	-				
6	64 Kab. Maluku Tenggara	24	10	6	8	29	11.413,67	9	1.172,45	4	7.990,10	5	752,62	8	-	-	-	3	1.498,46	-	-	-				
7	65 Kab. Seram Bagian Timur	27	10	9	8	38	18.606,00	12	8.566,15	-	-	6	9.919,44	17	1	120,37	2	-	-	-	-	-				
8	66 Kota Ambon	27	17	7	3	21	4.425,21	2	864,34	1	279,44	1	318,47	15	-	-	2	2.962,95	1	100,00	-	-				
9	67 Kota Tual	24	10	8	6	36	18.011,88	12	14.512,97	-	-	8	2.204,08	15	-	-	1	1.294,80	-	-	-	-				
16	Prov. Maluku Utara	99	44	21	34	89	20.621,12	22	6.655,74	1	277,88	16	4.400,27	39	8	2.821,69	3	6.465,44	4	364,42	2	153,88				
1	68 Kab. Halmahera Timur	31	8	10	13	27	1.279,94	8	690,49	-	-	8	589,43	11	-	-	-	-	4	364,42	2	153,88				
2	69 Kab. Kepulauan Sula	25	13	3	9	21	5.215,28	5	3.225,46	1	277,88	2	179,80	8	5	1.532,12	-	-	-	-	-	-				
3	70 Kab. Pulau Morotai	21	12	1	8	17	11.040,54	4	1.643,42	-	-	4	3.415,06	6	1	115,00	2	5.867,04	-	-	-	-				
4	71 Kota Ternate	22	11	7	4	24	3.085,36	5	1.096,37	-	-	2	215,98	14	2	1.174,57	1	598,40	-	-	-	-				

Halaman 6 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kedakiaptuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penjabaran aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibudayakan/diikuti dalam proses pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Total	Kelemahan Daerah		Potensi Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Keddakhematan		Ketidakefektifan		Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
17	Prov. Papua	182	90	53	39	279	337.130,63	100	105.576,28	14	144.487,66	34	21.374,96	107	2.836,04	17	62.255,34	4	4.186,15	4	4.186,15	2	17,77
1	72 Kab. Boven Digoel	14	8	5	1	17	2.637,10	6	408,76	1	598,26	1	7,21	7	72,84	1	1.550,00	-	-	-	-	-	-
2	73 Kab. Deiyai	10	6	3	1	12	32.864,22	4	26.551,58	-	-	2	620,13	5	-	1	5.692,48	-	-	-	-	-	-
3	74 Kab. Dogiyai	4	3	1	-	23	19.704,05	7	4.876,09	-	-	2	1.579,61	9	-	5	13.248,31	1	87,36	-	-	-	-
4	75 Kab. Intan Jaya	10	5	2	3	11	23.052,28	5	5.019,01	-	-	-	-	5	-	1	18.033,25	-	-	-	-	-	-
5	76 Kab. Keerom	8	3	5	-	17	2.175,31	4	1.781,30	-	-	3	393,99	10	-	-	-	-	-	-	-	1	11,84
6	77 Kab. Lanny Jaya	21	7	7	7	29	13.688,70	13	9.291,08	-	-	3	1.231,26	9	609,34	1	2.557,00	-	-	-	-	-	-
7	78 Kab. Mamberamo Raya	9	8	1	-	21	10.280,78	7	3.498,11	1	5.151,75	4	1.186,69	8	-	1	444,20	-	-	-	-	-	-
8	79 Kab. Merauke	12	5	5	2	20	46.350,11	3	2.071,65	2	36.676,20	5	6.625,91	9	976,32	-	-	-	-	-	-	1	5,93
9	80 Kab. Nabire	11	7	3	1	15	25.558,36	6	818,47	1	17.405,24	2	1.585,75	4	1.177,54	1	4.571,33	2	98,79	-	-	-	-
10	81 Kab. Nduga	17	7	5	5	32	115.068,74	8	24.926,42	3	78.644,07	3	5.187,23	14	-	3	6.311,00	-	-	-	-	-	-
11	82 Kab. Puncak	7	3	1	3	13	4.951,95	1	148,12	3	4.733,25	1	70,57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	83 Kab. Sarmi	11	4	3	4	11	5.773,71	6	5.556,36	1	-	1	217,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	84 Kab. Supiori	13	9	1	3	22	8.370,58	14	6.960,76	-	-	4	1.409,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	85 Kab. Tolikara	7	4	2	1	12	12.615,91	6	2.785,33	1	1.278,89	1	122,19	3	-	1	8.429,47	-	-	-	-	-	-
15	86 Kab. Yahukimo	12	5	5	2	11	10.526,04	5	9.855,85	1	-	1	670,18	3	-	1	-	1	4.000,00	-	-	-	-
16	87 Kab. Yalimo	16	6	4	6	13	3.512,79	5	1.027,39	-	-	1	1.067,09	6	-	1	1.418,30	-	-	-	-	-	-
18	Prov. Papua Barat	70	31	26	13	112	40.855,24	49	34.093,33	5	3.465,69	18	2.784,58	37	394,49	1	117,00	8	438,28	1	38,17	-	-
1	88 Prov. Papua Barat	8	2	3	3	14	6.268,70	5	5.980,62	-	-	2	288,06	7	-	-	-	1	31,50	-	-	-	-
2	89 Kab. Fakfak	8	7	1	-	17	7.660,68	7	4.869,79	1	2.779,11	1	11,75	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kelemahan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3	Kab. Manokwari	16	6	7	3	16	12.303,26	8	11.281,05	-	-	5	1.022,19	3	-	-	-	-	-	-	-	1	38,17
4	Kab. Maybrat	12	4	6	2	20	7.591,08	10	6.888,30	2	432,51	3	270,25	5	-	-	-	-	1	21,68	-	-	-
5	Kab. Tambora	9	4	3	2	15	2.677,56	7	1.915,38	1	176,07	2	191,59	4	1	394,49	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Teluk Bintuni	8	4	2	2	17	3.191,13	7	2.511,66	1	78,00	3	484,46	5	-	-	1	117,00	5	324,38	-	-	-
7	Kab. Teluk Wondama	9	4	4	1	13	1.162,83	5	646,53	-	-	2	516,28	5	1	-	-	-	1	60,72	-	-	-
	Jumlah	1.306	586	433	287	1.767	1.138.344,83	561	384.987,00	92	291.541,19	284	128.339,37	651	71	50.150,45	108	283.326,82	58	7.773,61	32	3.703,09	
	Jumlah Provinsi	93	38	36	19	116	125.626,56	35	73.863,88	6	32.743,12	19	9.357,10	43	4	5.680,78	9	3.981,68	6	724,80	2	2.039,13	
	Jumlah Kabupaten/Kota	1.213	548	397	268	1.651	1.012.718,27	526	311.123,12	86	258.798,07	265	118.982,27	608	67	44.469,67	99	279.345,14	52	7.048,81	30	1.663,96	

Lampiran 9

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	27
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	19
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	32
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	14
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	22
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		106

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	6	627,61
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	1	300,00
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	15,73
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	290,66
4	Lain-lain	1	21,22
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	11	4.160,64
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	4,45
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	23,10
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	8	4.056,59
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	76,50
III	Kekurangan Penerimaan	14	3.125,64
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan	2	84,88
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah atau perusahaan	11	3.036,46
3	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	4,30
IV	Administrasi	29	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	6	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	2	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-
6	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	2	-
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	2	-

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	-
11	Lain-lain	1	-
V	Ketidakhematan	14	8.246,83
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	14	8.246,83
VI	Ketidakefektifan	4	81,05
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	81,05
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		78	16.241,77

Lampiran 11

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Daerah/ Perusahaan atau Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	Prov. Sumatera Barat	54	22	21	11	39	12.121,62	3	169,32	7	3.587,26	9	1.909,89	11	8	6.374,10	1	81,05	5,40	-	-	-
1	PDAM Kab. Pasaman	8	4	2	2	5	1.895,62	2	27,93	1	1.673,93	-	-	1	1	193,76	-	-	5,40	-	-	-
2	PDAM Kab. Pesisir Selatan	9	3	3	3	4	992,32	-	-	1	6,53	-	-	2	1	985,79	-	-	-	-	-	-
3	PDAM Kota Bukittinggi	13	2	9	2	6	557,82	-	-	1	76,50	-	-	3	1	400,27	1	81,05	-	-	-	-
4	PDAM Kota Padang	12	7	2	3	15	7.075,36	-	-	3	1.804,50	6	1.861,68	3	3	3.409,18	-	-	-	-	-	-
5	PDAM Kota Payakumbuh	12	6	5	1	9	1.600,50	1	141,39	1	25,80	3	48,21	2	2	1.385,10	-	-	-	-	-	-
II	Prov. Banten	17	7	2	8	7	300,00	1	300,00	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-
6	PDAM Kota Tangerang	17	7	2	8	7	300,00	1	300,00	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-
III	Prov. Sulawesi Utara	28	15	7	6	24	2.941,34	1	137,07	3	280,57	3	1.007,91	11	4	1.515,79	2	-	-	-	-	-
7	PDAM Kab. Bolaang Mongondow	8	6	1	1	11	1.835,92	1	137,07	2	222,68	-	-	7	1	1.476,17	-	-	-	-	-	-
8	PDAM Kab. Minahasa	20	9	6	5	13	1.105,42	-	-	1	57,89	3	1.007,91	4	3	39,62	2	-	-	-	-	-
IV	Prov. Maluku Utara	7	4	2	1	8	878,81	1	21,22	1	292,81	2	207,84	2	2	356,94	-	-	-	-	6,34	-
9	PDAM Kota Ternate	7	4	2	1	8	878,81	1	21,22	1	292,81	2	207,84	2	2	356,94	-	-	-	-	6,34	-
	Total	106	48	32	26	78	16.241,77	6	627,61	11	4.160,64	14	3.125,64	29	14	8.246,83	4	81,05	5,40	-	-	6,34

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester II Tahun 2012

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
1	1	Provinsi Aceh	1	LKPD Provinsi Aceh Tahun 2011
	2		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011
	3		1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2011
	4		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2011
	5		1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2011
2	6	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2011
	7		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2011
	8		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2011
	9		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2011
	10		1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2011
	11		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011
	12		1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2011
	13		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011
	14		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011
	15		1	LKPD Kota Gunung Sitoli Tahun 2011
3	16	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011
4	17	Provinsi Riau	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011
	18		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011
5	19	Provinsi Jambi	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011
6	20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2011
7	21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2011
	22		1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2011
	23		1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2011
	24		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2011
	25		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011
	26		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011
	27		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2011
	28		1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011
	29		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
	30		1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2011
	31		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
	32		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011
	33		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011
8	34	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011
	35		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2011
	36		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2011
	37		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2011
	38		1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2011
	39		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2011

Halaman 2 - Lampiran 12

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
9	40 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2011
	41	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
	42	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2011
	43	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2011
10	44 Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
	45	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
	46	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
	47	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011
	48	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2011
	49	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011
	50	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2011
11	51 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011
	52	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011
	53	1	LKPD Kota Manado Tahun 2011
12	54 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2011
	55	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2011
13	56 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011
14	57 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2011
	58	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011
15	59 Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2011
	60	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2011
	61	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011
	62	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011
	63	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011
	64	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011
	65	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011
	66	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2011
	67	1	LKPD Kota Tual Tahun 2011
	16	68 Provinsi Maluku Utara	1
69		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011
70		1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011
71		1	LKPD Kota Ternate Tahun 2011
17	72 Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011
	73	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2011
	74	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2011
	75	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2011
	76	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2011
	77	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011
	78	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011
	79	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2011
	80	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2011
	81	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2011
	82	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2011

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	83		LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2011
	84		LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2011
	85		LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2011
	86		LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011
	87		LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2011
	88		LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2010
	89		LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2010
18	90 Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2011
	91	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2011
	92	1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2011
	93	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011
	94	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011
	95	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2011
	96	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2011
		96	
II	Laporan Keuangan BUMD		
1	97 Provinsi Sumatera Barat	1	LK PDAM Kota Padang TB 2011
	98	1	LK PDAM Kota Bukittinggi TB 2011
	99	1	LK PDAM Kabupaten Pasaman TB 2011
	100	1	LK PDAM Kabupaten Pesisir Selatan TB 2011
	101	1	LK PDAM Kota Payakumbuh TB 2011
2	102 Provinsi Banten	1	LK PDAM Kota Tangerang TB 2011
3	103 Provinsi Sulawesi Utara	1	LK PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow TB 2011
	104	1	LK PDAM Kabupaten Minahasa TB 2011
4	105 Provinsi Maluku Utara	1	LK PDAM Kota Ternate TB 2011
		9	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan	105	



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

**Buku III
Pemeriksaan Kinerja**
(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	ii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
DAFTAR LAMPIRAN	iv	
BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2	Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012	3
BAB 3	Pendidikan	9
BAB 4	Kesehatan	13
BAB 5	Infrastruktur	21
BAB 6	Pelayanan Publik	27
BAB 7	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	35
BAB 8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	43
BAB 9	Lingkungan Hidup	47
BAB 10	Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB)	53
BAB 11	Minyak dan Gas Bumi (Migas)	61
BAB 12	Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum	69
BAB 13	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	75
BAB 14	Kinerja Bidang Lainnya	79
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM		89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja
- 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja
- 7.1. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011
- 7.2. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat Tahun 2007 s.d. 2011
- 7.3. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011
- 8.1. Realisasi Pembuatan dan Penanaman Bibit KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012

DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 10.1. Skema Pencapaian Ketahanan Pangan
- 12.1. Wilayah Sungai Citarum

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Tujuan dan Konsep Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

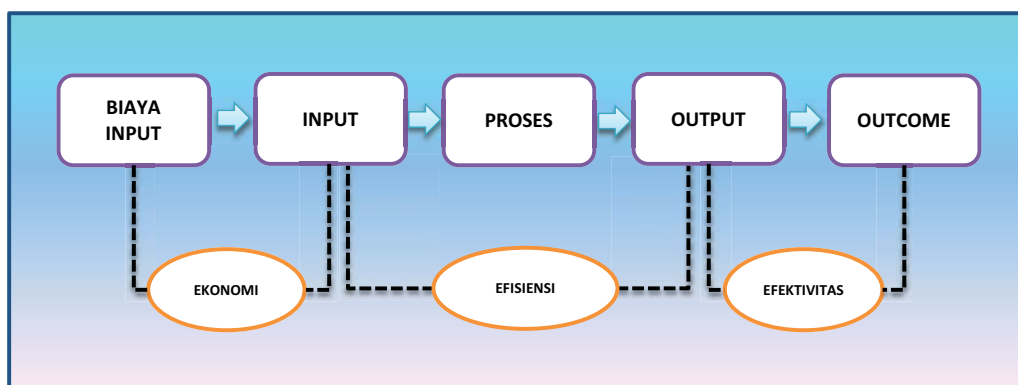
- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.
- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, proses, output, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 154 objek pemeriksaan, terdiri atas 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 12 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 51 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 8 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), 11 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 46 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua belas tema sebagai berikut:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Infrastruktur;
- Pelayanan Publik;
- Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- Lingkungan Hidup;
- Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB);
- Minyak dan Gas Bumi (Migas);
- Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum;
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
- Kinerja bidang lainnya yang terdiri atas 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 2 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 7 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 3 objek pemeriksaan BUMN, 1 objek pemeriksaan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan BLU.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan

administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester II Tahun 2012 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2012 ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai Rp1.221.145,07 juta, 36 kasus ketidakehematan/ketidakekonomisan senilai Rp56.737,97 juta, dan 12 kasus ketidakefisienan senilai Rp141.340,62 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
		Ketidakehematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pusat	18	45.294,97	3	57,90	206	1.130.588,41	227	1.175.941,28
2	Provinsi	6	5.111,22	-	-	95	43.089,93	101	48.201,15
3	Kabupaten/ Kota	1	-	-	-	484	2.797,60	485	2.797,60
4	BUMN	8	6.295,65	8	141.104,19	71	23.979,31	87	171.379,15
5	BUMD	1	-	-	-	120	7.636,46	121	7.636,46
6	BLU	2	36,13	1	178,53	463	13.053,36	466	13.268,02
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	36	56.737,97	12	141.340,62	1.440	1.221.145,07	1.488	1.419.223,66

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan dalam IHPS II Tahun 2012, di antaranya sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat, pertimbangan Kepala BKN yang disampaikan

kepada Menteri PAN dan RB hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi PNS secara nasional. Selain itu, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS pusat. Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS yaitu terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN dan pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur. Hal itu mengakibatkan sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS belum efektif.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan RHL menunjukkan bahwa pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran yaitu tidak ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Selain itu, bibit hasil KBR yang diserahkan belum siap tanam sehingga kegiatan KBR tidak efektif untuk menunjang merehabilitasi lahan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian SBB Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut di antaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum pada umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu kualifikasi tenaga pendidik lebih rendah dari

kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Selain itu, sarana prasarana pendidikan belum memadai.

- Hasil pemeriksaan kinerja terhadap 66 rumah sakit di 26 provinsi mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal. Namun, terhadap pengelolaan pelayanan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi telah efektif.

BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya.

BUMD

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM dilakukan pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, penanggulangan kebocoran air, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi, serta pengelolaan meter air PDAM pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pada proses produksi terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Pada proses distribusi, tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung dengan menggunakan alat ukur yang akurat.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 1.411 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. Kelemahan tersebut terdiri atas 36 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 331 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.044 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 108 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp408,37 miliar yang terdiri atas 28 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.779,94 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp368,82 juta), 14 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp221.252,40 juta, 24 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp181.340,85 juta, dan 42 kasus penyimpangan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								
		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Adminis trasi	Total Ketidapatuhan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	14	1.468,75	4	5.523,37	12	159.912,43	9	39	166.904,55
2	Provinsi	5	2.331,11	4	1.376,74	2	282,23	7	18	3.990,08
3	Kabupaten/ Kota	3	552,22	-	-	2	1.828,98	19	24	2.381,20
4	BUMN	3	1.307,93	4	214.257,01	5	18.476,41	4	16	234.041,35
5	BUMD	3	119,93	1	48,54	2	813,59	1	7	982,06
6	BLU	-	-	1	46,74	1	27,21	2	4	73,95
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	5.779,94	14	221.252,40	24	181.340,85	42	108	408.373,19

Pada temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan di atas, terdapat temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 19 kasus senilai Rp10,16 miliar. Temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas 9 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.130,91 juta; 7 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp5.927,01 juta; dan 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.103,23 juta.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp2,97 miliar dengan rincian temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp112,76 juta dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.859,93 juta.

Penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kerugian negara/daerah oleh pemerintah pusat senilai Rp103,69 juta dan pemerintah provinsi senilai Rp9,07 juta. Adapun penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kekurangan penerimaan oleh pemerintah pusat senilai Rp2.556,75 juta dan BUMD senilai Rp303,18 juta.

BAB 3

Pendidikan

- 3.1 Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain melalui perbaikan kebijakan, peningkatan sarana prasarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
- 3.2 Kebijakan pembangunan pendidikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak terlepas dari kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional selalu mengacu pada tiga pilar pembangunan pendidikan. Ketiga pilar pembangunan pendidikan tersebut adalah (1) perluasan, pemerataan, dan pelayanan pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan daya saing; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- 3.3 Kebijakan perluasan, pemerataan, dan pelayanan pendidikan antara lain dilakukan melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana. Peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan daya saing antara lain dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana, dan kesempatan belajar bagi guru (melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidikan serta mengikuti program S1, S2, dan S3).
- 3.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan pada 13 Dinas Pendidikan di tujuh provinsi.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.5 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Sasaran Pemeriksaan

- 3.6 Sasaran pemeriksaan kinerja pada umumnya diarahkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Hasil Pemeriksaan

3.7 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan yang terdiri atas 98 kasus ketidakefektifan senilai Rp2,56 miliar.

3.8 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Instansi yang diperiksa

1. Provinsi Aceh:
 - Kabupaten Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Barat:
 - Kabupaten Dharmasraya
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Tanah Datar
3. Provinsi Riau:
 - Kabupaten Siak
 - Kota Dumai
4. Provinsi Kepulauan Riau:
 - Kabupaten Lingga
 - Kota Batam
 - Kota Tanjungpinang
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - Kabupaten Dompu
 - Kabupaten Lombok Tengah
6. Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Provinsi Maluku:
 - Kota Tual

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.

- Database yang mendukung perencanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan kurang memadai, yaitu belum dimutakhirkan secara periodik dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan karena informasinya tidak lengkap. Belum mutakhirnya data tersebut mengakibatkan database yang ada belum menggambarkan kondisi pendidikan senyatanya dan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penyebabnya antara lain Dinas Pendidikan dalam melakukan proses penginputan dan pemutakhiran data tidak secara rutin dan berkala.
- Kualifikasi tenaga pendidik belum memenuhi standar, yaitu latar belakang pendidikan guru di bawah kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Hal tersebut mengakibatkan standar minimum kualifikasi tidak tercapai dan mutu pendidikan tidak tercapai secara optimal. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang optimal dalam memenuhi kualitas guru dari segi pendidikan formal dan kurangnya

kemampuan tenaga pendidik untuk lulus ujian sertifikasi. Selain itu, sebagian besar jumlah tenaga pendidik belum memenuhi syarat minimal untuk mengikuti sertifikasi pendidik.

- Monev atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar belum dilaksanakan secara memadai dan belum seluruh pengawas mengevaluasi permasalahan yang ada secara memadai. Belum memadainya monev mengakibatkan keberhasilan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dievaluasi untuk pengembangan proses pembelajaran. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan monev atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memerintahkan kepala dinas kabupaten/kota untuk

- menambah petugas khusus yang menangani penginputan dan pemutakhiran database pendidik dan kependidikan secara rutin, lebih optimal dalam memenuhi kualitas guru dari segi pendidikan formal, dan melakukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik untuk mengikuti ujian sertifikasi; dan
- membentuk dan memberdayakan tim monev secara menyeluruh terhadap aspek pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan

3.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan di antaranya sebagai berikut.

- Sarana prasarana pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama belum memadai. Masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas dan buku pegangan, serta belum memiliki perpustakaan dan ruang laboratorium. Belum memadainya sarana prasarana mengakibatkan pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif sesuai yang diharapkan. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang optimal mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, pejabat terkait tidak membuat skala prioritas dalam perencanaan sarana prasarana.
- Terdapat pengadaan sarana prasarana yang belum dimanfaatkan di antaranya alat laboratorium dan ruang kelas. Alat laboratorium belum dimanfaatkan antara lain karena ruang laboratorium masih dalam proses pengerjaan dan para guru belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan alat laboratorium. Belum dimanfaatkannya sarana prasarana mengakibatkan tujuan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Penyebabnya antara

lain Dinas Pendidikan dalam mengadakan sarana prasarana pendidikan belum melalui mekanisme perencanaan dan analisis kebutuhan yang akurat.

- 3.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar kepala dinas kabupaten/kota
- lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat skala prioritas dalam perencanaan perbaikan sarana prasarana; dan
 - lebih optimal dalam merencanakan pengadaan sarana prasarana, membuat analisis kebutuhan yang senyatanya, dan segera memanfaatkan sarana prasarana yang belum dimanfaatkan.
- 3.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp125,77 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp14,65 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp1,80 miliar, 13 kasus penyimpangan administrasi, dan 107 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 3.14 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp125,77 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp9,07 juta.
- 3.15 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 4

Kesehatan

- 4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab VI Pasal 47 menetapkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan.
- 4.2 Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- 4.3 Pada Tahun 2011, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 1.721 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 615 unit merupakan rumah sakit pemerintah. Pada Tahun 2012, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia meningkat menjadi sebanyak 2.098 unit dan rumah sakit pemerintah juga meningkat menjadi sebanyak 627 unit.
- 4.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada 66 rumah sakit di 26 provinsi. BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada 7 Dinas Kesehatan di 4 provinsi, 8 rumah sakit di 1 provinsi, dan instansi terkait lainnya seperti disajikan dalam Lampiran 2.

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Tujuan Pemeriksaan

- 4.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Selain itu, pemeriksaan kinerja pada tiga rumah sakit juga menilai efisiensi dan ekonomi pelayanan kesehatan rumah sakit.
- 4.6 Kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan. Selain itu, pelayanan kesehatan rumah sakit juga meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan bedah, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, dan pengelolaan sarana prasarana.

Sasaran pemeriksaan

- 4.7 Sasaran pemeriksaan pada umumnya meliputi
- perencanaan atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit;
 - pelaksanaan atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit; dan
 - monitoring dan evaluasi (monev) atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit.

Hasil Pemeriksaan

- 4.8 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan obat pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012, menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi telah efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan positif baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev pada kegiatan pelayanan obat.
- 4.9 Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit, yang terdiri atas 757 kasus ketidakefektifan senilai Rp13,05 miliar, 1 kasus ketidakefisienan senilai Rp178,53 juta, dan 2 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp36,13 juta.
- 4.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rumah sakit lainnya, diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Farmasi

- 4.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.
- Instalasi farmasi belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Gudang farmasi belum menggunakan *air conditioner*, apotek rawat jalan belum memiliki ruang khusus penerimaan resep dan persiapan obat. Apotek rawat inap belum memiliki ruang satelit untuk distribusi obat dan peralatan yang digunakan dalam pendistribusian/pelayanan masih menjadi satu dengan peralatan yang dimiliki di apotek.
 - Belum memadainya sarana prasarana instalasi farmasi disebabkan Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi belum membuat perencanaan pengembangan sarana prasarana instalasi farmasi yang ideal.
 - Pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal, yaitu dari tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

dan distribusi perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Pada tahap pemilihan, perencanaan, dan pengadaan, pemenuhan perbekalan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi kekosongan obat. Pada tahap penerimaan, penyimpanan, dan distribusi perbekalan farmasi, pelaksanaannya belum diverifikasi dan dilaksanakan sesuai pedoman.

- Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD dan Kepala Instalasi Farmasi lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi, serta panitia pengadaan/panitia penerimaan/panitia pemeriksaan/koordinator gudang/koordinator instalasi perbekalan farmasi tidak cermat dalam melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi sesuai dengan pedoman yang ada.
- Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat meliputi kegiatan pengkajian resep, *dispensing* (proses peracikan obat), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemberian informasi obat, pemberian konseling kepada pasien dan keluarga pasien, serta ronde/visite pasien. Kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tujuan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu dan menjamin efektivitas pelayanan farmasi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, pelayanan kefarmasian dengan sistem satu pintu belum sepenuhnya dilaksanakan.
- Hal tersebut antara lain disebabkan Kepala Instalasi Farmasi belum sepenuhnya memahami fungsi pelayanan farmasi yang harus dilakukan serta kurang memedomani ketentuan. Selain itu, Direktur RSUD belum mempunyai kebijakan yang tegas terkait pelayanan farmasi dengan sistem satu pintu.

4.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi untuk membuat perencanaan pengembangan sarana prasarana instalasi farmasi yang ideal;
- bersama dengan Kepala Instalasi Farmasi meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi, serta panitia pengadaan/panitia penerimaan/panitia pemeriksaan/koordinator gudang/koordinator instalasi perbekalan farmasi lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi; dan
- memperingatkan Kepala Instansi Farmasi dan para pegawai di instalasi farmasi supaya lebih memahami fungsi pelayanan farmasi yang harus dilakukan, serta menetapkan kebijakan yang tegas terkait pelayanan farmasi dengan sistem satu pintu.

Pelayanan Rawat Inap

4.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap di antaranya sebagai berikut.

- Standar pelayanan minimal (SPM) rawat inap rumah sakit belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa jenis indikator belum diukur dan dianalisis, serta SPM rumah sakit belum disesuaikan dengan standar Kementerian Kesehatan, sehingga pelayanan rawat inap yang diberikan kepada pasien belum optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktur RSUD tidak menyusun SPM dengan berpedoman pada SPM yang telah ditetapkan pemerintah.
- Pelayanan rawat inap belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, di antaranya kondisi sarana prasarana tidak sesuai standar, sebagian besar dalam kondisi yang tidak layak, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, terdapat beberapa kamar yang tidak dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan hak pasien. Belum memadainya sarana prasarana pelayanan rawat inap mengakibatkan kualitas pelayanan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penyebabnya antara lain karena manajemen rumah sakit belum menyusun anggaran dengan memprioritaskan pembenahan sarana prasarana.
- Manajemen belum optimal dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan. Pelaksanaan monev belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP dan pelaporan kinerja pelayanan rawat inap belum akurat. Hal tersebut mengakibatkan manajemen tidak dapat mengukur pencapaian kinerja pelayanan. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD belum memiliki prioritas dan rencana yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit, serta wakil direktur pelayanan belum memiliki dokumentasi yang baik atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

4.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- menyusun SPM dengan berpedoman pada SPM yang telah ditetapkan pemerintah;
- menyusun perencanaan strategis (rencana 5 s.d. 10 tahun) yang memprioritaskan pembenahan sarana prasarana rumah sakit; dan
- menetapkan prioritas dan rencana yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit, serta memerintahkan wakil direktur pelayanan untuk menerapkan dokumentasi yang baik atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pelayanan Rawat Jalan

4.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat jalan di antaranya sebagai berikut.

- Struktur organisasi RSUD belum menggambarkan alur koordinasi, belum dilengkapi dengan uraian tugas perangkat kerja RSUD, dan belum didukung dengan satuan pengawas internal, sehingga pelayanan rawat jalan tidak optimal. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD belum melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, uraian tugas tiap-tiap perangkat kerja RSUD, dan belum membentuk satuan pengawas internal.
- Penyediaan sarana prasarana rawat jalan belum memenuhi kebutuhan sehingga pemberian layanan kesehatan prima kepada pasien rawat jalan belum terpenuhi dan kualitas pelayanannya tidak terjamin. Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur RSUD belum mengadakan dan memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, belum melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan pada tiap-tiap ruang pelayanan rawat jalan, serta belum dilakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis.
- Penanganan keluhan pasien pelayanan rawat jalan belum dilakukan dengan baik, sehingga Direktur RSUD tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai harapan, keinginan, dan kebutuhan pasien dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD belum menetapkan unit kerja khusus yang menangani keluhan pasien dan belum menyusun SOP penanganan keluhan.
- Monev pelayanan rawat jalan belum memenuhi standar sehingga kinerja pelayanan RSUD tidak dapat diukur. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD belum mengawasi dan mengendalikan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan RSUD, serta belum menetapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan monev yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD.

4.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, uraian tugas tiap-tiap perangkat kerja RSUD, serta menetapkan pejabat pengelola satuan pengawas internal;
- mengadakan dan memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan pada tiap-tiap ruang pelayanan rawat jalan, serta melakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis;

- menetapkan unit kerja khusus yang menangani keluhan pasien dan menetapkan SOP penanganan keluhan; dan
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan monev yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD.

Pelayanan Rumah Sakit Lainnya

- 4.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bedah, pelayanan gawat darurat, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, serta pengelolaan sarana prasarana dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.
- Kebutuhan SDM pada pelayanan kesehatan RSUD belum terpenuhi, sehingga pelayanan kesehatan di RSUD belum optimal. Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur RSUD kurang optimal dalam menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, baik dokter maupun keperawatan.
 - Pelayanan kesehatan RSUD belum didukung dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Jumlah dan fasilitas ruangan tidak mencukupi kebutuhan pasien, peralatan medis dan penunjang medis tidak semuanya tersedia, serta fasilitas keselamatan kerja, kebakaran, dan kewaspadaan bencana belum sesuai standar. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tidak optimal dan misi RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau sulit dicapai. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD kurang mengawasi dan mengendalikan perencanaan atas ketersediaan sarana prasarana pada pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.
- 4.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar
- menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, baik dokter maupun keperawatan; dan
 - meningkatkan pengawasan dan pengendalian perencanaan atas ketersediaan sarana prasarana pada pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4.19 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp46,74 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp48,42 juta, 7 kasus penyimpangan administrasi dan 750 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan

- 4.20 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 dilakukan pada 7 Dinas Kesehatan di 4 provinsi, dan 8 rumah sakit di 1 provinsi, serta instansi terkait lainnya.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.21 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan.

Sasaran pemeriksaan

- 4.22 Sasaran pemeriksaan kinerja pelayanan dan pengelolaan program kesehatan pada umumnya meliputi

- perencanaan atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan;
- pelaksanaan atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan; dan
- monev atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan.

Instansi yang Diperiksa:

1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2. Dinas Kesehatan dan tiga rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
5. Dinas Kesehatan Kota Singkawang
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lima rumah sakit, dan instansi terkait
7. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil Pemeriksaan

- 4.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan dan pengelolaan program kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev, yang terdiri atas 60 kasus ketidakefektifan dan 32 kasus kelemahan pengendalian intern.

- 4.24 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan di antaranya sebagai berikut.
- Hasil pemeriksaan atas perencanaan pengelolaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (KIA) mengungkapkan bahwa data jumlah kematian ibu dan anak Tahun 2011 belum menggambarkan jumlah sebenarnya. Selain itu, target jumlah kematian ibu dan anak tidak

disebutkan secara jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut mengakibatkan perencanaan program peningkatan KIA berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang terarah. Penyebabnya adalah pimpinan puskesmas, bidan subkoordinator puskesmas, dan bidan desa tidak melaporkan jumlah kematian ibu dan bayi sesuai kondisi sebenarnya. Tim penyusun RPJMD tidak berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan.

- Pelaksanaan pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) masih belum didukung dengan ketersediaan sarana yang memadai. Puskesmas belum seluruhnya memiliki sarana listrik, air bersih, dan fasilitas laboratorium yang cukup. Selain itu, makanan tambahan gizi pada puskesmas tidak terjamin ketersediaannya. Belum memadainya sarana prasarana ini mengakibatkan pelayanan kesehatan Program KIA-Gizi yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal. Penyebabnya adalah Bagian Umum Dinas Kesehatan belum membuat pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang memadai.

4.25 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan antara lain agar

- menginstruksikan pimpinan puskesmas, bidan subkoordinator puskesmas, dan bidan desa supaya melaporkan jumlah kematian ibu dan bayi yang sebenarnya, serta menginstruksikan tim penyusun RPJMD agar mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan; dan
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan pendamping air susu ibu.

4.26 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 5

Infrastruktur

- 5.1 Prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur diupayakan pada pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara Kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 5.2 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur yang dilakukan pada Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh, dan Pengelolaan Proyek PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PT PP).
- 5.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas empat objek pemeriksaan kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Proyek BKT

- 5.4 Pemeriksaan kinerja atas Proyek BKT Tahun 2011 dan 2012 pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan Proyek BKT.
- 5.5 Hasil pemeriksaan kinerja Proyek BKT menyimpulkan bahwa pengelolaan Proyek BKT Tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan banjir di sebagian wilayah timur dan utara Jakarta. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan Proyek BKT, yang terdiri atas 7 kasus ketidakefektifan.
- 5.6 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pengendalian banjir di antaranya sebagai berikut.
 - Jalan inspeksi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal tersebut disebabkan lemahnya pengendalian oleh Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Ciliwung Cisadane atas kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan inspeksi serta pemanfaatan jalan inspeksi.
 - Saluran gendong jalan inspeksi dan bangunan terjunan pada *Inlet* Sunter (DPS-4) BKT 340 belum efektif. Hal tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antara SNVT PJSA Ciliwung Cisadane dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana pembebasan lahan.

- 5.7 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU antara lain agar
- memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk menegur Kepala SNVT PJSA Ciliwung Cisadane supaya meningkatkan pengendalian; dan
 - berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembebasan tanah untuk lokasi saluran gendong dan bangunan terjunan dimaksud.
- 5.8 Hasil pemeriksaan kinerja Proyek BKT juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp535,36 juta, potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp4,54 miliar, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 4 kasus kelemahan pengendalian intern.

Program Rusunawa

- 5.9 Pemeriksaan kinerja atas Program Rusunawa Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bertujuan untuk menilai efektivitas dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rusunawa serta pemanfaatan hasil pembangunan rusunawa.
- 5.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Rusunawa menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya hanya berorientasi pada output, yaitu pembangunan fisik rusunawa. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Program Rusunawa, yang terdiri atas 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp1,05 triliun.
- 5.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan pembangunan rusunawa di antaranya proses alih status dan hibah aset rusunawa kepada instansi penerima yang sangat lamban, yaitu dari 305,50 *twin block* (TB) yang telah dibangun, baru 9 TB (2,95%) yang dialihstatuskan. Hal ini antara lain mengakibatkan terdapat 89 TB rusunawa senilai Rp1,05 triliun yang belum dimanfaatkan dan dihuni.
- 5.12 Hal tersebut disebabkan kegiatan Ditjen Cipta Karya hanya berorientasi pada output, yaitu pembangunan fisik rusunawa. Ditjen Cipta Karya belum berorientasi pada outcome atau tujuan dari pembangunan rusunawa, yaitu menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mengurangi kantong-kantong permukiman kumuh di perkotaan.
- 5.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU antara lain agar mempercepat proses pengalihan status (hibah) aset rusunawa dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan rusunawa yang telah terbangun.

- 5.14 Hasil pemeriksaan kinerja Program Rusunawa juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp279,09 juta, potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp4,50 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp821,00 juta.

Dana Otsus Provinsi Aceh

- 5.15 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus TA 2008-2012 pada bidang pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh dan instansi terkait di Provinsi Aceh bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus TA 2008-2012 tersebut telah efektif menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- 5.16 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Otsus Aceh belum sepenuhnya efektif, khususnya pengelolaan dana otsus dalam pembangunan jalan dan jembatan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dana otsus, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan senilai Rp29,21 miliar.
- 5.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus di antaranya sebagai berikut.
- Pemerintah Provinsi Aceh belum menetapkan kebijakan atas sisa dana otsus yang tidak terserap pada TA berjalan. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Provinsi Aceh belum menerbitkan kebijakan/aturan pengalokasian dana otsus yang belum teralokasi dan dana otsus yang sudah dialokasikan namun belum terealisasi untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian dana otsus.
 - Hasil kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang dibiayai dana otonomi khusus selama TA 2008-2012 belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Aceh dhi. Dinas BMCK Aceh belum menetapkan pedoman/kesepakatan bersama antara Dinas BMCK Aceh selaku pengguna anggaran dengan tiap-tiap kuasa pengguna anggaran dana otsus kabupaten/kota yang mengatur tentang pembagian kewenangan dan mekanisme penggunaan/pemanfaatan atas hasil perencanaan konstruksi.
- 5.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Aceh antara lain agar
- menerbitkan suatu aturan/kebijakan tentang (1) mekanisme/prosedur pengalokasian seluruh dana otsus yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk dapat didistribusikan seluruhnya baik untuk porsi provinsi maupun porsi kabupaten/kota, termasuk dana otsus yang diterima pada triwulan IV tahun berjalan, dan (2) pengelolaan dan pendistribusian atas sisa

dana otsus yang tidak terserap pada TA berjalan dengan memperhatikan rencana induk (*master plan*) pemanfaatan dana otsus.

- menginstruksikan Kepala Dinas BMCK Aceh untuk menyusun pedoman kegiatan perencanaan konstruksi yang dibiayai dari dana otsus yang antara lain mengatur kewenangan kegiatan perencanaan supaya hasil perencanaan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

5.19 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan Dana Otsus Aceh juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp2,31 miliar, potensi kerugian daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp1,37 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp282,23 juta, dan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,11 miliar, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 21 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan Proyek PT PP (Persero) Tbk

5.20 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan proyek pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2010 dan 2011 di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru bertujuan untuk menilai ketepatan dan keandalan perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dalam rangka mencapai efisiensi pengelolaan proyek.

5.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan proyek PT PP menunjukkan bahwa pengelolaan proyek belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PT PP, yang terdiri atas 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp11,69 miliar dan 6 kasus ketidakefisienan senilai Rp90,14 miliar.

5.22 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PT PP antara lain sebagai berikut.

- Ketidaktepatan pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan realisasi biaya pokok produksi proyek melebihi rencana anggaran pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan para pelaksana belum merencanakan pekerjaannya dengan baik.
- Pemahaman yang kurang terhadap standar kualitas dan *safety* dari pemberi kerja. Hal tersebut disebabkan tim tender belum sepenuhnya memahami standar kualitas dan *safety* dari pihak pemberi kerja dan/atau *owner* serta kurang cermat dalam memperhitungkan penerapan standar kualitas dan *safety* tersebut dalam menghitung harga penawaran tender.

5.23 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PP antara lain agar

- menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan standar internasional dan pemilihan metode kerja yang tepat kepada karyawan secara berkala; dan

- menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan standar kualitas dan *safety* berskala internasional kepada karyawan secara berkala.
- 5.24 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan proyek PT PP juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp3,07 miliar, 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp967,47 juta, dan 7 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 5.25 Pada pemeriksaan kinerja bidang infrastruktur, terdapat temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 19 kasus senilai Rp10,16 miliar. Temuan tersebut terdiri atas 9 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.130,91 juta; 7 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp5.927,01 juta; dan 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.103,23 juta.
- 5.26 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 6

Pelayanan Publik

- 6.1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut di antaranya pelayanan perizinan, pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, pelayanan bandar udara, dan pelayanan publik lainnya.
- 6.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan publik pada sebelas objek pemeriksaan, yaitu 4 objek pelayanan perizinan, 1 objek pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, 1 objek pelayanan bandar udara, dan 5 objek pelayanan publik lainnya.

Pelayanan Perizinan

- 6.3 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan instansi terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Objek pemeriksaan kinerja tersebut, yaitu
- Pelayanan perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu TA 2011 dan Semester I TA 2012;
 - Pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal (RT) pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Suku Dinas, Seksi Dinas Kecamatan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta instansi terkait lainnya pada Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan Semester I TA 2012;
 - Pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) dan Unit PTSP pada Provinsi DKI Jakarta TA 2012; dan
 - Pelayanan perizinan Pemerintah Kota Baubau TA 2011 dan 2012.
- 6.4 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya instansi terkait kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, yang terdiri atas 45 kasus ketidakefektifan.
- 6.5 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, di antaranya sebagai berikut.

- Di KP2T Provinsi Bengkulu, terdapat 90 jenis perizinan/nonperizinan atau 89,11% yang belum dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada KP2T sebagai penyelenggara PTSP serta penanganan kepuasan dan pengaduan masyarakat tidak didukung dengan perencanaan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan terhambat. Penyebabnya Gubernur Bengkulu kurang tegas terhadap kepala satuan kerja yang belum mendelegasikan kewenangan pengelolaan perizinan/nonperizinan kepada KP2T serta Kepala KP2T lalai dalam menyusun perencanaan kegiatan dan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Di Dinas P2B dan Unit PTSP, Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan PTSP belum optimal, yaitu mekanisme pelayanan administrasi dan penilaian teknis belum diatur serta terdapat simpul pelayanan dan waktu pelayanan yang bertambah. Kelemahan ini mengakibatkan Unit PTSP belum menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Penyebabnya antara lain belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan, mekanisme serta tanggung jawab dari setiap unit terkait dan belum adanya peraturan daerah unit PTSP.
- Di Dinas KUMKMP, Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan pelayanan perizinan SIUP belum sesuai prosedur sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena pejabat yang berwenang lalai dalam melaksanakan kegiatan, kurang optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan perizinan SIUP.
- Di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan pelayanan perizinan belum didukung dengan dasar hukum, SOP, kompetensi SDM, dan sarana prasarana yang memadai. Belum memadainya mekanisme dan sumber daya tersebut mengakibatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Penyebabnya antara lain karena pejabat yang berwenang belum mengusulkan rancangan peraturan daerah, belum menyusun SOP sesuai ketentuan Menteri PAN dan RB, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi pegawai, serta terbatasnya alokasi anggaran.

6.6 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar

- melakukan inventarisasi ulang dan melimpahkan kewenangan pengelolaan perizinan/nonperizinan kepada KP2T, serta menyusun perencanaan atas penanganan kepuasan dan pengaduan masyarakat;
- mempertimbangkan penetapan peraturan daerah untuk menyelenggarakan PTSP berdasar hasil kajian yang komprehensif;

- mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui Unit PTSP, menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP, dan memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan; dan
 - mengusulkan rancangan peraturan daerah, menyusun SOP, dan menyusun analisis kebutuhan pegawai dari segi jumlah maupun kompetensi, serta menyusun analisis kebutuhan sarana prasarana.
- 6.7 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan juga mengungkapkan adanya 1 kasus penyimpangan administrasi dan 33 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pelayanan Ekspor Barang yang Dipungut Bea Keluar

- 6.8 Pemeriksaan kinerja atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan untuk TA 2010 dan 2011 bertujuan untuk menilai efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar.
- 6.9 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa kinerja pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar cukup efektif. Namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, yang terdiri atas 18 kasus ketidakefektifan senilai Rp5,26 miliar.
- 6.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, di antaranya sebagai berikut.
- Di Ditjen Daglu, kegiatan penetapan harga patokan ekspor (HPE) dan verifikasi oleh *surveyor* belum didukung dengan peraturan dan prosedur yang memadai. Selain itu, proses pengiriman data perizinan ekspor melalui *intrade* ke *Indonesian National Single Window* (INSW) lambat. Hal tersebut terjadi antara lain karena pejabat yang berwenang kurang memperhatikan ketentuan terkait penetapan HPE, dan tidak cermat dalam memproses pengiriman data perizinan ke INSW.
 - Di DJBC, jumlah kegiatan pelayanan ekspor belum seluruhnya didukung dengan SOP dan kompetensi SDM yang memadai. Selain itu, terdapat bea keluar atas beberapa produk turunan *palm kernel fatty acid distillate* (PKFAD) senilai Rp5,26 miliar yang tidak dipungut oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Dumai. Hal tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum memahami pentingnya SOP dalam kegiatan pelayanan, serta pejabat tidak menyosialisasikan kebijakan pemungutan bea keluar atas produk PKFAD ke seluruh kantor pelayanan.

- 6.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk
- menyempurnakan SOP terkait penetapan HPE, melakukan pembinaan kepada para pelaksana, melakukan pengiriman data ke INSW melalui *inatrade*, dan meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung; dan
 - membuat dan menetapkan SOP terkait kegiatan ekspor barang, melakukan pembinaan serta meningkatkan kemampuan tenaga SDM, dan melakukan diseminasi atas setiap kebijakan yang dibuat kepada semua kantor pelayanan.
- 6.12 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar juga mengungkapkan adanya temuan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp3,83 miliar dan 5 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 6.13 Dari kasus kekurangan penerimaan senilai Rp3,83 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan oleh KPPBC Kotabaru senilai Rp2,54 miliar.

Pelayanan Bandar Udara (Bandara)

- 6.14 Pemeriksaan kinerja pengelolaan pelayanan di bandara pada PT Angkasa Pura I (Persero) (PT AP I), PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, DJBC, dan pihak-pihak terkait lainnya Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pelayanan di bandara telah dilakukan secara efektif dalam mendukung kelancaran penerbangan serta keamanan, kenyamanan, dan kelancaran penumpang.
- 6.15 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan di bandara oleh pihak-pihak terkait belum efektif untuk mendukung kelancaran penerbangan serta keamanan, kenyamanan, dan kelancaran penumpang. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bandara, yang terdiri atas 34 kasus ketidakefektifan senilai Rp11,31 miliar.
- 6.16 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bandara, di antaranya sebagai berikut.
- Kapasitas terminal Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda belum memadai sehingga kelancaran kegiatan penerbangan terganggu dan timbulnya ketidaknyamanan penumpang pada jam-jam sibuk. Penyebabnya antara lain pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam merencanakan pembangunan dan pengembangan bandara untuk mengimbangi jumlah pengguna bandara.
 - Jumlah dan kualifikasi personil pelayanan jasa pesawat udara terutama petugas *air traffic control* (ATC) di Bandara Juanda, Bandara Hasanuddin,

dan Bandara Soekarno-Hatta belum mencukupi sehingga timbul potensi risiko operasional, terutama terhadap faktor keselamatan penerbangan. Penyebabnya antara lain karena Direksi PT AP I dan PT AP II tidak mengantisipasi kebutuhan tenaga ATC dan ketersediaan calon pegawai terbatas.

- Mesin *x-ray* pada KPPBC Makassar tidak dapat digunakan dan tidak didukung dengan operator yang kompeten. Selain itu, terdapat keterbatasan ruangan dan area *customs, immigration, dan quarantine* pada Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Kelemahan tersebut mengakibatkan pelayanan dan pengawasan kepada penumpang terhambat. Penyebabnya antara lain pejabat yang berwenang belum menyediakan *layout* terminal yang memadai, belum merealisasikan pengajuan pelatihan bagi pegawai, dan belum melakukan pemeliharaan mesin *x-ray* secara optimal.

6.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk

- mengembangkan terminal bandara sesuai perkembangan jumlah penumpang dan rencana pengembangan bandara;
- mengupayakan penambahan personel pada tiap-tiap unit kerja sesuai kebutuhan; dan
- menyediakan *layout* terminal kedatangan internasional yang dibutuhkan petugas bea dan cukai, mengkaji ulang pemberian izin kegiatan usaha di area *customs*, mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta melakukan pemeliharaan mesin *x-ray* secara rutin.

6.18 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan bandara juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/perusahaan sebanyak 3 kasus senilai Rp1,30 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp78,45 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 3 kasus senilai Rp545,66 juta, 5 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,32 miliar, dan 9 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pelayanan Publik Lainnya

6.19 Pemeriksaan kinerja atas lima objek pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Khusus pada kegiatan pelayanan badan hukum dan jaminan fidusia, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan.

6.20 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik lainnya terdiri atas 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp4,95 juta dan 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp57,90 juta.

Pelayanan Badan Hukum dan Jaminan Fidusia

- 6.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan badan hukum dan jaminan fidusia menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi di Jakarta Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 telah meningkatkan upaya efisiensi dan efektivitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan (BHP) dan jaminan fidusia. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya kegiatan pelayanan BHP belum memiliki SOP, sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi SDM. Selain itu, penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan.

Pelayanan Informasi Statistik atas Kegiatan Survei Harga Konsumen (HK)

- 6.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan informasi statistik atas kegiatan survei HK pada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Malang untuk TA 2011 dan 2012 menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya terdapat perbedaan angka antara kuesioner hasil pencacahan survei HK dengan laporan perubahan harga yang disampaikan kepada BPS Pusat dan pengolahan survei HK belum didukung teknologi informasi.

Pengelolaan Pelayanan Pertanahan

- 6.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan pelayanan pertanahan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya pemberian pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pengukuran bidang tanah tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan. Selain itu, terdapat pungutan tanpa dasar hukum atas layanan kutipan peta bidang, kutipan surat ukur, dan cek plot peta sehingga memberatkan masyarakat pengguna layanan.

Pelayanan dan Dukungan Direktorat *E-Procurement* terhadap Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit LPSE terhadap Pengguna

- 6.24 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan dukungan Direktorat *E-Procurement* terhadap unit LPSE dan unit LPSE terhadap pengguna pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk TA 2011 dan 2012 di Jakarta, Bandung, Depok, Surabaya, Malang, Banda Aceh, Padang, Bukittinggi, Manado, Bitung, dan Mataram menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan di antaranya belum membuat *disaster*

recovery plan untuk sistem elektronik yang dikelola dalam rangka menunjang pelaksanaan *e-procurement* nasional. Selain itu, Direktorat *E-Procurement* belum memiliki SOP terkait *update* sistem aplikasi dan belum sepenuhnya melakukan asistensi/supervisi terkait peningkatan/pengembangan standar layanan terhadap LPSE.

Layanan Pelanggan Korporat Divisi *Enterprise Services* dan Unit Terkait

- 6.25 Hasil pemeriksaan kinerja atas layanan pelanggan korporat Divisi *Enterprise Services* dan unit terkait pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (PT Telkom) Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) di Jakarta dan Bandung menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan pelanggan korporat PT Telkom dikatakan sangat baik. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya implementasi *pricing* Divisi *Enterprise Services* belum sepenuhnya mengantisipasi target *revenue* Tahun 2010 dan 2011 sehingga *revenue* Tahun 2010 dan 2011 tidak mencapai target.
- 6.26 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan publik lainnya juga mengungkapkan adanya temuan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp66,59 juta dan 51 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 6.27 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 7

Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 7.1 Penetapan formasi PNS meliputi pengajuan usulan tambahan formasi dari instansi, pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penetapan formasi, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran untuk tambahan formasi PNS, dan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
- 7.2 Formasi PNS merupakan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penetapan formasi dan pengadaan PNS merupakan dua kegiatan penting dalam mewujudkan formasi PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi negara.
- 7.3 Menurut ketentuan formasi PNS setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada tiap-tiap satuan organisasi. Kementerian PAN dan RB menetapkan dua formasi, yaitu formasi secara nasional yang merupakan jumlah formasi PNS untuk seluruh instansi dan formasi instansional yang merupakan jumlah formasi untuk tiap-tiap instansi pusat dan daerah.
- 7.4 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya terjadi karena adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Pengadaan meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan atau seleksi, pengumuman pelamar yang diterima, penetapan nomor induk pegawai (NIP) oleh BKN, dan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pengadaan PNS dan sebagai *crash* program pemerintah untuk pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer dan sekretaris desa (sekdes), selain pengadaan yang berasal dari formasi umum dan khusus. Adapun pengadaan PNS Tahun 2010 hanya berasal dari formasi umum dan khusus.
- 7.5 Jumlah PNS secara nasional dari Tahun 2007 s.d. 2011 sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011

Tahun	Jumlah Pegawai
2007	4.067.201
2008	4.083.360
2009	4.524.205
2010	4.598.100
2011	4.570.818

Sumber data: Buku Data Statistik PNS per 31 Desember 2011 – BKN

- 7.6 Tabel 7.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pegawai dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 5 tahun, yaitu Tahun 2007 s.d. 2011 terjadi penambahan jumlah PNS sebanyak 503.617 pegawai atau 12,38%. Kecuali pada Tahun 2011 terdapat penurunan jumlah pegawai dari jumlah pegawai pada Tahun 2010. Hal ini disebabkan pada Tahun 2011 terdapat kebijakan pemerintah mengenai penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium).
- 7.7 Tabel 7.2 dan 7.3 menunjukkan perbandingan realisasi belanja pegawai dari total belanja sejak Tahun 2007 s.d. 2011 dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 7.2. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat Tahun 2007 s.d. 2011

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Pegawai	%
1	2	3	4 (3:2)
2007	504.623,30	90.425,00	17,92
2008	693.355,90	112.829,90	16,27
2009	628.812,40	127.669,70	20,30
2010	781.533,50	162.659,00	20,81
2011	823.627,00	180.624,10	21,93

Sumber data: *Website* DJA/Kemenkeu.go.id.

Tabel 7.3. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah	Belanja Pegawai	%
1	2	3	4 (3:2)
2007	307.398,12	119.257,38	38,80
2008	366.951,08	148.515,16	40,47
2009	395.593,27	169.278,57	42,79
2010	420.769,79	199.050,75	47,31
2011	501.262,58	226.545,61	45,19

Sumber data: *Website* DJPK/Kemenkeu.go.id.

- 7.8 Belanja pegawai pada pemerintah pusat dalam kurun waktu lima tahun meningkat senilai Rp90.199,10 miliar (99,75%), yaitu pada Tahun 2007 senilai Rp90.425,00 miliar menjadi Rp180.624,10 miliar di Tahun 2011. Begitu juga pada belanja pegawai pemerintah daerah meningkat senilai Rp107.288,23 miliar (89,96%), yaitu pada Tahun 2007 senilai Rp119.257,38 miliar menjadi Rp226.545,61 miliar di Tahun 2011.
- 7.9 Pada Tahun 2009 dan 2010, Menteri PAN dan RB telah menetapkan formasi PNS secara nasional masing-masing sebanyak 325.000 formasi dan 185.000 formasi. Formasi ini ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mendapat pertimbangan dari Kepala BKN. Formasi itu mencakup formasi PNS pusat dan daerah.
- 7.10 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian PAN dan RB, BKN, serta empat instansi *sampling* sebagai *piloting* di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bekasi. Hasil pemeriksaan di empat instansi *sampling* tersebut telah disajikan dalam IHPS II Tahun 2011.
- 7.11 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, serta 38 instansi *sampling* di 5 kementerian, 7 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.12 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

Hasil Pemeriksaan

- 7.13 Hasil pemeriksaan atas penetapan formasi dan pengadaan PNS menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
- Pemerintah dhi. Kementerian PAN dan RB serta BKN telah berupaya memperbaiki manajemen kepegawaian terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS, terutama berupa penyusunan rancangan berbagai peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, peraturan Menteri PAN dan RB, peraturan Kepala BKN, serta berbagai norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

- BKN telah mengembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan kepegawaian melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pegawai, dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional yang bisa menjamin tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat.
- 7.14 Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penetapan Formasi PNS

- 7.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.
- Pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyusunan usulan tambahan formasi pada 42 instansi yang di-*sampling* belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan serta penyusunan *bezetting*--gambaran kekuatan pegawai dari aspek jumlah, kualifikasi, pangkat dan jabatan--tidak berdasarkan database pegawai yang mutakhir. Selain itu penyampaian dokumen pengajuan usulan melewati jadwal yang ditentukan, yaitu usulan formasi instansi pusat melewati bulan Februari dan instansi daerah melewati bulan Maret.
 - Pertimbangan Kepala BKN hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi nasional. Penyusunan pertimbangan Kepala BKN tersebut dalam penetapan formasi tidak didukung dengan pedoman perhitungan yang standar dan tidak didokumentasikan dengan baik. Meskipun dokumen pengajuan usulan formasi dari instansi tidak lengkap dan data *bezetting* pegawai tidak mutakhir, Kepala BKN tetap menyusun pertimbangan yang disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Penyampaian hasil pertimbangan tersebut seringkali melewati jadwal yang ditentukan.
 - Pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan dalam memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran formasi nasional hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS Pusat. Selain itu, Kementerian Keuangan tidak memperoleh data dari Kementerian PAN dan RB pada saat dibutuhkan sehingga Kementerian Keuangan melakukan perhitungan berdasarkan asumsi jumlah pegawai yang akan pensiun dan asumsi rencana penambahan pegawai *zero growth*.

- Kementerian PAN dan RB sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara belum memiliki *grand design* yang berisi arah kebijakan formasi PNS nasional dalam jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Selain itu, penetapan formasi oleh Kementerian PAN dan RB belum berdasarkan data dan informasi yang mutakhir serta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat memetakan kebutuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan PNS secara nasional baik dari sisi kualifikasi pendidikan, keahlian, jumlah, distribusi menurut instansi dan kriteria lain sesuai kebutuhan pembangunan dan visi/misi pemerintah.

Pengadaan PNS

7.16 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Jangka waktu pengumuman penerimaan PNS lebih cepat dari yang seharusnya dan tidak melalui media massa yang diketahui masyarakat luas (tidak transparan). Selain itu terdapat instansi yang membatasi penerimaan CPNS hanya dari wilayah kerja setempat dan kualifikasi pendidikan yang dimuat di pengumuman tidak sesuai ketentuan Menteri PAN dan RB. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembatasan kesempatan masyarakat untuk mengajukan lamaran CPNS yang disebabkan keterbatasan waktu dan media pengumuman.
- Terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal, tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penetapan kelulusan bagi peserta yang memiliki nilai yang sama pada saat pengumuman hasil ujian seleksi pengadaan PNS. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya parameter yang jelas untuk menentukan kelulusan peserta dengan nilai dan kompetensi yang sama untuk mengisi lowongan formasi PNS.
- Pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur, yaitu berkas pelamar tidak sesuai prasyarat kualifikasi jabatan, pendidikan dan usia yang telah ditetapkan dan penetapan kelulusan tidak berdasar daftar peringkat nilai. Selain itu, terdapat pelamar yang tidak lulus tes CPNS namun dinyatakan lulus dan telah ditetapkan NIP-nya serta peserta yang tidak lulus seleksi administrasi tetapi tetap diangkat menjadi CPNS. Terdapat pula peserta yang tidak tercantum dalam daftar peringkat nilai dan tidak ada dalam daftar kelulusan tetapi ditetapkan kelulusannya dan mendapat NIP serta terdapat pelamar dinyatakan lulus ujian CPNS tetapi pejabat pembina kepegawaian tidak menetapkan kelulusan peserta. Selain itu, pejabat pembina kepegawaian menetapkan kelulusan bagi peserta ujian CPNS yang lembar jawaban komputernya tidak didukung data yang valid.

- Dalam proses penetapan NIP masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu pengajuan usulan penetapan NIP tidak disertai berkas-berkas persyaratan dan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan CPNS yang telah ditetapkan NIP-nya berbeda dengan SK Rincian Formasi Menteri PAN dan RB. Selain itu terdapat berkas usulan penetapan NIP CPNS dari instansi yang terlambat disampaikan ke BKN namun BKN tetap menetapkan NIP berdasar berkas yang terlambat tersebut. Kelemahan lain adalah terdapat pelamar yang tidak memenuhi persyaratan tetapi tetap mendapat penetapan NIP dari BKN.
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS terdapat beberapa kelemahan, yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum sesuai urutan prioritas tenaga yang dibutuhkan, adanya pengangkatan tenaga honorer yang persyaratan pengangkatannya tidak memadai, dan terdapat tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya walaupun datanya tidak sesuai dengan daftar nominatif BKN. Selain itu, permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas tenaga honorer yang telah diangkat sebagai PNS belum sepenuhnya ditindaklanjuti BKN.
- Pengangkatan sekdes menjadi CPNS formasi Tahun 2009 belum memadai, yaitu penyampaian usulan data dan berkas pengangkatan sekdes dari bupati/walikota kepada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya melalui gubernur. Selain itu proses verifikasi dan validasi pemberkasan pengangkatan sekdes menjadi PNS belum dituangkan dalam kebijakan yang baku dan terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya serta terdapat perbedaan jumlah sekdes yang ditetapkan NIP-nya antara data penetapan NIP menurut Kementerian Dalam Negeri dengan BKN. Kelemahan lain yaitu jangka waktu pelaksanaan pengangkatan sekdes menjadi PNS melewati batas waktu yang ditentukan selambat-lambatnya Tahun 2009.

7.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pemerintah antara lain agar

Menteri PAN dan RB

- mengajukan usulan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas pertimbangan tertulis Kepala BKN atas formasi nasional, pusat, dan daerah;
- membuat *grand design* formasi PNS nasional maupun instansional dan pedoman penyusunannya;
- menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penetapan formasi terkait langkah-langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi; dan

- berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN untuk mereviu dan melakukan rekonsiliasi database daftar nominatif sekdes dan formasi sekdes yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan

- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB serta Menteri Dalam Negeri untuk mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Formasi PNS dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB untuk mengharmonisasikan jadwal permintaan pendapat ketersediaan anggaran belanja pegawai untuk rencana alokasi formasi PNS dari Kementerian PAN dan RB dengan jadwal perhitungan anggaran gaji pegawai baru yang mengacu pada siklus APBN pada Kementerian Keuangan.

Kepala BKN

- menyempurnakan Keputusan Kepala BKN yang mengatur kewajiban instansi menyampaikan lampiran pertimbangan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- membuat kebijakan agar instansi melakukan rekonsiliasi data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan mengupayakan menggunakan data kepegawaian di BKN sebagai data pembanding dalam melakukan analisis;
- menyusun pedoman yang mengatur formula pemberian pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengatur dokumentasi yang harus ada terkait perubahan-perubahan angka usulan tambahan formasi hasil dari pertimbangan;
- melakukan sinkronisasi antara Surat Keputusan Kepala BKN dengan Keputusan Kepala (Kepka) BKN Nomor 26 Tahun 2004 terkait tugas dan wewenang Tim Kerja Kepegawaian dalam proses pemberian pertimbangan;
- meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam hal penetapan tambahan formasi PNS; dan

- memperbaiki ketentuan dan mekanisme pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah secara memadai;

Menteri Dalam Negeri

- meningkatkan koordinasi dengan BKN untuk memonitor jumlah sekdes yang telah ditetapkan NIP-nya; dan
- mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dalam pengangkatan sekdes yang memenuhi syarat namun tertinggal.

7.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

- 8.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa RHL adalah kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. RHL dilaksanakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah.
- 8.2 Salah satu program Kementerian Kehutanan untuk menyediakan bibit tanaman dalam rangka RHL adalah program kebun bibit rakyat (KBR). KBR adalah kegiatan penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serba guna (*multi purpose trees species*) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Sasaran penanaman bibit KBR adalah untuk rehabilitasi hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial, rehabilitasi hutan mangrove, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
- 8.3 Biaya pembuatan dan penanaman bibit KBR disediakan dalam Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Realisasi pembuatan, dan penanaman bibit KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 secara nasional seperti disajikan dalam Tabel 8.1 berikut.

**Tabel 8.1. Realisasi Pembuatan dan Penanaman Bibit KBR
Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012**

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	KBR (Unit)	Pembuatan	Penanaman
1	2010	8.016	373,00	-
2	2011	10.270	587,89	578,14
3	2012 (s.d. Semester I)	10.040	502,00	1,23
Jumlah		28.326	1.462,89	579,37

- 8.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Kegiatan RHL untuk Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 yang dilakukan pada tujuh objek pemeriksaan di Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya di Jakarta (Kantor Pusat), Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Tujuan Pemeriksaan

- 8.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembuatan dan penanaman bibit hasil KBR dalam mendukung kegiatan RHL.

Sasaran Pemeriksaan

- 8.6 Sasaran pemeriksaan diarahkan pada (a) perencanaan kegiatan KBR yang meliputi penganggaran kegiatan KBR, penentuan kelompok tani, dan pembuatan rancangan penanaman; (b) pelaksanaan kegiatan KBR yang meliputi kegiatan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR; serta (c) monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan KBR yang meliputi kegiatan pelaporan, penilaian keberhasilan penanaman, dan pemanfaatan hasil monev KBR untuk perencanaan.

Hasil Pemeriksaan

- 8.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembuatan KBR dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan atas perencanaan, pelaksanaan, dan monev yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan pembuatan dan penanaman bibit hasil KBR, yang terdiri atas 36 kasus ketidakefektifan senilai Rp39,72 juta.

Perencanaan

- 8.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Mekanisme seleksi kelompok KBR pada BPDAS belum memadai, di antaranya penetapan dalam seleksi kelompok tanpa melalui proses *scoring* dan terdapat proposal yang tidak layak sebagai kelompok tani penerima KBR tetapi lolos verifikasi, yang mengakibatkan target RHL berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan Kepala BPDAS Daerah belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan ini terjadi di Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
 - BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar memerintahkan Dirjen BPDAS Perhutanan Sosial (PS) untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat dengan menegur Kepala BPDAS Daerah supaya lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan

- 8.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran, yaitu tidak ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Akibatnya penanaman bibit hasil KBR belum sepenuhnya efektif. Permasalahan ini terjadi di Jakarta (Kantor Pusat), Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

- Bibit hasil KBR yang diserahterimakan belum siap tanam, mengakibatkan kegiatan KBR tidak efektif untuk merehabilitasi lahan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Kepala BPDAS Daerah terkait. Permasalahan ini terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
- 8.10 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen BPDAS PS untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat dengan menegur Kepala BPDAS Daerah atas kelalaiannya.

Monitoring dan Evaluasi

- 8.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam monev kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Pelaporan kegiatan KBR belum tertib, di antaranya penyampaian laporan hanya lisan kepada petugas lapangan KBR dan masih banyaknya kelompok tani KBR yang tidak membuat laporan kemajuan dan realisasi KBR. Akibatnya monev dalam penyelenggaraan penanaman KBR belum optimal dan belum dapat dijadikan acuan untuk kebijakan program KBR di tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena Kepala BPDAS Daerah kurang optimal dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program KBR. Permasalahan ini terjadi di Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Barat.
 - BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen BPDAS PS untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- 8.12 Hasil pemeriksaan kinerja kegiatan RHL juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp566,60 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp155,00 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 5 kasus senilai Rp1,72 miliar, 13 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp12,90 miliar, 5 kasus penyimpangan administrasi, dan 22 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 8.13 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah dan kekurangan penerimaan senilai Rp566,60 juta dan Rp1,72 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp103,69 juta dan Rp10,37 juta oleh Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya di Provinsi Riau.
- 8.14 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 9

Lingkungan Hidup

- 9.1 Terkait dengan pemeriksaan berperspektif lingkungan, pemeriksaan kinerja harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan demikian, pemeriksaan kinerja diharapkan dapat mencerminkan tingkat ketercapaian upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah.
- 9.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas bidang lingkungan hidup, yaitu pemeriksaan kinerja atas pengendalian *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*; perlindungan ekosistem terumbu karang; pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim; pengelolaan air bawah tanah; dan kegiatan reklamasi pasca penambangan.
- 9.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas lima objek pemeriksaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengendalian IUU Fishing

- 9.4 Pemeriksaan kinerja atas pengendalian IUU *fishing* Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam mengendalikan IUU *fishing*.
- 9.5 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota belum terlaksana secara optimal sehingga belum mengarah kepada efektivitas pencapaian sasaran Renstra KKP 2010-2014 yaitu terwujudnya Indonesia yang bebas IUU *fishing* pada Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian IUU *fishing*, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan senilai Rp912,47 juta dan 2 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 9.6 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di antaranya sebagai berikut.
- Upaya pengendalian perizinan penangkapan ikan masih lemah sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya pencegahan IUU *fishing*. Hal tersebut disebabkan antara lain Ditjen Perikanan Tangkap lalai belum menetapkan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah tentang penggunaan alokasi izin usaha perikanan sebagai acuan dalam penerbitan izin penangkapan ikan.
 - Upaya penegakan hukum belum efektif memberantas IUU *fishing*. Hal tersebut disebabkan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak memadai dan kurang cermatnya penempatan PPNS.

- 9.7 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar
- memerintahkan Dirjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pembinaan mengenai perizinan penangkapan ikan ke pemerintah daerah dan segera menetapkan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah tentang penggunaan alokasi izin usaha perikanan sebagai acuan dalam penerbitan izin penangkapan ikan; dan
 - meningkatkan jumlah PPNS dengan merekrut dan menyelenggarakan pendidikan/pelatihan PPNS, serta memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi penempatan PPNS sesuai dengan tingkat kerawanan pelanggaran/tindak pidana perikanan.

Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang

- 9.8 Pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem terumbu karang Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 pada KKP bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang, serta menilai efektivitas kawasan konservasi sebagai pusat perlindungan ekosistem terumbu karang.
- 9.9 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal sehingga belum mengarah kepada efektivitas pencapaian sasaran Renstra KKP Tahun 2010-2014. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan ekosistem terumbu karang, yang terdiri atas 16 kasus ketidakefektifan senilai Rp5,71 miliar dan 6 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 9.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam melindungi ekosistem terumbu karang di antaranya sebagai berikut.
- Belum seluruh kawasan konservasi perairan dan otoritas perdagangan karang hias berada dalam kewenangan KKP. Hal tersebut disebabkan Kementerian Kehutanan belum menyerahkan seluruh taman nasional laut yang masih dalam penguasaannya kepada KKP dan adanya dua ketentuan perundang-undangan yang bersinggungan dalam hal pengelolaan ikan.
 - Pemanfaatan *management information system* senilai Rp1,01 miliar sebagai salah satu sarana monitoring *coral, reef, rehabilitation, and management project phase* (COREMAP) II tidak optimal. Hal tersebut disebabkan perencanaan yang dilakukan oleh *National Coordinating Unit* dan pengelolaan dokumen terkait COREMAP II oleh unit pengelolaan proyek tidak memadai.

- 9.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar
- meningkatkan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menindaklanjuti surat keputusan bersama yang telah dibuat dan membahas penyalarsan kewenangan KKP dan Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - memerintahkan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil untuk mengoptimalkan sistem informasi COREMAP II yang telah dibangun.

Pengelolaan Kegiatan Penambangan Batubara Tanjung Enim

- 9.12 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PT BA) bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan tersebut.
- 9.13 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT BA belum efektif dalam mengelola kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, serta monev kegiatan penambangan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 9.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penambangan di antaranya sebagai berikut.
- Kegiatan produksi batubara dan pengembangan areal tambang di izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Banko Tengah tertunda yang disebabkan PT BA belum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atas hutan tanaman industri yang dikuasai oleh PT MHP. Hal tersebut disebabkan manajemen PT BA tidak mengajukan IPPKH atas areal di wilayah Banko Tengah sebagai syarat melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan pada saat memiliki izin kuasa pertambangan eksplorasi (KW.J00196) Tahun 1996 dan Kementerian Kehutanan belum menerbitkan IPPKH atas areal di wilayah Banko Tengah.
 - Kegiatan penambangan swakelola di PT BA Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 belum mencapai target produksi batubara dan penggalian tanah. Hal tersebut disebabkan perencanaan swakelola tidak dilaksanakan dengan baik dan kontrak perjanjian swakelola selain paket 09-218 tidak memuat pasal mengenai penilaian kinerja pelaksana pekerjaan (*business partner appraisal*) sebagai sarana evaluasi kinerja rekanan.
- 9.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT BA antara lain agar

- bersama-sama dengan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kehutanan dan mengajukan IPPKH sesuai hasil pertemuan yang dipimpin Menteri Perekonomian tanggal 5 Juni 2012; dan
 - menyusun dan menerapkan perencanaan penambangan swakelola sesuai dengan kondisi terkini dan memasukkan *business partner appraisal* dalam kontrak perjanjian swakelola.
- 9.16 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan kegiatan penambangan juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 2 kasus senilai Rp210,37 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp885,24 juta, 2 kasus penyimpangan administrasi, dan 9 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan Air Bawah Tanah

- 9.17 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan air bawah tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait lainnya di Jakarta bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konservasi air tanah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 9.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dhi. BPLHD serta Dinas Perindustrian dan Energi belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan konservasi air tanah, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.
- 9.19 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan konservasi air tanah di antaranya sebagai berikut.
- Sistem informasi air tanah Provinsi DKI Jakarta belum komprehensif dan terintegrasi. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pembuatan sistem informasi air tanah yang di dalamnya mengakomodasi hasil pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data dari berbagai pihak yang dikumpulkan dan diolah ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait yang disesuaikan tingkat aksesnya terhadap data dan informasi yang diperlukan.
 - Pengelolaan pemberian izin dan sanksi terhadap izin pemanfaatan air bawah tanah masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan Kepala Subbidang Perizinan BPLHD belum optimal melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap surat izin pemboran air bawah tanah (SIB) dan surat izin pemanfaatan air bawah tanah (SIPA); Kepala Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD belum optimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap izin SIPA yang kedaluwarsa; dan BPLHD

belum melakukan pemutakhiran data pengguna air tanah secara menyeluruh baik dari database yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak, maupun data penambahan pengguna air tanah baru.

- 9.20 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta antara lain agar
- menginstruksikan asisten pembangunan dan lingkungan hidup supaya mengembangkan unit pengelola data dan informasi sumber daya air (SDA) terpadu dengan cara antara lain, membangun jejaring sistem informasi SDA antarinstansi dan memfasilitasi dengan cara meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi SDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan
 - memerintahkan Kepala Subbidang Perizinan BPLHD untuk menginventarisasi data perizinan SIB dan SIPA sehingga pengguna air tanah yang izinnya telah kedaluwarsa dapat diidentifikasi, melakukan pemberitahuan kepada pengguna air tanah yang izinnya telah kedaluwarsa, dan berkoordinasi dengan Kepala Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengguna air tanah yang tidak memperpanjang izin yang kedaluwarsa sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan pemutakhiran data pengguna air tanah secara menyeluruh baik dari database yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak maupun data penambahan pengguna air tanah baru.

Reklamasi Pasca Penambangan

- 9.21 Pemeriksaan kinerja atas kegiatan reklamasi pasca penambangan pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I Tahun 2012 di Sungailiat bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan timah di darat untuk area penggunaan lainnya.
- 9.22 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I Tahun 2012 di Sungailiat belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 9.23 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan timah di antaranya sebagai berikut.
- Sejumlah IUP tidak dapat dinilai kelayakan lingkungannya dan tidak memiliki pedoman pelaksanaan reklamasi. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi lalai dalam menerbitkan IUP belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup kurang

cermat dalam melakukan koordinasi dan menatausahakan dokumen lingkungan hidup terkait kegiatan pertambangan.

- Pengawasan terhadap pengelolaan reklamasi belum efektif. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi belum memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas kelalaiannya dalam menyerahkan laporan pelaksanaan reklamasi, dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup lalai dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi sebagaimana telah ditetapkan.

9.24 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar

- memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk memberikan sanksi kepada IUP yang sampai saat ini belum melengkapi dokumen-dokumen persyaratan penerbitan IUP dan memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam menerbitkan IUP dan penatausahaan dokumen lingkungan hidup; dan
- memperingatkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan reklamasi.

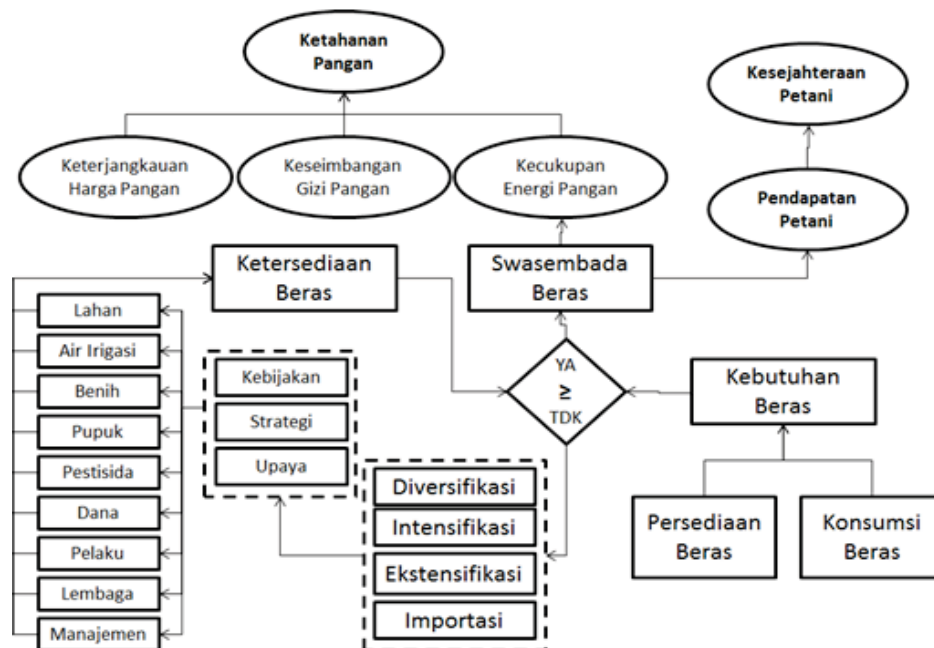
9.25 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 10

Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB)

- 10.1 Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
- 10.2 Beras merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I (Tahun 2005 s.d. 2009), pembangunan nasional antara lain diprioritaskan pada program ketahanan pangan melalui upaya pencapaian dan pemantapan SBB. Kemudian dalam RPJMN II (Tahun 2010 s.d. 2014), pemerintah menargetkan tercapainya produksi padi sebanyak 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Tahun 2014.
- 10.3 Swasembada beras terwujud apabila kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi. Kebutuhan beras cenderung selalu meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan persediaan beras melalui kegiatan diversifikasi pangan, intensifikasi, dan ekstensifikasi penanaman padi, serta importasi beras. Untuk itu diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya dari pemerintah untuk mengelola sarana produksi padi (lahan, irigasi, benih, pupuk, pestisida, dan dana) serta meningkatkan kelembagaan dan manajemen. Skema pencapaian ketahanan pangan dapat dilihat pada Gambar 10.1 berikut.

Gambar 10.1. Skema Pencapaian Ketahanan Pangan



- 10.4 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian SBB Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012. Lingkup pemeriksaan di tingkat nasional adalah pada 4 kementerian/lembaga negara dan 97 kabupaten/kota di 9 provinsi, termasuk di seluruh provinsi sentra produksi padi.

Tujuan Pemeriksaan

- 10.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai

- Efektivitas kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mencapai SBB;
- Penghematan (ekonomis) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBB; dan
- Kepatuhan (ketaatan) terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBB.

Sasaran Pemeriksaan

- 10.6 Untuk mencapai tujuan pemeriksaan atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan, pemeriksaan diarahkan terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Peningkatan produksi/produktivitas padi.
- Perluasan dan perlindungan areal sawah.
- Pengamanan produksi.
- Pemenuhan kebutuhan beras nasional.
- Ketersediaan dan pendistribusian beras.
- Kebijakan dan pelaksanaan impor beras.

Instansi yang Diperiksa:

1. Kementerian Pertanian:
 - ❖ Ditjen Tanaman Pangan
 - ❖ Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - ❖ Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - ❖ Badan Ketahanan Pangan
 - ❖ Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia
 - ❖ Badan Karantina Pertanian
 - ❖ Badan Litbang Pertanian
2. Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Perdagangan;
3. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
4. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya di:
 - ❖ Provinsi Sumatera Utara
 - ❖ Provinsi Sumatera Selatan
 - ❖ Provinsi Lampung
 - ❖ Provinsi Jawa Barat
 - ❖ Provinsi Jawa Tengah
 - ❖ Provinsi Jawa Timur
 - ❖ Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - ❖ Provinsi Kalimantan Timur
 - ❖ Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil Pemeriksaan

- 10.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran.
- 10.8 Kelemahan-kelemahan tersebut terdiri atas 20 kasus ketidakefektifan senilai Rp56,57 miliar, 4 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp32,11 miliar, 1 kasus indikasi kerugian negara senilai Rp87,70 juta, 1 kasus potensi kerugian negara senilai Rp973,10 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp131,14 miliar, dan 3 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 10.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pencapaian sasaran dan ketidakhematan penggunaan anggaran antara lain sebagai berikut.

Upaya Perluasan dan Optimalisasi Lahan

- 10.10 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam perluasan lahan sawah dan optimalisasi lahan belum efektif, yaitu antara lain sebagai berikut.
- Target pencetakan sawah tidak tercapai. Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan sawah Tahun 2010 s.d. 2014 seluas 250.000 ha. Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), target ini ditingkatkan menjadi 262.100 ha. Realisasi pencetakan sawah s.d. September 2012 baru mencapai 60.770 ha atau 46,38% dari target Tahun 2010 s.d. 2012.
 - Upaya optimasi lahan belum sepenuhnya efektif. Optimasi lahan pertanian adalah upaya untuk memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan usaha tani pangan produktif melalui perbaikan lahan dan sarana dukungannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kegiatan optimasi lahan Tahun 2011 yang lahannya berada di kawasan hutan lindung, terdapat bantuan optimasi lahan Tahun 2010 yang tidak bermanfaat karena lahan sering digenangi air, terdapat kegiatan optimasi lahan Tahun 2012 yang belum dilaksanakan oleh para kelompok tani, dan terdapat kegiatan optimasi melalui pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum seluruhnya terealisasi karena dana bantuan tidak mencukupi.
- 10.11 Hal tersebut disebabkan oleh
- Kementerian Pertanian belum melakukan analisis kebutuhan lahan sawah guna mencapai target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014;
 - pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan belum menjelaskan secara pasti kapan pelaksanaan survei, investigasi, dan desain (SID) serta instansi yang membiayai SID; dan

- lemahnya pembinaan dan pengawasan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian atas pelaksanaan pencetakan sawah.
- 10.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar
- menghitung ulang berapa sebenarnya luasan sawah baru yang diperlukan di setiap provinsi untuk mendukung SBB dan P2BN serta bagaimana pentahapan luasan pencetakan sawah yang efektif sampai Tahun 2014;
 - menyusun kebutuhan lahan sawah (luasan dan lokasinya) secara rinci per provinsi untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton Tahun 2014;
 - merevisi pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan yang lebih rinci dan jelas, khususnya tentang SID pencetakan sawah; dan
 - menegur Dirjen PSP atas kelalaiannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencetakan sawah.

Upaya Peningkatan Produktivitas Padi

- 10.13 Hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi antara lain sebagai berikut.
- Pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Metode SRI tidak digunakan lagi karena umur tanaman lebih lama, biaya mahal terutama upah buruh tani, memerlukan pupuk organik yang banyak, dan rawan serangan hama. Metode ini juga batal dilaksanakan karena bantuan terlambat ditransfer kepada kelompok tani dan adanya keberatan dari kelompok tani untuk menggunakan metode SRI. Akibatnya tujuan dan outcome usaha tani metode SRI tidak tercapai. Hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan penerapan inovasi oleh Kementerian Pertanian dan kurangnya penyuluhan kepada para kelompok tani.
 - Bendungan/jaringan irigasi di tiga kabupaten rusak berat dan hasil pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 13 kabupaten tidak bermanfaat yang mengakibatkan peningkatan produktivitas padi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan Menteri Pekerjaan Umum belum memprioritaskan pembangunan Waduk Banjarharjo untuk mengoptimalkan sistem jaringan Daerah Irigasi Dumpil dan kurangnya pemeliharaan bendungan, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Ditjen PSP Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan pembuatan embung, cekdam, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
 - Upaya penyediaan benih varietas unggul bersertifikat belum efektif, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan cadangan

benih nasional (CBN) berdampak meningkatnya ketergantungan petani terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Penyaluran BLBU dan CBN Tahun 2010 s.d. 2012 sebanyak 3.464,65 ton di 27 kabupaten/kota tidak tepat sasaran, terlambat dari musim tanam, berkualitas rendah, dan kedaluwarsa sehingga menimbulkan ketidakhematan sebesar Rp29,02 miliar. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam merencanakan bantuan benih tidak mempertimbangkan aspek kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul dan lemahnya pengawasan oleh Ditjen Tanaman Pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberian BLBU dan CBN.

10.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar

- mengevaluasi kembali program usaha tani metode SRI untuk keberhasilan penerapannya di kemudian hari dan memastikan bahwa para petani yang akan menerapkan metode SRI sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang metode SRI;
- berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sistem jaringan irigasi; menegur secara tertulis Dirjen PSP atas kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan embung, cekdam, dan rehabilitasi jaringan irigasi; serta memastikan bahwa bendungan/jaringan irigasi yang dibutuhkan telah dalam kondisi prima terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman padi di sawah-sawah; dan
- melakukan evaluasi dampak dari program BLBU dan CBN serta memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan untuk meminta pertanggungjawaban Perum Perhutani atas penggunaan CBN untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011.

Upaya Pengamanan Produksi Padi

10.15 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) belum optimal. Serangan OPT dan DPI ditargetkan pada Tahun 2010 s.d. 2014 turun, ternyata lahan sawah yang puso (gagal panen) akibat OPT pada Tahun 2010 dan 2011 naik. DPI (banjir dan kekeringan) pada Tahun 2010 naik, tetapi pada Tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan upaya pengamanan produksi padi melalui pengendalian OPT dan DPI tidak efektif. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan pembinaan oleh Kementerian Pertanian.

10.16 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar meningkatkan upaya pengendalian OPT dan DPI melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah,

serta menyusun peta-peta yang lebih teliti dalam menggambarkan daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Upaya Pengamanan Stok Beras

- 10.17 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa pembangunan lumbung pangan belum sepenuhnya efektif menunjang pencapaian surplus beras 10 juta ton Tahun 2014 dan belum seluruh daerah rawan pangan dibangun lumbung pangan. Hal ini terjadi karena Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak memprioritaskan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten yang berkategori rawan pangan.
- 10.18 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menegur Kepala BKP untuk segera memberi bantuan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten rawan pangan.

Upaya Pengurangan Tingkat Konsumsi Beras

- 10.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat konsumsi beras belum efektif menunjang pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014. Target pemerintah adalah menurunkan tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Ternyata tingkat konsumsi beras Tahun 2011 turun 0,75% dan tingkat konsumsi umbi-umbian Tahun 2008 s.d. 2011 turun rata-rata 4,97% per tahun, sedangkan tingkat konsumsi tepung/terigu Tahun 2010 dan 2011 naik 4,17% dan 12%.
- 10.20 Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan tingkat konsumsi beras bukan karena substitusi ke umbi-umbian (pangan lokal), melainkan ke tepung terigu/gandum. Adapun untuk memperoleh tepung/terigu, Indonesia mengimpor sebanyak 5,61 juta ton pada Tahun 2010, dan sebanyak 6,20 juta ton pada Tahun 2011. Penyebabnya adalah dari aspek sosial budaya, Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sulit untuk mensubstitusi beras sebagai sumber karbohidrat.
- 10.21 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar mengkaji ulang Program P2KP dan mengembangkan program peningkatan konsumsi makanan sumber protein dan lemak (dengan meningkatnya konsumsi makanan sumber protein dan lemak, maka secara otomatis akan mengurangi konsumsi beras).

Dukungan Kelembagaan Penyuluhan dan Perkreditan Usaha Tani Padi

- 10.22 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan penyuluhan belum efektif menunjang pencapaian target surplus beras 10 juta ton Tahun 2014. Terdapat 4 provinsi, 164 kabupaten/kota, dan 1.601 kecamatan belum membentuk lembaga penyuluhan. Tenaga penyuluh per September 2012 berjumlah 51.433 orang, jauh di bawah jumlah ideal sebanyak 98.126 orang.

- 10.23 Para penyuluh PNS di Provinsi Lampung memiliki beban kerja yang tertinggi terhadap jumlah kelompok tani, yaitu satu penyuluh harus menangani sebelas kelompok tani, sedangkan para penyuluh PNS di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beban kerja tertinggi terhadap luas sawah, yaitu satu orang harus menangani wilayah sawah seluas 269,91 ha.
- 10.24 Hal tersebut terjadi karena lemahnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kabupaten/kota dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan rekrutmen tenaga penyuluh (PNS kabupaten/kota).
- 10.25 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar meningkatkan koordinasi dengan para gubernur dan bupati/walikota untuk pembentukan kelembagaan penyuluhan, meningkatkan pelaporan kegiatan, dan merekrut tenaga penyuluh (PNS kabupaten/kota).
- 10.26 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.
- Perum Bulog mengimpor beras non *public service obligation* (PSO) dengan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang pembebasan bea masuk impor beras PSO, sehingga bebas membayar bea masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari bea masuk senilai Rp97,93 miliar. Penyebabnya adalah kesengajaan dari pihak Perum Bulog untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor beras non PSO.
 - Penyaluran BLBU Tahun 2012 oleh PT HNW tidak sesuai kontrak mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp973,10 juta. Penyebabnya adalah kelalaian panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang meloloskan PT HNW sebagai pemenang pelelangan BLBU.
 - Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi tidak cermat sehingga menimbulkan ketidakhematan keuangan negara senilai Rp570,65 juta. Hal ini terjadi karena Panitia Pengadaan dan PPK tidak cermat dalam menyusun HPS dalam rangka memperoleh harga yang paling menguntungkan negara.
- 10.27 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direktur Utama Perum Bulog untuk membayar bea masuk senilai Rp97,93 miliar;
 - Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan menegur secara tertulis PPK dan unit layanan pengadaan (ULP) atas kelalaiannya dan memerintahkan PT HNW mempertanggungjawabkan benih yang tidak sesuai spesifikasi teknis, jika tidak dapat mempertanggungjawabkan

agar menyetorkan ke kas negara senilai Rp973,10 juta dan menegur PT HNW atas keterlambatan penyalurannya; dan

- Menteri Pertanian agar menginstruksikan kepada para PPK dan Tim Penyusun HPS dalam kegiatan pengadaan di Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan penambahan keuntungan atas harga hasil survei yang merupakan harga pasar atau harga *end user*, serta menegur PPK dan tim penyusun HPS agar bekerja lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

10.28 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 11

Minyak dan Gas Bumi (Migas)

- 11.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha migas mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan serta menyumbangkan devisa yang cukup signifikan bagi negara.
- 11.2 Kegiatan usaha migas meliputi kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha migas yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
- 11.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas sektor migas pada dua objek, yaitu pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS), dan instansi terkait lainnya, serta implementasi kebijakan energi nasional sektor gas area kunci pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero).

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- 11.4 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas Tahun 2010 dan 2011 bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang meliputi kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja (WK), kegiatan eksplorasi, serta kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi migas telah efektif, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pada tiap-tiap kegiatan tersebut.
- 11.5 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam kaitannya dengan pencapaian target produksi mengalami kendala-kendala yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, yang terdiri atas 1 kasus ketidakefektifan dan 8 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 11.6 Kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, serta kegiatan eksplorasi mengalami kendala terkait kendala internal kontraktor, operasional,

perizinan dan tumpang tindih lahan, serta sosial masyarakat. Adapun kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi terkendala dengan implementasi mekanisme pengawasan dan implementasi sistem informasi.

- 11.7 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, serta kegiatan eksplorasi di antaranya sebagai berikut.

Kendala Internal

- Kementerian ESDM belum memiliki metodologi yang baku untuk mempertimbangkan parameter kewajaran biaya eksplorasi dalam melakukan penilaian dokumen lelang dan menyatakan perusahaan memenuhi kemampuan keuangan sehingga tidak dapat diyakini bahwa pemenang lelang memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan komitmen pasti.

Perizinan dan Tumpang Tindih Lahan

- Kementerian ESDM menetapkan beberapa WK sebelum mendapat masukan dari konsultasi daerah dan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah yang wilayah administrasinya dilalui oleh WK memperoleh informasi melalui konsultasi daerah, serta tidak memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti saran/masukan dari pemerintah daerah yang disampaikan pada saat konsultasi daerah. Hal ini disebabkan Kementerian ESDM belum memiliki mekanisme berupa tata cara koordinasi, pelaksanaan konsultasi daerah, tindak lanjut atas informasi yang diperoleh, dan tujuan yang diharapkan dari proses tersebut.
- Kementerian ESDM belum melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan terkait izin pinjam pakai kawasan hutan dalam penyiapan, penetapan, dan penawaran WK sehingga pelaksanaan kewajiban komitmen pasti sesuai ketentuan KKS yang disusun oleh Kementerian ESDM pada WK yang tumpang tindih dengan wilayah kehutanan terhambat oleh pengurusan izin pinjam pakai hutan yang membutuhkan waktu 215 hari kerja.

Kendala Operasional

- Kementerian ESDM telah meminta pertimbangan kepada BPMIGAS dalam kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, namun pertimbangan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Permintaan pertimbangan kepada BPMIGAS dalam proses penetapan WK migas dibutuhkan untuk mendapatkan masukan terkait operasional kegiatan usaha hulu migas. Pada praktiknya terdapat beberapa kondisi dimana pertimbangan tidak dipakai secara optimal oleh Kementerian ESDM karena waktu penyampaian permintaan pertimbangan bersamaan atau setelah WK tersebut ditetapkan.

- BPMIGAS belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan kegiatan eksplorasi karena pedoman evaluasi biaya pada BPMIGAS belum mengatur secara detail terkait dengan proses evaluasi biaya.

Sosial Masyarakat

- BPMIGAS belum memiliki pedoman terkait pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan kegiatan eksplorasi. Hal tersebut disebabkan pedoman yang ada belum mencantumkan aspek sosial dan kultural sehingga pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan berbeda-beda tergantung pada setiap KKKS.

11.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

Kementerian ESDM

- menetapkan mekanisme baku sebagai petunjuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008;
- menetapkan mekanisme baku sebagai petunjuk pelaksanaan tata cara konsultasi daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- melakukan koordinasi lintas kementerian kepada Kementerian Kehutanan untuk memperlancar dan mempermudah perizinan untuk kegiatan usaha hulu migas sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010; dan
- menjabarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terkait permintaan pertimbangan kepada BPMIGAS dalam bentuk tata cara permintaan pertimbangan, lingkup pertimbangan, dan tahapan waktu permintaan pertimbangan.

BPMIGAS

- menyempurnakan pedoman evaluasi biaya pada perencanaan kegiatan eksplorasi supaya lebih terstruktur; dan
- menyempurnakan pedoman yang sudah ada dengan hasil kajian dan pemetaan aspek sosial masyarakat dan alur pelaksanaan sosialisasi.

11.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi di antaranya sebagai berikut.

- BPMIGAS belum memiliki mekanisme untuk memastikan KKKS melakukan perencanaan pemeliharaan sesuai Pedoman Tata Kerja

(PTK) 41 Tahun 2011 dan belum mengatur secara detail terkait dengan proses evaluasi biaya. Belum adanya mekanisme dan pedoman tersebut mengakibatkan pengelolaan pemeliharaan fasilitas produksi tidak diyakini telah direncanakan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan frekuensi berhentinya produksi secara tiba-tiba (*unplanned shutdown*) Tahun 2011.

- BPMIGAS belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi terutama yang dilakukan oleh Divisi Pemeliharaan Fasilitas Operasi dan belum memiliki daftar peralatan/fasilitas produksi pada beberapa KKKS sehingga pengelolaan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi terkait *unplanned shutdown* tidak mendapat dukungan informasi yang memadai.

11.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada BPMIGAS antara lain untuk

- memperbaiki pedoman dan sistem pengawasan kegiatan pemeliharaan KKKS sehingga dapat memastikan kepatuhan KKKS terhadap PTK 41 Tahun 2011 dan menyempurnakan pedoman evaluasi biaya pada perencanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi; dan
- segera merealisasikan rencana ICT *blueprint* untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya.

Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas

11.11 Pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas area kunci pendistribusian LPG Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero) bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pendistribusian LPG dan Tabung LPG Pertamina, dengan subtujuan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

- Perencanaan kegiatan pendistribusian dan penentuan harga LPG telah dilakukan secara memadai, memiliki justifikasi, dan memenuhi kriteria penetapan perencanaan yang baik.
- Kegiatan pendistribusian LPG maupun pemeliharaan sarana prasarana pendistribusian telah dilaksanakan dengan efisien dan memenuhi ekspektasi yang dituangkan dalam *key performance indicator* (KPI).
- Penanganan tabung LPG telah dilaksanakan sesuai dengan standar, kualitas, dan kuantitas yang ditentukan oleh Pertamina maupun instansi yang berwenang lainnya.
- Kegiatan pendistribusian LPG dan ketersediaan tabung LPG telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai dalam rangka memenuhi

tujuan perusahaan dan ketersediaan LPG serta tabung untuk keperluan masyarakat.

- 11.12 Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan penyediaannya.
- 11.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas, yang terdiri atas 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp50,96 miliar dan 7 kasus ketidakefektifan.
- 11.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Penggunaan *floating storage very large gas carrier* (VLGC) sebagai solusi sementara pengganti terminal LPG *refrigerated* dalam jangka panjang menimbulkan hilangnya potensi penghematan senilai USD5.23 juta per tahun. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum merealisasikan terminal LPG *refrigerated* di darat untuk menggantikan *floating storage* VLGC, adanya *delay* pada proses penyusunan *front end engineering design* (FEED), dan adanya permasalahan pembebasan lahan untuk dermaga.
 - Pertamina menanggung kerugian atas bisnis LPG non PSO 12 kg dan 50 kg selama Tahun 2011 s.d. Oktober 2012 senilai Rp7,73 triliun. Kerugian disebabkan Pertamina tidak menaikkan harga jual LPG tabung 12 kg dengan masih mempertimbangkan kata “dilaporkan kepada Menteri” dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 sebagai sesuatu yang mengikat dan harus mendapatkan persetujuan pemerintah.
 - Pertamina belum memanfaatkan sumber dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG secara optimal. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum menjabarkan strateginya dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dalam bentuk yang lebih konkret dan nyata, serta belum mengambil langkah-langkah jangka panjang yang lebih terencana dengan memaksimalkan potensi sumber LPG dari dalam negeri.
 - Kekurangan jumlah depot LPG di beberapa daerah berpotensi mengganggu kelancaran distribusi LPG dan menimbulkan hilangnya potensi penghematan *transport fee* minimal senilai Rp25,9 miliar per tahun. Hal tersebut disebabkan Pertamina tidak memiliki perencanaan

yang matang terkait dengan pola pembangunan depot, belum menetapkan porsi depot/terminal yang akan dibangun sendiri atau yang akan disediakan oleh swasta, belum melakukan koordinasi internal, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk percepatan pembangunan depot/terminal.

- Pertamina kehilangan potensi penghematan kegiatan *Integrated Port Time* (IPT) untuk proses *discharge* LPG senilai USD17.29 juta pada Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Oktober). Hal tersebut disebabkan antara lain IPT hanya menjadi KPI bagi Fungsi *Marine*, bukan menjadi KPI bagi fungsi lainnya, dan Pertamina belum mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan dan perbaikan sarana dermaga maupun depot LPG.

11.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina (Persero) antara lain untuk

- merealisasikan percepatan pembangunan terminal LPG *refrigerated* Jawa Bagian Barat (JBB) Banten untuk menggantikan VLGC, membuat jadwal perkembangan *project* sebagai sarana monitoring dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mempercepat pengurusan penggunaan area untuk pembangunan dermaga kapal VLGC;
- menaikkan harga LPG tabung 12 kg sesuai harga perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina dengan mempertimbangkan harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, serta melaporkan kenaikan harga LPG tabung 12 kg tersebut kepada Menteri ESDM;
- mendeskripsikan secara lebih rinci turunan dari RJPP dalam bentuk *workplan* langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pasokan LPG dari dalam negeri dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pembelian sumber-sumber gas baik melalui kerja sama antara anak perusahaan dengan KKKS maupun KKKS murni;
- membuat *blue print* perencanaan pembangunan depot/terminal LPG di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan secara definitif depot yang akan dibangun sendiri maupun depot yang akan disewa ke pihak swasta dengan mempertimbangkan kebutuhan *storage* LPG di masa yang akan datang serta menetapkan rencana kerja pengendalian dan pengawasan percepatan pembangunan depot/terminal; dan
- mewajibkan KPI IPT ke fungsi-fungsi terkait dan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan serta perbaikan sarana dermaga maupun depot LPG.

- 11.16 Hasil pemeriksaan kinerja implementasi kebijakan energi nasional sektor gas juga mengungkapkan adanya 2 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan dan 6 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 11.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 12

Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum

- 12.1 Pengelolaan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami.
- 12.2 Sungai Citarum mengairi ratusan ribu hektar sawah khususnya wilayah Pantai Utara Jawa Barat melalui jaringan irigasi Jatiluhur. Sungai Citarum juga merupakan sumber air bagi penduduk kota besar seperti Bandung dan Jakarta, serta sumber pembangkit listrik tenaga air untuk Pulau Jawa dan Bali. Selain itu Sungai Citarum juga mengairi tiga waduk yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Ir. H. Djuanda dengan menghasilkan daya listrik 1.400 MW.
- 12.3 Mengingat keberadaan Sungai Citarum sangat penting sebagai penyedia air baku ibukota dan mempunyai dampak ekonomi serta sosial yang besar secara regional, maka pemerintah menjadikan Sungai Citarum sebagai wilayah sungai strategis nasional yang kewenangan pengelolannya berada di Pemerintah Pusat.

Gambar 12.1. Wilayah Sungai Citarum



- 12.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas SDA WS Citarum pada delapan objek, yaitu 3 kementerian dan 5 pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengelolaan SDA pada WS Citarum

Sasaran Pemeriksaan

- 12.6 Sasaran pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas

- koordinasi antar instansi dalam memadukan upaya-upaya pengelolaan SDA Sungai Citarum; dan
- pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di WS Citarum.

Instansi yang Diperiksa:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perum Jasa Tirta II
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi terkait lainnya
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5. Pemerintah Kabupaten Bandung
6. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
7. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
8. Pemerintah Kota Bandung

Hasil Pemeriksaan

- 12.7 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan SDA pada WS Citarum menunjukkan
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan SDA;
 - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memiliki peran penting terkait pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah rumah tangga/domestik, serta pengawasan dan penegakan hukum;
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan terpadu terkait pengelolaan SDA pada WS Citarum dalam bentuk Citarum *Roadmap*;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi yang selaras dengan RTRW nasional dan telah membentuk Dewan SDA Provinsi dan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA WS Citarum;
 - Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan rencana pendayagunaan air Sungai Citarum beserta anak-anaknya, menggunakan laboratorium yang terakreditasi, dan telah melakukan pemantauan kualitas air sungai pada 75 titik di anak-anak Sungai Citarum yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun;

- Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki RTRW kabupaten yang selaras dengan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan
 - Pemerintah Kota Bandung telah menyusun RTRW Kota Bandung 2011-2030 dan telah melakukan pengawasan kualitas air pada 16 anak Sungai Citarum melalui program kali bersih.
- 12.8 Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Kementerian PU, PJT II, KLH, dan Kementerian PPN/Bappenas serta empat pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengelola SDA WS Citarum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan SDA WS Citarum dalam hal koordinasi antarinstansi dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di WS Citarum, yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan senilai Rp3,93 miliar.

Koordinasi antarinstansi

- 12.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait koordinasi antarinstansi yaitu sebagai berikut.
- Target penertiban keramba jaring apung (KJA) oleh PJT II tidak tercapai. Sampai dengan Tahun 2012, terdapat 7.087 petak KJA dari total 20.752 petak KJA tidak memiliki surat perjanjian pemanfaatan area perairan. Selain itu, PJT II serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta belum mengatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan pengendalian dan penertiban KJA. Hal tersebut mengakibatkan populasi KJA tidak terkontrol dan kualitas air waduk semakin turun. Penyebabnya adalah Direksi PJT II belum menyusun perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban KJA.
 - Terdapat dua perencanaan dan koordinasi pengelolaan WS Citarum yaitu Citarum *Roadmap* yang disusun oleh Bappenas dan pola rencana pengelolaan Sungai Citarum yang disusun oleh Kementerian PU. Hal tersebut mengakibatkan potensi ketidakjelasan atas pengelolaan Sungai Citarum, khususnya bagi para instansi terkait pengelolaan di pusat dan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antara Kementerian PU dan Bappenas pada saat perencanaan kontrak dengan *Asian Development Bank* dalam pembuatan pola dan rencana untuk WS Citarum.
- 12.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direksi PJT II agar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menyusun perjanjian kerja sama penertiban KJA yang diatur dalam nota kesepahaman; dan

- Kepala Bappenas agar menginstruksikan Deputi Sarana dan Prasarana untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PU dalam pengelolaan *Roadmap Citarum* dengan memperhatikan amanat *loan Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* Nomor 2500-INO (SF) dan 2501-INO (SF).

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

12.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, antara lain sebagai berikut.

- Pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh KLH dan pemda lemah sehingga pencemaran air limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pembinaan pengelolaan air limbah domestik oleh Deputi II KLH kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pencemaran limbah cair industri yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung belum optimal. Akibatnya kualitas air akibat pencemaran pada sungai-sungai di Kota Bandung yang merupakan anak Sungai Citarum menurun. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya pembinaan dan pengawasan BPLH Kota Bandung, serta tidak ada tindakan tegas BPLH dalam penegakan hukum untuk menindaklanjuti perusahaan yang lalai dan bermasalah dalam pengelolaan limbah cair.

12.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Menteri KLH antara lain agar menegur dan menginstruksikan Deputi II supaya berkoordinasi dengan Kementerian PU dan pemda di WS Citarum untuk menyusun rencana penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah domestik skala kota yang sebanding dengan jumlah populasi; dan
- Walikota Bandung antara lain agar memerintahkan Kepala BPLH untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai dan bermasalah dalam pengelolaan limbah.

12.13 Selain kelemahan dalam pengelolaan kualitas air dan pencemaran lingkungan, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yaitu.

- Terdapat empat perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang membuang limbahnya tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi pencemaran lingkungan karena tidak terpantaunya pembuangan limbah cair.

- Terdapat tujuh pelaku usaha (industri) di Kabupaten Bandung yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali dan empat pelaku usaha (industri) yang membuang limbah cair tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran air di WS Citarum semakin tinggi.
 - Terdapat 16 pelaku usaha (industri) di Kabupaten Bandung Barat yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran air di WS Citarum semakin tinggi.
- 12.14 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan SDA WS Citarum juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp441,10 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp22,32 miliar, 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan, 6 kasus penyimpangan administrasi, dan 16 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 12.15 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 13

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- 13.1 Air bersih merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga pemenuhan terhadap air bersih mutlak diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah melalui PDAM memanfaatkan potensi sumber daya air baku yang berlimpah untuk keperluan masyarakat sehari-hari.
- 13.2 PDAM merupakan perusahaan daerah yang terdapat di tingkat provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melakukan penyediaan dan pendistribusian air bersih sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat. PDAM didirikan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Pemenuhan tersebut dengan membangun dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum secara seimbang dan merata. PDAM juga didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 13.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM yang dilakukan pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi.
- 13.4 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM dilakukan pada tiga kegiatan, yaitu
- kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan;
 - kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi; dan
 - pengelolaan meter air (*water meter*).

Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan

- 13.5 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan yang dilakukan pada delapan PDAM. Tujuh PDAM untuk tahun yang diperiksa Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yaitu PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta Dharma Kabupaten Lebak, PDAM Kota Denpasar, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Kabupaten Kolaka, dan PDAM Kota Gorontalo. Satu PDAM untuk tahun yang diperiksa Tahun 2011 dan 2012 yaitu PDAM Kabupaten Gianyar.
- 13.6 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PDAM terkait kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.

- 13.7 Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 92 kasus ketidakefektifan senilai Rp7,63 miliar.
- 13.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses produksi antara lain sebagai berikut.
- Kegiatan produksi tidak didukung dengan SOP dan sarana instalasi produksi yang lengkap. Selain itu, terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Hal tersebut antara lain disebabkan pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 13.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses distribusi, di antaranya sebagai berikut.
- Tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung menggunakan alat ukur yang akurat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan distribusi belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang lengkap sehingga pendistribusian air bersih kepada pelanggan belum seluruhnya terpenuhi selama 24 jam. Hal tersebut antara lain disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sarana prasarana distribusi yang kurang memadai dan tidak dimanfaatkan secara optimal, serta tidak adanya prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi kebocoran air.
 - BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan sarana prasarana distribusi air bersih, serta menyusun SOP mengenai pengendalian dan perhitungan tingkat kehilangan air yang ditetapkan secara formal dengan surat keputusan Direktur PDAM.
- 13.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses pelayanan pelanggan, di antaranya sebagai berikut.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pelanggan belum didukung dengan pedoman yang mengatur penanganan pengaduan, media pengaduan, dan unit penanganan pengaduan. Selain itu, kegiatan penanganan keluhan

pelanggan dan pembacaan *water meter* tidak didukung dengan SOP sehingga tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut pada umumnya disebabkan antara lain pejabat yang berwenang lalai dan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan kegiatan penanganan keluhan pelanggan dan pelayanan penyelesaian pengaduan.

13.11 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan PDAM juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah/perusahaan sebanyak 3 kasus senilai Rp119,93 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 2 kasus senilai Rp33,02 juta), potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp48,54 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp583,29 juta, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 85 kasus kelemahan pengendalian intern.

13.12 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp583,29 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan oleh PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin senilai Rp303,18 juta.

Kegiatan Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi

13.13 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan penanggulangan kebocoran air serta pemeliharaan sarana prasarana produksi yang dilakukan pada PDAM Kota Magelang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi.

13.14 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PDAM Kota Magelang belum efektif dalam melakukan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 6 kasus ketidakefektifan dan 10 kasus kelemahan pengendalian intern.

13.15 Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya kegiatan peneraan, penggantian, dan perbaikan meter air serta penanggulangan kebocoran air pada pipa distribusi belum didukung dengan SOP. Selain itu, pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana produksi terkait sumber air, *genset*, panel listrik, dan pompa tidak dilakukan secara rutin sesuai SNI 6775 Tahun 2008 serta belum didukung dengan SOP. Hal tersebut disebabkan antara lain

pejabat yang berwenang belum menetapkan SOP dan tidak memahami standar tata cara pengoperasian serta pemeliharaan sarana prasarana produksi.

- 13.16 BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar segera menetapkan SOP, menyusun jenis dan jadwal pemeliharaan, serta melakukan koordinasi dan pemantauan atas pemeliharaan sarana prasarana.

Pengelolaan Meter Air

- 13.17 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan meter air yang dilakukan pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang bertujuan menilai efektivitas kegiatan pengelolaan meter air dalam meminimalkan tingkat kehilangan air.
- 13.18 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan meter air dalam meminimalkan tingkat kehilangan air adalah kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan dan 11 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 13.19 Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya pengadaan meter air belum berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan perusahaan, kegiatan pemantauan kondisi dan pemeliharaan meter air belum didukung dengan SOP, dukungan sarana prasarana teknis belum sepenuhnya memadai dan rusak, serta SPM belum dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kinerja sehingga manajemen tidak dapat mengukur pencapaian kerjanya.
- 13.20 Hal tersebut disebabkan antara lain pejabat yang berwenang belum memperhatikan pentingnya analisis kebutuhan pengadaan meter air dan penyusunan SOP sebagai pedoman kegiatan. Selain itu, pejabat yang berwenang belum melakukan pemeliharaan, pemantauan, pengoptimalan sarana prasarana, dan belum adanya kriteria standar SPM secara terinci dan terukur.
- 13.21 BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar membuat analisis kebutuhan pengadaan meter air, menyusun SOP kegiatan, melakukan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, serta mengusulkan penyempurnaan kriteria standar SPM.
- 13.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 14

Kinerja Bidang Lainnya

14.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 19 objek pemeriksaan kinerja bidang lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 2 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 7 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 3 objek pemeriksaan BUMN, 1 objek pemeriksaan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan BLU.

14.2 Objek pemeriksaan tersebut terbagi atas pemeriksaan pengelolaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pengelolaan unit layanan pengadaan (ULP), manajemen aset, dan kinerja lain-lain.

TKI

14.3 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI formal Program *Government to Government (G to G)* pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Perwakilan Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jepang, dan Korea Selatan untuk TA 2011 dan 2012.

14.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah efektif menyangkut aspek perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian.

14.5 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya

- penempatan TKI formal *G to G* untuk bekerja di luar negeri telah didukung dengan suatu kebijakan untuk melindungi hak-hak dasar TKI berupa peraturan ketenagakerjaan di negara penempatan, *memorandum of understanding (MoU)*, dan peraturan pelaksanaan/teknis;
- penempatan TKI formal ke Korea Selatan dan Jepang masing-masing juga didukung dengan sistem perekrutan yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Selatan dan diimplementasikan ke seluruh negara pengirim yang menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Korea Selatan (*Sending Public Agency System/SPAS*) dan proses *matching* yang bebas intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta proses validasi calon TKI guna meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan penempatan dan perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

- pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G* ke Jepang dan Korea Selatan juga diawasi secara ketat oleh pemerintah negara penempatan.
- 14.6 Kejelasan kebijakan, sistem perekrutan yang memadai, dan ketatnya pengawasan oleh pemerintah negara penempatan mengakibatkan permasalahan yang terjadi pada TKI formal Program *G to G* relatif sedikit dibandingkan dengan TKI informal.
- 14.7 Namun demikian, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan dan 5 kasus kelemahan pengendalian intern. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan agar pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI formal Program *G to G* menjadi lebih optimal antara lain sebagai berikut.
- Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI formal Program *G to G* kurang memadai. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang sampai ke masyarakat tidak benar, lengkap, akurat, berimbang, sesuai kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat pencari kerja salah dalam mengambil keputusan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, kesiapan fisik dan mental, serta adanya potensi pihak tertentu mengambil keuntungan dari ketidaktahuan calon TKI. Hal tersebut disebabkan antara lain Subdirektorat Monitoring Evaluasi Sosialisasi, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan (Dit. Soskel), dan Deputi Bidang Penempatan tidak memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi. Selain itu kurangnya koordinasi antara BNP2TKI dan BP3TKI dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi penempatan TKI Program *G to G*.
 - Calon TKI Program *G to G* ke Korea Selatan tidak memperoleh informasi yang memadai tentang pekerjaan dan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mereview kontrak kerja/*standard labour contract* (SLC) sebelum menandatangani. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan TKI mendapatkan pekerjaan tidak sesuai harapan dan pindah kerja secara ilegal. Peningkatan jumlah TKI ilegal mempengaruhi keberlangsungan dan kuota penempatan TKI Program *G to G* ke Korea Selatan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengarahan dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada calon TKI terkait informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan sebelum calon TKI menandatangani SLC.
 - Database penempatan TKI pada perwakilan RI belum meliputi seluruh data TKI yang masuk dan bekerja di negara penempatan sehingga berpotensi mengganggu kecepatan penyelesaian kasus TKI bermasalah, pemantauan, dan pembinaan TKI. Hal tersebut disebabkan kebijakan dan implementasi integrasi database TKI yang dijalankan oleh BNP2TKI serta instansi terkait tidak optimal dan kurangnya sosialisasi wajib lapor diri oleh instansi terkait.

- 14.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala BNP2TKI untuk
- menginstruksikan Dit. Soskel untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi khususnya terkait penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G*; menginstruksikan Dit. Soskel untuk berkoordinasi dengan Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah (Dit. PPP) menyusun buku materi baku sebagai bahan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G* yang lengkap, berimbang, sesuai perkembangan, dan kebutuhan;
 - menginstruksikan Dit. PPP agar meningkatkan pengarahannya dan sosialisasi tentang informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan kepada calon TKI; dan
 - berkoordinasi dengan Staf Teknis Ketenagakerjaan di Perwakilan RI Korea Selatan dan Jepang dalam rangka mengoptimalkan database hasil sistem aplikasi kartu tenaga kerja luar negeri sebagai sumber data keberangkatan bagi perwakilan RI serta meningkatkan sosialisasi agar TKI melaporkan kedatangannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

ULP

- 14.9 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan ULP pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, dan Kota Parepare untuk TA 2011.
- 14.10 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja pengelolaan ULP dan mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja yang masih membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.
- 14.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pada tiga ULP memiliki capaian kinerja cukup, yang berarti manajemen harus berhati-hati karena sewaktu-waktu kinerjanya dapat turun lagi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ULP, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 14 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 14.12 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ULP antara lain sebagai berikut.
- ULP belum memiliki SOP atas satu atau keseluruhan prosedur dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan tidak ada standarisasi pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan administrasi tidak tertib. Selain itu, ULP belum melakukan analisis beban kerja dalam menyusun kelompok kerja pengadaan barang/jasa sehingga penetapan dan pembagian tugas perangkat organisasi belum memadai.

Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menyusun dan menetapkan SOP serta melakukan analisis beban kerja.

- ULP belum sepenuhnya melakukan pengkajian ulang terkait harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis sehingga HPS tidak disusun sesuai dengan harga pasar. Selain itu, ULP belum melaksanakan proses evaluasi pengadaan barang/jasa secara memadai sehingga penyedia barang/jasa yang dipilih untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa diragukan kualitas dan kemampuan kerjanya. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menetapkan mekanisme telaahan HPS, spesifikasi teknis, dan pendokumentasiannya, serta anggota kelompok kerja belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ULP belum memiliki kebijakan formal atas monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa dan belum melakukan pengadaan barang/jasa secara *full e-procurement* sehingga prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menyusun dan menetapkan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi, serta kurangnya komitmen dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara *full e-procurement*.

14.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada bupati/walikota agar menginstruksikan Kepala ULP untuk

- menyusun dan menetapkan SOP baik administratif maupun teknis untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi perangkat ULP serta menyusun analisis beban kerja ULP sesuai dengan tata cara yang diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- menyusun mekanisme telaahan HPS dan spesifikasi teknis serta pendokumentasiannya, menginstruksikan anggota kelompok kerja ULP untuk menyusun spesifikasi teknis dan HPS, serta melaksanakan evaluasi proses pengadaan barang/jasa secara cermat dan teliti dengan memedomani ketentuan yang berlaku; dan
- menyusun kebijakan formal tentang monitoring dan evaluasi atas proses pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan pengadaan barang/jasa yang seluruh proses pelelangannya dilakukan secara *full e-procurement* atas seluruh paket yang dilelang melalui ULP mulai TA 2013.

Manajemen Aset

14.14 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas manajemen aset pada tiga kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012.

- 14.15 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas penatausahaan aset tetap.
- 14.16 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset tetap belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan.
- 14.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen aset antara lain sebagai berikut.
- Penatausahaan aset tetap belum didukung dengan SDM yang memadai, yaitu belum ada syarat kompetensi bagi pejabat penatausahaan, belum ada analisis kebutuhan pegawai secara khusus untuk pegawai yang mengelola penatausahaan aset. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan aset tetap. Penyebabnya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan sistem pemilihan pengurus barang yang tidak berdasarkan kualifikasi tertentu.
 - Barang yang sudah tidak dalam penguasaan, hilang, dan rusak belum dihapuskan karena belum diusulkan oleh pengguna barang milik daerah (BMD) sehingga membebani pemeliharaan, penyimpanan, perawatan, dan penatausahaan BMD. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pengurus barang, pengguna barang, dan pengelola barang terkait mekanisme penghapusan BMD.
 - Pelaksanaan kegiatan pengamanan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memadai. Secara administrasi ditunjukkan dengan masih terbatasnya pemberian label kode dan tidak tersedianya informasi dalam kartu inventaris barang dengan tidak diketahuinya secara pasti data aset tanah yang belum/sudah bersertifikat. Secara fisik ditunjukkan dengan masih terdapatnya 6 bidang tanah serta bangunan dan 2 bidang tanah kosong yang tidak dilakukan pemagaran, pemasangan tanda batas, dan pemasangan tanda kepemilikan. Hal tersebut berpotensi terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya aset tetap yang terjadi karena Kepala Bidang Pengadaan dan Aset Daerah belum optimal dalam penyelenggaraan koordinasi pengamanan aset tetap.
- 14.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas antara lain untuk
- memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi penatausahaan aset tetap dan melakukan analisis kebutuhan pegawai yang mengelola penatausahaan aset tetap;
 - menyampaikan usulan penghapusan BMD disertai berita acara pemeriksaan barang dan dokumentasi kondisi barang kepada pengelola barang; dan

- mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaan Kepala SKPD se-Kabupaten Tulang Bawang.

14.19 Hasil pemeriksaan kinerja manajemen aset juga mengungkapkan adanya 2 kasus penyimpangan administrasi dan 41 kasus kelemahan pengendalian intern.

Kinerja Lain-Lain

14.20 Selain pemeriksaan atas kegiatan TKI, pengelolaan ULP, dan manajemen aset, terdapat 12 pemeriksaan kinerja lain-lain, yaitu 8 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas, 2 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi, serta 2 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi.

14.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas 12 objek pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 79 kasus ketidakefektifan senilai Rp14,83 miliar, 1 kasus ketidakefisienan, dan 2 kasus ketidakhematian/ketidakekonomisan senilai Rp270,00 juta.

14.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas delapan objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas tersebut diuraikan sebagai berikut.

Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah

14.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan perencanaan investasi pemerintah yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Kementerian Keuangan TA 2006 s.d. Triwulan II Tahun 2012 menunjukkan bahwa manajemen PIP telah melakukan upaya dalam menekan resiko investasi hingga *zero risk*. Namun penyaluran dana investasi pemerintah oleh PIP tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya permasalahan perencanaan investasi pemerintah. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan regulasi/kebijakan tertulis tentang perencanaan investasi pemerintah melalui PIP sebagai BLU belum memadai, perencanaan investasi di PIP belum didukung dengan sumber data yang valid dan belum didasari dengan alasan, asumsi, dan pertimbangan yang jelas, perencanaan investasi pemerintah belum didukung ketersediaan sumber daya yang memadai, dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

14.24 Hasil pemeriksaan kinerja atas SIDJP TA 2012 menunjukkan bahwa sistem informasi perpajakan kurang efektif dalam mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut antara lain terlihat dari aplikasi SIDJP belum memadai untuk digunakan sebagai alat bantu utama dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak; dan sistem informasi perpajakan yang digunakan saat ini belum memadai untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengambilan keputusan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

- 14.25 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan di Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dinilai cukup efektif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di STAN, sebagai perguruan tinggi kedinasan. Namun, guna meningkatkan kinerja STAN, masih diperlukan beberapa hal yaitu melakukan penyesuaian kelembagaan STAN agar sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, dan melakukan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan, serta menyusun dan menetapkan SOP perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Kegiatan Peningkatan Ekspor

- 14.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan peningkatan ekspor pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) TA 2011 dan 2012 menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut kurang efektif. Hal tersebut antara lain terlihat dari Timnas PEPI belum memiliki sistem informasi, dan mekanisme monitoring penyelesaian permasalahan, serta belum menetapkan Sekretaris Timnas PEPI. Selain itu, SOP kegiatan peningkatan ekspor belum disusun secara memadai, dan pelaporan, monitoring, serta evaluasi kegiatan belum dilaksanakan secara memadai.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Provinsi Aceh

- 14.27 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah pada Inspektorat Provinsi Aceh Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Banda Aceh menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya kelemahan-kelemahan pada tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Aceh dalam pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya, serta terdapat kegiatan tindak lanjut yang belum dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal.

Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 14.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Manajemen BPAD Provinsi DKI Jakarta kurang efektif. Hal tersebut antara lain terlihat dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kekurangan tenaga arsiparis untuk melakukan penataan arsip sesuai aturan kearsipan, dan saat ini Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARS) di BPAD dalam kondisi rusak dan kurang efektif digunakan sebagai database arsip dan sarana temu kembali arsip.

Pembentukan dan Pengelolaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (PT PI)

- 14.29 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembentukan dan pengelolaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (PT PI) Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa PT PI masih memiliki kelemahan yang mendorong belum efektifnya pembentukan dan pengelolaan *holding* BUMN pupuk. Hal tersebut antara lain terlihat dari PT PI belum memiliki *blue print* dan/atau rencana induk sebagai arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan perusahaan, rencana strategis, proses bisnis, struktur organisasi, dan SOP yang memadai.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon

- 14.30 Hasil pemeriksaan kinerja atas PD Pasar Kota Tomohon TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa PD Pasar Kota Tomohon belum melakukan secara efektif proses kegiatan penagihan dan perencanaan, pelayanan, serta evaluasi pada Bagian Umum. Hal tersebut antara lain terlihat dari sarana prasana PD Pasar Kota Tomohon yang tidak memadai, serta PD Pasar Kota Tomohon belum menetapkan standar pelayanan minimal.
- 14.31 Hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan pada PTPN IX (Persero)

- 14.32 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan pada PTPN IX (Persero) Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Semarang dan Surakarta menunjukkan belum efektif dan belum efisien. Hal tersebut antara lain terlihat dari Direksi PTPN IX tidak sepenuhnya memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan menimbulkan inefisiensi biaya bunga Tahun 2011 minimal senilai Rp16,01 miliar. Selain itu, pengendalian atas pengelolaan kredit ketahanan pangan dan energi kurang memadai sehingga kurang mendukung pencapaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Kegiatan Pengerukan Perum Jasa Tirta (PJT) I

- 14.33 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan BJPSDA dan kegiatan pengerukan Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada PJT I menunjukkan bahwa pengelolaan BJPSDA telah dilaksanakan cukup efektif, sedangkan kegiatan pengerukan telah dilaksanakan cukup efektif namun kurang efisien.
- 14.34 Selain itu masih terdapat beberapa kelemahan dalam penetapan volume BJPSDA yaitu beberapa pengguna air tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, pembayaran BJPSDA Tahun 2012 (s.d. Semester I) belum sesuai tarif Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, dan analisis prioritas kegiatan pengerukan belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

- 14.35 Hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI)

- 14.36 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SIMKARI pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara TA 2010 s.d. Triwulan III Tahun 2011 menunjukkan bahwa pengadaan SIMKARI-2 untuk menyediakan otomatisasi bisnis proses penanganan perkara belum efektif, pelaksanaan kontrak pengadaan jasa interkoneksi *wide area network* Kejaksaan Agung Tahun 2010 dan 2011 tidak efisien, serta pekerjaan pengadaan jasa pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras *data centre*, *disaster recovery centre*, dan perangkat keras SIMKARI-2 Kejaksaan Agung Tahun 2010 tidak ekonomis senilai Rp270,00 juta.

Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Muna

- 14.37 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kepegawaian Kabupaten Muna TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna kurang ekonomis, kurang efisien, dan kurang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan kepegawaian. Hal tersebut antara lain tercermin dari masih adanya hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pelaksanaan dan pemantauan kegiatan formasi pegawai belum memadai, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pada Subbidang Sistem Informasi dan Subbidang Dokumentasi dan Penggajian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna belum dilaksanakan secara memadai.
- 14.38 Hasil pemeriksaan kinerja lain-lain juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp809,90 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp17,27 miliar, 2 kasus penyimpangan administrasi, dan 142 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 14.39 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ATC : *Air Traffic Control*

B

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bandara : Bandar Udara

BBWS : Balai Besar Wilayah Sungai

BHP : Badan Hukum Perseroan

BJPSDA : Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

BKN : Badan Kepegawaian Negara

BKP : Badan Ketahanan Pangan

BKT : Banjir Kanal Timur

BLU : Badan Layanan Umum

BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul

BMCK : Bina Marga dan Cipta Karya

BMD : Barang Milik Daerah

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BPAD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

BPDAS : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPMIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BPS : Badan Pusat Statistik

BPLH : Badan Pengelola Lingkungan Hidup

BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

BP3TKI : Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

Bulog : Badan Urusan Logistik

C

CBN : Cadangan Benih Nasional

CD : *Compact Disc*

COREMAP : *Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase*

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAS : Daerah Aliran Sungai

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DPI : Dampak Perubahan Iklim

Dirjen : Direktur Jenderal

Ditjen : Direktorat Jenderal

Ditjen Daglu : Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Dit. PPP : Direktorat Penempatan Pelayanan Pemerintah

Dit. Soskel : Direktorat Sosialisasi Kegiatan dan Penempatan

DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPS	: <i>Drop Structure</i>
E	
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
3E	: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas
G	
GKG	: Gabah Kering Giling
GP3K	: Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi
G to G	: <i>Government to Government</i>
H	
HK	: Harga Konsumen
HPE	: Harga Patokan Ekspor
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
I	
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
INSW	: <i>Indonesian National Single Window</i>
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPT	: <i>Integrated Port Time</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUU	: <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i>
J	
JBB	: Jawa Bagian Barat
JUT	: Jalan Usaha Tani
K	
KBR	: Kebun Bibit Rakyat
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
kg	: kilogram
KIA	: Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
KIA-Gizi	: Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat
KJA	: Keramba Jaring Apung
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KP2T	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KUMKMP	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPI	: <i>Key Performance Indicator</i>

L

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik

M

Migas	: Minyak dan Gas Bumi
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MW	: Mega Watt

N

NIP	: Nomor Induk Pegawai
-----	-----------------------

O

OPT	: Organisme Pengganggu Tanaman
Otsus	: Otonomi Khusus

P

PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	: Pemerintah Daerah
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PJT	: Perum Jasa Tirta
PKFAD	: <i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PS	: Perhutanan Sosial
PSP	: Prasarana dan Sarana Pertanian
PT	: Perusahaan Terbatas
PTK	: Pedoman Tata Kerja
PTPN	: PT Perkebunan Nusantara
PT AP I	: PT Angkasa Pura I (Persero)
PT AP II	: PT Angkasa Pura II (Persero)
PT BA	: PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT HNW	: PT Hidayah Nur Wahana
PT MHP	: PT Musi Hutan Persada
PT PI	: PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT PP	: PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Pusri	: PT Pupuk Sriwijaya (Persero)
PT Telkom	: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PU	: Pekerjaan Umum
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
P2B	: Pengawasan dan Penertiban Bangunan
P2BN	: Peningkatan Produksi Beras Nasional
P2KP	: Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

R

Renstra	: Rencana Strategis
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RJPP	: Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rumah Tinggal
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Rusunawa	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Satker	: Satuan Kerja
SBB	: Swasembada Beras Berkelanjutan
Sekdes	: Sekretaris Desa
SDA	: Sumber Daya Air
SDM	: Sumber Daya Manusia
SID	: Survei, Investigasi, dan Desain
SIDJP	: Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIMARS	: Sistem Informasi Manajemen Kearsipan
SIMKARI	: Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SIUP-MB	: Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLC	: <i>Standard Labour Contract</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SNVT PJSA	: Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPAS	: <i>Sending Public Agency System</i>
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
STAN	: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
SRI	: <i>System of Rice Intensification</i>

T

TA	: Tahun Anggaran
TB	: <i>Twin Block</i>
Timnas PEPI	: Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

U

ULP : Unit Layanan Pengadaan
UKM : Usaha Kecil Menengah

V

VLGC : *Very Large Gas Carrier*

W

WK : Wilayah Kerja
WS : Wilayah Sungai

LAMPIRAN

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Kedapausahaan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan						Nilai penyesuaian aset atau pemotoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Negara/ Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kelemahan Penertinan		Administrasi		Total Ketidapausahaan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Kelemahan Pengendalian Intern		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kelemahan Penertinan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Pendidikan	4	125,77	-	-	1	1.807,77	13	18	1.933,54	1	34	72	107	-	-	-	-	98	2.564,66	98	2.564,66	-	9,07	-
	Provinsi	2	14,65	-	-	-	-	-	6	14,65	-	2	2	1	14,65	-	-	-	6	-	6	-	-	9,07	-
	Kabupaten/Kota	2	111,12	-	-	1	1.807,77	9	12	1.918,89	1	32	71	104	-	-	-	-	92	2.564,66	92	2.564,66	-	-	-
2	Kesehatan	-	-	1	46,74	2	48,42	7	10	95,16	7	168	607	782	2	36,13	1	178,53	817	13.053,36	820	13.268,02	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	-	-	1	46,74	2	48,42	7	10	95,16	7	163	580	750	2	36,13	1	178,53	757	13.053,36	760	13.268,02	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1	21,21	4	5	21,21	2	57	223	282	-	-	-	-	297	-	297	-	-	-	-
	Badan Layanan Umum	-	-	1	46,74	1	27,21	2	4	73,95	3	103	350	456	2	36,13	1	178,53	455	13.053,36	458	13.268,02	-	-	-
	Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	32	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	26	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-
3	Infrastruktur	9	3.130,91	8	9.001,96	3	1.103,23	2	22	13.236,10	-	21	11	32	7	6.078,69	6	90.140,81	27	1.099.288,34	40	1.195.507,84	-	-	-
	Proyek Banjir Kanal Timur	5	535,36	2	4.545,77	-	-	-	8	5.081,13	-	4	-	4	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-
	Pusat	5	535,36	2	4.545,77	-	-	-	8	5.081,13	-	4	-	4	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-
	Program Rusunawa	1	279,09	1	4,50	1	821,00	-	3	1.094,59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.058.375,14	3	1.058.375,14	-	-	-
	Pusat	1	279,09	1	4,50	1	821,00	-	3	1.094,59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.058.375,14	3	1.058.375,14	-	-	-
	Dina Otus Aceh	3	2.316,46	4	1.376,74	2	282,23	1	10	3.975,43	-	13	8	21	6	5.111,22	-	14	29.216,80	20	34.328,02	-	-	-	
	Provinsi	3	2.316,46	4	1.376,74	2	282,23	1	10	3.975,43	-	13	8	21	6	5.111,22	-	14	29.216,80	20	34.328,02	-	-	-	
	Pengelolaan Proyek PT PP BUMN	-	-	1	3.074,95	-	-	-	1	3.074,95	-	4	3	7	1	967,47	6	90.140,81	3	11.696,40	10	102.804,68	-	-	-
	BUMN	-	-	1	3.074,95	-	-	-	1	3.074,95	-	4	3	7	1	967,47	6	90.140,81	3	11.696,40	10	102.804,68	-	-	-
4	Pelayanan Publik	3	1.307,93	-	-	5	4.446,77	-	9	5.754,70	6	13	79	98	5	5.328,18	2	57,90	125	16.590,02	132	21.976,10	-	2.546,38	-
	Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	26	33	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	22	-	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	11	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-
	Pelayanan Ekspor Barang yang dipergunakan Beas Keluar	-	-	-	-	1	3.834,52	-	1	3.834,52	-	-	5	5	-	-	-	-	18	5.268,23	18	5.268,23	-	2.546,38	-
	Pusat	-	-	-	-	1	3.834,52	-	1	3.834,52	-	-	5	5	-	-	-	-	18	5.268,23	18	5.268,23	-	2.546,38	-
	BUMN	3	1.307,93	-	-	3	545,66	-	6	1.853,59	-	7	2	9	5	5.328,18	-	34	11.316,84	39	16.645,02	-	-	-	
	Pelayanan Publik Lainnya	3	1.307,93	-	-	3	545,66	-	6	1.853,59	-	7	2	9	5	5.328,18	-	34	11.316,84	39	16.645,02	-	-	-	
	Pusat	-	-	-	-	1	66,59	-	2	66,59	2	3	46	51	-	-	-	-	28	57,90	30	4,95	-	62,85	-
	BUMN	-	-	-	-	1	66,59	-	1	66,59	2	3	43	48	-	-	-	-	24	57,90	26	62,85	-	-	-
	Pusat	-	-	-	-	1	66,59	-	1	66,59	2	3	43	48	-	-	-	-	24	57,90	26	62,85	-	-	-
	BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu volis)

No	Entitas	Kedapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kedakefisienan, Kedakefisienan, dan Ketidakefektifan						Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Keurangan Pencernaan		Administrasi		Total Kedapatuhan		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Kelemahan Pengendalian Intern			Kedakefisienan		Kedakefektifan		Total Temuan SE		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
5	Penetapan Formasi dan Sipli (PNS) Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	26	-	-	26	-	-	-	-		
6	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Pusat	7	566,60	-	-	5	1.724,68	5	17	2.291,28	-	13	9	22	13	12.890,04	-	-	36	39,72	49	12.948,76	103,69	103,37				
7	Lingkungan Hidup Pusat	7	566,60	-	-	5	1.724,68	5	17	2.291,28	-	13	9	22	13	12.890,04	-	-	36	39,72	49	12.948,76	103,69	103,37				
	Pengendalian UU Fishing	-	-	2	210.372,16	1	885,24	2	5	211.257,40	1	10	6	17	2	-	-	-	4	912,47	4	912,47	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	912,47	4	912,47	-	-	-	-		
	Perindungan Ekosistem Reumbu Karang Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	16	5.716,74	16	5.716,74	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	16	5.716,74	16	5.716,74	-	-	-	-		
	Pengelolaan Kegiatan Penambangan Batubara Tanjung Enim BUMN	-	-	2	210.372,16	1	885,24	2	5	211.257,40	1	4	4	9	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	2	210.372,16	1	885,24	2	5	211.257,40	1	4	4	9	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-		
	Reklamasi Pasca Penambangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-		
8	Swasembada Beras Berkelanjutan Pusat	1	87,70	1	973,10	3	131.142,08	-	5	132.202,88	1	1	1	3	4	32.115,93	-	-	20	56.573,27	24	88.689,20	-	-	-	-		
	Pusat	1	87,70	1	973,10	3	131.142,08	-	5	132.202,88	1	1	1	3	4	32.115,93	-	-	20	56.573,27	24	88.689,20	-	-	-	-		
9	Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jumlah Rupaiah BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	14	2	-	-	-	8	375,65	12	375,65	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	14	2	-	-	-	8	375,65	12	375,65	-	-	-	-		
	Jumlah Rupaiah Migas Badan Lainnya BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rupaiah BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	375,65	11	375,65	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	375,65	11	375,65	-	-	-	-		
10	Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum	1	441,10	-	-	1	223,23,56	6	8	22.764,66	-	1	15	16	1	-	-	-	26	3.930,83	27	3.930,83	-	-	-	-		
	Pusat	1	441,10	-	-	1	223,23,56	6	8	22.764,66	-	1	15	16	1	-	-	-	26	3.930,83	27	3.930,83	-	-	-	-		
	Provinsi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	232,94	13	232,94	-	-	-	-		
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,697,89	2	3,697,89	-	-	-	-		
	Provinsi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	232,94	13	232,94	-	-	-	-		

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kendapatkan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kendakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Nilai penyerahan aset atau pemertoran ke kas negara/daerah/perusahaan dan kewajiban yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kerugian Penerimaan		Administrasi		Total Kendapatkan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Kelemahan Pengendalian Intern		Kendakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan SE		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
11	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kegiatan Produksi, Distribusi dan Pelayanan Pelanggan BUMD	3	119,93	1	48,54	1	583,29	1	6	751,76	2	28	76	106	-	-	-	-	108	7.636,46	108	7.636,46	-	-	-	-	108	7.636,46	-	303,18	
	Kegiatan Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi BUMD	3	119,93	1	48,54	1	583,29	1	6	751,76	2	25	58	85	-	-	-	-	92	7.636,46	92	7.636,46	-	-	-	-	92	7.636,46	-	303,18	
12	Kinerja Bidang Lainnya TKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Unit Layanan Pengabdian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	10	14	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	14	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
	Mandjemer Abet Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	2	2	-	17	18	41	10	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	41	-	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	-	41	-	-	-	
	Kinerja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	112	142	-	-	-	-	142	-	142	-	-	-	-	-	142	-	-	-	
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	15	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	13	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
	BUMD	-	-	-	-	-	-	2	4	17.855,41	-	9	13	22	-	-	-	-	22	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	
	BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
	Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	65	71	-	-	-	-	71	-	71	-	-	-	-	-	71	-	-	-	
	Total	14	1.468,75	4	5.523,37	12	159.912,43	9	39	166.904,55	3	30	83	116	18	45.294,97	3	57,90	206	1.130.588,41	227	1.175.944,28	-	-	-	206	1.130.588,41	227	1.175.944,28	103,69	2.556,75
	Pusat	5	2.331,11	4	1.376,74	2	282,23	7	18	3.990,08	3	24	54	81	6	5.111,22	-	-	95	430.899,93	101	48.201,15	-	-	-	95	430.899,93	101	48.201,15	9,07	
	Provinsi	3	552,22	-	-	-	-	19	24	2.381,20	24	108	371	503	1	-	-	-	484	2.797,60	485	2.797,60	-	-	-	484	2.797,60	485	2.797,60	-	
	Kabupaten/Kota	3	1.307,93	4	214.257,01	5	18.476,41	4	16	234.041,35	1	27	28	56	8	6.295,65	8	90.516,46	71	23.979,31	87	120.791,42	-	-	-	71	23.979,31	87	120.791,42	-	
	BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	28	5.779,94	14	221.252,40	24	181.340,85	42	108	408.373,19	36	331	1.044	1.411	36	56.737,97	12	90.752,89	1.440	1.221.145,07	1.488	1.368.635,93	-	-	-	1.488	1.368.635,93	1.488	1.368.635,93	112,76	2.859,93
	Jumlah rupiah	-	5.779,94	-	221.252,40	-	181.340,85	-	-	408.373,19	-	-	-	-	-	56.737,97	-	-	-	1.221.145,07	-	1.368.635,93	-	-	-	-	1.221.145,07	-	1.419.223,66	112,76	2.859,93

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Kinerja				
I	Pendidikan			
1	1	Provinsi Aceh	1	Efektivitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
2	2	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pelayanan Pendidikan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
	3		1	Kinerja Pendidikan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
	4		1	Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Tenaga Pendidik Serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Pendidikan Dasar dan Menengah TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar
3	5	Provinsi Riau	1	Kinerja Dinas Pendidikan TA 2011-2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
	6		1	Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2011 - Semester I 2012
4	7	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Dasar TA 2011 dan 2012 (Smt. I) pada Pemerintah Kabupaten Lingga
	8		1	Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2011 dan 2012 di Batam
	9		1	Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 dan 2012 di Tanjungpinang
5	10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun Ajaran 2011/2012 Pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu
	11		1	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Ajaran 2011/2012 Pada Pemerintah Kab. Lombok Tengah di Praya
6	12	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 dan 2012
7	13	Provinsi Maluku	1	Kinerja Pendidikan pada Pemerintah Kota Tual TA 2010, 2011, dan Semester I TA 2012 di Tual
			13	
II	Kesehatan			
A	Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah			
1	14	Provinsi Aceh	1	Efektivitas Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Dalam Mengelola Pelayanan Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh
	15		1	Pelayanan Rawat Inap Kelas III TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) pada RSUD Dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
	16		1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Takengon
	17		1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Kelas III TA 2011 dan Tahun 2012 (Semester I) pada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe
2	18	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelayanan Kesehatan RSUD Deli Serdang TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
	19		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Tanjung Pura TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
	20		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Pirngadi TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	21		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Djasamen Saragih TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar
3	22	Provinsi Sumatera Barat	1	Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam di Lubuk Basung
	23		1	Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto
4	24	Provinsi Jambi	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gizi RSU M. H. A. Thalib Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
	25		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kefarmasian pada RSD Kolonel Abundjani Kabupaten Merangin di Bangko
	26		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada RSUD H. Hanafie di Muara Bungo
	27		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
	28		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kefarmasian RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo di Muaro Tebo
	29		1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Peralatan 2 RSUD Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain di Sarolangun

Halaman 2 - Lampiran 2

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
5	30	Provinsi Sumatera Selatan	1	Perbekalan Farmasi Pada RSUD DR. H.M. Rabain Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
6	31	Provinsi Bangka Belitung	1	Pelayanan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2011 s.d. Semester I 2012 di Manggar
7	32	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Kabupaten Karimun Tahun 2011 dan 2012 di Tanjung Balai Karimun
	33		1	Pengelolaan Pelayanan Obat pada Instalasi Farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam di Batam
	34		1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) di Batam
8	35	Provinsi Jawa Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan rawat Inap dan Perbekalan Farmasi TA 2011 dan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Provinsi Jawa Barat di Baleendah
	36		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi di Cibitung
	37		1	Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Rekam Medis TA 2011 dan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Kota Cimahi di Cimahi
	38		1	Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Rekam Medis TA 2011 dan 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
9	39	Provinsi Jawa Tengah	1	Pelayanan Instalasi Farmasi dan Instalasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Brebes
	40		1	Pelayanan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 dan 2012 di Karanganyar
	41		1	Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Purworejo
10	42	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Yogyakarta TA 2011 dan 2012 (s.d Juni) di Yogyakarta
11	43	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soedono TA 2011 dan 2012 Semester I di Madiun
	44		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Blitar
	45		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 dan 2012 di Bondowoso
	46		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Jombang TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Jombang
	47		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Kediri TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Kediri
	48		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Lamongan
	49		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang TA 2011 dan 2012 di Lumajang
	50		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Magetan
	51		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Ngawi
	52		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan TA 2011 dan 2012 di Pamekasan
	53		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Tuban
	54		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Tulungagung
	55		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo TA 2011 dan 2012 di Probolinggo
12	56	Provinsi Bali	1	Pelayanan Medis Di Instalasi Rawat Inap Dan Instalasi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung TA 2011 Dan 2012 Di Mangupura
13	57	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pengelolaan Pelayanan Gawat Darurat pada RSUD Bima Kabupaten Bima TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) di Raba
14	58	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap TA 2011 dan 2012 pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang di Kupang
	59		1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap TA 2011 dan 2012 pada RSUD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
15	60	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Pelayanan Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang Tahun 2011 dan 2012 (s.d. semester I) di Ketapang
	61		1	Kinerja Pelayanan Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang TA 2011 dan 2012 (s.d. semester I) di Sintang
16	62	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
	63		1	Efektivitas Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
	64		1	Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

Halaman 3 - Lampiran 2

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
17	65 Provinsi Kalimantan Selatan	1	Penerimaan, Pelayanan, dan Pemulangan Pasien Rawat Inap pada RSUD H.Boejasin TA 2011 dan 2012 (Nopember) di Pelaihari
18	66 Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi RSUD Dr. Abdul Rivai TA 2011 dan 2012 di Kabupaten Berau
19	67 Provinsi Sulawesi Utara	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Datoe Binangking Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2011 dan Semester I 2012 di Kotamobagu
	68	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa di Tondano
20	69 Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSUD Ampana di Kabupaten Tojo Una-una
	70	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSU Mokopido di Kabupaten Tolitoli
	71	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSU Anutapura di Kota Palu
21	72 Provinsi Gorontalo	1	Pelayanan Poli Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila
22	73 Provinsi Sulawesi Barat	1	Pengelolaan Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD Majene
23	74 Provinsi Maluku	1	Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi Tahun 2011 dan 2012 pada RSUD dr. M. Haulussy di Ambon
24	75 Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Pelayanan Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha TA 2011 di Labuha
25	76 Provinsi Papua	1	Efektivitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, dan Farmasi pada RSUD Serui Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Serui
	77	1	Efektivitas Pelayanan di Instalasi Rawat Inap pada RSUD Yowari Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 Semester I di Sentani
26	78 Provinsi Papua Barat	1	Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Triwulan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak
	79	1	Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Triwulan III 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Schoolo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
		66	
B Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan			
1	80 Provinsi Sumatera Barat	1	Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi di Bukittinggi
2	81 Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, RSUD Kayuagung Ogan Komering Ilir, RSUD DR. Ibnu Sutowo Ogan Komering Ulu, RSUD DR. Sobirin Musi Rawas, RSUD Banyuasin, dan RS Muhammadiyah Palembang serta Instansi Terkait
	82	1	Pengelolaan Program Muba Semesta TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, RSUD Sungai Lilin, dan RSUD Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin
	83	1	Pengelolaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung
3	84 Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan Program Jamkesos/Jamkesta pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2011 dan 2012 (s.d Juni)
4	85 Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2011 Dan Semester I 2012 Di Pontianak
	86	1	Efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Peningkatan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) Pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang dan SKPD Terkait TA 2011 dan Semester I 2012 Di Singkawang
		7	
III Infrastruktur			
1	87 Kementerian Pekerjaan Umum	1	Proyek Banjir Kanal Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 pada BBWS Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	88	1	Program Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2010, 2011, dan Semester 1 2012 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
2	89 Provinsi Aceh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2012 pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dan Instansi Terkait di Provinsi Aceh
3	90 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1	Pengelolaan proyek PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2010 dan 2011 di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru
		4	
IV Pelayanan Publik			
A Pelayanan Perizinan			
1	91 Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Bengkulu

Halaman 4 - Lampiran 2

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
2	92	Provinsi DKI Jakarta	1	Pelayanan Perizinan IMB Rumah Tinggal pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Suku Dinas, Seksi Dinas Kecamatan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Instansi terkait Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	93	Provinsi DKI Jakarta	1	Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Serta Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
3	94	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pelayanan Perizinan Kota Bau-Bau
			4	
	B	Pelayanan Ekspor Barang yang dipungut Bea Keluar		
1	95	Kementerian Keuangan	1	Kegiatan Pelayanan Ekspor Barang yang Dipungut Bea Keluar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta, Medan, Dumai, Padang, Bandar Lampung, dan Kotabaru
			1	
	C	Pelayanan Bandar Udara		
1	96	PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Bea dan Cukai	1	Kinerja atas pengelolaan pelayanan di Bandar Udara pada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Bea dan Cukai serta pihak terkait lainnya.
			1	
	D	Pelayanan Publik Lainnya		
1	97	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelayanan Badan Hukum dan Jaminan Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
2	98	Badan Pusat Statistik	1	Pelayanan Informasi Statistik Atas Kegiatan Survei harga Konsumen (HK) pada Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik di Jakarta, Bandung, Bekasi Surabaya dan Malang Tahun Anggaran 2011 dan 2012
3	99	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
4	100	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Direktorat E-Procurement Terhadap Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit LPSE Terhadap Pengguna Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) TA 2011 dan 2012 di Jakarta, Bandung, Depok, Surabaya, Malang, Banda Aceh, Padang, Bukittinggi, Manado, Bitung, dan Mataram
5	101	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1	Layanan pelanggan korporat Divisi Enterprise dan Unit terkait PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Tw. I) di Jakarta dan Bandung
			5	
	V	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
1	102	Kementerian PAN, RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan 38 Instansi Sampling	1	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 Gabungan
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada BKN dan Kementerian Dalam Negeri
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Keuangan
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Kesehatan
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Sosial
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Agama
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Dalam Negeri
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Aceh Tengah
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Sibolga
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Medan
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Riau
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Lubuk Linggau
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Banyuwangi
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Muaro Jambi
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Kepahiang
			-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 5 - Lampiran 2

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi DKI Jakarta	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Bandung	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tasikmalaya	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Karanganyar	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Semarang	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Sleman	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Lamongan	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Pamekasan	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Surabaya	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tangerang	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tabanan	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Bima	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Kupang	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Kalimantan Barat	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Kalimantan Tengah	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tanah Datar	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tanah Bumbu	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Kutai Timur	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Kotamobagu	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Sulawesi Tengah	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Makassar	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Sulawesi Tenggara	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Gorontalo	
		-	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Maluku	
		1		
VI	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)			
1	103	Kementerian Kehutanan	1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kebun Bibit Rakyat) TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Kantor Pusat)
	104		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara
	105		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Riau
	106		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Lampung
	107		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat
	108		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat
	109		1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan
			7	
VII	Lingkungan Hidup			
1	110	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengendalian <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i> (IUU) Fishing Tahun 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Maluku di Jakarta, Medan, Pontianak, Pangkal Pinang, Tanjungpinang, Manado, dan Ambon
	111		1	Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan di Jakarta, Tanjungpinang, dan Makassar
2	112	Provinsi Bangka Belitung	1	Kinerja Kegiatan Reklamasi Pasca Penambangan Pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I 2012 di Sungailiat
3	113	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Air Bawah Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

Halaman 6 - Lampiran 2

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
4	114	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1	Kinerja Pengelolaan kegiatan penambangan Batubara Tanjung Enim Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Bukit Asam (Persero) Tbk
			5	
VIII Swasembada Beras Berkelanjutan				
1	115	Kementerian Pertanian	1	Kinerja Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan Tahun 2010, 2011, dan Semester I 2012
			1	
IX Minyak dan Gas Bumi (Migas)				
1	116	Kementerian ESDM dan BPMIGAS	1	Kinerja Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas pada Kementerian ESDM dan BPMIGAS
2	117	PT Pertamina (Persero)	1	Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas Area Kunci Pendistribusian LPG Tahun 2011 dan Semester I tahun 2012 PT Pertamina (Persero)
			2	
X Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum				
1	118	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Nasional	1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Nasional di Jakarta dan Jawa Barat
2	119	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
3	120	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta
4	121	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Provinsi Jawa Barat di Bandung
	122		1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Bandung di Soreang
	123		1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
	124		1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Purwakarta di Purwakarta
	125		1	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kota Bandung di Bandung
			8	
XI Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)				
1	126	Provinsi Jawa Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu di Indramayu
	127		1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang di Sumedang
2	128	Provinsi Jawa Tengah	1	Efektivitas Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan sarana Prasarana Produksi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Magelang
	129		1	Pengelolaan Meter Air pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang TA 2011 dan 2012 di Semarang
3	130	Provinsi Banten	1	Pengelolaan Penyediaan Air Minum TB 2011 dan TB 2012 (Semester I) pada PDAM Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
4	131	Provinsi Bali	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar Tahun 2011 dan 2012 di Gianyar
	132		1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun 2011 dan 2012 di Denpasar
5	133	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Produksi dan Distribusi Air Minum dan Pengelolaan Penagihan, Penanganan Tunggakan dan Pelayanan Pelanggan TB 2011 s.d. 2012 (sd Nopember) pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
6	134	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka TA 2011 - Semester I 2012
7	135	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Produksi dan Distribusi Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo di Gorontalo
			10	
XII Kinerja Bidang Lainnya				
A Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia				
1	136	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Formal pada Program <i>Government to Government</i> pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Tengah

Halaman 7 - Lampiran 2

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
			Pengelolaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Formal pada Program <i>Government to Government</i> (Masa Penempatan) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jepang, dan Korea Selatan
		1	
B	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan		
1	137 Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara TA 2011 di Masamba
	138	1	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Maros TA 2011 di Maros
	139	1	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Parepare TA 2011 di Parepare
		3	
C	Manajemen Aset		
1	140 Provinsi Lampung	1	Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
	141	1	Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
	142	1	Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
		3	
D	Kinerja Lain-lain		
1	143 Kementerian Keuangan	1	Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah yang Dikelola Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan
	144	1	Kinerja Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	145	1	Kinerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2011
2	146 Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	Efektivitas Kegiatan Peningkatan Ekspor pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012
3	147 Provinsi Aceh	1	Pengelolaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah pada Inspektorat Provinsi Aceh Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Banda Aceh
4	148 Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
5	149 PT Pupuk Indonesia	1	Efektivitas pembentukan dan Pengelolaan PT Pupuk Indonesia TB 2011 dan 2012
6	150 Provinsi Sulawesi Utara	1	Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon TA 2011 dan Semester I 2012
7	151 PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	1	Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) TB 2011 dan 2012 di Semarang dan Surakarta
8	152 Perum Jasa Tirta I	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Kegiatan Pengerukan Tahun 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Perum Jasa Tirta I di Malang, Surabaya, dan Solo
9	153 Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan
10	154 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Muna
		12	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja	154	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id





**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012	3
BAB 3 Pengelolaan Pendapatan	21
BAB 4 Pelaksanaan Belanja	57
BAB 5 Manajemen Aset	97
BAB 6 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	115
BAB 7 Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	129
BAB 8 Operasional Badan Usaha Milik Negara	135
BAB 9 Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya	149
BAB 10 Operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya	157
BAB 11 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	177

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 2.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 2.4. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat
- 2.5. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
- 2.6. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS
- 2.7. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD
- 2.8. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya
- 3.1. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

- 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.8. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangangan atas PNBPN
- 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas PNBPN
- 3.11. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.12. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.13. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3.14. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.15. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.16. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.17. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 3.18. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.19. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.20. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.1. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.2. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.4. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.5. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 4.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.9. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

- 4.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.12. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.13. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.14. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.15. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.16. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

- 5.6. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.8. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.9. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 5.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN
- 6.1. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012
- 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda
- 7.1. Koreksi *Cost Recovery* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
- 8.1. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMN
- 8.2. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Perusahaan atas Operasional BUMN
- 8.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Operasional BUMN

- 8.4. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BUMN
- 8.5. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BUMN
- 8.6. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BUMN
- 8.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BUMN
- 9.1. Cakupan Pemeriksaan Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 9.2. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 9.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Pemeriksaan atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 10.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pendapatan Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya Berdasarkan Pengelompokan BLU dan Badan Lainnya
- 10.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.8. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.9. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

- 10.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 10.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BLU dan Badan lainnya
- 10.12. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya
- 11.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
- 11.2. Perbandingan antara Kebutuhan Impor dan Realisasi Daging Sapi (Tidak Termasuk Bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012
- 11.3. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 11.4. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 11.5. Kelompok Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada BUMN

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester II Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester II Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester II Tahun 2012
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
6. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
18. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas Manajemen Aset
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset
21. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
24. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
27. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya
29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

30. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya
31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
33. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
35. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
36. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
37. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2012

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas 450 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 38 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), 34 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 17 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 450 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp352,07 triliun atau sekitar 44,2% dari realisasi anggaran. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Cakupan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

(nilai dalam miliar rupiah)

Entitas	Jumlah Objek Pemeriksaan	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Nilai Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	83	385.481,38	346.505,54	23.708,02	6,8
Provinsi	48	89.575,76	56.983,91	32.599,70	57,2
Kabupaten/Kota	220	112.122,01	76.933,60	32.400,03	42,1
BUMN dan KKKS	38	261.923,82	251.254,00	235.002,63	93,5
BUMD	34	17.203,63	40.783,37	14.750,36	36,1
BLU	17	10.011,39	7.318,56	2.908,61	39,7
Badan Lainnya	10	15.670,47	16.593,83	10.704,76	64,5
Total	450	891.988,46	796.372,81	352.074,11	44,2

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam sembilan tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- manajemen aset;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- operasional BUMN;
- operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- operasional BLU dan badan lainnya; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

PDTT dalam IHPS II Tahun 2012 menunjukkan adanya 1.977 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	381
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	955
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	641
	Jumlah	1.977

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester II Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.665 kasus senilai Rp6,72 triliun. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

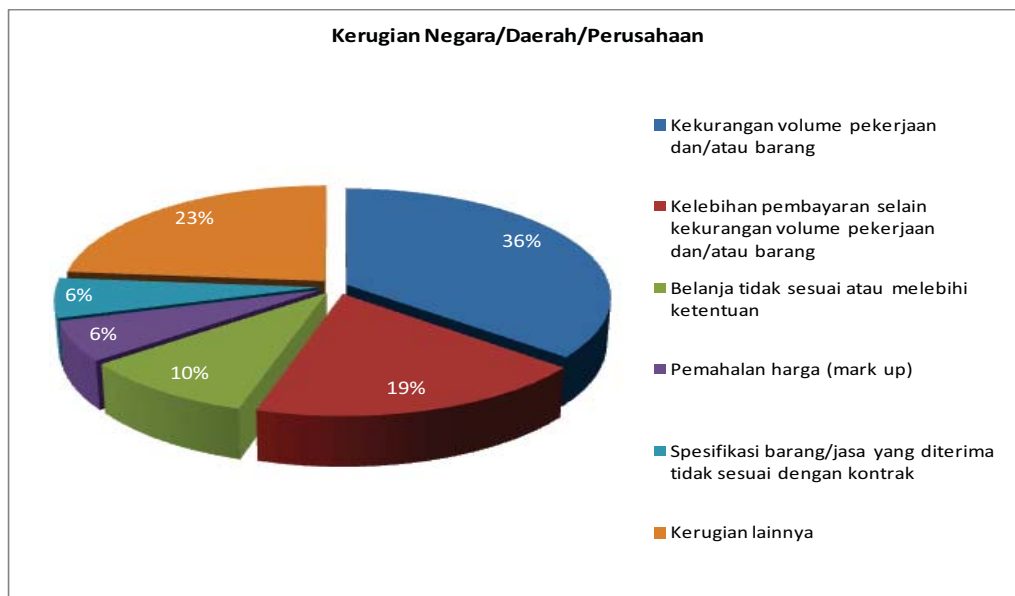
(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.505	809.915,36
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	488	1.659.927,29
3	Kekurangan Penerimaan	951	2.143.036,78
Sub Total I		2.944	4.612.879,43
4	Administrasi	1.166	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	222	232.144,61
6	Ketidakefisienan	2	4.392,08
7	Ketidakefektifan	331	1.875.129,58
Sub Total II		1.721	2.111.666,27
Total		4.665	6.724.545,70

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 menemukan sebanyak 4.665 kasus senilai Rp6,72 triliun. Sub total I menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan. Sub total II menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang tidak berdampak finansial sebanyak 1.721 kasus senilai Rp2,11 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Rincian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1.505 kasus senilai Rp809,91 miliar (disajikan dalam Lampiran 1), di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/ perusahaan sebanyak 633 kasus senilai Rp370,69 miliar. Kasus kerugian negara/daerah/ perusahaan meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan kasus kerugian lainnya. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian



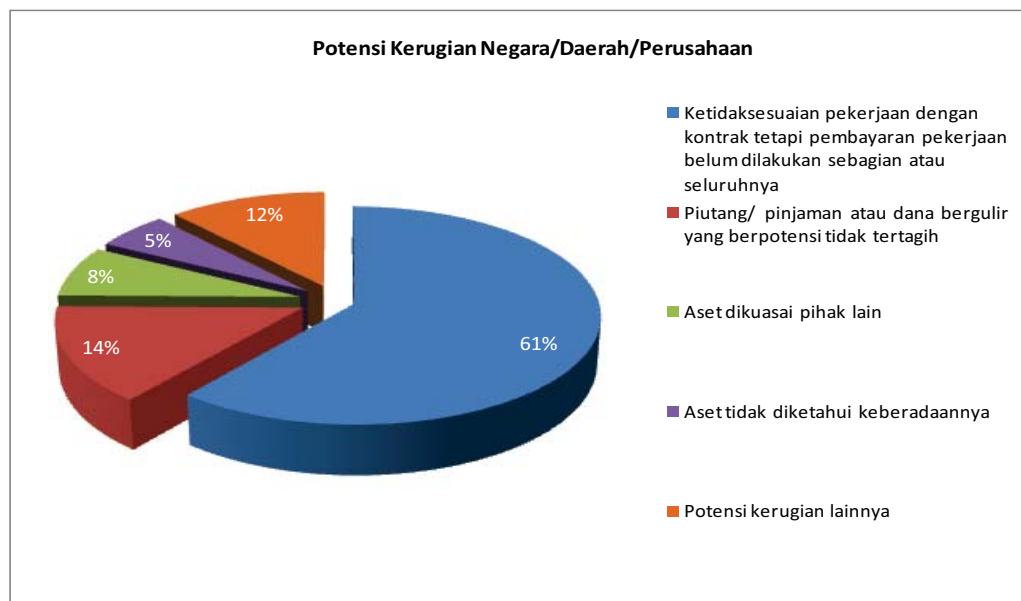
Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 540 kasus (36% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp155,886 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 284 kasus (19% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp74,833 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 147 kasus (10% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp126,033 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 90 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp73,131 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 89 kasus (6% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp74,332 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 355 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp305,698 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya.

Rincian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 488 kasus senilai Rp1,65 triliun disajikan dalam Lampiran 2. Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan kasus potensi kerugian lainnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian



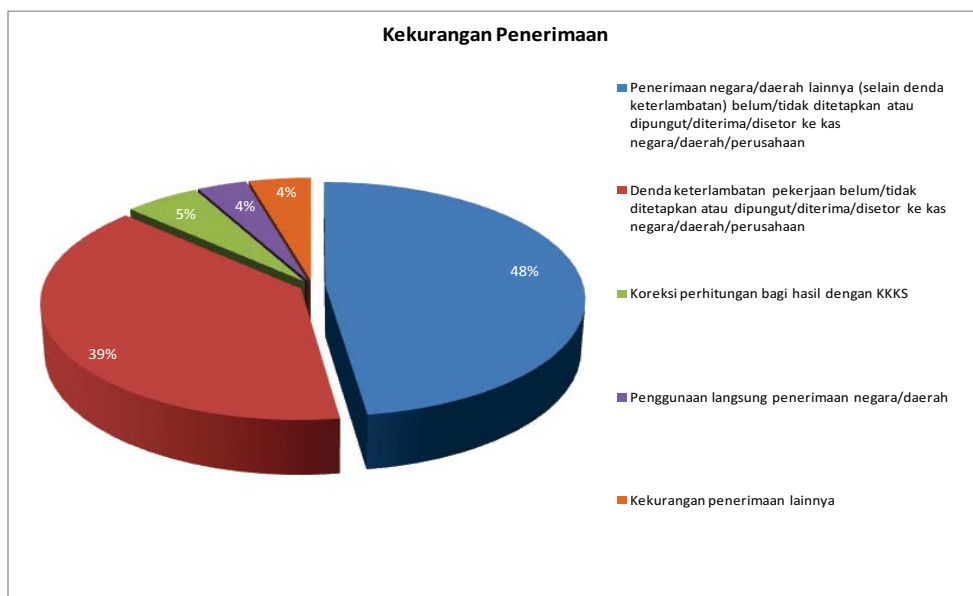
Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 297 kasus (61% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp223,509 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BUMN, serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 70 kasus (14% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp878,085 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan;

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 37 kasus (8% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp96,665 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan manajemen aset, operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 27 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp51,172 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan manajemen aset, operasional BLU dan badan lainnya serta pelaksanaan belanja; dan
- kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 57 kasus (12% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp410,494 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta pengelolaan pendapatan.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 951 kasus senilai Rp2,14 triliun disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan meliputi kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan kasus kekurangan penerimaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/ perusahaan sebanyak 458 kasus (48% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1,453 triliun. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, serta operasional BLU dan badan lainnya;
- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 370 kasus (39% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp72,751 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan badan lainnya, serta operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya;
- kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp372,489 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan KKKS;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 33 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp226,240 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, operasional BLU dan badan lainnya, serta pelaksanaan belanja; dan
- kasus kekurangan lainnya sebanyak 40 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp18,195 miliar. Kasus tersebut sering terjadi pada pemeriksaan pelaksanaan belanja, operasional BLU dan Badan Lainnya, serta pengelolaan pendapatan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4,61 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp109,676 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp38,433 miliar, potensi kerugian senilai Rp55,929 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15,314 miliar.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Rincian hasil PDTT selama Semester II Tahun 2012 berupa temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kasus-kasus yang sering terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta BLU dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 83 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 367 kasus kelemahan SPI dan 663 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,29 triliun. Dari total temuan PDTT di pusat tersebut, sebanyak 354 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	230	44.262,05
2	Potensi Kerugian Negara	31	151.911,20
3	Kekurangan Penerimaan	93	253.967,98
Sub Total I		354	450.141,23
4	Administrasi	228	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	26	13.572,63
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	54	830.938,18
Sub Total II		309	844.543,78
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
8	SPI	367	-
Total		1.030	1.294.685,01

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara karena kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp5,44 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 58 kasus senilai Rp9,26 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 32 kasus senilai Rp2,94 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, dan pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkap/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara karena pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 12 kasus senilai Rp29,20 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 48 kasus senilai Rp81,67 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 29 kasus senilai Rp17,73 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp450,14 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp7,40 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp4,083 miliar, potensi kerugian senilai Rp87,69 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,233 miliar.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 158 kasus kelemahan SPI dan 508 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp499,20 miliar. Dari total temuan PDTT

di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 328 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp280,93 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 220 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 651 kasus kelemahan SPI dan 2.469 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,09 triliun. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.740 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp611,55 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Daerah	190	188.023,35	909	309.460,77
2	Potensi Kerugian Daerah	48	50.089,93	313	179.201,98
3	Kekurangan Penerimaan	90	42.821,17	518	122.890,27
Sub Total I		328	280.934,45	1.740	611.553,02
4	Administrasi	114	-	470	-
5	Ketidakhormatan	25	93.923,52	122	82.788,16
6	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	41	124.344,75	136	396.609,23
Sub Total II		180	218.268,27	729	483.756,50
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
8	SPI	158	-	651	-
Total		666	499.202,72	3.120	1.095.309,52

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 450 kasus senilai Rp136,00 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 202 kasus senilai Rp52,90 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 80 kasus senilai Rp113,72 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 278 kasus senilai Rp126,87 miliar dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 24 kasus senilai Rp15,06 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja dan manajemen aset, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pengelola dan pengguna barang kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dan tidak melakukan pengamanan aset secara fisik dan administrasi, serta para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya. Selain itu menginstruksikan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas aset tetap dalam penguasaan pihak lain, mengintensifkan penarikan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, dan meningkatkan penatausahaan barang milik daerah (BMD).

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 309 kasus senilai Rp45,47 miliar dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak/ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 261 kasus senilai Rp101,60 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan belanja dan pengelolaan pendapatan, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp892,48 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp51,63 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp33,153 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,010 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,469 miliar.

3. BUMN dan KKKS

Hasil PDTT pada 31 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dan 7 objek pemeriksaan KKKS menemukan 357 kasus kelemahan SPI dan 388 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun. Dari total temuan PDTT di BUMN dan KKKS tersebut, sebanyak 166 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan KKKS Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN dan KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	15	25.137,38
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	24	736.291,04
3	Kekurangan Penerimaan	127	742.487,94
Sub Total I		166	1.503.916,36
4	Administrasi	168	--
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	10	9.812,77
6	Ketidakefektifan	44	130.843,37
Sub Total II		222	140.656,14
7	SPI	357	--
Total		745	1.644.572,50

Hasil PDTT di lingkungan BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara/perusahaan karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 6 kasus senilai Rp3,57 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp2,52 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp11,58 miliar. Kasus-kasus tersebut terjadi pada tema operasional BUMN dan PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, pengelola BUMN lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara/perusahaan karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp329,41 miliar dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 3 kasus senilai Rp39,62 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BUMN dan PDPT lainnya, yang pada umumnya disebabkan pengelola BUMN kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa kekurangan penerimaan negara yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pelaksanaan KKKS, yang pada umumnya disebabkan KKKS tidak mengakomodir perubahan lingkup kerja (PLK) dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan *home office overhead* (HOO).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan dari KKKS tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 62 kasus senilai Rp312,01 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pengelolaan pendapatan dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pengelola BUMN serta bendaharawan kurang cermat dan kurang memahami peraturan terkait perpajakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pengelola BUMN yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan. Selain itu agar segera melakukan penelitian ulang atas potensi penerimaan yang kurang dipungut dari kesalahan penetapan tarif bea masuk, dan melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 sesuai ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan penanganan perpajakan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,50 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah tindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp401,42 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp66,27 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp335,15 juta.

4. BUMD

Hasil PDTT pada 34 BUMD menemukan 293 kasus kelemahan SPI dan 305 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. Dari total temuan PDTT di BUMD tersebut, sebanyak 174 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar. Rincian temuan PDTT pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMD Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	66	173.281,84
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	51	464.193,49
3	Kekurangan Penerimaan	57	156.858,13
Sub Total I		174	794.333,46
4	Administrasi	89	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	21	27.277,90
6	Ketidakefektifan	21	348.819,98
Sub Total II		131	376.097,88
7	SPI	293	-
Total		598	1.170.431,34

Hasil PDTT atas 34 BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan karena pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet sebanyak 17 kasus senilai Rp163,05 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 15 kasus senilai Rp4,00 miliar, dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 7 kasus senilai Rp456,97 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan para pengelola BUMD yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, lalai dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan serta belum optimalnya penagihan penyelesaian atas pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan serta mengoptimalkan penagihan/penyelesaian atas pinjaman piutang atau dana bergulir macet.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 38 kasus senilai Rp461,71 miliar dan pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp1,70 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan pengelola BUMD kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan sebanyak 45 kasus senilai Rp155,57 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 8 kasus senilai Rp1,13 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pengelola BUMD kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pengelola BUMD yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp794,33 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp48,54 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp768,43 juta, potensi kerugian senilai Rp46,83 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp949,47 juta.

5. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDDT pada 17 objek pemeriksaan di lingkungan BLU menemukan 75 kasus kelemahan SPI dan 173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp160,49 miliar. Dari total temuan PDDT di BLU tersebut, sebanyak 106 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp119,32 miliar.

Hasil pemeriksaan PDDT pada 10 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 76 kasus kelemahan SPI dan 159 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp859,84 miliar. Dari total temuan PDDT di badan lainnya tersebut, sebanyak 76 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp852,67 miliar. Rincian temuan PDDT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BLU dan Badan Lainnya Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
1	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06
Sub Total I		106	119.323,55	76	852.677,35
4	Administrasi	37	-	60	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	5	489,28	13	4.280,35
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79
Sub Total II		67	41.175,56	83	7.168,14
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
7	SPI	75	-	76	-
Total		248	160.499,11	235	859.845,49

Hasil PDTT di lingkungan BLU dan badan lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara/daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 20 kasus senilai Rp6,74 miliar, pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 17 kasus senilai Rp35,94 miliar, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 17 kasus senilai Rp2,83 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara/daerah karena piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 5 kasus senilai Rp42,41 miliar dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 2 kasus senilai Rp27,71 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan entitas tidak mempunyai SOP untuk mengamankan penerimaan negara di seluruh satker tentang kerja sama dengan mitra kerja untuk siaran dan non siaran serta tidak mengintensifkan penagihan piutang, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, serta pejabat terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Agar pimpinan entitas menyusun dan memberlakukan SOP untuk mengamankan penerimaan negara dan mengoptimalkan penagihan piutang usaha serta pengembalian aset negara. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 42 kasus senilai Rp802,48 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp5,12 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema operasional BLU dan badan lainnya, yang pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara/ daerah.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp972,00 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1,68 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp361,92 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,327 miliar.

Hasil Pemeriksaan Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum

Pada temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.944 kasus senilai Rp4,61 triliun yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU dan badan lainnya di atas, di antaranya terdapat temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 1.224 kasus senilai Rp577,36 miliar. Kasus-kasus tersebut merupakan kompilasi dari kasus-kasus yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLU dan badan lainnya. Rincian temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari.

- 710 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp369,32 miliar di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 177 kasus senilai Rp103,31 miliar;
- 270 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp159,67 miliar; dan
- 244 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp48,37 miliar.

Dari temuan terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum di atas, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp36,64 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp23,76 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,07 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,81 miliar.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan

- 3.1 Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan (termasuk kepabeanan dan cukai) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 3.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan TA 2010 s.d. 2012 atas 93 objek pemeriksaan, terdiri atas 38 objek pemeriksaan di kementerian/lembaga (KL), 16 objek pemeriksaan di pemerintah provinsi, 32 objek pemeriksaan di pemerintah kabupaten/kota, dan 7 objek pemeriksaan kepatuhan perpajakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3.3 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan terdiri dari 3 sub tema, yaitu sebagai berikut.
- Penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
 - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
 - Pengelolaan pendapatan daerah.
- 3.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dapat dilihat pada uraian berikut.

Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

- 3.5 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada 13 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas kepatuhan kewajiban perpajakan BUMN Perkebunan pada 7 BUMN dan Ditjen Pajak KPP Wajib Pajak Besar Tiga, serta pengelolaan pajak bendahara pengeluaran pada 3 pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas 1 objek pemeriksaan penerimaan kepabeanan dan cukai, dan 1 objek pemeriksaan bea masuk anti *dumping*.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai adalah senilai Rp1,19 triliun dari realisasi anggaran penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai senilai Rp195,17 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp196,87 miliar merupakan temuan kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.7 Secara umum tujuan pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.10 Hasil evaluasi atas SPI penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.11 Hasil evaluasi SPI terhadap penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 52 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 36 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2	1	-	3
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	11	12	13	36
3	Struktur pengendalian intern	11	2	-	13
	Jumlah	24	15	13	52

- 3.12 Terdapat 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	1	-	1
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	-	-	1
	Jumlah	2	1	-	3

- 3.13 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

- 3.14 Terdapat 36 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja					
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/ daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	-	10	9	19
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan /pendapatan	11	2	-	13
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	4	4
	Jumlah	11	12	13	36

3.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.16 Terdapat 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BUMN	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern					
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	2	-	6
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	-	-	5
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi memadai	2	-	-	2
	Jumlah	11	2	-	13

3.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.18 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat proses penagihan piutang tidak dilakukan sesuai Keputusan Menteri

Keuangan (KMK) Nomor 147/KMK.04/1998 dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2004 sehingga penerimaan negara senilai Rp68,89 miliar belum dapat terealisasi.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat kasus PPN jasa giling tebu pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (Persero) dan PTPN X (Persero) yang penyelesaiannya berlarut-larut sehingga PTPN VII (Persero) dan PTPN X (Persero) masih terutang PPN Jasa Giling masing-masing senilai Rp9,64 miliar dan Rp72,25 miliar.
- Di Kementerian Keuangan, DJP, terdapat hasil penjualan gula milik Petani Tebu Rakyat (PTR) yang memiliki omzet penjualan di atas Rp600,00 juta belum dikenakan PPN oleh DJP sehingga potensi penerimaan negara senilai Rp79,70 miliar belum terealisasi.

Penyebab

- 3.19 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta belum adanya persamaan persepsi antara PTPN dan DJP dalam melihat objek pajak PPN Jasa Giling khususnya pada pola kemitraan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan DJP belum mensosialisasikan ketentuan perpajakan kepada PTR dan belum mengukuhkan PTR sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Rekomendasi

- 3.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Dirjen Pajak meninjau kembali peraturan terkait PPN terhadap jasa giling tebu pola kemitraan dan menyinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mengukuhkan PTR sebagai PKP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.21 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 5 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	1	34,68
2	Kekurangan Penerimaan	60	196.840,09
3	Administrasi	38	-
4	Ketidakefektifan	2	-
Jumlah		101	196.874,77

3.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 101 kasus senilai Rp196,87 miliar sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

3.23 Rincian temuan pemeriksaan ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai berdasarkan tingkat pemerintahan dan BUMN disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
1	Kerugian Daerah	-	-	1	34,68	-	-	1	34,68
2	Kekurangan Penerimaan	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09
3	Administrasi	7	-	8	-	23	-	38	-
4	Ketidakefektifan	2	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah		15	54.909,17	13	479,98	73	141.485,62	101	196.874,77

Kerugian Daerah (1 kasus senilai Rp34,68 juta)

3.24 Kerugian daerah adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 3.25 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.26 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang di pemerintah kabupaten/kota senilai Rp34,68 juta.
- 3.27 Kasus tersebut terjadi di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kewajiban pajak tiga pekerjaan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran yang seharusnya ditanggung oleh rekanan sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp34,68 juta.

Penyebab

- 3.28 Kasus kerugian daerah terjadi karena kelalaian kepala dinas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pengguna anggaran yang membayar pajak yang seharusnya menjadi beban rekanan.

Rekomendasi

- 3.29 Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan instansi memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan (60 kasus senilai Rp196,84 miliar)

- 3.30 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.31 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara dan pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan.
- 3.32 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 60 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp196,84 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Sub Kelompok Temuan Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan									
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	6	54.909,17	3	337,43	47	141.241,70	56	196.488,30
2	Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan	-	-	1	107,87	3	243,92	4	351,79
	Jumlah	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09

3.33 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PPFD) tidak cermat melakukan penelitian dokumen pengujian dan identifikasi barang beserta kelengkapan sehingga penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor kurang dipungut senilai Rp26,91 miliar.
- Di PTPN III (Persero), terdapat pembebanan biaya pengobatan senilai Rp62,93 miliar dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan Tahun 2011 sehingga perhitungan penghasilan kena pajak PTPN III (Persero) harus dikoreksi positif senilai Rp62,93 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp15,73 miliar.
- Di PTPN VI (Persero), terdapat koreksi fiskal positif atas biaya di luar usaha senilai Rp43,56 miliar yang tidak dilakukan sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Badan Tahun 2011 senilai Rp10,89 miliar.
- Di PTPN VIII (Persero), terdapat koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan aktiva tetap dan amortisasi hak guna usaha senilai Rp106,35 miliar yang belum dilakukan mengakibatkan perhitungan penghasilan kena pajak PTPN VIII (Persero) Tahun 2011 harus dikoreksi positif senilai Rp106,35 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp26,58 miliar.

- Di PTPN XII (Persero), terdapat koreksi fiskal PPh Badan Tahun Pajak 2011 senilai Rp27,14 miliar yang belum dilakukan mengakibatkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak PTPN XII (Persero) harus dikoreksi positif senilai Rp27,14 miliar yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp6,78 miliar.

Penyebab

- 3.35 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan kurang memahami peraturan terkait perpajakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan langsung.

Rekomendasi

- 3.36 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera melakukan penelitian ulang atas potensi penerimaan yang kurang dipungut dari kesalahan penetapan tarif bea masuk, dan melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPK merekomendasikan agar entitas meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan penanganan perpajakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Administrasi (38 kasus)

- 3.37 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.38 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.39 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 38 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Penerimaan Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
Penyimpangan Administrasi					
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara	1	-	-	1
2	Penyimpangan terhadap Peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	5	20	31
3	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	-	3	3	6
Jumlah		7	8	23	38

3.40 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.

3.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PTPN VIII (Persero), terdapat biaya terkait gaji/upah tanaman belum menghasilkan senilai Rp72,43 miliar belum dikoreksi fiskal negatif sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak PTPN VIII (Persero) Tahun 2011 harus dikoreksi negatif senilai Rp72,43 miliar yang berpotensi mengurangi penerimaan negara senilai Rp18,10 miliar.
- Di Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terdapat kesalahan penetapan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dalam PMK Nomor 150/PMK.011/2012 sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara atas BMAD yang berasal dari tarif BMAD yang ditetapkan lebih rendah dari seharusnya.
- Di Kementerian Keuangan, DJP, pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3 terdapat polemik yang berlarut-larut terkait pengkreditan PPN Masukan TBS (PM TBS) pada Tahun Pajak 2011 di empat PTPN berjumlah minimal senilai Rp134,55 miliar sehingga mengakibatkan perlakuan atas pengkreditan PM TBS Tahun 2011 pada empat PTPN minimal senilai Rp134,55 miliar menjadi tidak jelas.

Penyebab

3.42 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak cermat dalam menyusun SPT Tahunan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2011, serta kekurangcermatan BKF dalam menyusun

rancangan PMK tentang BMAD. Selain itu terdapat indikasi ketidaksesuaian aturan yang lebih tinggi dengan aturan pelaksanaannya yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 dengan PP Nomor 12 Tahun 2001 jo. PP No.31 Tahun 2007.

Rekomendasi

- 3.43 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas melakukan pembetulan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011, serta memerintahkan Kepala BKF segera melakukan revisi atas PMK Nomor 150/PMK.011/20112. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Ditjen Pajak meninjau kembali peraturan terkait pengkreditan PM TBS pada usaha terintegrasi kelapa sawit dan menyinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketidakefektifan (2 kasus)

- 3.44 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.45 Hasil pemeriksaan atas penerimaan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 3.46 Kasus-kasus tersebut terjadi di 1 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 6.
- 3.47 Kasus-kasus tersebut terjadi di Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Permasalahan yang terjadi adalah
- Kementerian Perdagangan pada Tahun 2012 belum membentuk unit organisasi yang bertanggung jawab membahas *national interest* dan struktur organisasi KADI belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan/rekomendasi akhir KADI yang dilaporkan kepada Menteri Perdagangan dan rekomendasi Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan.
 - Proses penetapan kebijakan BMAD dan tidak ditetapkannya Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dalam penyelesaian kasus anti dumping memerlukan waktu relatif lama sehingga berpotensi terjadinya kerugian industri dalam negeri.

Penyebab

- 3.48 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas belum membentuk unit organisasi yang bertanggung jawab membahas kepentingan nasional dan perencanaan pelaksanaan penelitian permohonan dan penyelidikan kasus anti dumping tidak disusun dengan baik.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas membentuk dan mengefektifkan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pembahasan pertimbangan *national interest*, memperbaiki perencanaan penyelesaian kasus anti dumping dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 3.50 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PNBP pada 35 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 6 kementerian/lembaga (KL)
- 3.51 Cakupan pemeriksaan PNBP adalah senilai Rp721,06 miliar dari realisasi anggaran PNBP senilai Rp1,04 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp13,07 miliar merupakan temuan kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.52 Secara umum tujuan pemeriksaan atas PNBP adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyeteroran PNBP telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.53 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 3.54 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.55 Hasil evaluasi atas SPI PNBPN menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.56 Hasil evaluasi SPI terhadap PNBPN menunjukkan terdapat 79 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 43 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.57 Terdapat 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
- 3.58 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.59 Terdapat 43 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, sebagai berikut
- sebanyak 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 11 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 7 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 22 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

- 3.60 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.61 Terdapat 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 13 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 10 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 3.62 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.63 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kepolisian RI, Polda Jambi, terdapat dana pengamanan bersama Polda Jambi dengan perwakilan BPMIGAS Sumbagsel dikelola tanpa melalui mekanisme APBN dan belum diungkap dalam laporan keuangan sehingga mengakibatkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana pengamanan bersama Polda Jambi - Dinas Perwakilan BPMIGAS Sumbagsel Tahun 2009 s.d. 30 September 2011 senilai Rp4,23 miliar.
 - Di Kementerian Perhubungan, pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mendahului pembayaran PNBP Uang Rambu Tahun 2009 - Mei 2011 pada Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok, Adpel Sunda Kelapa, dan Adpel Kepulauan Seribu. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan kewenangan penerbitan SPB dalam hal agen/pemilik kapal belum melunasi kewajibannya.
 - Di Kementerian Hukum dan HAM, pada Kanwil Kemenkumham Jambi, terdapat penatausahaan buku kas umum bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi Tahun 2010 dan 2011 tidak sesuai PMK Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 sehingga mengakibatkan laporan bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada satker-satker di lingkungan Kanwil Jambi tidak menyajikan informasi yang lengkap dan akurat serta adanya potensi penyalahgunaan kas yang tinggi.

Penyebab

- 3.64 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan mekanisme pembayaran PNBP pada malam hari atau hari libur dan SOP mengenai pengelolaan dana pengamanan objek vital (pamobvit) belum ada serta Polri belum mengajukan penggunaan langsung atas sebagian pendapatan kepada Menteri Keuangan.

Rekomendasi

- 3.65 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar entitas menyusun mekanisme pembayaran PNBP Uang Rambu pada malam hari atau hari libur dan SOP mengenai pengelolaan dana pamobvit serta Polri mengajukan penggunaan langsung atas sebagian pendapatan kepada Menteri Keuangan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.66 Hasil pemeriksaan atas PNBP mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 8 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 9.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PNBP

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	3	1.215,98
2	Kekurangan Penerimaan	26	11.863,14
3	Administrasi	23	-
4	Ketidakefektifan	4	-
Jumlah		56	13.079,12

- 3.67 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai Rp13,07 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan PNBP.

Kerugian Negara (3 kasus senilai Rp1,21 miliar)

- 3.68 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.69 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.70 Hasil pemeriksaan atas PNBP menunjukkan adanya 3 kasus kerugian negara, yaitu penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,21 miliar.

- 3.71 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.72 Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:
- Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yaitu terdapat setoran PNBP Tahun 2010 pada Adpel Kepulauan Seribu senilai Rp507,32 juta yang tidak disetorkan ke Kas Negara karena digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Penerimaan Tahun 2010. Selain itu terdapat penyalahgunaan PNBP yang dikelola Bendahara Penerimaan Tahun 2009 s.d. Februari 2011 senilai Rp146,57 juta. Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan PNBP senilai Rp653,89 juta.
 - Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas terdapat penggelapan kas pendapatan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) selama Tahun 2011 sehingga mengakibatkan kas tekor di BBPLKLN senilai Rp562,09 juta berpotensi disalahgunakan dan merugikan negara.
- 3.73 Dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan PNBP senilai Rp1,21 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp246,56 juta, yaitu pada Kementerian Perhubungan.

Penyebab

- 3.74 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas serta keinginan bendahara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari penggunaan uang negara.

Rekomendasi

- 3.75 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada bendahara yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan (26 kasus senilai Rp11,86 miliar)

- 3.76 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.77 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara. Selain

itu terdapat kasus kekurangan penerimaan berupa penggunaan langsung penerimaan negara, penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.

- 3.78 Hasil pemeriksaan atas PNBP menunjukkan terdapat 26 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp11,86 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas PNBP

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	1	1.165,80
2	penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	20	9.905,95
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	272,70
4	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,00
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	5,15
6	Lain-lain	1	473,54
	Jumlah	26	11.863,14

- 3.79 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.

- 3.80 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat kekurangan penerimaan kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal serta denda keterlambatan selama Tahun 2009 s.d. 2011 dari PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok dan PT Pertamina Tongkang sehingga mengakibatkan penerimaan kontribusi PNBP belum diterima kas negara senilai Rp540,97 juta dan USD681.55 ribu.
- Di Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town Afrika Selatan, terdapat penggantian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Afrika Selatan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa periode Maret 2011 – Oktober 2012 senilai Rp510,98 juta yang belum

diterima sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan PNBPNon Fungsional dari restitusi PPN atas transaksi belanja pengadaan barang dan jasa KJRI Cape Town Afzel senilai Rp510,98 juta.

- Di Kementerian Luar Negeri, KJRI Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok, terdapat PNBPNon Fungsional dan PNBPNon Fungsional KJRI Hongkong yang belum ditransfer ke rekening PNBPNon Fungsional Kementerian Luar Negeri sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PNBPNon Fungsional KJRI Hongkong senilai Rp428,30 juta.
- Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Amman di Yordania, terdapat PNBPNon Fungsional Tahun 2011 dan 2012 senilai USD36.63 ribu eq. Rp351,64 juta pada KBRI Amman belum disetor ke kas negara sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PNBPNon Fungsional KBRI Amman senilai Rp351,64 juta.

- 3.81 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan PNBPNon Fungsional senilai Rp11,86 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp361,10 juta, yaitu oleh Kementerian Luar Negeri senilai Rp351,64 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp9,46 juta.

Penyebab

- 3.82 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja. Selain itu permasalahan tersebut disebabkan perbedaan pendapat mengenai terminologi jasa pemanduan dan jasa penundaan antara Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo II.

Rekomendasi

- 3.83 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan PT Pelindo II terkait kekurangan pembayaran.

Administrasi (23 kasus)

- 3.84 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 3.85 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll serta penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.86 Hasil pemeriksaan atas PNBPN menunjukkan terdapat 23 kasus penyimpangan administrasi, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan
 - sebanyak 12 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.87 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.88 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, terdapat PNBPN Tahun 2010 dan 2011 pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi terlambat disetor sehingga mengakibatkan negara terlambat menerima PNBPN Tahun 2010 dan 2011 dari Lapas Jambi dan Kanim Kuala Tungkal.
 - Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten dan Sumatera Utara, terdapat barang rampasan dan uang rampasan Tahun 2011 s.d. 31 Mei 2012 yang sudah lama memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya mengakibatkan penerimaan negara yang berasal dari hasil lelang barang rampasan dan uang rampasan senilai Rp2,86 miliar terlambat diterima oleh negara dan barang rampasan berisiko rusak serta turun nilai ekonomisnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Jakarta, terdapat PNBPN jasa kenavigasian selama Tahun 2011 yang tidak langsung disetorkan ke kas negara atau mengalami keterlambatan antara 2 s.d. 27 hari sehingga mengakibatkan PNBPN Jasa Kenavigasian senilai Rp3,14 miliar tidak diterima negara tepat waktu.

Penyebab

- 3.89 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran yang tersedia untuk proses pelelangan kurang memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.90 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, memerintahkan penyetoran PNPB ke kas negara sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakefektifan (4 kasus)

- 3.91 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.92 Hasil pemeriksaan atas PNPB menunjukkan adanya 4 kasus ketidakefektifan, berupa fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.93 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 9.
- 3.94 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten, penyelesaian uang pengganti per 31 Mei 2012 senilai Rp129,07 miliar dan denda senilai Rp1,35 miliar pada empat Kejari yaitu Tangerang, Tigaraksa, Cilegon dan Serang belum optimal sehingga mengakibatkan potensi penerimaan negara senilai Rp130,42 miliar belum dapat diterima dan dimanfaatkan oleh negara.
 - Di Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Banten, terdapat pelaksanaan pengelolaan pelanggaran lalu lintas/tilang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI dan Bank Rakyat Indonesia Nomor B-319/E/VII/1993, Nomor Pol.Kep/09/VII/1993, B-299/E/7/1993, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-404/E/6/1994. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan tersebut seperti Kejari tidak memiliki rekening giro I dan giro III, tidak menerima tembusan surat pengantar tilang dari kepolisian, dan

jaksa tidak selalu hadir dalam sidang perkara tilang serta tembusan bukti perkara tilang tidak didistribusikan secara tertib setelah perkara lelang dieksekusi. Hal tersebut mengakibatkan perkara pelanggaran lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh pihak kejaksaan.

Penyebab

- 3.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, kurang optimal dalam melakukan upaya penyitaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan, serta kurangnya koordinasi antar instansi dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

Rekomendasi

- 3.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian. Selain itu entitas agar lebih optimal dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti dan meningkatkan koordinasi antar instansi yang lebih intensif.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 3.97 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan daerah pada 45 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 16 pemerintah provinsi dan 29 pemerintah kabupaten/kota.
- 3.98 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah adalah senilai Rp20,86 triliun dari realisasi anggaran pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp28,93 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp103,55 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.99 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait pengelolaan pendapatan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 3.100 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.101 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.102 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.103 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 362 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 25 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 270 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 67 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.11. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 10.

Tabel 3.11. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	16	9	25
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	71	199	270
3	Struktur Pengendalian Intern	15	52	67
	Jumlah	102	260	362

- 3.104 Terdapat 25 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	7	9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	11	1	12
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM memadai	2	-	2
	Jumlah	16	9	25

- 3.105 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.106 Terdapat 270 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	7	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	19	49	68
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	15	20
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	3	6
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	42	124	166
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
	Jumlah	71	199	270

- 3.107 Kasus-kasus tersebut terjadi di 43 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.108 Terdapat 67 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No.	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	42	51
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	9	13
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	2
Jumlah		15	52	67

- 3.109 Kasus-kasus tersebut terjadi di 28 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.110 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Sulawesi Utara, pada Dinas Pendapatan Daerah terdapat kelemahan pengendalian atas prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pengelolaan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat). Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya antar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di wilayah Sulawesi Utara tidak terkoneksi dalam jaringan, tidak terdapat *file history* pada aplikasi Samsat dan tidak dilakukan *backup* data, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor belum diimplementasikan secara optimal, serta tidak seluruh transaksi penetapan PKB dan BBNKB terekam dalam *database*. Hal tersebut mengakibatkan akurasi dan validitas *database* aplikasi Samsat kurang dapat diandalkan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mengetahui/tidak memperoleh data mutakhir tentang jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak serta tidak dapat secara persis berapa potensi penerimaan PKB dan BBNKB.
 - Di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat tunggakan pembayaran sewa toko/kios, bak dan los dan tunggakan biaya tebusan pasar selama Tahun 2009 s.d. Semester I 2012 masing-masing senilai Rp4,94 miliar dan Rp1,72 miliar yang telah melebihi umur kadaluarsa penagihan. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak diterimanya pendapatan/penerimaan dari tunggakan yang melebihi batas umur kadaluarsa.

- Di Provinsi Bali, pada Dinas Pendapatan (Dispenda) belum sepenuhnya mengenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pendaftaran dan pembayaran PKB dan BBNKB oleh Wajib Pajak (WP) Tahun 2012 (s.d. Agustus 2012) sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah senilai Rp4,38 miliar dari sanksi denda keterlambatan pembayaran PKB dan bunga keterlambatan pembayaran BBNKB.
- Di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, uang jaminan pembongkaran reklame insidental (bebas pajak) Tahun 2012 (s.d Oktober) senilai Rp2,09 miliar tidak pernah dipungut karena tidak pernah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sedangkan dasar pengenaan uang jaminan bongkar untuk reklame insidental adalah SKPD. Permasalahan tersebut berpotensi membebani pemerintah daerah jika reklame tersebut tidak dibongkar oleh pemasang reklame.
- Di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, terdapat keterlambatan sosialisasi dan pemberitahuan kenaikan tarif PPJ oleh pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis, kepada masyarakat dan PT PLN, mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Ciamis kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan sejak bulan Maret s.d. Mei 2012 senilai Rp1,09 miliar.
- Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, terdapat reklame yang sudah terpasang, namun tidak memiliki ijin pemasangan dan belum memiliki ketetapan pajak serta belum dilakukan penertiban/pembongkaran sehingga terdapat potensi pendapatan pajak reklame yang belum dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten minimal senilai Rp226,89 juta.

Penyebab

- 3.111 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan entitas terlambat melakukan sosialisasi kenaikan tarif serta kurang optimal dalam merancang dan menerapkan pengendalian atas sistem informasi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Rekomendasi

- 3.112 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar melakukan sosialisasi kenaikan tarif sejak dini dan melakukan pembenahan secara menyeluruh atas aplikasi sistem informasi Samsat dan melakukan rekonsiliasi data secara periodik dengan pihak Kepolisian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.113 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 3.15. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 11 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 12.

Tabel 3.15. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
1	Kerugian Daerah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70
2	Potensi Kerugian Daerah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06
3	Kekurangan Penerimaan	23	21.735,89	198	69.060,39	221	90.796,28
4	Administrasi	20	-	43	--	63	--
5	Ketidakefektifan	9	-	5	60,91	14	60,91
	Jumlah	56	23.680,69	258	79.873,26	314	103.553,95

- 3.114 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 314 kasus senilai Rp103,55 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah.

Kerugian Daerah (8 kasus senilai Rp1,28 miliar)

- 3.115 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.116 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.117 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 3.118 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 8 kasus senilai Rp1,28 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp128,97 juta. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	204,01	5	950,72	7	1.154,73
2	Lain-lain	1	128,97	-	-	1	128,97
	Jumlah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70

3.119 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.120 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 dan 2010 yang tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp436,50 juta.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terdapat penyalahgunaan setoran pajak daerah Tahun 2011 dan 2012 yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak dapat segera memanfaatkan pajak yang terlambat disetorkan dan terdapat penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp361,18 juta.
- Di Provinsi Maluku Utara, terdapat penerimaan pajak alat berat Tahun 2011 dan 2012 yang telah diterima oleh pemungut pajak tetapi tidak dicatat dan disetorkan ke Kas Daerah melainkan digunakan secara pribadi dan untuk keperluan operasional kantor sehingga mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp141,43 juta.
- Di Provinsi Sulawesi Utara, pada kantor Samsat Tahuna terdapat perbedaan antara jumlah yang disetorkan sesuai data Surat Tanda Setoran dengan jumlah yang diterima dalam rekening kas daerah pada Bank Sulut selama 1 Januari s.d. 31 Agustus 2012 sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp128,97 juta karena digunakan untuk kepentingan bendahara.

3.121 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp1,28 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp880,50 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran tersebut di antaranya Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara senilai Rp436,50 juta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat senilai Rp361,18 juta, dan Provinsi NTB senilai Rp62,58 juta.

Penyebab

- 3.122 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.123 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada bendahara.

Potensi Kerugian Daerah (8 kasus senilai Rp11,41 miliar)

- 3.124 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.125 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 3.126 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 8 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp11,41 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	7	9.801,24	7	9.801,24
2	Lain-lain	1	1.611,82	-	-	1	1.611,82
	Jumlah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06

- 3.127 Kasus-kasus tersebut terjadi di 6 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.128 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, terdapat piutang angsuran biaya konstruksi kios pada 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) per 30 September 2012 senilai Rp8,13 miliar yang penyelesaiannya berlarut-larut sehingga mengakibatkan pendapatan angsuran biaya konstruksi kios/los pasar senilai Rp8,13 miliar tertunda pemanfaatannya.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada UP Perparkiran Dinas Perhubungan, terdapat pekerjaan pembangunan jaringan sistem *gate* lingkungan Pasar Baru Tahun 2012 yang telah dinyatakan selesai dengan persentase bobot pekerjaan 72,26021% dan telah dibayarkan senilai Rp1,83 miliar. Pekerjaan dihentikan karena penolakan warga atas pemasangan pos *gate* parkir di lingkungan pemukiman warga. Atas pembayaran tersebut, rekanan telah mengembalikan ke kas daerah senilai Rp225 juta, sehingga sisa pembayaran senilai Rp1,61 miliar berpotensi merugikan keuangan daerah karena pekerjaan belum terintegrasi menjadi sistem jaringan yang dapat difungsikan.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terdapat piutang pajak daerah Tahun 2007 s.d. Tahun 2012 (s.d. 10 Agustus) masih belum tertagih senilai Rp878,11 juta sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan dari piutang pajak daerah minimal senilai Rp878,11 juta.
- Di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat pemberian pinjaman pada Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok nelayan sejak Tahun 2007 yang pembayaran angsuran/cicilan tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan pendapatan daerah yang berasal dari cicilan alat bantu belum diterima dan berpotensi tidak tertagih senilai Rp609,69 juta.

Penyebab

3.129 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana belum optimal dalam melakukan penagihan, pelampauan wewenang Kepala UP Perparkiran untuk menggunakan dana swadana sebagai belanja modal, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

3.130 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberi sanksi kepada pelaksana dan memerintahkan pimpinan entitas untuk lebih tegas dan intensif dalam upaya penagihan piutang daerah. Selain itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Kepala UP Perparkiran mempertanggungjawabkan pembayaran kegiatan pekerjaan sistem *gate*.

Kekurangan Penerimaan (221 kasus senilai Rp90,79 miliar)

- 3.131 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.132 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan penggunaan langsung penerimaan daerah. Kekurangan penerimaan juga meliputi pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 3.133 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 221 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp90,79 miliar, yang disajikan dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	--	-	1	8,39	1	8,39
2	Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	20	15.007,54	168	62.396,57	188	77.404,11
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	18	1.266,31	18	1.266,31
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	6.728,35	9	5.136,78	12	11.865,13
5	Lain-lain	-	-	2	252,34	2	252,34
	Jumlah	23	21.735,89	198	69.060,39	221	90.796,28

- 3.134 Kasus-kasus tersebut terjadi di 35 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.135 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan terdapat tunggakan pajak restoran dan tunggakan pajak mineral bukan logam

dan batuan Tahun 2011 – 2012 dan belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sehingga mengakibatkan pendapatan daerah senilai Rp11,64 miliar belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

- Di Provinsi Maluku Utara, terdapat Pajak Air Permukaan dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) Tahun 2010 dan 2011 kurang ditetapkan dan diterima sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan potensi pendapatan Pajak Air Permukaan dari PT NHM senilai Rp6,72 miliar.
- Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Tahun 2011 dan 2012 kurang ditetapkan senilai Rp6,14 miliar serta sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp6,14 miliar.
- Di Provinsi Gorontalo, terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012 (s.d. Agustus) senilai Rp5,25 miliar pada Unit Pelaksana Teknis Badan di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Dinas Perpajakan Daerah terdapat pajak yang belum disetor Januari - Agustus 2012 sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp3,30 miliar.

- 3.136 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan daerah senilai Rp90,79 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp4,32 miliar. Entitas yang telah melakukan penyetoran tersebut di antaranya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat senilai Rp3,53 miliar; Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat senilai Rp240,69 juta; dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY senilai Rp229,31 juta.

Penyebab

- 3.137 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 3.138 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pelaksana kegiatan dan bendaharawan.

Administrasi (63 kasus)

- 3.139 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.140 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, serta penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.141 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 63 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Total
Penyimpangan Administrasi				
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah	2	-	2
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	-	2	2
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	13	13	26
4	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	28	33
	Jumlah	20	43	63

- 3.142 Kasus-kasus tersebut terjadi di 35 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.
- 3.143 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 terlambat disetor ke kas daerah berkisar antara 1 s.d. 60 hari kerja, yang mengakibatkan penerimaan senilai Rp3,87 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

- Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat penyetoran penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2011 ke kas daerah oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami keterlambatan antara 1 – 3 bulan dari ketentuan sehingga mengakibatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PPJ senilai Rp2,27 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk pembangunan daerah.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi Tahun 2011 – 2012 senilai Rp1,66 miliar ke kas daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkisar antara 2 – 30 hari sejak tanggal penerimaan sehingga menimbulkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan penerimaan daerah.

Penyebab

- 3.144 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan kurang mematuhi ketentuan dalam melakukan penyetoran pendapatan daerah serta belum memiliki peraturan pelaksanaan atau SOP dari peraturan daerah.

Rekomendasi

- 3.145 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pejabat pelaksana yang lalai, memerintahkan penyetoran penerimaan sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan menyusun peraturan pelaksanaan atau SOP dari peraturan daerah.

Ketidakefektifan (14 kasus senilai Rp60,91 juta)

- 3.146 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.147 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.148 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan terdapat 14 kasus ketidakefektifan senilai Rp60,91 juta yang disajikan dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	-	-	5	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.	4	-	5	60,91	9	60,91
Jumlah		9	-	5	60,91	14	60,91

3.149 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12.

3.150 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat proses hibah 20 bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Provinsi DIY yang belum selesai sampai dengan Tahun 2012 sehingga mengakibatkan potensi bus-bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat beroperasi sehingga pelayanan angkutan umum tidak dapat berlangsung optimal. Selain itu terdapat 20 bus milik Pemerintah Provinsi DIY yang dijadikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT AMI tetapi belum dioperasikan sehingga terjadi penurunan kualitas bus-bus tersebut karena tidak segera dioperasikan.
- Di Provinsi Gorontalo, terdapat potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Tahun 2012 yang belum dilakukan penetapan karena kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, pendataan dan penetapan pajak. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan daerah yang diperoleh dari PKB dan BBN KB Alat Berat

Penyebab

3.151 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan, pimpinan entitas belum menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan melakukan pembahasan dokumen pengajuan hibah dengan DPRD, serta sosialisasi peraturan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan kepada wajib pajak.

Rekomendasi

- 3.152 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar segera mempercepat proses hibah bus, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi peraturan kepada wajib pajak serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 3.153 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 4

Pelaksanaan Belanja

- 4.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
- 4.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja TA 2010 s.d. 2012 atas 248 objek pemeriksaan, terdiri atas 63 objek pemeriksaan kementerian/lembaga (KL), 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 158 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.
- 4.3 Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri dari 2 sub tema, yaitu sebagai berikut.
- Belanja pemerintah pusat; dan
 - Belanja pemerintah daerah.
- 4.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pelaksanaan belanja disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 4.5 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah memeriksa belanja pemerintah pusat TA 2009 s.d. 2012. Pemeriksaan dilakukan pada 20 kementerian/ lembaga yang meliputi 63 objek pemeriksaan.
- 4.6 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 20 KL adalah senilai Rp8,92 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp21,79 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp103,07 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.7 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan

- pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.10 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 4.11 Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 4.12 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 154 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 76 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 47 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 13.

- 4.13 Terdapat 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebagai berikut
- sebanyak 18 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 12 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 4.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.15 Terdapat 76 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, sebagai berikut
- sebanyak 33 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 3 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan
 - sebanyak 20 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 9 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
 - sebanyak 10 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 4.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 37 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.17 Terdapat 47 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 32 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 13 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.19 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian RI, pada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, terdapat tunggakan/utang langganan listrik Tahun 2010 senilai Rp1,20 miliar dan Tahun 2011 senilai Rp1,51 miliar tidak diungkapkan dalam akun kewajiban jangka pendek pada Laporan Keuangan Polda Jambi sehingga utang biaya langganan listrik kepada PT PLN akan mempengaruhi pembebanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berikutnya.
- Di TNI AD, pada pengembangan fasilitas dan pemeliharaan bangunan TNI AD terdapat perencanaan yang tidak maksimal atas pembangunan Yonkav Bengkayang Kodam XII/Tpr dan Yonkav Bulungan Kodam VI/MLw Tahun 2012 sehingga pelaksanaan pekerjaan senilai Rp22,07 miliar belum dapat terlaksana yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Yonkav Bengkayang Kodam XII/Tpr dan Yonkav Bulungan Kodam VI/MLw terlambat sehingga pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan sesuai dengan program menjadi tertunda.
- Di Kementerian Luar Negeri, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman di Yordania terdapat pengadaan aset senilai Rp458,14 juta belum dicatat dalam laporan barang milik negara (BMN) KBRI Amman sehingga mengakibatkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan KBRI Amman belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan terdapat kurang saji nilai aset dalam Laporan BMN KBRI Amman per 30 Juni 2012 senilai Rp458,14 juta.
- Di Badan Pertanahan Nasional, terdapat pelaporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bidang kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) TA 2010 dan 2011 dalam Aplikasi Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur belum berdasarkan data yang memadai mengakibatkan pelaporan kegiatan Prona dalam aplikasi SKMPP berupa realisasi fisik (bidang) dan realisasi keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (tidak akurat).

Penyebab

4.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

4.21 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan

dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. Selain itu, BPK merekomendasikan agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.22 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Tabel 4.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	212	41.071,81
2	Potensi Kerugian Negara	14	28.574,43
3	Kekurangan Penerimaan	49	19.734,46
4	Administrasi	131	-
5	Ketidakhematan	25	9.106,73
6	Ketidakefisienan	1	32,97
7	Ketidakefektifan	26	4.557,43
	Jumlah	458	103.077,83

- 4.23 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 458 kasus senilai Rp103,07 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 20 kementerian/lembaga (KL).

Kerugian Negara (212 kasus senilai Rp41,07 miliar)

- 4.24 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4.25 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4.26 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang,

dan pemahalan harga (*mark up*). Kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara.

- 4.27 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 212 kasus senilai Rp41,07 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 65 kasus senilai Rp12,41 miliar. Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	10	8.135,44
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	14	4.989,40
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	48,08
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	8.842,91
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan/atau barang	55	4.446,93
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	7.400,88
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	94,12
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	13	1.046,65
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	1.766,46
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	1.403,84
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	29	2.863,63
12	Lain-lain	1	33,47
	Jumlah	212	41.071,81

- 4.28 Kasus-kasus tersebut terjadi di 53 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

- 4.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat pemahalan harga kontrak (*mark up*) atas pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara dari pemahalan harga kontrak penggandaan Kitab Suci senilai Rp6,92 miliar, terdiri atas penggandaan Kitab Suci APBN TA 2011 senilai Rp1,10 miliar dan APBN-P TA 2011 senilai Rp5,82 miliar.

- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat bantuan langsung kegiatan pengembangan pusat pelatihan pemuda dan mahasiswa (P3M) dan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan TA 2011 senilai Rp1,50 miliar tidak dilaksanakan oleh penerima serta senilai Rp500,00 juta tidak dapat diyakini keberadaannya sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp2,00 miliar.
 - Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas selama Semester I Tahun 2012 yang diragukan kebenarannya dan berindikasi adanya kerugian negara senilai Rp1,90 miliar sehingga mengakibatkan negara telah mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya senilai Rp1,90 miliar.
 - Di TNI AU, pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU terdapat kekurangan volume pekerjaan atas paket pekerjaan pengembangan fasilitas konstruksi (bangfas) belanja modal terpusat Tahun 2011 senilai Rp1,117 miliar dan pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp43,80 juta sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp1,16 miliar.
 - Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal Purse Seine 10-30 GT Tahun 2012 pada Kabupaten Halmahera Timur diindikasikan fiktif sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp795,22 juta.
 - Di TNI AD, pada Kodam IX Udayana terdapat pembayaran *fee management* Tahun 2011 dan 2012 kepada pengelola Rumah Sakit Tk. III Denpasar yang melebihi ketentuan Surat Telegram Direktur Kesehatan Angkatan Darat Nomor ST/138/2010 yang menyatakan besarnya *fee management* maksimal 3% dari penerimaan bruto sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran *fee management* senilai Rp259,12 juta kepada Pengelola Rumah Sakit Tk. III Denpasar.
- 4.30 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 72 kasus senilai Rp10,05 miliar dari seluruh kasus kerugian negara pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya merupakan 40 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp7,435 miliar, sebanyak 22 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp2,082 miliar, dan sebanyak 5 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp207,03 juta. Dari temuan belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp10,05 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp1,47 miliar.
- 4.31 Dari kasus-kasus kerugian negara atas belanja pemerintah pusat senilai Rp41,07 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp3,77 miliar, di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp1,68 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp508,07 juta, dan TNI AU senilai Rp429,27 juta.

Penyebab

- 4.32 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, dan penerima barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.33 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (14 kasus senilai Rp28,57 miliar)

- 4.34 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.35 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset tidak diketahui keberadaannya, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
- 4.36 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp28,57 miliar yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11	28.567,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	--
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	7,40
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	--
Jumlah		14	28.574,43

- 4.37 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat pemahalan harga kontrak (*mark up*) atas pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2012, tetapi pemahalan harga tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian Negara dari pemahalan harga atas penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku-buku Keagamaan APBN TA 2012 senilai Rp21,23 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, terdapat penetapan pencairan uang muka kepada rekanan atas pekerjaan pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran uang muka senilai Rp4,07 miliar, tetapi pembayaran tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya.
 - Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan kapal perikanan Inka Mina Tahun 2012 tetapi kekurangan volume kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp849,10 juta.
 - Di Kementerian Perhubungan, pada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat terdapat kelebihan perhitungan pekerjaan rehabilitasi terminal Tipe A Pakupatan Serang Tahun 2012, tetapi kelebihan perhitungan tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp532,49 juta.
 - Di Kementerian Perhubungan, pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat pengadaan tiang pancang baja yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pantoloan Tahun 2012 sehingga mengakibatkan potensi kerusakan struktur atas dermaga (*upper structure*). Selain itu terdapat tiang pancang yang tidak dapat digunakan senilai Rp828,94 juta serta potensi kelebihan pembayaran atas selisih berat pengadaan tiang pancang baja senilai Rp3,24 juta.
 - Di TNI Angkatan Udara (AU), pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU terdapat pelaksanaan fisik pekerjaan pengembangan fasilitas konstruksi (bangfas) belanja modal terpusat Tahun 2012 yang tidak sesuai kontrak, tetapi kekurangan fisik pekerjaan tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran proyek Tahun 2012 kepada rekanan atas kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp312,75 juta.

- 4.39 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 10 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp7,70 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian negara pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Dari temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp7,70 miliar, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp87,69 juta.
- 4.40 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara atas belanja pemerintah pusat senilai Rp28,57 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp87,69 juta, yaitu di Kejaksaan RI senilai Rp66,39 juta, dan TNI AU senilai Rp21,30 juta.

Penyebab

- 4.41 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.42 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (49 kasus senilai Rp19,73 miliar)

- 4.43 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.44 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 4.45 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 49 kasus senilai Rp19,73 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	26	15.560,86
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	16	3.406,12
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	183,27
4	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	152,64
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	431,57
Jumlah		49	19.734,46

4.46 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.47 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal perikanan Inka Mina >30 *gross ton* TA 2010 s.d. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan di delapan provinsi belum dikenakan denda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp1,03 miliar.
- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas tiga item pekerjaan penggandaan kitab suci dan buku-buku keagamaan APBN TA 2012 yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp848,98 juta.
- Di Kementerian Kesehatan, pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan alat kesehatan yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara Tahun 2012 senilai Rp668,13 juta.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara oleh *Indonesia SEA Games Organizing Committee* (INASOC) sehingga mengakibatkan penerimaan negara dari pajak untuk kegiatan pelaksanaan SEA Games XXVI kurang diterima senilai Rp423,90 juta.

- Di TNI AD, pada pengembangan fasilitas dan pemeliharaan bangunan terdapat kekurangan pemungutan pajak atas kegiatan pembangunan yang dilakukan Tahun 2011 dan 2012 oleh Kodam VII/Wrb dan Kopassus sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan yang diterima oleh negara untuk TA 2011 melalui PPh Pasal 4 ayat (2) senilai Rp313,37 juta. Selain itu terdapat sanksi denda keterlambatan yang belum ditarik atas pekerjaan pembangunan fasilitas dan bangunan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan senilai Rp77,14 juta.
 - Di TNI AD, pada Kodam IX Udayana terdapat kontribusi pengelolaan apotik, laboratorium dan praktek dokter pada Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) 09.04.01 Kupang Tahun 2011 dan 2012 yang tidak disetor ke kas negara melainkan dikelola Bintara Administrasi Logistik (Baminlog) Denkesyah Kupang sehingga mengakibatkan Dana Yanmasum yang digunakan Denkesyah 09.04.01 Kupang senilai Rp112,64 juta rawan terjadi penyimpangan dan pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 4.48 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 8 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp377,10 juta dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada belanja pemerintah pusat pada Semester II Tahun 2012. Dari temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp377,10 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp35,46 juta.
- 4.49 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas belanja pemerintah pusat senilai Rp19,73 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp2,87 miliar, di antaranya adalah TNI AU senilai Rp1,68 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp600,19 juta, dan TNI AD senilai Rp419,12 juta.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.51 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (131 kasus)

- 4.52 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.53 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.
- 4.54 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.55 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 131 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 12 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 56 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 5 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 25 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 3 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 13 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya.
- 4.56 Kasus-kasus tersebut terjadi di 46 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.57 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, terdapat pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari Tahun 2012 yang dilaksanakan mendahului kontrak perjanjian pekerjaan maupun revisi DIPA/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) sehingga mengakibatkan ketidakpastian mekanisme, spesifikasi pekerjaan, hak maupun kewajiban, waktu pelaksanaan, dan besaran biaya yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa.
 - Di Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat pembangunan rusunawa *multi years* 2010 - 2011, fungsionalisasi rusunawa Tahun 2011, pembangunan rusun Tahun 2011, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Tahun 2011 yang masih belum didukung *Final Hand Over* sehingga mengakibatkan kepemilikan aset rusunawa, rumah khusus dan PSU menjadi tidak jelas serta terancam terbengkalai.
 - Di TNI AD, pada Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD terdapat pengeluaran BBM intensitas berupa MT-88 dan HSD Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Juni) tidak didukung dengan bukti yang valid sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya bahan bakar minyak senilai Rp2,67 miliar belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/15/M/XI/2000.

Penyebab

- 4.58 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan langsung.

Rekomendasi

- 4.59 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (25 kasus senilai Rp9,10 miliar)

- 4.60 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 4.61 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 4.62 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat 25 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp9,10 miliar yang sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan; dan
 - sebanyak 24 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp9,10 miliar.
- 4.63 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.
- 4.64 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat biaya untuk penyewaan *personal computer* (PC), laptop, dan *walkie talkie* yang terlalu mahal dibandingkan dengan harga beli alat tersebut pada pekerjaan pendukung *timing* dan *scoring* Sea Games XXVI di Jakarta dan Palembang Tahun 2011 sehingga mengakibatkan ketidakhematan penggunaan anggaran pemerintah dalam penyewaan alat-alat untuk menunjang pelaksanaan *timing* dan *scoring* senilai Rp3,60 miliar.
 - Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Sekretariat Jenderal terdapat pembayaran honor untuk pejabat penanggung jawab pengelola keuangan, tim SAI dan tim pelaksana kegiatan yang melebihi ketentuan SBU TA 2011 dan TA 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas kelebihan pembayaran honor senilai Rp925,75 juta.
 - Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian sehingga terdapat selisih yang signifikan antara RAB kontrak dengan harga yang dibayarkan rekanan

kepada TVRI sesuai *media order* Tahun 2010 dan 2011 yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp642,00 juta.

- Di Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat pembayaran honorarium penyelenggaraan sidang umum *Asean Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-33 Tahun 2012 senilai Rp269,11 juta yang tidak sesuai dengan indeks honor kegiatan DPR RI yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan standar biaya 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp269,11 juta.
- Di TNI AD, pada Kodiklat TNI AD terdapat realisasi belanja barang untuk mendukung operasional pendidikan Tahun 2011 dan 2012 di lingkungan Pusat Pendidikan Ajunan Jenderal (Pusdikajen) dan Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran sehingga mengakibatkan beban anggaran bertambah senilai Rp360,97 juta.

Penyebab

- 4.65 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.66 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp32,97 juta)

- 4.67 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 4.68 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp32,97 juta.
- 4.69 Kasus tersebut terjadi di TNI AL, pada Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) terdapat pemesanan beras Tahun 2011 pada Kobangdikal melebihi standar kebutuhan senilai Rp32,97 juta mengakibatkan pengeluaran atas biaya pembelian beras Tahun 2011 senilai Rp32,97 juta belum dipertanggungjawabkan.

Penyebab

- 4.70 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena pelaksana kurang cermat dalam membeli kuantitas beras sesuai standar kebutuhan sesungguhnya.

Rekomendasi

- 4.71 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar pejabat terkait bekerja lebih cermat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan bahan makanan yang dibeli.

Ketidakefektifan (26 kasus senilai Rp4,55 miliar)

- 4.72 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 4.73 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 4.74 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan 26 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp4,55 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	111,68
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	140,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	14	3.293,78
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	392,15
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	619,82
Jumlah		26	4.557,43

4.75 Kasus-kasus tersebut terjadi di 21 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 15.

4.76 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Ditjen Bimas Islam terdapat 22.151 eksemplar Kitab Suci Al Qur'an senilai Rp697,75 juta hasil penggandaan Tahun 2011 dan 2012 belum tersalurkan dan masih tersimpan di 13 Kanwil Kemenag Provinsi sehingga mengakibatkan hasil penggandaan Kitab Suci APBN-P TA 2011 dan TA 2012 belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.
- Di TNI AL, pada Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan terdapat perbedaan jumlah orang pada bukti pembayaran uang lauk pauk (ULP) tahanan Tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan data pada laporan yang disusun Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Lantamal I Belawan. Selain itu realisasi harga satuan ULP yang dibayarkan lebih kecil dari indeks yang digunakan dalam bukti pembayaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat realisasi keuangan yang tidak sesuai peruntukan senilai Rp107,15 juta.
- Di Kementerian Perumahan Rakyat, pemberian bantuan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) kepada lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama Tahun 2010 s.d. 2011 tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenpera dan tidak sesuai dengan tujuan, visi dan misi pembangunan rusunawa sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni melalui program bantuan pembangunan rusunawa.
- Di Kementerian Luar Negeri, pada KJRI Guangzhou terdapat pelaksanaan dan pembayaran biaya representasi tidak sesuai ketentuan dan laporan kegiatan representasi yang dibuat tidak digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KJRI Guangzhou. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pelaksanaan penggantian biaya representasi yang telah dikeluarkan dalam Tahun 2011 senilai Rp363,88 juta dan Tahun 2012 (s.d. Mei 2012) senilai Rp129,18 juta serta pemanfaatan dari hasil pelaksanaan kegiatan representasi dalam mendukung tugas dan fungsi diplomasi secara optimal belum tercapai.

Penyebab

4.77 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai serta kurang memperhatikan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksana kegiatan kurang mempedomani keputusan Menlu RI tentang penggantian biaya representasi dan belum menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan representasi serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

- 4.78 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat serta memperhatikan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, menyusun SOP perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan representasi, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.79 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009 s.d. 2012, atas 185 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 158 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.80 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 185 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp42,42 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp102,68 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,17 triliun merupakan temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.81 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.82 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.83 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.84 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 4.85 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 4.86 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya 196 kasus kelemahan SPI, yaitu 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 143 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 44 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 16.

Tabel 4.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas</i>				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1	8	9
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	20	123	143
3	Struktur Pengendalian Intern	7	37	44
	Jumlah	28	168	196

- 4.87 Terdapat 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	6	7
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	2	2
Jumlah		1	8	9

- 4.88 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.89 Terdapat 143 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8	57	65
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	-	4	4
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	41	49
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	-	4	4
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	-	7	7
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	10	14
Jumlah		20	123	143

- 4.90 Kasus-kasus tersebut terjadi di 81 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.91 Terdapat 44 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	8	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	22	26
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	2	2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	-	5	5
	Jumlah	7	37	44

- 4.92 Kasus-kasus tersebut terjadi di 32 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.93 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat penganggaran belanja hibah yang tidak memenuhi kriteria penerima hibah yaitu kepada pemerintah desa dengan total anggaran senilai Rp1,07 miliar, yang seharusnya bantuan tersebut dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan. Selain itu terdapat penganggaran belanja hibah kepada penerima yang telah memperoleh bantuan pada Tahun 2011 senilai Rp12,98 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan para penerima hibah lainnya yang lebih berhak memperoleh dana hibah senilai Rp14,05 miliar.
 - Di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dan telah direalisasikan namun belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Selain itu, terdapat bantuan yang

diberikan secara tunai dikarenakan penerima tidak memiliki rekening, serta pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal Tahun 2008. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerima terlambat menerima dan memanfaatkan bantuan serta lemahnya pengendalian atas dana bantuan yang tidak langsung ditransfer ke penerima bantuan.

- Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat perangkapan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sehingga mengakibatkan pengendalian pada ULP tidak memadai.

Penyebab

- 4.94 Kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam proses perencanaan penganggaran, dan pegawai yang bersertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa kurang diberdayakan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 4.95 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah daerah, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum memperhatikan ketentuan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPK merekomendasikan agar perangkapan jabatan dihilangkan dengan cara memberdayakan pegawai yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.96 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya 2.222 kasus ketidakpatuhan senilai Rp1,17 triliun yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.10. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 17 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 18.

Tabel 4.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>							
1	Kerugian Daerah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93
2	Potensi Kerugian Daerah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26
3	Kekurangan Penerimaan	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25
4	Administrasi	38	--	205	--	243	--
5	Ketidakhematan	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43
6	Ketidakefisienan	--	--	1	4.359,11	1	4.359,11
7	Ketidakefektifan	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56
	Jumlah	341	380.767,21	1.881	795.241,33	2.222	1.176.008,54

Kerugian Daerah (1.043 kasus senilai Rp445,14 miliar)

- 4.97 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4.98 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4.99 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan.
- 4.100 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 4.101 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.043 kasus senilai Rp445,14 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 491 kasus senilai Rp253,97 miliar. Hasil pemeriksaan atas belanja daerah disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	3	1.056,42	34	9.341,01	37	10.397,43
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	5	520,95	31	15.233,48	36	15.754,43
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	2.285,16	18	14.333,48	19	16.618,64
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	92	23.995,02	354	111.709,14	446	135.704,16
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang	29	6.177,94	168	46.361,14	197	52.539,08
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	6	17.681,30	55	11.524,25	61	29.205,55
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	143,67	15	5.232,26	16	5.375,93
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.307,75	45	5.965,49	52	7.273,24
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	300,76	15	1.146,07	16	1.446,83
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	1.138,07	57	51.322,78	66	52.460,85
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	91.368,03	66	22.132,96	74	113.500,99
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	1	232,36	1	232,36
13	Lain-lain	3	387,98	19	4.244,46	22	4.632,44
	Jumlah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93

4.102 Kasus-kasus tersebut terjadi di 182 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.103 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua Barat, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat pengeluaran belanja daerah TA 2012 untuk kekurangan bayar pekerjaan pembangunan jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 senilai Rp78,90 miliar. Pengeluaran tersebut tanpa dasar hukum karena anggaran untuk membayar pekerjaan tersebut belum ada serta menurut hasil konfirmasi diketahui tidak pernah terjadi kekurangan bayar pekerjaan karena telah dilakukan pembayaran 100% seluruhnya pada TA 2008. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah senilai Rp78,90 miliar.
- Di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo TA 2011 dan 2012 pada 12 kontrak yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama sehingga hasil pekerjaan tidak dapat diterima seluruhnya senilai Rp23,39 miliar.
- Di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan pekerjaan dalam pelaksanaan 30 paket pekerjaan Tahun 2009 s.d. 2011 di Dinas Pekerjaan Umum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah senilai Rp12,86 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Perhubungan terdapat pembayaran remunerasi kepada Pegawai Unit Pengelola Perpustakaan TA 2011 dan 2012 yang melebihi Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp10,18 miliar.
- Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdapat mekanisme verifikasi atas pembayaran tunjangan sertifikasi guru TA 2012 tidak optimal sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara/daerah atas keterlanjuran pembayaran tunjangan sertifikasi guru kepada 874 orang guru yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi terakhir minimal senilai Rp9,13 miliar.
- Di Provinsi Bali, terdapat pemahalan harga atas beberapa item pekerjaan pengadaan alat-alat berat, alat-alat studio, *closed circuit television*, instalasi listrik dan telepon pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2011 dan 2012 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah minimal senilai Rp6,26 miliar.

4.104 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 606 kasus senilai Rp326,82 miliar dari seluruh kasus kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada tingkat provinsi sebanyak 94 kasus senilai Rp108,028 miliar di antaranya sebanyak 71 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp22,78 miliar, sebanyak 15 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4,08 miliar, dan sebanyak 4

kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp833,85 juta. Dari temuan pada tingkat provinsi sebanyak 94 kasus senilai Rp108,028 miliar tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp11,15 miliar.

- 4.105 Selain itu temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum juga terjadi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota pada Semester II Tahun 2012 sebanyak 512 kasus senilai Rp218,795 miliar, di antaranya 298 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp100,27 miliar, sebanyak 105 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp35,74 miliar, dan 43 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp48,35 miliar. Dari temuan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota sebanyak 512 kasus senilai Rp218,795 miliar tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp11,11 miliar.
- 4.106 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas belanja pemerintah daerah senilai Rp445,14 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp28,21 miliar, di antaranya di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp4,43 miliar, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp3,25 miliar, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,63 miliar, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua senilai Rp1,44 miliar, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,30 miliar.

Penyebab

- 4.107 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.108 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (308 kasus senilai Rp151,64 miliar)

- 4.109 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 4.110 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan pembelian aset yang berstatus sengketa.
- 4.111 Potensi kerugian daerah juga meliputi aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah serta lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 4.112 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 308 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp151,64 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	31	20.238,12	246	106.517,34	277	126.755,46
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	2.120,74	2	63,97	4	2.184,71
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	250,45	2	250,45
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	1	82,40	1	82,40
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	73,00	1	73,00
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	4	603,80	4	603,80
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	-	-	2	644,50	2	644,50
8	Lain – lain	2	9.160,39	15	11.894,55	17	21.054,94
	Jumlah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26

- 4.113 Kasus-kasus tersebut terjadi di 118 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.
- 4.114 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terdapat kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Lobang Klatak-Pantai Harapan, tetapi kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp10,07 miliar.
 - Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat pembayaran kontrak pekerjaan pengadaan kapal operasional dan patroli Tahun 2011 dan 2012 yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp9,95 miliar karena anggaran belum tersedia dan kapal tersebut belum diserahkan.
 - Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp7,78 miliar untuk pekerjaan penyiapan lahan, galian, dan timbunan tanah pembangunan Bandar Udara Nabire Tahun 2011, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp7,78 miliar.
 - Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atas pekerjaan pembangunan jalan dan gedung Tahun 2012, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp6,12 miliar.
 - Di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi atas 11 paket pekerjaan jalan dan jembatan Tahun 2012, tetapi kekurangan volume dan spesifikasi tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp4,11 miliar.
 - Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2012 terdapat pekerjaan pengadaan mobil pompa 4000 liter (*medium pressure*) tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu pada selang pemadam kebakaran, tetapi ketidaksesuaian spesifikasi kontrak tersebut bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp1,95 miliar.
- 4.115 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 254 kasus senilai Rp120,24 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian

temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp20,269 miliar dan pada pemerintah kabupaten/kota sebanyak 223 kasus senilai Rp99,973 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah masing-masing senilai Rp7,69 miliar dan Rp1,28 miliar.

- 4.116 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas belanja pemerintah daerah senilai Rp151,64 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp9,01 miliar, di antaranya di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp5,89 miliar, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,46 miliar, dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur senilai Rp532,26 juta.

Penyebab

- 4.117 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

- 4.118 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

Kekurangan Penerimaan (356 kasus senilai Rp56,88 miliar)

- 4.119 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.120 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.121 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 356 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp56,88 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah	48	7.760,56	257	37.381,12	305	45.141,68
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah	8	3.951,39	39	7.495,92	47	11.447,31
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	2	25,41	2	25,41
4	Lain – lain	-	-	2	269,85	2	269,85
	Jumlah	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25

4.122 Kasus-kasus tersebut terjadi di 145 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.123 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun 2012 pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp4,35 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada UP Transjakarta Busway Dinas Perhubungan terdapat pengenaan denda (sanksi) atas pelanggaran kontrak oleh operator pada Transjakarta Busway Koridor 1 s.d. 10 selama Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang belum diterima sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari denda senilai Rp2,48 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase Tahun 2011 yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp2,40 miliar.

- Di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, terdapat sisa uang muka dan jaminan pelaksanaan dengan total senilai Rp2,09 miliar pada pekerjaan pembangunan gedung parkir Tahun 2012 yang putus kontrak belum diterima sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp2,09 miliar.
 - Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas 6 paket pekerjaan Tahun 2012 yang telah putus kontrak sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp1,42 miliar.
 - Di Provinsi Jambi, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 7 paket pekerjaan Tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp452,85 juta.
- 4.124 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 229 kasus senilai Rp44,13 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada belanja pemerintah daerah pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri dari temuan pada pemerintah provinsi sebanyak 35 kasus senilai Rp6,72 miliar dan temuan pada pemerintah kabupaten/kota sebanyak 194 kasus senilai Rp37,41 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah masing-masing senilai Rp857,32 juta dan Rp2,91 miliar.
- 4.125 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas belanja pemerintah daerah senilai Rp56,88 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4,75 miliar, di antaranya di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara senilai Rp1,03 miliar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali senilai Rp469,68 juta, dan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp420,07 juta.

Penyebab

- 4.126 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 4.127 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (243 kasus)

- 4.128 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.129 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, dan pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan serta pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.130 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetorkan ke kas daerah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.
- 4.131 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 243 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

No	Jenis Temuan	Jumlah kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Administrasi				
1	pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	21	21
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	15	74	89
3	pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;	-	10	10
4	proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah	16	65	81
5	pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	8	11
6	pelaksanaan lelang secara proforma	2	3	5
7	penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	-	4	4
8	penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	2	12	14
9	penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	1	1
10	sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	-	1	1
11	kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	3	3
12	pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	3	3
	Jumlah	38	205	243

4.132 Kasus-kasus tersebut terjadi di 106 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.133 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Gorontalo, terdapat realisasi bantuan sosial Tahun 2011 yang belum sepenuhnya dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial senilai Rp5,00 miliar sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan.
- Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kelebihan pekerjaan yang telah dikerjakan rekanan pada pembangunan lanjutan gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahun 2011. Kelebihan pekerjaan Tahun 2011 tersebut belum terikat kontrak dan belum memiliki anggaran serta baru dianggarkan dan dibuat kontrak pada Tahun 2012 senilai Rp2,90 miliar, mengakibatkan gedung kantor bupati belum sepenuhnya dapat diakui menjadi aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2012 (s.d. Oktober) pada satuan kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sehingga mengakibatkan belanja perjalanan dinas yang dilaporkan senilai Rp2,09 miliar belum memenuhi syarat sahnya pengeluaran.
- Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pajak-pajak yang dipungut dari realisasi belanja modal Tahun 2012 terlambat disetorkan ke kas negara selama 27 s.d. 66 hari sehingga mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara senilai Rp882,46 juta.

Penyebab

- 4.134 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.135 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakhematan (139 kasus senilai Rp175,35 miliar)

- 4.136 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 4.137 Ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 4.138 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 139 kasus ketidakhematan senilai Rp175,35 miliar, yang disajikan dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan							
1	pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4	9.010,43	3	104,36	7	9.114,79
2	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	11	835,97	11	835,97
3	pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	17	83.977,00	104	81.428,67	121	165.405,67
	Jumlah	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43

4.139 Kasus-kasus tersebut terjadi di 80 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

4.140 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Bali, terdapat pengadaan media pembelajaran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2010-2012 tidak dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang memadai yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp69,02 miliar.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kemahalan harga pengadaan pipa *High Density Polyethylene* (HDPE) pada pembangunan sarana air bersih PDAM Kota Tanjung Redeb lanjutan tahap II TA 2008 sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga pengadaan pipa HDPE senilai Rp35,16 miliar.
- Di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, terdapat harga material 9 (sembilan) kontrak pekerjaan peningkatan ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 melebihi standar harga Kabupaten dan kemahalan harga satuan pekerjaan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp4,46 miliar.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada Sekretariat DPRD terdapat kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tahun 2012 yang tumpang tindih dilaksanakan pada dua kegiatan yaitu kegiatan pembahasan raperda dan kegiatan rapat paripurna sehingga memboroskan keuangan daerah minimal senilai Rp1,33 miliar.

Penyebab

- 4.141 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.142 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp4,35 miliar)

- 4.143 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 4.144 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp4,35 miliar.
- 4.145 Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketidakcermatan perencanaan pembangunan Pasar Semi Modern Tamiang Layang yaitu pada kedalaman dan ukuran tiang pancang, pekerjaan pembesian poer, dan pekerjaan pembesian balok/kolom sehingga terjadi kenaikan RAB yang mengakibatkan biaya pembangunan yang tidak efisien senilai Rp4,35 miliar.

Penyebab

- 4.146 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena konsultan perencana kurang cermat dalam melakukan perhitungan perencanaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh kepala dinas terkait.

Rekomendasi

- 4.147 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar mengenakan sanksi kepada pejabat terkait sesuai ketentuan berlaku.

Ketidakefektifan (132 kasus senilai Rp342,61 miliar)

- 4.148 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 4.149 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 4.150 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 132 kasus ketidakefektifan senilai Rp342,61 miliar yang disajikan dalam Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan ketidakefektifan atas Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	8	3.229,90	42	28.808,16	50	32.038,06
2	pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	657,82	5	34,50	6	692,32
3	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	15	25.380,03	30	99.287,18	45	124.667,21
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	189,58	1	189,58
5	pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	68.917,78	27	116.112,61	29	185.030,39
6	fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56

- 4.151 Kasus-kasus tersebut terjadi di 88 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 18.

- 4.152 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 14 Paket Pekerjaan Tahun 2012 senilai Rp72,81 miliar pada Dinas Bina Marga dan Pengairan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

- Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat pekerjaan pembangunan gedung RSUD Bangkinang dan seluruh peralatan pendukungnya Tahun 2011 yang belum dapat dimanfaatkan sehingga mengakibatkan gedung RSUD Bangkinang beserta seluruh peralatan yang ada di dalamnya senilai Rp69,03 miliar menjadi tidak efektif dan berpotensi mengalami kerusakan.
- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kerusakan konstruksi pada pekerjaan penurapan Jalan Marsma Iswahyudi (depan Bandara Kalimantan) TA 2010 minimal senilai Rp14,28 miliar sehingga mengakibatkan belanja infrastruktur belum memberikan manfaat dan menimbulkan potensi kerusakan pada ruas jalan alternatif atas pengalihan rute jalan.
- Di Provinsi Kepulauan Riau, pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdapat pengadaan alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran umum Tahun 2012 belum dimanfaatkan senilai Rp6,97 miliar sehingga mengakibatkan barang hasil pengadaan tidak efektif dan barang yang tidak digunakan dapat menjadi rusak sebelum dimanfaatkan.
- Di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, terdapat belanja subsidi dan belanja tidak terduga Tahun 2011 senilai Rp5,93 miliar tidak sesuai peruntukan karena digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mengakibatkan tujuan penganggaran belanja subsidi dan belanja tidak terduga tidak tercapai dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Penyebab

- 4.153 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, tidak segera memanfaatkan dana yang sudah tersedia, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 4.154 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 4.155 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Bab 5

Manajemen Aset

- 5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).
- 5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 5.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas manajemen aset termasuk penyertaan modal dan pengelolaan kas pada 43 objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 8 pemerintah pusat, 5 pemerintah provinsi, 27 pemerintah kabupaten/kota, dan 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan Pemeriksaan

- 5.4 Tujuan pemeriksaan atas manajemen aset adalah untuk
- menilai efektivitas SPI terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap;
 - menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap; dan
 - menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian

negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 5.6 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.7 Pemeriksaan atas manajemen aset bertujuan antara lain menilai apakah SPI atas pelaksanaan manajemen aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Selain itu untuk menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset.

- 5.8 Hasil evaluasi SPI pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

- 5.9 Hasil evaluasi SPI menunjukkan adanya 311 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 173 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 82 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 56 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				Total
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	29	13	124	7	173
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	3	39	11	82
3	Struktur Pengendalian Intern	8	4	36	8	56
Jumlah		66	20	199	26	311

- 5.10 Terdapat 173 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				Total
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan</i>						
1	Pencatatan Tidak/Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	22	7	108	5	142
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	2	3	10	-	15
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Tidak Memadai	2	3	3	2	10
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Belum didukung SDM yang Memadai	3	-	3	-	6
Jumlah		29	13	124	7	173

- 5.11 Kasus-kasus tersebut terjadi di 42 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

- 5.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pertahanan, penatausahaan tanah, gedung dan bangunan Tahun 2012 di lingkungan unit organisasi kementerian pertahanan belum sesuai ketentuan mengakibatkan nilai aset tersebut pada laporan barang milik negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tidak akurat.
- Di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, realisasi belanja modal TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp21,251 miliar pada 4 SKPD tidak tercatat dalam laporan barang milik daerah (LBMD) yaitu RSUD Kabupaten Landak senilai Rp3,308 miliar, Sekretaris Daerah senilai Rp6,512 miliar, Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) senilai Rp89,00 juta, dan Dinas Pendidikan senilai Rp11,342 miliar. Hal ini mengakibatkan pengadaan barang milik daerah berpotensi tidak termonitor dan disalahgunakan pihak yang tidak berhak.
- Di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, penatausahaan barang milik daerah Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 belum tertib, yaitu pencatatan ganda atas satu jenis aset di beberapa SKPD, hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB), rumah dinas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum tercatat, dan hasil inventarisasi barang belum menyajikan aset tetap yang dimiliki sesuai kondisi yang sebenarnya.

- Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, KIB pada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Sekretariat Daerah, dan Dinas Pertanian dengan total nilai Rp4,21 miliar disajikan secara global. Hal ini mengakibatkan saldo aset tetap per 31 Desember 2012 tidak disajikan secara wajar.

5.13 Terdapat 82 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</i>						
1	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	2	-	4	-	6
2	Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Serta Penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah Tidak Sesuai Ketentuan	5	-	-	-	5
3	Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Teknis Tertentu atau Ketentuan Intern Organisasi yang Diperiksa tentang Pendapatan dan Belanja	3	-	4	-	7
4	Penetapan/Pelaksanaan Kebijakan Tidak Tepat atau Belum Dilakukan Berakibat Hilangnya Potensi Penerimaan/Pendapatan	18	3	27	5	53
5	Penetapan/Pelaksanaan Kebijakan Tidak Tepat atau Belum Dilakukan Berakibat Peningkatan Biaya/Belanja	-	-	2	6	8
6	Lain-lain	1	-	2	-	3
Jumlah		29	3	39	11	82

5.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 27 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AU, nilai pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil oleh PT Angkasa Pura (Persero) atas pemanfaatan pangkalan udara belum ditetapkan sesuai kesepakatan bersama pada Januari 2011 yang mengakibatkan negara kehilangan penerimaan.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat penghapusan aset tetap dalam TA 2011 atas 43 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua tidak sesuai prosedur dan tidak mencantumkan harga perolehan dan harga wajarnya. Hal ini mengakibatkan penerimaan daerah senilai Rp3,97 miliar tertunda.
- Di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdapat bangunan ruko dan plasa yang berasal dari bangun guna serah yang berakhir Tahun 2012 belum bisa dimanfaatkan mengakibatkan pendapatan atas pemanfaatan aset daerah belum dapat diperoleh.
- Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) untuk TA 2012 yang mengakibatkan jumlah kebutuhan barang daerah dan pemeliharaan barang daerah setiap tahun tidak dapat diketahui secara pasti.
- Di PT Pertamina (Persero), pelaksanaan perjanjian pengelolaan perwismaan dan balai-balai hiburan oleh koperasi karyawan Patra dan koperasi wanita Petra dengan sistem *reimbursement* membebani PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III senilai Rp1,17 miliar untuk periode Januari 2011 – Juni 2012, sehingga PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan kompensasi dari pengelolaan perwismaan dan balai-balai tersebut.

5.16 Terdapat 56 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus				Total
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern						
1	Entitas Tidak Memiliki SOP yang Formal untuk Suatu Prosedur atau Keseluruhan Prosedur	6	4	28	4	42
2	SOP yang Ada pada Entitas tidak Berjalan Secara Optimal atau Tidak Ditaati	1	-	8	4	13
3	Satuan Pengawas Intern yang Ada Tidak Memadai atau Tidak Berjalan Optimal	1	-	-	-	1
	Jumlah	8	4	36	8	56

- 5.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, KEP-185/PB/2010 tentang Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, belum mengatur prosedur pelaporan hasil penerimaan negara dari pembayaran angsuran sewa beli rumah negara golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan sehingga tidak mendukung asersi keberadaan, hak, dan kewajiban.
 - Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dimiliki yang mengakibatkan lemahnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.
 - Di Provinsi Sulawesi Utara, mekanisme/prosedur pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 masih berupa *draft* sehingga penyusunan buku inventaris barang daerah terlambat dan tidak akurat dan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang dan pengelola barang tidak optimal.
 - Di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Surat Keputusan penghapusan/penggabungan SD Negeri tidak diikuti dengan penyerahan aset hasil penghapusan/penggabungan kepada Bupati. Hal ini mengakibatkan penyajian aset gedung dan bangunan Tahun 2011 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - Di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, penghapusan atas aset yang rusak belum dilakukan mengakibatkan nilai aset tetap Tahun 2012 tidak memberikan informasi yang memadai dan akurat.

Penyebab

- 5.19 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pengelola barang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan inventarisasi aset tetap yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangannya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan, lemahnya koordinasi antar pihak yang terkait mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, dan entitas belum memiliki SOP.

Rekomendasi

- 5.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan penertiban penatausahaan atas aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan aset tetap. BPK juga merekomendasikan kepada entitas agar melakukan peningkatan koordinasi antar pihak yang terkait dalam penatausahaan aset tetap serta menyusun SOP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.21 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Negara/Daerah	7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76
3	Kekurangan Penerimaan	3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	9.265,09	25	24.320,34
4	Administrasi	36	-	40	-	203	-	11	-	290	-
5	Ketidakhematan	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
6	Ketidakefektifan	2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07
Jumlah		60	123.370,27	62	61.365,83	295	196.426,57	21	23.281,03	438	404.443,70

- 5.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 438 kasus senilai Rp404,44 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 40 pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dan 3 BUMN.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan (34 kasus senilai Rp62,03 miliar)

- 5.23 Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 5.24 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5.25 Kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan pada pemeriksaan atas manajemen aset yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara/daerah/perusahaan.

- 5.26 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 34 kasus senilai Rp62,03 miliar, yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Daerah											
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	151,33	-	-	-	-	-	-	2	151,33
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	3,08	-	-	1	269,39	1	9.324,68	4	9.597,15
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	67,75	-	-	-	-	2	2.217,95	3	2.285,70
5	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan	-	-	2	11.877,98	5	4.411,97	-	-	7	16.289,95
6	lain-lain	2	152,40	2	28.704,35	13	4.854,09	-	-	17	33.710,84
	Jumlah	7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97

- 5.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

- 5.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Mahkamah Agung, terdapat kekurangan volume dan perbedaan harga atas pekerjaan pembangunan gedung kantor, rumah dinas dan prasarana kantor di 13 satuan kerja TA 2011 dan Semester I TA 2012 senilai Rp141,05 Juta.
- Di Provinsi Maluku, pelaksanaan kuasi reorganisasi pada PT BPD Maluku Tahun 2008 tidak sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp28,53 miliar atas penurunan nilai penyertaan modal.
- Di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat penghapusan/penjualan rumah dinas dan 508 unit kendaraan dinas operasional pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga berindikasi merugikan daerah masing-masing minimal senilai Rp7,32 miliar dan Rp4,54 miliar.
- Di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat panjar Tahun 2012 yang belum disetorkan ke Kas Daerah mengakibatkan kerugian daerah minimal senilai Rp4,22 miliar.

- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, penghapusan sebagian lahan Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT) yang telah dijual kepada PT PLN (Persero) pada Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan karena PT PLN (Persero) belum melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp4,00 miliar.
 - Di PT Timah (Persero) Tbk, terdapat penagihan biaya sewa atas kapal keruk dan kapal isap produksi milik anak perusahaan (PT Tambang Timah) selama Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 yang tidak digunakan oleh PT Timah sehingga perusahaan terbebani biaya sewa yang tidak seharusnya senilai Rp9,32 miliar.
- 5.29 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan atas manajemen aset senilai Rp62,03 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp4,05 miliar, di antaranya adalah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau senilai Rp4,00 miliar dan Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan senilai Rp50,44 juta.

Penyebab

- 5.30 Kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan disebabkan kepala daerah lalai mengendalikan pengelolaan aset, PPK kurang cermat dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pengelola aset tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam menjalankan tugas pengamanan aset, serta perusahaan tidak menyampaikan daftar aset yang tidak dipakai dalam kegiatan.

Rekomendasi

- 5.31 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyelesaikan kekurangan volume atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke negara/daerah/perusahaan, mengkaji kembali revaluasi aset dan menyelesaikan kewajiban perpajakan, meninjau kembali keputusan penghapusan/penjualan aset tetap, merealisasikan pengeluaran kas mematuhi ketentuan yang berlaku, dan lebih tertib mengadministrasikan uang yang dikelolanya, meningkatkan pengamanan terhadap aset, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang terkait.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan (56 kasus senilai Rp180,82 miliar)

- 5.32 Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 5.33 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman dan atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain potensi kerugian negara/daerah/perusahaan.
- 5.34 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 56 kasus senilai Rp180,82 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Daerah											
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	1	115,21	-	-	1	115,21
2	Aset dikuasai pihak lain	8	80.266,09	7	5.805,40	15	9.008,27	-	-	30	95.079,76
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	-	-	1	163,15	-	-	1	163,15
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	-	3	10.586,94	14	39.455,95	-	-	20	50.042,89
5	Piutang/pinjaman dan/atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	34.465,91	-	-	1	275,77	-	-	2	34.741,68
6	Lain-lain	-	-	1	425,69	1	252,38	-	-	2	678,07
Jumlah		12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76

- 5.35 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AD, Ditjen Bina Marga sampai dengan Tahun 2011 belum menyerahkan aset pengganti kepada Kodam Jaya atas proses *ruijslag* tanah dan bangunan di Jalan Tongkol Nomor 2 dan Jalan Kakap Nomor 25 Jakarta Utara senilai Rp80,26 miliar sehingga berpotensi merugikan negara.
 - Di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum Tahun 2010 minimal senilai Rp15,87 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terjadi potensi kerugian daerah senilai Rp14,23 miliar pada Tahun 2012 yaitu tanah dan bangunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dikuasai pihak lain senilai Rp312,615 juta, dimanfaatkan oleh pegawai yang telah pindah ke pemerintah daerah lainnya senilai Rp249,296 juta, dan tidak diketahui keberadaannya senilai Rp13,672 miliar.
- Di Provinsi Sulawesi Barat, dalam Tahun 2011 terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas kondisinya minimal senilai Rp8,21 miliar.

Penyebab

- 5.37 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan disebabkan pejabat entitas yang diperiksa, pengelola dan pengguna barang belum optimal melaksanakan tupoksinya, kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD, dan tidak melakukan pengamanan aset secara fisik dan administrasi, serta lalai melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib.

Rekomendasi

- 5.38 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyelesaikan permasalahan *ruijslag*, menginstruksikan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas aset tetap dalam penguasaan pihak lain, mengintensifkan penarikan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya, meningkatkan penatausahaan BMD, dan memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepada pihak yang terkait.

Kekurangan Penerimaan (25 kasus senilai Rp24,32 miliar)

- 5.39 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.40 Kasus kekurangan penerimaan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, dan penenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 5.41 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan terdapat 25 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp24,32 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan											
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah	1	79,50	-	-	2	40,39	2	1.414,68	5	1.534,57
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah	2	6.800,88	1	12,50	13	8.121,98	2	7.718,51	18	22.653,87
3	Pengenaan tarif pajak/ PNBK lebih rendah dari ketentuan	-	-	-	-	-	-	2	131,90	2	131,90
Jumlah		3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	9.265,09	25	24.320,34

5.42 Kasus-kasus tersebut terjadi di 18 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AD, PT Kartika Jaya Abadi tidak melakukan pembayaran sewa periode 31 Januari 2008 - 31 Januari 2011 senilai Rp6,77 miliar atas pemanfaatan tanah eks Gudang Pusat Zeni (Gudpuszi) di jalan Yos Sudarso Jakarta Utara.
- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terdapat tunggakan sewa kios dan los Pasar Rumbai sampai dengan September 2012 sehingga pendapatan daerah dari sewa kios dan los belum diterima senilai Rp4,65 miliar.
- Di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, kelompok tani belum mengembalikan dana kerja sama pemanfaatan *handtractor* hasil pengadaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 senilai Rp1,05 miliar.
- Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, terdapat pengeluaran kas Tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kuasa BUD mengakibatkan kekurangan kas daerah senilai Rp311,15 juta.
- Di PT Pertamina (Persero), terlambat menerima pendapatan dari optimalisasi Aset Penunjang Usaha (APU) selama Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp4,75 miliar, sehingga perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan dana tersebut.

5.44 Dari kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas manajemen aset senilai Rp24,32 miliar telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp371,15 juta, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, senilai Rp311,15 juta, dan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, senilai Rp60,00 juta.

Penyebab

- 5.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang diperiksa belum sepenuhnya melaksanakan pemanfaatan aset sesuai ketentuan, tidak optimal dalam menagih piutang sewa, dan melakukan penagihan, pengawasan, dan pengendalian kerja sama operasional *handtractor* kepada kelompok tani, serta penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL), dan Kuasa BUD lalai mempertanggungjawabkan pengeluaran Kas Daerah, serta SPI masih belum memadai.

Rekomendasi

- 5.46 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain menagih hasil penyewaan tanah dan APU sesuai perjanjian, melakukan negosiasi dengan penyewa kios dan los pasar serta menelusuri kembali nilai tunggakan dengan mendata, menetapkan dan melakukan penagihan, menagih uang pemasukan HPL, menyetorkan hasil penagihan ke kas negara/daerah, dan memberikan sanksi administratif kepada mantan Kuasa BUD yang bersangkutan sesuai PP No. 53 Tahun 2010.

Administrasi (290 kasus)

- 5.47 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.48 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan), dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 5.49 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 290 kasus terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

No	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
Penyimpangan Administrasi						
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2	-	1	-	3
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	6	2	8
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	3	-	3
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1	-	2	-	3
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	27	26	151	6	210
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	4	2	1	7
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	1	-	1
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	1	-	-	1
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	8	37	2	53
10	Lain-lain	-	1	-	-	1
Jumlah		36	40	203	11	290

5.50 Kasus-kasus tersebut terjadi di 43 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.51 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Mabes TNI, sampai dengan Agustus 2011 sebanyak 81 bidang tanah seluas 942.628m² senilai Rp2,36 triliun tidak memiliki sertifikat. Hal ini mengakibatkan adanya potensi permasalahan kepemilikan tanah atau hilangnya aset tanah.
- Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, jaringan sarana air bersih yang telah diserahkan kepada pihak ketiga senilai Rp22,08 miliar belum dihapuskan, dan pemanfaatan aset jaringan air minum milik pemda oleh PDAM Kabupaten Malang senilai Rp1,07 miliar belum ditetapkan statusnya. Hal ini mengakibatkan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada KIB D Tahun 2011 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

- Di Provinsi Maluku, pengelolaan aset dengan PT Dok dan Perkapalan Waiame pada Tahun 2010 belum memadai, yaitu penyertaan modal tidak ada sertifikatnya dan kurang diakui minimal senilai Rp8,10 miliar, sumbangan belum ditentukan statusnya senilai Rp4,37 miliar, dan pemakaian generator set senilai Rp495,20 juta belum ditentukan status pemanfaatan dan kepemilikannya.
- Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, terdapat pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, bangunan, dan peralatan dan mesin kepada masyarakat pada Tahun 2011 belum didukung surat keputusan pengelola BMD dan berita acara hibah senilai Rp5,69 miliar.
- PT Timah (Persero) Tbk, pengamanan terhadap aset non-operasional belum memadai dan masa berlaku beberapa bukti kepemilikan tanah telah habis sehingga berpotensi kehilangan kepemilikan atas aset non operasional tersebut senilai Rp39,11 miliar.

Penyebab

- 5.52 Kasus-kasus penyimpangan administrasi terjadi karena upaya pengamanan aset secara fisik maupun administratif belum optimal, pengguna barang masih lemah dalam penatausahaan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah, pengurus barang lalai melaksanakan tupoksinya, dan kepala daerah belum optimal dalam mengupayakan penyerahan dana dan aset kepada pihak ketiga menjadi penyertaan modal.

Rekomendasi

- 5.53 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa agar menyusun skala prioritas dalam pensertifikatan tanah dan berkoordinasi dengan BPN, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD, mengupayakan penyerahan dana dan aset kepada PT Dok dan Perkapalan Waiame menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku, dan menegur pejabat terkait untuk lebih memperhatikan tupoksinya.

Ketidakhematan (5 kasus senilai Rp2,88 miliar)

- 5.54 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 5.55 Pada umumnya kasus ketidakhematan pada pemeriksaan atas manajemen aset berupa pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 5 kasus senilai Rp2,88 miliar yang terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakhematan											
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
Jumlah		-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56

5.56 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.

5.57 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pemberian tunjangan perumahan dalam Tahun 2009-2012 senilai Rp266,00 juta kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah disediakan rumah jabatan memboroskan keuangan daerah.
- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pembangunan Kantor Dinas Pasar oleh pihak ketiga sejak Tahun 2004-2012 belum terealisasi dan pihak ketiga tidak melaksanakan kewajiban menyewa bangunan untuk Kantor Dinas sehingga Dinas Pasar mengeluarkan biaya sewa kantor senilai Rp130,75 juta yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat kelebihan perhitungan honorarium dalam APBD-P Tahun 2011 senilai Rp18,50 juta mengakibatkan potensi pemborosan keuangan daerah.
- Di PT Antam (Persero) Tbk, terdapat kemahalan harga atas pengadaan jasa sewa kendaraan Tahun 2009 s.d. 2012 di unit bisnis pertambangan emas Pongkor yang menimbulkan ketidakhematan senilai Rp2,47 miliar.

Penyebab

5.58 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena pengguna barang kurang cermat dan optimal dalam penerimaan, penggunaan dan penyaluran aset, pejabat pelaksana kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian, dan dalam menyusun Keputusan Bupati belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 5.59 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mengoptimalkan pemanfaatan rumah jabatan, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana sesuai ketentuan, dan entitas mengajukan usulan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikuasainya.

Ketidakefektifan (28 kasus senilai Rp134,37 miliar)

- 5.60 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 5.61 Kasus-kasus ketidakefektifan pada pemeriksaan atas manajemen aset meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 5.62 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset menunjukkan 28 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp134,37 miliar terdiri dari jenis-jenis temuan yang tersaji pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Manajemen Aset Berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakefektifan											
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.383,33	2	3.952,97	15	129.042,77	-	-	19	134.379,07
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah		2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07

- 5.63 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 21.
- 5.64 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Mahkamah Agung, pengadaan 2 buah *dental unit* oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun 2011 untuk ditempatkan di gedung Sekretariat MA senilai Rp1,38 miliar tidak digunakan dan tidak ada penugasan dokter gigi dan penunjang peralatan gigi.
 - Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, hasil pengadaan tanah, gedung, dan peralatan senilai Rp64,45 miliar dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 belum dimanfaatkan.
 - Di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, aset hasil pengadaan Tahun 2002 pada RSUD dan Tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp42,18 miliar belum dimanfaatkan.
 - Di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, gedung DPRD yang dibangun TA 2008 s.d. 2009 dan alat hemodialisa yang diadakan TA 2010 dengan total nilai Rp9,97 miliar belum digunakan karena sejak diserahkan telah rusak dan ruangan untuk operasi peralatan belum tersedia.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, bangunan Rumah Sakit Umum Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir yang dibangun TA 2009 seluas 1.320,48 m² atau senilai Rp3,46 miliar belum dimanfaatkan dan dalam kondisi rusak berat.

Penyebab

- 5.65 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena PPK kurang memperhatikan ketentuan perencanaan pengadaan BMN dan penganggarannya, penetapan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya, dan pengguna/kuasa pengguna barang lemah dalam pengawasan dan pengendalian atas pengamanan.

Rekomendasi

- 5.66 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat entitas yang diperiksa antara lain agar menyusun SOP pengadaan barang, mengambil langkah strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengamanan aset negara/daerah.
- 5.67 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 6

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

- 6.1 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 6.2 Program Jamkesmas dimulai Tahun 2008 merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah dijalankan sebelumnya, terakhir melalui program asuransi sosial yang dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJK MM) (2004-2005) dan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) (2006-2007).
- 6.3 Perubahan kebijakan dari Program Askeskin menjadi Program Jamkesmas dilakukan karena belum ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu penyelenggaraan Askeskin kurang terkendali, hal ini terbukti dalam Tahun 2007 terjadi defisit anggaran (hutang klaim) kepada PT Askes (Persero) senilai Rp1,13 triliun. Perubahan kebijakan dari Program Askeskin menjadi Program Jamkesmas menempatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator sekaligus sebagai pengelola, sementara PT Askes (Persero) hanya dilibatkan dalam manajemen kepesertaan.
- 6.4 Pada semester II Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda pada 33 provinsi. Pemeriksaan dilakukan terhadap entitas-entitas berikut:
 - Kemenkes meliputi Sekretariat Jenderal (d.h.i Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan) dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) dan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - PT Askes (Persero) meliputi kantor pusat, regional dan cabang;
 - Badan Pusat Statistik (BPS) di provinsi/kabupaten/kota;
 - RSUP, RSUD yang berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD), RSUD yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan rumah sakit (RS) swasta;

- puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, bidan praktek swasta (yang disampling); dan
- pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota (dinas kesehatan dan dinas sosial).

6.5 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran Program Jamkesmas Tahun 2010, 2011 dan Semester I Tahun 2012. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Anggaran dan Realisasi Program Jamkesmas TA 2010, 2011 dan Semester I TA 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2010		TA 2011		Semester 1 TA 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kementerian Kesehatan	25.274.803,99	22.428.341,51	30.919.269,94	26.871.294,93	30.636.024,33	14.920.350,66
Anggaran Jamkesmas	4.270.690,50	4.099.486,73	6.348.595,94	6.278.967,95	7.494.900,00	6.686.340,00
% terhadap Anggaran Kementerian Kesehatan	16,90%	18,28%	20,53%	23,37%	24,46%	44,81%
Cakupan Pemeriksaan		1.293.725,19		1.744.473,34		1.584.985,08
% terhadap Anggaran Jamkesmas		31,56%		27,78%		23,70%

Tujuan Pemeriksaan

6.6 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah

- seluruh peserta Jamkesmas telah terlayani program Jamkesmas;
- SPI atas kepesertaan, pelayanan, penyaluran dan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- dana Jamkesmas dan Jamkesda telah diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat; dan
- dana Jamkesmas telah dipergunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 6.8 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	-
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	6	-
	Sub Total I	15	-
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kekurangan Penerimaan	2	151.832,07
2	Administrasi	4	-
3	Ketidakefektifan	12	352.419,49
	Sub Total II	18	504.251,56
	Total	33	504.251,56

- 6.9 Pemeriksaan pengelolaan Program Jamkesmas dan Jamkesda meliputi pemeriksaan atas kepesertaan, pelayanan, pendanaan, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Jamkesmas

Kepesertaan

- 6.10 Peserta Program Jamkesmas Tahun 2010 s.d. Semester 1 Tahun 2012 adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya ditanggung oleh pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan *database* kepesertaan Jamkesmas dari Tahun 2008 s.d 2012 dan data tersebut masih menggunakan data BPS pada Tahun 2005. Jumlah masyarakat miskin tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan secara *by name* dan *by address* oleh kepala daerah sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, sebesar 72.049.380 jiwa untuk kabupaten/kota yang berisi nama dan alamat, serta 4.350.620 jiwa bagi gelandangan, pengemis, anak terlantar dan masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas.
- 6.11 Data ini tidak berubah (statis) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, sementara jumlah masyarakat miskin setiap tahun berubah, untuk mengatasi itu, maka Pemerintah Pusat (Kemenkes) menghimbau daerah untuk membiayai masyarakat dengan mendorong dikembangkannya Jamkesda di daerah.
- 6.12 Hasil pemeriksaan atas kepesertaan Program Jamkesmas menunjukkan adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati serta 3 kasus ketidakefektifan yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukkan senilai Rp44,68 juta. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- *Database* kepesertaan Jamkesmas belum mutakhir dan akurat dimana terdapat *database* kepesertaan Jamkesmas ganda, alamat peserta jamkesmas tidak lengkap, peserta Jamkesmas tidak dikenal oleh pihak kelurahan, peserta Jamkesmas yang terdaftar telah meninggal dunia, peserta Jamkesmas yang terdaftar berstatus PNS, TNI, dan pensiunan, serta data jumlah orang miskin pada 2 provinsi dan 13 kabupaten/kota berbeda antar instansi. Hal tersebut mengakibatkan Program Jamkesmas berpotensi tidak tepat sasaran, penganggaran dana Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya, dan tidak terjaminnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak terdaftar.

- Terdapat pelayanan Jamkesmas kepada orang yang tidak berhak karena adanya peminjaman kartu Jamkesmas pada RSUD Kabupaten Mamuju senilai Rp4,75 juta dan pada RSUD Ulin Banjarmasin senilai Rp39,92 juta mengakibatkan proses klaim dana Jamkesmas dengan menggunakan dokumen palsu yang tidak sesuai peruntukkan.
- Terdapat penerbitan surat keabsahan peserta (SKP) tidak sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.903 Tahun 2011 yaitu terdapat penerbitan 3.247 SKP tanpa dilengkapi kartu Jamkesmas, dokumen identitas diri atau rujukan, dokumen pendukung yang diserahkan tidak sesuai, dan dokumen pendukung palsu; SKP diterbitkan di luar jam operasional PT Askes (Persero) dan bukan oleh petugas PT Askes (Persero); SKP diterbitkan melebihi batas waktu 2x24 jam sejak pasien masuk RS; SKP tetap diterbitkan meskipun nama pasien yang tertera dalam kartu peserta Jamkesmas berbeda dengan nama yang tertera dalam KK/KTP.
- Terdapat dinas/instansi sosial setempat menerbitkan surat rekomendasi tidak sesuai dengan Peraturan Menkes No.903 Tahun 2011 yaitu untuk masyarakat dengan kategori mampu dan bukan termasuk kategori gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dan penghuni panti sosial. Selain itu juga terdapat pemalsuan surat rekomendasi yang diperoleh melalui perantara (calo). Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian pelayanan Jamkesmas kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran.

Pelayanan

- 6.13 Pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. Pelayanan rawat jalan tingkat primer diberikan di puskesmas dan jaringannya. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat (IGD).
- 6.14 RS berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) dan gawat darurat kepada pasien peserta Jamkesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jamkesmas. Salah satu bentuk dukungan atas pelaksanaan Program Jamkesmas adalah kebijakan pimpinan RS untuk memberikan kemudahan pelayanan dan dukungan pendanaan bagi pasien Jamkesmas.
- 6.15 Hasil pemeriksaan atas pelayanan Program Jamkesmas menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 3 kasus ketidakefektifan yaitu 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/

terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Delapan RS mewajibkan pasien Jamkesmas memberikan jaminan uang muka (deposit) dengan kisaran antara Rp50,00 ribu hingga Rp1,00 juta.
- Lima belas RS belum mempunyai prosedur/alur pelayanan yang mengakibatkan pasien mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
- Dua RS membatasi jumlah pasien Jamkesmas (memberikan kuota) per hari, sehingga pasien yang sudah memperoleh SKP namun telah melebihi kuota hari tersebut baru bisa mendapatkan pelayanan pada keesokan harinya.
- Sebanyak 2 RSUP, 6 RSUD Provinsi, 7 RSUD Kabupaten dan 5 RSUD Kota yang belum sepenuhnya memberikan pelayanan kesehatan karena keterbatasan ketersediaan obat sesuai *formularium* dan sarana prasarana antara lain alat medis, bahan habis pakai (BHP), laboratorium, alat cuci darah, alat orthopedi, *CT Scan*, MRI. Selain itu pasien Jamkesmas pada 1 RSUP, 3 RSUD provinsi, 4 RSUD kabupaten dan 5 RSUD kota masih diharuskan membeli obat/alat kesehatan di luar RS. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis pada pasien Jamkesmas belum tercapai.
- Sebanyak minimal 1.900 pasien Jamkesmas pada 4 RSUP, 9 RSUD provinsi, 11 RSUD kabupaten, 7 RSUD kota, 5 puskesmas, 2 klinik bersalin, dan 10 bidan praktek swasta masih dikenakan biaya tambahan (iur biaya) minimal senilai Rp374,54 juta antara lain untuk biaya administrasi, honor, pembelian obat, biaya laboratorium, biaya pengurusan jenazah dan biaya transportasi. Seharusnya pemda bisa berkontribusi dalam menanggung biaya-biaya tersebut antara lain untuk biaya transportasi pasien rujukan dan biaya pemulangan pasien.
- Pemrosesan berkas klaim pasien Jamkesmas pada 78 RS di 33 provinsi lambat mengakibatkan RS terlambat mengajukan berkas klaim ke verifikator independen sehingga RS terlambat memperoleh pencairan dana klaim Jamkesmas.

Pendanaan

- 6.16 Sumber dana Program Jamkesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkes. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah masing-masing meliputi antara lain.

- Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jamkesmas.
 - Biaya transportasi rujukan dari RS yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien menjadi tanggung jawab Pemda asal pasien.
 - Biaya transportasi petugas pendamping pasien yang dirujuk.
 - Dukungan biaya operasional manajemen tim koordinasi dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota.
 - Biaya lain-lain diluar pelayanan kesehatan, sesuai dengan spesifik daerah dapat dilakukan oleh daerahnya.
- 6.17 Adapun dana operasional manajemen tim pengelola di provinsi bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi, sedangkan untuk tim pengelola kabupaten/kota bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 6.18 Pembiayaan program Jamkesmas mengacu kepada tarif Indonesia *Case Base Groups* (INA CBG's) seperti yang disyaratkan dalam pedoman pelaksanaan (Manlak) Program Jamkesmas. INA CBG's merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh PPK berupa RS, puskesmas ataupun balai pengobatan kepada masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas. Tarif INA CBG's merupakan pembiayaan berdasarkan diagnosa penyakit dengan sistem paket. Dalam software INA CBG's sudah ditentukan tarif dan standar lama hari perawatan rata-rata (*Average Length of Stay/ALOS*) untuk setiap diagnosa penyakit.
- 6.19 Metode penetapan tarif RS untuk RSUP ditetapkan dalam SK Direktur RS dengan mengacu pada Keputusan Menkes berdasar pada pelayanan yang diberikan kepada pasien (*fee for service*) dan selalu diperbaharui setiap tahun mengikuti keputusan Menkes, sedangkan tarif RSUD ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 6.20 Hasil pemeriksaan atas pendanaan Program Jamkesmas menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 3 kasus yang terdiri atas 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, serta 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

- kasus kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp151,83 miliar yang terdiri atas 1 kasus penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp1,356 miliar dan 1 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp150,476 miliar.
- kasus administrasi sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.
- kasus ketidakefektifan sebanyak 3 kasus senilai Rp3,89 miliar yang terdiri atas 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3,26 miliar dan 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp634,02 juta.

6.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Rekening penampungan dana Jamkesmas di Bank BRI belum memperoleh jasa giro serta jasa giro atas dana Jamkesmas di 20 RS untuk Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 senilai Rp931,66 juta dan di 15 dinas kesehatan untuk Semester I Tahun 2012 senilai Rp424,40 juta belum disetor ke kas negara sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan negara atas jasa giro senilai Rp1,35 miliar.
- Terdapat penggunaan dana Jamkesmas pada 49 puskesmas di 12 kabupaten/kota senilai Rp862,09 juta tidak sesuai pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas antara lain digunakan untuk rehabilitasi bangunan, pengadaan inventaris komputer dan printer, biaya konsumsi petugas jaga rawat inap, dan biaya konsumsi rapat sehingga pemanfaatan anggaran Jamkesmas untuk puskesmas dan jaringannya tidak tepat sasaran.
- Dana Jamkesmas yang dicairkan dari rekening Jamkesmas RS tidak berdasarkan pertanggungjawaban/klaim yang telah disahkan. Hal tersebut terjadi antara lain pada 23 RS di 19 provinsi TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 terdapat selisih pencairan dana kesehatan Jamkesmas yang tidak berdasarkan pertanggungjawaban yang telah disahkan atau ditandatangani oleh verifikator independen dan direktur RS senilai Rp154,46 miliar dan terdapat pencairan dana luncahan Tahun 2011 senilai Rp5,00 miliar yang diinvestasikan dalam bentuk deposito yang terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan dana *idle*, namun atas dana deposito tersebut telah dikembalikan ke rekening dana luncahan dan bunganya telah disetor ke kas negara. Pencairan dana tersebut tidak

berdasarkan pertanggungjawaban karena lambatnya proses verifikasi pertanggungjawaban, baik itu verifikasi pada RS maupun oleh verifikator independen, sehingga pihak RS menarik dana terlebih dahulu untuk membiayai operasional Program Jamkesmas.

- Terdapat penggunaan langsung hasil klaim dana Jamkesmas Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 pada 200 puskesmas dan 9 RS yang belum berstatus BLUD senilai Rp150,47 miliar. Penggunaan langsung tersebut digunakan untuk pembayaran jasa medis, obat-obatan, bahan habis pakai, pelayanan darah, dan administrasi pendukung lainnya.
- Pada 8 RSUD di 8 kabupaten/kota terdapat pemanfaatan dana dan porsi pembagian jasa layanan senilai Rp2,40 miliar yang tidak sesuai ketentuan penggunaan dana Jamkesmas. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pemberian bantuan kepada direktur dan staf RSUD, masyarakat, dan pihak lain, pembelian laptop dan AC, pembayaran kepada verifikator independen, dan pengadaan obat di luar *formularium*. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan dana Jamkesmas untuk RSUD senilai Rp2,40 miliar tidak tepat sasaran.
- Penyelesaian penyetoran sisa dana Jamkesmas TA 2010 dan 2011 ke kas negara senilai Rp7,97 miliar belum seluruhnya dilaksanakan oleh tim pengelola pusat dan terdapat dana Jamkesmas Yandas dan Jampersal TA 2011 yang belum dipertanggungjawabkan di rekening dinas kesehatan kabupaten/kota senilai Rp263,57 miliar.
- Terdapat 11 RS menanggung beban selisih tarif pelayanan kesehatan antara tarif RS dengan tarif INA CBG's dengan nilai keseluruhan senilai Rp167,46 miliar yang disebabkan antara lain karena lama hari perawatan lebih tinggi dibandingkan lama hari perawatan yang telah ditetapkan dalam INA CBG's. Selain itu juga terdapat pelayanan kesehatan Jamkesmas yang tidak dan/atau belum dapat diklaim dengan nilai keseluruhan senilai Rp71,58 miliar antara lain karena dinas sosial (Dinsos) terlambat mengeluarkan surat rekomendasi yang disyaratkan untuk pasien Jamkesmas non peserta, sehingga petugas Askes tidak dapat menerbitkan SKP, adanya perbedaan antara obat yang tercantum dalam resep dengan yang tercantum dalam *formularium* Jamkesmas yang ditetapkan oleh Kemenkes, dan prosedur langkah-langkah verifikasi yang ada pada mekanisme INA DRG/INA CBGs tidak terpenuhi. Hal tersebut mengakibatkan RS menanggung beban atas perbedaan tarif yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
- Pencairan klaim Jamkesmas RSAB Harapan Kita senilai Rp634,02 juta pada Tahun 2012 terlambat karena dokumen yang diajukan ke verifikator independen belum lengkap dan terdapat perbedaan penanganan pasien thalassaemia antara RSAB Harapan Kita dengan Kemenkes.

Verifikasi

- 6.22 Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK. Verifikasi di puskesmas dilaksanakan oleh tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota sedangkan verifikasi di PPK lanjutan dilakukan oleh verifikator independen.
- 6.23 Hasil pemeriksaan atas kegiatan verifikasi pada Program Jamkesmas menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan SPI berupa 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja dan 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati serta 1 kasus administrasi berupa pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).
- 6.24 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Persetujuan klaim Jamkesmas pada 21 RS senilai Rp10,02 miliar dan verifikasi pembayaran Jamkesmas pada 29 puskesmas di enam kabupaten minimal senilai Rp228,87 juta tidak didukung dengan dokumen yang memadai serta terdapat persetujuan klaim ganda pada 3 RS senilai Rp109,73 juta. Hal tersebut mengakibatkan administrasi pertanggungjawaban pelayanan sebagai dasar realisasi pembayaran klaim jamkesmas tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - Verifikator independen di RS Umum Pemerintah Nasional (RSUPN) sejak tahun 2008 tidak mendokumentasikan hasil verifikasi ke dalam suatu berita acara hasil verifikasi sampai dengan pemeriksaan berakhir. Verifikator independen hanya menerbitkan laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang ditandatangani oleh verifikator independen dan disetujui oleh Direktur RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Monitoring dan Evaluasi

- 6.25 Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Jamkesmas diperlukan kegiatan monitoring (pemantauan) dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jamkesmas, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- 6.26 Hasil pemeriksaan atas kegiatan monitoring dan evaluasi pada Program Jamkesmas menunjukkan adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, 1 kasus administrasi berupa proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), dan 1 kasus ketidakefektifan berupa fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 6.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Laporan pertanggungjawaban atas pelayanan dan pembiayaan belum disampaikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada tim pengelola pusat serta tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - Kemenkes dalam menunjuk pelaksana manajemen kepesertaan dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT Askes (Persero) berdasarkan UU BUMN No 19/2003 pasal 66. Seharusnya menggunakan PP No 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dana yang akan digunakan oleh Kemenkes dalam membayar jasa yang diberikan oleh PT Askes (Persero) menggunakan dana APBN. Sehingga perjanjian kerja sama yang telah dipergunakan oleh Kemenkes dengan PT Askes (Persero) sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 menjadi cacat hukum dan berpotensi mendapat gugatan hukum.

Jamkesda

- 6.28 Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan di luar kuota program Jamkesmas, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan sumber daya memadai dapat mengelola dan mengembangkan program jaminan kesehatan daerah di daerahnya masing-masing. Program Jamkesda dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/ kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di luar kuota Jamkesmas agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- 6.29 Hasil pemeriksaan atas Program Jamkesda menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern berupa 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja serta 2 kasus ketidakefektifan yaitu pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp348,47 miliar. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Hasil pemeriksaan *database* menunjukkan bahwa *database* kepesertaan Jamkesda pada 18 pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak akurat antara lain *database* kepesertaan Jamkesda pada satu provinsi dan dua kabupaten belum mengakomodir 78.845 jiwa masyarakat miskin. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terlayani Jamkesmas berpotensi tidak mendapatkan program pelayanan kesehatan Jamkesda.
 - *Database* kepesertaan Jamkesda pada 17 pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota mencantumkan 41.811 data ganda antara lain data peserta Jamkesda tercatat dalam *database* kepesertaan Jamkesmas dan/atau Askes, data dalam *database* peserta Jamkesmasda memiliki nama, alamat, tanggal lahir, dan status dalam keluarga yang sama namun memiliki nomor peserta lebih dari satu, dan data peserta jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) tercatat dalam *database* kepesertaan Jamkesmas.

- *Database* kepesertaan Jamkesda pada dua pemerintah kota mencantumkan 479 data yang tidak mutakhir yaitu data peserta Jamkesda yang meninggal, pindah alamat, dan/atau alamat tidak jelas serta tanpa identitas keluarga (nomor kartu keluarga), tanggal lahir, dan hubungan keluarga.
- Terdapat tagihan klaim program Jamkesda yang belum dibayar oleh 120 pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada PPK yaitu RSU, RSUP, RSUD, balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan paru masyarakat (BKPM), dan puskesmas senilai Rp348,47 miliar. Hal itu mengakibatkan kelancaran arus kas PPK terganggu dan dapat mempengaruhi kinerja PPK yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selanjutnya.
- Mekanisme penerbitan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai salah satu persyaratan pelayanan Jamkesda pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak sesuai Keputusan Direktur Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Timur No.003 Tahun 2012, antara lain terdapat beberapa pasien yang tidak memenuhi 14 kriteria keluarga miskin antara lain menempati rumah permanen, penghasilan dari pensiun maupun penghasilan sebagai karyawan swasta, memiliki usaha, memiliki kendaraan bermotor yang merupakan harta benda yang bernilai diatas Rp500,00 ribu. Selain itu juga terdapat tiga orang pengguna SPM di Kabupaten Pasuruan memiliki jaminan/asuransi kesehatan dari instansi/ perusahaan antara lain dari BRINGIN Life, Jamsostek maupun Inhealth.

Penyebab

6.30 Kasus-kasus pada Program Jamkesmas dan Jamkesda pada umumnya terjadi karena:

- Kemenkes belum membuat perangkat peraturan dan perangkat panduan yang mengatur pemutakhiran data pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
- Kepesertaan Jamkesda tidak memperhatikan kepesertaan Jamkesmas, dan peraturan yang disusun mengenai Jamkesda tidak mempertimbangkan dinamika di tataran pelaksanaan;
- pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan penyusunan APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani program Jamkesmas di wilayahnya dan pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan pendataan orang miskin;
- kepala puskesmas, direktur RS dan tim pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya mematuhi Manlak Program Jamkesmas tentang kewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan program jamkesmas di wilayahnya;

- kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS tidak mematuhi ketentuan terkait sisa dana dan jasa giro Jamkesmas yang harus dikembalikan ke kas negara pada setiap akhir tahun dan kemenkes belum melakukan evaluasi atas tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas; dan
- verifikator independen dan tim pengelola lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Simpulan

6.31 Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan sebagai berikut

- belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik, dan adanya perbedaan dalam data masyarakat miskin antar instansi;
- masih terdapat risiko masyarakat miskin belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda;
- penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2010 dan 2011;
- rewiu kinerja pengelola program tidak dilakukan dan umpan balik atas pelaporan yang telah dilakukan pengelola Jamkesmas di tingkat daerah tidak diberikan secara berkala oleh pengelola tingkat pusat; dan
- tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyetoran sisa Jamkesmas tahun 2010 dan 2011 belum selesai dilaksanakan.

Rekomendasi

6.32 Terhadap kasus-kasus pada Program Jamkesmas dan Jamkesda tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar

- menyusun perangkat peraturan dan perangkat panduan dalam hal pemutakhiran data dari tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke Kemenkes serta melakukan *updating* data peserta Jamkesmas;
- membuat surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur RS agar tertib dalam menyetorkan sisa dana Jamkesmas dan melakukan evaluasi terhadap penerapan INA CBG's terkait dengan ketidakseimbangan/ketimpangan/kesenjangan antara tarif INA CBG's dan biaya riil RS;

- menginstruksikan direktur RS vertikal dan berkoordinasi dengan Mendagri agar menginstruksikan direktur RSUD untuk membuat kebijakan dan prosedur/alur pelayanan yang mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
 - menetapkan mekanisme sanksi kepada verifikator independen RS dan tim pengelola Jamkesmas kabupaten/kota apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan;
 - membuat surat edaran kepada tim pengelola, tim koordinasi, kepala dinas kesehatan, direktur RS dan kepala puskesmas untuk mematuhi Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu; dan
 - berkoordinasi dengan Mendagri untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Jamkesda.
- 6.33 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 7

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 7.1 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak kerja sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi (*cost recovery*) pada tujuh entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tujuh wilayah kerja (WK).
- 7.3 Entitas KKKS pada tiap-tiap WK tersebut meliputi KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati WK Salawati, KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ WK *OffShore North West Java* (ONWJ), KKKS PT Pertamina EP WK Eks Pertamina, KKKS Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu WK *Coastal Plain* Pekanbaru, KKKS Medco E&P Indonesia WK Rimau, KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu, dan KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering WK Ogan Komering.
- 7.4 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* tujuh KKKS yang diperiksa masing-masing senilai USD9.19 miliar dan USD10.30 miliar. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah 100% dari realisasi *cost recoverable* atau senilai USD10.30 miliar. Nilai temuan pemeriksaan atas tujuh KKKS tersebut senilai USD37.86 juta dan Rp6,33 miliar.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.5 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, *cost recovery* (biaya yang dimintakan penggantian), termasuk pembebanan biaya dari *home office* yang dilakukan oleh KKKS, serta perhitungan *equity to be split* (bagi hasil) bagian pemerintah dan bagian kontraktor.

Hasil Pemeriksaan

- 7.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 7.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 7.8 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 11 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tujuh KKKS, sebagai berikut
- sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
 - sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 2 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 7.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 24.
- 7.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi pada KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati WK Salawati, terdapat pengadaan sirtu, batu kapur, dan batu pecah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan material yang diterima berpotensi tidak sesuai dengan *purchase order* dan spesifikasi teknis yang dibayarkan.

Penyebab

- 7.11 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan KKKS minyak dan gas belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) pengadaan barang dan jasa serta pelabelan aset, belum menyusun perencanaan dan dokumen pertanggungjawaban yang memadai, tidak melakukan pemantauan kinerja penyedia barang dan jasa, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari SKMIGAS.

Rekomendasi

- 7.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan KKS minyak dan gas, BPK telah merekomendasikan agar KKKS menyusun SOP pengadaan barang/jasa dan pelabelan aset serta mengenakan sanksi kepada rekanan/vendor sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar SKMIGAS meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa di KKKS.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.13 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi.
- 7.14 Hasil pemeriksaan berdasarkan kelompok temuan ketidakpatuhan atas pelaksanaan KKS pada tujuh KKKS mengungkapkan adanya 53 kasus, terdiri dari kekurangan penerimaan sebanyak 50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar, dan 3 kasus administrasi. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok disajikan dalam Lampiran 23 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 24.

Kekurangan Penerimaan (50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar atau total seluruhnya ekuivalen Rp372,48 miliar)

- 7.15 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 7.16 Pada umumnya temuan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan KKS tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil migas (*koreksi cost recovery* yang tidak dapat diperhitungkan/*non cost recovery*).
- 7.17 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 50 kasus senilai USD37,864.67 ribu dan Rp6,33 miliar atau total seluruhnya ekuivalen Rp372,48 miliar.
- 7.18 Kasus-kasus tersebut terjadi pada tujuh entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Koreksi Cost Recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

(dalam ribu USD dan juta rupiah)

No	Entitas	Koreksi Cost Recovery
1	KKKS Job Pertamina Petrochina Salawati	USD1,826.64
2	KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ	USD1,439.60
		Rp6.325,77
3	KKKS PT Pertamina EP	USD2,992.03
4	KKKS Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	USD1,304.99
		Rp12,76
5	KKKS Medco E&P Indonesia	USD518.20
6	KKKS Mobil Cepu Ltd.	USD29,747.10
7	KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	USD36.11
JUMLAH		USD37,864.67
		Rp6.338,53
Jumlah dalam Rupiah *		372.489,89

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012

7.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu, terdapat peningkatan nilai kontrak No. C-3207122 *lease of early production facility* senilai USD28.02 juta yang terdiri dari perubahan lingkup kerja (PLK) yang tidak mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS senilai USD25.109 juta dan *importation taxes* senilai USD2.91 juta yang tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery*. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan *cost recovery* Tahun 2011 senilai USD28.02 juta.
- KKKS Pertamina EP WK Eks Pertamina, terdapat pembebanan biaya *home office overhead* (HOO) dalam *cost recovery* Tahun 2011 senilai USD1.68 juta tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pembebanan *cost recovery* lebih besar dan perhitungan bagi hasil negara kurang dari yang seharusnya.

Penyebab

- 7.20 Kasus-kasus tersebut disebabkan KKKS tidak mengakomodir PLK dalam suatu amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BPMIGAS terlebih dulu, dan KKKS kurang cermat dalam melakukan perhitungan HOO.

Rekomendasi

- 7.21 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi dan mengeluarkan PLK yang tidak didukung *change order* dari *cost recovery*, dan mengeluarkan biaya HOO dari perhitungan *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Administrasi (tiga kasus)

- 7.22 Penyimpangan administratif adalah suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian/potensi kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan.
- 7.23 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 7.24 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus administrasi pada dua entitas, yaitu satu kasus pada KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu dan sebanyak dua kasus pada KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering WK Ogan Komering. Ketiga kasus tersebut mengenai Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.
- 7.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi pada KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering (PTOK) yaitu, pemungutan denda/bunga pajak senilai USD14.25 ribu tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang mengakibatkan potensi klaim dari rekanan di masa mendatang.

Penyebab

- 7.26 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan KKKS tidak mematuhi *production sharing contract* (PSC) dan lalai dalam mempedomani ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku.

Rekomendasi

- 7.27 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar SKMIGAS menegur KKKS untuk mematuhi PSC dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 7.28 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 8

Operasional Badan Usaha Milik Negara

- 8.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 15 entitas yaitu PT Tugu Pratama Indonesia/Tugu *Insurance Company Ltd* (PT TPI), PT Hutama Karya (Persero) (PT HK), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali *Tourism Development Corporation* (Persero) (PT BTDC), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (PT DKB), PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), PT Inhutani III (Persero), Perum Perhutani, PT Mega Eltra (PT ME), PT ASABRI (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PT BRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (PT BTN), PT Askes (PT Persero), dan PT Sucofindo (Persero).
- 8.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas 15 BUMN adalah senilai Rp129,19 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp144,08 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional BUMN senilai Rp1,09 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.
- 8.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada 15 BUMN adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, kredit, pengendalian biaya dan kegiatan investasi serta kegiatan pengadaan maupun pembentukan holding dan program santunan/dana pensiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 8.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.6 Hasil pemeriksaan SPI pada 15 entitas pemeriksaan mengungkapkan adanya 275 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 174 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 25
- 8.7 Terdapat 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebagai berikut
- sebanyak 26 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 4 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- 8.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27
- 8.9 Terdapat 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, sebagai berikut
- sebanyak 8 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 22 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
 - sebanyak 34 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan.
- 8.10 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.11 Terdapat 174 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagai berikut
- sebanyak 30 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 136 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern ;
 - sebanyak 6 kasus Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 8.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 14 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.
- 8.13 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT DPS (Persero), direksi perusahaan tidak cermat dalam pelaksanaan pembangunan Depot BBM Muara Sabak Jambi, mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan membayar material/jasa yang belum diterima senilai USD3.963,72 dan melaporkan pendapatan dan biaya proyek melebihi capaian sesungguhnya.
 - Di PT Askes (Persero), terdapat kelemahan desain pengendalian intern biaya operasional perjalanan dinas, yaitu tidak terdapat koordinasi antara bagian tertentu dan pihak bagian rumah tangga tidak proaktif menagih uang tiket *refund* yang harus dikembalikan selama Tahun 2011 dan 2012 sehingga PT Askes berpotensi menanggung kerugian atas tiket kategori *refund* serta uang harian yang terlanjur dibayar.
 - Di PT KPNB (Persero), PT KPNB dan PTPN tidak memiliki kebijakan penyesuaian harga komoditas pada saat amandemen kontrak, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari tambahan selisih harga selama periode 2009 s.d. 2010.

Penyebab

- 8.14 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan/direksi/dewan komisaris BUMN tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, entitas belum memiliki kebijakan intern yang mengatur perubahan harga jual komoditas dan belum memiliki mekanisme monitoring yang efektif atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Selain itu disebabkan ketidakcermatan pimpinan BUMN dalam penetapan kebijakan serta pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 8.15 Terhadap kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN agar memperhatikan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun atau memperbaiki standar atau pedoman serta meninjau kembali peraturan yang ditetapkan. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar direksi BUMN membuat kebijakan intern yang mengatur perubahan harga jual komoditas untuk amandemen kontrak serta memberikan sanksi untuk pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 26 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 27.

Tabel 8.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	10	8.062,06
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	22	734.930,68
3	Kekurangan Penerimaan	17	218.792,60
4	Administrasi	121	-
5	Ketidakhematan	9	7.339,46
6	Ketidakefektifan	34	130.843,37
Jumlah		213	1.099.968,17

- 8.17 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 213 kasus senilai Rp1,09 triliun, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 14 BUMN.

Kerugian Negara/Perusahaan (10 kasus senilai Rp8,06 miliar)

- 8.18 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 8.19 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 8.20 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya meliputi pekerjaan adanya kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara/perusahaan.
- 8.21 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya kerugian negara/perusahaan sebanyak 10 kasus senilai Rp8,06 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Perusahaan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Perusahaan			
1	Kekurangan volume pekerjaan	5	301,77
2	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	560,86
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	6.274,41
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	304,52
5	Lain-lain	1	620,50
Jumlah		10	8.062,06

- 8.22 Kasus-kasus tersebut terjadi di 6 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.
- 8.23 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT BTDC (Persero), pencairan deposito perusahaan beserta bunganya pada Tanggal 6 Juni 2011 senilai Rp6,11 miliar di transfer ke rekening PT Incor Energy dan dimanfaatkan PT Incor Energy sehingga menimbulkan kerugian negara/perusahaan senilai Rp6,11 miliar.
 - Di PT ASABRI (Persero), terdapat kelebihan pembayaran tunjangan untuk yatim/piatu dari anggota TNI, POLRI dan PNS Kemenhan/POLRI dari Tahun 2011 s.d. 2012 (Semester I) yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp304,52 juta.
 - Di PT Askes (Persero), kekurangan volume atas pekerjaan renovasi gedung PT Askes (Persero) kantor Cabang Boyolali pada kantor Divisi Regional VI Semarang pada Tahun 2010 mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan minimal senilai Rp66,26 juta.

- 8.24 Dari kasus-kasus kerugian negara/perusahaan atas operasional BUMN senilai Rp8,06 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/perusahaan senilai Rp66,27 juta oleh PT Askes (Persero).

Penyebab

- 8.25 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena pejabat pelaksana kurang maksimal dalam melakukan proses verifikasi dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan pimpinan BUMN tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 8.26 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi BUMN untuk memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan meminta pejabat terkait untuk menarik kelebihan pembayaran atas kerugian perusahaan yang terjadi, serta berusaha memperoleh pengembalian deposito dan segera mengambil langkah/tindakan hukum.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan (22 kasus senilai Rp734,93 miliar)

- 8.27 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 8.28 Kasus-kasus potensi kerugian negara atau perusahaan pada umumnya meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian/seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.
- 8.29 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 22 kasus senilai Rp734,93 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Perusahaan			
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian/seluruhnya	2	38.439,57
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	17	329.240,22
3	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	281,49
4	Lain-lain	2	366.969,40
Jumlah		22	734.930,68

8.30 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT ASABRI (Persero), pembayaran klaim dalam Tahun 2011 dan 2012 (Semester I) senilai Rp179,66 miliar tanpa dasar penetapan klaim dan Surat Panggilan (SP). Selain itu terdapat kurang catat saldo kas di bank senilai Rp144,89 miliar, sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian minimal senilai Rp324,55 miliar.
- Di PT TPI, upaya penagihan piutang dengan umur di atas dua tahun dan proses penutupan polis PT SKJ yang belum optimal senilai Rp81,74 miliar sampai dengan pertengahan Juni 2012 sehingga perusahaan berpotensi kehilangan penggantian beban klaim yang telah dibayar, terganggu arus kasnya, dan menanggung beban klaim terlalu berat.
- Di Perum Perhutani, kegiatan penyaluran modal kerja untuk trading Usaha Hutan Rakyat (UHR) untuk Tahun 2010 dan 2011 tidak berjalan atau macet, sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian minimal senilai Rp33,88 miliar.

Penyebab

8.32 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 8.33 Terhadap kasus kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMN untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi, membuat SOP penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Kekurangan Penerimaan (17 kasus senilai 218,79 miliar)

- 8.34 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 8.35 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, dan penggunaan langsung penerimaan negara/perusahaan.
- 8.36 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 17 kasus senilai Rp218,79 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	3	1.619,67
2	Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	12	162.842,60
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/perusahaan	2	54.330,33
Jumlah		17	218.792,60

- 8.37 Kasus-kasus tersebut terdapat pada 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut
- Di PT HK (Persero), piutang yang belum terselesaikan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memanfaatkan dana yang tertanam dalam piutang senilai Rp91,37 miliar.
 - Di PT Dok dan PKB (Persero), penerimaan pembayaran atas Kerjasama Operasi dan Transfer (KSOT) *Floating Dock* 9600 TLC dari PT Tri Warako Utama terlambat. Selain itu perusahaan tidak menerbitkan faktur pajak atas transaksi sewa area galangan I mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari PPN minimal senilai Rp3,15 miliar.
 - Di PT Askes (Persero), PT Askes (Persero) belum menetapkan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kantor Cabang Utama Kediri pada TA 2012, kantor Regional IV dan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan pada TA 2012 serta belum mengenakan denda atas keterlambatan serah terima renovasi gedung kantor Cabang Utama Tangerang pada TA 2011, mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda senilai Rp394,14 juta.
- 8.39 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas operasional BUMN senilai Rp218,79 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara oleh PT Askes (Persero) senilai Rp335,15 juta.

Penyebab

- 8.40 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut pada umumnya terjadi karena SPI belum memadai, Direksi BUMN tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya serta pelaksana tidak tertib atau kurang cermat dalam mengelola dokumen dan pencatatan piutang.

Rekomendasi

- 8.41 Atas kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi terkait untuk menagih dan menyetor ke kas negara/perusahaan atas pendapatan dan denda yang terlambat diterima serta lebih cermat dalam melakukan pencatatan piutang.

Administrasi (121 kasus)

- 8.42 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 8.43 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain

perjalanan dinas, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan), dan penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain. Selain itu kasus penyimpangan yang bersifat administrasi juga meliputi pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

- 8.44 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 121 kasus penyimpangan administrasi yang disajikan dalam Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BUMN

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Penyimpangan administrasi			
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain perjalanan dinas	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	7	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	98	-
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5	-
6	Penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
10	Lain-lain	1	-
Jumlah		121	-

- 8.45 Kasus-kasus administrasi tersebut terjadi 9 entitas pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT ME, terdapat transaksi penjualan semen dan kimia agro selama Tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak didukung surat perjanjian, sehingga adanya resiko hak dan kewajiban tidak terlindungi.
 - Di PT KAI (Persero), pengadaan *balas* pada Tahun 2011 diindikasikan tidak dilaksanakan senilai Rp1,23 miliar sehingga pembayaran kepada rekanan tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya.
 - Di PT BRI (Persero) Tbk, terdapat 28 debitur belum memenuhi *affirmative covenant* dalam perjanjian kredit diantaranya debitur tidak menyampaikan laporan periodik yang diwajibkan, debitur belum mengasuransikan dan menilai ulang agunan, serta debitur belum mengikat agunan. Hal tersebut mengakibatkan strategi dan tindak lanjut yang ditempuh PT BRI (Persero) Tbk, kurang efektif serta kepentingan atas agunan kredit kurang terjamin.

Penyebab

- 8.47 Kasus-kasus administrasi tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat terkait lalai/kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Rekomendasi

- 8.48 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat terkait agar melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan (9 kasus senilai Rp7,33 miliar)

- 8.49 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 8.50 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan mengenai penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga.
- 8.51 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 9 kasus ketidakhematan senilai Rp7,33 miliar yang disajikan dalam Tabel 8.6.

Tabel 8.6. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan			
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	447,88
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	7	6.891,58
Jumlah		9	7.339,46

8.52 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

8.53 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut

- Di PT KAI (Persero), perusahaan telah membayar bea masuk atas pengadaan wesel *Corrriago* dan *Insurance Paid (CIP)* pada Tahun 2011 yang dilakukan oleh pihak ke tiga sehingga terjadi ketidakhematan senilai Rp2,96 miliar.
- Di Perum Perhutani, realisasi tanaman yang tumbuh dalam rangka rehabilitasi dan usaha pengembangan hutan rakyat Tahun 2011 tidak mencapai target sehingga pengeluaran biaya tanaman senilai Rp1,21 miliar tidak dimanfaatkan sesuai rencana.
- Di PT ME, PT Multi Mas Chemindo (PT MMC) mengajukan klaim atas keterlambatan PT ME mengirimkan pupuk urea dan adanya pupuk urea yang bercampur dengan garam pada Tahun 2012 sehingga menimbulkan pemborosan senilai Rp650,34 juta.

Penyebab

8.54 Kasus ketidakhematan tersebut antara lain terjadi karena pejabat terkait tidak cermat dalam menjalankan tugasnya serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

8.55 Atas kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pejabat terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pegawai/pejabat terkait .

Ketidakefektifan (34 kasus senilai Rp130,84 miliar)

- 8.56 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 8.57 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan mengenai penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 8.58 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 34 kasus ketidakefektifan senilai Rp130,84 miliar mengenai ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.7.

Tabel 8.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	118.845,07
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	885,20
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	11.113,10
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	21	-
Jumlah		34	130.843,37

- 8.59 Kasus kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27.

- 8.60 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT ME, terdapat material sisa proyek rekonduktoring SUTT 150 kV Babat - Tuban pada Tahun 2012 senilai Rp885,20 juta belum dimanfaatkan sehingga dana yang tertanam dalam material proyek tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.
 - Di PT BTN (Persero) Tbk, monitoring atas pengembalian pokok kredit 21 debitor yang berasal dari penjualan unit rumah masih lemah sehingga terdapat penjualan unit rumah yang tidak digunakan sebagai pengembalian pokok kredit
 - Di PT Inhutani III (Persero), pengelolaan kegiatan produksi dan penjualan kayu unit Pelaihari tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi mengganggu pengembangan hutan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan keberlangsungan usaha PT Inhutani III.

Penyebab

- 8.61 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut pada umumnya terjadi karena manajemen entitas tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi

- 8.62 Atas kasus tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada manajemen entitas agar melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku
- 8.63 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 9

Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

9.1 Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 36 objek pemeriksaan yaitu 34 objek pemeriksaan di BUMD dan 2 objek pemeriksaan RSUD provinsi dan kabupaten. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 15 bank perkreditan rakyat/bank pembangunan daerah (BPR/BPD), 6 perusahaan daerah air minum (PDAM), 13 badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya, dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD). Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya/belanja, dan kegiatan investasi. Rincian entitas disajikan dalam Lampiran 30.

Tujuan Pemeriksaan

9.2 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern (SPI) entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
- pengelolaan pendapatan, biaya/belanja, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya.

9.3 Cakupan pemeriksaan operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya adalah senilai Rp14,98 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp41,02 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,20 triliun. Rincian cakupan pemeriksaan untuk operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 9.1 berikut.

Tabel 9.1. Cakupan Pemeriksaan Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Entitas	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	
					Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	7	8
1	BPR/BPD	16.210.277,90	39.395.239,57	13.674.112,56	276	996.788,18
2	PDAM	659.719,15	605.902,08	467.969,68	127	13.353,93
3	RSUD	381.629,85	239.514,90	239.514,90	24	31.346,43
4	BUMD Lainnya	333.639,97	782.235,79	608.278,83	195	160.289,23
JUMLAH		17.585.266,87	41.022.892,34	14.989.875,97	622	1.201.777,77

Hasil Pemeriksaan

- 9.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 9.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.6 Hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD lainnya menunjukkan adanya 303 kasus kelemahan SPI yang meliputi 138 kasus pada BPR/BPD, 56 kasus pada PDAM, 10 kasus pada RSUD, dan 99 kasus pada BUMD Lainnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.2.

Tabel 9.2. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

No	Sub Kelompok	BPR/BPD	PDAM	RSUD	BUMD Lainnya	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	7	2	20	44
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	56	28	6	38	128
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	67	21	2	41	131
Jumlah		138	56	10	99	303

- 9.7 Berdasarkan Tabel 9.2, hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya mengungkapkan 303 kasus sebagai akibat adanya kelemahan SPI, dengan rincian sebanyak 44 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 128 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 131 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam lampiran 28 dan rincian per entitas disajikan dalam Lampiran 30.
- 9.8 Kasus-kasus kelemahan SPI di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Bank DKI, Provinsi DKI Jakarta, sistem teknologi informasi bank belum mendukung penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) khususnya

perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan timbulnya risiko kesalahan dalam penentuan dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun Buku (TB) 2011 individual yang berdampak pada laporan laba rugi.

- Di PDAM Tirta Kepri di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan, pencatatan, dan penatausahaan persediaan bahan kimia periode TB 2011 dan Semester I TB 2012 tidak tertib sehingga nilai persediaan dalam neraca tidak diyakini dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pembelian.
- Di RSUD DR Soedarso, Provinsi Kalimantan Barat, penatausahaan distribusi gas medis sentral periode 2011 s.d. Agustus 2012 tidak tertib yang mengakibatkan penggunaan gas medis sentral tidak dapat diketahui secara pasti dan rawan terhadap penyalahgunaan pemakaian dan pendistribusian gas medis.
- Di PD Banama Tingang Makmur (BTM) Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pengelolaan pendapatan kamar Hotel Dandang Tingang yang tersaji dalam laporan laba rugi (L/R) berbeda dengan rincian yang berasal dari *billing system* mengakibatkan nilai realisasi pendapatan kamar pada bulan Maret, Desember 2011, dan Mei 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai yang akurat dan andal dan didukung dengan bukti-bukti sumber transaksi yang lengkap, serta terdapat risiko kesalahan penyajian nilai kas, pendapatan, dan L/R pada Laporan Keuangan.
- Di BPR Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan, penetapan gaji dan honorarium serta penghasilan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris PT BPR Sumsel Tahun 2011 tidak memiliki persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sehingga penetapan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Di PDAM Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tingkat kebocoran distribusi air Tahun 2011 dan 2012 melebihi batas toleransi minimal sehingga perusahaan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal senilai Rp1,12 miliar.
- Di RSUD RA Basoeni Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, laporan penggunaan langsung hasil penjualan obat dan alat kesehatan habis pakai periode Januari s.d. September 2012 yang tidak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset senilai Rp4,95 miliar mengakibatkan pertanggungjawaban transaksi pendapatan dan belanja pada RSUD RA Basoeni belum sepenuhnya dikelola secara transparan yang berpotensi penyalahgunaan.
- Di PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, penetapan pihak ketiga sebagai *financial partner* dalam pendanaan *participating interest* (PI) Tahun 2006 belum didukung studi kelayakan mengakibatkan pengelolaan PI di blok Cepu belum memberikan hasil yang optimal.

- Di PD BPR NTB Lombok Tengah (Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum menerapkan beberapa standar operasional prosedur *know your customer* (SOP-KYC) yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 sehingga BPR NTB Loteng berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan illegal serta tidak dapat memantau dan mengevaluasi nasabah secara memadai.
- Di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sistem dan prosedur akuntansi, serta standar operasional prosedur belum disusun dan ditetapkan sehingga aktivitas operasional belum optimal, menimbulkan berbagai penafsiran baik pelaksanaan administrasi keuangan maupun dalam penyusunan laporan keuangan PDAM, pegawai tidak memiliki standar minimal yang diharapkan perusahaan, dan pihak manajemen kurang memperoleh bahan penilaian kinerja pegawai secara terukur.

Penyebab

- 9.9 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan instansi tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, belum menyusun SOP, tidak cermat dalam penetapan kebijakan, pimpinan/direksi dan pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta kurangnya koordinasi.

Rekomendasi

- 9.10 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan instansi untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun SOP, meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan, serta pimpinan instansi agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya dan meningkatkan koordinasi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 9.11 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 9.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 29 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 30.

Tabel 9.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>											
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	35	169.147,64	21	1.973,59	1	254,10	10	2.160,61	67	173.535,94
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	455.650,53	6	3.637,16	1	140,83	13	4.905,80	52	464.334,32
3	Kekurangan Penerimaan	18	4.676,87	8	352,37	6	8.578,91	31	151.828,89	63	165.437,04
4	Administrasi	32		22		4		35		93	-
5	Ketidakhematan	11	19.894,54	7	7.204,97	1	166,34	3	178,39	22	27.444,24
6	Ketidakefektifan	10	347.418,60	7	185,84	1	22.206,25	4	1.215,54	22	371.026,23
Jumlah		138	996.788,18	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.201.777,77

9.12 Berdasarkan Tabel 9.3, hasil pemeriksaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya mengungkapkan 319 kasus senilai Rp1,20 triliun sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dengan rincian kerugian daerah/perusahaan sebanyak 67 kasus senilai Rp173,53 miliar (diantaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 18 kasus senilai Rp2,58 miliar), potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 52 kasus senilai Rp464,33 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 63 kasus senilai Rp165,43 miliar, administrasi sebanyak 93 kasus, ketidakhematan sebanyak 22 kasus senilai Rp27,44 miliar, dan ketidakefektifan sebanyak 22 kasus senilai Rp371,02 miliar. Rincian per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam lampiran 29 dan rincian per entitas disajikan dalam lampiran 30.

9.13 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di PT Bank Riau Kepri, Provinsi Riau, pelaksanaan penagihan kredit hapus buku Tahun 2010 senilai Rp93,77 miliar belum optimal meskipun telah dibentuk tim penagihan kredit macet dan kerja sama pelelangan jaminan kredit macet dan hapus buku sehingga berpotensi tidak tertagih.
- Di PT Jatim Marga Utama, Provinsi Jawa Timur, terdapat penggunaan dana perusahaan untuk pengusahaan jalan tol belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan indikasi kerugian senilai Rp1,04 miliar.
- Di PT BPD Jabar dan Banten, Provinsi Jawa Barat, penyaluran kredit Bank BJB Cabang Sukajadi akhir Tahun 2008 s.d. Tahun 2010 bermasalah berpotensi tidak tertagih yang berpotensi merugikan perusahaan senilai Rp76,18 miliar.

- Di PDAM Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, penyelesaian tunggakan TB 2009 – 2012 dan pemberian sanksi atas langganan air yang menunggak lebih dari tiga bulan tidak optimal mengakibatkan potensi tidak tertagihnya pendapatan senilai Rp1,30 miliar.
 - Di PT Jasa Sarana di Bandung, Provinsi Jawa Barat, hasil divestasi saham Tahun 2011 yang belum diterima oleh perusahaan senilai Rp125,27 miliar, mengakibatkan perusahaan tidak bisa memanfaatkan hasil divestasi.
 - Di PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Provinsi Bali, belum dikenakannya denda keterlambatan atas pekerjaan potensi *uprating* IPA di Estuary pada Tahun 2011 dan pekerjaan *integrated asset management solution* (IAMS) pada Tahun 2012 mengakibatkan PDAM belum menerima denda keterlambatan senilai Rp167,04 juta.
 - Di PD BPR NTB Lombok Tengah, Provinsi NTB, penyetoran pajak atas bunga tabungan dan deposito Tahun 2010 s.d. 2012 terlambat mengakibatkan pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pajak senilai Rp3,63 miliar.
 - Di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan untuk TB 2011 dan 2012 (s.d Mei) tidak sesuai dengan Perda Kab. Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 pasal 43 ayat (1) sehingga harga pengadaan barang pada PDAM Tirta Sanjung Buana senilai Rp968,24 juta tidak dapat diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan perusahaan.
 - Di PT BPD Jabar dan Banten, Provinsi Jawa Barat, terdapat pembayaran gaji, tunjangan, tantiem dan uang penghargaan untuk TB 2010 dan 2011 bagi direksi yang sudah tidak aktif mengakibatkan pemborosan senilai Rp13,33 miliar.
 - Di PDAM Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat realisasi biaya pegawai untuk TB 2011 dan 2012 yang melebihi ketentuan mengakibatkan ketidakhematan atas pengeluaran biaya kerja perusahaan minimal senilai Rp3,09 miliar.
 - Di PT Pertambangan dan Energi (PDPDE) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran selama periode 2007 – 2008 senilai Rp1,21 miliar.
- 9.14 Dari kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp173,53 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp768,43 juta yaitu PDAM Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp485,37 juta, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung senilai Rp279,01 juta, dan PT BPD Bali senilai Rp4,05 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.

- 9.15 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah/perusahaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp464,33 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp46,83 miliar yaitu PT BPD Jabar dan Banten senilai Rp46,768 miliar, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung senilai Rp33,50 juta, dan PD Petromuba senilai Rp29,45 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.
- 9.16 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas operasional BPR/BPD, RSUD, PDAM, dan BUMD Lainnya senilai Rp165,43 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp949,47 juta yaitu di PT BPD Jabar dan Banten senilai Rp518,61 juta, di PT BPD Jateng senilai Rp12,53 juta, di PD BPR Bank Salatiga senilai Rp1,50 juta, di PDAM Tirta Mangutama senilai Rp266,83 juta, dan di PD Pasar Bermartabat Kota Bandung senilai Rp150,00 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 30.

Penyebab

- 9.17 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pimpinan instansi kurang cermat dalam menyusun kebijakan, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksana kegiatan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta kurangnya koordinasi antar instansi.

Rekomendasi

- 9.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor ke kas daerah/perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- 9.19 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 10

Operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya

- 10.1 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan PDDT atas operasional Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya atas 27 objek pemeriksaan pada 7 kementerian/lembaga (KL), 1 Badan dan 6 pemerintah provinsi/kabupaten/kota
- 10.2 Pemeriksaan operasional BLU dilaksanakan pada 11 objek di 5 Kementerian/Lembaga yaitu Kepolisian Negara RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perindustrian. Adapun pemeriksaan operasional BLU di lingkungan pemerintah daerah meliputi 6 objek pemeriksaan operasional RSUD yaitu RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, RSUD Dr. Hardjono S Kabupaten Ponorogo, RSUD Ulin Provinsi Kalimantan Selatan, RSUD Kota Bitung, RSUD Kabupaten Mimika dan RSUD Kabupaten Paniai. Sedangkan pemeriksaan operasional Badan Lainnya dilaksanakan pada 10 objek pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) dan Otorita Asahan.
- 10.3 Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan aset Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012.
- 10.4 Cakupan pemeriksaan operasional BLU dan Badan Lainnya adalah senilai Rp13,61 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp23,91 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,02 triliun merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 10.5 Pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya bertujuan untuk menilai apakah
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (penerimaan, belanja dan aset) termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai; dan
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (penerimaan, belanja dan aset) termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

- 10.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 10.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 10.8 Salah satu tujuan pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya adalah untuk menilai apakah SPI dari entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional BLU dan Badan Lainnya.
- 10.9 Hasil evaluasi atas SPI operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 10.10 Hasil evaluasi SPI terhadap operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan terdapat 151 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 40 kasus kelemahan struktur pengendalian intern seperti disajikan dalam Tabel 10.1. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 31.

Tabel 10.1. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	17	25	42
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	35	34	69
3	Struktur Pengendalian Intern	23	17	40
	Jumlah	75	76	151

- 10.11 Terdapat 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas jenis-jenis temuan disajikan dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	22	34
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	5
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	-	3
	Jumlah	17	25	42

- 10.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 objek pemeriksaan disajikan dalam Lampiran 33.
- 10.13 Terdapat 69 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.3.

Tabel 10.3. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	-	3
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	5	7	12
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	12	19
4	pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	10	28
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	6
	Jumlah	35	34	69

10.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.15 Terdapat 40 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.4.

Tabel 10.4. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	17	15	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	1	6
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1	-	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	1	1
	Jumlah	23	17	40

- 10.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 20 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.
- 10.17 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di LPP RRI Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun, terdapat penerimaan jasa siaran non siaran (jasinonsi) RRI termasuk penerimaan di Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 masing-masing minimal senilai Rp57,01 miliar dan Rp14,09 miliar tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan RRI. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan jasinonsi kurang saji minimal senilai Rp57,01 miliar dan Rp14,09 miliar dalam LK BA 999 TA 2011 dan LK BA 116 Semester I TA 2012.
 - Di RS Bhayangkara Tk II Mappaoudang di Makassar, Kepolisian Negara RI, terdapat penerimaan hibah selama Tahun 2010 s.d Semester I Tahun 2012 dari Pertamina dan BTN masing-masing senilai Rp1,04 miliar dan Rp40,00 juta belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh register sehingga mengakibatkan pengelolaan atas uang/barang yang berasal dari hibah langsung berisiko tinggi mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan.
 - Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat kesepakatan pengenaan tarif bidang usaha siaran dan sewa ruangan Tahun 2011 s.d 2012 (Semester I) antara TVRI Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp2,24 miliar.

Penyebab

- 10.18 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme penyetoran, pencatatan, dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah. Selain itu, pejabat entitas kurang mengoptimalkan potensi penerimaan dari pihak ketiga.

Rekomendasi

- 10.19 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menyajikan penerimaan dalam laporan keuangan, melaporkan dan memantau proses registrasi hibah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 10.20 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,

ketidakhematan dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 10.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 32 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 33.

Tabel 10.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Daerah	95	69.749,97
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	21	78.239,65
3	Kekurangan Penerimaan	66	824.011,28
4	Administrasi	97	-
5	Ketidakhematan	18	4.769,63
6	Ketidakefektifan	35	43.574,07
	Jumlah	332	1.020.344,60

10.21 Berdasarkan Tabel 10.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332 kasus senilai Rp1,02 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BLU dan Badan Lainnya atas 27 objek pemeriksaan pada 7 KL, 1 Badan dan 6 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

10.22 Rincian temuan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya berdasarkan pengelompokan operasional BLU dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 10.6.

Tabel 10.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya Berdasarkan Pengelompokan BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65
3	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28
4	Administrasi	37	-	60	-	97	-
5	Ketidakhematan	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
6	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07
	Jumlah	173	160.499,11	159	859.845,49	332	1.020.344,60

Kerugian Negara/Daerah (95 kasus senilai Rp69,74 miliar)

- 10.23 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 10.24 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 10.25 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*). Kasus-kasus kerugian negara/daerah juga meliputi biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan serta lain-lain kasus kerugian negara/daerah.
- 10.26 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 95 kasus senilai Rp69,74 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 30 kasus senilai Rp56,53 miliar. Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 10.7.

Tabel 10.7. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara/Daerah							
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	284,85	-	-	1	284,85
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	628,95	2	628,95
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	153,29	-	-	1	153,29
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	5.796,10	8	949,01	20	6.745,11
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10	3.921,36	5	826,69	15	4.748,05
6	Pemahalan harga (mark up)	13	35.547,28	4	399,52	17	35.946,80
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	31,71	3	106,27	4	137,98
8	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	2	314,44	4	181,94	6	496,38
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	16.366,13	1	19,77	7	16.385,90
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	723,16	10	2.115,43	17	2.838,59
11	Lain-lain	2	1.358,00	3	26,07	5	1.384,07
	Jumlah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97

10.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Universitas Indonesia (UI), terdapat peralatan yang telah diserahkan terimakan rekanan namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yaitu pengadaan peralatan Laboratorium FIK UI, peralatan Laboratorium Metalurgi FT UI, peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Biomedis, peralatan Pendidikan dan Laboratorium FMIPA UI, dan peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI senilai Rp11,08 miliar. Selain itu, terdapat penyusunan HPS lebih tinggi dari yang seharusnya atas pengadaan peralatan Laboratorium Metalurgi FT UI, peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Biomedis, peralatan Pendidikan dan Laboratorium FMIPA UI, dan peralatan Laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI senilai Rp9,46 miliar. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas pengadaan peralatan laboratorium Tahun 2011 senilai Rp20,54 miliar.

- Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto Kepolisian Negara RI di Jakarta, terdapat indikasi pemahalan harga (*mark up*) nilai kontrak pengadaan alat kesehatan yang diperuntukkan bagi ICU, ICCU, NICU, IBS, IGD, Rawat Inap dan Poli Spesialis Kardiologi Tahun 2011 sehingga berindikasi merugikan negara senilai Rp2,49 miliar.
 - Di LPP TVRI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara, terdapat panjar kerja yang digunakan untuk biaya produksi siaran, biaya perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan belum dipertanggungjawabkan sejak Tahun 2004 s.d. 2012 pada TVRI Sumatera Utara dan Jakarta sehingga merugikan negara senilai Rp935,87 juta.
 - Di LPP RRI Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun, terdapat pengeluaran kas Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 tanpa didukung bukti atau kuitansi rincian penggunaan uang pada LPP RRI Jakarta, Denpasar, dan Madiun senilai Rp424,44 juta sehingga pengeluaran kas senilai Rp424,44 juta diragukan kewajarannya.
 - Di LPP RRI Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun 2011 pada Direktorat Teknologi dan Media Baru di Jakarta, RRI Surabaya, RRI Cirebon, dan RRI Purwokerto sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp269,06 juta.
 - Di RSUD Ulin di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat kegiatan studi banding *benchmarking* dan *Clinical* keperawatan bagi tenaga supervisor aspek RSUD Ulin Banjarmasin di RS SA Malang dan RSUP SI Denpasar Tahun 2011 tidak didukung bukti dan informasi yang memadai sehingga menimbulkan kerugian daerah senilai Rp284,85 juta.
- 10.29 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 30 kasus senilai Rp31,22 miliar dari seluruh kasus kerugian negara/daerah pada operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya sebanyak 13 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp6,14 miliar, sebanyak 7 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp15,73 miliar, dan sebanyak 4 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5,25 miliar. Dari temuan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp13,14 juta.
- 10.30 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah atas operasional BLU dan Badan lainnya senilai Rp69,74 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp361,92 juta, di antaranya yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) senilai Rp172,98 juta, BLU Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), Kementerian Perindustrian senilai Rp142,51 juta, dan RSUD Ulin Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp32,00 juta.

Penyebab

- 10.31 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena Panitia pelelangan tidak mematuhi ketentuan pelelangan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK dan panitia pemeriksa barang tidak melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, pelaksana pekerjaan tidak memenuhi kewajibannya, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 10.32 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain pimpinan entitas memberikan sanksi kepada PPK/Panitia Pelelangan/Panitia Pemeriksa Barang yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara mengganti peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan/atau menyetor uang ke kas negara/daerah.

Potensi Kerugian Negara/Daerah(21 kasus senilai Rp78,23 miliar)

- 10.33 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 10.34 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan aset tidak diketahui keberadaannya. Selain itu terdapat kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain kasus potensi kerugian.
- 10.35 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah sebanyak 21 kasus senilai Rp78,23 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.8.

Tabel 10.8. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara/Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	27.715,59	-	-	2	27.715,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-	1	103,50	2	103,50
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	1.241,81	2	1.241,81
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	865,02	1	43,27	4	908,29
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	921,68	4	41.493,06	5	42.414,74
6	Lain-lain	5	5.835,72	1	20,00	6	5.855,72
	Jumlah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65

10.36 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.37 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPP TVRI Jakarta, Padang, dan Samarinda, terdapat piutang usaha periode 30 Juni 2012 dari jasa siaran dan non siaran senilai Rp40,61 miliar yang berumur antara 1 tahun – 8 tahun dan penyelesaiannya berlarut-larut sehingga mengakibatkan pendapatan LPP TVRI Pusat, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur minimal senilai Rp40,61 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan operasional TVRI dan berpotensi tidak tertagih.
- Di UI, terdapat beberapa item pekerjaan yang tercantum dalam *bill of quantity* melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp22,44 miliar dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp5,22 miliar pada Pembangunan Rumpun Kesehatan atau *Development World Class University at University of Indonesia* Tahun 2011, namun atas pekerjaan tersebut baru direalisasikan pembayaran uang muka sehingga mengakibatkan indikasi potensi kerugian negara seluruhnya senilai Rp27,66 miliar.

- Di UGM, terdapat kesalahan dalam penurunan nilai nominal saham (*stock split*) yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah lembar saham atas penyertaan modal UGM pada PT GI Tahun 2011 sehingga kepemilikan saham UGM pada PT GI berpotensi hilang senilai Rp506,34 juta.

10.38 Terdapat temuan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 5 kasus senilai Rp31,09 miliar dari seluruh kasus potensi kerugian negara/daerah pada Operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012. Rincian temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut di antaranya sebanyak 2 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Penyebab

10.39 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena entitas tidak mempunyai SOP untuk mengamankan penerimaan negara di seluruh satker tentang kerja sama dengan mitra kerja untuk siaran dan non siaran serta tidak mengintensifkan penagihan piutang, pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pelelangan, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, dan pejabat pengelola kurang optimal dalam pengamanan barang.

Rekomendasi

10.40 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas menyusun dan memberlakukan SOP untuk mengamankan penerimaan negara dan mengoptimalkan penagihan piutang usaha serta pengembalian aset negara. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (66 kasus senilai Rp824,01 miliar)

10.41 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

10.42 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

- 10.43 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 66 kasus senilai Rp824,01 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.9.

Tabel 10.9. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	12	4.057,38	4	1.071,80	16	5.129,18
2	Penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas kas negara/daerah	23	12.291,67	19	790.195,20	42	802.486,87
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	3	1.554,19	3	13.254,44	6	14.808,63
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1.585,98	1	0,62	2	1.586,60
	Jumlah	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28

- 10.44 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

- 10.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Otorita Asahan, terdapat saldo dana penerimaan dari PT Inalum berupa *environmental fund* (EF) dan *development fund* (DF) per 31 Maret 2012 yang dikelola oleh Otoritas Asahan senilai Rp772,46 miliar belum disetorkan ke kas negara sehingga dana senilai tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- Di LPP RRI Jakarta, Banjarmasin, Padang, dan Bukittinggi, terdapat penerimaan jasinonsi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RRI Pusat Pemberitaan, RRI Direktorat LPU, RRI Banjarmasin, RRI Padang, dan RRI Bukit Tinggi senilai Rp12,11 miliar tidak dilaporkan sebagai penerimaan di Laporan Keuangan LPP RRI dan digunakan langsung. Penerimaan tersebut belum dilaporkan sebagai PNBP di Laporan Keuangan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian terhadap penerimaan Jasinonsi sulit dilakukan.

- Di Universitas Indonesia, terdapat kontribusi sebesar 5% dari hasil penerimaan kerjasama lembaga-lembaga di bawah Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu dan Budaya pada Tahun 2011 yang belum diterima mengakibatkan UI berpotensi kehilangan penerimaan dari kontribusi penerimaan dan tidak segera dapat memanfaatkan dana kontribusi minimal senilai Rp3,62 miliar.
 - Di Universitas Gadjah Mada, terdapat perhitungan sewa tanah dan bangunan atas pemanfaatan aset oleh PT BNI tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sehingga mengakibatkan UGM berpotensi mengalami kekurangan penerimaan atas pemanfaatan tanah senilai Rp1,58 miliar.
- 10.46 Terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 6 kasus senilai Rp2,92 miliar dari seluruh kasus kekurangan penerimaan pada operasional BLU dan Badan Lainnya pada Semester II Tahun 2012, di antaranya sebanyak 5 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp2,88 miliar.
- 10.47 Dari kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya senilai Rp824,01 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1,32 miliar, di antaranya yaitu UI senilai Rp891,50 juta, RS Bhayangkara Tk II Mappaoudang di Makassar senilai Rp238,57 juta, dan UGM senilai Rp103,63 juta.

Penyebab

- 10.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola penerimaan negara/daerah, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi

- 10.49 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain menghentikan penggunaan langsung penerimaan negara dan menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara serta melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah.

Administrasi (97 kasus)

- 10.50 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 10.51 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma. Selain itu juga meliputi kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan dan perpajakan dll., penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 10.52 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 97 kasus, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.10.

Tabel 10.10.Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
Penyimpangan Administrasi				
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	2	2
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	12	17
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9	11	20
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	6	6
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-	4
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	8	14	22
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dll.	8	3	11
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2	5	7
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-	1
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	7	7
	Jumlah	37	60	97

- 10.53 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.54 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPP RRI Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto, terdapat aset tanah sebanyak 12 bidang seluas 543.599 m² senilai Rp228,46 miliar belum bersertifikat atas nama RRI pada RRI Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto Semester I Tahun 2012 sehingga berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain.
- Di Universitas Gadjah Mada, terdapat penyertaan modal ke PT UGM SP senilai Rp29,50 miliar yang tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2009 dan 2010 sehingga mengakibatkan fungsi RKAT sebagai alat kendali pemangku kepentingan tidak terpenuhi dan penyertaan modal UGM ke PT UGM SP senilai Rp29,50 miliar melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Di RSUD Bitung, Kota Bitung, terdapat penggunaan dana Jamkesmas dan askes TA 2011 s.d. 2012 (Semester I) masing-masing senilai Rp6,81 miliar dan Rp2,26 miliar belum dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sebagai belanja daerah sehingga mengakibatkan nilai realisasi Belanja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bitung belum dilaporkan untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012 (Semester I).
- Di LPP TVRI, Jakarta, Padang, dan Samarinda terdapat keterlambatan penyetoran PPh pasal 21 periode Tahun 2011 sampai dengan Semester I Tahun 2012 pada TVRI Pusat selama dua sampai dengan 105 hari senilai Rp7,38 miliar sehingga penerimaan pajak senilai Rp7,38 miliar tidak dapat segera dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja negara dan berisiko disalahgunakan.
- Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat PPK/Pejabat Pengadaan RRI Pontianak dan Makassar tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS) dan tidak mempunyai referensi harga sehingga mengakibatkan nilai pengadaan Tahun 2011 senilai Rp2,08 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab

- 10.55 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta tidak menaati ketentuan dalam pengelolaan aset, investasi, pengadaan barang dan jasa serta perpajakan.

Rekomendasi

- 10.56 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas meminta *legal audit* atas status penyertaan modal UGM, mengurus sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Radio Republik Indonesia, menyetorkan pajak tepat pada waktunya dan mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Ketidakhematan (18 kasus senilai Rp4,76 miliar)

- 10.57 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 10.58 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 18 kasus pemborosan keuangan BLU dan Badan Lainnya atau kemahalan harga senilai Rp4,76 miliar, terdiri atas jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.11.

Tabel 10.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan atas Operasional BLU dan Badan lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakhematan							
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
	Jumlah	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63

- 10.59 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

- 10.60 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPP TVRI Jakarta, Pontianak, dan Makassar, terdapat pengadaan barang/jasa Tahun 2011 yang dibiayai dari APBN berupa *Water Proofing* Beton, ICT 2011, ICT 2012 dan plafond ruangan Kepala Bidang Berita tidak sesuai kebutuhan pada TVRI Pusat dan Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan pemborosan penggunaan uang negara senilai Rp3,23 miliar.

- Di LPP TVRI Jakarta, Manado, dan Medan, terdapat pemberian uang lelah periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 berdasarkan nota dinas yang tumpang tindih dengan tugas pokok dari masing-masing pegawai/bagian di TVRI Sumut senilai Rp259,02 juta. Selain itu, terdapat pemberian tunjangan representatif Kepala Stasiun yang tumpang tindih dengan biaya representatif dan tunjangan operasional dari Bulan November 2011 s.d. Juni 2012 yang dikeluarkan oleh TVRI Sumut senilai Rp40,00 juta. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembebanan uang lelah dan tunjangan representatif senilai Rp299,02 juta.
- Di RSUD Paniai, Kabupaten Paniai, terdapat harga pengadaan obat TA 2011 yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 633/MENKES/SK/III/2011 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2011 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp209,40 juta.
- Di Universitas Gadjah Mada, terdapat pengeluaran PT GI Tahun Buku 2011 untuk bonus direksi senilai Rp100,00 juta ketika kondisi perusahaan sedang mengalami rugi kumulatif senilai Rp1,77 miliar sehingga memboroskan keuangan perusahaan senilai Rp100,00 juta.

Penyebab

- 10.61 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa, adanya unsur kesengajaan dalam menerbitkan nota dinas tim guna mencairkan uang lelah, dan kurang optimal melakukan pengawasan.

Rekomendasi

- 10.62 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pejabat yang bertanggung jawab lebih cermat dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian uang lelah dan tunjangan representatif.

Ketidakefektifan (35 kasus senilai Rp43,57 miliar)

- 10.63 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 10.64 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 10.65 Hasil pemeriksaan atas operasional BLU dan Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 35 kasus senilai Rp43,57 miliar, terdiri atas jenis-jenis temuan yang disajikan dalam Tabel 10.12.

Tabel 10.12. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Operasional BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	-	-	-	2	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	5.320,47	1	-	5	5.320,47
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10	35.365,81	4	2.795,60	14	38.161,41
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-	1	-	4	-
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	1	-	6	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	3	92,19	4	92,19
	Jumlah	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07

10.66 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 33.

10.67 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Universitas Indonesia, terdapat beberapa peralatan pendidikan dan laboratorium FMIPA dan peralatan laboratorium Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI masih tersimpan dalam dus kemasan barang dan disimpan di gudang penyimpanan yang belum dilakukan uji fungsi dan pelatihan pengoperasian oleh vendor untuk memastikan bahwa peralatan yang diadakan tersebut berfungsi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan barang hasil pengadaan Tahun 2011 senilai Rp28,28 miliar belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pengadaan.

- Di Universitas Sebelas Maret, terdapat pemanfaatan gedung tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu gedung Kantor Pusat Tahap 4 hasil pembangunan Tahun 2011 senilai Rp2,79 miliar yang semula direncanakan sebagai perkantoran namun digunakan sebagai ruangan pertemuan/aula dan tempat olahraga.
- Di RSUD Bitung, Kota Bitung, terdapat hasil pengadaan alat kesehatan TA 2011 yang tersimpan di gudang, kantor, laboratorium, poliklinik mata, dan bagian radiologi sehingga peralatan kesehatan senilai Rp2,64 miliar tidak efektif dan belum memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.
- Di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), Kementerian Perumahan Rakyat, pengadaan enam unit kendaraan dinas roda empat Tahun 2011 senilai Rp1,71 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional pejabat dan staf BLU-PPP tidak sesuai dengan tujuannya yaitu dipinjam-pakaikan kepada Biro Umum Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga BLU-PPP tidak dapat memanfaatkan kendaraan operasional tersebut secara optimal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU-PPP.

Penyebab

- 10.68 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam merencanakan dan lalai dalam melaksanakan kegiatan, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 10.69 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, mempercepat pemanfaatan hasil pengadaan dan menarik kembali aset yang dipinjam-pakaikan kepada unit lain serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 10.70 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

BAB 11

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 11.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 20 objek pemeriksaan yaitu 8 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 6 objek pemeriksaan BUMN, seperti disajikan dalam Lampiran 36.
- 11.2 Cakupan pemeriksaan atas 20 objek pemeriksaan tersebut, disajikan dalam Tabel 11.1 di bawah ini.

Tabel 11.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas Yang Diperiksa (1)	Cakupan Pemeriksaan (2)	Total Temuan (3)	% Temuan (4) = $\frac{3}{2} \times 100\%$
Pemerintah Pusat	9.443.037,94	495.997,07	5,25%
Pemerintah Daerah	263.022,32	25.330,94	9,63%
BUMN	6.197.168,15	7.347,79	0,12%
Jumlah	15.903.228,41	528.675,80	3,32%

Hasil Pemeriksaan

- 11.3 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 11.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat

- 11.5 Hasil pemeriksaan atas 8 objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, menunjukkan 29 kasus kelemahan SPI dan 56 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp495,99 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 11.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 29 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 19 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.7 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di 7 objek pemeriksaan seperti disajikan dalam Lampiran 36.
- 11.9 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), laporan bulanan yang disampaikan oleh masing-masing Tim Likuidasi (TL) belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan bank dalam likuidasi, mengakibatkan laporan bulanan yang dibuat dan disampaikan kepada LPS tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat sistem pencatatan persediaan konsentrat pada PT Freeport Indonesia (PT FI) masih lemah mengakibatkan selisih kurang persediaan konsentrat per 31 Desember 2011 sebanyak 11.075,30 *Wet Metric Ton* (WMT).
 - Di Kementerian Kehutanan, kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam Pasal 18 dan 19 PP Nomor 28 Tahun 2011 tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu zona di luar inti dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu memberi peluang penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan sehingga akan merusak kawasan hutan konservasi.

- Di Kementerian Pertanian, periode s.d September 2011 penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih menjadi kewenangan Kementan. Realisasi impor daging sapi Tahun 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150% dari kebutuhan impor dan 67,1 ribu ton atau 187% dari kebutuhan impor. Perbandingan antara kebutuhan impor dan realisasi daging sapi (tidak termasuk bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel 11.2.

Tabel 11.2. Perbandingan antara Kebutuhan Impor dan Realisasi Daging Sapi (Tidak Termasuk Bakalan) Tahun 2008 s.d. 2012

(dalam ribu ton)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kebutuhan konsumsi daging	313,3	325,9	338,7	351,9	365,4
2	Produksi lokal	233,6	250,8	283,0	316,1	349,7
3	kebutuhan impor	79,7	75,1	55,7	35,8	15,7
4	Realisasi impor	150,4	142,8	139,5	102,9	34,6

sumber: PSDS 2010-2014 dan data DJBC

Pada periode Oktober 2011 s.d. sekarang, kewenangan penetapan kebutuhan impor telah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, kewenangan pemberian Persetujuan Impor (PI) oleh Menteri Perdagangan, dan kewenangan pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) oleh Menteri Pertanian, namun masih ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP.

Penyebab

- 11.10 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memahami prosedur yang ada serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 11.11 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan rekonsiliasi data secara rutin dan tertulis, melaksanakan sosialisasi, memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengkaji kebijakan pemerintah untuk terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar Menteri Pertanian segera memperbaiki administrasi penerbitan RPP dan kuota impor daging sapi, serta berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan terkait perbedaan kuantitas antara PI dengan RPP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

11.12 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	8	1.599,70
2	Potensi Kerugian Negara	5	8.604,77
3	Kekurangan Penerimaan	7	8.748,76
4	Administrasi	27	-
5	Ketidakhematan	1	4.465,90
6	Ketidakefektifan	8	472.577,94
Jumlah		56	495.997,07

11.13 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai Rp495,99 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 8 entitas pemerintah pusat.

11.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan seperti disajikan dalam Lampiran 36.

11.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LPS, terdapat pembayaran klaim simpanan layak bayar kepada nasabah BPR Tripanca Setiadana pada Tanggal 14 Juli 2009 dan 17 Juli 2009 yang terindikasi sebagai penerima kredit fiktif. Pembayaran tersebut dilakukan sebelum laporan audit investigasi BPKP diterbitkan sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp2,18 miliar.
- Di Kementerian ESDM, terdapat pelaksanaan pekerjaan pembangunan transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi TA 2010 – 2011 tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp1,21 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perijinan yang diberikan yaitu PT. IP pada Tahun 2010 mengimpor daging sapi sebanyak 880,50 ton diindikasikan tanpa surat persetujuan pemasukan (SPP), PT. IP diduga memalsukan

40 dokumen invoice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), PT. KSU diduga memalsukan lima surat persetujuan impor daging sapi, impor daging dan jeroan sapi sebanyak 22,82 ribu ton oleh 21 importir diindikasikan tanpa melalui prosedur karantina, dan dua importir diduga merubah nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah. Disamping lima kasus di atas terdapat kesalahan pengenaan tarif PNBP jasa tindakan karantina periode tahun 2010 s.d. Oktober 2012 mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal senilai Rp26,478 juta dan potensi kekurangan penerimaan negara senilai Rp73,702 juta serta tidak terpungutnya PNBP senilai Rp2,362 miliar sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan karantina.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT) yang sudah dinyatakan menjadi bagian pemerintah senilai USD9,97 juta belum dapat dimanfaatkan bagi kepentingan negara. Selain itu terdapat pengadaan jasa konsultasi taksasi Tahun 2008 dan 2009 seluruhnya senilai Rp240,00 juta dilakukan tidak melalui proses lelang, sehingga tidak diperoleh harga yang bersaing dan ekonomis.

11.16 Dari kasus-kasus kerugian negara pada PDDT lainnya pemerintah pusat terdapat temuan yang terkait belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 2 kasus senilai Rp1,21 miliar yaitu 1 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp268,73 juta dan sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran, selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp950,53 juta. Selain itu terdapat 1 kasus potensi kerugian negara senilai Rp633,47 juta dan 1 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp928,53 juta.

11.17 Dari kasus-kasus kerugian negara pada pemerintah pusat senilai Rp1,59 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara oleh LPS senilai Rp11,55 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 36.

Penyebab

11.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian antar instansi terkait dan adanya unsur kesengajaan dari importir untuk memanfaatkan kelemahan pengawasan dan pengendalian tersebut. Selain itu terdapat perbedaan waktu pembayaran simpanan layak bayar dengan laporan audit investigasi.

Rekomendasi

11.19 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung

jawab, membuat rencana yang akurat, melaksanakan pengamanan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dan kompeten, menagih kekurangan penerimaan, mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara dan menyetorkan kerugian negara ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta agar menarik klaim simpanan layak bayar apabila terbukti sebagai penerima kredit fiktif.

Pemerintah Daerah

- 11.20 Hasil pemeriksaan 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan adanya 7 kasus SPI dan 57 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp25,33 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.21 Hasil pemeriksaan SPI pada 6 objek pemeriksaan mengungkapkan adanya 7 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.22 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.23 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Muaro Jambi, aset hasil pengadaan dana BOSTA 2011 pada 48 sekolah belum diberi kode inventaris barang dan minimal senilai Rp104,16 juta belum tercatat mengakibatkan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah (BMD) menjadi tidak handal dan berpotensi hilang. Selain itu, Rencana Strategis 2011-2016 dinas pendidikan belum ditetapkan oleh kepala daerah mengakibatkan dinas pendidikan belum memiliki acuan dalam membangun pendidikan untuk lima tahun ke depan.
 - Di Kabupaten Bungo, jumlah dana BOS yang diterima sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa pada lembar kerja individu sekolah mengakibatkan kelebihan dan kekurangan penetapan alokasi dana BOS pada TA 2011 dan Semester I TA 2012.

Penyebab

- 11.24 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi

- 11.25 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.26 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian daerah	22	651,93
2	Kekurangan Penerimaan	5	831,83
3	Administrasi	23	-
4	Ketidakhematan	3	773,66
5	Ketidakefektifan	4	23.073,52
Jumlah		57	25.330,94

- 11.27 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 57 kasus senilai Rp25,33 miliar, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas pemerintah daerah.

- 11.28 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten, pajak atas honor dan sewa Tahun 2011 kurang dipungut dan disetor pada KPU Provinsi Banten mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp551,11 juta. Selain itu terdapat kelebihan

pencairan biaya operasional pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Benda Kota Tangerang, mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp198,65 juta.

- Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pengelolaan pembukuan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pemilukada TA 2011 tidak tertib sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban terlambat.
- Di Kabupaten Muaro Jambi, dana BOS Tahun 2011 senilai Rp22,93 miliar terlambat disalurkan sehingga proses belajar mengajar terganggu dan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

11.29 Dari kasus kerugian daerah senilai Rp651,93 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp61,63 juta yaitu Pemda Kab. Muaro Jambi senilai Rp23,47 juta dan Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp38,16 juta seperti disajikan dalam Lampiran 36.

11.30 Dari kasus kekurangan penerimaan senilai Rp831,83 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp14,43 juta, yaitu Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp13,49 juta dan Pemda Provinsi Banten senilai Rp944,24 ribu.

Penyebab

11.31 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memahami dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang ada, tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

11.32 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, melaksanakan monitoring dan evaluasi, memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkan kerugian daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUMN

11.33 Hasil pemeriksaan atas 6 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menunjukkan adanya 32 kasus SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp7,34 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi dan tidak efektifitas.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.34 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 32 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 15 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.35 Rincian kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 34.
- 11.36 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT PLN (Persero), saldo uang jaminan langganan (UJL) PLN berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2011 berbeda dengan saldo UJL dalam data induk langganan (DIL) mengakibatkan penyajian nilai utang jangka pendek PLN kepada pelanggan lebih rendah dibandingkan nilai yang seharusnya.
 - Di PT Pertamina (Persero), pelaksanaan penandatanganan surat permintaan pembayaran atas 31 kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) senilai Rp76,96 miliar di lingkungan *corporate secretary* dilakukan oleh pejabat di bawah direktur utama sehingga penandatanganan tersebut tidak sah karena belum disetujui oleh pihak yang berwenang. Selain itu terdapat pinjaman program kemitraan (PK) periode September 2008 s.d. Oktober 2009 senilai Rp6,47 miliar yang tidak disalurkan secara langsung kepada mitra binaan yang berhak.

Penyebab

- 11.37 Kasus-kasus kelemahan SPI pada PDDT lainnya antara lain disebabkan pejabat terkait lalai/kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Rekomendasi

- 11.38 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.39 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 11.5. Rincian jenis temuan pada

tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 36.

Tabel 11.5. Kelompok Temuan Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan PDDT Lainnya pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	2	5.532,69
2	Potensi Kerugian	2	1.360,36
3	Kekurangan Penerimaan	4	454,74
4	Administrasi	10	-
5	Ketidakefektifan	10	-
Jumlah		28	7.347,79

11.40 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 28 kasus senilai Rp7,34 miliar, sebagai akibat adanya ketidaktepatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 5 entitas BUMN.

11.41 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di PT Sarinah (Persero), terdapat kegiatan pengadaan dan penjualan singkong kering (*cassava*) Tahun 2011 tidak sesuai ketentuan menimbulkan indikasi kerugian senilai Rp3,27 miliar yang berasal dari kekurangan volume *cassava* untuk ekspor senilai Rp2,924 miliar dan distribusi lokal senilai Rp346,87 juta.
- Di PT Antam (Persero), penyaluran dana program bina lingkungan (BL) untuk pembebasan lahan kampus Tahun 2011 dan renovasi Masjid Nurul Iman Kijang Tahun 2009 dan 2011 senilai Rp2,45 miliar belum dipertanggungjawabkan sehingga penggunaan dana program bina lingkungan belum terpantau secara memadai.

Penyebab

11.42 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan terjadi karena pimpinan entitas lalai/tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

11.43 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan penagihan dan mengenakan sanksi tertulis kepada pejabat terkait.

11.44 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

AIPA	: <i>Asean Inter-Parliamentary Assembly</i>
ALOS	: <i>Average Length of Stay</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	: Anggaran Rumah Tangga

B

Baminlog	: Bintara Administrasi Logistik
Bansos	: Bantuan Sosial
B4T	: Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
BBLM	: Balai Besar Logam dan Mesin
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKMM	: Balai Kesehatan Mata Masyarakat
BKPM	: Balai Kesehatan Paru Masyarakat
BMKT	: Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
BL	: Bina Lingkungan
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMAD	: Bea Masuk Anti Dumping
BMADS	: Bea Masuk Anti Dumping Sementara
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTM	: PD Banama Tingang Makmur
BUA	: Badan Urusan Administrasi
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CIP	: <i>Corriago dan Insurance Paid</i>
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>

D

Denkesyah	: Detasemen Kesehatan Wilayah
DF	: <i>Development Fund</i>
DIL	: Data Induk Langganan
Dinsos	: Dinas Sosial
Dinsosnaker	: Dinas Sosial Tenaga Kerja
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
Disperindagkop	: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Ditjen BUK	: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPPKD	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

E

EF	: <i>Environmental Fund</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

G

Gudpuszi	: Gudang Pusat Zeni
----------	---------------------

H

HGU	: Hak Guna Usaha
HOO	: <i>Home office overhead</i>
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

I

IAMS	: <i>Integrated Asset Management Solution</i>
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
INA CBG's	: <i>Indonesia Case Base Groups</i>
INASOC	: <i>Indonesia SEA Games Organizing Committee</i>

J

Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JPK Gakin	: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin

K

KADI	: Komite Anti <i>Dumping</i> Indonesia
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KIT	: Kawasan Industri Tenayan Raya
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	: Kementerian/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
Kodiklat	: Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSOT	: Kerjasama Operasi dan Transfer

L

LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LBMD	: Laporan Barang Milik Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LLAJ	: Lalu Lintas Angkutan Jalan
Loteng	: Lombok Tengah
LPP-RR1	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP-TVRI	: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

N

NHM : PT Nusa Halmahera Mineral

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah
Pamobvit : pengamanan objek vital
PC : *personal computer*
PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda : Pemerintah Daerah
PHE : PT Pertamina Hulu Energi
PI : *Participating Interest*
PIB : Persetujuan Impor Barang
PJK MM : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
PK : Program Kemitraan
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
PKP : Pengusaha Kena Pajak
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PMP : Penyertaan Modal Pemerintah
PM TBS : PPN Masukan Tandan Buah Segar
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPFD : Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
PPh : Pajak Penghasilan
PPJ : Pajak Penerangan Jalan
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
PPK : Pemberi Pelayanan Kesehatan
PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
P3M : Pusat Pelatihan Pemuda dan Mahasiswa
PPP : Pusat Pembiayaan Perumahan
Prona : Proyek Operasi Nasional Agraria
PSU : prasarana, sarana dan utilitas
PSDS : Program Swasembada Daging Sapi
PT BRI : PT Bank Rakyat Indonesia
PT BTDC : PT Pengembangan Pariwisata Bali/Bali *Tourism Development Corporation*
PT BTN : PT Bank Tabungan Negara
PT DPS : PT Dok dan Perkapalan Surabaya
PT DKB : PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari
PT FI : PT Freeport Indonesia
PT HK : PT Hutama Karya
PT KAI : PT Kereta Api Indonesia
PT KPBN : PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT ME : PT Mega Eltra
PT MMC : PT Multi Mas Chemindo
PTOK : Pertamina Talisman Ogan Komering
PTPN : PT Perkebunan Nusantara
PTR : Petani Tebu Rakyat
PT TPI : PT Tugu Pratama Indonesia/*Tugu Insurance Company Ltd*
Pusdikajen : Pusat Pendidikan Ajunan Jenderal
Pusdikif : Pusat Pendidikan Infanteri

R

RI	: Rawat Inap
RJ	: Rawat Jalan
RJTL	: Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RKBMD	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKPBMD	: Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUPN	: RS Umum Pemerintah Nasional
RU	: <i>Refinery Unit</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Rusunawa	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

Samsat	: Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap
SE	: Surat Edaran
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKMPP	: Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPB	: Surat Persetujuan Berlayar
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Surat Pernyataan Miskin
SPP	: Surat Persetujuan Pemasukan
SPT	: Surat Pemberitahuan
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah

T

TL	: Tim Likuidasi
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

U

UHR	: Usaha Hutan Rakyat
UI	: Universitas Indonesia
UJL	: Uang Jaminan Lagganan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

W

WK	: Wilayah Kerja
WMT	: <i>Wet Metric Ton</i>
WP	: Wajib Pajak
WP&B	: <i>Work Program and Budget</i>

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDDT Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Kedapatkahan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ kas lainnya yang telah dibidang lanjut dalam proses pemeriksaan										
		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah/perusahaan						Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah						Jml Kasus	Nilai									
		Total potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/ perusahaan		Kendisesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tidak diketahui keberadaannya				Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tenagah		Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Pengelolaan Pendapatan	8	11.413,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.801,24	-	-	-	1	1.611,82
1	Penerimaan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	8	11.413,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Daerah	1	1.611,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	1	1.611,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/kota	7	9.801,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Belanja	322	180.223,69	288	155.322,49	5	2.184,71	2	250,45	1	82,40	2	80,40	4	603,80	3	644,50	-	-	-	-	-	17	21.054,94
	Kabupaten/kota	14	28.574,43	11	28.567,03	1	-	-	-	-	-	-	7,40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	87,69
5	Belanja Daerah	308	151.669,26	277	126.755,46	4	2.184,71	2	250,45	1	82,40	1	73,00	4	603,80	2	644,50	-	-	-	-	-	17	21.054,94
	Provinsi	35	31.519,25	31	20.235,12	2	2.120,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.180,39
	Kabupaten/kota	273	120.150,01	246	106.517,34	2	63,97	2	250,45	1	82,40	1	73,00	4	603,80	2	644,50	-	-	-	-	-	15	11.894,55
3	Manajemen Aset	56	180.820,76	1	115,21	-	-	30	95.079,76	1	163,15	20	50.042,89	-	-	-	-	2	34.741,68	-	-	-	2	678,07
	Pusat	12	114.732,00	-	-	-	-	8	80.266,09	-	-	3	-	-	-	-	-	1	34.465,91	-	-	-	-	-
	Provinsi	11	16.818,03	-	-	-	-	7	5.805,40	-	-	3	10.586,94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	425,69	
	Kabupaten/kota	33	49.270,73	1	115,21	-	-	15	9.008,27	1	163,15	14	39.455,95	-	-	-	-	1	275,77	-	-	1	252,38	
	BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jamkesmas dan Jamkesda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan KKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional BUMN	22	734.930,88	2	38.439,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	329.240,22	1	281,49	2	366.969,40	
7	Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya	52	372.176,61	2	94,77	-	-	3	93,50	1	140,83	3	1.700,00	3	1.700,00	3	369.557,68	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	
	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	USD 9.530,27	1	140,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	51	372.035,78	2	94,77	-	-	3	93,50	-	-	-	-	3	1.700,00	3	369.557,68	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	46.831,85
	BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah/perusahaan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Jml Kasus	Nilai	Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Kendakapartuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/perusahaan		Jml Kasus	Nilai								
				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai						
8	11	Operasional BLU dan Badan Lainnya	21	78.239,65	2	27.715,59	2	1.043,50	2	1.241,81	11	1,2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		BLU	12	35.338,01	2	27.715,59	1	103,50	2	1.241,81	-	-	4	908,29	-	-	-	-	-	5	42.414,74	-	-	6	5.855,72		
		Badan Lainnya	9	42.901,64	-	-	1	103,50	2	1.241,81	-	-	3	865,02	-	-	-	-	-	1	921,68	-	-	5	5.855,72		
9	12	PDTT Lainnya	7	9.965,13	2	1.821,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	172,14	-	-	3	7.971,30		
		Pusat	5	8.604,77	1	633,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	172,14	-	-	3	7.971,30		
		BLUMN	2	1.360,36	1	1.188,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total	488	1.567.769,58	297	23.509,32	7	2.288,21	37	96.665,52	2	245,55	27	51.172,41	7	2.303,80	7	644,50	70	785.927,70	2	805	32	404.207,77	55.929,71		
		Pusat	31	151.911,20	12	29.200,50	1	-	8	80.266,09	-	-	4	7,40	-	-	2	-	1	34.465,91	-	-	3	7.971,30	87,69		
		Provinsi	48	50.089,93	31	20.238,12	2	2.120,74	7	5.805,40	-	-	4	10.727,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.197,90	7.696,63	
		Kabupaten/Kota	313	179.201,98	247	106.632,55	2	63,97	17	9.258,72	2	245,55	15	39.528,95	4	603,80	2	644,50	2	644,50	8	10.077,01	-	-	16	12.146,93	1.313,54
		Jumlah Daerah (Provinsi + Kabupaten/Kota)	361	229.291,91	278	126.870,67	4	2.184,71	24	15.064,12	2	245,55	19	50.256,72	4	603,80	2	644,50	2	644,50	8	10.077,01	-	-	20	23.344,83	9.010,17
		BLUMN	24	736.291,04	3	39.627,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	329.412,36	1	281,49	2	366.969,40	-	
		Jumlah Rupiah BLUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Rupiah BLUMN	51	372.035,78	2	94,77	-	-	3	93,50	-	-	-	-	3	1.700,00	3	-	38	369.557,68	1	523,31	1	66,52	46.831,85		
		BLUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Rupiah BLUMD	12	464.193,49	-	-	-	-	-	93,50	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-	461.715,39	-	-	-	66,52	46.831,85	
		BLU	12	35.338,01	2	27.715,59	1	103,50	2	1.241,81	-	-	3	865,02	-	-	-	-	-	1	921,68	-	-	5	5.855,72		
		Badan Lainnya	9	42.901,64	-	-	1	103,50	2	1.241,81	-	-	1	43,27	-	-	-	-	-	4	41.493,06	-	-	1	20,00		
		Jumlah BLU dan Badan Lainnya	21	78.239,65	2	27.715,59	2	103,50	2	1.241,81	-	-	4	908,29	-	-	-	-	-	5	42.414,74	-	-	6	5.855,72		
		Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	488	1.659.927,29	297	23.509,32	7	2.288,21	37	96.665,52	2	245,55	27	51.172,41	7	2.303,80	7	644,50	70	785.927,70	2	804,80	32	404.207,77	55.929,71		

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester II Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan				Kekurangan Penerimaan												Lain-lain		penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																							
1	Pengelolaan Pendapatan	307	291.053,31	2	99	264	276.901,39	20	1.539,01	1	40,00	17	12.222,07	-	-	3	252,34	-	-	4.688,00	-		
			USD 872,07		USD 111,24		USD 711,86										USD 48,97						
1	Penerimaan Pajak, Kepabeanan, dan Cukai Pusat	60	196.840,09	-	-	56	196.488,30	-	-	-	-	4	351,79	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6	54.909,17	-	-	6	54.909,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	445,30	-	-	337,43	-	-	-	-	-	1	107,87	-	-	-	-	-	-	-	-		
		50	141.485,62	-	-	47	141.241,70	-	-	-	-	3	243,92	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	26	3.430,22	1	90,11	20	3.022,26	2	272,70	1	40,00	1	5,15	-	-	1	-	-	-	-	361,10		
			USD 872,07		USD 111,24		USD 711,86										USD 48,97						
3	Pendapatan Daerah	221	90.783,00	1	8,39	188	77.390,83	18	1.266,31	-	-	12	11.865,13	-	-	2	252,34	-	-	4.326,90	-		
			SGD 1,68				SGD 1,68																
		23	21.735,89	-	-	20	15.007,54	-	-	-	-	3	6.728,35	-	-	-	-	-	-	8,98	-		
		198	69.047,11	1	8,39	168	62.383,29	18	1.266,31	-	-	9	5.136,78	-	-	2	252,34	-	-	4.317,92	-		
			SGD 1,68				SGD 1,68																
2	Pelaksanaan Belanja	405	70.709,86	331	54.793,69	63	14.853,43	2	183,27	2	152,64	5	456,98	-	-	2	269,85	-	-	3.299,85	-		
			USD 611,05		USD 611,05		USD 611,05																
4	Belanja Pusat	49	13.825,61	26	9.652,01	16	3.406,12	2	183,27	2	152,64	3	431,57	-	-	-	-	-	-	180,71	-		
			USD 611,05		USD 611,05		USD 611,05																
5	Belanja Daerah	356	56.884,25	305	45.141,68	47	11.447,31	-	-	-	-	2	25,41	-	-	2	269,85	-	-	4.148,10	-		
		56	11.711,95	48	7.760,56	8	3.951,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,11	-		
		300	45.172,30	257	37.381,12	39	7.495,92	-	-	-	-	2	25,41	-	-	2	269,85	-	-	3.736,99	-		
3	Manajemen Aset	25	21.354,84	5	1.534,57	18	19.689,37	-	-	-	-	2	131,90	-	-	-	-	-	-	68,16	-		
			USD 306,67		USD 306,67		USD 306,67																
		3	6.880,38	1	79,50	2	6.800,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	12,50	-	-	1	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		15	8.162,37	2	40,39	13	8.121,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6	6.299,59	2	1.414,68	2	4.753,01	-	-	-	-	2	131,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
			USD 306,67		USD 306,67		USD 306,67																
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda	2	151.832,07	-	-	1	1.356,06	1	150.476,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan					Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan					Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Lain-lain						
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	8 Pelaksanaan KKKS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5		50	6.338,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.338,53	-	-	-	-	
6	Operasional BIJMN	17	202.675,80	3	1.613,67	12	146.725,80	2	54.330,33	-	-	-	-	-	-	-	-	335,15	-	
7	Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD dan BUMD lainnya	63	165.437,04	9	1.423,11	49	159.025,52	1	4.841,56	-	-	4	146,85	-	-	-	-	167,04	782,43	
	Provinsi	5	8.529,00	1	288,13	3	3.399,31	1	4.841,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	1	49,91	-	-	1	49,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BUMD	57	156.858	8	1.134,98	45	155.576,30	-	-	-	-	4	146,85	-	-	-	-	167,04	782,43	
8	Operasional BLU dan Badan Lainnya	66	810.084	16	5.125,18	42	788.560,04	6	14.808,63	-	-	2	1.586,60	-	-	-	-	38,87	1.288,69	
	BLU	39	19.489,22	12	4.057,38	23	12.291,67	3	1.554,19	-	-	1	1.585,98	-	-	-	-	38,87	1.233,70	
	Badan Lainnya	27	790.595,23	4	1.071,80	19	776.268,37	3	13.254,44	-	-	1	0,62	-	-	-	-	-	54,99	
	PTT Lainnya	16	7.384,11	4	1.168,37	9	3.691,71	1	61,64	-	-	1	100,18	-	-	-	-	2.362,21	14,43	
	Pusat	7	6.097,54	1	928,53	3	2.644,98	1	61,64	-	-	1	100,18	-	-	-	-	-	-	
	BUMN	4	454,74	3	239,84	1	214,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	5	831,83	-	-	5	831,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,43	
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	951	1.726.870,01	370	65.767,09	458	1.410.802,32	33	225.240,45	3	192,64	31	14.644,58	50	6.338,53	6	2.884,40	4.869,87	10.444,55	
		-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	-	-	-	-	USD 37,864,67	-	USD 48,97	-	-	
	Pusat	93	236.974,99	29	10.750,15	48	72.139,47	6	150.993,62	3	192,64	5	536,90	-	-	-	2	2.362,21	180,71	3.052,49
	Jumlah Rupiah Pusat	-	USD 1.757,29	-	USD 722,29	-	USD 986,03	-	150.993,62	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 48,97	-	
	Provinsi	90	253.967,98	17	17.734,69	81	674,38	1	4.841,56	-	-	3	6.728,35	-	-	-	-	2.835,75	180,71	3.052,49
	Kabupaten/Kota	518	122.876,99	260	37.425,90	224	78.388,53	18	1.266,31	-	-	12	5.270,06	-	-	-	4	522,19	3.736,99	4.757,23
	Jumlah Rupiah Kabupaten/Kota	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Daerah (Provinsi + Kabupaten/Kota)	608	165.711,35	309	45.478,59	261	101.604,29	19	6.107,87	-	-	15	11.998,41	-	-	-	4	522,19	3.736,99	4.757,23
		-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.320,94	

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketersediaan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengalihkan Kekurangan Penerimaan												Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dipungut lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Total Kekurangan Penerimaan				Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan				Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/perusahaan				Penerimaan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah difidat lanjut dalam proses pemeriksaan		Penerimaan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah difidat lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		127	357.254,28	8	3.274,19	62	292.935,41	2	54.330,33	-	-	5	375,82	50	6.336,53	-	-	335,15	-
		-	USD 39.838,02	-	-	-	USD 1.973,35	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 37.864,67	-	-	-
	Jumlah Rupiah BUMN		742.487,94		3.274,19		312.017,71		54.330,33		-		375,82		372.489,89		-	335,15	
	BUMD	57	156.658,13	8	1.134,98	45	155.576,30	-	-	-	-	4	146,85	-	-	-	-	167,04	782,43
	BLU	39	19.489,22	12	4.057,38	23	12.291,67	3	1.554,19	-	-	1	1.585,98	-	-	-	-	38,87	1.233,70
	Badan Lainnya	27	790.595,23	4	1.071,80	19	776.268,37	3	13.254,44	-	-	1	0,62	-	-	-	-	-	54,99
			USD 1.440,21		-		USD 1.440,21		-		-		-		-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah Badan Lainnya		804.522,06		1.071,80		790.195,20		13.254,44		-		0,62		-	-	-	-	54,99
	Jumlah BLU dan Badan Lainnya	66	824.011,28	16	5.129,18	42	802.486,87	6	14.808,63	-	-	2	1.586,60	-	-	-	-	38,87	1.288,69
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	951	2.143.096,78	370	72.751,63	458	1.453.359,64	33	226.240,45	3	192,64	31	14.644,58	50	372.489,89	6	3.357,94	4.869,87	10.444,55

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 4

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan,
Kepabeanaan, dan Cukai**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	1	-	3
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	1	-	1
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	-	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	12	13	36
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	-	10	9	19
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11	2	-	13
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	4	4
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11	2	-	13
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	2	-	6
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	-	-	5
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		24	15	13	52

Lampiran 5

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	-	-	1	34,68	-	-	1	34,68
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		-	1	34,68	-	-	1	34,68
II	Kekurangan Penerimaan	6	54.909,17	4	445,30	50	141.485,62	60	196.840,09
1	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	6	54.909,17	3	337,43	47	141.241,70	56	196.488,30
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		-	1	107,87	3	243,92	4	351,79
III	Administrasi	7	-	8	-	23	-	38	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	1						1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6		5		20		31	-
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan			3		3		6	-
IV	Ketidakefektifan	2	-	-	-	-	-	2	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2						2	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	15	54.909,17	13	479,98	73	141.485,62	101	196.874,77

Lampiran 6

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kepatuhan Perpajakan Perkebunan													
1	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero)	-	-	-	-	12	64.783,26	-	-	11	64.783,26	1	-	-
2	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV (Persero)	2	-	2	-	7	9.950,93	-	-	5	9.950,93	2	-	-
3	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI (Persero)	6	-	6	-	5	11.357,95	-	-	4	11.357,95	1	-	-
4	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	-	-	-	18	12.376,85	-	-	14	12.376,85	4	-	-
5	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero)	-	-	-	-	12	27.681,79	-	-	4	27.681,79	8	-	-
6	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero)	5	-	5	-	13	7.490,69	-	-	7	7.490,69	6	-	-
7	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero)	-	-	-	-	6	7.844,15	-	-	5	7.844,15	1	-	-
8	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	7	-	5	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	Pajak Bendahara Pengeluaran													
1	Kab. Kolaka	4	-	4	-	3	5,56	-	-	1	5,56	2	-	-
2	Kab. Kolaka Utara	5	1	3	1	5	1,40	-	-	1	1,40	4	-	-
3	Kota Baubau	6	-	5	1	5	473,02	1	34,68	2	438,34	2	-	-
	Penerimaan Kepabeanan dan Cukai													
1	Dirjen Bea Cukai	10	-	5	5	6	48.256,37	-	-	5	48.256,37	1	-	-
	Bea Masuk Anti Dumping													
1	KADI, BKF, KPBC	7	2	1	4	7	6.652,80	-	-	1	6.652,80	4	2	-
	Jumlah	52	3	36	13	101	196.874,77	1	34,68	60	196.840,09	38	2	-

Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	13
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	43
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	11
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	22
5	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	13
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		79

Lampiran 8

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara/Daerah	3	1.215,98
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3	1.215,98
II	Kekurangan Penerimaan	26	3.430,22
			USD 872.07
	Jumlah rupiah		11.863,14
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	1	90,11
			USD 111.24
	Jumlah rupiah		1.165,80
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	20	3.022,26
			USD 711.86
	Jumlah rupiah		9.905,95
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	272,70
4	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,00
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	5,15
6	Lain-lain	1	USD 48.97
	Jumlah rupiah		473,54
III	Administrasi	23	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	1	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	9	-
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12	-
IV	Ketidakefektifan	4	-
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	-
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	4.646,20
			USD 872.07
	Jumlah rupiah		13.079,12

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 9

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pendapatan Negara																			
1	Keajaiban RI	42	12,73	23	5	13	5	19	12,73	-	-	1	12,73	15	3	-	-	-	
1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Banten di Serang	19	-	9	4	3	2	10	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-	
2	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 pada Keajaiban Tinggi Jawa Tengah di Semarang	7	12,73	4	-	3	1	3	12,73	-	-	1	13	2	-	-	-	-	
3	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 di Lingkungan Keajaiban Tinggi Sumatera Utara di Medan	11	-	6	-	5	1	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
4	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Keajaiban Tinggi dan Keajaiban Negeri di Lingkungan Keajaiban Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	5	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	Kementerian Luar Negeri	21	2.043,44	11	2	7	2	10	2.043,44	-	-	8	2.043,44	2	-	-	-	351,64	
		-	USD 48.97					-	USD 48.97				USD 48.97						
5	Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KBRI Amman	2	351,64	1	-	1	-	1	351,64	-	-	1	351,64	-	-	-	-	351,64	

Halaman 2 - Lampiran 9

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Cape Town di Afrika Selatan	1	510,98	-	-	-	-	1	510,98	-	-	1	510,98	-	-	-	-	-
7	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 KEBRI Doha di Qatar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Guangzhou di Republik Rakyat Tiongkok	1	139,90	-	-	-	-	1	139,90	-	-	1	139,90	-	-	-	-	-
9	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KJRI Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok	1	428,30	-	-	-	-	1	428,30	-	-	1	428,30	-	-	-	-	-
10	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Houston di Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KEBRI Kopenhagen di Denmark	2	USD 48,97	1	-	1	-	1	USD 48,97	-	-	1	48,97	-	-	-	-	-
12	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KJRI Los Angeles di Amerika Serikat	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KEBRI Untuk Kerjasama Inggris dan Republik Irlandia di London	6	-	5	-	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KEBRI Oslo di Norwegia	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KEBRI Pretoria di Afrika Selatan	4	612,62	-	-	-	-	4	612,62	-	-	3	612,62	1	-	-	-	-
16	Belanja dan PNBPTA 2011 dan 2012 pada KEBRI Stockholm di Swedia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBPTahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real-Time pada KEBRI Bangkok di Thailand	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Belanja dan PNBp TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian SIMKEU Real Time pada KBRI Baghdad di Irak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kementerian Hukum dan HAM	15	53,79	10	2	6	2	5	53,79	-	-	1	53,79	4	-	-	-	-	-
19	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang	3	53,79	2	-	1	1	1	53,79	-	-	1	53,79	-	-	-	-	-	-
21	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBp TA 2010 dan 2011, pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBp TA 2010 & 2011, pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Satker Tertask di Jakarta	8	-	6	1	4	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
23	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi	3	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Banjarmasin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2010 s.d 2012 (semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP TA. 2009 dan 2010 kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi PNBP Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta TA.2010 dan 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Negara/ Daerah	Nilai	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Kementerian Perhubungan	19	1.374,16	8	-	5	3	11	1.374,16	2	653,89	8	720,27	1	-	-	246,56	9,46	
			USD 823,10						USD 823,10				USD 823,10						
32	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011 Pada Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kemenhub di Jakarta	19	1.374,16	8	-	5	3	11	1.374,16	2	653,89	8	720,27	1	-	-	246,56	9,46	
5	Kementerian Tenaga Kerja	25	1.112,69	15	1	7	7	10	1.112,69	1	562,09	7	550,60	1	1	-	-	-	
33	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Trivulan III Tahun 2012	13	350,00	8	-	5	3	5	350,00	-	-	5	350,00	-	-	-	-	-	
34	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Trivulan III Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	762,69	7	1	2	4	5	762,69	1	562,09	2	200,60	1	1	-	-	-	
6	Kepolisian RI	13	49,39	12	3	5	4	1	49,39	-	-	1	49,39	-	-	-	-	-	
35	Pengelolaan Anggaran dan Penerimaan Bukan Pajak TA 2009 s.d. 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi	13	49,39	12	3	5	4	1	49,39	-	-	1	49,39	-	-	-	-	-	
		135	4.646,20	79	13	43	23	56	4.646,20	3	1.215,98	26	3.430,22	23	4	-	246,56	361,10	
			USD 872,07						USD 872,07				USD 872,07						
	Jumlah rupiah	135	13.079,12	79	13	43	23	56	13.079,12	3	1.215,98	26	11.863,14	23	4	-	246,56	361,10	

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 10

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	16	9	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	7	9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	11	1	12
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2	-	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	71	199	270
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	7	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	19	49	68
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	15	20
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	3	6
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	42	124	166
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	52	67
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	42	51
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	9	13
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		102	260	362

Lampiran 11

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
I	Kerugian Daerah	3	332,98	5	950,72	8	1.283,70
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	204,01	5	950,72	7	1.154,73
2	Lain-lain	1	128,97	-	-	1	128,97
II	Potensi Kerugian Daerah	1	1.611,82	7	9.801,24	8	11.413,06
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	7	9.801,24	7	9.801,24
2	Lain-lain	1	1.611,82	-	-	1	1.611,82
III	Kekurangan Penerimaan	23	21.735,89	198	69.047,11	221	90.783,00
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		21.735,89		69.060,39		90.796,28
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	-	-	1	8,39	1	8,39
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	20	15.007,54	168	62.383,29	188	77.390,83
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		15.007,54		62.396,57		77.404,11
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	18	1.266,31	18	1.266,31
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	6.728,35	9	5.136,78	12	11.865,13
5	Lain-lain	-	-	2	252,34	2	252,34
IV	Administrasi	20	-	43	-	63	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	2	-	-	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	-	-	2	-	2	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	13	-	13	-	26	-
4	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	-	28	-	33	-
V	Ketidakefektifan	9	-	5	60,91	14	60,91
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	-	-	5	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	-	5	60,91	9	60,91
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	23.680,69	258	79.859,98	314	103.540,67
					SGD 1,68		SGD 1,68
	Jumlah rupiah		23.680,69		79.873,26		103.553,95

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 12

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pendapatan Daerah																			
1	Prov. Sumatera Selatan	10	1	9	-	5	10.520,74	-	-	-	-	4	10.520,74	1	-	-	-	-	
	1 Kota Palembang																		
2	Prov. Bengkulu																		
1	Pemeriksaan atas Pendapatan PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan Bagi Hasilnya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	7	1	6	-	1	206,77	-	-	-	-	1	206,77	-	-	-	-	-	
3	Prov. Kepulauan Riau	21	-	15	6,00	15	17.786,17	-	-	-	-	9	17.786,17	6	-	-	-	-	
	1 Prov. Kepulauan Riau	9	-	7	2	5	5.601,55	-	-	-	-	4	5.601,55	1	-	-	-	-	
	2 Kab. Bintan	5	-	4	1	5	12.151,97	-	-	-	-	4	12.151,97	1	-	-	-	-	
	3 Kab. Karimun	7	-	4	3	5	32,65	-	-	-	-	1	32,65	4	-	-	-	-	
4	Prov. DKI Jakarta	8	1	5	2	8	2.039,71	-	-	1	1.611,82	4	427,89	3	-	-	-	8,98	
1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	5	-	5	-	7	2.039,71	-	-	1	1.612	4	427,89	2	-	-	-	8,98	
2	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Operasional TA 2011 dan 2012 s.d Semester I pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	Prov. Jawa Barat	72	2	52	18	83	13.253,96	1	361,18	1	878,11	66	12.014,67	8	7	-	361,18	3.941,12	
1	Pemeriksaan PKB-BBNKB pada Dispenda Provinsi Jawa Barat TA 2012 (s.d Agustus)	7	-	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
2	Kab. Bandung	13	-	10	3	9	714,34	-	-	-	-	9	714,34	-	-	-	-	42,00	

Halaman 2 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan												
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		8	1	5	2	7	284,59	-	-	-	-	5	284,59	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	1	3	-	9	5.190,71	1	361,18	1	878,11	5	3.951,42	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,18	
		3	-	1	2	11	2.288,37	-	-	-	-	10	2.288,37	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
		16	-	11	5	12	2.162,29	-	-	-	-	12	2.162,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,84
		6	-	6	6	13	1.423,61	-	-	-	-	11	1.423,61	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,69
		9	-	5	4	6	104,13	-	-	-	-	5	104,13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	-	4	2	11	1.085,92	-	-	-	-	9	1.085,92	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,95
		64	4	54	6	45	14.784,12	1	18,21	1	8.137,76	34	6.628,15	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,96
		21	2	16	3	9	158,82	-	-	-	-	6	158,82	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,59
		12	2	10	-	8	8.357,49	1	18,21	1	8.137,76	5	201,52	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,25
		12	-	10	2	5	1.797,01	-	-	-	-	5	1.797,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	-	8	-	9	3.409,55	-	-	-	-	8	3.409,55	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	-	10	1	14	1.061,25	-	-	-	-	10	1.061,25	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
		10	-	9	1	21	3.148,57	-	-	-	-	16	3.148,57	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,31
1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA 2012 pada Pemerintah Provinsi D.I.Y	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	4	-	3	1	6	278,38	-	-	-	-	5	278,38	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Sleman	3	-	3	-	12	2.870,19	-	-	-	-	11	2.870,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,31
8	Prov. Jawa Timur	20	-	15	5	11	2.668,01	-	-	-	-	7	2.668,01	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kota Blitar	14	-	10	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kota Malang	6	-	5	1	9	2.668,01	-	-	-	-	7	2.668,01	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prov. Banten																									
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten	5	2	3	-	6	71,46	-	-	-	-	4	71,46	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		
10	Prov. Bali	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pendapatan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (PKB dan BBNKB) Tahun Anggaran 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Prov. NTB																	
1	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) Pada Pemprov NTB dan Instansi Terkait Lainnya TA.2012 (Semester 1)	6	-	6	-	4	62,58	1	62,58	-	-	-	-	3	-	-	62,58	-
12	Prov. NTT	34	2	21	11	38	9.085,57	1	50,38	5	785,37	27	8.249,82	5	-	-	3,10	5,18
1	Prov. NTT	9	2	5	2	10	2.294,41	-	-	-	-	7	2.294,41	3	-	-	-	-
2	Kab. Belu	8	-	5	3	9	2.528,29	1	50,38	1	609,69	7	1.868,22	-	-	-	3,10	-
3	Kab. Lembata	9	-	6	3	8	1.513,63	-	-	1	92,64	5	1.420,99	2	-	-	-	-
4	Kab. Sikka	8	-	5	3	11	2.749,24	-	-	3	83,04	8	2.666,20	-	-	-	-	5,18
13	Prov. Kalimantan Barat	21	3	12	6	7	695,21	-	-	-	-	4	695,21	3	-	-	-	-
1	Pendapatan PKB dan BBNKB dengan Menggunakan E-Audit Prov. Kalimantan Barat TA 2012 (s.d Juli 2012)	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Kab. Ketapang	17	1	11	5	6	695,21	-	-	-	-	4	695,21	2	-	-	-	-
14	Prov. Kalimantan Selatan	4	-	3	1	3	769,92	-	-	-	-	2	769,92	1	-	-	-	23,56
1	Kota Banjarmasin																	
15	Prov. Kalimantan Timur																	
1	Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Provinsi Kalimantan Timur TA.2012	9	3	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	Prov. Sulawesi Utara																		
1	Pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (A. 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) Provinsi Sulawesi Utara	7	3	4	-	1	128,97	1	128,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Prov. Sulawesi Selatan																		
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dengan Menggunakan E Audit pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2012 (s.d. Juli 2012)	17	-	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
18	Prov. Sulawesi Tenggara	24	-	22	2	32	3.095,30	-	-	-	-	23	3.034,39	7	2	60,91	-	0,70	
1	Kab. Konawe	5	-	5	-	15	1.887,44	-	-	-	-	12	1.826,53	1	2	60,91	-	-	
2	Kab. Muna	19	-	17	2	17	1.207,86	-	-	-	-	11	1.207,86	6	-	-	-	0,70	
19	Prov. Gorontalo																		
1	Pendapatan PKB dan BBNKB TA 2012 (s.d. Agustus 2012) dengan Menggunakan E Audit pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya	8	2	4	2	3	5.254,64	-	-	-	-	1	5.254,64	-	2	-	-	-	
20	Prov. Maluku Utara	7	1	5	1	16	14.886,37	3	662,38	-	-	10	14.023,99	3	-	-	436,50	-	
1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Provinsi Maluku Utara TA 2011 dan 2012 (Semester I)	1	-	-	1	4	8.020,60	1	141,43	-	-	2	7.879,17	1	-	-	-	-	
2	Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Kota Ternate TA 2011 dan 2012	6	1	5	-	12	6.665,77	2	520,95	-	-	8	6.144,82	2	-	-	436,50	-	

Halaman 5 - Lampiran 12

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas Daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI Jml Kasus	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jml Kasus	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi Jml kasus	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah Nilai	Kekurangan Penerimaan Nilai
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Prov. Papua	6	-	5	1	10	5.282,60	-	-	-	-	9	5.282,60	1	-	-	-	29,09
	1 Kab. Mimika																	
	Total Pemerintahan Provinsi	102	16	71	15	56	23.680,69	3	332,98	1	1.611,82	23	21.735,89	20	9	-	62,58	8,98
	Total Pemerintahan Kabupaten/Kota	260	9	199	52	258	79.859,98	5	950,72	7	9.801,24	198	69.047,11	43	5	60,91	817,92	4.317,92
	Total Rupiah Pemerintah Kabupaten/Kota						SGD 1.68						SGD 1.68					
	Total Rupiah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	362	25	270	67	314	103.553,95	8	1.283,70	8	11.413,06	221	90.796,28	63	14	60,91	880,50	4.326,90

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 13

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	31
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	12
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	76
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	33
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	20
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10
6	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		154

Halaman 1 - Lampiran 14

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara	212	41.057,98
			USD 0.80
			DKK 3.55
	Jumlah rupiah		41.071,81
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	10	8.135,44
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	14	4.983,31
			DKK 3.55
	Jumlah Rupiah		4.989,40
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	48,08
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	8.842,91
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	55	4.446,93
6	Pemahalan harga (Mark up)	10	7.400,88
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	94,12
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	13	1.046,65
9	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	1.766,46
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	1.403,84
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	29	2.855,89
			USD 0.80
	Jumlah Rupiah		2.863,63
12	Lain-lain	1	33,47
II	Potensi Kerugian Negara	14	28.574,43
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11	28.567,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	7,40
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	-
III	Kekurangan Penerimaan	49	13.825,61
			USD 611.05
	Jumlah Rupiah		19.734,46
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	26	9.652,01
			USD 611,05
	Jumlah Rupiah		15.560,86
2	Penerimaan Negara (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	16	3.406,12
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	2	183,27
4	Penerimaan Negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	152,64
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3	431,57
IV	Administrasi	131	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	12	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	56	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	25	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	13	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	-
9	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	3	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
12	Lain-lain	1	-
V	Ketidakhematan	25	9.106,73
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	24	9.106,73
VI	Ketidakefisienan	1	32,97
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	32,97
VII	Ketidakefektifan	26	4.557,43
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	111,68
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	140,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	14	3.293,78
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	392,15
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	619,82
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	458	97.155,15
			USD 611,85
			DKK 3,55
	Jumlah rupiah		103.077,83

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 2 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan						
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Keuangan Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KEBRI Stockholm di Swedia	5	2	1	2	2	5,05	1	5,05	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5,09	-	-	
8	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada Kantor Pusat Kemlu dan KIRI Guangzhou di Jakarta dan BRT	4	1	1	2	4	493,07	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	493,07	-	-	-	
9	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KEBRI Kopenhagen di Denmark	6	3	1	2	3	173,18	2	173,18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KEBRI Doha di Qatar	5	1	4	-	4	12,09	1	12,09	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	9,70	-	-	
11	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KEBRI Amman di Yordania	7	3	4	-	3	12,62	2	12,62	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KEBRI Los Angeles di Amerika Serikat	8	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KEBRI Houston di Amerika Serikat	6	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Simkeu Real Time pada KEBRI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo	5	1	1	3	3	1,18	1	1,18	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-	
15	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KEBRI untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia di London	7	1	4	2	4	14,84	2	14,84	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBP TA 2011 dan 2012 pada KEBRI Cape Town di Afrika Selatan	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/diarah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Keuangan Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi	Ketidakefisienan			Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
17	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBPT TA 2011 dan 2012 pada KBRl Pretoria di Afrika Selatan	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Belanja dan PNBPT TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Internal Berbasis Risiko pada KBRl SMA/SLB Real Time pada KBRl Baghdad di Irak	3	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Pemeriksaan atas Belanja dan PNBPT Tahun Anggaran 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Internal Berbasis Risiko pada KBRl Bangkok di Thailand	4	1	1	2	6	128,71	3	128,71	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	6	1	2	3	114	5.488,40	86	5.134,79	-	-	6	106,08	16	2	48,63	-	-	4	198,90	1.686,52	-	-	9,56	
20	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh	-	-	-	-	11	574,17	9	564,64	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	1	4,53	447,87	-	-	-	
21	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang	1	1	-	-	8	91,74	3	59,64	-	-	1	32,10	4	-	-	-	-	-	-	59,64	-	-	4,81	
22	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBPT TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu	-	-	-	-	9	803,99	9	803,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	
23	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBPT TA. 2010 & 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Satker Terkait di Jakarta	-	-	-	-	7	93,44	4	92,28	-	-	1	1,16	2	-	-	-	-	-	-	56,48	-	-	1,16	
24	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo	-	-	-	-	4	296,71	4	296,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ketidakapatuhan Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi	-	-	-	-	5	148,53	4	106,77	-	-	-	-	-	1	41,76	-	-	-	-	106,84	-	-
26	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Banjarmasin	-	-	-	-	11	280,04	9	280,04	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	58,23	-	-
27	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011 dan 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon	-	-	-	-	5	147,24	5	147,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,19	-	-
28	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2010 s.d 2012 (semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate	-	-	-	-	14	766,62	11	724,78	-	-	1	41,84	2	-	-	-	-	-	-	58,23	-	-
29	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP TA. 2009 dan 2010 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru	1	-	-	1	4	112,00	2	112,00	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pelaksanaan Anggaran dan PNBP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru	-	-	-	-	8	670,94	8	670,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 s.d. 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari	1	-	-	1	5	505,16	5	505,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,94	-	-
32	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi PNBP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta TA. 2010 dan 2011	3	-	2	1	7	227,32	2	204,93	-	-	1	22,39	3	-	-	-	-	1	-	204,94	-	-

Halaman 5 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan						
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Ketidakapatuhan Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
33	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta	-	-	-	-	3	280,98	2	274,11	-	-	-	-	-	1	6,87	-	-	-	-	-	274,11	-	-
34	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2010 dan 2011	-	-	-	-	9	347,50	7	149,54	-	-	1	3,59	-	-	-	-	-	1	194,37	-	137,53	-	3,59
35	Pelaksana Anggaran Kegiatan Belanja Barang Belanja Modal TA. 2009 dan 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta	-	-	-	-	4	142,02	2	142,02	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	142,02	-	-
5	Kementerian Perhubungan	1	1	-	-	22	5.840,91	10	2.477,71	2	1.364,68	2	28,68	2	4	1.281,87	-	-	2	687,97	2	162,42	-	-
36	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2011 dan 2012 di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat	1	1	-	-	16	4.695,98	7	2.187,73	1	532,49	1	5,92	2	3	1.281,87	-	-	-	2	687,97	-	-	-
37	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Sektorsaker Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	-	-	-	-	3	249,91	2	227,15	-	-	1	22,76	-	-	-	-	-	-	-	-	162,42	-	-
38	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Sektorsaker Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah	-	-	-	-	3	895,02	1	62,83	1	832,19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Maibes TNI	4	-	4	-	5	252,72	3	252,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	234,27	-	-	
39	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA. 2010, 2011, dan 2012 pada Demma Maibes TNI serta Instansi Terkait Lainnya	4	-	4	-	5	252,72	3	252,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	234,27	-	-	

Halaman 6 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengikibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Keuangan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakehematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	TNI AD	8		7		6		1	2.567,14	13	909,03	2	166,62	10	965,43	14	5	526,06			20	21	22	1877,3			23	24	419,12
40	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Penganggaran Realisasi Anggaran Tahun 2011 dan 2012 pada UO TNI AD di Jabara, Bandung, Makassar, Gorontalo dan Pontianak	1	722,16	1	202,36	-	-	10	722,16	3	202,36	-	-	3	492,06	3	1	27,74			-	-	-	126,58			-	217,81	
41	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Kodam IV/Diponegoro di Semarang	4		3		1		8	275,45	2	23,67	-	-	3	251,78	3	-	-			-	-	-	236,7			-	201,31	
42	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 pada Kodam IX/Udayana di Bali	-		-		-		11	780,66	6	442,22	2	166,62	2	117,84	-	1	53,98			-	-	-	-			-	-	
43	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 pada Kodiklat TNI AD di Bandung	3		3		-		15	788,87	2	240,78	-	-	2	103,75	8	3	444,34			-	-	-	37,48			-	-	
8	TNI AL	12	1.189,62	6	264,64	4		35	1.189,62	6	264,64	2	270,03	2	211,42	20	1	32,97			4	410,56	4	128,05			-	69,64	
44	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Kobangkalal dan AAL Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012	3	161,02	2	128,05	-		7	161,02	2	128,05	-	-	-	-	3	-	1	32,97		1	-	-	128,05			-	-	
45	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Komando Lintas Laut Militer (Kolamil) serta jajaran Terkait di Jakarta dan Surabaya	1	257,40	1		-		6	257,40	-	-	-	-	-	-	5	-	-			1	257,40	-	-			-	-	
46	Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 (smpai dengan trivulan II 2012) pada Lanamal I Belawan beserta jajarannya di Belawan	4	192,60	1	15,69	2		9	192,60	2	15,69	1	7,40	1	16,35	3	-	-			2	153,16	-	-	-		-	-	-
47	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut	4	578,60	2	120,90	2		13	578,60	2	120,90	1	262,63	1	195,07	9	-	-			-	-	-	-	-		-	69,64	

Halaman 7 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																				
		Total SPI		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap ketentuan Perundang-undangan			Keuangan Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
9	TNI AU	3	8.121,31	2	1.397,90	3	312,75	2	6.108,52	9	302,14	1	260,25	21	49,27	1	1.684,22																							
48	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU serta Dinas terkait	-	1.541,64	-	1.228,89	1	312,75	-	-	4	1.228,89	1	312,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
49	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodiklat) di Jakarta (TP No. 10)	-	471,15	-	169,01	6	169,01	-	-	6	302,14	3	302,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara (DISAEROU) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Jakarta	5	6.108,52	2	6.108,52	3	6.108,52	-	-	7	6.108,52	2	6.108,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Kepolisian RI	4	953,07	2	953,07	1	953,07	4	953,07	7	953,07	4	953,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	Pengelolaan Anggaran dan Penerimaan Bukan Pajak TA 2009 s.d. 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi	4	953,07	2	953,07	1	953,07	4	953,07	7	953,07	4	953,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Kementerian Keuangan	2	4.437,66	2	4.437,66	1	12,04	15	4.437,66	15	4.437,66	1	12,04	2	4.163,85	2	4.163,85	1	32,40	7	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37		
52	Belanja Medial Kementerian Keuangan	2	4.437,66	2	4.437,66	1	12,04	15	4.437,66	15	4.437,66	1	12,04	2	4.163,85	2	4.163,85	1	32,40	7	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37	2	229,37
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	3.212,78	2	1.154,12	1	849,10	8	1.302,23	14	3.910,92	8	1.302,23	1	849,10	1	849,10	3	1.209,56	1	2	772,43	2	772,43	1	668,13	2	1.218,13	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83
53	Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan TA 2010 s.d. 2012	3	3.212,78	2	1.154,12	1	849,10	8	1.302,23	14	3.910,92	8	1.302,23	1	849,10	1	849,10	3	1.209,56	1	2	772,43	2	772,43	1	668,13	2	1.218,13	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83	2	698,83
13	Kementerian Kesehatan	3	979,55	2	779,62	1	59,93	5	779,62	8	979,55	5	779,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana APBN TA 2011 pada Balai Pelatihan Kesehatan (Balpelkes) Batam	3	979,55	2	779,62	1	59,93	5	779,62	8	979,55	5	779,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Ditkes Provinsi Kepulauan Riau	-	2.931,37	-	522,61	-	668,13	3	522,61	6	2.931,37	3	522,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Keketakausahaan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengikibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindaki lanjut dalam proses pemeriksaan											
		Keklemahan Sistem Pengendalian Intern					Keketakausahaan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan					Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan							
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	14	2.323,04	4	1.988,09	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	1	334,95	14,38	-	-
56	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2011 dan 2012 & d Semester II Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta	-	-	-	-	14	2.323,04	4	1.988,09	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	334,95	14,38	-	-
15	PPATK	1	-	1	-	1	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,95	-	-	-
57	Belanja PPAK TA 2011 dan s.d. 30 September 2012	1	-	1	-	1	334,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334,95	-	-	-
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	1	-	30	10.409	10	3.527,75	-	-	9	2.813,43	9	1	3.605,25	-	-	1	462,77	508,07	-	600,19
58	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	1	-	30	10.409,20	10	3.527,75	-	-	9	2.813,43	9	1	3.605,25	-	-	1	462,77	508,07	-	600,19
17	Badan Pertanahan Nasional	13	2	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Legalisasi Aset Perairan dan Wilayah Perairan 2010 dan 2011 khususnya Prima dan Sekunder BPN, Kawasan BPN Prov Jawa Tengah, dan Kawasan BPN Prov Jatim di Jakarta, Semarang, dan Surabaya	13	2	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	-	-	7	905,53	4	786,97	-	-	-	-	1	1	122,56	-	-	1	-	-	-	-
60	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat	-	-	-	-	7	905,53	4	786,97	-	-	-	-	1	1	122,56	-	-	1	-	-	-	-
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	6	1	5	-	37	13.176,64	20	10.886,05	-	-	9	643,90	4	3	1.357,31	-	-	1	289,38	83,83	-	3,55
61	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Triduan III Tahun 2012 pada Badan Nasional Pengelola Kawasan Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	3	1	2	-	23	9.852,94	12	8.185,90	-	-	7	404,64	1	2	973,02	-	-	1	289,38	82,18	-	-

Lampiran 16

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah**

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	8	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	6	7
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	2	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20	123	143
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8	57	65
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	-	4	4
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	41	49
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	-	4	4
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	-	7	7
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	10	14
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7	37	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	8	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	22	26
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	2	2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	5	5
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		28	168	196

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	165	146.363,05	878	298.778,88	1.043	445.141,93
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	3	1.056,42	34	9.341,01	37	10.397,43
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	5	520,95	31	15.233,48	36	15.754,43
3	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	2.285,16	18	14.333,48	19	16.618,64
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	92	23.995,02	354	111.709,14	446	135.704,16
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	29	6.177,94	168	46.361,14	197	52.539,08
6	Pemahalan harga (Mark up)	6	17.681,30	55	11.524,25	61	29.205,55
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	143,67	15	5.232,26	16	5.375,93
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.307,75	45	5.965,49	52	7.273,24
9	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	300,76	15	1.146,07	16	1.446,83
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	1.138,07	57	51.322,78	66	52.460,85
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	91.368,03	66	22.132,96	74	113.500,99
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	1	232,36	1	232,36
13	Lain - lain	3	387,98	19	4.244,46	22	4.632,44
II	Potensi Kerugian Daerah	35	31.519,25	273	120.130,01	308	151.649,26
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	31	20.238,12	246	106.517,34	277	126.755,46
2	Rekaman belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	2.120,74	2	63,97	4	2.184,71
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	250,45	2	250,45
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	1	82,40	1	82,40
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	73,00	1	73,00
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	4	603,80	4	603,80
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	-	-	2	644,50	2	644,50
8	Lain-lain	2	9.160,39	15	11.894,55	17	21.054,94
III	Kekurangan Penerimaan	56	11.711,95	300	45.172,30	356	56.884,25
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	48	7.760,56	257	37.381,12	305	45.141,68
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah	8	3.951,39	39	7.495,92	47	11.447,31
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	2	25,41	2	25,41
4	Lain-lain	-	-	2	269,85	2	269,85

Halaman 2 - Lampiran 17

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
IV	Administrasi	38	-	205	-	243	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	21	-	21	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	15	-	74	-	89	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	10	-	10	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	16	-	65	-	81	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3	-	8	-	11	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	2	-	3	-	5	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	-	-	4	-	4	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-	12	-	14	-
9	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	1	-	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	-	-	1	-	1	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	3	-	3	-
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	-	3	-	3	-
V	Ketidakhematian	21	92.987,43	118	82.369,00	139	175.356,43
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4	9.010,43	3	104,36	7	9.114,79
2	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	11	835,97	11	835,97
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	17	83.977,00	104	81.428,67	121	165.405,67
VI	Ketidakefisienan	-	-	1	4.359,11	1	4.359,11
1	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	-	-	1	4.359,11	1	4.359,11
VII	Ketidakefektifan	26	98.185,53	106	244.432,03	132	342.617,56
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	8	3.229,90	42	28.808,16	50	32.038,06
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	657,82	5	34,50	6	692,32
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	15	25.380,03	30	99.287,18	45	124.667,21
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	189,58	1	189,58
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	68.917,78	27	116.112,61	29	185.030,39
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	1	-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		341	380.767,21	1.881	795.241,33	2.222	1.176.008,54

Halaman 2 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern												Ketidaksihan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Ketidakefektifan				Potensi Kerugian Daerah					
	Jml Kasus		Nilai		Keklemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Keklemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Keklemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaksihan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kerugian Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefisienan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
4	28	Kab. Tanjung Jabung Timur	5	2.741,20	-	-	5	2.741,20	2	468,99	2	1.536,41	1	335,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	29	Kota Jambi	3	395,13	-	-	3	395,13	2	368,26	-	-	1	26,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	30	Kota Sungai Penuh	4	654,68	-	-	4	654,68	4	654,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prov. Sumatera Selatan		10	455,87	1	1	9	455,87	4	82,97	5	372,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	32	Kab. Empat Lawang	4	2.861,51	-	-	4	2.861,51	3	2.486,46	1	375,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	33	Kab. Lahat	5	2.150,99	-	-	5	2.150,99	2	574,34	2	241,56	-	-	-	-	1	1.335,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	34	Kab. Muara Enim	3	868,02	-	-	3	868,02	1	620,34	1	247,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	35	Kab. Musi Rawas	10	1.141,86	-	-	10	1.141,86	4	83,53	5	1.039,72	1	18,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	36	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4	355,97	-	-	4	355,97	2	317,21	1	23,97	1	14,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	37	Kota Prabumulih	5	2.105,86	-	-	5	2.105,86	3	1.111,17	1	957,65	1	37,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prov. Bengkulu		7	555,51	1	1	6	555,51	3	423,73	1	63,97	2	67,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	38	Kab. Bengkulu Selatan	1	311,58	-	-	1	311,58	3	7.995,65	3	2	36,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	39	Kab. Seluma	11	9.311,58	-	-	10	9.311,58	3	7.995,65	3	2	36,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	40	Kota Bengkulu	12	1.746,06	1	1	11	1.746,06	4	1.401,00	1	73,00	4	202,17	1	1	69,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	41	Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Rak. terduga Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	8	1.421,33	3	3	5	1.421,33	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	42	Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Rak. terduga Pemerintah Provinsi Bengkulu Kota	8	3.538,41	2	2	6	3.538,41	1	312,50	-	-	-	-	1	1	537,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Prov. Kepulauan Bangka Belitung		10	1.947,37	1	1	9	1.947,37	1	237,90	4	659,15	1	50,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	43	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10	1.947,37	1	1	9	1.947,37	1	237,90	4	659,15	1	50,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	44	Kabupaten Bangka	9	5.296,45	1	1	8	5.296,45	3	551,09	1	28,03	2	196,78	1	1	4.717,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	45	Kabupaten Tengah	15	764,74	2	2	13	764,74	4	301,38	3	266,58	4	196,78	2	2	74,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	46	Kabupaten Timur	13	2.826,36	-	-	13	2.826,36	7	97,65	2	2.458,67	3	270,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ke Rugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
9	Prov. Kepulauan Riau	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	47	Pengadaan barang dan jasa Belanja Modal dan Belanja Barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan konstruksi TA 2011 dan 2012 Prov. Kep. Riau	19	9.744,33	-	-	-	19	9.744,33	9	1.641,08	5	878,08	3	254,77	1	-	-	-	-	1	6.970,40	895,45	-	-	-	96,11		
2	48	Pengadaan barang dan jasa dari Belanja Modal Barang dan Jasa Terkait Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Kab. Natuna	20	2.678,87	1	-	1	19	2.678,87	13	534,07	1	290,66	4	314,14	-	-	-	-	-	1	1.540,00	-	-	-	-	-		
3	49	Pengadaan barang dan jasa dari belanja modal dan belanja barang dan jasa yang terkait konstruksi TA 2011 dan 2012 Kota Batam	13	221,29	-	-	-	13	221,29	6	77,18	4	81,09	2	63,02	1	-	-	-	-	-	-	21,51	-	-	-	5,69		
4	50	DAK Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 Kab. Kepulauan Anambas	8	1.615,30	2	-	2	6	1.615,30	4	1.454,14	-	-	-	-	1	1	161,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	51	DAK Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 Kota Batam	6	594,18	-	-	-	6	594,18	3	376,11	-	-	-	-	-	2	218,07	-	-	-	1	159,09	-	-	-	-		
10	Prov. DKI Jakarta																												
1	52	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Badan Pengelola Kawasan Objek (BKOP) Terminal DKI Jakarta	4	1.006,51	2	-	2	2	1.006,51	-	-	-	-	-	-	-	1	117,35	-	-	-	1	889,16	-	-	-	-		
2	53	Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	19	6.336,38	1	-	-	18	6.336,38	12	2.281,14	-	-	2	207,75	-	1	384,42	-	-	-	3	3.463,07	1.100,60	-	-	-		
3	54	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta	20	2.340,03	-	-	-	20	2.340,03	11	1.611,76	-	-	6	728,27	3	-	-	-	-	-	-	-	374,40	-	-	139,42		
4	55	Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan 2012	17	6.414,87	1	-	-	16	6.414,87	5	1.304,49	6	2.112,92	5	2.997,46	-	-	-	-	-	-	-	-	1.304,50	155,31	-	23,56		

Halaman 4 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatkan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyisihan aset atau penyerahan ke lembaga lain yang mengakibatkan hilangnya aset atau penyerahan ke lembaga lain dalam proses pemeliharaan							
	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatkan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan		Kelemahan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kerugian Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Ketidakefisienan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Penerimaan	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
56	13	4.377,76	-	-	-	-	13	4.377,76	4	579,55	1	1.556,00	-	-	6	-	-	-	-	2	1.842,21	-	-	-	-	-	-	-
57	22	13.860,42	1	-	-	1	21	13.860,42	10	555,00	-	-	3	86,53	3	3	8.626,01	-	-	2	4.592,88	119,43	-	-	-	-	-	-
58	7	1.639,25	-	-	-	-	7	1.639,25	6	1.639,25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.639,25	-	-	-	-	-	-
59	7	562,79	-	-	-	-	7	562,79	6	415,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	147,73	415,06	-	-	-	-	-	-
60	5	1.172,80	1	-	-	-	4	1.172,80	3	661,95	-	-	-	-	-	1	510,85	-	-	-	-	-	661,95	-	-	-	-	-
61	22	16.862,11	3	-	-	3	19	16.862,11	13	14.607,68	1	1.465,99	3	688,69	1	-	-	-	-	1	99,75	724,64	1.465,99	94,06	-	-	-	-
62	18	14.205,84	3	-	-	3	15	14.205,84	4	2.080,83	2	9.160,39	4	2.790,62	4	1	174,00	-	-	-	-	-	52,21	-	-	-	-	-
63	26	9.261,80	1	-	-	1	25	9.261,80	11	1.310,70	-	-	2	90,02	5	4	220,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	13	1.793,73	-	-	-	-	13	1.793,73	4	571,87	3	790,40	4	122,94	-	1	26,84	-	-	-	3	7.640,70	-	-	-	-	-	-
65	18	78.752,57	-	-	-	-	18	78.752,57	3	883,32	8	3.373,34	4	1.560,51	1	1	115,98	-	-	-	1	72.819,42	-	-	-	-	-	-
66	7	274,86	-	-	-	-	7	274,86	3	145,69	-	-	1	129,17	2	-	-	-	-	-	-	27,77	-	-	-	-	-	-
67	17	1.772,11	1	-	-	1	16	1.772,11	11	1.319,15	2	263,27	2	129,50	1	1	60,19	-	-	-	-	51,80	-	-	-	-	-	-
68	11	1.940,53	1	-	-	1	10	1.940,53	6	1.913,20	-	-	1	15,18	2	1	12,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	12	1.914,18	-	-	-	-	12	1.914,18	7	467,08	-	-	2	185,57	1	-	-	-	-	-	-	115,96	-	-	-	-	-	-
70	20	803,77	-	-	-	-	20	803,77	5	294,67	4	192,84	5	34,94	3	1	6,93	-	-	-	-	274,39	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Ketidakefektifan				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan							
					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
15	Prov. Banten	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1	86 Kab. Serang	7	3.321,10	1	-	1	-	6	3.321,10	2	592,60	2	2.645,95	1	82,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	87 Kab. Tangerang	11	1.322,77	2	-	2	-	9	1.322,77	5	1.163,79	1	156,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	838,88	-	-							
16	Prov. Bali	8	1.851,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	88 Kab. Bangli	8	1.851,42	-	-	-	-	8	1.851,42	5	336,76	1	1.486,87	1	27,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	89 Kab. Buleleng	7	982,89	1	-	1	-	6	982,89	4	657,41	-	1	325,48	1	-	-	-	-	-	-	-	322,90	-	469,68							
3	90 Kab. Jembrana	5	2.378,32	1	-	1	-	4	2.378,32	3	2.250,01	-	1	128,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20							
4	91 Kab. Karangasem	11	1.238,04	4	-	4	-	7	1.238,04	3	1.181,06	1	45,78	1	11,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	92 Kab. Klungkung	13	2.214,49	3	-	3	-	10	2.214,49	4	1.197,27	3	134,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	882,96	-	-							
6	93 Kota Denpasar	22	2.655,63	5	-	5	-	17	2.655,63	3	469,00	3	1.374,69	2	348,00	4	2	274,36	-	-	-	-	189,58	-	-							
7	94 Pengaduan Berimbang dan Tidak Berimbang 2012 (K4 Semester I) Prov. Bali	17	102.160,75	-	-	-	-	17	102.160,75	13	19.471,29	-	-	-	-	-	3	78.585,28	-	-	-	1	4.104,18	-	-							
8	95 Pengaduan Berimbang dan Tidak Berimbang 2012 (K4 Semester I) Prov. Bali	15	5.553,16	-	-	-	-	15	5.553,16	10	4.993,16	1	24,04	2	115,21	1	-	-	-	-	-	1	420,75	-	-							
17	Prov. Nusa Tenggara Barat	8	785,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	96 Belanja Modal Kab. Dompu	8	785,39	-	-	-	-	8	785,39	6	766,88	1	18,51	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	97 Belanja Modal Kab. Lombok Timur	14	1.007,03	-	-	-	-	14	1.007,03	7	589,33	5	400,90	2	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	98 Belanja Modal Kab. Lombok Utara	7	27.356,28	1	-	1	-	6	27.356,28	1	373,04	-	-	2	50,28	1	4,11	-	-	-	1	26.928,85	-	-	-							
4	99 Belanja Modal Kota Bina	11	490,01	3	-	3	-	8	490,01	2	73,68	2	36,28	1	81,20	1	54,65	-	-	-	1	244,20	-	-	0,76							
5	100 Belanja Modal Kota Mataram	4	65,89	-	-	-	-	4	65,89	1	23,49	1	26,72	1	15,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
18	Prov. Nusa Tenggara Timur	29	2.761,22	3	-	3	-	26	2.761,22	4	763,98	4	375,19	4	251,56	8	2	51,62	-	-	-	4	1.318,87	31,94	1,00	13,02						
1	101 Kab. Ende	15	3.458,53	3	-	3	-	12	3.458,53	7	651,09	-	1	42,29	3	-	-	-	-	-	-	1	2.765,15	35,53	1,49							
2	102 Kab. Manggarai	13	2.114,24	3	-	3	-	10	2.114,24	2	182,59	2	100,30	4	16,60	1	-	-	-	-	-	1	1.665,33	4,46	19,56							
3	103 Kab. Sumba Timur	24	1.525,45	2	-	2	-	22	1.525,45	5	655,22	4	371,53	5	386,26	6	1	112,44	-	-	-	1	8,75	180,96	120,25							
4	104 Kab. Sumba Tengah	24	1.525,45	2	-	2	-	22	1.525,45	5	655,22	4	371,53	5	386,26	6	1	112,44	-	-	-	1	8,75	180,96	120,25							
19	Prov. Kalimantan Barat	5	1.388,29	-	-	-	-	5	1.388,29	4	1.325,97	-	1	62,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	105 Prov. Kalimantan Barat	11	1.586,99	1	-	1	-	10	1.586,99	5	928,69	1	22,89	1	2,14	1	-	-	-	-	-	2	633,27	-	-							
2	106 Kab. Kapuas Hulu	9	447,68	-	-	-	-	9	447,68	5	308,96	-	2	93,90	-	-	1	13,14	-	-	-	1	31,68	-	-							
3	107 Kab. Melawi	7	489,05	2	-	2	-	5	489,05	2	480,48	-	-	1	8,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	108 Kab. Sambas	7	489,05	2	-	2	-	5	489,05	2	480,48	-	-	1	8,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Halaman 7 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Keurangan Penerimaan		Administrasi		Kedakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
5	1109	Kab. Sekeloa	3	1.090,91	-	-	5	1.090,91	3	1.064,22	-	-	1	3,72	-	1	21,97	-	-	-	-	59,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1110	Kab. Sintang	11	468,22	-	-	11	468,22	7	468,22	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1111	Kota Singkawang	9	398,96	-	-	9	398,96	4	268,57	-	-	1	21,48	-	2	108,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Prov. Kalimantan Tengah																														
1	112	Belanja Modal TA 2010, 2011 dan 2012 Kabupaten Bario Timur	11	11.422,85	-	-	1	11.422,85	5	1.427,10	2	5.620,12	1	0,90	-	-	1	15,62	1	4.359,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	113	Belanja Modal Kab. Gunung Mas	7	516,55	2	-	-	5	516,55	1	46,72	1	305,98	1	12,35	-	1	151,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	114	Belanja Modal Kab. Kabuas	11	16.157,70	-	-	-	16.157,70	4	1.209,22	1	6.128,68	1	8.745,37	3	1	74,43	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	115	Belanja Modal Kab. Kotawaringin Barat	5	729,47	-	-	-	729,47	1	107,42	1	384,24	1	133,53	-	1	27,38	-	-	-	-	76,90	75,08	185,42	-	-	-	-	-		
5	116	Belanja Modal Kab. Kotawaringin Timur	8	179,71	-	-	-	179,71	2	63,05	2	55,92	1	29,10	-	1	31,64	-	-	-	-	-	23,10	-	-	-	-	-	-	-	
6	117	Belanja Modal Kab. Pulau Pisau	7	1.432,05	-	-	-	1.432,05	1	58,50	2	957,06	1	345,79	2	1	70,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,56	
7	118	Belanja Modal Kota Palangkaraya	6	781,59	-	-	-	781,59	2	638,03	1	7,27	1	68,08	-	1	68,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,33	
21	Prov. Kalimantan Selatan																														
1	119	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Prov. Kalimantan Selatan	10	74.322,32	1	-	-	74.322,32	4	4.437,19	3	5.912,33	1	535,32	-	-	-	-	-	-	-	63.437,48	4.430,10	5.899,24	-	-	-	-	-	420,07	
2	120	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Banjar	10	939,38	1	-	-	939,38	6	864,26	-	-	2	75,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	121	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Hulu Sungai Utara	10	7.968,22	-	-	-	7.968,22	7	6.650,63	1	1.193,40	1	124,19	-	-	-	-	-	-	-	-	10,44	-	-	-	-	-	-	102,85	
4	122	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Tabalong	8	4.754,18	1	-	-	4.754,18	5	4.640,58	1	91,65	1	21,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,14	
5	123	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kab. Tapin	11	6.141,67	-	-	-	6.141,67	10	5.806,12	-	-	1	315,55	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250,21	-	-	-	-	-	-	367,36	

Halaman 8 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatannya Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefisienan										Ketidakefektifan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatannya Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
22	Prov. Kalimantan Timur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	124	Belanja Infrastruktur Daerah Kab. Berau	26	73.145,95	1	-	-	25	73.145,95	11	5.303,28	4	12.413,27	5	1.002,22	1	2	35.460,69	-	-	2	18.966,49	-	560,85	-	-	-
23	Prov. Sulawesi Utara																										
1	125	Belanja Infrastruktur TA.2011 dan Semester I TA.2012 Kab. Bolaang Mongondow	8	504,75	2	-	2	6	504,75	2	81,69	-	-	1	59,95	1	2	363,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	126	Kab. Bolaang Mongondow Timur	16	1.555,18	-	-	-	16	1.555,18	5	247,55	3	810,37	1	275,63	5	2	221,63	-	-	-	-	-	2,54	-	-	-
3	127	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12	2.057,34	2	-	2	10	2.057,34	6	1.419,17	-	-	3	638,17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,71
4	128	Kab. Minahasa Utara	25	2.899,77	1	-	1	24	2.899,77	8	1.910,43	2	97,87	5	336,98	5	2	322,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Prov. Sulawesi Tengah																										
1	129	Belanja Infrastruktur Kab. Buol	5	3.063,40	-	-	-	5	3.063,40	2	2.172,72	2	890,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	152,69	98,76	-	-
2	130	Belanja Infrastruktur Kab. Donggala	4	1.686,03	-	-	-	4	1.686,03	2	1.649,97	1	36,06	-	-	1	-	-	-	-	-	-	630,91	36,06	-	-	-
3	131	Belanja Infrastruktur Kab. Morowali	5	1.113,19	-	-	-	5	1.113,19	3	752,10	1	144,99	1	216,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	132	Belanja Infrastruktur Kab. Parigi Moutong	3	489,56	-	-	-	3	489,56	1	95,26	1	74,87	1	319,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Prov. Sulawesi Selatan																										
1	133	Belanja Modal Infrastruktur Prov. Sulawesi Selatan	13	3.402,80	1	-	1	12	3.402,80	4	1.726,19	1	400,57	4	276,72	-	1	96,71	-	-	-	2	902,61	198,37	-	-	158,47
2	134	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Kab. Barru	12	841,91	1	-	1	11	841,91	7	820,55	1	7,52	2	13,84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	135	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Kab. Bone	12	1.526,88	1	-	1	11	1.526,88	6	1.067,93	-	-	3	458,95	1	-	-	-	-	-	1	-	309,25	-	-	6,63
4	136	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Kab. Enrekang	5	172,88	2	-	2	3	172,88	2	94,94	-	-	1	77,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	137	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Kab. Wajo	9	25.854,04	1	-	1	8	25.854,04	5	25.717,03	1	126,67	1	10,34	-	-	-	-	-	-	1	-	110,87	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan														
	Jml Kasus	Nilai	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Ke Rugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan							
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
Prov. Sulawesi Tenggara																																			
1	22	2.348,33	-	-	-	3	19	2.348,33	9	1.661,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	1.305,72	3	1	-	2	14	1.305,72	4	248,09	3	114,64	1	13,72	4	1	187,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	13	5.885,01	1	1	-	-	12	5.885,01	5	5.475,19	1	393,85	1	15,97	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prov. Gorontalo																																			
1	12	4.150,28	-	-	-	-	12	4.150,28	3	150,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	24	4.285,36	1	-	-	1	23	4.285,36	13	616,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	13	1.395,93	3	1	-	-	10	1.395,93	5	944,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	11	3.165,52	1	-	-	-	10	3.165,52	7	668,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	1.650,34	-	-	-	-	5	1.650,34	2	133,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	4.697,18	3	-	-	3	7	4.697,18	3	790,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	17	1.506,16	-	-	-	-	17	1.506,16	7	1.256,55	4	194,47	4	55,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	23	9.754,65	-	-	-	-	23	9.754,65	14	4.218,49	3	61,89	5	57,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prov. Sulawesi Barat																																			
1	9	1.005,64	2	1	-	1	7	1.005,64	4	581,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	5.134,88	9	-	-	7	2	5.134,88	4	1.514,75	1	722,00	1	269,83	1	1	723,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	10	164,95	4	1	-	3	6	164,95	2	23,01	1	134,05	1	7,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prov. Maluku																																			
1	27	5.600,23	3	-	-	2	1	5.600,23	11	3.496,10	2	1.431,26	7	600,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	28	8.429,45	2	-	-	2	26	8.429,45	13	3.568,53	1	165,28	8	4.695,64	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	28	3.030,37	2	-	-	-	26	3.030,37	22	2.900,18	1	82,40	2	47,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 10 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatkan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatkan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kerugian Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah				
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
30	Prov. Maluku Utara	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	155 Kab. Halmahera Barat	23	6.905,35	1	-	-	-	-	22	6.905,35	12	4.931,11	3	300,88	3	276,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	156 Kab. Halmahera Tengah	13	2.325,11	-	-	-	-	13	2.325,11	7	1.197,46	6	1.127,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	-	
3	157 Kab. Halmahera Timur	15	1.251,92	-	-	-	-	15	1.251,92	9	777,64	3	303,02	3	171,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	158 Kab. Halmahera Utara	25	15.776,36	1	-	1	-	24	15.776,36	4	545,10	13	12.686,80	7	2.544,46	-	-	-	-	-	-	-	-	12,61	-	1.035,42	
5	159 Kab. Kepulauan Sula	27	6.331,28	-	-	-	-	27	6.331,28	8	1.847,52	12	4.151,56	6	332,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	160 Kab. Pulau Morotai	36	3.943,93	-	-	-	-	36	3.943,93	17	2.958,59	10	2	480,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,34	
7	161 Kota Tidore Kepulauan	30	4.317,04	-	-	-	-	30	4.317,04	17	869,68	6	66,64	3	305,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,45	
8	162 Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 Prov. Maluku Utara	34	6.660,97	1	-	1	-	-	33	6.660,97	20	5.882,92	1	166,02	11	612,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	163 Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 Kota Ternate	4	636,30	-	-	-	-	-	4	636,30	2	110,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	525,43	36,05	-	
10	164 Belanja Modal Kab. Kepulauan Sula	40	51.090,17	2	-	2	-	-	38	51.090,17	18	45.864,01	3	3.009,43	5	2.416,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Prov. Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	165 Kab. Boven Digoel	13	9.847,54	-	-	-	-	-	13	9.847,54	6	3.663,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	166 Kab. Jayawijaya	17	6.193,54	1	-	1	-	16	6.193,54	7	1.836,71	3	2.875,27	3	723,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	167 Kab. Keerom	25	16.158,68	3	-	2	-	22	16.158,68	12	5.832,73	1	253,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	168 Kab. Mamberamo Raya	17	9.514,25	1	-	1	-	16	9.514,25	9	7.353,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	169 Kab. Mappi	17	9.862,73	1	-	1	-	16	9.862,73	9	4.209,68	1	197,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	170 Kab. Nabire	17	16.880,01	2	-	1	-	15	16.880,01	6	5.795,35	2	7.805,81	1	364,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	171 Kab. Supiori	23	5.505,03	-	-	-	-	23	5.505,03	12	2.164,45	2	644,50	5	654,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	172 Kab. Waropen	14	13.769,21	-	-	-	-	14	13.769,21	11	11.838,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	173 Kab. Yahukimo	17	5.100,67	-	-	-	-	17	5.100,67	10	3.898,63	1	60,61	2	358,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Prov. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	174 Prov. Papua Barat	11	84.753,58	-	-	-	-	-	11	84.753,58	6	81.394,57	2	1.991,52	3	1.367,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	175 Kab. Fakfak	5	5.738,25	-	-	-	-	5	5.738,25	3	1.707,18	2	4.031,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	176 Kab. Kaimana	9	3.365,68	-	-	-	-	9	3.365,68	4	918,45	2	1.655,32	3	1.281,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	177 Kab. Manokwari	6	2.023,76	-	-	-	-	6	2.023,76	5	1.989,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	178 Kab. Maybrat	13	5.588,18	-	-	-	-	13	5.588,18	9	2.967,84	3	2.352,46	1	267,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	179 Kab. Raja Ampat	6	444,25	-	-	-	-	6	444,25	5	198,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	180 Kab. Sorong	8	10.613,48	1	-	-	-	7	10.613,48	4	299,40	2	10.073,20	1	240,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	181 Kab. Sorong Selatan	7	1.825,72	-	-	-	-	7	1.825,72	3	1.541,53	1	45,21	3	438,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	182 Kab. Tambora	7	3.847,76	-	-	-	-	7	3.847,76	4	3.289,68	1	214,86	2	343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	183 Kab. Teluk Bintuni	6	6.871,96	-	-	-	-	6	6.871,96	3	6.169,92	1	159,82	2	542,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 18

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/desa/di atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Kelemahan Sistem Pengendalian Eksternal					Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	

Lampiran 19

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset**

No	Kelompok	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	BUMN	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	29	13	124	7	173
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	22	7	108	5	142
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	10	-	15
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	3	3	2	10
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	3	-	3	-	6
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	3	39	11	82
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	-	4	-	6
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	5	-	-	-	5
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	-	4	-	7
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	3	27	5	53
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	2	6	8
6	Lain-lain	1	-	2	-	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	4	36	8	56
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	4	28	4	42
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-	8	4	13
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	-	-	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		66	20	199	26	311

Halaman 1 - Lampiran 20

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:											
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	7	374,56	4	40.582,33	20	9.535,45	3	11.542,63	34	62.034,97
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	151,33	-	-	-	-	-	-	2	151,33
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	3,08	-	-	1	269,39	1	9.324,68	4	9.597,15
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	67,75	-	-	-	-	2	2.217,95	3	2.285,70
5	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan	-	-	2	11.877,98	5	4.411,97	-	-	7	16.289,95
6	Lain-lain	2	152,40	2	28.704,35	13	4.854,09	-	-	17	33.710,84
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	12	114.732,00	11	16.818,03	33	49.270,73	-	-	56	180.820,76
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	1	115,21	-	-	1	115,21
2	Aset dikuasai pihak lain	8	80.266,09	7	5.805,40	15	9.008,27	-	-	30	95.079,76
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	-	-	1	163,15	-	-	1	163,15
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	-	3	10.586,94	14	39.455,95	-	-	20	50.042,89
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	34.465,91	-	-	1	275,77	-	-	2	34.741,68
6	Lain-lain	-	-	1	425,69	1	252,38	-	-	2	678,07
III	Kekurangan Penerimaan	3	6.880,38	1	12,50	15	8.162,37	6	6.299,59	25	21.354,84
									USD 306,67		USD 306,67
	Jumlah Rupiah		6.880,38		12,50		8.162,37		9.265,09		24.320,34
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	1	79,50	-	-	2	40,39	2	1.414,68	5	1.534,57
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	2	6.800,88	1	12,50	13	8.121,98	2	4.753,01	18	19.688,37
									USD 306,67		USD 306,67
	Jumlah Rupiah		6.800,88		12,50		8.121,98		7.718,51		22.653,87
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	-	-	-	-	-	-	2	131,90	2	131,90
IV	Administrasi	36	-	40	-	203	-	11	-	290	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	-	-	6	-	2	-	8	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah)	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan per- UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	27	-	26	-	151	-	6	-	210	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehumanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	4	-	2	-	1	-	7	-

Halaman 2 - Lampiran 20

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		BUMN		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyetoran penerimaan negara/ daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	6	-	8	-	37	-	2	-	53	-
10	Lain-lain	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
V	Ketidakhematan	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	-	-	1	-	3	415,25	1	2.473,31	5	2.888,56
VI	Ketidakefektifan	2	1.383,33	5	3.952,97	21	129.042,77	-	-	28	134.379,07
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.383,33	2	3.952,97	15	129.042,77	-	-	19	134.379,07
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		60	123.370,27	62	61.365,83	295	196.426,57	21	20.315,53	438	401.478,20
									USD 306,67		USD 306,67
Jumlah Rupiah			123.370,27		61.365,83		196.426,57		23.281,03		404.443,70

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah di tindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Kendakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21				
Pemerintah Pusat																									
1	1	5	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	6	3	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	9	4	4	1	10	87.044,97	-	-	2	80.266,09	1	6.778,88	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	8	4	4	-	8	79,50	-	-	2	-	1	79,50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	9	5	4	-	4	34.465,91	-	-	3	34.465,91	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	9	5	1	3	5	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Sistem Pengendalian Intern					Potensi Kerugian Negara/ Daerah					Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan						
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	Administrasi	Ketidakhormatan	Ketidakefektifan	Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan						
Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Pengelolaan Aset dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012 Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	14	3	9	2	24	1.757,22	6	351,89	3	-	1	22,00	12	-	-	2	1.383,33	90,44	-
8	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	3	1	2	3	22,67	1	22,67	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah I		66	29	29	8	60	123.370,27	7	374,56	12	114.732,00	3	6.880,38	36	-	-	2	1.383,33	50,44	-
Pemerintah Daerah																				
Provinsi Aceh																				
1	Pemeriksaan Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	2	-	-	-	2	311,15	-	-	-	-	1	311,15	1	-	-	-	-	-	311,15
2	Pemantauan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru	17	3	11	3	28	10.861,47	1	4.000,00	4	275,77	5	6.454,95	14	1	130,75	3	-	4.000,00	-
3	Pengelolaan Aset Pemerintah Prov. Sumatera Selatan	5	3	2	-	10	3.466,66	-	-	3	-	-	-	6	-	-	1	3.466,66	-	-
4	Provinsi Bengkulu	10	9	-	1	9	66.126,73	-	-	2	1.673,56	-	-	6	-	-	1	64.453,17	-	-
5	Provinsi Jawa Tengah	9	7	1	1	5	2.103,17	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2.103,17	-	-
6	Manajemen Aset Tetap Kab Pemalang	6	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kendakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah difinalkan lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Sistem Pengendalian Intern					Kendakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan					Kerugian Negara/ Daerah	Nilai							
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Manajemen Aset pada Kabupaten Sukoharjo	8	4	3	1	7	297,27	1	106,93	-	-	1	190,34	3	-	-	2	-	-	-
6	Provinsi DIY																			
8	Manajemen Aset TA 2012 (s.d. 30 Juni 2012 (s.d. 30 Juni)) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	6	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
7	Provinsi Jawa Timur																			
9	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Malang per 30 Juni 2012	12	8	1	3	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
10	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pasuruan	8	7	1	-	9	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
11	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pasuruan per 30 Juni 2012	10	8	-	2	6	66,34	2	66,34	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
12	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Daerah Per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	8	5	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
13	Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Agustus 2012	2	-	1	1	10	371,81	1	-	2	367,59	1	4,22	5	-	-	1	-	-	-
14	Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Madureh per 31 Oktober 2012	3	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
8	Provinsi Kalimantan Barat																			
15	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pontianak	14	6	6	2	12	118,90	1	118,90	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidaktahuan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Sistem Pengendalian Intern					Potensi Kerugian Negara/ Daerah					Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Negara/ Daerah						
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	Administrasi	Kekadakhematan	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kuba Raya	13	10	-	3	21	1.496,56	1	-	2	1.467,85	1	28,71	17	-	-	-	-	-	-
17	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Landak	4	4	-	-	15	32,50	1	32,50	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
9	Provinsi Kalimantan Tengah																			
18	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Katingan	3	3	-	-	7	15,00	1	15,00	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
19	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur	7	5	-	2	11	31,04	1	31,04	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
20	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara	3	3	-	-	18	2.563,22	1	48,68	3	2.085,56	1	11,68	10	1	265,00	2	151,30	-	-
10	Provinsi Kalimantan Selatan																			
21	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kota Banjarbaru TA. 2008 sd s.m.t. 1 TA. 2012	7	7	-	-	16	16.795,85	1	16,20	4	16.384,39	1	17,28	9	-	-	1	377,98	-	-
11	Provinsi Sulawesi Utara																			
22	Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	8	4	-	4	19	12,50	-	-	2	-	1	12,50	13	1	-	2	-	-	-
12	Provinsi Sulawesi Tengah																			
23	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah	2	1	1	-	8	16.225,89	3	12.046,25	3	4.179,64	-	-	2	-	-	-	-	-	-
24	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Kabupaten Poso	4	1	1	2	12	9.306,92	3	463,07	3	6.399,91	1	1.054,50	4	-	-	-	1	1.389,44	-
25	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 Pada Pemerintahan Kabupaten Banggai	7	4	3	-	17	12.545,43	1	36,55	4	2.536,05	-	-	11	-	-	-	1	9.972,83	-

Halaman 5 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kekadapatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah difinalkan lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Sistem Pengendalian Intern					Kekadapatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan					Kerugian Negara/ Daerah	Nilai								
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
13	Provinsi Sulawesi Selatan																				
26	Pengelolaan Aset Kabupaten Bantaeng	8	5	2	1	17	80,31	1	20,31	1	-	1	60,00	13	-	-	1	-	-	60,00	
14	Provinsi Sulawesi Barat																				
27	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3	3	-	-	15	13.124,70	-	-	3	12.638,39	-	-	11	-	-	1	486,31	-	-	
15	Provinsi Maluku																				
28	Penyerahan Modal, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Maluku	2	2	-	-	10	28.536,08	1	28.536,08	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
16	Provinsi Maluku Utara																				
29	Pengelolaan Aset Tetap TA 2011 dan 2012 (Smc.) Kota Temate	5	1	2	2	14	24.821,28	1	90,00	3	16.314,84	1	4,54	8	-	-	1	8.411,90	-	-	
30	Pengelolaan Kas dan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	7	2	2	3	20	4.533,43	2	4.489,93	1	-	1	25,00	15	1	15,50	-	-	-	-	
17	Provinsi Papua																				
31	Manajemen Aset Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2012	10	3	3	4	5	546,90	-	-	1	546,90	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
32	Manajemen Aset Kabupaten Kepulauan Yapen	6	4	-	2	9	43.401,29	-	-	1	1.218,31	-	-	7	-	-	1	42.182,98	-	-	
Jumlah II		219	137	42	40	357	257.792,40	24	50.117,78	44	66.088,76	16	8.174,87	243	4	415,25	26	132.995,74	4.000,00	371,15	
1	BUMN																				
1	Pelaksanaan Pengelolaan Aset (Asset Management) pada PT Pertamina	13	1	9	3	6	4.753,01	-	-	-	-	2	4.753,01	4	-	-	-	-	-	-	
							USD 306,67						USD 306,67								

Halaman 6 - Lampiran 21

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidapkpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau pengotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Sistem Pengendalian Intern					Potensi Kerugian Negara/ Daerah					Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Negara/ Daerah						
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Total	Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	Administrasi	Ketidakhormatan	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Manajemen Aset PT Timah (Persero) Tbk	5	3	-	2	5	10.358,13	1	9.324,68	-	-	1	1.033,45	3	-	-	-	-	-	-
3	Manajemen Aset PT Antam (Persero) Tbk	8	3	2	3	10	5.204,39	2	2.217,95	-	-	3	513,13	4	1	2.473,31	-	-	-	-
	Jumlah III	26	7	11	8	21	20.315,53	3	11.542,63	-	-	6	6.299,59	11	1	2.473,31	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah						USD 306,67		11.542,63				9.265,09			2.473,31				
	Total (I + II + III)	311	173	82	56	438	401.478,20	34	62.034,97	56	180.820,76	25	21.354,84	290	5	2.888,56	28	134.379,07	4.050,44	371,15
	Jumlah Rupiah						USD 306,67		62.034,97		180.820,76		24.320,34			2.888,56		134.379,07	4.050,44	371,15
	Pemerintah Provinsi	20	13	3	4	62	61.365,83	4	40.882,33	11	16.818,03	1	12,50	40	1	-	5	3.952,97	-	-
	Pemerintah Kabupaten/Kota	199	124	39	36	295	196.426,57	20	9.535,45	33	49.270,73	15	8.162,37	203	3	415,25	21	129.042,77	4.000,00	371,15

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 22

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		11

Lampiran 23

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jml Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kekurangan Penerimaan	50	USD 37,864.67
			6.338,53
	Jumlah Rupiah		372.489,89
1	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	48	USD 37,864.67
		2	6.338,53
	Jumlah Rupiah		372.489,89
II	Administrasi	3	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		53	USD 37,864.67
			6.338,53
Jumlah Rupiah			372.489,89

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 24

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kekurangan Penerimaan		Administrasi						
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	KKKS Job Pertamina Petrochina Salawati	1	-	-	1	6	USD 1,826.64	6	USD 1,826.64	6	USD 1,826.64	6	USD 1,826.64	6	USD 1,826.64					
2	KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ	2	-	2	-	8	USD 1,439.60	8	USD 1,439.60	8	USD 1,439.60	8	USD 1,439.60	8	USD 1,439.60					
		-	-	-	-	1	6.325,77	1	6.325,77	1	6.325,77	1	6.325,77	1	6.325,77					
3	KKKS PT Pertamina EP	6	-	5	1	5	USD 2,992.03	5	USD 2,992.03	5	USD 2,992.03	5	USD 2,992.03	5	USD 2,992.03					
4	KKKS Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	-	-	-	-	6	USD 1,304.99	6	USD 1,304.99	6	USD 1,304.99	6	USD 1,304.99	6	USD 1,304.99					
		-	-	-	-	1	12,76	1	12,76	1	12,76	1	12,76	1	12,76					
5	KKKS Medco E&P Indonesia	-	-	-	-	6	USD 518.20	6	USD 518.20	6	USD 518.20	6	USD 518.20	6	USD 518.20					
6	KKKS Mobil Cepu Ltd.	1	-	-	1	13	USD 29,747.10	13	USD 29,747.10	13	USD 29,747.10	12	USD 29,747.10	12	USD 29,747.10					1
7	KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	1	-	-	1	7	USD 36.11	7	USD 36.11	7	USD 36.11	5	USD 36.11	5	USD 36.11					2
		11	-	7	4	53	USD 37,864.67	53	USD 37,864.67	53	USD 37,864.67	50	USD 37,864.67	50	USD 37,864.67					3
	Jumlah						6.338,53		6.338,53		6.338,53		6.338,53		6.338,53					
	Jumlah Rupiah						372.489,89		372.489,89		372.489,89		372.489,89		372.489,89					

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 25

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	32
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	26
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4
3	entitas terlambat menyampaikan laporan	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8
2	mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	22
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ belanja	34
6	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	174
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	30
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	136
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		275

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara/Perusahaan	10	7.501,20
			USD 58.00
	Jumlah rupiah		8.062,06
1	Kekurangan volume pekerjaan	5	301,77
2	Pemahalan harga (Mark up)	1	USD 58.00
	Jumlah rupiah		560,86
3	penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	6.274,41
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	304,52
5	Lain-lain	1	620,50
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	22	734.930,68
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian / seluruhnya	2	38.439,57
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	17	329.240,22
3	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	281,49
4	Lain-lain	2	366.969,40
III	Kekurangan Penerimaan	17	202.675,80
			USD 1,666.68
	Jumlah rupiah		218.792,60
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/perusahaan	3	1.619,67
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/perusahaan	12	146.725,80
			USD 1,666.68
	Jumlah rupiah		162.842,60
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/perusahaan	2	54.330,33
IV	Administrasi	121	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	7	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Perusahaan	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	98	-
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5	-
6	Penyetoran penerimaan negara/perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
10	Lain-lain	1	-

Halaman 2 - Lampiran 26

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	9	7.339,46
1	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	447,88
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	7	6.891,58
			-
VI	Ketidakefektifan	34	130.843,37
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	118.845,07
2	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	885,20
3	pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	11.113,10
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	21	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		213	1.083.290,51
			USD 1,724.68
	Jumlah dalam Rupiah *		1.099.968,17

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 27

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kelemahan Negara/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kedakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Perusahaan		Kerugian Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	PT Tugu Pratama Indonesia dan Tugu Insurance Company Limited	7	1	-	6	5	81.741,51	-	-	3	81.741,51	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Beban Kontrak pada PT. Hutama Karya (Persero)	9	2	4	3	7	154.943,42	-	-	4	18.454,03	3	136.489,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pengelolaan Deposito Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (Persero) (PT BTDC)	1	-	-	1	2	6.110,15	1	6.110,15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PT Dok dan Pelabuhan Surabaya (Persero)	17	3	6	8	10	36.883,54	2	620,50	1	35.063,04	1	1.200,00	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	11	1	5	5	14	6.079,24	-	USD 58,00	-	-	3	924,49	6	4	5.154,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	18	4	11	3	10	120.784,55	-	-	-	-	3	8.317,92	2	-	-	5	112.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dan Penjualan Komoditas Perkebunan pada PT KPBN	12	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PT Inihutani III (Persero)	5	1	3	1	3	180,61	1	164,26	-	-	1	16,35	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Perum Perhutani	4	2	2	-	11	80.069,76	4	235,51	4	77.902,43	2	718,58	-	-	1	1.213,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya Pada PT Mega Eltra	4	1	1	2	6	6.246,04	-	-	2	4.425,90	1	284,60	1	1	650,34	1	885,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Penyelenggaraan Program Santunan dan Tabung Hari Tua, Dana pensiun, Biaya Operasional & Belanja Modal serta PKBL PT ASABRI (Persero)	14	6	2	6	15	430.252,96	1	304,52	4	372.808,91	2	54.330,33	5	1	-	2	2.809,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 27

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan terhadap Perimbangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Pengelolaan Kredit Pada PT Bank BRI (Persero) Tbk	120	8	7	105	108	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	14	-	-	-
13	Pengelolaan Kredit Pada PT Bank BTN (Persero) Tbk	26	1	8	17	11	83.385,55	-	-	1	83.385,55	-	-	5	-	-	5	-	-	-
14	Pelaksanaan Program pengelolaan barang/jasa, pengelolaan biaya operasional, dan PKBL pada PT Askes (Persero)	19	2	6	11	9	49.331,98	1	66,26	1	33.868,11	1	394,14	2	2	321,13	2	14.682,34	66,27	335,15
15	Pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi dan pengelolaan PKBL Pada PT Sucofindo (Persero)	8	-	5	3	2	27.281,20	-	-	2	27.281,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		275	32	69	174	213	1.083.290,51	10	7.501,20	22	734.930,68	17	202.675,80	121	9	7.339,46	34	130.843,37	66,27	335,15
Jumlah Rupiah							USD 1.724,68		USD 58,00			USD 1.666,68								
							1.099.966,17		8.062,06				218.792,60							

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 28

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

No	Kelompok	BPR/BPD	PDAM	RSUD	BUMD Lainnya	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	7	2	20	44
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	2	1	10	19
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	-	6	11
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	-	-	1	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7	2	1	2	12
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	-	-	-	1	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	56	28	6	38	128
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	3	-	6	14
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	-	1	3	6
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	14	6	3	9	32
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	-	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9	13	2	14	38
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	25	5	-	6	36
7	Lain-lain	-	1	-	-	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	67	21	2	41	131
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	27	12	2	26	67
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	36	8	-	9	53
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	-	-	1	1
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	-	3	4
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	3	1	-	2	6
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		138	56	10	99	303

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>											
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	35	169.147,64	21	1.973,59	1	254,10	10	2.160,61	67	173.535,94
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	237,44	2	58,75	1	254,10	-	-	7	550,29
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	12,86	2	47,71	-	-	2	87,02	6	147,59
3	Pemahalan harga (Mark up)	-	-	1	17,87	-	-	-	-	1	17,87
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	5	241,20	-	-	2	215,77	7	456,97
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	4,05	2	191,97	-	-	-	-	3	196,02
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	131,81	3	325,30	-	-	-	-	6	457,11
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	4.081,60	-	-	-	-	-	-	3	4.081,60
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6	1.739,16	5	894,34	-	-	4	1.374,40	15	4.007,90
9	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	14	162.373,35	1	196,45	-	-	2	483,42	17	163.053,22
10	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1	367,37	-	-	-	-	-	-	1	367,37
11	Lain-lain	1	200,00	-	-	-	-	-	-	1	200,00
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	363.492,82	6	3.637,16	1	140,83	13	4.905,80	52	372.176,61
			USD 9.530,27		-		-		-		USD 9.530,27
	Jumlah Rupiah		455.650,53		3.637,16		140,83		4.905,80		464.334,32
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	59,02	1	35,75	-	-	-	-	2	94,77
2	Aset dikuasai pihak lain	-	-	1	-	-	-	2	93,50	3	93,50
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	-	-	1	140,83	-	-	1	140,83
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3	1.700,00	-	-	-	-	-	-	3	1.700,00
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
6	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	28	361.733,80	4	3.601,41	-	-	6	4.222,47	38	369.557,68
			USD 9.530,27		-		-		-		USD 9.530,27
	Jumlah Rupiah		453.891,51		-		-		-		453.891,51
7	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	1	523,31	1	523,31
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1	66,52	1	66,52
III	Kekurangan Penerimaan	18	4.676,87	8	352,37	6	8.578,91	31	151.828,89	63	165.437,04
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah atau perusahaan	5	899,75	2	171,80	1	288,13	1	63,43	9	1.423,11
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah atau perusahaan	12	3.773,84	3	37,00	4	3.449,22	30	151.765,46	49	159.025,52
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	-	-	-	-	1	4.841,56	-	-	1	4.841,56
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,28	3	143,57	-	-	-	-	4	146,85
IV	Administrasi	32	-	22	-	4	-	35	-	93	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-	2	-	-	-	2	-	5	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-	6	-	-	-	5	-	13	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	2	-	1	-	-	-	4	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3	-	2	-	-	-	1	-	6	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	2	-	3	-	-	-	4	-	9	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	19	-	3	-	1	-	16	-	39	-

Halaman 2 - Lampiran 29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BPR/BPD		PDAM		RSUD		BUMD Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
8	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		-		1		2	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-		2		1		4	
10	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-		-		-		3		3	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		2		-		2		5	
12	Lain-lain	-		2		-		-		2	
V	Ketidakhematan	11	19.894,54	7	7.204,97	1	166,34	3	178,39	22	27.444,24
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	25,80	1	43,12	-	-	-	-	2	68,92
2	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	10	19.868,74	6	7.161,85	1	166,34	3	178,39	20	27.375,32
VI	Ketidakefektifan	10	347.418,60	7	185,84	1	22.206,25	4	1.215,54	22	371.026,23
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	1	5,87	2	185,84	-	-	1	1.215,54	4	1.407,25
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	1.694,36	1	-	-	-	-	-	3	1.694,36
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	1	22.206,25	1	-	2	22.206,25
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	317.962,75	-	-	-	-	1	-	5	317.962,75
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	27.755,62	3	-	-	-	-	-	5	27.755,62
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	138	904.630,47	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.109.620,06
			USD 9,530.27		-		-		-		USD 9,530.27
	Jumlah Rupiah	138	996.788,18	71	13.353,93	14	31.346,43	96	160.289,23	319	1.201.777,77

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BPR/BPD, PDAM, RSUD, dan BUMD Lainnya

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	BPR	138	15	56	67	138	904.630,47 USD 9.530,27	35	169.147,64	32	363.492,82 USD 9.530,27	18	4.676,87	32	11	19.894,54	10	347.418,60	4,05	46.768,90	532,64
	Prov. Sumatera Utara																				
1	Operasional PT Bank Sumut TB 2011 dan Smt. I 2012	1	-	-	1	10	39.995,41	2	1.716,13	5	38.209,98	-	-	2	1	69,30	-	-	-	-	-
	Prov. Riau																				
2	Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2010, 2011, dan Tw. I 2012 di Pekanbaru	10	1	5	4	25	431.234,87	13	160.576,55	-	-	2	3.026,71	6	-	-	4	267.631,61	-	-	-
	Prov. Sumatera Selatan																				
3	Operasional Bank TB 2011 dan 2012 pada BPR Sumsel di Palembang	15	1	1	13	7	264,94	2	46,37	1	59,02	2	113,43	1	1	46,12	-	-	-	-	-
	Prov. Kep. Riau																				
4	Kegiatan Operasional PD BPR Bestari Tanjungpinang TB 2011 dan 2012 di Tanjungpinang	21	2	5	14	2	120,33	2	120,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prov. DKI Jakarta																				
5	Pendapatan dan Biaya pada PT Bank DKI TB 2010 dan 2011 di Jakarta	4	1	1	2	5	58.180,48	1	166,17	4	58.014,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prov. Jawa Barat																				
6	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Kredit, dan Kegiatan Investasi Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 Pada PT BPD Jabar dan Banten, Tbk di Bandung	3	-	3	-	22	357.796,88	-	-	12	257.984,00	2	518,61	2	4	19.513,15	2	79.781,12	-	46.768,90	518,61
							USD 9.530,27				USD 9.530,27										

Halaman 3 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Kendakpatuhan			Kerugian Negara	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	Prov. Kep. Riau																						
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri TB 2011 dan 2012 (s.d. Smrt) di Tanjungpinang	13	1	6	6	3	86,75	1	65,76	-	-	2	20,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Prov. Bali																						
3	Operasional PDAM Tirta Mangrana Kabupaten Badung Tahun 2011 dan 2012	4	-	2	2	14	624,71	5	279,01	1	35,75	2	266,83	4	1	43,12	1	-	279,01	33,50	266,83		
4	Operasional PDAM Kab. Tabanan Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Juni 2012)	12	2	5	5	12	3.090,88	1	49,22	-	-	1	37,03	6	3	3.004,63	1	-	-	-	-		
4	Prov. Sulawesi Selatan																						
5	Operasional PDAM Kota Palopo Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012)	8	-	5	3	14	2.416,63	9	925,62	1	1.305,17	-	-	2	-	-	2	185,84	485,37	-	-		
5	Prov. Sulawesi Tenggara																						
6	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Buton Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)	7	1	5	1	18	5.985,43	5	653,98	3	2.213,85	2	22,35	6	1	3.095,25	1	-	-	-	-		
1	RSUD	10	2	6	2	14	31.346,43	1	254,10	1	140,83	6	8.578,91	4	1	166,34	1	22.206,25	-	-	-		
1	Prov. Jawa Timur																						
1	Operasional RSUD RA Basoeni Mojokerto TA 2011 dan 2012 (Tw. III) di Mojokerto	3	1	2	-	2	49,91	-	-	-	-	1	49,91	1	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 5 - Lampiran 30

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Kekurangan Negara		Potensi Kerugian		
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus
1	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	Pendapatan dan Biaya TB 2011 dan Semester I Tahun 2012 Pada PD Pasar Bernartabat Kota Bandung di Bandung	16	3	9	4	17	6.985,13	1	73,08	3	-	9	6.912,05	4	-	-	-	-	-	-	-	150,00
6	Prov. Jawa Tengah																					
9	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Thn 2011 dan 2012	7	-	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Prov. Jawa Timur																					
10	Kegiatan Operasional PT Jatin Investment Management dan Anak Perusahaan TB 2011 dan 2012	1	-	-	1	4	523,31	-	-	1	523,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan Operasional PD Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2012	7	1	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kegiatan Operasional PT Jatin Niaga Utama Tahun 2011 dan 2012	2	-	-	2	5	1.759,54	1	1.042,74	1	650,00	1	66,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prov. Kalimantan Tengah																					
13	Kegiatan Operasional PD Barana Ungang Wakmur TB 2011 dan Smt. I 2012 di Palangkaraya	13	3	6	4	8	734,57	2	72,72	3	562,32	2	99,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	303	44	128	131	319	1.109.620,06	67	173.535,94	52	372.176,61	63	165.437,04	93	22	27.444,24	22	371.026,23	768,43	46.831,85	-	949,47
	Jumlah Rupiah	303	44	128	131	319	1.201.777,77	67	173.535,94	52	464.334,32	63	165.437,04	93	22	27.444,24	22	371.026,23	768,43	46.831,85	-	949,47

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 31

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya**

No	Kelompok	Jumlah Kasus		
		BLU	Badan Lainnya	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	17	25	42
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	22	34
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	3	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	-	3
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	35	34	69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	-	3
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	5	7	12
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	12	19
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	10	28
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	6
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	17	40
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	17	15	32
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	1	6
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	-	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	1	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		75	76	151

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidaktepatan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BLU		Badan Lainnya		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
I	Kerugian Negara/Daerah	55	64.496,32	40	5.253,65	95	69.749,97
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	284,85	-	-	1	284,85
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	628,95	2	628,95
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	153,29	-	-	1	153,29
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	5.796,10	8	949,01	20	6.745,11
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10	3.921,36	5	826,69	15	4.748,05
6	Pemahalan harga (mark up)	13	35.547,28	4	399,52	17	35.946,80
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	31,71	3	106,27	4	137,98
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	314,44	4	181,94	6	496,38
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	16.366,13	1	19,77	7	16.385,90
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	723,16	10	2.115,43	17	2.838,59
11	Lain-lain	2	1.358,00	3	26,07	5	1.384,07
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	12	35.338,01	9	42.901,64	21	78.239,65
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	27.715,59	-	-	2	27.715,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-	1	103,50	2	103,50
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	2	1.241,81	2	1.241,81
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	3	865,02	1	43,27	4	908,29
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	921,68	4	41.493,06	5	42.414,74
6	Lain-lain	5	5.835,72	1	20,00	6	5.855,72
III	Kekurangan Penerimaan	39	19.489,22	27	790.595,23	66	810.084,45
					USD 1.440,21		USD 1.440,21
	Jumlah Rupiah	39	19.489,22	27	804.522,06	66	824.011,28
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	12	4.057,38	4	1.071,80	16	5.129,18
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	23	12.291,67	19	776.268,37	42	788.560,04
					USD 1.440,21		USD 1.440,21
	Jumlah Rupiah				790.195,20		802.486,87
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	3	1.554,19	3	13.254,44	6	14.808,63
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1.585,98	1	0,62	2	1.586,60
IV	Administrasi	37	-	60	-	97	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	2	-	2	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	-	12	-	17	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9	-	11	-	20	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	6	-	6	-
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4	-	-	-	4	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	8	-	14	-	22	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8	-	3	-	11	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-	5	-	7	-
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-	-	-	1	-
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	7	-	7	-
V	Ketidakehematan	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
1	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	5	489,28	13	4.280,35	18	4.769,63
VI	Ketidakefektifan	25	40.686,28	10	2.887,79	35	43.574,07
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	-	-	-	2	-

Halaman 2 - Lampiran 32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BLU		Badan Lainnya		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	5.320,47	1	-	5	5.320,47
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10	35.365,81	4	2.795,60	14	38.161,41
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-	1	-	4	-
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-	1	-	6	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	3	92,19	4	92,19
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		173	160.499,11	159	845.918,66	332	1.006.417,77
					USD 1,440.21		USD 1,440.21
Jumlah Rupiah		173	160.499,11	159	859.845,49	332	1.020.344,60

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 33

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindarkan lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan			
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Badan Layanan Umum																					
	BLU Rumah Sakit																					
	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum TA 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I Raden Said Sulianto di Jakarta	7	2	3	2	13	8.512,16	3	5.983,62	-	-	5	810,68	4	-	-	1	1.717,86	-	-	-	
2	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri di Kediri	5	3	1	1	7	1.678,77	2	268,51	-	-	1	1.410,26	1	-	-	3	-	-	-	-	
3	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang di Makassar	4	2	2	-	10	1.107,72	4	632,57	-	-	5	475,15	1	-	-	-	-	-	-	238,57	
4	Operasional RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto TA 2011 dan 2012 (Tw. III) di Mojokerto	4	2	2	-	4	343,71	1	181,86	1	13	1	148,68	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	Operasional RSUD dr. Harjiono S Kab. Ponorego TA 2011 dan 2012 (Tw. III)	8	2	4	2	2	48,27	1	48,27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Nilai
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6	Operasional RSUD Ulin Banjarmasin pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarmasin	4	-	2	2	8	1.921,87	4	912,78	1	921,68	1	87,41	2	-	-	-	-	-	32,00	-	
7	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bitung TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung	7	2	4	1	13	2.924,61	2	90,00	-	-	2	96,33	5	-	-	4	2.738,28	-	-	-	
8	Pendapatan dan Belanja RSUD Mimika TA 2011 dan 2012 (Semester I)	2	-	2	-	6	2.167,36	2	160,85	-	-	3	1.276,41	-	-	-	1	730,10	-	-	-	
9	Pendapatan dan Belanja RSUD Panai TA 2011 dan 2012 (Semester I)	3	-	1	2	5	209,40	-	-	-	-	-	-	2	1	209,40	2	-	-	-	-	
10	BLU Pendidikan																					
	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Indonesia di Depok	4	1	3	-	38	113.323,00	16	43.180,39	6	33.672	6	8.182,07	8	-	-	2	28.288,13	-	-	891,50	
11	Pemeriksaan Lanjutan pada Universitas Indonesia di Depok	1	-	1	-	5	9.823,28	2	6.450,62	-	-	1	1.034,61	1	-	-	1	2.338,05	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan														
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah		Nilai			
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
12	Belanja Modal Universitas Sebelas Maret TA 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Surakarta	1	-	-	1	4	2.942,99	-	-	-	-	-	-	1	1	68,22	2	2.874,77	-	-	-	-	-	-	-	
13	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta	11	3	6	2	30	12.714,94	12	6.279,48	2	559,94	11	5.781,52	4	1	100,00	-	-	-	172,98	-	-	-	-	103,63	
14	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada UIN Sunan Gunung Djati	1	-	-	1	10	399,15	2	106,41	2	176,81	1	73,02	3	1	42,91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BLU Lainnya																									
15	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur	5	-	1	4	9	1.993,46	-	-	-	-	1	64,12	1	1	68,75	6	1.860,59	-	-	-	-	-	-	-	
16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada BLU Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBT) dan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) TA 2011 dan Semester I 2012	1	-	1	-	6	355,43	2	167,97	-	-	1	48,96	1	-	-	2	138,50	142,51	38,87						

Halaman 5 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Nilai	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
20	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Palembang, Stasiun Manado, Puslitbangdiklat dan SPI di Jakarta, Palembang dan Mamado	2	-	1	1	2	185,93	1	185,93	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
21	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Jakarta, Surabaya, Cirebon dan Purwokerto	7	1	6	-	12	2.643,38	3	499,19	1	1.241,81	3	45,77	4	-	-	1	856,61	13,14	0,82
22	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012, pada LPP RRI Stasiun Denpasar, Malang, Madiun dan Jakarta, serta Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum dan Program dan Produksi di Jakarta, Denpasar, Malang dan Madiun	16	8	7	1	24	1.519,90	10	824,73	-	-	3	695,17	11	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Nilai		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPTVRI)																				
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Tiga Sektor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Bali dan Jawa Tengah	5	1	2	2	14	1.441,63	3	761,67	2	329,29	2	350,67	7	-	-	-	-	-	43,34	
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Pontianak, dan Makassar	7	3	2	2	22	6.808,95	5	563,54	2	442,66	4	1.311,30	5	4	3.590,83	2	900,62	-	-	
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Manado dan Medan	9	4	4	1	24	2.699,11	5	1.055,20	2	234,15	1	13,60	10	4	474,12	2	922,04	-	6,75	
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Penerimaan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Padang dan Samerrida	11	3	3	5	10	42.710,74	3	1.004,43	1	40.610,46	1	940,94	4	1	154,91	-	-	-	-	

Halaman 7 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
	Otorita Asahan																			
	Pelaksanaan Kewajiban Penyetoran dan Penyaluran Annual Fee (Iuran Tetap dan Iuran Tambahan), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Environmental Fund, Development Fund, dan Biaya Operasional Tahun Anggaran 2010 s.d Triwulan I 2012. Serta Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2003 pada Otoritas Asahan, PT Inalum, Kementerian Keuangan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sumatera Utara	5	-	2	3	9	772.514,91	-	-	-	-	4	772.514,91	1	-	-	4	-	-	-
							USD 1.440,21						USD 1.440,21							
	Sub Jumlah Badan Lainnya	76	25	34	17	159	845.918,66	40	5.253,65	9	42.901,64	27	790.595,23	60	13	4.280,35	10	2.887,79	14,43	54,99
	Jumlah Rupiah	76	25	34	17	159	859.845,49	40	5.253,65	9	42.901,64	27	804.522,06	60	13	4.280,35	10	2.887,79	14,43	54,99
	Jumlah	151	42	69	40	332	1.006.417,77	95	69.749,97	21	78.239,65	66	810.084,45	97	18	4.769,63	35	43.574,07	361,92	1.327,56
	Jumlah Rupiah	151	42	69	40	332	1.020.344,60	95	69.749,97	21	78.239,65	66	824.011,28	97	18	4.769,63	35	43.574,07	361,92	1.327,56

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Lampiran 34

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

No	Kelompok	Pusat	BUMN	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	4	1	3	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	3	-	2	5
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	1	2
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	-	1	-	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	1	-	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	13	-	1	23
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	3	-	1	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	4	-	-	5
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	1	-	-	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	5	-	-	6
5	Lain-lain	1	-	-	-	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	15	-	2	36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	6	-	-	13
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	12	9	-	2	23
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		29	32	1	6	68

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

No	Kelompok	Pusat		BUMN		Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>											
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	8	1.599,70	2	5.532,69	17	490,89	5	161,04	32	7.784,32
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	-	-	-	-	1	1,67	-	-	1	1,67
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	268,73	1	3.270,94	-	-	3	50,88	5	3.590,55
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	992,47	1	2.261,75	3	65,79	-	-	6	3.320,01
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	-	-	-	-	1	109,02	1	109,02
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	-	-	5	140,59	-	-	5	140,59
6	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	326,95	-	-	2	25,55	-	-	3	352,50
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	11,55	-	-	5	219,22	1	1,14	8	231,91
8	Lain-lain	2	-	-	-	1	38,07	-	-	3	38,07
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	5	8.604,77	2	1.360,36	-	-	-	-	7	9.965,13
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	633,47	1	1.188,22	-	-	-	-	2	1.821,69
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	1	172,14	-	-	-	-	1	172
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lain-lain	3	7.971,30	-	-	-	-	-	-	3	7.971
III	Kekurangan Penerimaan	7	6.097,54	4	454,74	5	831,83	-	-	16	7.384,11
			USD 274,17								USD 274,17
	Jumlah rupiah		8.748,76		-						10.035,33
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	928,53	3	239,84	-	-	-	-	4	1.168,37
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	2.644,98	1	214,90	5	831,83	-	-	9	3.691,71
		-	USD 274,17								USD 274,17
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	1	61,64	-	-	-	-	-	-	1	61,64
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	100,18	-	-	-	-	-	-	1	100,18
5	Lain-lain	1	2.362	-	-	-	-	-	-	1	2.362
IV	Administrasi	27	-	10	-	13	-	10	-	60	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	1	-	7	-	5	-	13	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1	-	2	-	1	-	1	-	5	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	24	-	1	-	-	-	2	-	27	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
11	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Halaman 2 - Lampiran 35

(nilai dalam juta rupiah dan ribuan valas)

No	Kelompok	Pusat		BUMN		Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	1	4.465,90	-	-	2	769,75	1	3,91	4	5.239,56
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1	4.465,90	-	-	2	769,75	1	3,91	4	5.239,56
VI	Ketidakefektifan	8	376.131,78	10	-	-	-	4	23.073,52	22	399.205,30
			USD 9,973,75								USD 9,973,75
	Jumlah rupiah		472.577,94								495.651,46
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	3	-	-	-	1	115,61	4	115,61
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	328.989,17	-	-	-	-	1	287,64	4	329.016,81
		-	USD 9,973,75					-	-		USD 9,973,75
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	-	-	2	22.930,27	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	47.142,61	6	-	-	-	-	-	11	70.072,88
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	396.899,69	28	7.347,79	37	2.092,47	20	23.238,47	141	429.578,42
			USD 10,247,92								USD 10,247,92
	Jumlah rupiah		495.997,07								528.675,80

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kelemahan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			Jml Kasus
1	Pusat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Imporasi Babi Gasp) Tahun 2010-2012 pada Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bca dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta	4	-	-	4	6	2.462,39	-	-	-	-	2	2.462,39	4	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Pertambangan Mineral TA 2009 s.d 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perusahaan Kontrak Karya (PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara) dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (PT Aneka Tambang UPBE Pongkor) serta Instalasi Terkait Lainnya di Jakarta, Bogor, Gresik, Sumbawa dan Timika	1	-	1	-	6	2.367,30	-	-	-	-	2	2.367,30	4	-	-	-	-	-	-
3	Proses Penetapan Status dan Penerbitan Sertifikat "Clear and Clean" Pemegang IUP Mineral dan Batubara Tahun 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan dan Program Listrik Perdesaan Tahun Anggaran (TA) 2010 s.d. TA 2011 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangunan dan Jaringan (UIP KIRING) Sumatera, Aceh, Riau, UIP KIRING Kalimantan, UIP Kiring Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan UIP Kiring Sulawesi, Maluku, Papua Serta Listrik Perdesaan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara	-	-	-	-	9	383.252,63	2	1.219,26	1	633,47	1	928,53	1	1	4.465,90	3	376.005,47	-	-

Halaman 2 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan	
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kerbakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi pada Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Pusat), Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	2	-	-	2	16	3.453,58	3	326,95	2	2.787,31	2	359,32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
5																							
6	Pengelolaan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam pada Kementerian Kehutanan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di Jakarta.	8	-	3	5	6	126,31	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	126,31	-	-	-	-	
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Migas pada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
7																							
8	Penanganan Bank Gagal Lembaga Penjamin Simpanan	11	1	5	5	9	5.237,48	3	53,49	2	5.183,99	-	-	4	-	-	-	-	-	-	11,55	-	
	Sub Jumlah Pusat	29	1	9	19	56	396.899,69	8	1.599,70	5	8.604,77	7	6.097,54	27	1	4.465,90	8	376.131,78	11,55	-	-	-	
	Jumlah rupiah						USD 10.247,92						8.748,76										
							495.997,07																
2	BUJAN																						
9	Kelayakan Pemungutan Dan Pengelolaan Uang Jaminan Langgahan (UJL) Pada PT. PLN Persero	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	PKBL PT Antam (Persero) Tbk TA 2011 dan Semester I 2012	3	1	-	2	13	1,54	-	-	-	-	1	1,54	7	-	-	5	-	-	-	-	-	
11	Pelaksanaan PKBL PT. Timah TA 2011 dan Semester I 2012	6	-	2	4	4	172,14	-	-	1	172,14	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
12	Program Kemitraran dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) TA 2011 dan Semester I 2012	9	1	5	3	5	174,05	-	-	-	-	1	174,05	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
13	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero)	8	-	3	5	4	2.540,90	1	2.261,75	-	-	2	279,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyempinan aset atau penyostoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	Pemeriksaan Terinci Atas Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Singkong Keiring (Casava) pada PT Sarimah (Persero) TA.2011 dan 2012 semester I	1	-	1	-	2	4.459,16	1	3.270,94	1	1.188,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah BUMN	32	4	13	15	28	7.347,79	2	5.532,69	2	1.360,36	4	454,74	10	-	-	10	-	-	-
3	Daerah																			
	Provinsi																			
15	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA.2011 dan 2012	1	1	-	-	4	74,11	2	60,62	-	-	1	13,49	1	-	-	-	-	38,16	13,49
16	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu/leada Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilu/leada Provinsi Banten di Serang	-	-	-	-	26	1.920,92	12	348,82	-	-	3	800,35	9	2	769,75	-	-	-	0,94
17	Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada KPUD Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya	-	-	-	-	7	97,44	3	81,45	-	-	1	15,99	3	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah Provinsi	1	1	-	-	37	2.092,47	17	490,89	-	-	5	831,83	13	2	769,75	-	-	38,16	14,43
	Kabupaten/Kota																			
18	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS pada Penda. Kab. Bungo dan Instansi Terkait Lainnya	2	-	-	2	5	120,00	1	4,39	-	-	-	-	2	-	-	-	2	115,61	-
19	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS TA.2011 dan Semester I TA.2012 Kab. Muaro Jambi	2	1	1	-	8	23.111,59	2	149,77	-	-	-	-	3	1	3,91	2	22.557,91	23,47	-

Halaman 4 - Lampiran 36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilukada KPUD pemerintah Kabupaten Buton	2	2		-	7	6,88	2	6,88	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah Kabupaten/kota	6	3	1	2	20	23.238,47	5	161,04	-	-	-	-	10	1	3,91	4	23.073,52	23,47	-
	Jumlah Daerah	7	4	1	2	57	25.330,94	22	651,93	-	-	5	831,83	23	3	773,66	4	23.073,52	61,63	14,43
	Jumlah (Pusat+BUMN+Daerah)	68	9	23	36	141	429.578,42	32	7.784,32	7	9.865,13	16	7.384,11	60	4	5.239,56	22	399.205,30	73,18	14,43
	Jumlah rupiah (Pusat+BUMN+Daerah)						USD 10.247,92						USD 274,17					USD 9.973,75		
							528.675,80						10.035,33					495.651,46		

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2012

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja			
	A	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai		
	1	1	Kementerian Keuangan	1 Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai serta Penerimaan Negara Lainnya pada Kantor Pusat DJBC, KPUBC Tanjung Priok, KPPBC Tangerang, KPPBC Ngurah Rai dan KPPBC Palembang di Jakarta, Tangerang, Denpasar dan Palembang
		2		1 Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan BUMN Sektor Perkebunan TA 2010 dan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga
		3	PT Perkebunan Nusantara III	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
		4	PT Perkebunan Nusantara IV	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
		5	PT Perkebunan Nusantara VI	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)
		6	PT Perkebunan Nusantara VII	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
		7	PT Perkebunan Nusantara VIII	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
		8	PT Perkebunan Nusantara X	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
		9	PT Perkebunan Nusantara XII	1 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
		10	Kementerian Perdagangan	1 Kebijakan Anti Dumping TA 2012 pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping (KADI), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Serta Instansi Vertikal Dibawahnya di Jakarta, Medan, Cilegon, Semarang, Surabaya
	2	11	Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Pajak di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2011
		12		1 Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara
		13		1 Pajak di Bendahara Pengeluaran Kota Bau-Bau
				13
	B	Belanja dan Pendapatan		
	1	14	Dewan Perwakilan Rakyat	1 Belanja TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta
	2	15	Kejaksaan Republik Indonesia	1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan
		16		1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Instansi Terkait di Semarang
		17		1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
		18		1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten di Serang
	3	19	Kementerian Luar Negeri	1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok di Thailand
		20		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal n Republik Indonesia Guangzhou di Republik Rakyat Tiongkok
		21		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong di Republik Rakyat Tiongkok
		22		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Denmark
		23		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Swedia

Halaman 2 - Lampiran 37

No		Entitas	Jml	Daftar LHP
				Objek Pemeriksaan
4	24		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo
	25		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 Serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Baghdad di Irak
5	26		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 Serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha di Qatar
	27		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman di Yordania
	28		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston di Amerika Serikat
	29		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 serta Pengujian Pengendalian Sistem Simkeu Real Time pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles di Amerika Serikat
	30		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia di London
	31		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Cape Town di Afrika Selatan
	32		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2012 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Afrika Selatan
	33	Mabes TNI	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Denma Mabes TNI
	34	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Fasilitas dan Pemeliharaan Bangunan Tahun 2011 dan 2012 pada UO TNI AD
	35		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodiklat TNI AD di Bandung
	36		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodam IV/ Diponegoro di Semarang
	37		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Kodam IX/Udayana di Bali
	38	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pada Kobangdiklat dan AAL Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Surabaya
	39		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 (s.d Triwulan III) pada Lantamal I Belawan Beserta Jajarannya di Belawan
	40		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) serta Jajaran Terkait di Jakarta dan Surabaya
	41		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2011 dan 2012 pada Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya
	42	TNI AU	1	Pelaksanaan anggaran dan kegiatan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara TA 2011 dan 2012 di Jakarta
	43		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dinas fasilitas dan konstruksi TNI Angkatan Udara (DISFASKONAU) serta jajaran terkait TA 2011 dan 2012 di Jakarta
	44		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Dinas Aeronautika TA 2011 dan 2012 di Jakarta
	45	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh
	46		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru
	47		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Jambi
	48		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu di Bengkulu
	49		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Satker Terkait di Jakarta
	50		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta

Halaman 3 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
51		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
52		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
53		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
54		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Serang
55		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan di Banjarmasin
56		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu
57		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Kendari
58		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Gorontalo
59		1	Pelaksanaan Anggaran dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon
60		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 s.d. 2012 (semester I) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate
61	Kementerian Keuangan	1	Pemeriksaan Belanja Modal Kementerian Keuangan TA 2012
62	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2011 dan 2012 di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
63		1	Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2009, 2010 dan 2011 pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
64		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker-satker Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah
65		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker-satker Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Sulawesi Tengah
66	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana APBN TA 2011 pada Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam di Batam
67		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
68	Kementerian Agama	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di Jakarta
69	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2011 sampai dengan Triwulan III Tahun 2012 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
70		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Pendapatan, Belanja dan Aset) Tahun 2011 dan Triwulan III Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Bekasi dan Medan
71	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat serta Instansi Terkait Lainnya
72	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta

Halaman 4 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
73	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Legalisasi Aset Pertanahan Khususnya Proyek Operasi Nasional (Prona) Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Semarang, dan Surabaya	
74	Kepolisian Republik Indonesia	1	Pengelolaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 Sampai Dengan 2011 pada Kepolisian Daerah Jambi di Jambi	
75	Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK)	1	Belanja Pada Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September) di Jakarta	
76	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat	
77	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga	
78	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2012 di Calang	
79		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2012 di Kutacane	
80		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2012 di Sigli	
81		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2012 di Sinabung	
82		1	Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa TA 2012 di Langsa	
83	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal TA 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	
84		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nias di Gunung Sitoli	
85		1	Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhan	
86		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya	
87		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	
88		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kota Sibolga	
89		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi	
90	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2012 di Padang	
91		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam TA 2012 di Lubuk Basung	
92		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 di Painan	
93		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2012 di Padang Aro	
94		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2012 di Bukittinggi	
95		1	Belanja Daerah Kota Padang TA 2012 di Padang	
96		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2012 di Sawahlunto	
97		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Solok TA 2012 di Solok	
98	Provinsi Riau	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis	
99		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang	
100		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	
101		1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Siak	
102	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	
103		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	
104		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	
105		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak	
106		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kota Jambi di Jambi	
107		1	Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh	
108	Provinsi Sumatera Selatan	1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait di Pangkalan Balai	

Halaman 5 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
109		1	Belanja DPRD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2011 dan 2012 di Tebing Tinggi
110		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura
111		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait di Lahat
112		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait di Muara Enim
113		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait di Muara Beliti
114		1	Pendapatan Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
115		1	Belanja Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Prabumulih Timur dan Instansi Terkait di Prabumulih
116	Provinsi Bengkulu	1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasilnya TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
117		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna
118		1	Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga TA 2011 dan 2012 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi
119		1	Belanja Modal TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais
120		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu TA 2012 di Bengkulu
121		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka pada Pemerintah Kota Bengkulu TA 2011 dan Semester I 2012
122	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2012 di Pangkalpinang
123		1	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2012 di Sungailiat
124		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah TA 2012 di Koba
125		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2012 di Manggar
126	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
127		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait dengan Kontruksi TA 2011 dan 2012 Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
128		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu
129		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2011 dan 2012 di Tanjung Balai
130		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di Tarempa
131		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal Barang dan Jasa Terkait Jasa Konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Ranai
132		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait Konstruksi TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
133		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau di Batam
134	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
135		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta di Jakarta
136		1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
137		1	Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I 2012 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

Halaman 6 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
138		1	Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta TA 2008 & 2009 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
139		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
140		1	Belanja dan Pendapatan TA 2011 dan 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
141		1	Belanja TA 2011 dan 2012 pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
142		1	Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan 2012 di Jakarta	
143		1	Belanja TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
144		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Operasional TA 2011 dan 2012 s.d. Semester I pada Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
145	Provinsi Jawa Barat	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (sampai dengan 31 Agustus 2012) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
146		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	
147		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang	
148		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	
149		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	
150		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis	
151		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur	
152		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	
153		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut	
154		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Kabupaten Indramayu di Indramayu	
155		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang	
156		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka	
157		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor	
158		1	Pendapatan Daerah Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon	
159		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Cimahi di Cimahi	
160		1	Pendapatan Daerah Semester I 2012 pada Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi	
161		1	Pendapatan Daerah Semester I 2012 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya	
162	Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes	
163		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap	
164		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan di Purwodadi	
165		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal	
166		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten	
167		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pati di Pati	
168		1	Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Purbalingga	
169		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi	
170		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri	
171		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Pekalongan di Pekalongan	
172	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika TA 2012 pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di Yogyakarta	
173		1	Belanja Infrastruktur di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul	

Halaman 7 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
174		1	Belanja Barang dan Jasa TA 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di Yogyakarta
175		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2011 dan 2012 (s.d Juni) di Wonosari
176		1	Belanja Daerah Non Infrastruktur TA 2012 (s.d. 31 Oktober) Kabupaten Kulon Progo di Wates
177		1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2012 (s.d. 31 Oktober) di Sleman
178		1	Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta TA 2012 (s.d. 30 September) dan Kantor Kesatuan Bangsa (TA 2011 dan 2012) di Yogyakarta
179	Provinsi Jawa Timur	1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi
180		1	Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2011 dan 2012 s.d. Triwulan III
181		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2012 pada Kabupaten Jember di Jember
182		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 pada Kabupaten Probolinggo di Probolinggo
183		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2012 di Tuban
184		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar
185		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kota Malang di Malang
186	Provinsi Banten	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten
187		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
188		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa
189	Provinsi Bali	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) TA 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) Pada Pemerintah Provinsi Bali Di Denpasar
190		1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Semester I) Pemerintah Provinsi Bali
191		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bangli
192		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (S.D. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
193		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana
194		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem
195		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung
196		1	Pengadaan Barang Dan Jasa TA 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tabanan
197		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar
198	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Kerja Lainnya TA 2012 (Semester I)
199		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu TA 2012 di Dompu
200		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara TA 2012 di Tanjung
201		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bima TA 2012 di Raba
202		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2012 di Mataram
203		1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur TA 2012 di Selong
204	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
205		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Belu di Atambua
206		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Ende di Ende
207		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Lembata di Lewoleba
208		1	Belanja daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng
209		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere

Halaman 8 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
210		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul	
211		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu	
212	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 (s.d. Juli 2012) Dengan Menggunakan E-Audit pada Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak	
213		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak	
214		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau	
215		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Bulan Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang	
216		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh	
217		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sambas di Sambas	
218		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau	
219		1	Belanja Daerah TA 2012 (s.d. 31 Oktober 2012) pada Pemerintah Kabupaten Singkawang di Singkawang	
220		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Agustus 2012) pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang	
221	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas TA 2012 di Kuala Kurun	
222		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas TA 2012 di Kuala Kapuas	
223		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2012 di Pangkalan Bun	
224		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2012 di Sampit	
225		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau TA 2012 di Pulang Pisau	
226		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Palangka Raya TA 2012 di Palangka Raya	
227		1	Belanja Modal TA 2010, 2011 dan 2012 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang	
228	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 dan 2012	
229		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Banjar TA 2011 dan 2012	
230		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	
231		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong TA 2011 dan 2012	
232		1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tapin TA 2011 dan 2012	
233		1	Pendapatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarmasin	
234	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (s.d. Agustus) pada Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Bontang	
235		1	Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur TA 2009, 2010, dan 2011 di Tanjung Redep	
236	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara TA 2012 (s.d. 31 Agustus) di Manado	
237		1	Belanja Infrastruktur TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak	
238		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Timur	
239		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Utara	
240		1	Belanja Daerah TA 2012 Kab Pemerintah Kab Minahasa Utara	

Halaman 9 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
241	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi	
242		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Donggala di Banawa	
243		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d.30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku	
244		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 November 2012) pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol	
245	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pelaksanaan APBD Khusus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	
246		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	
247		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru	
248		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Bone di Watampone	
249		1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang	
250		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d September) Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang	
251	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara TA 2011 dan 2012	
252		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2011 dan 2012	
253		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe TA 2011 dan Semester I 2012	
254		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2011 dan 2012	
255		1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna	
256	Provinsi Gorontalo	1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 (s.d. Agustus 2012) Dengan Menggunakan E-Audit pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo	
257		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2001 dan 2012 di Gorontalo	
258		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2011 dan 2012 di Tilamuta	
259		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2011 dan 2012 di Suwawa	
260		1	Belanja Operasi Kabupaten Gorontalo TA 2001 dan 2012 di Limboto	
261		1	Belanja Operasi Kabupaten Gorontalo Utara TA 2011 dan 2012 di Kwandang	
262		1	Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Utara TA 2011 dan 2012 di Kwandang	
263		1	Belanja Operasi Kabupaten Pohuwatu TA 2011 dan 2012 di Marisa	
264		1	Belanja Operasi Kota Gorontalo TA 2011 dan 2012 di Gorontalo	
265	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Bantuan Sosial Hibah dan Bantuan Keuangan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa	
266		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju	
267		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali	
268	Provinsi Maluku	1	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru TA 2011 dan 2012 di Dobo	
269		1	Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2011 dan 2012 di Piru	
270		1	Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon TA 2011 dan 2012 di Ambon	
271	Provinsi Maluku Utara	1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara	
272		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo	
273		1	Belanja Barang dan Modal TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	
274		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	
275		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo	

No	Entitas	Jml	Daftar LHP		
			Objek Pemeriksaan		
		276		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
		277		1	Belanja Daerah Yang Signifikan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
		278		1	Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kota Ternate
		279		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		280		1	Belanja Daerah TA 2009 s.d 2011 untuk Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) dan Kontrak Tahun Tunggal pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
	Provinsi Papua	281		1	Belanja Kabupaten Boven Digoel TA 2011 s.d. Semester I 2012
		282		1	Belanja Daerah TA 2011 dan TA 2012 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
		283		1	Belanja Kabupaten Keerom TA 2011 dan 2012 (s.d. Juni)
		284		1	Belanja Daerah Kabupaten Mappi TA 2011 dan 2012 (Samapai dengan Triwulan III) di Kepi
		285		1	Belanja Daerah Kabupaten Memberamo raya TA 2011-2012 (s.d. Mei)
		286		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Timika
		287		1	Belanja Daerah Kabupaten Nabire TA 2011 dan 2012 (Sampai Dengan Triwulan III) di Nabire
		288		1	Belanja Daerah TA 2011 dan 2012 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiwari
		289		1	Belanja Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2011 dan 2012 (s.d. September)
		290		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo TA 2011 dan 2012 di Sumohai
	Provinsi Papua Barat	291		1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2011 dan 2012 di Manokwari
		292		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari TA 2011 dan 2012 di Manokwari
		293		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2011 dan 2012 di Fakfak
		294		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2011 dan 2012 di Kaimana
		295		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat TA 2011 dan 2012 di Maybrat
		296		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA 2011 dan 2012
		297		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong TA 2011 dan 2012 di Aimas
		298		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan TA 2011 dan 2012 di Teminabuan
		299		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrau TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) di Sausapor
		300		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2011 dan 2012 di Bintuni
		301		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2011 dan 2012 di Rasiei
		302		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sorong TA 2011 dan 2012 di Sorong
				289	
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda				
	303	Kementerian Kesehatan		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda pada Kementerian Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya TA 2010 s.d. Semester I TA 2012
				1	
III	Manajemen Aset				
	304	Mahkamah Agung		1	Pengelolaan Aset dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012 Pada Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdi) dan Badan Peradilan di Wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah
	305	Kementerian Pertahanan		1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi Kementerian Pertahanan
	306	Mabes TNI		1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi Mabes TNI

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
307	TNI AD	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AD	
308	TNI AL	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AL di Jakarta dan Surabaya	
309	TNI AU	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2008 s.d Semester I 2011 pada Unit Organisasi TNI AU	
310	Kementerian Keuangan	1	Pemeriksaan Manajemen Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahun 2012	
311	Provinsi Aceh	1	Kas Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2007 s.d. 2010	
312	Provinsi Riau	1	Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru	
313	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	
314	Provinsi Bengkulu	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2011 dan Semester I 2012 di Tubei	
315	Provinsi Jawa Tengah	1	Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	
316		1	Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang	
317		1	Manajemen Aset tetap Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo	
318	Provinsi DI Yogyakarta	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2011 dan 2012 (Semester 1) di Wonosari	
319	Provinsi Jawa Timur	1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Oktober 2012	
320		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2012 Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Malang di Malang	
321		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto per 31 Agustus 2012	
322		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	
323		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo per 30 Juni 2012	
324		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pasuruan per 30 Juni 2012	
325	Provinsi Kalimantan Barat	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	
326		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Landak	
327		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pontianak	
328	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. Juni) pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang	
329		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	
330		1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan	
331	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2008, 2009, 2010,2011 dan Semester I TA 2012 di Banjarbaru	
332	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Aset (BMD) Posisi Per 30 Juni 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado	
333	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	
334		1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Banggai	
335		1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Poso	
336	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng TA 2010, 2011 dan September 2012 (Per September 2012) di Bantaeng	
337	Provinsi Sulawesi Barat	1	Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju	
338	Provinsi Maluku	1	Penyertaan Modal, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon	
339	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Kas dan Aset Tetap Untuk Periode Sampai Dengan Semester I Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda	

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
	340		1	Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)
	341	Provinsi Papua	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Biak
	342		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
	343	PT Aneka Tambang (Persero)	1	Pengelolaan Aset pada PT Antam (Persero) TBK tahun 2011 dan Semester I 2012
	344	PT Timah (Persero)	1	Pengelolaan Aset (Asset Management) TA 2011 dan Semester I 2012 pada PT Timah (Persero) Tbk dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, dan Pangkalpinang
	345	PT Pertamina (Persero)	1	Pengelolaan Aset PT Pertamina (Persero) tahun 2011 dan 2012 Semester I
			42	
IV	Kontraktor Kontrak Kerjasama			
	346		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Salawati Tahun 2011 pada KKKS JOB Pertamina Petrochina Salawati dan BP Migas Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Papua Barat
	347		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Cepu pada BP Migas dan KKKS Mobil Cepu Ltd Serta Instansi Terkait Lainnya
	348		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Ogan Komering Ilir pada BP Migas dan KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Serta Instansi Terkait Lainnya
	349		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Eks Pertamina pada BP Migas dan KKKS PT Pertamina EP Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
	350		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja <i>Offshore North West Java</i> (ONWJ) pada BP Migas dan KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
	351		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru pada BPMigas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Pekanbaru
	352		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Rimau pada BPMigas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Indonesia Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sumatera Selatan
			7	
V	Operasional BUMN/BUMD			
	1	Operasional BUMN		
	353	PT Tugu Pratama Indonesia dan Tugu Insurance Company LTD	1	Pendapatan, biaya dan investasi pada PT Tugu Pratama Indonesia dan <i>Tugu Insurance Company LTD</i> Tahun 2010, 2011 Semester 1 2012
	354	PT Utama Karya (Persero)	1	Pengelolaan pendapatan usaha dan pengendalian beban kontrak TB 2010 dan 2011 pada PT Utama Karya (Persero)
	355	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (PT BTDC)	1	Pengelolaan deposito tahun 2011 dan 2012 pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ Bali Tourism Development Corporation (PT BTDC)
	356	PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa produksi serta investasi pengembangan galangan Lamongan pada PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) TB 2010 dan 2011 di Surabaya, Lamongan, Jambi dan Singapura.
	357	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan kegiatan pengadaan barang/jasa produksi dan investasi pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) TB 2010 dan 2011.
	358	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian TA 2011 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta, Bandung, Cirebon dan Surabaya
	359	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	1	Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dan Pelaksanaan Penjualan Komoditas Perkebunan Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan BUMN Terkait di Jakarta, Bandung, Semarang, Lampung dan Medan
	360	Perum Perhutani	1	Kegiatan Trading Hutan Rakyat, Pengelolaan Biaya Produksi, dan Kegiatan Investasi pada Perum Perhutani TB 2011 dan 2012 (Semester I)
	361	PT Inhutani III (Persero)	1	Kegiatan Produksi dan Penjualan pada PT Inhutani III (Persero) di Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan TB 2011 dan 2012 (semester I)
	362	PT Mega Eltra	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya TB 2010, 2011 dan 2012 (smt I) pada PT Mega Eltra di Jakarta, Medan dan Surabaya

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
363	PT Asabri	1	Penyelenggaraan Program Santunan dan Tabungan Hari Tua, Dana Pensiun Biaya Operasional dan Belanja Modal, Serta PKBL PT Asabri (Persero) Tahun 2011 dan 2012 (Semester I) di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar
364	PT Askes	1	Pelaksanaan Program Pengelolaan Barang/jasa, Biaya Operasional dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada PT Asuransi Kesehatan (Persero)
365	PT Bank Rakyat Indonesia	1	Pengelolaan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TB 2011 dan Triwulan I 2012 di Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung
366	PT Bank Tabungan Negara	1	Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Triwulan I 2012 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Batam, Makassar, Jakarta Harmoni dan Jakarta Kuningan
367	PT Sucofindo	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan PKBL Tahun 2011 dan 2012 9s.d. Semester I) pada PT Sucofindo (Persero) di Jakarta, Tarakan, Samarinda dan Cibitung
		15	
2	Operasional BUMD, RSUD, PDAM, Bank Pembangunan Daerah		
368	Provinsi Sumatera Utara	1	Operasional PT Bank Sumut TB 2011 dan Semester I 2012
369	Provinsi Sumatera Barat	1	Operasional PDAM Tirta Sanjung Buana TB 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
370		1	Operasional Perusahaan Daerah Kinantan TB 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
371	Provinsi Riau	1	Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2010, 2011, dan TW I 2012 di Pekanbaru
372	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PT Petromuba di Sekayu
373		1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) di Palembang
374		1	Operasional Bank TB 2011 dan 2012 pada Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan di Palembang
375		1	Operasional Perusahaan Daerah TB 2011 dan 2012 pada PD Pasar Palembang Jaya di Palembang
376	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kegiatan Operasional PD BPR Bestari Tanjungpinang Tahun Buku 2011 dan 2012 di Tanjungpinang
377		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Tanjungpinang
378		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Perusahaan Daerah Karimun TB 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Tanjung Balai Karimun
379	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Biaya pada PD PAL Jaya TB 2010 dan 2011 di Jakarta
380		1	Pendapatan dan Biaya pada PT Bank DKI Tahun Buku 2010 dan 2011 di Jakarta
381	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Kredit dan Kegiatan Investasi Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PT BPD Jabar dan Banten, Tbk di Bandung
382		1	Pendapatan dan Biaya TB 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PD Pasar Bermartabat Kota Bandung di Bandung
383		1	Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Jasa Sarana di Bandung
384	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional PD BPR Bank Pasar Rembang Tahun 2011 dan 2012
385		1	Operasional PD BPR Bank Bapas 69 Magelang Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. 30 juni)
386		1	Operasional PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni)
387		1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012
388		1	Operasional pada BPR Bank Salatiga Tahun Buku 2011 dan 2012
389		1	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) tahun Buku 2011 dan 2012 di Semarang
390	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PT Jatim Investment Management (PT JIM) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2011 dan 2012
391		1	Operasional PD Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2012
392		1	Kegiatan Operasional PD PT Jatim Marga Utama Tahun 2011 dan 2012
393		1	Operasional RSUD RA Basoeni Mojokerto Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Mojokerto

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
	394	Provinsi Bali	1	Operasional Tahun Buku 2011 Dan 2012 (s.d. Semester I) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali
	395		1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2011 Dan 2012
	396		1	Operasional PD BPR Bank Buleleng 45 Tahun Buku 2011 Dan 2012 (Semester I) Di Singaraja
	397		1	Operasional PDAM Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Dan 2012 (s.d. Juni 2012)
	398	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Operasional PD BPR NTB Bima Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni)
	399		1	Operasional PD BPR NTB Lombok Tengah Tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni 2012)
	400	Provinsi Kalimantan Barat	1	Operasional RSUD Dr. Soedarso TA 2011 dan 2012 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	401	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kegiatan Operasional PD Banama Tingang Makmur TB 2011 dan Semester I 2012 di Palangka Raya
	402	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo TB 2011 dan 2012 (s.d 30 September 2012)
	403	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Tahun 2011 dan 2012 (Semester I)
			36	
C	Operasional Badan Layanan Umum dan Badan Lainnya			
	404	Kementerian Perindustrian	1	Anggaran Dan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik dan Balai Besar Logam dan Mesin pada Kementerian Perindustrian Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Bandung
	405		1	Pengelolaan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro (BBIA) Dan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2011
	406	Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kediri di Kediri
	407	Rumah Sakit BHayangkara TK Raden Said Sukanto	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK Raden Said Sukanto
	408	Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010-2012 pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Mappaoudang di Makassar
	409	Universitas Indonesia	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) dan Pengelolaan Aset Tetap pada Universitas Indonesia di Depok
	410		1	Pemeriksaan Lanjutan pada Universitas Indonesia di Depok
	411	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Kementerian Agama RI TA 2010, 2011 dan Semester I 2012 pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati di Bandung
	412	Universitas Sebelas Maret	1	Belanja Modal Universitas Sebelas Maret TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) di Surakarta
	413	Universitas Gajah Mada	1	Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) dan pengelolaan aset tetap pada Universitas Gajah Mada
	414	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Denpasar, Malang, dan Madiun
	415		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Banjarmasin, Padang, dan Bukittinggi
	416		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Pekanbaru, dan Samarinda
	417		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Palembang, dan Manado
	418		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia di Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Purwokerto
	419	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Denpasar dan Semarang

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
420		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Makassar dan Pontianak
421		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Manado dan Medan
422		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Penerimaan, Belanja, dan Aset) Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia di Jakarta, Padang dan Samarinda
423	Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur
424	Otorita Asahan	1	Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan penyaluran <i>Annual fee</i> (luran Tetap dan luran Tambahan), pengelolaan dan pertanggungjawaban <i>Environmental Fund</i> , <i>Development Fund</i> , dan biaya Operasional TA 2010 s.d. TW I 2012 serta TL Rekomendasi BPK RI atas HP Tahun 2003 pada Otorita Asahan, PT Inalum, Kementerian Keuangan, dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Sumatera Utara
425	Provinsi Jawa Timur	1	Operasional RSUD Prof. DR. Soekandar Mojokerto Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III)
426		1	Operasional RSUD dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo TA 2011-2012
427	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Operasional RSUD Ulin Banjarmasin pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2011 dan Semester I 2012 di Banjarmasin
428	Provinsi Sulawesi Utara	1	Operasional RSUD Bitung TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung
429	Provinsi Papua	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Mimika TA 2011 dan 2012 (Semester I)
430		1	Pendapatan dan Belanja RSUD Paniai TA 2011 dan 2012 (Semester I)
		27	
VI	PDTT Lainnya		
431	Lembaga Penjamin Simpanan	1	PDTT Penanganan Bank Gagal Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta
432	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada Kementerian Kehutanan dan Perikanan, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
433	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Migas pada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
434	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Proses Penetapan Status dan Penerbitan Sertifikat " <i>Clear and Clean</i> " Pemegang IUP Mineral dan Batubara Tahun 2011 s.d 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
435		1	Pengelolaan Pertambangan Mineral TA 2009 s.d 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perusahaan Kontrak Karya (PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara) dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (PT Aneka Tambang UPBE Pongkor) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bogor, Gresik, Sumbawa dan Timika
436		1	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan dan Program Listrik Perdesaan Tahun Anggaran (TA) 2010 s.d. TA 2011 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangkitan dan Jaringan (UIP KITRING) Sumatera, Aceh, Riau, UIP KITRING Kalimantan, UIP Kitring Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan UIP Kitring Sulawesi, Maluku, Papua Serta Listrik Perdesaan Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara
437	Kementerian Pertanian	1	Program Swasembada Daging Sapi (Pengendalian Importasi Daging Sapi) Tahun 2010-2012 pada Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta
438	Kementerian Kehutanan	1	Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi pada Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Pusat), Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
439	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 dan Semester I TA 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muaro Bungo
440		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 dan Semester I TA 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Sengeti
441	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2011 dan 2012 di Pangkalpinang

Halaman 16 - Lampiran 37

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
	442	Provinsi Banten	1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 pada KPU dan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Banten di Serang
	443	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilukada TA 2011 pada Komisi Umum Pemilihan Daerah (KPUD) Kabupaten Buton di Pasarwajo
	444	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Gorontalo TA 2011 pada KPUD dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
	445	PT Timah	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Timah (Persero) Tbk. Dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, dan Pangkalpinang
	446	PT Antam	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Pomalaa, Pongkor, dan Tanjungpinang
	447	PT Pertamina (Persero)	1	Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya dan Balikpapan
	448		1	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Pertamina (Persero) tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan
	449	PT PLN (Persero)	1	Kelayakan pemungutan dan pengelolaan Uang Jaminan Langganan pada PT PLN (Persero)
	450	PT Sarinah	1	Pengadaan dan penjualan singkong kering (cassava) pada PT Sarinah (Persero) TA 2011 dan 2012 Semester I
			20	
		Jumlah LHP PDDT	450	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id





**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

**Buku V
Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**
(Buku ke-5 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	ii	
DAFTAR GRAFIK	iv	
DAFTAR LAMPIRAN	v	
BAB 1	Gambaran Umum	1
BAB 2	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara/Daerah	3
BAB 3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
BAB 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- 3.1 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
- 3.2 Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Selama Semester II Tahun 2012 atas data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sejak Tahun 2008
- 3.3 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
- 3.4 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
- 3.5 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
- 3.6 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
- 4.1 Data Kerugian Negara/Daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012
- 4.2 Data Kerugian Negara/Daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012
- 4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2012
- 4.4 Data Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat
- 4.5 Data Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat
- 4.6 Data Kerugian Negara dengan Status Dalam Proses Penetapan Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat
- 4.7 Data Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah
- 4.8 Data Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah
- 4.9 Data Kerugian Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah

- 4.10 Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012
- 4.11 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012
- 4.12 Hasil Pemantauan Data Tindak Lanjut LHP BPK yang Mengandung Unsur Pidana dan telah dilaporkan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK

- 3.1 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.2 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.3 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.4 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.5 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kementerian/Lembaga
2. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
3. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita

BAB 1

Gambaran Umum

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara/Daerah

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum milik negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan otorita, terdapat 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 109.391 rekomendasi senilai Rp33,58 triliun, status belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 49.222 rekomendasi senilai Rp30,67 triliun, status belum ditindaklanjuti sebanyak 40.491 rekomendasi senilai Rp20,83 triliun, dan status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 198 rekomendasi senilai Rp450,75 miliar.

Selain itu terdapat pula tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 9.855 rekomendasi, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.759 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 22,10% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2007.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 adalah senilai Rp17,51 triliun.

B. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 s.d. Tahun 2012 menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar, dan penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester II Tahun 2012 sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3,37 triliun.

Selain itu, BPK juga berkewajiban untuk menyampaikan LHP BPK yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang (Kepolisian RI, Kejaksaan RI, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 adalah sebanyak 159 surat yang terdiri dari 332 temuan senilai Rp34,35 triliun.

Hasil pemantauan terhadap LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 332 temuan dimaksud, sebanyak 186 temuan atau 56,02% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan

dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 146 temuan atau 43,98% belum ditindaklanjuti atau belum dapat diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam IHPS yang memuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita. IHPS II Tahun 2012 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita.

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu

- tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan antara lain dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern (SPI).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita, terdapat 199.302 rekomendasi senilai Rp85,55 triliun. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.1.

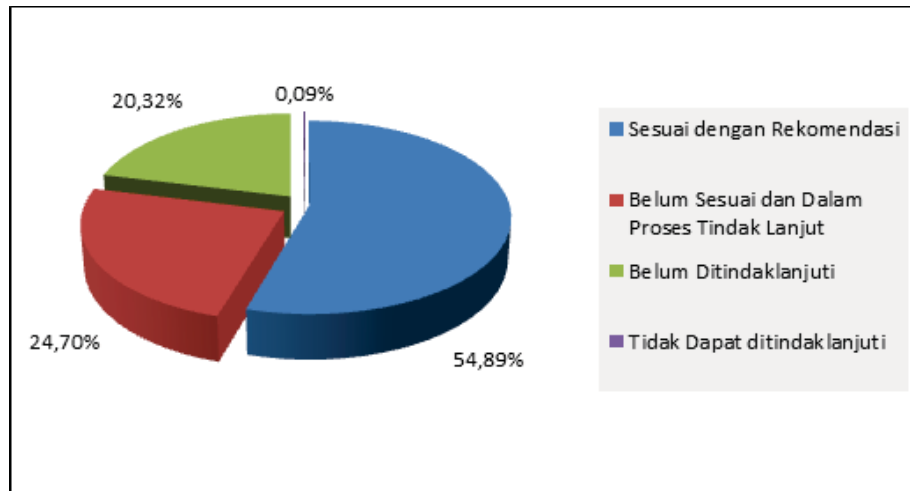
Tabel 3.1. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	21.983	37.493.625,34	13.515	10.185.005,49	5.167	14.501.704,41	3.242	12.554.968,35	59	251.947,09	7.903.857,83
Pemerintah Daerah	171.976	18.950.407,33	93.233	5.037.956,08	42.957	8.998.144,00	35.693	4.722.396,27	93	191.910,98	4.409.708,93
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	4.887	13.122.928,06	2.430	9.390.113,97	1.010	1.941.819,58	1.401	1.784.094,11	46	6.900,40	5.199.125,04
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Ptorita	456	15.983.735,08	213	8.973.878,36	88	5.235.189,09	155	1.774.667,63	-	-	-
TOTAL	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.1 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 109.391 rekomendasi atau 54,89%. Sedangkan sebanyak 49.222 rekomendasi atau 24,70% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 40.491 rekomendasi atau 20,32% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 198 rekomendasi atau 0,09% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 109.391 rekomendasi senilai Rp33,58 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan secara kumulatif sejak tahun 2008 s.d. Tahun 2012 senilai Rp17,51 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,89%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 9.855 rekomendasi senilai Rp8,47 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.759 rekomendasi senilai Rp928,69 miliar. Rekomendasi ini meliputi 22,10% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

Untuk mengetahui perkembangan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan selama Semester II Tahun 2012 di bawah ini disajikan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012 dibandingkan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 atas data sejak Tahun 2008.

Tabel 3.2. Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Selama Semester II Tahun 2012 atas data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sejak Tahun 2008

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester II Tahun 2012	199.302	85.550.695,81	109.391	33.586.953,90	49.222	30.676.857,08	40.491	20.836.126,36	198	450.758,47	17.512.691,80
Semester I Tahun 2012	183.862	80.970.223,98	94.689	31.527.368,72	43.297	26.295.337,32	45.715	22.809.665,42	161	337.852,52	16.901.459,21
Perkembangan	15.440	4.580.471,83	14.702	2.059.585,18	5.925	4.381.519,76	-5.224	-1.973.539,06	37	112.905,95	611.232,59

Selama Semester II Tahun 2012, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Semester II Tahun 2012 dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp611,23 miliar.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 secara keseluruhan dari 91 kementerian/lembaga terdapat 21.983 rekomendasi senilai Rp37,49 triliun. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 3.3. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

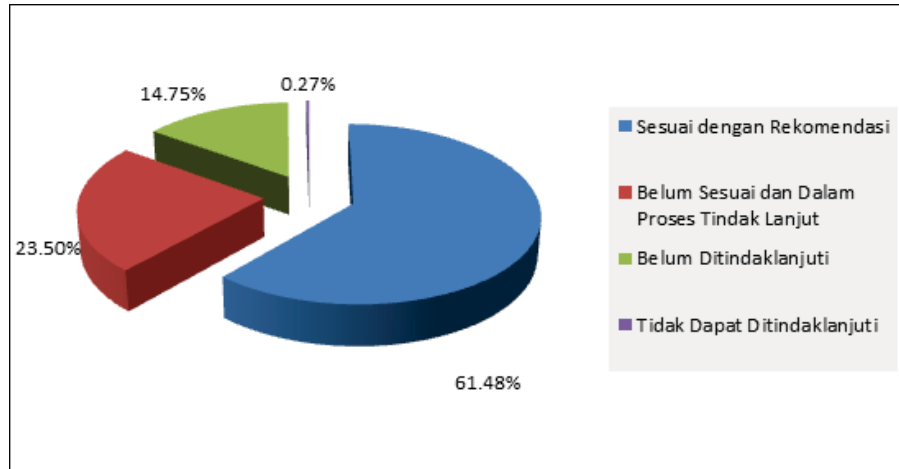
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
	12.075	71.195.515,32	21.983	33.445.190,49	13.515	9.712.052,35	5.167	13.894.533,45	3.242	9.690.968,36	59	147.636,32	7.085.539,07
		USD 490,663,46		USD 416,841,48		USD 47,143,55		USD 62,786,07		USD 296,124,81		USD 10,787,05	USD 84,605,66
		EUR 63,80		EUR 13,61		EUR 13,61		-		-		-	EUR 14,21
		AUD 28,59		AUD 28,59		-		-		AUD 28,59		-	-
		JPY 267,381,23		JPY 150,835,50		JPY 150,835,50		-		-		-	-
		SAR 1,502,90		-		-		-		-		-	-
		THB 25,00		THB 25,00		-		-		THB 25,00		-	-
		SGD 0,24		SGD 0,24		-		SGD 0,24		-		-	-
		RON 7,16		RON 7,15		RON 4,21		-		RON 2,94		-	-
		PLN 54,42		PLN 54,42		-		-		PLN 54,42		-	-
		KRW 3,075,01		KRW 3,075,01		-		KRW 3,075,01		-		-	-
Total (Rp)	75.975.376,17		37.493.625,34		10.185.005,49		14.501.704,41		12.554.968,35		251.947,09		7.903.857,83

Ket: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.2 sebagai berikut.

Grafik 3.2. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.2 data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.515 rekomendasi atau 61,48%, sedangkan sebanyak 5.167 rekomendasi atau 23,50% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 3.242 rekomendasi atau 14,75% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 59 rekomendasi atau 0,27% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 13.515 rekomendasi senilai Rp10,18 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara senilai Rp7,90 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (61,48%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada pemerintah pusat yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.531 rekomendasi senilai Rp2,68 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 407 rekomendasi senilai Rp124,63 miliar. Rekomendasi ini meliputi 17,54% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada Pemerintah Pusat.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 secara keseluruhan dari 524 pemerintah daerah dan 2 badan terdapat 171.976 rekomendasi senilai Rp18,95 triliun. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.4. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 2.

Tabel 3.4. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

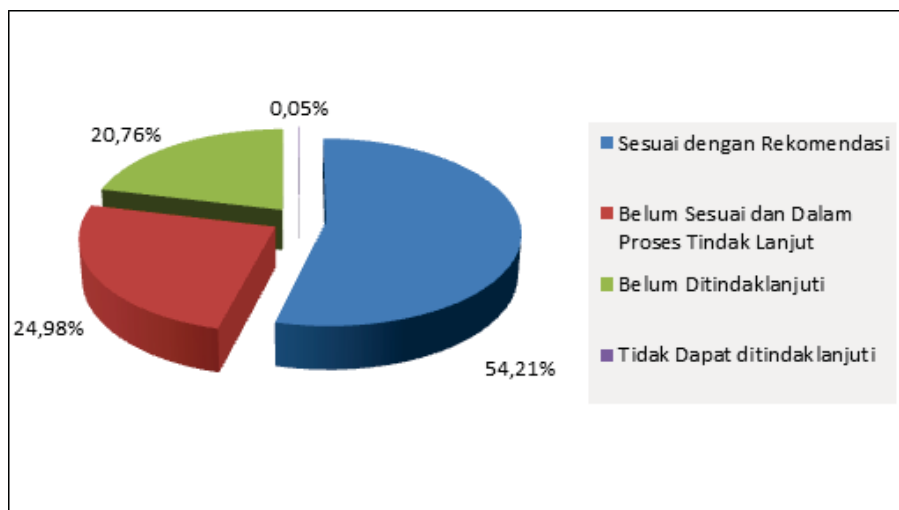
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan	
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
74.510	54.303.851,84	171.976	18.803.770,29	93.233	5.019.077,00	42.957	8.899.446,09	35.693	4.693.336,22	93	191.910,98	4.390.829,85
	USD 24.713.69		USD 14.875.05		USD 1.774.25		USD 10.206.61		USD 2.894.19			USD 1.774.25
	SGD 353.52		SGD 353.52		SGD 217.79				SGD 135.73			SGD 217.79
Total (Rp)	54.545.628,55		18.950.407,33		5.037.956,08		8.998.144,00		4.722.396,27		191.910,98	4.409.708,93

Ket: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.3 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.4 dan Grafik 3.3 terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 93.233 rekomendasi atau 54,21% sedangkan sebanyak 42.957 rekomendasi atau 24,98% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 35.693 rekomendasi atau 20,76% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 93 rekomendasi atau 0,05% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 93.233 rekomendasi senilai Rp5,03 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp4,40 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,21%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 7.971 rekomendasi senilai Rp3,55 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.206 rekomendasi senilai Rp704,77 miliar. Rekomendasi ini meliputi 23,48% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 secara keseluruhan dari 172 BUMN (termasuk Anak Perusahaan) terdapat 4.887 rekomendasi senilai Rp13,12 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.5. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN (termasuk Anak Perusahaan) disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.5. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

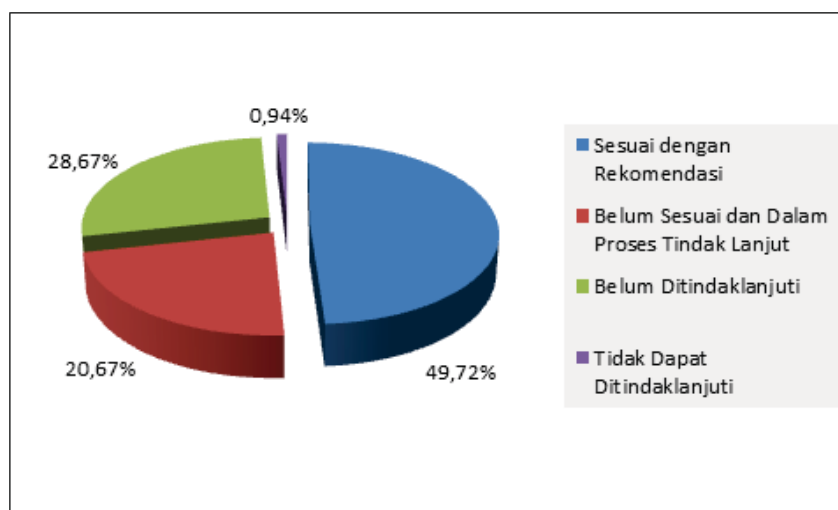
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BUMN (Induk perusahaan)	2.582	99.406.452,82	4.619	7.277.447,57	2.213	4.304.920,38	985	1.284.229,83	1.376	1.681.396,96	45	6.900,40	4.406.314,71
		USD 1,384,911.78		USD 579,314.70		USD 510,911.69		USD 66,897.78		USD 1,505.23		-	USD 66,355.03
		EUR 469.83		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
		JPY 104,916.81		-		-		-		-		-	-
		CNY 896.89		-		-		-		-		-	-
BUMN (anak perusahaan)	180	28.744.030,96	268	234.192,75	217	135.362,95	25	10.688,22	25	88.141,58	1	-	141.751,01
		USD 53,701.07		USD 931.19		USD 931.19		-		-		-	USD 940.66
		EUR 117.48		-		-		-		-		-	-
TOTAL	2.762	128.150.483,78	4.887	7.511.640,32	2.430	4.440.283,33	1.010	1.294.918,05	1.401	1.769.538,54	46	6.900,40	4.548.065,72
		USD 1,438,612.85		USD 580,245.89		USD 511,842.88		USD 66,897.78		USD 1,505.23		-	USD 67,295.69
		EUR 587.31		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
		JPY 104,916.81		-		-		-		-		-	-
		CNY 896.89		-		-		-		-		-	-
Total (Rp)	2.762	142.082.519,53	4.887	13.122.928,06	2.430	9.390.113,97	1.010	1.941.819,58	1.401	1.784.094,11	46	6.900,40	5.199.125,04

Ket: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Dalam bentuk lebih ringkas, status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.4 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.4. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.5 dan Grafik 3.4 tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.430 rekomendasi atau 49,72%, sedangkan sebanyak 1.010 rekomendasi atau 20,67% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 1.401 rekomendasi atau 28,67% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 46 rekomendasi atau 0,94% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 2.430 rekomendasi senilai Rp9,39 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) senilai Rp5,19 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (49,72%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada BUMN yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 297 rekomendasi senilai Rp2,13 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 142 rekomendasi senilai Rp99,28 miliar. Rekomendasi ini meliputi 14,87% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita mengungkapkan bahwa dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 terdapat 456 rekomendasi senilai Rp15,98 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.6. Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

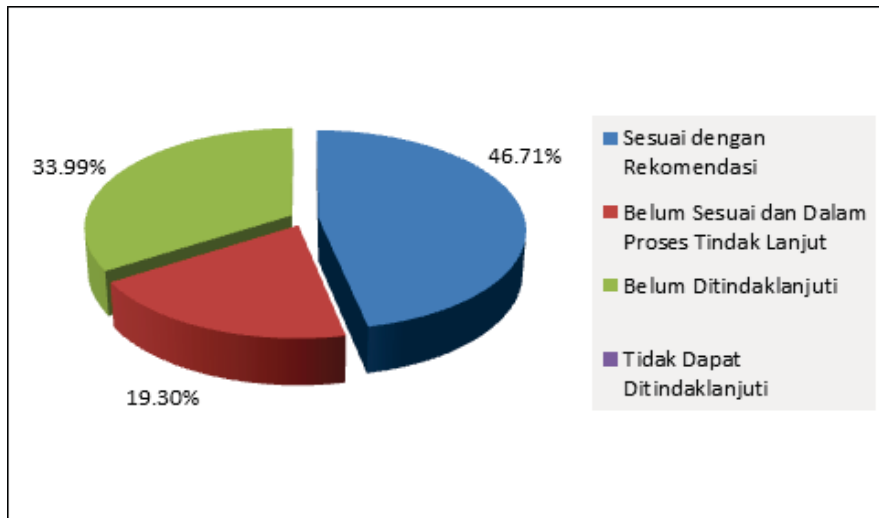
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset / penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BHMN	53	207.112,38	68	-	36	-	17	-	15	-	-	-	-
		USD 137,143.74		USD 11,250.02		-		USD 11,250.02		-		-	-
KKKS	266	107.080,39	309	60.092,80	150	1.628,69	63	2.748,23	96	55.715,88	-	-	-
		USD 1,869,919.41		USD 1,555,156.37		USD 927,839.48		USD 529,850.38		USD 97,466.51		-	-
		SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-		-	-
		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-		EUR 11.88		-	-
Badan Usaha Lainnya (Lembaga)	16	-	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
Saham Pemerintah 50%	3	2.514,51	4	2.514,51	-	-	-	-	4	2.514,51	-	-	-
Penyertaan BUMN	10	28.717,34	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Otorita	10	773.783,91	26	773.783,91	-	-	-	-	26	773.783,91	-	-	-
		USD 1,440.21		-		-		-		-		-	-
TOTAL	358	1.119.208,53	456	836.391,22	213	1.628,69	88	2.748,23	155	832.014,30	-	-	-
		USD 2,008,503.36		USD 1,566,406.39		USD 927,839.48		USD 541,100.40		USD 97,466.51		-	-
		SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-		-	-
		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-		EUR 11.88		-	-
Total (Rp)	358	20.541.630,11	456	15.983.735,08	213	8.973.878,36	88	5.235.189,09	155	1.774.667,63	-	-	-

Ket: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Dalam bentuk lebih ringkas, status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.5 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.5. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2008 s.d Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.6 dan Grafik 3.5 terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 213 rekomendasi atau 46,71%, sedangkan sebanyak 88 rekomendasi atau 19,30% belum sesuai rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 155 rekomendasi atau 33,99% belum ditindaklanjuti.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (46,71%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita telah memperhatikan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 56 rekomendasi senilai Rp102,94 miliar, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 24% dari seluruh rekomendasi BPK pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2005 s.d. Tahun 2007.

BAB 4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

PENDAHULUAN

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

GAMBARAN UMUM

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2012 memuat data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "*telah ditetapkan*" dan "*dalam proses penetapan*".

Data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 merupakan data kerugian yang dimuat dalam IHPS Semester II Tahun 2012.

Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, dengan cakupan sebesar 30,32% atau sejumlah 671 entitas dari 2.213 total entitas yang seharusnya dipantau.

Data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4.710,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar, dan penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester II Tahun 2012 sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3.378,72 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Kerugian Negara/Daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
Penanggung Jawab Kerugian Negara				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3.220	443,14	970	22,00	1.226	36,48	78	2,98	1.918	381,68
	USD		60.00		-		-		60.00		-
	KSHS		2,000.00		-		-		2,000.00		-
TGR Nonbendahara	IDR	10.076	829,67	2.602	178,20	3.740	104,99	35	1,52	6.320	544,96
	USD		3,023.74		6.97		-		-		3,016.77
	AUD		2,111.93		-		-		-		2,111.93
	GBP		199.15		-		-		-		199.15
	CAD		39.60		-		-		-		39.60
	JPY		523,747.20		-		-		-		523,747.20
	EUR		33,231.17		-		-		-		33,231.17
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
Pihak Ketiga	IDR	3.928	1.487,95	890	227,17	1.950	98,34	4	1,25	1.975	1.161,19
	USD		141,054.76		14,319.83		52,835.80		-		73,899.13
Pengelola Keuangan	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
Total	IDR	17.282	2.804,90	4.501	429,80	6.928	239,92	127	11,66	10.249	2.123,52
	USD		144,138.50		14,326.80		52,835.80		60.00		76,915.90
	AUD		2,111.93		-		-		-		2,111.93
	GBP		199.15		-		-		-		199.15
	CAD		39.60		-		-		-		39.60
	JPY		523,747.20		-		-		-		523,747.20
	EUR		33,231.17		-		-		-		33,231.17
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	KSHS		2,000.00		-		-		2,000.00		-
Total Valas Ekuivalen	IDR		1.905,46		138,54		510,92		0,80		1.255,20
Total Kerugian Negara	IDR	17.282	4.710,36	4.501	568,34	6.928	750,84	127	12,46	10.249	3.378,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012

Data kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012 terdapat 16.883 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp4.699,00 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp567,53 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp745,69 miliar, dan penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3.373,32 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Kerugian Negara/Daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai
Penanggung Jawab Kerugian Negara				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3.128	441,19	942	21,75	1.178	36,30	78	2,98	1.872	380,16
	USD		60,00		-		-		60,00		-
	KSHS		2,000,00		-		-		2,000,00		-
TGR Nonbendahara	IDR	9.788	820,90	2.550	177,67	3.673	100,02	33	1,52	6.082	541,69
	USD		3,023,74		6,97		-		-		3,016,77
	AUD		2,111,93		-		-		-		2,111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523,747,20		-		-		-		523,747,20
	EUR		33,231,17		-		-		-		33,231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
Pihak Ketiga	IDR	3.909	1.487,31	888	227,14	1.949	98,34	4	1,25	1.956	1.160,58
	USD		141,054,76		14,319,83		52,835,80		-		73,899,13
Pengelola BUMN dan BUMD	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
Total	IDR	16.883	2.793,54	4.419	428,99	6.812	234,77	125	11,66	9.946	2.118,12
	USD		144,138,50		14,326,80		52,835,80		60,00		76,915,90
	AUD		2,111,93		-		-		-		2,111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523,747,20		-		-		-		523,747,20
	EUR		33,231,17		-		-		-		33,231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
	KSHS		2,000,00		-		-		2,000,00		-
Total Valas Ekuivalen	IDR		1.905,46		138,54		510,92		0,80		1.255,20
Total Kerugian Negara	IDR	16.883	4.699,00	4.419	567,53	6.812	745,69	125	12,46	9.946	3.373,32

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

**) Nilai total kerugian negara, total penyelesaian kerugian, total sisa kerugian berbeda dengan nilai yang disajikan pada IHPS I 2012 dikarenakan adanya perbedaan nilai kurs tengah yang digunakan. Untuk IHPS I 2012 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012, sedangkan pada IHPS II 2012 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

***) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara

Data kerugian negara/daerah dengan subjek bendahara terdapat 3.128 kasus senilai Rp441,19 miliar dan beberapa valuta asing, dengan penyelesaian kerugian negara/daerah terdiri atas angsuran sebanyak 942 kasus senilai Rp21,75 miliar, pelunasan sebanyak 1.178 kasus senilai Rp36,30 miliar, dan penghapusan sebanyak 78 kasus senilai Rp2,98 miliar dan beberapa valuta asing. Sisa kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebanyak 1.872 kasus senilai Rp380,16 miliar.

2. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Data kerugian negara/daerah dengan subjek pegawai negeri bukan bendahara terdiri dari 9.788 kasus senilai Rp820,90 miliar dengan beberapa valuta asing. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara terdiri atas angsuran sebanyak 2.550 kasus senilai Rp177,67 miliar dan USD6,97 ribu, pelunasan sebanyak 3.673 kasus senilai Rp100,02 miliar, dan penghapusan sebanyak 33 kasus senilai Rp1,52 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebanyak 6.082 kasus senilai Rp541,69 miliar dengan beberapa valuta asing.

3. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Ketiga

Data kerugian negara/daerah dengan subjek pihak ketiga terdiri dari 3.909 kasus senilai Rp1.487,31 miliar dan USD141,054.76 ribu, dengan penyelesaian meliputi angsuran sebanyak 888 kasus senilai Rp227,14 miliar dan USD14,319.83 ribu, pelunasan sebanyak 1.949 kasus senilai Rp98,34 miliar dan USD52,835.80 ribu, dan penghapusan terdiri dari 4 kasus senilai Rp1,25 miliar.

Sampai dengan Semester I Tahun 2012, sisa kerugian negara/daerah sebanyak 1.956 kasus senilai Rp1.160,58 miliar dan USD73,899.13 ribu.

4. Kerugian Negara/Daerah terhadap Pengelola BUMN dan BUMD

Data kerugian negara/daerah dengan subjek Pengelola BUMN/BUMD terdiri atas 58 kasus senilai Rp44,14 miliar, dengan penyelesaian meliputi angsuran sebanyak 39 kasus senilai Rp2,43 miliar, pelunasan sebanyak 12 kasus senilai Rp0,11 miliar dan penghapusan sebanyak 10 kasus senilai Rp5,91 miliar.

Sisa kasus kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebanyak 36 kasus senilai Rp35,69 miliar.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2012

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 terdapat 399 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp11,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar, dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester II Tahun 2012 yaitu sebanyak 303 kasus senilai Rp5,40 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa		
				Angsuran		Lunas		Penghapusan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												$12=4-(6+8+10)$
TGR Bendahara	IDR	92	1,95	28	0,25	48	0,18	-	-	46	1,52	
TGR Nonbendahara	IDR	288	8,77	52	0,53	67	4,97	2	-	238	3,27	
Pihak III	IDR	19	0,64	2	0,03	1	-	-	-	19	0,61	
Total	IDR	399	11,36	82	0,81	116	5,15	2	-	303	5,40	

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Selanjutnya hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2012 dirinci lebih lanjut dalam pemantauan pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD, sebagai berikut.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Jumlah kasus kerugian negara pada instansi pusat periode Semester II Tahun 2012 yaitu sebanyak 93 kasus senilai Rp2,78 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran yang telah dilakukan sebanyak 26 kasus senilai Rp0,17 miliar, pelunasan sebanyak 32 kasus senilai Rp1,26 miliar dengan sisa kerugian negara yaitu sebanyak 64 kasus senilai Rp1,35 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di instansi pusat periode Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Data Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Penanggung Jawab Kerugian Negara	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2	0,53	2	0,02	-	-	-	-	2	0,51
TGR Nonbendahara	IDR	91	2,25	24	0,15	32	1,26	-	-	62	0,84
Pihak III	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	93	2,78	26	0,17	32	1,26	0	0	64	1,35

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Data kerugian negara pada instansi pusat selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian negara pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan disajikan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

1. Data Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan

Tabel 4.5. Data Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Penanggung Jawab Kerugian Negara	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2	0,53	2	0,02	-	-	-	-	2	0,51
TGR Nonbendahara	IDR	56	1,56	15	0,12	29	0,73	-	-	27	0,71
Pihak III	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	58	2,09	17	0,14	29	0,73	-	-	29	1,22

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

2. Data Kerugian Negara dengan Status dalam Proses Penetapan

Tabel 4.6. Data Kerugian Negara dengan Status Dalam Proses Penetapan Periode Semester II Tahun 2012 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Penanggung Jawab Kerugian Negara	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR Bendahara	IDR	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TGR Nonbendahara	IDR	35	0,69	9	0,03	3	0,53	0	-	35	0,13
Pihak III	IDR	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	IDR	35	0,69	9	0,03	3	0,53	0	0	35	0,13

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada BUMN.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Data kerugian daerah periode Semester II Tahun 2012 sebanyak 306 kasus senilai Rp8,58 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 56 kasus senilai Rp0,64 miliar, pelunasan sebanyak 84 kasus senilai Rp3,89 miliar, dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sebanyak 239 kasus senilai Rp4,05 miliar.

Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah periode Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Data Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Penanggung Jawab Kerugian Negara	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR Bendahara	IDR	90	1,42	26	0,23	48	0,18	-	-	44	1,01
TGR Nonbendahara	IDR	197	6,52	28	0,38	35	3,71	2	-	176	2,43
Pihak III	IDR	19	0,64	2	0,03	1	-	-	-	19	0,61
Total	IDR	306	8,58	56	0,64	84	3,89	2	-	239	4,05

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Data kerugian daerah pada instansi daerah selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian daerah pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan disajikan dalam Tabel 4.8 dan Tabel 4.9.

1. Data Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

Tabel 4.8. Data Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	69	0,46	23	0,10	46	0,18	-	-	23	0,18
TGR Nonbendahara	IDR	74	4,35	15	0,15	19	3,61	2	-	53	0,59
Pihak III	IDR	6	0,20	-	-	-	-	-	-	6	0,20
Total	IDR	149	5,01	38	0,25	65	3,79	2	-	82	0,97

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

2. Data kerugian daerah dengan status dalam proses penetapan

Tabel 4.9. Data Kerugian Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan Periode Semester II Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	21	0,96	3	0,13	2	-	-	-	21	0,83
TGR Nonbendahara	IDR	123	2,17	13	0,23	16	0,10	-	-	123	1,84
Pihak III	IDR	13	0,44	2	0,03	1	-	-	-	13	0,41
Total	IDR	157	3,57	18	0,39	19	0,10	-	-	157	3,08

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 tidak terdapat penambahan data maupun penyelesaian kasus kerugian daerah pada BUMD.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa pada periode Semester II Tahun 2012 tidak terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti BHMN dan badan layanan umum (BLU).

Permasalahan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut.

1. Tim penyelesaian kerugian negara (TPKN) perlu berkoordinasi dengan inspektorat terkait dengan penyelesaian kerugian negara/daerah.
2. Entitas belum melaporkan terjadinya kerugian negara/daerah kepada BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
3. Pelaksanaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Beberapa informasi kerugian negara/daerah belum ditindaklanjuti.
5. Beberapa entitas belum mempunyai Daftar Inventaris Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
6. Penagihan pembayaran kerugian negara/daerah belum maksimal dilaksanakan oleh entitas.
7. Belum tertibnya pengelolaan administrasi data kerugian negara/daerah.
8. Belum adanya pengaturan mengenai prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah.
9. Penyelesaian kerugian negara/daerah macet atau tidak tertagih karena penanggung jawab tidak diketahui keberadaannya.
10. Kasus-kasus kerugian negara/daerah yang telah diproses secara pidana belum ditindaklanjuti dengan pemrosesan secara administrasi.
11. Pelaksanaan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang belum disertai dengan jaminan.
12. Proses penghapusan dilaksanakan belum sesuai ketentuan.
13. Penagihan/penyelesaian kepada pihak ketiga belum optimal dilaksanakan.
14. Pemahaman terhadap ketentuan belum optimal sehingga penanganan kasus-kasus kerugian negara/daerah belum sesuai ketentuan.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pimpinan instansi membentuk TPKN/D dan atau meningkatkan kinerja TPKN/D yang sudah terbentuk serta meningkatkan koordinasi dengan inspektorat dalam mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah.
2. Pimpinan instansi mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai tata cara yang termuat dalam peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dan peraturan lain tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.
3. Pimpinan instansi meningkatkan koordinasi dalam menangani kendala-kendala penyelesaian kerugian negara/daerah antara lain dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pelimpahan atau penghapusan piutang negara/daerah maupun BPK dalam pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai kewenangannya.
4. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
5. Untuk mengisi kekosongan hukum atas pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dimaksud, instansi dapat menyusun petunjuk teknis atau Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan indikasi unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK.

Laporan pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan surat keluar BPK sejak akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 sebanyak 159 surat yang terdiri atas 332 temuan senilai Rp34.353,58 miliar.

Instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 186 temuan atau 56,02% yang terdiri atas 37 temuan (11,14%) berupa pelimpahan, 47 temuan (14,16%) dalam proses penyelidikan, 8 temuan (2,41%) dalam proses penyidikan, 13 temuan (3,92%) proses penuntutan dan persidangan, 70 temuan (21,08%) telah diputus oleh pengadilan, dan 11 temuan (3,31%) dihentikan penyidikannya dengan SP3. Adapun sebanyak 146 temuan atau 43,98% belum ditindaklanjuti atau belum dapat diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
		Laporan Indikasi Pidana				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
		Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)							
Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	1	10	18.965	-	-	-	-	-	-	10	-
	2005	1	1	104	-	-	-	-	-	1	-	-
	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	3	3	673	-	-	2	-	-	1	-	-
	2008	2	1	8	-	-	-	1	-	-	-	-
	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	2	2	16	-	-	-	2	-	-	-	-
	2011	3	20	12	-	-	-	-	-	-	-	20
	2012	6	4	30	10,846	-	-	-	-	-	-	4
Sub Total		18	41	19.807,26	10,846.07	0	2	3	0	2	10	24
Kejaksaan RI	2003	4	17	121	-	11	-	-	-	6	-	-
	2004	9	54	384	3,240	25	-	-	-	29	-	-
	2005	7	14	2.746	39,096	-	-	4	4	-	-	6
	2006	9	18	614	112,047	-	14	-	-	-	-	4
	2007	10	28	1.682	53,838	-	7	-	1	11	-	9
	2008	6	4	86	-	-	-	-	-	2	-	2
	2009	16	20	217	315	-	1	1	2	2	1	13
	2010	10	15	82	8,835	-	-	-	-	-	-	15
	2011	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	2012	7	6	18	-	-	-	-	-	-	-	6
Sub Total		80	178	5.950	217,372	36	22	5	7	50	1	57
KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2006	3	8	120	-	-	3	-	-	5	-	-
	2007	5	4	19	235,214	-	2	-	-	2	-	-
	2008	13	23	2.749	26,376	1	12	-	1	9	-	-
	2009	15	22	403	1,464	-	6	-	4	2	-	10
	2010	14	46	395	453	-	-	-	1	-	-	45
	2011	3	4	79	-	-	-	-	-	-	-	4
	2012	8	6	77	-	-	-	-	-	-	-	6
Sub Total		61	113	3.841	263,507	1	23	-	6	18	-	65
Total		159	332	29.599	491,725	37	47	8	13	70	11	146
Total Ekuivalen					4.754,97							
Total Kerugian		159	332		34.353,58			186				146
Prosentase			100%			11,14%	14,16%	2,41%	3,92%	21,08%	3,31%	43,98%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

Rincian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang adalah sebagai berikut.

Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan surat keluar BPK sejak Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebanyak 145 surat yang terdiri atas 319 temuan senilai Rp34.158,21 miliar.

Instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 186 temuan (58,31%) yang terdiri atas pelimpahan sebanyak 37 temuan (11,60%), proses penyelidikan sebanyak 47 temuan (14,73%), proses penyidikan sebanyak 8 temuan (2,51%), proses penuntutan dan persidangan sebanyak 13 temuan (4,08%), telah diputus oleh peradilan sebanyak 70 temuan (21,94%), maupun dihentikan penyidikannya sebanyak 11 temuan (3,45%). Adapun sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasinya mengenai tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Tahun	Laporan Indikasi Pidana				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	
		Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)							
Kepolisian RI	2003	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2004	1	10	18.964,61	-	0	0	0	0	0	10	0
	2005	1	1	103,62	-	0	0	0	0	1	0	0
	2006	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2007	3	3	673,27	-	0	2	0	0	1	0	0
	2008	2	1	7,96	-	0	0	1	0	0	0	0
	2009	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2010	2	2	16,13	-	0	0	2	0	0	0	0
	2011	3	20	11,64	-	0	0	0	0	0	0	20
	2012	2	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	14	37	19.777,23		0	2	3	0	2	10	20
Kejaksaan RI	2003	4	17	120,57	-	11	0	0	0	6	0	0
	2004	9	54	383,83	3.240,00	25	0	0	0	29	0	0
	2005	7	14	2.746,12	39.095,83	0	0	4	4	0	0	6
	2006	9	18	613,94	112.047,47	0	14	0	0	0	0	4
	2007	10	28	1.681,83	53.838,40	0	7	0	1	11	0	9
	2008	6	4	85,62	-	0	0	0	0	2	0	2
	2009	16	20	216,54	315,40	0	1	1	2	2	1	13
	2010	10	15	82,15	8.834,63	0	0	0	0	0	0	15
	2011	2	2	1,29	-	0	0	0	0	0	0	2
	2012	3	2	4,38	-	0	0	0	0	0	0	2
	Sub Total	76	174	5.936,27	217.371,73	36	22	5	7	50	1	53
KPK	2003	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2004	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2005	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2006	3	8	120,33	-	0	3	0	0	5	0	0
	2007	5	4	18,76	235.214,22	0	2	0	0	2	0	0
	2008	13	23	2.748,73	26.375,63	1	12	0	1	9	0	0
	2009	15	22	402,57	1.463,99	0	6	0	4	2	0	10
	2010	14	46	394,98	453,00	0	0	0	1	0	0	45
	2011	3	4	78,51	-	0	0	0	0	0	0	4
	2012	2	1	30,74	-	0	0	0	0	0	0	1
	Sub Total	55	108	3.794,62	263.506,84	1	23	0	6	18	0	60
Total	145	319	29.508,12	480.878,57	37	47	8	13	70	11	133	
Total Ekuivalen				4.650,09								
Total Kerugian	145	319		34.158,21			186				133	
Prosentase		100%			11,60%	14,73%	2,51%	4,08%	21,94%	3,45%	41,69%	

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2012

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan surat keluar BPK pada Semester II Tahun 2012 sebanyak 14 surat yang terdiri atas 13 temuan senilai Rp195,37 miliar. Dari 13 temuan tersebut belum ada temuan yang ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK periode Semester II Tahun 2012 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK yang Mengandung Unsur Pidana dan Telah Dilaporkan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Tahun	Laporan Indikasi Pidana				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	
		Surat Kelua	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)							
Polri	2012	4	4	30,03	10,846.07	0	0	0	0	0	0	4
Kejaksaan	2012	4	4	13,85	-	0	0	0	0	0	0	4
KPK	2012	6	5	46,61	-	0	0	0	0	0	0	5
Total	2012	14	13	90,49	10,846.07	0	0	0	0	0	0	13
Total Valas Ekuivalen		14	13	104,88		0						13
Total				195,37								
Posentase			100%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	ENTITAS	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kementerian Pertahanan	2008	12	306.100,95	131	330,36	88	330,36	28	-	14	-	1	-	330,36
		2009	12	14.233,56	97	0,00	66	0,00	13	-	18	-	-	-	0,00
		2010	17	3.539,38	130	3.539,38	28	-	37	-	65	3.539,38	-	-	-
		2011	8	21.368,95	28	21.368,95	3	15.854,78	14	5.514,17	11	-	-	-	15.854,78
		2012	19	5.955,64	38	5.955,64	7	155,58	9	-	22	5.800,06	-	-	155,58
	Jumlah	Jumlah	68	351.198,48	424	31.194,33	192	16.340,72	101	5.514,17	130	9.339,44	1	-	16.340,72
2	Mabes TNI	2008	34	13.571,03	63	331,02	60	331,02	3	-	-	-	-	-	0,00
		2009	22	475,51	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	-	-	0,00
		2010	10	95,94	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	-	-	0,00
		2011	27	878,32	52	828,48	44	715,39	6	113,09	2	-	-	-	0,00
		2012	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-	0,00
		Jumlah	93	15.020,80	164	1.394,35	153	1.281,26	9	113,09	2	-	-	-	0,00
				USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00				USD 0,00			
				USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00				USD 0,00			
3	TNI AD	2008	95	73.056,76	211	73.056,76	192	3.788,59	17	69.268,17	1	-	1	-	2.560,99
		2009	54	2.338,18	97	2.338,18	96	2.338,18	1	-	-	-	-	-	661,08
		2010	27	5.643,49	45	5.643,49	42	5.643,49	3	-	-	-	-	-	2.386,60
		2011	61	721.533,27	84	17.650,95	74	13.141,90	10	4.509,05	-	-	-	-	3.992,17
		2012	44	78.538,28	88	19.237,82	21	2.638,35	41	810,39	26	15.789,08	-	-	2.688,79
	Jumlah	Jumlah	281	881.109,98	525	117.927,20	425	27.550,51	72	74.857,61	27	15.789,08	1	-	12.289,63
4	TNI AL	2008	51	41.460,93	83	41.506,46	83	41.506,46	-	-	-	-	-	-	41.506,46
		2009	10	964,23	18	649,84	17	86,09	1	563,75	-	-	-	-	86,09
		2010	22	18.834,30	49	2.351,12	49	2.351,12	-	-	-	-	-	-	1.450,78
		2011	57	5.796,37	71	2.509,96	58	820,47	10	572,76	1	810,00	2	306,73	820,47
		2012	48	12.687.535,65	64	2.576,52	21	1.955,83	35	71,18	8	549,51	-	-	1.907,33
	Jumlah	Jumlah	188	12.754.591,48	285	49.593,90	228	46.719,97	46	1.207,69	9	1.359,51	2	306,73	45.771,13

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	ENTitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	TNI/AU	2008	54	161.377,64	132	127.625,74	121	59.774,29	11	67.851,45	-	-	-	-	23.779,06
				USD 151.96	-	USD 151.96	-	USD 151.96	-	-	-	-	-	-	-
		2009	20	8.285,34	34	2.348,55	34	2.348,55	-	-	-	-	-	-	2.215,61
				USD 971.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	37	15.102,36	58	2.066,05	58	2.066,05	-	-	-	-	-	-	1.463,70
		2011	28	4.511,29	55	120,57	51	40,72	4	79,85	-	-	-	-	40,72
		2012	82	256.122,33	71	5.695,16	22	5.695,16	30	73.626,46	19	-	-	-	-
		Jumlah	221	445.398,96	350	137.856,07	286	64.229,61	45	73.626,46	19	-	-	-	27.499,09
				USD 1.123,79		USD 151,96		USD 151,96		-					-
6	Kementerian Luar Negeri	2008	188	497.677,48	229	497.663,53	1960	495.284,74	30	2.242,41	8	54,12	1	82,26	495.227,97
				USD 122,75	-	USD 122,99	-	USD 122,99	-	-	-	-	-	-	USD 91,38
				EUR 11,18	-	EUR 11,18	-	EUR 11,18	-	-	-	-	-	-	EUR 11,78
		2009	112	647.556,08	145	647.556,07	124	645.683,89	17	1.840,03	4	32,15	-	-	645.683,89
				USD 1.599,93	-	USD 1.597,42	-	USD 1.597,42	-	-	-	-	-	-	USD 1.549,22
				EUR 0,40	-	EUR 0,40	-	EUR 0,40	-	-	-	-	-	-	EUR 0,40
		2010	104	38.791,55	145	38.524,27	106	35.449,55	21	2.422,75	18	651,97	-	-	33.929,98
		2011	155	13.520,29	228	12.098,94	109	2.393,52	79	540,65	90	9.164,77	-	-	755,74
				USD 13,86	-	USD 12,70	-	USD 4,42	-	-	-	USD 8,28	-	-	-
				EUR 16,43	-	EUR 2,03	-	EUR 2,03	-	-	-	RON 2,94	-	-	EUR 2,03
				RON 7,16	-	RON 7,15	-	RON 4,21	-	RON 2,94	-	RON 2,94	-	-	-
		2012	55	1.249,00	86	268,65	35	222,64	5	-	46	46,01	-	-	222,64
				USD 241,12	-	USD 241,11	-	USD 16,20	-	-	-	USD 28,59	-	-	-
				AUD 28,59	-	AUD 28,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				PLN 54,42	-	PLN 54,42	-	-	-	-	-	PLN 54,42	-	-	-
		Jumlah	614	1.198.794,40	833	1.196.111,46	564	1.179.034,34	102	7.045,84	166	9.949,02	1	82,26	1.175.820,22
				USD 1.977,66	-	USD 1.974,22	-	USD 1.741,03	-	-	-	USD 233,19	-	-	USD 1.640,60
				EUR 28,01	-	EUR 13,61	-	EUR 13,61	-	-	-	RON 2,94	-	-	EUR 14,21
				RON 7,16	-	RON 7,15	-	RON 4,21	-	-	-	RON 2,94	-	-	-
				AUD 28,59	-	AUD 28,59	-	AUD 28,59	-	-	-	AUD 28,59	-	-	-
				PLN 54,42	-	PLN 54,42	-	PLN 54,42	-	-	-	PLN 54,42	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENTITAS	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2008	28	5.200,91	39	3.152,91	32	3.152,61	7	0,30	-	-	-	-	3.152,61
		2009	27	4.131,32	39	1.435,64	12	1.435,64	4	-	23	-	-	-	1.435,64
		2010	37	65.425,66	89	64.987,88	15	1.037,35	44	9.472,46	30	54.478,07	-	-	1.048,65
		2011	35	47.236,00	66	44.858,55	14	6.885,46	28	28.137,17	24	9.835,92	-	-	6.885,46
		2012	30	123.076,06	87	123.076,68	15	50.902,88	63	72.126,01	9	47,79	-	-	50.902,88
			-	USD 13,72	-	USD 13,72	-	-	-	USD 13,72	-	-	-	-	-
			-	KRW 3,075,01	-	KRW 3,075,01	-	-	-	KRW 3,075,01	-	-	-	-	-
			-	SGD 0,24	-	SGD 0,24	-	-	-	SGD 0,24	-	-	-	-	-
	Jumlah		157	245.069,95	320	237.511,66	88	63.413,94	146	109.735,94	86	64.361,78	-	-	63.425,24
				USD 13,72		USD 13,72		-	-	USD 13,72		-			-
				KRW 3,075,01		KRW 3,075,01		-	-	KRW 3,075,01		-			-
				SGD 0,24		SGD 0,24		-	-	SGD 0,24		-			-
8	Wantannas	2008	10	16,80	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	3,52	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	-	-	3,52
		2012	8	5,18	17	5,18	1	5,18	-	-	16	-	-	-	5,18
		Jumlah	35	25,50	69	8,70	53	8,70	-	-	16	-	-	-	8,70
9	BIN	2008	5	39,20	5	39,20	5	39,20	-	-	-	-	-	-	39,20
		2009	14	11,26	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	-	-	11,26
		2010	11	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	6	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-
		Jumlah	38	50,46	55	50,46	49	50,46	-	-	6	-	-	-	50,46
10	Lemsaneg	2008	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	43.745,28	44	1.047,20	33	870,44	11	176,76	-	-	-	-	892,44
		2010	8	395,24	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	331,74
		2011	8	972,75	18	777,75	17	171,61	1	-	-	-	-	606,14	171,61
		2012	9	2.673,16	13	-	9	-	3	-	1	-	-	-	2.673,16
		Jumlah	46	47.786,43	92	1.824,95	74	1.042,05	17	176,76	1	-	-	606,14	4.068,95

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		16	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
11	Lemhannas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2008	13	166,94	18	86,84	18	86,84	-	-	-	-	-	-	-	86,84
		2009	8	94,98	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	-	-	-	94,98
		2010	5	24,12	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	-	-	-	24,12
		2011	6	60,50	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	-	-	-	60,50
		2012	7	165,69	10	165,69	0	0,00	0	-	10	165,69	-	-	-	0,00
		Jumlah	39	512,23	56	432,13	46	266,44	0	-	10	165,69	-	-	-	266,44
12	Menko Polhukam	2008	7	34,21	9	34,21	9	34,21	-	-	-	-	-	-	-	34,21
		2009	15	243,71	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	-	-	-	243,71
		2010	6	94,65	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	418,54	12	418,53	10	32,22	-	-	2	386,31	-	-	-	32,22
		2012	11	930,70	16	930,69	9	894,75	-	-	7	35,94	-	-	-	894,75
		Jumlah	45	1.721,81	78	1.627,14	69	1.204,89	-	-	9	422,25	-	-	-	1.204,89
13	Kementerian Dalam Negeri	2008	28	369.140,54	44	5.595,26	35	5.130,18	9	465,08	-	-	-	-	-	5.130,18
		2009	38	37.016,13	95	10.449,13	89	9.449,26	5	999,87	-	-	1	-	-	9.449,26
		2010	87	695.515,03	192	21.030,44	158	15.490,47	32	4.850,63	1	-	1	689,34	-	12.792,81
				USD 309,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	65	120.979,15	147	43.316,36	87	33.973,61	49	8.816,97	11	525,78	-	-	-	9.283,02
		2012	45	174.374,90	122	148.622,50	33	57.251,10	80	19.576,19	9	71.795,21	-	-	-	55.414,02
		Jumlah	263	1.397.025,75	600	229.013,69	402	121.294,62	175	34.708,74	21	72.320,99	2	689,34	-	92.493,80
				USD 309,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2008	4	48,27	6	48,27	6	48,27	-	-	-	-	-	-	-	48,27
		2009	6	699,84	13	699,83	7	132,89	6	566,94	-	-	-	-	-	132,89
		2010	7	158,40	10	158,40	9	158,40	1	-	-	-	-	-	-	158,40
		2011	4	399,50	5	399,50	5	399,50	-	-	-	-	-	-	-	399,50
		2012	9	85,93	15	85,93	12	85,93	3	-	-	-	-	-	-	85,93
		Jumlah	30	1.391,94	49	1.391,93	39	824,99	10	566,94	-	-	-	-	-	824,99
15	Kementerian Sekretariat Negara	2008	63	34.486,69	93	34.486,68	65	32.834,31	28	1.652,37	-	-	-	-	-	6.505,09
		2009	24	23.283,05	38	23.283,05	23	4.353,87	15	18.892,43	-	-	-	-	-	4.353,87
		2010	21	-	25	-	19	-	6	-	-	-	-	-	-	-
		2011	40	3.178,16	55	3.178,16	27	660,30	27	2.517,86	1	-	-	-	-	660,30
		2012	132	13.915,25	182	13.915,24	48	805,50	121	13.109,74	4	-	-	-	-	99,98
		Jumlah	280	74.863,15	393	74.863,13	182	38.653,98	197	36.172,40	5	36,75	9	-	-	11.619,24

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENtitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	TMIII	2008	4	749,90	7	749,90	5	749,90	2	-	-	-	-	-	749,90
		2009	12	138,60	21	138,60	20	138,60	1	-	-	-	-	-	138,60
		2010	9	15.536,08	13	15.536,08	6	11.194,60	7	4.341,48	-	-	-	-	11.194,60
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	16.424,58	41	16.424,58	31	12.083,10	10	4.341,48	-	-	-	-	12.083,10
17	BKN	2008	6	-	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	3	313,40	3	313,40	2	7,45	1	305,95	-	-	-	-	7,45
		2010	12	150,92	36	150,92	12	150,92	24	-	-	-	-	-	150,92
		2011	6	400,94	11	400,94	6	346,57	5	54,37	-	-	-	-	276,00
		2012	11	1.024,53	14	1.024,52	5	660,02	9	364,50	-	-	-	-	660,02
		Jumlah	38	1.889,79	71	1.889,78	31	1.164,96	40	724,82	-	-	-	-	1.094,39
18	BPN	2008	22	2.616,79	52	2.616,79	46	2.616,79	5	-	1	-	-	-	1.872,24
		2009	38	1.988,46	75	1.988,46	57	1.988,46	9	-	9	-	-	-	1.988,46
		2010	42	2.168,82	62	2.168,82	56	2.168,82	6	-	-	-	-	-	2.169,13
		2011	53	816,39	65	816,39	24	816,39	39	-	2	-	-	-	810,79
		2012	13	2.176,01	15	2.176,00	-	334,55	4	166,01	11	1.675,44	-	-	334,55
		Jumlah	168	9.766,47	269	9.766,46	183	7.925,01	63	166,01	23	1.675,44	-	-	7.175,17
19	LAN	2008	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	226,77	2	226,77	1	220,77	1	6,00	-	-	-	-	220,77
		2010	7	315,75	16	315,75	14	315,75	2	-	-	-	-	-	293,25
		2011	16	132,27	31	132,27	10	132,27	20	-	1	-	-	-	132,27
		2012	8	1.817,54	20	1.817,53	15	1.814,29	5	3,24	-	-	-	-	1.814,29
		Jumlah	34	2.492,33	70	2.492,32	41	2.483,08	28	9,24	1	-	-	-	USD 0,52
			-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	-	-	-	-	-	2.460,58
			-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	-	-	-	-	-	USD 0,52
20	Arsip Nasional	2008	5	6.595,68	7	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	4	1.779,44	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	1.408,55	9	1.005,47	9	1.005,47	-	-	-	-	-	-	740,10
		2011	8	4.416,22	12	475,87	9	475,87	3	-	-	-	-	-	475,87
		2012	8	87,83	11	80,06	7	80,06	4	-	-	-	-	-	87,83
		Jumlah	32	14.287,72	44	1.561,40	34	1.561,40	10	-	-	-	-	-	1.303,80

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu value)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	KPU	2008	21	73.375,97	41	55.915,17	30	3.149,00	7	52.766,17	4	-	-	-	3.149,06
		2009	256	863.608,81	529	266.137,82	361	128.973,61	156	137.001,97	11	162,24	1	-	48.384,64
		2010	9	24.242,50	22	4.592,24	19	1.438,04	3	3.154,20	-	-	-	-	1.438,04
		2011	13	5.422,16	30	5.422,16	16	493,01	14	4.929,15	-	-	-	-	438,46
		2012	9	1.134,84	22	1.134,84	2	9,18	2	137,53	18	988,13	-	-	9,18
		Jumlah	308	967.784,28	644	333.202,23	428	134.062,84	182	197.989,02	33	1.150,37	1	-	53.419,38
22	Kementerian Hukum dan HAM	2008	100	134.197,86	184	118.696,76	180	7.111,61	3	182,51	-	-	1	111.402,64	8.285,76
		2009	77	4.432,38	166	4.100,45	166	4.100,45	-	-	-	-	-	-	3.926,05
		2010	62	7.927,64	136	3.239,61	128	2.902,64	8	336,97	-	-	-	-	2.830,51
		2011	28	2.320,96	65	2.320,95	63	1.744,25	2	576,70	-	-	-	-	1.744,25
		2012	94	17.839,42	207	4.638,73	149	3.253,64	29	1.220,62	29	164,47	-	-	3.066,76
		Jumlah	361	166.718,26	758	132.996,50	686	19.112,59	42	2.316,80	29	164,47	1	111.402,64	19.853,33
23	Kejaksaan RI	2008	97	957.843,59	202	951.435,74	32	16.543,98	28	132.454,37	142	802.437,39	-	-	3.978,05
				USD 5.00	-	USD 5.00	-	-	-	-	-	USD 5.00	-	-	-
		2009	144	5.383.958,82	306	5.432.778,73	72	135.895,54	30	62.093,47	204	5.234.789,72	-	-	14.341,16
				USD 293.631,75	-	USD 293.631,75	-	-	-	USD 34,95	-	USD 293.596,80	-	-	-
		2010	77	47.023,35	158	43.450,38	27	868,56	15	4.665,82	116	37.916,00	-	-	868,56
				USD 5.00	-	USD 5.00	-	-	-	USD 5.00	-	-	-	-	-
		2011	81	75.722,22	226	25.486,44	45	291,63	19	1.240,36	162	23.954,45	-	-	767,46
				USD 9.63	-	USD 9.63	-	-	-	-	-	USD 9.63	-	-	-
				THB 25.00	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-
		2012	21	2.560,41	51	787,24	3	85,23	-	-	48	702,01	-	-	85,23
		Jumlah	420	6.467.108,39	943	6.453.938,53	179	153.684,94	92	200.454,02	672	6.099.799,57	-	-	20.040,46
				USD 293.651,38	-	USD 293.651,38	-	-	-	USD 39,95	-	USD 293.611,43	-	-	-
				THB 25.00	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-
24	POLRI	2008	33	6.412,21	45	6.412,21	41	5.009,83	4	1.402,38	-	-	-	-	2.832,33
		2009	118	6.057,59	171	6.057,58	166	5.348,89	5	708,69	-	-	-	-	3.833,26
		2010	87	13.663,91	128	13.663,90	115	12.210,16	11	1.300,29	1	-	1	153,45	9.482,58
		2011	52	31.580,10	115	31.580,10	75	29.196,72	17	2.283,60	23	99,78	-	-	28.081,71
		2012	38	327.803,34	97	15.443,22	40	4.518,66	25	9.407,55	32	1.517,01	-	-	3.560,64
		Jumlah	328	385.517,15	556	73.157,01	437	56.284,26	62	15.102,51	56	1.616,79	1	153,45	47.790,52

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Komnas HAM	2008	5	27,39	9	27,39	9	27,39	-	-	-	-	-	-	27,39
		2009	18	1.044,25	30	680,03	25	4,99	4	648,20	1	26,84	-	-	4,99
		2010	5	141,43	11	2,74	11	2,74	-	-	-	-	-	-	2,74
		2011	6	73,52	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	73,52
		2012	4	-	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	38	1.286,59	67	710,16	61	35,12	5	648,20	1	26,84	-	-	108,64
26	Mahkamah Konstitusi	2008	2	159,66	2	74,95	2	74,95	-	-	-	-	-	-	74,95
		2009	5	121,85	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-	-	-	121,85
		2010	6	106,60	13	86,98	13	86,98	-	-	-	-	-	-	86,98
		2011	3	196,79	7	196,79	7	196,79	-	-	-	-	-	-	196,79
		2012	6	173,68	13	173,68	12	173,68	1	-	-	-	-	-	173,68
		Jumlah	22	758,58	43	654,25	42	654,25	1	-	-	-	-	-	654,25
27	MPR	2008	8	317,00	12	197,27	12	197,27	-	-	-	-	-	-	197,27
		2009	2	2,20	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	519,65	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	29,02	5	29,02	5	29,02	-	-	-	-	-	-	29,02
		Jumlah	21	867,87	27	226,29	26	226,29	1	-	-	-	-	-	226,29
28	DPR	2008	8	3.042,66	18	59,07	18	59,07	-	-	-	-	-	-	59,07
		2009	17	36.912,30	28	32.614,86	25	32.599,87	3	14,99	-	-	-	-	3.801,46
		2010	7	376,67	13	326,45	13	326,45	-	-	-	-	-	-	326,45
		2011	21	28.237,26	30	24.415,00	17	4.014,47	13	20.400,53	-	-	-	-	4.014,47
		2012	20	4.675,35	38	3.347,39	18	405,57	20	2.941,82	-	-	-	-	405,57
		Jumlah	73	73.244,24	127	60.762,77	91	37.405,43	36	23.357,34	-	-	-	-	8.607,02
29	DPD	2008	2	69,88	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	69,88
		2009	8	33,19	8	33,19	8	33,19	-	-	-	-	-	-	33,19
		2010	4	230,01	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	230,01
		2011	7	1.564,54	11	1.358,80	10	3,02	1	1.355,78	-	-	-	-	206,72
		2012	5	126,41	10	126,41	10	126,41	-	-	-	-	-	-	126,41
		Jumlah	26	2.024,03	35	1.518,40	34	162,62	1	1.355,78	-	-	-	-	666,21

Halaman 8 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Mahkamah Agung	2008	25	1.179,08	43	770,91	34	770,91	9	-	-	-	-	-	785,82
		2009	21	98,73	40	98,73	21	96,75	19	1,98	-	-	-	-	96,75
		2010	44	3.664,69	79	795,86	49	751,51	30	44,35	-	-	-	-	993,48
		2011	56	3.691,17	100	2.418,52	48	1.321,60	50	1.096,92	2	-	-	-	1.349,91
		2012	19	1.912,96	39	1.195,53	24	770,69	15	424,84	-	-	-	-	784,45
		Jumlah	165	10.546,63	301	5.279,55	176	3.711,46	123	1.568,09	2	-	-	-	4.010,41
31	Komisi Yudisial	2008	2	3,47	2	3,47	2	3,47	-	-	-	-	-	-	3,47
		2009	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	1.165,95	10	26,81	10	26,81	-	-	-	-	-	-	16,10
		2011	4	19,28	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3,65
		2012	4	55,28	6	55,28	6	55,28	-	-	-	-	-	-	55,28
		Jumlah	21	1.243,98	26	85,56	26	85,56	-	-	-	-	-	-	78,50
32	KPK	2008	5	4.851,00	13	4.851,00	13	4.851,00	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	160,79	10	160,78	10	107,59	-	-	-	-	-	53,19	50,03
		2010	7	47,15	8	47,15	7	47,15	1	-	-	-	-	-	4,00
		2011	6	173.812,37	11	173.812,37	10	173.812,37	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	178.871,31	43	178.871,30	41	178.818,11	2	-	-	-	-	53,19	54,03
33	PPATK	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	3	6.196,19	3	6.196,19	3	6.196,19	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	2.032,96	15	2.032,96	15	2.032,96	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	305,10	10	305,10	8	305,10	2	-	-	-	-	-	-
		2012	6	373,39	6	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	36	8.907,64	38	8.534,25	34	8.534,25	2	-	2	-	-	-	-
34	BNN	2008	16	920,06	16	920,05	15	816,26	1	46,92	-	-	-	56,87	612,54
		2009	17	2.281,99	17	2.281,99	17	2.281,99	-	-	-	-	-	-	2.034,36
		2010	32	421,54	32	421,54	31	421,54	1	-	-	-	-	-	421,54
		2011	27	1.334,39	27	1.334,38	23	1.108,07	4	226,31	-	-	-	-	1.009,65
		2012	13	4.418,25	20	4.418,25	15	4.418,25	5	-	-	-	-	-	3.523,41
		Jumlah	105	9.376,23	112	9.376,21	101	9.046,11	11	273,23	-	-	-	56,87	7.601,50

Halaman 9 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENtitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	Kementerian Pertanian	2008	9	3.368,08	16	3.368,07	9	2.455,61	6	912,46	-	-	1	-	2.455,61
		2009	33	5.668,97	55	2.064,47	53	1.970,41	2	94,06	-	-	-	-	1.970,41
		2010	55	11.704,44	91	12.988,71	66	11.755,64	7	1.233,07	18	-	-	-	11.755,64
		2011	80	626.584,55	122	25.078,14	97	22.252,02	12	2.174,33	13	651,79	-	-	19.917,64
		2012	63	563.297,14	109	219.755,17	22	24.366,56	33	25.636,39	54	169.752,22	-	-	22.461,10
		Jumlah	240	1.210.623,18	393	263.254,56	247	62.800,24	60	30.050,31	85	170.404,01	1	-	58.560,40
36	Kementerian Kehutanan	2008	101	270.417,54	165	268.550,89	82	47.131,86	75	221.419,03	3	-	5	-	5.375,47
				USD 25.906,17	-	USD 25.697,75		USD 829,47		USD 24.868,28		-		-	USD 109,64
		2009	118	577.867,56	210	491.162,85	123	61.768,56	75	429.167,34	11	226,95	1	-	37.243,36
				USD 12.850,92	-	USD 12.813,81		USD 3.070,95		USD 9.742,86		-		-	USD 59,08
		2010	78	75.239,40	111	74.599,05	56	14.183,98	28	55.788,08	13	4.486,11	14	140,88	13.662,60
				USD 525,78	-	USD 525,77		86,64		USD 4,00		435,13		-	56,55
		2011	52	7.042.072,41	80	6.483.860,62	35	57.327,38	39	4.356.776,38	6	2.069.756,86	-	-	57.327,38
				USD 1.088,02	-	USD 1.088,01		-		USD 75,75		USD 1.012,26		-	-
		2012	25	30.009,28	44	2.679,75	13	1.496,39	31	1.183,36	-	-	-	-	1.580,38
		Jumlah	374	7.995.606,19	610	7.320.853,16	309	181.908,17	248	5.064.334,19	33	2.074.469,92	20	140,88	115.189,19
				USD 40.370,89	-	USD 40.125,34		USD 3.987,06		USD 34.690,89		USD 1.447,39		-	USD 225,27
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2008	38	296.264,66	68	45.625,74	54	45.445,52	14	180,22	-	-	-	-	44.763,29
				JPY 1.299,04	-	-		-		-		-		-	-
		2009	36	34.099,91	66	1.990,35	35	1.922,46	31	67,89	-	-	-	-	1.922,46
		2010	36	33.540,20	55	3.024,59	29	2.400,27	25	624,32	1	-	-	-	2.400,27
		2011	42	425.917,49	54	6.312,97	2	3.802,10	48	139,30	3	-	1	2.371,57	2.779,23
		2012	14	441.398,05	20	8.678,28	-	2.058,33	18	1.730,92	2	4.889,03	-	-	2.058,33
		Jumlah	166	1.231.220,31	263	65.631,93	120	55.628,68	136	2.742,65	6	4.889,03	1	2.371,57	53.923,58
				JPY 1.299,04	-	-		-		-		-		-	-
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2008	32	53.000,02	53	52.672,23	50	52.390,75	3	281,48	-	-	-	-	52.390,75
				EUR 35,79	-	-		-		-		-		-	-
		2009	156	172.650,35	362	83.686,21	284	79.989,27	38	3.144,55	40	552,39	-	-	82.898,03
		2010	102	60.362,53	239	26.644,08	148	21.249,68	52	2.805,38	37	431,87	2	2.157,15	21.277,15
		2011	62	762.420,93	152	50.427,83	64	33.206,49	41	13.427,13	47	3.794,21	-	-	29.156,86

Halaman 10 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	46	767.367,81	96	764.383,38	21	13.185,23	32	751.058,74	43	139,41	-	-	15.368,48
		Jumlah	398	1.815.801,64	902	977.813,73	567	200.021,42	166	770.717,28	167	4.917,88	2	2.157,15	201.091,27
			-	EUR 35,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kementerian Perhubungan	2008	33	14.140,14	60	5.850,29	31	5.299,38	27	550,91	2	-	-	-	5.299,38
		2009	33	84.586,26	50	658,98	45	658,98	5	-	-	-	-	-	658,98
		2010	84	530.235,21	147	24.768,55	120	16.219,11	26	8.524,33	1	-	-	25,11	16.219,11
		2011	44	250.829,47	77	10.600,31	22	9.730,06	33	206,36	22	663,89	-	-	9.730,06
		2012	45	4.450.173,15	92	4.018,36	33	2.634,25	11	1.061,15	48	225,30	-	-	2.634,25
			-	USD 145,13	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-
		Jumlah	239	5.329.964,23	426	45.896,49	251	34.541,78	102	10.342,75	73	889,19	-	-	34.541,78
			-	USD 145,13	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-
40	Kemenerpa	2008	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	3	228,37	3	228,37	1	139,27	2	89,10	-	-	-	-	139,27
		2010	23	1.197,85	26	1.197,85	16	1.197,85	9	-	-	-	-	-	1.197,85
		2011	21	403,25	27	403,25	6	403,25	3	-	18	-	-	-	403,25
		2012	13	10.052,65	17	10.052,64	4	2.178,27	1	84,99	12	7.789,38	-	-	2.178,27
		Jumlah	62	11.882,12	75	11.882,11	29	3.918,64	15	174,09	31	7.789,38	-	-	3.918,64
41	Bapertarum	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.145,88	8	41.145,88	2	109,54	5	41.036,34	1	-	-	-	109,54
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	41.145,88	8	41.145,88	2	109,54	5	41.036,34	1	-	-	-	109,54
42	Kementerian PDT	2008	10	945,54	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	15,93	25	-	23	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	14	1.336,99	22	1.336,99	21	1.336,99	1	-	-	-	-	-	1.336,99
		2011	16	104.470,79	30	2.241,96	25	1.457,64	5	784,32	-	-	-	-	1.457,64
		2012	18	9.791,94	39	67.141,97	30	67.038,13	9	103,84	-	-	-	-	9.380,80
		Jumlah	66	116.561,19	142	70.720,92	125	69.832,76	17	888,16	-	-	-	-	12.175,43

Halaman 11 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	BMMKG	2008	18	564,50	24	564,50	24	564,50	-	-	-	-	-	-	564,51
		2009	12	621,27	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	-	-	191,07
		2010	19	3.143,81	39	3.143,81	37	790,78	2	2.353,03	-	-	-	-	790,78
		2011	9	8.140,42	16	19,80	16	19,80	-	-	-	-	-	-	19,80
		2012	8	490,43	12	490,43	9	190,43	3	300,00	-	-	-	-	190,43
		Jumlah	66	12.960,43	112	4.409,61	107	1.756,58	5	2.653,03	-	-	-	-	1.756,59
44	Kementerian Perindustrian	2008	12	-	20	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	16	1.704,40	20	1.704,40	20	1.704,40	-	-	-	-	-	-	1.111,41
		2010	12	222,81	17	222,81	17	222,81	-	-	-	-	-	-	222,81
		2011	13	417,60	13	417,60	10	417,60	3	-	-	-	-	-	417,60
		2012	27	480,99	40	248,20	31	248,20	9	-	-	-	-	-	695,96
		Jumlah	80	2.825,80	110	2.593,01	97	2.593,01	13	-	-	-	-	-	2.447,78
45	Kementerian Perdagangan	2008	12	-	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-
		2009	18	-	39	-	37	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	31	3.722,64	47	3.666,13	34	2.429,50	13	1.236,16	-	-	-	0,47	1.129,30
			-	-	-	USD 6,60	-	USD 6,60	-	-	-	-	-	-	USD 6,60
		2011	26	3.475,17	48	3.475,17	20	3.475,17	1	-	27	-	-	-	2.300,02
		2012	13	1.476,22	21	1.229,04	21	868,71	-	-	-	360,33	-	-	633,81
		Jumlah	100	8.674,03	168	8.370,34	123	6.773,38	18	1.236,16	27	360,33	-	0,47	4.063,13
			-	-	-	USD 6,60	-	USD 6,60	-	-	-	-	-	-	USD 6,60
46	Kementerian Kop. & UKM	2008	10	2.142,76	18	1.635,14	14	414,59	2	1.220,55	-	-	2	-	354,66
		2009	24	6.084,76	38	6.084,76	27	500,00	10	2.237,95	-	-	1	3.346,80	-
		2010	16	19.471,60	32	19.471,60	31	17.468,98	1	2.002,62	-	-	-	-	17.468,98
		2011	18	5.208,84	20	1.460,15	16	1.149,73	4	310,42	-	-	-	-	10,79
		2012	9	869,60	13	869,60	10	869,60	3	-	-	-	-	-	884,73
		Jumlah	77	33.777,56	121	29.521,24	98	20.402,90	20	5.771,54	-	-	3	3.346,80	18.719,16
47	BSN	2008	3	517,73	3	517,73	3	517,73	-	-	-	-	-	-	517,73
		2009	4	300,78	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-	-	300,78
		2010	7	11,55	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-	-	11,55
		2011	14	59,23	27	59,23	27	59,23	-	-	-	-	-	-	59,23
		2012	5	216,23	10	216,23	9	119,23	1	97,00	-	-	-	-	119,23
		Jumlah	33	1.105,52	55	1.105,52	54	1.008,52	1	97,00	-	-	-	-	1.008,52

Halaman 12 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	BKPM	2008	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	8,60	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	-	-	8,60
		2010	15	-	24	-	19	-	4	-	1	-	-	-	-
		2011	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	79,62	3	79,62	3	79,62	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	88,22	35	88,22	30	88,22	4	-	1	-	-	-	8,60
49	Kementerian ESDM	2008	45	251.959,93	60	250.758,09	53	97.677,36	5	151.197,78	-	-	2	1.882,95	98.039,70
				USD 46.877,81	-	USD 18.200,43	-	USD 14.441,56	-	USD 3.758,87	-	-	-	-	USD 43.118,94
		2009	34	384,46	42	384,46	37	83,12	5	301,34	-	-	-	-	83,12
				USD 8,51	-	USD 8,51	-	USD 8,51	-	-	-	-	-	-	USD 8,51
		2010	57	278.268,79	95	251.503,29	75	91.855,08	19	150.749,32	-	-	1	8.898,89	93.259,52
				USD 29.261,54	-	USD 17.731,86	-	USD 10.405,62	-	USD 7.326,24	-	-	-	-	USD 21.935,30
		2011	31	106.398,87	51	97.927,02	28	25.570,26	23	72.356,76	-	-	-	-	29.923,54
				USD 43.332,44	-	USD 43.012,09	-	USD 15.549,04	-	USD 16.676,00	-	-	-	-	USD 15.869,38
		2012	25	7.929,70	32	4.515,11	6	-	6	-	20	4.515,11	-	-	3.414,58
				USD 1.274,17	-	USD 274,17	-	-	-	-	-	USD 274,17	-	-	USD 1.000,00
		Jumlah	192	644.941,75	280	605.087,97	199	215.185,82	58	374.605,20	20	4.515,11	3	10.781,84	224.720,46
				USD 120.754,47	-	USD 79.227,06	-	USD 40.404,73	-	USD 27.761,11	-	-	-	USD 10.787,05	USD 81.932,13
50	Kementerian LH	2008	25	-	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	60	34.209,86	125	1.680,79	105	457,16	20	1.223,63	-	-	-	-	604,54
				USD 651,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	20.109,49	29	20.109,49	28	5.004,45	-	-	-	-	1	15.105,04	5.002,93
		2011	20	10.428,02	33	2.867,82	28	2.867,82	5	-	-	-	-	-	3.831,05
		2012	26	30.889,44	31	211,53	4	157,60	11	53,93	16	-	-	-	304,88
		Jumlah	147	95.636,81	253	24.869,63	200	8.487,03	36	1.277,56	16	-	1	15.105,04	9.743,40
				USD 651,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kementerian BUMN	2008	13	90,77	19	90,77	19	90,77	-	-	-	-	-	-	90,77
		2009	8	165,79	8	165,79	8	165,79	-	-	-	-	-	-	165,79
		2010	9	1.227,87	9	61,20	9	61,20	-	-	-	-	-	-	61,20
		2011	4	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	96,57	13	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	45	1.581,00	54	317,76	44	317,76	10	-	-	-	-	-	317,76

Halaman 13 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENtitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Kementerian Ristek	2008	9	169.947,96	9	166.716,05	8	166.716,05	1	-	-	-	-	-	166.716,05
		2009	7	121.728,67	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	11	955,86	14	116,23	12	116,23	2	-	-	-	-	-	116,23
		2011	14	74.045,96	32	70.493,51	18	26.823,43	10	43.670,08	4	-	-	-	26.823,43
		2012	21	103.932,99	41	10.606,07	28	3.826,23	13	6.779,84	-	-	-	-	262,93
		Jumlah	62	470.611,44	103	247.931,86	71	197.481,94	28	50.449,92	4	-	-	-	193.918,64
53	BPPT	2008	24	49.101,17	30	14.249,86	22	5.143,61	8	9.106,25	-	-	-	-	5.143,61
				USD 506,73	-	USD 476,73	-	USD 476,73	-	-	-	-	-	-	USD 476,73
		2009	9	3.414,68	10	315,65	10	315,65	-	-	-	-	-	-	160,75
		2010	23	26.374,98	34	26.156,71	32	26.156,71	2	-	-	-	-	-	25.113,74
		2011	12	3.994,11	23	3.881,91	22	3.881,91	1	-	-	-	-	-	288,16
		2012	15	13.108,99	38	4.260,90	32	4.054,33	6	206,57	-	-	-	-	775,43
		Jumlah	83	95.993,93	135	48.865,03	118	39.552,21	17	9.312,82	-	-	-	-	31.481,69
			-	USD 506,73	-	USD 476,73	-	USD 476,73	-	-	-	-	-	-	USD 476,73
54	LIPi	2008	7	10.754,76	9	10.754,76	8	10.754,76	1	-	-	-	-	-	10.754,76
		2009	8	246,69	8	35,80	7	35,80	1	-	-	-	-	-	35,80
		2010	17	8.233,65	17	7.204,58	13	1.137,29	4	6.067,29	-	-	-	-	1.137,37
		2011	28	80.564,60	59	72.185,57	51	860,87	8	71.324,70	-	-	-	-	677,27
		2012	11	10.588,34	24	449,89	9	133,66	10	104,88	5	211,35	-	-	150,29
		Jumlah	71	110.388,04	117	90.630,60	88	12.922,38	24	77.496,87	5	211,35	-	-	12.755,49
55	BATAN	2008	7	-	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
				USD 36,72	-	USD 36,72	-	USD 36,72	-	-	-	-	-	-	USD 36,72
		2009	14	3.179,94	24	234,82	24	234,82	-	-	-	-	-	-	234,82
		2010	9	6.046,62	12	82,06	12	82,06	-	-	-	-	-	-	82,06
		2011	15	2.513,25	25	202,03	25	202,03	-	-	-	-	-	-	169,15
		2012	13	2.588,01	35	1.034,25	22	617,68	13	416,57	-	-	-	-	617,68
		Jumlah	58	14.327,82	103	1.553,16	89	1.136,59	14	416,57	-	-	-	-	1.103,71
			-	USD 36,72	-	USD 36,72	-	USD 36,72	-	-	-	-	-	-	USD 36,72
56	BAPETEN	2008	6	62,21	8	62,20	7	24,03	1	38,17	-	-	-	-	24,03
		2009	6	17,90	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	-	-	17,90
		2010	9	73,22	15	73,22	10	25,00	4	48,22	1	-	-	-	25,00
			-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 222,15

Halaman 14 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	9	73,25	14	73,24	11	70,45	2	2,79	1	-	-	-	70,45
		2012	11	104,04	25	104,04	15	29,78	9	74,26	1	-	-	-	29,78
		Jumlah	41	330,62	69	330,60	49	167,16	17	163,44	3	-	-	-	167,16
			-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	USD 222,15	-	-	-
57	Badan Informasi Geospasial	2008	13	1.611,83	13	1.611,83	13	1.611,83	-	-	-	-	-	-	1.741,40
		2009	4	4.536,69	6	69,65	6	69,65	-	-	-	-	-	-	74,31
		2010	13	595,66	13	350,56	12	286,93	1	63,63	-	-	-	-	307,13
		2011	16	7.120,41	24	4.485,98	7	1.964,73	6	2.510,72	11	10,53	-	-	1.961,91
		2012	10	56.478,90	27	3.382,29	3	727,51	19	2.634,22	5	20,56	-	-	578,97
		Jumlah	56	70.343,49	83	9.900,31	41	4.660,65	26	5.208,57	16	31,09	-	-	4.663,72
58	LAPAN	2008	9	45,70	11	45,70	11	45,70	-	-	-	-	-	-	45,70
			-	USD 145,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	6	3.038,21	7	289,69	4	6,61	3	283,08	-	-	-	-	6,61
		2010	23	58.281,44	29	409,43	17	243,37	4	41,17	8	124,89	-	-	243,37
		2011	17	11.374,13	36	9.732,28	14	60,63	8	46,80	14	9.624,85	-	-	60,63
		2012	9	3.012,59	21	1.932,07	2	8,82	2	83,28	17	1.839,97	-	-	8,82
		Jumlah	64	75.752,07	104	12.409,17	48	365,13	17	454,33	39	11.589,71	-	-	365,13
			-	USD 145,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kementerian Agama	2008	135	103.975,29	253	19.992,20	141	17.564,24	36	2.125,03	76	302,93	-	-	12.817,47
			-	SAR 284,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	86	86.978,47	183	65.226,04	90	23.006,69	72	42.143,86	17	-	4	75,49	22.377,92
			-	SAR 1.097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	154	228.474,57	340	40.902,89	184	28.734,48	38	7.242,73	118	4.925,68	-	-	16.834,25
			-	USD 270,54	-	USD 270,52	-	USD 249,48	-	USD 14,09	-	USD 6,95	-	-	USD 249,48
			-	JPY 266,082,19	-	JPY 150,835,50	-	JPY 150,835,50	-	-	-	-	-	-	-
		2011	119	235.339,76	248	22.323,00	105	9.253,36	100	12.771,94	43	297,70	-	-	105.344,20
			-	USD 1,05	-	USD 1,05	-	USD 1,05	-	-	-	-	-	-	USD 1,05
		2012	59	43.460,32	138	14.312,75	44	5.031,28	89	9.281,47	5	-	-	-	5.031,28
			-	USD 128,57	-	USD 128,57	-	USD 0,09	-	USD 128,47	-	-	-	-	-
		Jumlah	553	698.228,41	1.162	162.756,88	564	83.590,05	335	73.565,03	259	5.526,31	4	75,49	162.405,12
			-	USD 400,16	-	USD 400,13	-	USD 250,62	-	USD 142,56	-	USD 6,95	-	-	USD 250,53
			-	SAR 1.381,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 266,082,19	-	JPY 150,835,50	-	JPY 150,835,50	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	Kementerian Sosial	2008	14	17.010,79	24	-	23	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	28	159.643,08	45	7.029,72	37	2.612,42	7	4.417,30	1	-	-	-	2.612,42
		2010	42	146.627,20	49	10.850,30	26	747,63	22	9.268,17	1	834,50	-	-	1.980,00
		2011	20	4.889,18	31	2.127,44	18	1.945,05	13	182,39	-	-	-	-	-
		2012	29	36.394,32	46	3.047,29	5	61,24	27	1.355,62	-	-	-	-	61,24
		Jumlah	133	364.564,57	195	23.054,75	109	5.366,34	70	15.223,48	16	2.464,93	-	-	4.653,66
61	BN Penanagulangan Bencana	2008	7	1.534,04	15	1.534,03	14	161,18	1	1.372,85	-	-	-	-	1.205,12
		2009	11	7.749,04	19	7.749,04	16	7.749,04	2	-	1	-	-	-	9.235,36
		2010	15	902,10	27	424,25	22	306,47	5	117,78	-	-	-	-	306,47
		2011	59	81.829,39	98	24.406,38	15	2.175,22	65	22.203,51	18	27,65	-	-	USD 0,06
		2012	27	161.021,00	38	471,82	-	-	-	-	38	471,82	-	-	22.865,31
		Jumlah	119	253.035,57	197	34.585,52	67	10.391,91	73	23.694,14	57	499,47	-	-	33.612,26
			-	USD 2.385,73	-	USD 0,06	-	USD 0,06	-	-	-	-	-	-	USD 0,06
62	Kemenko Kesra	2008	17	207.642,88	23	207.472,56	10	2.144,97	8	92.736,30	5	112.591,29	-	-	2.144,97
		2009	15	65.103,71	31	65.103,70	7	2.942,77	12	14.306,02	12	47.854,91	-	-	2.992,05
		2010	16	15.972,29	17	234,48	7	188,35	2	46,13	8	-	-	-	188,35
		2011	5	870,56	7	870,56	1	147,98	3	722,58	3	-	-	-	147,98
		2012	19	8.435,30	23	707,97	-	58,94	2	57,80	21	591,23	-	-	82,50
		Jumlah	72	298.024,74	101	274.389,27	25	5.483,01	27	107.868,83	49	161.037,43	-	-	5.555,85
			-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	-	-	-	-	-	USD 0,05
63	KPP & PA	2008	4	132,46	5	91,58	5	91,58	-	-	-	-	-	-	91,58
		2009	2	199,06	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	-	-	54,54
		2010	12	5.242,71	14	5.002,28	14	5.002,28	-	-	-	-	-	-	164,24
		2011	10	11.075,47	16	6.775,37	15	6.775,37	1	-	-	-	-	-	259,34
		2012	10	1.666,29	24	182,60	22	182,60	2	-	-	-	-	-	182,60
		Jumlah	38	18.315,99	61	12.106,37	58	12.106,37	3	-	-	-	-	-	752,30

Halaman 16 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	Kementerian Kesehatan	2008	43	218.546,56	80	41.351,92	71	1.302,21	9	40.049,71	-	-	-	-	1.302,21
		2009	72	454.031,97	103	78.730,09	58	2.111,12	36	76.618,97	9	-	-	-	2.931,11
		2010	53	25.139,24	93	22.107,13	55	19.884,66	38	2.222,47	-	-	-	-	20.059,56
		2011	116	1.097.901,80	235	267.652,29	69	128.694,58	157	138.765,39	9	192,32	-	-	13.801,51
				SAR 121.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	43	1.005.167,81	148	948.900,21	23	963,86	104	192.726,86	21	755.209,49	-	-	2.516,85
		Jumlah	327	2.800.787,38	659	1.358.741,64	276	152.956,43	344	450.383,40	39	755.401,81	-	-	40.611,24
				USD 125.88	-	USD 125.88	-	-	-	USD 125.88	-	-	-	-	-
				SAR 121.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Kementerian Nakertrans	2008	31	237.539,95	46	70.729,76	21	69.111,10	9	721,13	16	897,53	-	-	69.111,10
		2009	29	7.746,69	43	113,90	10	37,26	10	76,64	23	-	-	-	37,26
				USD 203.60	-	USD 203.60	-	USD 16.80	-	USD 2.40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80
		2010	38	23.759,82	56	10.005,42	26	1.677,82	24	8.327,60	6	-	-	-	1.685,18
		2011	63	30.242,42	164	22.163,42	24	18.455,47	27	3.707,95	113	-	-	-	17.368,36
		2012	33	23.463,55	60	19.796,81	15	2.773,60	35	16.979,86	10	43,35	-	-	2.572,19
		Jumlah	194	322.752,43	369	122.809,31	96	92.055,25	105	29.813,18	168	940,88	-	-	90.774,09
				USD 203.60	-	USD 203.60	-	USD 16,80	-	USD 2,40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80
66	BKKB	2008	10	186,38	10	186,38	9	186,38	1	-	-	-	-	-	186,38
		2009	11	392,37	17	392,37	16	112,74	1	279,63	-	-	-	-	112,74
		2010	22	30.022,90	22	30.022,89	19	18.776,28	2	5.359,70	1	5.886,91	-	-	898,73
		2011	26	22.385,11	53	6.319,42	43	437,45	8	5.881,97	2	-	-	-	349,36
		2012	65	74.920,67	124	688,72	9	514,55	70	174,17	45	-	-	-	514,55
		Jumlah	134	127.907,43	226	37.609,78	96	20.027,40	82	11.695,47	48	5.886,91	-	-	2.061,76
67	BPOM	2008	11	114,12	19	114,12	17	114,12	2	-	-	-	-	-	114,12
		2009	12	4.363,17	21	4.363,17	18	4.363,17	3	-	-	-	-	-	4.363,17
		2010	10	1,04	18	1,04	15	1,04	3	-	-	-	-	-	1,04
		2011	13	4.227,28	27	940,80	23	453,08	4	487,72	-	-	-	-	453,08
		2012	18	1.667,49	35	1.260,77	9	159,65	21	602,96	5	498,16	-	-	411,86
		Jumlah	64	10.373,10	120	6.679,90	82	5.091,06	33	1.090,68	5	498,16	-	-	5.343,27

Halaman 17 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENtitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Kementerian Pendidikan Nasional	2008	45	1.915,26	77	1.915,25	67	1.411,23	9	504,02	1	-	-	-	1.411,23
				USD 8.69	-	USD 8.69	-	USD 8.69	-	-	-	-	-	-	-
		2009	166	300.207,76	417	247.322,17	254	194.101,83	93	46.225,22	70	6.995,12	-	-	45.282,45
				USD 9.56	-	USD 9.56	-	USD 9.56	-	USD 9.56	-	-	-	-	-
		2010	139	4.890.576,83	298	295.721,71	168	134.950,80	82	162.368,43	48	2.402,48	-	-	99.993,99
		2011	284	1.552.225,46	661	420.388,07	381	244.579,52	202	174.703,52	78	1.105,03	-	-	122.334,35
				USD 61.74	-	USD 61.74	-	USD 61.74	-	-	-	-	-	-	USD 19.65
		2012	93	1.657.466,94	208	103.798,39	75	13.568,64	96	63.814,12	37	26.415,63	-	-	9.436,12
				USD 32.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	727	8.402.392,25	1.661	1.073.145,59	945	588.612,02	482	447.615,31	234	36.918,26	-	-	278.458,14
			-	USD 112.75	-	USD 79.99	-	USD 70.43	-	USD 9.56	-	-	-	-	USD 19.65
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2008	8	89,97	8	15,00	4	15,00	2	-	2	-	-	-	15,00
		2009	19	6.461,64	37	421,19	25	421,19	5	-	7	-	-	-	421,19
		2010	27	5.907,58	47	585,09	24	515,51	10	69,58	13	-	-	-	515,99
		2011	32	5.876,42	77	2.674,16	23	1.031,67	22	1.642,49	32	-	-	-	1.031,67
		2012	47	17.697,23	98	17.697,23	-	-	-	-	98	17.697,23	-	-	-
		Jumlah	133	36.032,84	267	21.392,67	76	1.983,37	39	1.712,07	152	17.697,23	-	-	1.983,85
70	Kemenpora	2008	5	291,00	5	291,00	3	291,00	2	-	-	-	-	-	291,00
		2009	18	1.221,43	22	1.221,42	17	828,09	5	393,33	-	-	-	-	828,09
		2010	11	2.002,70	11	2.002,69	5	424,34	4	1.578,35	2	-	-	-	581,51
		2011	13	17.931,93	17	17.812,08	3	6.894,32	4	7.817,81	10	3.099,95	-	-	6.894,32
		2012	58	70.330,24	77	58.499,59	-	-	-	-	77	58.499,59	-	-	-
		Jumlah	105	91.777,30	132	79.826,78	28	8.437,75	15	9.789,49	89	61.599,54	-	-	8.594,92
71	Perpustakaan Nasional	2008	10	82,00	21	82,00	21	82,00	-	-	-	-	-	-	82,00
		2009	5	458,08	7	458,08	3	-	1	-	3	458,08	-	-	-
		2010	11	1.535,53	21	1.535,53	20	1.535,53	1	-	-	-	-	-	1.535,53
		2011	5	47,61	8	47,61	8	47,61	-	-	-	-	-	-	47,61
		2012	6	82,81	8	82,81	8	82,81	-	-	-	-	-	-	82,81
		Jumlah	37	2.206,03	65	2.206,03	60	1.747,95	2	-	3	458,08	-	-	1.747,95

Halaman 18 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	ENrtas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
72	Kementerian Keuangan	2008	137	136.835,33	271	18.253,55	206	18.172,30	60	81,25	4	-	1	-	2.501,73
		2009	286	487.894,40	490	422.084,22	377	389.362,68	99	32.721,54	13	-	1	-	1.503,27
		2010	427	4.618.423,70	795	4.610.270,34	628	1.961.771,47	148	2.648.456,44	19	42,43	-	-	1.696.140,58
		2011	360	6.117.731,66	657	4.687.629,31	391	2.591.511,89	162	2.083.941,73	104	12.170,42	-	-	-
		2012	140	180.010,75	203	176.757,17	68	170.916,62	134	5.840,54	1	-	-	5,27	1.667.320,20
		Jumlah	1.350	11.540.895,84	2.416	9.914.994,59	1.670	5.131.734,96	603	4.771.041,50	141	12.212,85	2	5,27	3.537.244,24
				USD 25,200,24		USD 0,24		USD 0,24							
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	733,68	15	733,68	13	558,68	1	-	-	-	1	175,00	335,30
		2010	8	404,53	11	404,53	10	404,53	1	-	-	-	-	-	369,03
		2011	14	293,59	22	84,05	20	84,05	2	-	-	-	-	-	259,58
		2012	11	385,22	13	5,80	9	5,80	4	-	-	-	-	-	12,86
		Jumlah	46	1.817,02	65	1.228,06	56	1.053,06	8	-	-	-	1	175,00	976,77
74	BPKP	2008	6	46,00	6	46,00	6	46,00	-	-	-	-	-	-	46,00
		2009	9	72,19	12	72,19	11	72,19	1	-	-	-	-	-	72,19
		2010	17	953,57	29	617,38	22	615,26	5	-	1	-	1	2,12	615,26
		2011	16	356,34	19	356,33	13	260,62	6	95,71	-	-	-	-	258,35
		2012	11	45,86	18	37,76	5	37,76	12	-	1	-	-	-	37,76
		Jumlah	59	1.473,96	84	1.129,66	57	1.031,83	24	95,71	2	-	1	2,12	1.029,56
75	BPS	2008	7	3.012,55	13	865,15	12	865,15	1	-	-	-	-	-	865,15
		2009	16	747,42	22	544,89	19	283,22	2	256,72	1	3,65	-	1,30	157,58
		2010	9	103,47	15	103,47	15	103,47	-	-	-	-	-	-	103,47
		2011	31	6.124,02	60	958,67	54	439,31	5	219,88	1	299,48	-	-	314,09
		2012	12	1.624,11	23	1.624,10	19	45,69	3	1513,01	1	65,40	-	-	45,69
		Jumlah	75	11.611,57	133	4.096,28	119	1.736,84	11	1.989,61	3	368,53	-	1,30	1.485,98

Halaman 19 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	ENTitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	Kemenko Perencanaan	2008	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	41,25	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	-	-	41,25
		2010	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	40,91	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	82,16	11	41,25	10	41,25	1	-	-	-	-	-	41,25
77	BPK	2008	14	13,11	15	13,11	15	13,11	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	-	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	9,49
		2010	20	1.604,80	28	71,30	27	71,30	1	-	-	-	-	-	71,32
		2011	12	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	34	-	41	-	34	-	7	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	104	1.617,91	126	84,41	117	84,41	9	-	-	-	-	-	80,81
78	Bank Indonesia	2008	11	94.020,70	18	94.020,70	10	919,71	8	93.100,99	-	-	-	-	919,71
		2009	12	2.847,94	21	2.847,94	13	14,00	8	2.833,94	-	-	-	-	14,00
		2010	13	599.941,27	21	599.941,27	8	69.220,60	13	530.720,67	-	-	-	-	95.845,48
		2011	13	1.676,71	29	1.676,71	16	459,58	13	1.217,13	-	-	-	-	459,58
		2012	10	165.448,72	20	177.030,22	10	152.774,09	10	24.256,13	-	-	-	-	152.774,09
		Jumlah	59	863.935,34	109	875.516,84	57	223.387,98	52	652.128,86	-	-	-	-	250.012,86
79	LPS	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	27	2.425,43	35	2.225,93	13	-	1	2.225,93	21	2.225,93	-	-	-
		Jumlah	52	2.425,43	60	2.225,93	38	-	1	2.225,93	21	2.225,93	-	-	-
80	BNP2TKI	2008	11	-	20	-	9	-	7	-	4	-	-	-	-
			-	USD 2,325,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	8.053,98	32	-	8	-	12	-	12	-	-	-	-
		2010	11	593,44	17	336,84	10	336,84	-	-	7	-	-	-	336,84
		2011	10	676,88	13	575,02	6	237,75	5	337,27	2	-	-	-	237,75
		2012	14	1.539,29	38	1.077,71	15	398,59	22	679,12	1	-	-	-	361,65
		Jumlah	67	10.863,59	120	1.989,57	48	973,18	46	1.016,39	26	-	-	-	936,24
			-	USD 2,325,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	BPLS	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	266,89	19	266,89	19	266,89	-	-	-	-	-	-	266,89
		2010	5	128,68	9	2,06	8	2,06	1	-	-	-	-	-	128,68
		2011	4	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	17,99	10	17,99	10	17,99	-	-	-	-	-	-	17,99
		Jumlah	27	413,56	44	286,94	43	286,94	1	-	-	-	-	-	413,56
82	LPP TVRI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	56.570,38	12	53.598,29	3	17.710,41	9	35.887,88	-	-	-	-	17.710,41
		2010	15	326,04	20	326,02	6	74,05	11	123,43	3	128,54	-	-	74,05
		2011	21	66.197,07	42	66.197,05	7	1.335,06	22	2.275,04	13	62.588,95	-	-	1.335,06
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	123.093,49	74	120.121,36	16	19.117,52	42	38.286,35	16	62.717,49	-	-	19.117,52
83	LPP RRI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	679,74	32	557,84	17	46,95	13	510,89	2	-	-	-	46,95
		2012	14	15.082,43	51	10.099,55	14	817,79	15	9.280,26	22	1,50	-	-	158,72
		Jumlah	28	15.762,17	83	10.657,39	31	864,74	28	9.791,15	24	1,50	-	-	205,67
84	BASARNAS	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	20.825,33	20	20.726,72	18	20.726,72	2	-	-	-	-	-	1.158,57
		2012	18	14.797,92	18	1.118,93	10	1.118,93	8	-	-	-	-	-	56,45
		Jumlah	29	35.623,25	38	21.845,65	28	21.845,65	10	-	-	-	-	-	1.215,02
85	KPPU	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	11,70	2	11,70	2	11,70	-	-	-	-	-	-	11,70
		2010	5	183,51	7	180,12	5	-	2	180,12	-	-	-	-	3,39
		2011	4	45,39	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	8	1.073,19	11	1.073,19	8	1.073,19	3	-	-	-	-	-	72,03
		Jumlah	19	1.313,79	26	1.265,01	20	1.084,89	6	180,12	-	-	-	-	87,12

Halaman 21 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No.	ENtitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	BAWASLU	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	12.432,43	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	12.432,43	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54
87	Ombudsman RI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
88	BNPP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	20	19.106,51	59	17.199,99	24	8.713,13	14	2.218,80	21	6.268,06	-	-	8.713,13
		Jumlah	20	19.106,51	59	17.199,99	24	8.713,13	14	2.218,80	21	6.268,06	-	-	8.713,13
89	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	720,02	24	720,02	22	720,02	2	-	-	-	-	-	720,02
		2012	15	-	24	-	11	-	1	-	12	-	-	-	-
		Jumlah	24	720,02	48	720,02	33	720,02	3	-	12	-	-	-	720,02
90	ETESP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 22 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	ENttas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	STAR SDP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	4,39	5	4,39	5	4,39	-	-	-	-	-	-	4,39
		2011	8	104,19	8	104,18	6	46,74	2	57,44	-	-	-	-	46,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	108,58	13	108,57	11	51,13	2	57,44	-	-	-	-	51,13
		Total	12.075	711.195.515,32	21.983	33.445.190,49	13.515	9.712.052,35	5.167	13.894.533,45	3.242	9.690.968,36	59	147.636,32	7.085.539,07
				USD 490,663,46		USD 416,841,48		USD 47,143,55		USD 62,786,07		USD 296,124,81		USD 10,787,05	USD 84,605,66
				EUR 63,80		EUR 13,61		EUR 13,61		-		-		-	EUR 14,21
				AUD 28,59		AUD 28,59		-		-		AUD 28,59		-	-
				JPY 267,381,23		JPY 150,835,50		JPY 150,835,50		-		-		-	-
				SAR 1.502,90		-		-		-		-		-	-
				THB 25,00		THB 25,00		-		-		THB 25,00		-	-
				SGD 0,24		SGD 0,24		-		SGD 0,24		-		-	-
				RON 7,16		RON 7,15		RON 4,21		-		RON 2,94		-	-
				PLN 54,42		PLN 54,42		-		-		PLN 54,42		-	-
				KRW 3,075,01		KRW 3,075,01		-		KRW 3,075,01		-		-	-
		Total (Rp)		75.975.376,17		37.493.625,34		10.185.005,49		14.501.704,41		12.554.968,35		251.947,09	7.903.857,83

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prov. Aceh	2008	43	26.416,17	96	26.314,17	73	15.831,50	23	2.718,23	-	7.764,44	-	-	15.831,50
		2009	74	850.306,75	199	44.100,07	116	2.393,79	50	39.766,74	33	1.939,54	-	-	1.964,39
		2010	94	6.431.584,81	238	191.443,66	96	3.442,33	110	1.456,36	32	186.544,97	-	-	2.780,53
		2011	70	77.231,58	256	27.138,63	67	1.105,52	171	-	18	26.033,11	-	-	933,80
		2012	78	37.815,72	214	42.110,48	26	-	65	-	123	42.110,48	-	-	-
		Jumlah	359	7.423.355,03	1.003	331.107,01	378	22.773,14	419	43.941,33	206	264.392,54	-	-	21.510,22
2	Kab. Aceh Barat	2008	21	7.805,09	45	6.628,75	27	-	14	6.354,50	4	274,25	-	-	-
		2009	15	35.878,14	35	10.901,46	4	-	4	9.918,79	27	982,67	-	-	-
		2010	10	6.721,14	30	6.721,14	-	-	12	6.721,14	18	-	-	-	-
		2011	31	26.385,74	89	7.132,35	-	-	34	4.558,52	55	2.573,83	-	-	-
		2012	17	4.187,15	50	4.187,15	-	-	-	-	50	4.187,15	-	-	-
		Jumlah	94	80.977,26	249	35.570,85	31	-	64	27.552,95	154	8.017,90	-	-	-
3	Kab. Aceh Barat Daya	2008	12	3.891,31	22	3.891,30	20	3.244,87	2	646,43	-	-	-	-	3.244,87
		2009	14	10.857,30	42	5.167,19	1	-	1	11,20	40	5.155,99	-	-	-
		2010	23	9.374,16	84	7.792,85	1	63,59	9	2.065,72	74	5.663,54	-	-	63,59
		2011	18	11.729,81	48	9.027,26	-	-	-	-	48	9.027,26	-	-	-
		2012	25	26.391,07	79	8.375,73	-	-	-	-	79	8.375,73	-	-	-
		Jumlah	92	62.243,65	275	34.254,33	22	3.308,46	12	2.723,35	245	28.222,52	-	-	3.308,46
4	Kab. Aceh Besar	2008	26	4.058,69	55	3.427,52	48	2.572,71	7	854,81	-	-	-	-	946,25
		2009	18	22.680,49	45	501,15	41	145,20	2	256,50	2	99,45	-	-	626,81
		2010	21	4.011,86	43	4.011,85	30	523,01	13	3.488,84	-	-	-	-	523,01
		2011	24	2.911,74	56	2.864,84	24	1.515,44	10	431,57	22	917,83	-	-	51,44
		2012	15	33.976,99	44	2.246,33	25	87,48	1	16,10	18	2.142,75	-	-	-
		Jumlah	104	67.635,77	243	13.051,69	168	4.843,84	33	5.047,82	42	3.160,03	-	-	2.147,51
5	Kab. Aceh Jaya	2008	10	835,78	20	835,77	13	761,71	4	74,06	3	-	-	-	-
		2009	21	22.488,44	48	4.262,16	31	1.095,12	12	3.167,04	5	-	-	-	57,47
		2010	24	9.254,50	48	2.030,88	19	722,18	5	959,28	24	349,42	-	-	55,64
		2011	19	13.891,83	50	2.353,42	-	-	2	999,31	48	1.312,36	-	-	41,75
		2012	13	4.579,63	26	1.619,10	5	886,51	16	66,19	5	666,40	-	-	780,42
		Jumlah	87	51.050,18	192	11.101,33	68	3.507,27	39	5.265,88	85	2.328,18	-	-	935,28

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Kab. Aceh Selatan	2008	21	23.961,03	62	23.961,02	50	22.991,36	12	969,66	-	-	-	-	2.390,64
		2009	19	42.354,47	44	30.108,17	23	12.588,68	14	17.405,64	7	113,85	-	-	12.580,91
		2010	20	4.988,92	54	4.042,38	39	1.264,37	14	2.778,01	1	-	-	-	1.264,37
		2011	20	17.124,96	59	966,41	1	259,86	1	-	57	706,55	-	-	259,86
		2012	11	1.709,52	24	1.709,52	-	-	1	-	23	1.709,52	-	-	-
		Jumlah	91	90.138,90	243	60.787,50	113	37.104,27	42	21.153,31	88	2.529,92	-	-	16.495,78
7	Kab. Aceh Singkil	2008	11	1.593,37	34	1.496,09	29	660,23	5	835,86	-	-	-	-	660,23
		2009	13	1.898,16	34	647,59	23	443,86	5	179,95	6	23,78	-	-	180,39
		2010	17	20.447,79	63	1.033,10	48	893,86	9	139,24	6	-	-	-	315,96
		2011	23	21.580,77	68	7.691,84	2	13,49	29	5.656,18	37	2.022,17	-	-	13,49
		2012	15	23.976,00	41	564,28	9	564,28	3	-	29	-	-	-	-
		Jumlah	79	69.496,09	240	11.432,90	111	2.575,72	51	6.811,23	78	2.045,95	-	-	1.170,07
8	Kab. Aceh Tamiang	2008	22	16.815,50	41	16.815,49	35	14.301,75	4	412,19	2	2.101,55	-	-	8.015,00
		2009	25	21.956,82	71	8.279,27	56	4.798,78	11	3.265,08	4	215,41	-	-	284,57
		2010	14	1.485,31	52	394,96	40	186,36	9	14,50	3	194,10	-	-	96,36
		2011	24	24.250,03	67	2.457,69	34	5,72	3	1.994,23	30	457,74	-	-	5,72
		2012	16	2.200,02	47	2.200,02	4	-	1	-	42	2.200,02	-	-	-
		Jumlah	101	66.707,68	278	30.147,43	169	19.292,61	28	5.686,00	81	5.168,82	-	-	8.401,65
9	Kab. Aceh Tengah	2008	11	128,39	18	64,18	17	50,73	1	13,45	-	-	-	-	50,73
		2009	14	2.120,92	34	1.666,66	30	448,62	4	1.218,04	-	-	-	-	448,62
		2010	22	28.863,21	53	1.766,26	12	50,13	17	938,68	24	777,45	-	-	127,85
		2011	16	40.208,43	38	10.248,78	27	537,02	10	256,97	1	9.454,79	-	-	537,02
		2012	17	2.333,81	46	2.333,81	-	-	2	-	44	2.333,81	-	-	-
		Jumlah	80	73.654,76	189	16.079,69	86	1.086,50	34	2.427,14	69	12.566,05	-	-	1.164,22
10	Kab. Aceh Tenggara	2008	37	20.064,38	60	13.286,05	48	10.763,46	10	2.447,89	2	74,70	-	-	292,06
		2009	15	47.358,61	32	33.643,01	27	17.544,23	5	16.098,78	-	-	-	-	9.039,20
		2010	15	25.502,92	33	14.327,88	27	9.432,67	4	4.895,21	2	-	-	-	454,47
		2011	12	30.051,75	36	7.547,02	7	-	23	4.343,97	6	3.203,05	-	-	-
		2012	24	8.731,82	66	8.731,82	1	11,04	-	-	65	8.720,78	-	-	11,04
		Jumlah	103	131.709,48	227	77.535,78	110	37.751,40	42	27.785,85	75	11.998,53	-	-	9.796,77

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi Tindak Lanjut		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
11	Kab. Aceh Timur	2008	4	9.788,19	22	8.953,78	19	7.291,40	10	11	11	12	14	15	16	6.851,51
		2009	26	77.127,26	72	6.374,23	35	871,56	21	3.721,57	16	1.781,10	-	-	-	869,47
		2010	25	14.693,96	59	1.482,27	26	37,50	12	864,95	21	579,82	-	-	-	-
		2011	19	40.065,09	44	6.579,46	13	-	20	246,28	11	6.333,18	-	-	-	-
		2012	12	632,99	23	632,99	5	-	3	632,99	15	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	142.307,49	220	24.022,73	98	8.200,46	57	7.128,17	65	8.694,10	-	-	-	7.720,98
12	Kab. Aceh Utara	2008	15	100,00	29	100,00	27	-	2	100,00	-	-	-	-	-	-
		2009	23	664.878,34	56	225.656,06	41	5.572,06	9	219.981,74	6	102,26	-	-	-	2.357,80
		2010	69	556.243,75	145	13.785,82	82	1.886,69	19	6.983,53	44	4.915,60	-	-	-	56,45
		2011	21	248.442,63	49	571,50	-	54,57	-	-	49	516,93	-	-	-	54,57
		2012	12	16.721,03	23	11.153,42	-	17,08	-	-	23	11.136,34	-	-	-	17,08
		Jumlah	140	1.486.385,75	302	251.266,80	150	7.530,40	30	227.065,27	122	16.671,13	-	-	-	2.485,90
13	Kab. Bener Meriah	2008	10	199,77	15	199,77	12	-	3	199,77	-	-	-	-	-	-
		2009	20	43.106,89	54	2.329,46	27	-	20	174,31	7	2.155,15	-	-	-	-
		2010	15	23.142,05	36	321,43	28	142,94	4	141,35	4	37,14	-	-	-	142,94
		2011	31	4.240,81	74	4.240,81	-	-	4	1.608,11	70	2.632,70	-	-	-	-
		2012	12	683,64	26	683,64	-	-	-	-	26	683,64	-	-	-	-
		Jumlah	88	71.373,16	205	7.775,11	67	142,94	31	2.123,54	107	5.508,63	-	-	-	142,94
14	Kab. Bireuen	2008	14	10.802,46	36	10.802,46	23	-	8	10.802,46	5	-	-	-	-	-
		2009	21	42.645,53	53	42.178,02	23	92,93	13	42.009,73	17	75,36	-	-	-	92,93
		2010	11	11.399,67	28	2.912,88	-	467,11	1	64,45	27	2.381,32	-	-	-	467,11
		2011	27	72.867,86	75	5.374,19	-	-	-	-	75	5.374,19	-	-	-	-
		2012	24	7.314,99	89	2.109,59	-	-	-	-	89	2.109,59	-	-	-	-
		Jumlah	97	145.030,51	281	63.377,14	46	560,04	22	52.876,64	213	9.940,46	-	-	-	560,04
15	Kab. Gayo Lues	2008	13	4.755,71	22	4.755,71	17	3.129,87	5	1.625,84	-	-	-	-	-	2.229,26
		2009	18	11.210,52	48	512,16	42	33,28	4	478,88	2	-	-	-	-	33,28
		2010	21	2.992,13	42	2.545,94	26	263,91	7	75,69	9	2.206,34	-	-	-	263,91
		2011	25	4.030,46	61	2.922,48	29	286,88	11	2.370,48	21	265,12	-	-	-	253,88
		2012	13	2.925,40	25	1.541,80	10	10,71	-	-	24	1.531,09	-	-	-	1.394,30
		Jumlah	90	25.914,22	198	12.278,09	115	3.724,65	27	4.550,89	56	4.002,55	-	-	-	4.174,63
16	Kab. Nagan Raya	2008	18	897,43	36	897,43	32	897,43	2	-	2	-	-	-	-	897,43
		2009	11	18.391,67	25	441,49	24	309,45	1	132,04	-	-	-	-	-	309,45
		2010	13	6.298,69	34	518,65	28	349,34	4	150,32	2	18,99	-	-	-	349,34

Halaman 4 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	24	4.562,05	69	3.350,16	31	229,58	3	299,89	35	2.820,69	-	-	-	77,63
		2012	9	101,04	30	101,03	22	0,06	8	100,97	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	75	30.250,88	194	5.308,76	137	1.785,86	18	683,22	39	2.839,68	-	-	-	1.633,85
17	Kab. Pidie	2008	19	997,89	38	997,88	11	39,15	23	958,73	4	-	-	-	-	39,15
		2009	15	1.728,17	31	1.728,16	15	0,66	11	269,55	5	1.457,95	-	-	-	0,66
		2010	11	1.634,17	30	1.634,17	21	-	7	-	2	1.634,17	-	-	-	-
		2011	38	41.980,16	95	41,28	-	-	-	-	95	41,28	-	-	-	-
		2012	21	1.552,06	54	1.873,09	-	-	-	-	54	1.873,09	-	-	-	-
		Jumlah	104	47.892,45	248	6.274,58	47	39,81	41	1.228,28	160	5.006,49	-	-	-	39,81
18	Kab. Pidie Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	1.771,93	59	1.771,93	37	310,17	17	1.461,76	5	-	-	-	-	-
		2010	14	817,55	44	648,59	3	36,07	26	592,12	15	20,40	-	-	-	-
		2011	26	4.342,41	83	4.342,41	5	-	31	147,40	47	4.195,01	-	-	-	-
		2012	15	7.086,28	46	1.105,34	10	-	6	-	30	1.105,34	-	-	-	-
		Jumlah	82	14.018,17	232	7.868,27	55	346,24	80	2.201,28	97	5.320,75	-	-	-	-
19	Kab. Simeulue	2008	15	23.382,66	36	5.028,86	33	5.028,86	2	-	1	-	-	-	-	5.028,86
		2009	21	21.668,02	63	2.018,06	47	45,14	15	1.972,92	1	-	-	-	-	10,20
		2010	12	22.963,50	17	3.636,57	12	2.200,45	5	1.436,12	-	-	-	-	-	2.200,45
		2011	36	70.352,02	116	3.421,62	29	116,04	55	2.610,86	32	694,72	-	-	-	116,04
		2012	12	6.712,44	28	1.070,50	8	-	12	1.070,50	8	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	145.078,64	260	15.175,61	129	7.390,49	89	7.090,40	42	694,72	-	-	-	7.355,55
20	Kota Banda Aceh	2008	13	5.302,25	27	5.302,23	22	5.298,97	3	1,63	2	1,63	-	-	-	298,97
		2009	36	5.169,90	73	5.169,90	61	430,27	12	4.739,63	-	-	-	-	-	390,51
		2010	10	1.254,58	22	1.031,42	18	86,66	4	944,76	-	-	-	-	-	86,66
		2011	19	7.257,04	51	5,33	45	5,33	5	-	1	-	-	-	-	5,33
		2012	12	9.028,21	29	681,73	29	681,73	-	-	-	-	-	-	-	681,73
		Jumlah	90	28.011,98	202	12.190,61	175	6.502,96	24	5.686,02	3	1,63	-	-	-	1.463,20
21	Kota Langsa	2008	12	1.198,27	29	1.198,27	22	1.135,77	2	62,50	5	-	-	-	-	1.135,77
		2009	11	3.860,76	19	2.510,69	13	381,26	4	2.097,39	2	32,04	-	-	-	381,26
		2010	11	6.634,04	33	569,25	29	-	-	-	4	569,25	-	-	-	-
		2011	13	35.717,23	35	8.590,91	19	5.439,12	8	2.044,69	8	1.107,10	-	-	-	5.439,12
		2012	15	93,99	43	93,99	17	22,01	16	71,98	10	-	-	-	-	22,01
		Jumlah	62	47.504,29	159	12.963,11	100	6.978,16	30	4.276,56	29	1.708,39	-	-	-	6.978,16

Halaman 5 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veias)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Kota Lhokseumawe	2008	13	143,61	30	143,61	11	-	19	143,61	-	-	-	-	-
		2009	23	2.392,02	55	930,10	22	381,42	27	432,41	6	116,27	-	-	264,73
		2010	12	-	29	-	6	-	9	-	14	-	-	-	-
		2011	27	4.098,48	84	3.497,92	25	140,09	30	3.104,73	29	253,10	-	-	140,09
		2012	13	3.689,26	30	3.689,26	2	78,78	24	3.610,48	4	-	-	-	78,78
		Jumlah	88	10.323,37	228	8.260,89	66	600,29	109	7.291,23	53	369,37	-	-	483,60
23	Kota Sabang	2008	27	3.708,65	52	2.504,79	45	26,46	7	2.478,33	-	-	-	-	11,90
		2009	10	1.581,40	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	-	-	1.354,40
		2010	21	28.803,58	42	200,49	29	40,54	12	140,78	1	19,17	-	-	40,54
		2011	13	66,24	28	66,24	11	15,01	12	46,23	5	5,00	-	-	15,01
		2012	16	366,23	45	366,23	21	236,03	22	100,00	2	30,20	-	-	333,45
		Jumlah	87	34.526,10	188	4.492,15	124	1.672,44	55	2.765,34	9	54,37	-	-	1.755,30
24	Kota Subulussalam	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	13.838,75	73	10.377,92	26	205,84	17	8.674,45	30	1.497,63	-	-	205,84
		2010	17	5.297,81	50	1.030,54	5	22,45	8	106,26	37	901,83	-	-	22,45
		2011	29	35.573,85	71	491,83	9	32,12	3	103,75	59	355,96	-	-	-
		2012	16	1.622,81	49	1.090,54	8	-	35	701,02	6	389,52	-	-	-
		Jumlah	86	56.333,22	243	12.990,83	48	260,41	63	9.585,48	132	3.144,94	-	-	228,29
25	Prov. Sumatera Utara	2008	42	12.437,18	96	11.248,45	38	219,02	27	10.907,68	31	121,75	-	-	219,02
		2009	43	61.052,49	108	47.246,87	48	3.083,94	50	37.173,18	10	6.989,75	-	-	3.083,94
		2010	26	325.312,04	70	296.325,64	31	5.294,16	27	148.035,62	12	142.995,86	-	-	5.294,16
		2011	52	45.062,49	122	40.805,14	43	15.527,78	39	22.133,39	40	3.143,97	-	-	9.063,84
		2012	19	77.754,60	52	29.141,71	9	542,10	42	28.599,61	1	-	-	-	-
		Jumlah	182	521.618,80	448	424.767,81	169	24.667,00	185	246.849,48	94	153.251,33	-	-	17.660,96
26	Kab. Asahan	2008	35	10.587,33	94	10.571,80	73	3.710,40	19	6.861,40	2	-	-	-	3.710,40
		2009	38	487,86	91	487,86	45	449,58	5	28,28	41	10,00	-	-	449,58
		2010	32	11.041,48	74	5.806,37	37	633,46	13	3.967,12	24	1.205,79	-	-	633,46
		2011	16	2.109,55	36	2.109,53	26	133,10	7	1.942,73	3	33,70	-	-	133,10
		2012	17	4.974,01	43	5.070,63	37	2.257,50	4	2.813,13	2	-	-	-	2.257,50
		Jumlah	138	29.200,23	338	24.046,19	218	7.184,04	48	15.612,66	72	1.249,49	-	-	7.184,04

Halaman 6 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Kab. Batubara	2008	7	96,22	16	96,21	11	58,74	2	37,47	1	-	2	-	58,74
		2009	20	41.857,71	55	41.857,69	34	768,37	21	38.344,72	-	-	-	2.744,60	768,37
		2010	17	24.028,77	52	24.028,77	29	21.406,98	21	23.406,98	2	-	-	-	510,91
		2011	25	84.823,55	57	83.186,37	38	338,86	13	1.479,60	6	81.367,91	-	-	338,86
		2012	17	92.174,58	28	83.938,93	5	1.900,08	23	82.038,86	-	-	-	-	637,20
		Jumlah	86	242.980,83	208	233.107,97	117	3.687,84	80	145.307,63	9	81.367,91	2	2.744,60	2.314,08
28	Kab. Dairi	2008	26	11.099,79	63	2.620,03	53	430,55	6	1.621,16	2	-	2	568,32	316,70
		2009	14	3.056,11	40	3.056,09	28	932,96	10	1.303,19	-	-	2	819,94	932,96
		2010	16	936,26	35	606,60	7	397,42	25	209,18	3	-	-	-	397,42
		2011	25	2.980,55	71	2.659,26	15	230,52	54	1.656,64	2	772,11	-	-	154,30
		2012	12	4.380,01	29	4.383,75	10	64,32	15	4.157,07	4	162,36	-	-	64,32
		Jumlah	93	22.452,72	238	13.325,73	113	2.055,77	110	8.947,24	11	934,47	4	1.388,26	1.865,70
29	Kab. Deli Serdang	2008	41	3.855,08	84	3.855,08	65	44,65	14	3.810,43	5	-	-	-	44,65
		2009	25	8.994,18	63	9.458,69	32	585,64	18	4.202,49	13	4.670,56	-	-	744,57
		2010	25	2.731,15	62	2.731,15	41	1.479,70	18	1.251,45	3	-	-	-	424,20
		2011	22	5.098,26	44	5.098,25	28	184,29	13	4.073,36	3	840,60	-	-	-
		2012	29	3.305,91	55	3.305,90	5	47,78	13	3.258,12	37	-	-	-	-
		Jumlah	142	23.984,58	308	24.449,07	171	2.342,06	76	16.595,85	61	5.511,16	-	-	1.213,42
30	Kab. Humbang Hasundutan	2008	15	770,52	35	770,51	25	322,08	10	448,43	-	-	-	-	322,08
		2009	19	9.691,50	43	7.334,82	32	609,53	4	2.511,75	7	4.213,54	-	-	609,53
		2010	15	11.754,53	31	8.576,11	9	434,83	2	171,60	20	7.969,68	-	-	456,43
		2011	19	1.284,24	54	1.422,14	11	972,74	9	346,30	34	103,10	-	-	915,50
		2012	10	3.453,03	18	685,62	4	528,52	2	157,10	12	-	-	-	508,98
		Jumlah	78	26.953,82	181	18.789,20	81	2.867,70	27	3.635,18	73	12.286,32	-	-	2.812,52
31	Kab. Karo	2008	11	658,60	24	249,67	17	124,67	5	125,00	2	-	-	-	124,67
		2009	12	1.083,23	32	318,16	6	314,42	25	3,74	1	-	-	-	314,42
		2010	16	5.607,00	29	963,65	7	387,20	17	576,45	5	-	-	-	387,20
		2011	26	2.610,55	76	2.330,12	57	1.812,65	17	510,30	2	7,17	-	-	1.812,65
		2012	13	67.123,94	37	2.469,28	11	244,69	25	2.224,59	1	-	-	-	-
		Jumlah	78	77.083,32	198	6.330,88	98	2.883,63	89	3.440,08	11	7,17	-	-	2.638,94
32	Kab. Labuhanbatu	2008	25	4.130,61	57	4.130,60	51	833,86	6	3.296,74	-	-	-	-	833,86
		2009	25	5.066,96	66	5.066,95	53	477,52	13	4.589,43	-	-	-	-	477,52
		2010	11	584,15	26	584,14	18	242,67	8	341,47	-	-	-	-	242,67

Halaman 7 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	23	6.492,99	58	6.492,98	40	-	16	6.383,65	2	109,33	-	-	-	-
		2012	10	68.615,84	22	600,20	-	-	-	-	22	600,20	-	-	-	-
		Jumlah	94	84.890,55	229	16.874,87	162	1.554,05	43	14.611,29	24	709,53	-	-	-	1.554,05
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	3.275,45	37	3.275,44	4	30,32	9	211,95	24	3.033,17	-	-	-	30,32
		2012	11	5.041,15	25	4.380,15	-	-	-	-	25	4.380,15	-	-	-	-
		Jumlah	26	8.316,60	62	7.655,59	4	30,32	9	211,95	49	7.413,32	-	-	-	30,32
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	10.752,53	49	11.417,42	5	729,67	20	10.579,39	24	108,36	-	-	-	729,67
		2012	16	1.878,64	42	1.878,64	8	596,54	7	25,71	27	1.256,39	-	-	-	596,54
		Jumlah	29	12.631,17	91	13.296,06	13	1.326,21	27	10.605,10	51	1.364,75	-	-	-	1.326,21
35	Kab. Langkat	2008	13	116.593,52	36	4.579,71	13	2.335,83	19	2.243,88	4	-	-	-	-	2.335,83
		2009	20	113.794,59	54	109.569,33	33	4.546,94	20	2.234,66	1	102.787,73	-	-	-	4.546,94
		2010	23	12.764,17	56	6.221,89	18	2.940,96	36	3.280,93	2	-	-	-	-	2.940,96
		2011	33	8.256,02	78	6.847,50	12	3.814,50	29	2.243,60	37	789,40	-	-	-	2.827,32
		2012	38	9.408,59	82	1.205,82	8	875,48	22	330,34	52	-	-	-	-	651,71
		Jumlah	127	260.816,89	306	128.424,25	84	14.513,71	126	10.333,41	96	103.577,13	-	-	-	13.302,76
36	Kab. Mandailing Natal	2008	26	2.876,99	53	2.876,99	18	848,70	25	1.879,39	10	148,90	-	-	-	848,70
		2009	22	2.104,67	52	2.104,66	18	293,44	7	1.094,81	27	716,41	-	-	-	293,44
		2010	32	1.280,09	96	1.280,09	26	391,49	37	851,04	33	37,56	-	-	-	391,49
		2011	19	1.659,20	40	1.659,19	3	761,26	25	541,59	12	356,34	-	-	-	761,26
		2012	11	14.713,77	23	426,14	-	-	-	-	23	426,14	-	-	-	-
		Jumlah	110	22.634,72	264	8.347,07	65	2.294,89	94	4.366,83	105	1.685,35	-	-	-	2.294,89
37	Kab. Nias	2008	16	7.382,80	46	7.486,09	25	298,57	17	7.187,52	4	-	-	-	-	298,57
		2009	20	19.983,85	67	14.452,32	39	3.297,08	21	6.883,37	7	4.271,87	-	-	-	3.297,08
		2010	13	3.078,86	34	141,42	23	76,92	9	64,50	2	-	-	-	-	76,92
		2011	14	768,32	31	768,32	15	-	15	768,32	1	-	-	-	-	-
		2012	21	11.448,43	46	1.423,18	-	27,98	-	-	46	1.395,20	-	-	-	2,32
		Jumlah	84	42.662,26	224	24.271,33	102	3.700,55	62	14.903,71	60	5.667,07	-	-	-	3.674,89

Halaman 8 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Kab. Nias Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	880,42	43	776,02	30	-	11	776,02	2	-	-	-	-
		2012	11	1.568,49	35	1.568,49	15	-	20	1.568,49	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	2.448,91	78	2.344,51	45	-	31	2.344,51	2	-	-	-	-
39	Kab. Nias Selatan	2008	16	20.617,69	38	20.617,67	1	3.675,35	2	10.699,73	35	6.242,59	-	-	3.675,35
		2009	17	3.242,83	48	3.242,83	1	104,18	-	-	47	3.138,65	-	-	104,18
		2010	15	685,34	45	685,33	2	199,64	1	7,71	42	477,98	-	-	199,64
		2011	17	2.658,15	55	2.658,14	22	191,31	24	2.360,16	9	106,67	-	-	191,31
		2012	12	4.563,49	24	4.563,49	-	-	-	-	24	4.563,49	-	-	-
		Jumlah	77	31.767,50	210	31.767,46	26	4.170,48	27	13.067,60	157	14.529,38	-	-	4.170,48
40	Kab. Nias Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	19	10.835,07	59	10.249,38	2	198,62	6	9.279,55	51	771,21	-	-	198,65
		2012	14	108.651,36	43	6.121,51	2	22,84	5	722,67	36	5.376,00	-	-	22,84
		Jumlah	33	119.486,43	102	16.370,89	4	221,46	11	10.002,22	87	6.147,21	-	-	221,49
41	Kab. Padang Lawas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	343,09	20	343,09	15	192,70	4	150,39	1	-	-	-	116,64
		2010	20	7.124,44	53	1.904,51	1	275,48	8	591,38	44	1.037,65	-	-	275,48
		2011	15	233.543,26	33	2.339,99	-	-	-	-	33	2.339,99	-	-	-
		2012	22	10.733,75	48	10.733,74	14	522,42	26	8.756,10	8	1.455,22	-	-	522,42
		Jumlah	66	251.744,54	154	15.321,33	30	990,60	38	9.497,87	86	4.832,86	-	-	914,54
42	Kab. Padang Lawas Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	6.867,61	18	6.867,61	10	187,88	4	6.621,38	4	58,35	-	-	187,88
		2010	20	4.763,11	52	4.763,10	32	80,14	14	3.442,72	6	1.240,24	-	-	80,14
		2011	19	6.178,96	54	6.178,96	25	-	27	6.178,96	2	-	-	-	-
		2012	15	22.066,70	40	22.066,70	-	-	-	-	40	22.066,70	-	-	-
		Jumlah	65	39.876,38	164	39.876,37	67	268,02	45	16.243,06	52	23.365,29	-	-	268,02
43	Kab. Pakpak Bharat	2008	17	2.846,51	44	548,21	37	537,42	6	10,79	1	-	-	-	537,42
		2009	12	836,72	26	836,71	21	164,20	4	225,64	1	446,87	-	-	164,20
		2010	27	10.435,89	73	1.841,98	35	270,58	32	771,01	6	800,39	-	-	270,58

Halaman 9 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	13	1.436,00	33	1.117,67	26	254,21	4	863,46	3	-	-	-	254,21
		2012	7	237,90	26	131,98	3	38,39	22	93,59	1	-	-	-	38,39
		Jumlah	76	15.793,02	202	4.476,55	122	1.264,80	68	1.964,49	12	1.247,26	-	-	1.264,80
44	Kab. Samosir	2008	23	4.608,41	49	3.311,60	14	648,38	25	2.032,74	10	630,48	-	-	648,38
		2009	14	3.084,02	35	649,76	-	164,69	19	485,07	16	-	-	-	164,69
		2010	28	5.297,82	67	4.238,24	10	480,52	42	3.621,10	15	136,62	-	-	480,52
		2011	11	1.416,54	47	674,32	22	87,40	12	586,92	13	-	-	-	87,40
		2012	9	380,25	27	380,24	6	-	19	323,72	2	56,52	-	-	-
		Jumlah	85	14.787,04	225	9.254,16	52	1.380,99	117	7.049,55	56	823,62	-	-	1.380,99
45	Kab. Serdang Bedagai	2008	18	3.901,29	50	2.733,48	36	508,51	14	2.224,97	-	-	-	-	508,51
		2009	29	14.914,14	74	693,51	34	13,37	40	680,14	-	-	-	-	14,72
		2010	17	11.984,37	38	2.046,74	20	877,18	18	1.169,56	-	-	-	-	877,18
			-	USD 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	26.645,15	67	2.972,58	34	778,25	33	2.194,33	-	-	-	-	778,25
		2012	12	478,42	24	74,32	10	20,41	13	53,91	1	-	-	-	20,41
		Jumlah	101	57.923,37	253	8.520,63	134	2.197,72	118	6.322,91	1	-	-	-	2.199,07
			-	USD 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kab. Simalungun	2008	47	37.399,75	105	2.169,25	8	586,51	24	991,21	73	591,53	-	-	586,51
		2009	17	5.144,43	53	3.009,69	3	18,79	20	39,26	30	2.951,64	-	-	18,79
		2010	28	58.606,70	66	2.476,40	11	56,11	29	2.047,97	26	372,32	-	-	56,11
		2011	25	29.857,14	66	23.640,16	14	20.706,69	42	2.933,47	10	-	-	-	40,11
		2012	23	8.339,11	50	5.039,31	9	465,15	21	2.128,37	20	2.445,79	-	-	106,84
		Jumlah	140	139.347,13	340	36.334,81	45	21.833,25	136	8.140,28	159	6.361,28	-	-	808,36
47	Kab. Tapanuli Selatan	2008	17	3.679,68	36	3.076,07	27	384,34	8	2.691,73	1	-	-	-	384,34
		2009	19	928,07	56	854,67	41	258,40	9	596,27	6	-	-	-	258,40
		2010	34	48.829,30	95	6.328,53	78	3.250,40	11	3.078,13	6	-	-	-	3.250,40
		2011	11	1.030,23	34	1.030,23	32	494,54	2	535,69	-	-	-	-	494,54
		2012	24	10.251,05	59	5.888,63	-	104,20	-	-	59	5.784,43	-	-	-
		Jumlah	105	64.718,33	280	17.178,13	178	4.491,88	30	6.901,82	72	5.784,43	-	-	4.387,68
48	Kab. Tapanuli Tengah	2008	35	4.541,41	71	3.888,87	50	1.888,92	11	991,16	10	1.008,79	-	-	1.888,92
		2009	16	2.665,19	37	355,79	27	198,82	6	156,97	4	-	-	-	198,82
		2010	20	1.194,90	54	1.194,90	27	174,47	24	1.020,43	3	-	-	-	174,47

Halaman 10 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	11	26.694,28	34	1.422,34	1	-	-	-	33	1.422,34	-	-	-
		2012	13	5.126,94	35	2.665,48	-	-	-	-	35	2.665,48	-	-	-
		Jumlah	95	40.220,72	231	9.527,38	105	2.262,21	41	2.168,56	85	5.096,61	-	-	2.262,21
49	Kab. Tapanuli Utara	2008	21	836,84	57	711,86	1	672,97	7	10,50	49	28,39	-	-	672,97
		2009	42	5.766,26	65	5.688,28	36	160,28	23	5.528,00	6	-	-	-	160,28
		2010	16	4.289,40	39	1.033,48	10	17,49	11	577,41	18	438,58	-	-	17,49
		2011	17	860,24	40	633,19	17	-	18	618,19	5	15,00	-	-	-
		2012	13	1.896,60	23	1.471,08	-	385,80	1	353,15	22	732,13	-	-	385,80
		Jumlah	109	13.649,34	224	9.537,89	64	1.236,54	60	7.087,25	100	1.214,10	-	-	1.236,54
50	Kab. Toba Samosir	2008	17	59.721,39	41	1.135,70	11	105,00	11	395,00	19	635,70	-	-	105,00
		2009	13	3.613,25	34	449,39	23	426,61	5	-	6	22,78	-	-	426,61
		2010	10	14.172,81	30	14.983,15	15	8.840,18	8	3.225,39	7	2.917,58	-	-	31,63
		2011	21	5.104,98	54	5.122,88	8	786,96	7	242,98	39	4.092,94	-	-	418,81
		2012	16	1.794,15	38	820,24	23	238,94	12	581,30	3	-	-	-	49,08
		Jumlah	77	84.406,58	197	22.511,36	80	10.397,69	43	4.444,67	74	7.669,00	-	-	1.031,13
51	Kota Binjai	2008	24	7.245,00	70	5.960,68	50	1.696,36	18	4.264,32	2	-	-	-	1.696,36
		2009	18	8.130,80	34	3.436,18	19	317,91	15	3.118,27	-	-	-	-	317,91
		2010	15	14.590,81	40	4.207,20	14	373,69	23	3.833,51	3	-	-	-	373,69
		2011	22	14.769,59	55	6.533,16	18	457,64	4	4.331,42	33	1.744,10	-	-	457,64
		2012	14	11.568,50	34	3.325,10	3	74,43	30	3.250,67	1	-	-	-	74,43
		Jumlah	93	56.304,70	233	23.462,32	104	2.920,03	90	18.798,19	39	1.744,10	-	-	2.920,03
52	Kota Gunung Sitoli	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	206,06	34	206,06	8	206,06	26	206,06	-	-	-	-	-
		2012	13	1.087,38	23	1.092,17	-	-	-	-	23	1.092,17	-	-	-
		Jumlah	26	1.293,44	57	1.298,23	8	206,06	26	206,06	23	1.092,17	-	-	-
53	Kota Medan	2008	48	13.202,91	120	4.191,72	92	1.975,03	28	2.216,69	-	-	-	-	1.975,03
		2009	-	USD 5,07	-	USD 5,07	-	USD 0,99	-	USD 4,08	-	-	-	-	USD 0,99
		2010	54	50.752,00	109	43.809,58	76	19.472,40	30	24.337,18	3	-	-	-	19.472,40
		2011	49	44.075,84	128	31.463,93	64	7.035,32	59	23.558,76	5	869,85	-	-	3.612,27

Halaman 11 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	37	12.141,10	98	6.129,95	38	3.233,46	17	2.581,44	43	315,05	-	-	-	3.226,55
		2012	24	6.536,79	54	6.472,44	15	5.823,37	9	649,07	30	-	-	-	-	5.823,37
		Jumlah	212	126.709	509	92.067,62	285	37.539,58	143	53.343,14	81	1.184,90	-	-	-	34.109,62
			-	USD 5,07	-	USD 5,07	-	USD 0,99	-	USD 4,08	-	-	-	-	-	USD 0,99
54	Kota Padangsidimpuan	2008	25	21.486,22	63	2.082,70	42	129,42	21	1.953,28	-	-	-	-	-	129,42
		2009	17	9.487,14	41	8.015,62	34	161,26	7	7.854,36	-	-	-	-	-	161,26
		2010	20	3.125,05	55	2.959,60	50	134,15	5	2.825,45	-	-	-	-	-	134,15
		2011	19	4.699,03	53	877,30	40	1,44	10	875,86	3	-	-	-	-	1,44
		2012	16	2.195,80	54	2.195,80	-	-	-	-	54	2.195,80	-	-	-	-
		Jumlah	97	40.993,24	266	16.131,02	166	426,27	43	13.508,95	57	2.195,80	-	-	-	426,27
55	Kota Pematangsiantar	2008	56	37.699,14	145	10.533,79	67	135,41	70	10.398,38	8	-	-	-	-	135,41
		2009	25	41.024,27	61	1.511,01	20	148,77	39	589,27	2	772,97	-	-	-	148,77
		2010	26	21.841,39	94	15.547,17	53	50,76	40	15.496,41	1	-	-	-	-	50,76
		2011	22	17.142,88	67	2.772,18	46	496,52	13	1.246,06	8	1.029,60	-	-	-	496,52
		2012	27	1.394,94	62	831,49	13	288,78	8	402,51	41	140,20	-	-	-	288,78
		Jumlah	156	119.102,62	429	31.195,64	199	1.120,24	170	28.132,63	60	1.942,77	-	-	-	1.120,24
56	Kota Sibolga	2008	51	2.997,78	96	2.129,04	75	630,99	14	1.207,14	7	290,91	-	-	-	630,99
		2009	17	2.634,23	42	226,33	35	13,20	4	213,13	3	-	-	-	-	13,20
		2010	10	458,93	23	458,93	8	26,57	11	432,36	4	-	-	-	-	26,57
		2011	23	1.049,09	63	1.049,08	26	86,40	8	669,98	29	292,70	-	-	-	86,40
		2012	7	1.256,22	18	1.220,44	2	20,31	-	-	16	1.200,13	-	-	-	20,31
		Jumlah	108	8.396,25	242	5.083,82	146	777,47	37	2.522,61	59	1.783,74	-	-	-	777,47
57	Kota Tanjungbalai	2008	19	2.612,02	53	535,98	40	105,66	8	430,32	5	-	-	-	-	105,66
		2009	16	2.276,74	39	2.144,81	27	692,83	10	1.451,98	2	-	-	-	-	692,83
		2010	18	4.999,13	47	4.299,52	29	252,30	17	3.215,83	1	831,39	-	-	-	252,30
		2011	18	34.661,45	36	5.540,04	19	-	16	5.540,04	1	-	-	-	-	-
		2012	15	4.130,98	30	380,07	16	131,80	14	248,27	-	-	-	-	-	131,80
		Jumlah	86	48.680,32	205	12.900,42	131	1.182,59	65	10.886,44	9	831,39	-	-	-	1.182,59
58	Kota Tebing Tinggi	2008	24	22.705,39	69	1.071,04	10	52,12	17	722,92	42	296,00	-	-	-	52,12
		2009	17	8.576,77	38	260,20	10	10,27	17	159,93	11	90,00	-	-	-	10,27
		2010	16	4.150,87	48	2.721,39	21	1.344,90	10	1.376,49	17	-	-	-	-	-
		2011	5	2.360,54	16	886,74	-	-	-	-	16	886,74	-	-	-	-
		2012	25	18.013,77	51	6.740,47	29	1.442,49	8	81,46	14	5.216,52	-	-	-	81,46
		Jumlah	87	55.807,34	222	11.679,84	70	2.849,78	52	2.340,80	100	6.489,26	-	-	-	546,02

Halaman 12 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
59	Prov. Sumatera Barat	2008	74	337.425,79	166	19.425,05	123	2.284,50	37	16.447,73	6	692,82	-	-	2.284,50	
		2009	22	32.249,16	73	31.452,49	54	31.440,77	18	11,72	1	-	-	-	31.440,77	
		2010	109	7.618,91	266	5.128,43	219	3.068,39	45	2.060,04	2	-	-	-	3.068,39	
		2011	46	22.353,66	136	7.511,24	62	419,90	31	7.091,34	43	-	-	-	419,90	
		2012	39	37.357,13	105	12.305,54	-	461,65	5	135,47	100	11.708,42	-	-	461,65	
		Jumlah	290	437.004,65	746	75.822,75	458	37.675,21	136	25.746,30	152	12.401,24	-	-	37.675,21	
60	Kab. Agam	2008	36	3.633,01	87	662,64	47	150,52	26	512,12	14	-	-	-	150,52	
		2009	28	9.216,73	62	3.735,66	45	2.906,41	15	829,25	2	-	-	-	2.906,41	
		2010	34	2.041,09	71	640,11	14	2,45	45	637,66	12	-	-	-	2,45	
		2011	25	10.558,17	62	8.176,56	8	3,95	31	143,57	23	8.029,04	-	-	3,95	
		2012	15	9.137,19	36	6.314,69	-	-	-	-	36	6.314,69	-	-	-	
		Jumlah	138	34.586,19	318	19.529,66	114	3.063,33	117	2.122,60	87	14.343,73	-	-	3.063,33	
61	Kab. Dharmasraya	2008	27	3.786,94	70	3.365,46	9	730,40	54	2.179,74	7	455,32	-	-	730,40	
		2009	43	12.811,15	129	4.686,76	32	2.022,89	76	2.019,97	21	643,90	-	-	2.022,89	
		2010	38	805,97	110	785,99	15	329,93	68	447,48	27	8,58	-	-	329,93	
		2011	19	4.047,88	44	3.118,84	5	52,16	28	3.066,68	11	-	-	-	52,16	
		2012	18	2.481,64	58	2.481,63	-	1.139,36	1	346,11	57	996,16	-	-	1.139,36	
		Jumlah	145	23.933,58	411	14.438,68	61	4.274,74	227	8.059,98	123	2.103,96	-	-	4.274,74	
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2008	28	1.717,24	76	248,86	44	-	12	-	20	248,86	-	-	-	
		2009	27	7.739,03	81	2.428,59	49	211,63	16	1.307,64	16	909,32	-	-	211,63	
		2010	27	3.264,17	64	2.825,76	2	586,02	58	2.239,74	4	-	-	-	586,02	
		2011	34	4.636,79	93	1.481,83	7	49,13	46	429,31	40	1.003,39	-	-	49,13	
		2012	19	4.896,93	38	4.855,63	-	-	-	-	38	4.855,63	-	-	-	
		Jumlah	135	22.254,16	352	11.840,67	102	846,78	132	3.976,69	118	7.017,20	-	-	846,78	
63	Kab. Lima Puluh Kota	2008	52	61.804,30	124	22.018,76	70	1.022,79	43	12.708,94	11	8.287,03	-	-	1.022,79	
		2009	18	11.689,17	48	2.807,86	32	2.185,92	11	614,24	5	7,70	-	-	2.185,92	
		2010	43	10.888,02	136	3.811,73	76	1.435,93	56	2.375,80	4	-	-	-	1.435,93	
		2011	28	1.511,22	67	1.038,77	34	320,33	32	718,44	1	-	-	-	320,33	
		2012	22	2.564,30	50	1.384,97	-	18,23	2	7,52	48	1.359,22	-	-	18,23	
		Jumlah	163	88.457,01	425	31.062,09	212	4.983,20	144	16.424,94	69	9.653,95	-	-	4.983,20	
64	Kab. Padang Pariaman	2008	26	42.887,72	54	21.288,74	36	18.417,00	14	2.871,74	4	-	-	-	18.417,00	
		2009	35	29.471,24	74	4.033,55	47	93,59	23	3.939,96	4	-	-	-	93,59	
		2010	20	2.601,68	60	508,92	20	243,91	34	265,01	6	-	-	-	243,91	

Halaman 13 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	47	35.616,83	139	5.236,30	13	4,19	46	4.450,91	80	781,20	-	-	4,19
		2012	21	2.815,75	56	1.525,04	-	15,16	1	-	55	1.509,88	-	-	15,16
		Jumlah	149	113.393,22	383	32.592,55	116	18.773,85	118	11.527,62	149	2.291,08	-	-	18.773,85
65	Kab. Pesaman	2008	28	9.496,32	52	3.548,39	32	138,55	19	3.409,84	1	-	-	-	138,55
		2009	28	4.364,81	86	1.357,14	38	-	47	1.357,14	1	-	-	-	-
		2010	52	10.828,11	130	6.452,96	24	-	99	6.433,70	7	19,26	-	-	-
		2011	15	1.541,04	41	683,28	15	633,43	25	49,85	1	-	-	-	633,43
		2012	19	5.070,54	49	3.675,57	-	94,37	-	-	49	3.581,20	-	-	94,37
		Jumlah	142	31.300,82	358	15.717,34	109	866,35	190	11.250,53	59	3.600,46	-	-	866,35
66	Kab. Pasaman Barat	2008	48	12.356,76	143	3.894,03	94	672,73	42	2.832,80	7	388,50	-	-	672,73
		2009	32	9.029,56	86	667,65	61	54,79	12	506,36	13	106,50	-	-	54,79
		2010	34	6.870,18	118	5.535,26	45	1.252,12	59	4.023,73	14	259,41	-	-	1.252,12
		2011	24	11.470,66	66	1.182,57	33	148,57	28	1.034,00	5	-	-	-	148,57
		2012	23	11.299,79	66	6.142,27	1	62,41	2	684,46	63	5.395,40	-	-	62,41
		Jumlah	161	51.026,95	479	17.421,78	234	2.190,62	143	9.081,35	102	6.149,81	-	-	2.190,62
67	Kab. Pesisir Selatan	2008	40	10.379,28	98	8.482,55	80	5.642,52	16	2.840,03	2	-	-	-	5.642,52
		2009	20	3.360,82	51	779,79	43	687,99	7	91,80	1	-	-	-	687,99
		2010	25	2.914,63	72	2.852,42	33	1.752,42	38	1.100,00	1	-	-	-	1.752,42
		2011	32	1.469,38	100	564,92	53	377,97	15	45,90	32	141,05	-	-	377,97
		2012	20	9.562,31	52	7.311,40	-	20,52	2	75,11	50	7.215,77	-	-	20,52
		Jumlah	137	27.686,42	373	19.991,08	209	8.481,42	78	4.152,84	86	7.356,82	-	-	8.481,42
68	Kab. Sijunjung	2008	24	1.974,56	50	587,54	21	167,10	25	312,44	4	108,00	-	-	167,10
		2009	20	290,74	52	68,94	9	-	37	44,64	6	24,30	-	-	-
		2010	41	1.643,63	97	524,87	63	151,94	27	260,37	7	112,56	-	-	151,94
		2011	22	5,94	60	5,94	10	5,94	47	-	3	-	-	-	5,94
		2012	22	2.604,37	66	706,26	-	62,72	1	19,77	65	623,77	-	-	62,72
		Jumlah	129	6.519,24	325	1.893,55	103	387,70	137	637,22	85	868,63	-	-	387,70
69	Kab. Solok	2008	14	2.234,83	37	2.234,82	29	1.134,99	8	1.099,83	-	-	-	-	1.134,99
		2009	27	14.994,51	74	5.220,59	54	427,58	20	4.793,01	-	-	-	-	427,58
		2010	32	10.399,52	102	4.615,11	73	673,58	28	3.941,53	1	-	-	-	673,58

Halaman 14 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	34	4.517,19	75	1.531,81	20	13,60	54	1.518,21	1	-	-	-	13,60
		2012	19	636,06	42	600,84	-	-	-	-	42	600,84	-	-	-
		Jumlah	126	32.782,11	330	14.203,17	176	2.249,75	110	11.352,58	44	600,84	-	-	2.249,75
70	Kab. Soloek Selatan	2008	25	1.737,98	67	915,74	43	175,10	21	740,64	3	-	-	-	175,10
		2009	25	12.197,54	75	11.464,07	42	-	31	11.464,07	2	-	-	-	-
		2010	53	38.741,04	168	34.088,51	4	-	157	34.088,51	7	-	-	-	-
		2011	27	27.917,67	77	1.345,35	1	-	56	1.345,35	20	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	80.594,23	387	47.813,67	90	175,10	265	47.638,57	32	-	-	-	175,10
71	Kab. Tanah Datar	2008	28	3.311,70	85	372,63	81	306,13	4	66,50	-	-	-	-	306,13
		2009	39	16.317,05	94	971,05	88	114,35	5	856,70	1	-	-	-	114,35
		2010	24	970,92	65	259,83	53	73,50	12	186,33	-	-	-	-	73,50
		2011	36	19.946,25	97	2.445,25	69	25,33	23	2.419,92	5	-	-	-	25,33
		2012	33	5.310,14	122	2.070,41	-	-	-	-	122	2.070,41	-	-	-
		Jumlah	160	45.856,06	463	6.119,17	291	519,31	44	3.529,45	128	2.070,41	-	-	519,31
72	Kota Bukittinggi	2008	28	12.385,09	64	419,78	41	-	19	419,78	4	-	-	-	-
		2009	24	814,28	66	97,00	42	2,50	20	94,50	4	-	-	-	2,50
		2010	60	8.539,96	164	7.527,64	99	2.299,12	63	5.228,52	2	-	-	-	2.299,12
		2011	24	1.311,62	58	331,18	13	-	14	-	31	331,18	-	-	-
		2012	19	3.048,58	51	1.090,72	-	-	-	-	51	1.090,72	-	-	-
		Jumlah	155	26.099,53	403	9.466,32	195	2.301,62	116	5.742,80	92	1.421,90	-	-	2.301,62
73	Kota Padang	2008	65	12.435,26	193	6.738,75	175	2.719,11	18	4.019,64	-	-	-	-	2.719,11
		2009	47	29.671,81	123	6.288,11	107	6.149,58	16	138,53	-	-	-	-	6.149,58
		2010	39	392,09	123	392,09	106	262,17	16	129,92	1	-	-	-	262,17
		2011	59	13.850,61	188	6.848,92	59	650,91	1	86,49	128	6.111,52	-	-	650,91
		2012	26	11.129,39	75	4.933,11	-	-	1	1.925,71	74	2.955,48	-	-	51,92
		Jumlah	236	67.477,16	702	25.200,98	447	9.833,69	52	6.300,29	203	9.067,00	-	-	9.833,69
74	Kota Padang Panjang	2008	21	1.201,01	59	734,76	59	734,76	-	-	-	-	-	-	734,76
		2009	20	5.414,89	46	287,03	45	287,03	1	-	-	-	-	-	243,30
		2010	44	5.008,89	112	1.567,73	101	373,70	10	1.194,03	1	-	-	-	373,70
		2011	21	360,10	58	282,52	52	248,29	6	34,23	-	-	-	-	248,29
		2012	25	2.649,24	77	669,74	-	-	2	603,25	75	66,49	-	-	603,25
		Jumlah	131	14.634,13	352	3.541,78	257	2.247,03	19	1.228,26	76	66,49	-	-	2.203,30

Halaman 15 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
75	Kota Pariaman	2008	23	4.150,50	51	1.894,11	34	-	16	1.894,11	1	-	14	15	16	-
		2009	33	8.427,43	81	3.907,39	44	9,02	34	3.898,37	3	-	-	-	-	9,02
		2010	21	3.985,41	55	835,48	43	-	6	787,93	6	47,55	-	-	-	-
		2011	29	22.243,09	75	1.404,10	10	-	27	819,24	38	584,86	-	-	-	-
		2012	13	533,84	34	304,43	-	-	-	-	34	304,43	-	-	-	-
		Jumlah	119	39.340,27	296	8.345,51	131	9,02	83	7.399,65	82	936,84	-	-	-	9,02
76	Kota Payakumbuh	2008	46	18.063,35	86	3.998,61	73	191,56	12	3.728,18	1	78,87	-	-	-	191,56
		2009	35	7.508,99	98	1.272,89	82	358,86	14	823,17	2	90,86	-	-	-	358,86
		2010	36	1.708,35	92	-	79	-	13	-	-	-	-	-	-	-
		2011	49	7.196,39	114	5.134,41	32	4.055,82	43	17,63	39	1.060,96	-	-	-	4.055,82
		2012	20	1.010,26	49	1.010,25	-	43,46	1	-	48	966,79	-	-	-	43,46
		Jumlah	186	35.487,34	439	11.416,16	266	4.649,70	83	4.568,98	90	2.197,48	-	-	-	4.649,70
77	Kota Sawahlunto	2008	22	3.430,29	46	2.362,04	24	1.715,70	13	646,34	9	-	-	-	-	1.715,70
		2009	37	21.865,86	103	15.332,94	56	2.413,49	27	12.908,67	20	10,78	-	-	-	2.413,49
		2010	29	30.358,50	87	27.970,10	48	4.179,29	32	23.790,81	7	-	-	-	-	4.179,29
		2011	32	4.647,22	95	4.093,30	35	3.549,98	11	-	49	543,32	-	-	-	3.549,98
		2012	22	3.490,71	79	3.129,19	-	739,18	1	-	78	2.390,01	-	-	-	739,18
		Jumlah	142	63.792,58	410	52.887,57	163	12.597,64	84	37.345,82	163	2.944,11	-	-	-	12.597,64
78	Kota Solok	2008	34	5.008,88	80	3.496,05	64	1.337,02	14	678,63	1	-	-	-	-	1.337,02
		2009	26	15.507,31	61	7.322,54	49	6.092,69	9	1.229,85	3	-	-	-	-	6.092,69
		2010	45	5.142,78	106	1.245,70	78	911,02	28	334,68	-	-	-	-	-	911,02
		2011	29	6.375,98	60	1.768,60	43	1.768,60	17	-	-	-	-	-	-	219,91
		2012	20	2.489,41	49	407,07	-	-	-	-	49	407,07	-	-	-	-
		Jumlah	154	34.524,36	356	14.239,96	234	10.109,33	68	2.243,16	53	407,07	1	1.480,39	-	8.560,64
79	Prov. Riau	2008	63	10.298,00	121	8.497,99	79	982,45	41	7.515,54	1	-	-	-	-	982,45
		2009	74	46.050,89	323	45.829,30	222	13.672,20	99	32.157,10	2	-	-	-	-	13.672,20
		2010	80	147.016,05	184	49.963,88	130	6.858,83	54	43.105,05	-	-	-	-	-	6.858,83
		2011	91	54.988,12	227	34.886,50	138	14.134,61	87	20.751,89	2	-	-	-	-	14.134,61
		2012	76	313.155,45	193	7.358,66	13	1.597,42	94	5.761,24	86	-	-	-	-	1.597,42
		Jumlah	384	571.508,51	1.048	146.636,33	582	37.245,51	375	109.290,82	91	-	-	-	-	37.245,51
80	Kab. Bengkalis	2008	37	39.575,17	107	39.575,13	50	4.419,52	47	11.992,07	10	23.163,54	-	-	-	4.419,52
		2009	78	51.962,28	214	51.962,27	77	6.507,53	130	45.454,74	7	-	-	-	-	6.507,53
		2010	52	32.877,64	136	23.699,94	53	1.971,03	46	13.537,01	37	8.191,90	-	-	-	1.971,03

Halaman 16 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	31	33.037,46	76	33.023,19	23	5.955,91	53	16.005,45	-	11.061,83	-	-	-	5.955,91
		2012	36	26.801,70	96	24.605,83	28	1.390,24	17	19.344,60	51	3.870,99	-	-	-	1.390,24
		Jumlah	234	184.254,25	629	172.866,36	231	20.244,23	293	106.333,87	105	46.288,26	-	-	-	20.244,23
81	Kab. Indragiri Hilir	2008	30	13.971,50	83	10.603,36	56	6.160,89	27	4.442,47	-	-	-	-	-	6.160,89
		2009	57	22.585,64	148	20.417,00	117	12.394,79	31	8.022,21	-	-	-	-	-	12.394,79
		2010	14	19.264,37	23	19.264,36	14	5.570,03	8	13.694,33	1	-	-	-	-	5.570,03
		2011	27	8.662,31	64	7.692,36	36	2.233,09	27	5.459,27	1	-	-	-	-	2.233,09
		2012	21	91.245,66	98	11.461,82	59	354,49	33	11.094,24	6	13,09	-	-	-	354,49
		Jumlah	149	155.729,48	416	69.438,90	282	26.713,29	126	42.712,52	8	13,09	-	-	-	26.713,29
82	Kab. Indragiri Hulu	2008	36	22.452,67	101	14.886,08	79	8.472,45	10	3.719,03	12	2.694,60	-	-	-	8.400,95
		2009	41	6.624,53	116	6.011,43	93	2.448,11	14	3.563,32	9	-	-	-	-	2.448,11
		2010	31	183.144,95	82	182.687,95	57	32.694,52	20	149.993,43	5	-	-	-	-	32.694,52
		2011	49	69.656,50	128	39.457,35	83	1.068,46	36	38.388,89	9	-	-	-	-	1.068,46
		2012	28	18.198,71	71	13.508,15	3	1.491,53	4	11.205,19	64	811,43	-	-	-	1.127,06
		Jumlah	185	300.077,36	498	256.550,96	315	46.175,07	84	206.869,86	99	3.506,03	-	-	-	45.739,10
83	Kab. Kampar	2008	27	26.639,65	69	6.330,10	62	3.644,53	5	2.685,57	2	-	-	-	-	3.644,53
		2009	46	11.361,59	140	9.455,10	99	4.209,48	37	4.891,61	4	354,01	-	-	-	4.209,48
		2010	21	7.713,82	57	6.509,72	2	715,83	4	1.266,38	51	4.527,51	-	-	-	715,83
		2011	58	3.390,49	144	3.390,48	22	1.408,98	35	1.118,86	87	862,64	-	-	-	1.408,98
		2012	38	73.844,22	86	1.242,48	22	-	36	832,25	28	410,23	-	-	-	-
		Jumlah	190	122.949,77	496	26.927,88	207	9.978,82	117	10.794,67	172	6.154,39	-	-	-	9.978,82
84	Kab. Kuantan Singingi	2008	47	8.690,36	102	7.375,08	84	4.892,27	15	1.191,34	3	1.289,47	-	-	-	4.892,27
		2009	32	13.007,76	90	11.497,04	75	9.172,54	15	2.324,50	-	-	-	-	-	9.172,54
		2010	32	4.167,55	83	3.787,64	67	2.453,05	14	1.334,59	2	-	-	-	-	2.453,05
		2011	43	54.754,25	113	6.158,45	77	2.454,42	34	3.704,03	2	-	-	-	-	355,70
		2012	26	8.741,47	66	1.078,18	43	410,85	21	667,33	2	-	-	-	-	410,85
		Jumlah	180	89.361,39	454	29.894,39	346	19.383,13	99	9.221,79	9	1.289,47	-	-	-	17.284,41
85	Kab. Kepulauan Meranti	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	3.641,32	32	242,92	26	227,61	4	15,31	2	-	-	-	-	227,61
		2011	23	4.633,36	57	4.606,41	41	1.485,90	8	1.479,16	8	1.641,35	-	-	-	1.533,98
		2012	40	8.958,65	98	5.683,05	24	295,04	40	3.134,63	34	2.253,38	-	-	-	295,04
		Jumlah	76	17.233,33	187	10.532,38	91	2.008,55	52	4.629,10	44	3.894,73	-	-	-	2.056,63

Halaman 17 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		16	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
86	Kab. Pelawan	2008	20	3.327,25	54	3.327,25	39	1.812,74	14	1.514,51	1	-	-	-	-	565,36
		2009	47	31.893,83	193	30.562,78	75	2.093,46	108	27.706,84	10	762,48	-	-	-	2.093,46
		2010	23	5.322,02	69	3.676,08	31	1.074,26	18	2.601,82	20	-	-	-	-	1.074,26
		2011	27	3.795,23	61	3.786,56	20	284,91	38	2.972,64	3	284,91	-	-	-	529,01
		2012	16	9.487,32	54	5.974,93	-	587,62	-	-	54	5.387,31	-	-	-	587,62
		Jumlah	133	53.825,65	431	47.327,60	165	6.097,09	178	34.795,81	88	6.434,70	-	-	-	4.849,71
87	Kab. Rokan Hilir	2008	32	8.010,29	78	2.897,35	32	1.566,24	15	1.320,91	31	10,20	-	-	-	1.566,24
		2009	40	32.411,48	127	20.346,13	59	1.993,56	43	285,42	25	18.067,15	-	-	-	1.993,56
		2010	24	5.664,68	63	4.105,38	22	1.991,52	19	237,38	22	1.876,48	-	-	-	1.991,52
		2011	34	18.969,09	92	11.653,34	29	2.750,10	29	787,56	34	8.115,68	-	-	-	2.750,10
		2012	24	6.256,32	74	4.444,81	10	0,11	18	1.939,44	46	2.505,26	-	-	-	0,11
		Jumlah	154	71.311,86	434	43.447,01	152	8.301,53	124	4.570,71	158	30.574,77	-	-	-	8.301,53
88	Kab. Rokan Hulu	2008	29	3.216,86	47	2.848,13	39	2.848,13	8	-	-	-	-	-	-	2.848,13
		2009	35	9.687,10	103	8.985,99	88	945,32	13	7.855,33	2	185,34	-	-	-	945,32
		2010	16	8.930,46	43	8.930,46	27	8.369,98	16	560,48	-	-	-	-	-	8.369,98
		2011	26	4.141,22	58	2.648,40	39	479,80	18	2.007,72	1	160,88	-	-	-	479,80
		2012	19	11.574,32	33	8.738,37	7	232,75	24	8.505,62	2	-	-	-	-	232,75
		Jumlah	125	37.549,96	284	32.151,35	200	12.875,98	79	18.929,15	5	346,22	-	-	-	12.875,98
89	Kab. Siak	2008	17	10.602,66	40	6.099,36	37	5.870,88	3	228,48	-	-	-	-	-	5.870,88
		2009	62	58.467,68	140	24.369,23	117	21.276,77	20	3.092,46	3	-	-	-	-	21.276,77
			-	USD 164,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	59	60.545,37	199	31.380,71	163	20.713,08	36	10.667,63	-	-	-	-	-	20.713,08
		2011	49	18.267,45	126	14.722,84	77	880,62	24	12.530,99	25	1.311,23	-	-	-	876,50
		2012	52	5.821,56	146	3.282,82	45	1.049,38	13	137,71	88	2.095,73	-	-	-	1.085,24
		Jumlah	239	153.704,72	651	79.854,96	439	49.790,73	96	26.657,27	116	3.406,96	-	-	-	49.822,47
			-	USD 164,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Kota Dumai	2008	35	5.095,63	82	5.067,81	73	1.971,95	7	2.980,85	2	115,01	-	-	-	1.971,95
		2009	38	30.312,84	98	28.611,41	57	7.450,95	29	7.790,42	12	13.370,04	-	-	-	7.450,95
		2010	36	5.530,11	96	4.634,60	61	1.711,28	21	1.928,01	14	995,31	-	-	-	1.711,28
		2011	28	4.193,83	61	2.447,96	45	1.020,70	11	729,40	5	697,86	-	-	-	1.020,70
			-	USD 258,03	-	USD 258,03	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	-	USD 177,99
		2012	25	89.896,36	66	91,37	19	31,27	22	60,10	25	-	-	-	-	31,27
		Jumlah	162	135.029	403	40.853,15	255	12.186,15	90	13.488,78	58	15.178,22	-	-	-	12.186,15
			-	USD 258,03	-	USD 258,03	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	-	USD 177,99

Halaman 18 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	Kota Pekanbaru	2008	31	3.355,55	86	3.355,54	60	2.025,00	22	1.114,62	4	215,92	-	-	2.025,00
		2009	51	22.483,88	109	8.852,28	75	1.123,09	30	6.672,96	3	1.019,14	1	37	1.123,09
		2010	27	15.413,94	61	5.958,29	35	4.121,83	24	1.836,46	2	-	-	-	4.082,59
		2011	34	12.846,31	76	3.172,48	34	630,39	33	2.542,09	9	-	-	-	630,39
		2012	42	10.155,14	107	8.825,01	23	-	21	2.790,67	63	6.034,34	-	-	-
		Jumlah	185	64.254,82	439	30.163,60	227	7.900,31	130	14.956,80	81	7.269,40	1	37	7.861,07
92	Prov. Jambi	2008	88	27.216,18	224	16.882,99	205	14.647,21	19	2.235,78	-	-	-	-	14.615,21
		2009	43	8.470,78	101	7.627,40	98	6.363,88	3	1.263,52	-	-	-	-	7.207,26
		2010	55	27.480,87	127	3.854,63	90	2.835,92	32	976,75	5	41,96	-	-	2.835,92
		2011	47	12.287,43	114	11.529,89	53	514,12	52	10.375,88	9	639,89	-	-	514,12
		2012	25	29.144,26	52	28.892,93	21	4.716,89	20	21.485,98	11	2.690,06	-	-	4.968,21
		Jumlah	258	104.599,52	618	68.787,84	467	29.078,02	126	36.337,91	25	3.371,91	-	-	30.140,72
93	Kab. Batang Hari	2008	43	6.130,84	83	5.783,65	60	2.187,26	21	3.596,39	2	-	-	-	2.471,50
		2009	30	4.364,78	96	3.377,72	65	841,82	31	2.535,90	-	-	-	-	851,40
		2010	31	7.756,53	78	6.847,44	41	1.861,43	36	4.986,01	1	-	-	-	1.932,46
		2011	49	148,67	86	129,45	14	63,99	59	65,46	13	-	-	-	63,99
		2012	24	2.904,15	52	2.415,96	21	139,73	19	1.893,28	12	382,95	-	-	400,41
		Jumlah	177	21.304,97	395	18.554,22	201	5.094,23	166	13.077,04	28	382,95	-	-	5.719,76
94	Kab. Bungo	2008	39	19.007,10	105	13.943,82	85	7.575,45	20	6.368,37	-	-	-	-	7.575,45
		2009	58	33.374,30	139	4.859,48	110	519,99	29	4.339,49	-	-	-	-	519,99
		2010	48	19.570,03	102	19.532,50	51	5.937,93	51	13.594,57	-	-	-	-	6.037,85
		2011	27	332,26	55	286,24	29	65,39	26	220,85	-	-	-	-	65,39
		2012	39	3.384,01	97	3.384,01	12	-	36	1.444,31	49	1.939,70	-	-	-
		Jumlah	211	75.667,70	498	42.006,05	287	14.098,76	162	25.967,59	49	1.939,70	-	-	14.198,68
95	Kab. Kerinci	2008	26	10.033,43	62	10.021,19	44	6.166,66	14	3.854,53	4	-	-	-	6.166,66
		2009	45	21.344,23	102	11.976,66	67	1.925,92	35	10.050,74	-	-	-	-	2.562,06
		2010	44	12.134,95	85	6.241,96	29	1.062,78	34	5.179,18	22	-	-	-	1.073,89
		2011	23	1.544,91	58	1.503,99	31	379,59	25	1.124,40	2	-	-	-	379,59
		2012	67	1.403,07	159	1.124,12	24	100,34	37	1.023,78	98	-	-	-	379,28
		Jumlah	205	46.460,59	466	30.867,92	195	9.635,29	145	21.232,63	126	-	-	-	10.561,48

Halaman 19 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
96	Kab. Merangin	2008	30	33.037,39	78	9.346,32	44	4.055,17	33	5.293,15	1	-	14	15	16	4.055,17
		2009	33	9.659,45	97	7.947,75	57	1.786,41	40	6.161,34	-	-	-	-	-	1.786,41
		2010	21	5.122,11	45	3.585,13	26	1.765,45	19	1.819,68	-	-	-	-	-	1.765,45
		2011	22	2.515,25	59	1.666,07	15	402,05	25	1.264,02	19	-	-	-	-	402,05
		2012	48	2.200,50	117	1.819,55	3	1.288,16	38	531,39	76	-	-	-	-	1.353,39
		Jumlah	154	52.534,70	396	24.366,82	145	9.297,24	155	15.069,58	96	-	-	-	-	9.362,47
97	Kab. Muaro Jambi	2008	68	9.888,71	150	7.225,94	123	2.883,60	27	4.342,34	-	-	-	-	-	2.163,40
		2009	42	5.500,26	113	4.395,16	98	3.835,28	15	559,88	-	-	-	-	-	3.301,57
		2010	25	3.962,63	60	3.160,87	45	1.911,82	15	1.249,05	-	-	-	-	-	1.929,44
		2011	29	6.446,88	60	6.385,68	33	1.603,37	26	4.782,31	1	-	-	-	-	1.406,80
		2012	40	842,27	83	511,17	25	114,07	9	397,10	49	-	-	-	-	114,07
		Jumlah	204	26.640,75	466	21.678,82	324	10.348,14	92	11.330,68	50	-	-	-	-	8.915,28
98	Kab. Sarolangun	2008	30	10.423,32	71	3.779,51	39	1.714,08	32	2.065,43	-	-	-	-	-	1.714,08
		2009	38	9.442,51	99	8.175,47	68	3.120,77	31	5.054,70	-	-	-	-	-	3.120,77
		2010	39	9.093,99	67	7.767,18	11	2.202,05	42	3.462,50	14	2.102,63	-	-	-	2.202,05
		2011	-	USD 466,91	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	-	-
		2012	27	2.177,56	58	1.871,13	7	382,53	27	1.018,67	24	469,93	-	-	-	328,04
		2012	48	47.178,95	130	47.151,02	18	1.841,94	43	1.356,10	69	43.952,98	-	-	-	1.869,86
		Jumlah	182	78.316,33	425	68.744,31	143	9.261,37	175	12.957,40	107	46.525,54	-	-	-	9.234,80
			-	USD 466,91	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	-	-
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2008	34	14.868,21	91	10.535,09	57	8.146,86	32	2.388,23	2	-	-	-	-	8.146,86
		2009	32	19.985,75	106	16.618,21	66	5.282,21	37	11.336,00	3	-	-	-	-	5.282,21
		2010	21	1.779,22	48	1.772,46	32	915,42	14	857,04	2	-	-	-	-	915,42
		2011	32	1.653,12	63	1.593,47	11	977,06	48	422,66	4	193,75	-	-	-	889,52
		2012	20	10.986,88	53	10.986,87	8	118,06	28	158,31	17	10.710,50	-	-	-	-
		Jumlah	139	49.275,18	361	41.506,10	174	15.439,61	159	15.162,24	28	10.904,25	-	-	-	15.234,01
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2008	42	18.319,84	122	15.485,28	96	3.440,61	26	12.044,67	-	-	-	-	-	3.611,94
		2009	52	1.600,195,25	129	5.866,56	111	1.723,20	18	4.143,36	-	-	-	-	-	1.723,20
		2010	33	1.040,59	60	949,72	35	590,61	25	359,11	-	-	-	-	-	590,61
		2011	23	10.835,05	43	9.495,48	16	1.625,83	23	7.847,24	4	22,41	-	-	-	1.625,83
		2012	22	7.031,14	70	4.636,39	2	222,93	56	3.156,74	12	1.256,72	-	-	-	222,93
		Jumlah	172	1.637.421,87	424	36.433,43	260	7.603,18	148	27.551,12	16	1.279,13	-	-	-	7.774,51

Halaman 20 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
101	Kab. Tebo	2008	27	20.629,69	96	8.740,39	52	3.968,86	41	4.771,53	3	-	-	-	-	3.968,86
		2009	43	143.065,43	108	16.739,34	69	8.992,22	38	7.747,12	1	-	-	-	-	11.412,77
		2010	40	169.233,26	80	7.842,03	23	1.488,61	45	5.956,28	12	397,14	-	-	-	1.479,39
		2011	29	3.106,07	71	2.555,01	24	254,92	36	2.196,61	11	103,48	-	-	-	691,56
		2012	41	766,69	91	766,68	13	36,01	17	568,39	61	162,28	-	-	-	36,01
		Jumlah	180	336.801,14	446	36.643,45	181	14.740,62	177	21.239,93	88	662,90	-	-	-	17.588,59
102	Kota Jambi	2008	33	1.846,98	67	535,95	60	216,35	7	319,60	-	-	-	-	-	216,35
		2009	87	13.206,65	191	13.206,64	156	4.177,73	35	9.028,91	-	-	-	-	-	4.177,73
		2010	26	2.909,62	59	2.693,40	33	1.221,09	26	1.472,31	-	-	-	-	-	1.374,10
		2011	20	132,95	54	132,94	33	46,70	13	67,04	8	19,20	-	-	-	46,70
		2012	17	419,75	41	291,52	6	16,49	23	8,10	12	266,93	-	-	-	144,72
		Jumlah	183	18.515,95	412	16.860,45	288	5.678,36	104	10.895,96	20	286,13	-	-	-	5.959,60
103	Kota Sungai Penuh	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	559,17	27	120,25	20	99,39	7	20,86	-	-	-	-	-	538,30
		2011	21	2.038,22	70	1.599,20	42	1.144,77	23	454,43	5	-	-	-	-	1.328,67
		2012	20	3.495,60	48	3.479,82	6	183,06	31	2.642,06	11	654,70	-	-	-	187,14
		Jumlah	56	6.092,99	145	5.199,27	68	1.427,22	61	3.117,35	16	654,70	-	-	-	2.054,11
104	Prov. Sumatera Selatan	2008	60	48.553,64	111	6.819,73	88	6.419,32	20	400,41	3	-	-	-	-	6.091,05
		2009	40	25.571,84	92	9.406,59	73	700,40	18	8.706,19	1	-	-	-	-	1.624,14
		2010	35	10.306,01	81	10.203,01	60	945,53	21	9.257,48	-	-	-	-	-	975,22
		2011	68	11.580,94	169	5.770,35	139	3.279,79	28	1.621,88	2	868,68	-	-	-	3.245,62
		2012	78	26.771,84	204	20.084,64	62	576,07	44	5.032,30	98	14.476,27	-	-	-	576,07
		Jumlah	281	122.784,27	657	52.284,32	422	11.921,11	131	25.018,26	104	15.344,95	-	-	-	12.512,10
105	Kab. Banyuasin	2008	32	3.644,90	81	1.413,82	76	1.236,85	5	176,97	-	-	-	-	-	3.244,66
		2009	29	5.883,71	74	5.365,20	66	2.742,19	8	2.623,01	-	-	-	-	-	1.337,17
		2010	23	4.294,47	60	752,43	58	677,13	2	75,30	-	-	-	-	-	3.224,73
		2011	17	1.178,73	46	1.033,39	41	260,14	5	773,25	-	-	-	-	-	260,14
		2012	35	1.640,99	86	996,88	47	362,28	11	118,72	28	455,88	-	-	-	362,28
		Jumlah	136	16.642,80	347	9.501,72	288	5.278,59	31	3.767,25	28	455,88	-	-	-	8.428,98
106	Kab. Empat Lawang	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	28	2.371,16	76	2.257,52	65	867,99	11	1.389,53	-	-	-	-	-	926,68
		2010	25	4.475,60	69	858,96	58	138,48	11	720,48	-	-	-	-	-	138,52

Halaman 21 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	22	6.479,56	63	4.416,86	35	47,92	28	4.368,94	-	-	-	-	128,30
		2012	33	7.703,14	89	7.487,87	47	131,84	35	4.494,51	7	2.861,52	-	-	132,38
		Jumlah	108	21.029,46	297	15.021,21	205	1.186,23	85	10.973,46	7	2.861,52	-	-	1.325,88
107	Kab. Lahat	2008	21	376,09	39	138,55	32	112,50	6	26,05	1	-	-	-	112,50
		2009	41	1.809,35	93	1.472,57	80	641,02	11	831,55	2	-	-	-	641,02
		2010	34	3.515,18	90	3.353,61	72	256,12	18	3.097,49	-	-	-	-	268,70
		2011	23	531,28	54	406,73	43	282,92	11	123,81	-	-	-	-	288,72
		2012	29	6.748,55	75	3.004,82	43	424,71	21	1.764,20	11	815,91	-	-	1.227,82
		Jumlah	148	12.980,45	351	8.376,28	270	1.717,27	67	5.843,10	14	815,91	-	-	2.538,76
108	Kab. Muara Enim	2008	21	552,62	39	300,50	35	163,39	4	137,11	-	-	-	-	163,39
		2009	48	1.023,95	83	1.021,62	68	425,65	15	595,97	-	-	-	-	425,65
		2010	38	1.990,08	91	986,30	83	714,17	8	272,13	-	-	-	-	1.723,85
		2011	23	1.188,79	54	1,50	52	1,50	2	-	-	-	-	-	35,70
		2012	28	3.334,87	53	985,92	35	111,13	2	9,76	16	868,03	-	-	606,96
		Jumlah	158	8.090,31	320	3.298,84	273	1.415,84	31	1.014,97	16	868,03	-	-	2.955,55
109	Kab. Musi Banyuasin	2008	36	3.889,04	82	748,34	71	138,84	11	609,50	-	-	-	-	138,84
		2009	43	255.012,09	99	26.151,62	86	10.236,60	13	15.915,02	-	-	-	-	10.723,18
		2010	35	433,97	60	433,96	37	163,03	4	270,93	19	-	-	-	163,03
		2011	23	2.659,24	61	1.300,67	51	232,91	10	1.067,76	-	-	-	-	561,47
		2012	59	12.273,33	131	5.473,68	66	2.236,96	33	3.236,72	32	-	-	-	387,28
		Jumlah	196	274.267,67	433	34.108,27	311	13.008,34	71	21.099,93	51	-	-	-	11.973,80
110	Kab. Musi Rawas	2008	34	2.308,05	80	113,35	80	113,35	-	-	-	-	-	-	113,35
		2009	33	1.671,45	69	1.659,14	67	1.557,01	2	102,13	-	-	-	-	1.526,38
		2010	24	29,04	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-	18,02
		2011	21	3.056,74	52	868,16	48	786,70	4	81,46	-	-	-	-	819,80
		2012	32	1.705,43	85	1.258,81	54	111,09	2	115,73	29	1.128,99	-	-	458,50
		Jumlah	144	8.770,71	330	3.896,46	293	2.468,15	8	299,32	29	1.128,99	-	-	2.936,05
111	Kab. Ogan Ilir	2008	13	13.642,66	25	781,40	22	289,73	3	491,67	-	-	-	-	289,73
		2009	24	3.867,61	54	2.762,26	39	1.764,69	15	997,57	-	-	-	-	1.764,69
		2010	14	1.633,93	36	1.159,00	33	182,26	3	976,74	-	-	-	-	184,49
		2011	38	3.843,54	83	3.400,56	57	2.450,98	17	949,58	9	-	-	-	2.451,18
		2012	20	1.763,68	45	1.157,81	34	537,50	10	620,31	1	-	-	-	192,16
		Jumlah	109	24.751,42	243	9.261,03	185	5.225,16	48	4.035,87	10	-	-	-	4.882,25

Halaman 22 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2008	11	588,69	27	577,90	25	16,97	2	560,93	-	-	-	-	27,76
		2009	29	3.808,50	65	159,75	65	159,75	-	-	-	-	-	-	159,75
		2010	28	3.788,95	76	1.624,34	76	1.624,34	-	-	-	-	-	-	1.948,57
		2011	17	876,71	44	37,45	40	37,45	4	-	-	-	-	-	37,45
		2012	34	1.424,31	62	1.077,89	60	946,54	2	131,35	-	-	-	-	920,51
		Jumlah	119	10.487,16	274	3.477,33	266	2.785,05	8	692,28	-	-	-	-	3.094,04
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2008	22	4.598,40	40	717,61	34	320,00	6	397,61	-	-	-	-	320,00
		2009	60	7.751,49	137	2.423,98	108	1.244,07	28	1.179,91	1	-	-	-	1.244,07
		2010	40	17.712,52	92	5.378,43	73	2.442,84	18	2.935,59	1	-	-	-	2.442,84
		2011	29	4.391,88	58	470,17	43	-	13	461,79	2	8,38	-	-	2.345,49
		2012	22	7.612,78	58	2.702,13	32	622,48	7	887,07	19	1.192,58	-	-	635,86
		Jumlah	173	42.067,07	385	11.692,32	290	4.629,39	72	5.861,97	23	1.200,96	-	-	6.988,26
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2008	43	6.403,20	108	3.497,18	77	1.918,03	31	1.579,15	-	-	-	-	4.673,03
		2009	30	5.662,15	72	3.432,13	55	2.928,14	17	503,99	-	-	-	-	2.928,14
		2010	18	496,04	53	496,03	49	135,74	4	360,29	-	-	-	-	135,74
		2011	24	2.217,99	65	1.552,19	32	82,82	15	1.315,93	18	153,44	-	-	248,82
		2012	22	4.476,78	53	3.787,98	28	1.007,93	23	2.780,05	2	-	-	-	3.691,68
		Jumlah	137	19.256,16	351	12.765,51	241	6.072,66	90	6.539,41	20	153,44	-	-	11.677,41
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2008	29	2.229,72	65	1.986,54	65	1.986,54	-	-	-	-	-	-	1.998,60
		2009	15	468,06	40	468,06	40	468,06	-	-	-	-	-	-	468,06
		2010	26	2.361,09	70	2.361,09	70	2.361,09	-	-	-	-	-	-	2.255,16
		2011	19	1.647,64	47	593,15	47	593,15	-	-	-	-	-	-	593,15
		2012	23	6.909,49	61	2.925,73	43	2.000,04	7	569,70	11	355,99	-	-	2.000,04
		Jumlah	112	13.616,00	283	8.334,57	265	7.408,88	7	569,70	11	355,99	-	-	7.315,01
116	Kota Lubuklinggau	2008	21	3.952,83	45	1.402,33	40	1.239,45	5	162,88	-	-	-	-	1.268,73
		2009	29	12.923,27	58	139,92	56	69,65	2	70,27	-	-	-	-	69,65
		2010	18	322,40	49	296,73	49	296,73	-	-	-	-	-	-	319,45
		2011	41	5.595,06	85	2.765,95	76	1.634,53	7	1.129,42	2	-	-	-	2.265,25
		2012	18	604,32	40	315,41	28	281,5	12	287,26	-	-	-	-	281,5
		Jumlah	127	23.397,88	277	4.918,34	249	3.268,51	26	1.649,83	2	-	-	-	3.951,23

Halaman 23 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
117	Kota Pagar Alam	2008	36	1.566,91	66	463,23	55	401,48	11	61,75	-	-	14	15	16	958,52
		2009	18	1.364,90	38	243,66	36	118,47	2	125,19	-	-	-	-	-	230,43
		2010	17	3.312,81	40	2.027,40	28	7,85	11	2.019,55	1	-	-	-	-	8,91
		2011	50	5.287,23	127	2.632,08	108	604,59	15	403,61	4	1.623,88	-	-	-	2.860,25
		2012	25	7.249,59	59	6.265,93	43	869,25	6	739,71	10	4.656,97	-	-	-	253,51
		Jumlah	146	18.781,44	330	11.632,30	270	2.001,64	45	3.349,81	15	6.280,85	-	-	-	4.311,62
118	Kota Palembang	2008	50	8.428,18	118	2.035,94	97	1.558,34	20	477,60	1	-	-	-	-	1.845,15
		2009	57	8.028,06	112	7.837,66	67	1.293,39	35	7.708,27	10	-	-	-	-	129,39
		2010	26	3.452,66	51	26,97	35	5,61	16	21,36	-	-	-	-	-	5,61
		2011	34	5.197,88	86	1.609,90	72	355,25	9	926,61	5	328,04	-	-	-	355,25
		2012	63	16.781,85	139	13.161,41	68	438,33	69	10.494,97	2	2.228,11	-	-	-	2.019,27
		Jumlah	230	41.888,63	506	24.671,88	339	2.486,92	149	19.628,81	18	2.556,15	-	-	-	4.354,67
119	Kota Prabumulih	2008	20	6.980,10	46	1.130,77	42	359,10	4	771,67	-	-	-	-	-	1.926,49
		2009	26	10.420,35	73	1.860,70	64	485,79	9	1.374,91	-	-	-	-	-	1.027,61
		2010	23	4.731,51	55	4.211,47	48	3.479,95	7	731,52	-	-	-	-	-	3.479,43
		2011	16	242,80	38	-	35	-	3	-	-	-	-	-	-	54,69
		2012	23	4.636,31	65	4.582,01	42	12,68	12	2.463,44	11	2.105,89	-	-	-	27,17
		Jumlah	108	27.011,07	277	11.784,95	231	4.337,52	35	5.341,54	11	2.105,89	-	-	-	6.515,39
120	Prov. Bengkulu	2008	49	33.941,24	92	28.984,93	79	6.437,52	13	22.547,41	-	-	-	-	-	6.437,52
		2009	73	28.053,66	139	18.809,00	87	13.386,46	52	5.422,54	-	-	-	-	-	8.390,36
		2010	51	25.343,63	87	5.712,67	47	4.278,72	38	1.433,95	2	-	-	-	-	4.177,95
		2011	48	5.785,43	112	4.994,22	36	3.784,81	74	1.149,41	2	-	-	-	-	3.512,61
		2012	23	13.921,75	44	3.791,48	18	12,76	14	3.571,95	12	206,77	-	-	-	310,79
		Jumlah	244	107.045,71	474	62.232,30	267	27.900,27	191	34.125,26	16	206,77	-	-	-	22.829,23
121	Kab. Bengkulu Selatan	2008	18	1.659,18	46	1.073,86	44	685,08	2	388,78	-	-	-	-	-	685,08
		2009	45	2.353,18	77	1.826,88	51	762,15	18	1.064,73	8	-	-	-	-	762,15
		2010	20	4.301,27	36	2.162,44	15	1.776,11	13	386,33	8	-	-	-	-	922,88
		2011	21	205,82	41	205,81	1	-	21	66,65	19	139,16	-	-	-	-
		2012	12	1.007,84	27	1.007,84	-	-	2	894,86	25	112,98	-	-	-	-
		Jumlah	116	9.527,29	227	6.276,83	111	3.223,34	56	2.801,35	60	252,14	-	-	-	2.370,11
122	Kab. Bengkulu Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	36,10	21	36,10	12	36,10	9	-	-	-	-	-	-	36,10

Halaman 24 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	9	196,44	13	170,72	4	123,39	6	47,33	3	-	-	-	-	123,39
		2012	13	413,11	29	413,10	9	392,88	17	20,22	3	-	-	-	-	392,88
		Jumlah	34	645,65	63	619,92	25	552,37	32	67,55	6	-	-	-	-	552,37
123	Kab. Bengkulu Utara	2008	38	11.634,74	82	975,20	73	803,50	9	171,70	-	-	-	-	-	803,50
		2009	27	146.621,89	50	3.413,76	33	1.559,76	16	1.854,00	1	-	-	-	-	1.556,12
		2010	39	7.110,16	90	1.995,65	13	228,80	76	1.766,85	1	-	-	-	-	228,80
		2011	24	7.607,95	37	1.815,98	23	569,89	14	1.246,09	-	-	-	-	-	569,89
		2012	12	8.185,12	18	7.323,29	5	4.402,54	13	2.920,75	-	-	-	-	-	4.402,54
		Jumlah	140	181.159,86	277	15.523,88	147	7.564,49	128	7.959,39	2	-	-	-	-	7.560,85
124	Kab. Kaur	2008	18	2.009,24	37	751,36	35	528,34	2	223,02	-	-	-	-	-	528,34
		2009	13	879,51	25	879,51	20	501,15	4	378,36	-	-	-	1	-	501,15
		2010	8	1.122,97	18	1.122,96	7	507,35	11	615,61	-	-	-	-	-	507,35
		2011	10	1.993,68	17	1.994,33	3	417,13	14	1.527,20	-	-	-	-	-	417,13
		2012	13	4.472,61	28	463,48	-	45,98	4	31,66	24	385,84	-	-	-	45,98
		Jumlah	62	10.478,01	125	5.161,64	65	1.999,95	35	2.775,85	24	385,84	1	-	-	1.999,95
125	Kab. Kepahiang	2008	28	3.037,22	63	645,44	58	529,85	3	115,59	1	-	-	1	-	529,85
		2009	23	13.832,84	49	3.443,82	37	3.146,86	11	296,96	1	-	-	-	-	3.146,86
		2010	21	3.253,04	38	3.122,06	23	1.880,55	15	1.241,51	-	-	-	-	-	1.862,88
		2011	13	4.191,03	27	4.191,03	2	318,58	25	3.872,45	-	-	-	-	-	319,66
		2012	10	6.819,17	22	-	5	-	17	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	31.133,30	199	11.402,35	125	5.875,84	71	5.526,51	2	-	-	1	-	5.859,25
126	Kab. Lebong	2008	21	1.594,82	56	1.486,38	47	835,98	9	650,40	-	-	-	-	-	835,98
		2009	18	3.366,42	38	3.296,42	16	220,85	16	3.075,57	6	-	-	-	-	220,85
		2010	21	1.868,93	36	1.868,93	10	336,02	26	1.532,91	-	-	-	-	-	336,02
		2011	21	2.863,98	49	2.863,98	13	1.273,70	31	1.590,28	5	-	-	-	-	1.273,70
		2012	31	82.369,19	55	12.523,14	7	66,00	22	257,99	26	12.199,15	-	-	-	66,00
		Jumlah	112	92.063,34	234	22.038,85	93	2.732,55	104	7.107,15	37	12.199,15	-	-	-	2.732,55
127	Kab. Mukomuko	2008	15	5.308,78	34	4.788,78	31	1.988,73	3	2.800,05	-	-	-	-	-	229,78
		2009	31	2.039,50	61	710,12	13	367,71	4	342,41	44	-	-	-	-	49,26
		2010	13	702,35	25	702,34	11	379,73	14	322,61	-	-	-	-	-	379,73
		2011	17	1.050,88	36	993,57	13	755,80	21	237,77	2	-	-	-	-	755,80
		2012	6	63.861,01	16	1.479,37	9	22,96	3	1.456,41	4	-	-	-	-	22,96
		Jumlah	82	72.962,52	172	8.674,18	77	3.514,93	45	5.159,25	50	-	-	-	-	1.437,53

Halaman 25 - Lampiran 2

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
128	Kab. Rejang Lebong	2008	16	3.502,39	37	169,00	35	169,00	2	-	-	-	-	-	169,00
		2009	38	2.077,05	70	1.711,63	27	359,96	39	568,32	4	783,35	-	-	359,96
		2010	29	2.577,21	56	1.339,67	40	376,61	15	963,06	1	-	-	-	358,61
		2011	20	8.285,26	32	588,70	20	200,20	12	388,50	-	-	-	-	200,20
		2012	12	9.034,28	16	20,22	5	20,22	11	-	-	-	-	-	20,22
		Jumlah	115	25.476,19	211	3.829,22	127	1.125,99	79	1.919,88	5	783,35	-	-	1.107,99
129	Kab. Seluma	2008	25	17.240,14	59	13.484,07	54	6.257,66	4	4.193,35	1	2.983,06	-	-	6.257,66
		2009	20	3.010,63	35	2.017,16	19	621,53	14	1.395,63	-	-	2	-	536,87
		2010	13	172,13	23	172,12	6	32,00	11	140,12	6	-	-	-	32,00
		2011	20	10.843,07	44	3.093,98	19	1.348,56	20	1.745,42	5	-	-	-	1.348,56
		2012	13	2.631,02	41	2.050,57	-	-	-	-	41	2.050,57	-	-	-
		Jumlah	91	33.896,99	202	20.767,90	98	8.529,75	49	7.474,52	53	5.033,63	2	-	8.175,09
130	Kota Bengkulu	2008	16	3.367,90	31	3.217,95	27	3.217,95	4	-	-	-	-	-	3.217,95
		2009	103	4.142,14	185	2.931,13	75	2.856,18	32	13,73	78	61,22	-	-	2.856,18
		2010	15	1.881,06	31	1.239,85	14	939,85	15	-	2	300,00	-	-	-
		2011	27	1.755,28	58	1.256,23	10	297,24	44	958,99	4	-	-	-	297,24
		2012	11	728,07	21	631,07	1	80	20	551,07	-	-	-	-	-
		Jumlah	172	11.874,45	326	9.276,23	127	7.391,22	115	1.523,79	84	361,22	-	-	6.371,56
131	Prov. Lampung	2008	26	3.200,55	52	2.688,05	14	171,90	9	2.500,00	29	16,15	-	-	171,90
		2009	44	54.759,69	103	12.575,17	69	1.500,93	29	10.290,43	5	783,81	-	-	1.500,93
		2010	43	10.086,80	114	6.033,33	92	892,50	21	5.140,83	1	-	-	-	892,50
		2011	90	113.825,53	231	107.756,27	60	14.138,03	59	93.355,17	112	263,07	-	-	14.138,03
		2012	19	9,28	51	9,28	41	9,28	4	-	6	-	-	-	9,28
		Jumlah	222	181.881,85	551	129.062,10	276	16.712,64	122	111.286,43	153	1.063,03	-	-	16.712,64
132	Kab. Lampung Barat	2008	17	5.003,87	42	1.718,55	35	948,60	4	769,95	3	-	-	-	948,60
		2009	17	9.219,53	35	2.996,59	31	2.324,54	4	672,05	-	-	-	-	298,76
		2010	16	8.498,44	38	261,76	36	179,77	2	81,99	-	-	-	-	179,77
		2011	19	7.891,79	48	176,13	43	176,13	5	-	-	-	-	-	176,13
		2012	8	264,52	22	264,52	20	264,52	2	-	-	-	-	-	264,52
		Jumlah	77	30.878,15	185	5.417,55	165	3.893,56	17	1.523,99	3	-	-	-	1.867,78
133	Kab. Lampung Selatan	2008	14	4.225,81	42	4.193,76	37	2.017,71	4	716,88	1	1.459,17	-	-	2.017,71
		2009	18	3.181,44	45	697,42	43	292,28	2	405,14	-	-	-	-	292,28
		2010	24	2.969,75	56	2.633,75	53	2.535,35	3	98,40	-	-	-	-	2.535,35

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

Halaman 26 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	38	88.201,99	104	2.823,64	95	2.392,76	9	430,88	-	-	-	-	-	2.392,76
		2012	28	7.641,83	83	5.129,68	31	116,55	22	5.013,13	30	-	-	-	-	116,55
		Jumlah	122	106.220,82	330	15.478,25	259	7.354,65	40	6.664,43	31	1.459,17	-	-	-	7.354,65
134	Kab. Lampung Tengah	2008	32	19.383,45	65	1.703,18	45	977,15	9	104,18	11	621,85	-	-	-	977,15
		2009	21	9.642,90	60	8.637,01	52	4.916,18	8	3.720,83	-	-	-	-	-	4.916,18
		2010	20	9.322,83	69	7.559,78	57	7.078,25	7	472,42	5	9,11	-	-	-	7.078,25
		2011	27	34.497,68	74	31.350,24	62	1.611,19	6	1.702,82	6	28.036,23	-	-	-	1.595,56
		2012	17	10.073,93	44	366,15	29	219,76	11	146,39	4	-	-	-	-	219,76
		Jumlah	117	82.920,79	312	49.616,36	245	14.802,53	41	6.146,64	26	28.667,19	-	-	-	14.786,90
135	Kab. Lampung Timur	2008	17	12.504,75	38	3.488,85	34	3.321,65	4	167,20	-	-	-	-	-	3.321,65
		2009	23	5.241,40	53	5.241,40	38	845,05	15	4.396,35	-	-	-	-	-	624,63
		2010	22	3.207,71	60	2.058,47	18	170,13	13	1.758,44	29	129,90	-	-	-	170,13
		2011	38	285.297,69	109	114.875,10	38	282,04	37	2.880,26	34	111.712,80	-	-	-	282,04
		2012	14	1.363,77	35	377,77	2	-	33	377,77	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	307.615,32	295	126.041,59	130	4.618,87	102	9.580,02	63	111.842,70	-	-	-	4.398,45
136	Kab. Lampung Utara	2008	16	6.181,24	35	3.109,96	26	2.851,84	9	258,12	-	-	-	-	-	2.851,84
		2009	24	10.381,12	51	5.204,09	41	3.780,58	10	1.423,51	-	-	-	-	-	3.780,58
		2010	38	6.740,65	101	4.529,08	62	1.064,03	20	3.465,05	19	-	-	-	-	1.064,03
		2011	52	7.958,15	131	5.883,34	56	1.188,56	43	4.179,64	32	515,14	-	-	-	1.188,56
		2012	16	5.650,02	44	626,09	14	54,88	21	521,99	9	49,22	-	-	-	54,88
		Jumlah	146	36.911,18	362	19.352,56	199	8.939,89	103	9.848,31	60	564,36	-	-	-	8.939,89
137	Kab. Mesuji	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	1.354,83	42	578,96	14	-	15	578,96	13	-	-	-	-	-
		2012	12	2.261,94	42	2.090,12	14	778,83	22	1.251,29	6	-	-	-	-	778,83
		Jumlah	28	3.616,77	84	2.609,08	28	778,83	37	1.830,25	19	-	-	-	-	778,83
138	Kab. Pesawaran	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	623,96	12	623,95	10	413,19	2	210,76	-	-	-	-	-	413,19
		2010	20	1.707,86	58	688,03	49	151,99	9	536,04	-	-	-	-	-	150,49
		2011	16	11.357,15	42	467,62	38	24,00	4	443,62	-	-	-	-	-	24,00
		2012	17	4.106,52	41	794,67	25	-	7	632,14	9	162,53	-	-	-	-
		Jumlah	57	17.795,49	153	2.574,27	122	589,18	22	1.822,56	9	162,53	-	-	-	587,68

Halaman 27 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
139	Kab. Pringsewu	2008	4	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	1.162,02	49	388,97	45	388,97	4	-	-	-	-	-	388,97
		2012	23	1.038,87	57	1.012,34	39	302,45	17	709,89	1	-	-	-	-
		Jumlah	37	2.200,89	106	1.401,31	84	691,42	21	709,89	1	-	-	-	388,97
140	Kab. Tanggamus	2008	14	5.159,63	35	1.599,54	29	865,15	5	734,39	1	-	-	-	865,15
		2009	23	9.831,90	60	7.687,63	49	7.152,78	11	534,85	-	-	-	-	7.152,78
		2010	21	6.695,06	69	3.882,32	61	1.760,32	6	2.072,00	2	-	-	-	1.760,32
		2011	15	90.184,83	43	238,62	39	34,84	4	34,84	-	-	-	-	203,78
		2012	28	1.960,41	78	1.960,40	21	1.819,56	22	140,84	35	-	-	-	1.819,56
		Jumlah	101	113.831,83	285	15.318,51	199	11.801,59	48	3.516,92	38	-	-	-	11.801,59
141	Kab. Tulang Bawang	2008	15	8.606,99	38	2.772,74	32	2.124,17	6	648,57	-	-	-	-	2.124,17
		2009	26	47.628,49	56	2.819,46	45	1.142,82	8	1.676,64	3	-	-	-	1.142,82
		2010	31	5.974,91	95	5.902,80	85	4.829,81	6	564,19	4	508,80	-	-	4.829,81
		2011	17	799,46	43	799,44	22	35,47	1	46,25	20	717,72	-	-	35,47
		2012	13	1.108,13	69	185,55	22	185,55	5	-	42	-	-	-	1.108,13
		Jumlah	102	64.117,98	301	12.479,99	206	8.317,82	26	2.935,65	69	1.226,52	-	-	9.240,40
142	Kab. Tulang Bawang Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	234,87	42	234,86	33	233,43	8	1,43	1	-	-	-	233,43
		2012	13	414,69	36	414,69	27	414,69	9	-	-	-	-	-	154,28
		Jumlah	26	649,56	78	649,55	60	648,12	17	1,43	1	-	-	-	387,71
143	Kab. Way Kanan	2008	18	10.046,12	44	2.284,69	24	1.537,12	4	284,67	16	462,90	-	-	1.537,12
		2009	22	4.244,32	68	2.939,89	35	346,76	22	2.241,52	11	351,61	-	-	346,76
		2010	21	1.276,65	57	1.276,64	31	645,54	19	438,67	7	192,43	-	-	645,54
		2011	16	9.447,09	44	3.178,60	25	2.885,72	19	2.885,72	-	-	-	-	2.885,72
		2012	19	10.935,32	59	721,12	17	45,00	37	676,12	5	-	-	-	45,00
		Jumlah	96	35.949,50	272	10.400,94	132	2.867,30	101	6.526,70	39	1.006,94	-	-	2.867,30
144	Kota Bandar Lampung	2008	31	12.017,54	77	10.399,34	70	8.470,82	4	12,45	3	1.916,07	-	-	8.470,82
		2009	40	6.332,11	91	1.387,41	65	1.186,54	9	200,87	17	-	-	-	1.186,54
		2010	45	33.210,68	116	4.053,81	89	2.833,83	8	1.219,98	19	-	-	-	2.833,83

Halaman 28 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	36	43.129,60	87	9.522,42	65	1.530,22	21	7.278,58	1	713,62	-	-	1.530,22
		2012	28	3.267,02	95	778,63	76	339,20	18	439,43	1	-	-	-	339,20
		Jumlah	180	97.956,95	466	26.141,61	365	14.360,61	60	9.151,31	41	2.629,69	-	-	14.360,61
145	Kota Metro	2008	21	4.177,34	43	2.638,44	35	332,42	6	1.333,83	2	972,19	-	-	332,42
		2009	33	3.054,93	65	311,55	54	99,95	2	205,60	9	6,00	-	-	99,95
		2010	22	2.666,94	62	966,16	42	596,75	18	369,41	2	-	-	-	596,75
		2011	29	15.733,07	77	387,55	68	18,19	8	369,36	1	-	-	-	18,19
		2012	5	827,71	10	49,70	9	9,70	1	40,00	-	-	-	-	9,70
		Jumlah	110	26.459,99	257	4.353,40	208	1.057,01	35	2.318,20	14	978,19	-	-	1.057,01
146	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2008	29	3.371,90	50	2.462,63	45	2.352,95	5	109,68	-	-	-	-	2.352,95
		2009	26	18.966,23	56	4.152,81	45	3.674,90	11	477,91	-	-	-	-	3.674,90
		2010	26	1.156,98	43	972,96	37	917,91	6	55,05	-	-	-	-	917,91
		2011	28	549,99	42	473,60	14	100,29	28	373,31	-	-	-	-	100,29
		2012	34	2.518,97	49	1.518,95	10	236,18	21	312,94	18	969,83	-	-	250,18
		Jumlah	143	26.564,07	240	9.580,95	151	7.282,23	71	1.328,89	18	969,83	-	-	7.282,23
147	Kab. Bangka	2008	26	10.207,04	48	193,44	48	193,44	-	-	-	-	-	-	193,44
		2009	61	2.360,43	106	1.684,88	99	1.160,24	5	524,64	2	-	-	-	1.160,24
		2010	33	12.342,86	57	11.338,93	38	2.526,55	12	8.812,38	7	-	-	-	2.526,55
		2011	38	2.986,32	59	552,69	42	13,75	8	538,94	9	-	-	-	13,75
		2012	25	5.482,88	38	675,54	7	46,20	6	14,60	25	614,74	-	-	46,20
		Jumlah	183	33.379,53	308	14.445,48	234	3.940,18	31	9.890,56	43	614,74	-	-	3.940,18
148	Kab. Bangka Barat	2008	13	680,58	22	680,58	22	680,58	-	-	-	-	-	-	680,58
		2009	32	1.148,97	59	523,56	58	523,56	1	-	-	-	-	-	523,56
		2010	10	1.185,33	19	7,89	17	7,89	2	-	-	-	-	-	7,89
		2011	28	180.858,13	39	273,17	21	144,77	16	128,40	2	-	-	-	144,77
		2012	11	24,24	12	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	94	183.897,25	151	1.485,20	124	1.356,80	25	128,40	2	-	-	-	1.356,80
149	Kab. Bangka Selatan	2008	11	968,95	23	282,05	23	282,05	-	-	-	-	-	-	282,05
		2009	35	19.093,94	85	2.618,84	76	2.581,77	8	37,07	1	-	-	-	2.581,77
		2010	32	5.830,08	68	1.702,64	57	1.480,06	10	222,58	1	-	-	-	1.480,06
		2011	19	1.926,87	29	603,76	14	593,35	14	10,41	1	-	-	-	593,35
		2012	9	60,53	10	60,52	3	22,45	4	31,62	3	6,45	-	-	22,45
		Jumlah	106	27.880,37	215	5.267,81	173	4.959,68	36	301,68	6	6,45	-	-	4.959,68

Halaman 29 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
150	Kab. Bangka Tengah	2008	22	3.534,13	48	2.007,89	42	1.494,27	4	513,62	2	-	-	-	14	15	16	1.494,27
		2009	20	13.025,29	42	197,41	34	197,41	8	-	-	-	-	-	-	-	-	197,41
		2010	15	907,02	30	513,24	19	513,24	7	-	4	-	-	-	-	-	-	513,24
		2011	15	181,47	21	103,38	6	60,17	8	43,21	7	-	-	-	-	-	-	60,17
		2012	18	764,76	27	764,75	6	165,73	6	-	15	599,02	-	-	-	-	-	165,73
		Jumlah	90	18.412,67	168	3.586,67	107	2.430,82	33	556,83	28	599,02	-	-	-	-	-	2.430,82
151	Kab. Belitung	2008	18	2.090,70	42	1.072,69	37	1.053,67	5	19,02	-	-	-	-	-	-	-	1.053,67
		2009	27	6.441,34	59	2.030,26	31	1.208,09	21	822,17	7	-	-	-	-	-	-	1.208,09
		2010	27	738,64	72	375,64	34	100,09	36	275,55	2	-	-	-	-	-	-	100,09
		2011	33	5.680,13	44	720,51	22	440,15	18	280,36	4	-	-	-	-	-	-	466,74
		2012	13	473,72	19	473,71	5	-	4	70,16	10	403,55	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	118	15.424,53	236	4.672,81	129	2.802,00	84	1.467,26	23	403,55	-	-	-	-	-	2.828,59
152	Kab. Belitung Timur	2008	21	8.028,36	45	479,58	41	394,87	4	84,71	-	-	-	-	-	-	-	394,87
		2009	21	1.394,00	39	921,38	34	483,25	5	436,13	-	-	-	-	-	-	-	483,25
		2010	21	1.046,60	41	1.026,59	27	677,10	12	349,49	2	-	-	-	-	-	-	677,10
		2011	15	834,53	20	744,86	11	496,03	9	246,83	-	-	-	-	-	-	-	496,03
		2012	41	3.389,84	57	3.115,84	5	33,09	14	260,61	38	2.822,14	-	-	-	-	-	33,09
		Jumlah	119	14.693,33	202	6.288,25	118	2.084,34	44	1.381,77	40	2.822,14	-	-	-	-	-	2.084,34
153	Kota Pangkalpinang	2008	9	152,43	18	1.230,01	18	1.230,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,01
		2009	78	8.608,25	126	1.278,05	82	609,19	25	668,86	19	-	-	-	-	-	-	609,19
		2010	63	3.848,98	136	3.142,25	102	355,89	30	2.786,36	4	-	-	-	-	-	-	355,89
		2011	42	1.448,03	76	1.023,85	31	591,58	41	411,55	4	20,72	-	-	-	-	-	591,58
		2012	12	448,89	14	368,46	1	4,36	12	364,10	1	-	-	-	-	-	-	4,36
		Jumlah	204	14.506,58	370	7.042,62	234	2.791,03	108	4.230,87	28	20,72	-	-	-	-	-	2.791,03
154	Prov. Kepulauan Riau	2008	17	1.059,92	29	1.059,92	29	1.059,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,85
		2009	45	47.040,72	90	6.048,34	70	5.562,09	18	486,25	2	-	-	-	-	-	-	4.301,55
		2010	53	2.918,69	101	2.918,69	86	1.048,00	15	1.870,69	-	-	-	-	-	-	-	1.048,00
		2011	98	1.907,55	157	1.215,01	91	439,63	51	775,38	15	-	-	-	-	-	-	439,63
		2012	45	13.011,06	84	12.840,69	13	782,80	19	10.218,88	52	1.839,01	-	-	-	-	-	782,80
		Jumlah	258	65.937,94	461	24.082,65	289	8.892,44	103	13.351,20	69	1.839,01	-	-	-	-	-	6.912,83
155	Kab. Bintan	2008	27	191,88	44	191,88	43	185,81	1	6,07	-	-	-	-	-	-	-	185,81
		2009	30	15.866,51	45	15.866,50	40	839,85	5	15.026,65	-	-	-	-	-	-	-	839,85
		2010	33	582,51	60	582,50	49	548,54	11	33,96	-	-	-	-	-	-	-	548,54

Halaman 30 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	42	485,74	105	485,71	98	204,55	7	281,16	-	-	-	-	-	195,43
		2012	14	993,85	23	1,82	16	1,82	7	-	-	-	-	-	-	993,66
		Jumlah	146	18.120,49	277	17.128,41	246	1.780,57	31	15.347,84	-	-	-	-	-	2.763,29
156	Kab. Karimun	2008	19	620,59	30	620,59	30	620,59	-	-	-	-	-	-	-	620,59
		2009	60	23.009,01	91	23.008,74	81	9.219,95	7	13.749,73	3	39,06	-	-	-	7.085,87
		2010	62	27.381,02	127	27.381,01	106	25.286,61	9	42,15	12	2.052,25	-	-	-	25.255,74
		2011	58	12.044,24	150	12.044,24	121	11.788,80	11	243,89	18	11,55	-	-	-	11.788,80
		2012	45	8.280,19	98	2.052,79	24	69,87	3	45,55	71	1.937,37	-	-	-	69,87
		Jumlah	244	71.335,05	496	65.107,37	362	46.985,82	30	14.081,32	104	4.040,23	-	-	-	44.820,87
157	Kab. Kepulauan Anambas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	17.245,41	61	1.098,71	54	943,15	7	155,56	-	-	-	-	-	943,15
		2011	43	18.634,93	104	596,24	72	283,22	31	270,69	1	42,33	-	-	-	283,22
		2012	18	2.052,49	34	1.007,18	16	62,50	18	944,68	-	-	-	-	-	62,50
		Jumlah	86	37.932,83	199	2.702,13	142	1.288,87	56	1.370,93	1	42,33	-	-	-	1.288,87
158	Kab. Lingga	2008	24	6.018,06	37	4.390,58	33	2.004,24	4	2.386,34	-	-	-	-	-	2.004,24
		2009	36	25.301,38	64	2.991,46	45	1.341,33	12	1.650,13	7	-	-	-	-	1.341,33
		2010	44	15.759,19	88	13.558,27	48	11.570,43	36	1.978,69	4	9,15	-	-	-	11.570,43
		2011	58	193,33	139	181,81	59	142,35	67	39,46	13	-	-	-	-	142,35
		2012	28	15.834,61	59	80,74	13	-	43	80,74	3	-	-	-	-	-
		Jumlah	190	63.106,57	387	21.202,86	198	15.058,35	162	6.135,36	27	9,15	-	-	-	15.058,35
159	Kab. Natuna	2008	28	4.306,37	43	4.306,37	35	3.025,01	8	1.281,36	-	-	-	-	-	3.025,01
		2009	43	652,41	61	652,40	48	591,05	12	61,35	1	-	-	-	-	591,05
		2010	50	12.804,46	101	12.804,45	45	757,46	18	10.030,75	38	2.016,24	-	-	-	49,70
		2011	57	7.035,14	110	7.035,13	46	294,23	19	78,83	45	6.662,07	-	-	-	294,23
		2012	34	11.239,85	60	9.145,61	20	97,62	6	7.909,15	34	1.138,84	-	-	-	97,62
		Jumlah	212	36.038,23	375	33.943,96	194	4.765,37	63	19.361,44	118	9.817,15	-	-	-	4.057,61
160	Kota Batam	2008	27	20.824,06	33	20.495,93	21	19.852,48	12	643,45	-	-	-	-	-	19.852,48
		2009	54	10.444,25	96	10.444,24	74	849,73	13	9.586,41	9	8,10	-	-	-	849,73
		2010	54	7.193,26	102	7.193,25	65	6.880,48	32	293,32	5	19,45	-	-	-	6.880,48
		2011	60	16.108,73	137	13.725,60	90	1.582,07	29	11.464,48	18	679,05	-	-	-	1.582,07
		2012	54	1.339,78	95	1.339,77	-	-	26	1.209,22	69	130,55	-	-	-	-
		Jumlah	249	55.910,08	463	53.198,79	250	29.164,76	112	23.196,88	101	837,15	-	-	-	29.164,76

Halaman 31 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
161	Kota Tanjungpinang	2008	42	12.597,31	68	12.597,30	61	444,58	7	12.152,72	11	11	12	13	14	15	16	
		2009	50	107,44	61	107,44	50	87,12	5	20,32	6	6	6	-	-	-	-	444,58
		2010	53	425,28	106	425,27	96	332,06	8	93,21	2	2	2	-	-	-	-	332,06
		2011	61	1.551,82	140	1.551,82	105	153,1	27	1.536,51	8	8	8	-	-	-	-	153,1
		2012	50	240,27	96	240,26	27	120,49	26	-	-	43	119,77	-	-	-	-	120,49
		Jumlah	256	14.922,13	471	14.922,09	339	999,56	73	13.802,76	59	59	59	119,77	-	-	-	999,56
162	BP Batam	2008	36	256.120,21	59	256.120,20	55	252.734,64	4	3.326,51	-	-	-	-	-	-	-	155.368,33
			-	USD 185,45	-	USD 185,45	-	USD 184,45	-	USD 1,00	-	-	-	-	-	-	-	USD 184,45
			-	SGD 349,95	-	SGD 349,95	-	SGD 217,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 217,79
		2009	13	17.670,18	18	17.670,17	15	9.609,27	2	5.895,52	1	1	1	2.165,38	-	-	-	4.638,82
		2010	37	4.220,15	67	3.917,36	60	3.052,54	5	864,82	2	2	2	-	-	-	-	3.027,41
		2011	49	20.239,56	88	20.239,54	81	14.321,93	6	5.917,61	1	1	1	-	-	-	-	1.289,95
			-	USD 17,75	-	USD 17,75	-	USD 17,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 17,75
		2012	10	-	26	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	298.250,10	258	297.947,27	211	279.718,38	17	16.004,46	-	-	30	2.224,43	-	-	-	164.324,51
			-	USD 203,20	-	USD 203,20	-	USD 202,20	-	USD 1,00	-	-	-	-	-	-	-	USD 202,20
			-	SGD 349,95	-	SGD 349,95	-	SGD 217,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 217,79
163	Prov. DKI Jakarta	2008	395	339.290,23	849	257.419,15	720	63.327,86	91	11.616,25	-	-	28	3.874,37	10	178.601	-	65.385,84
		2009	337	493.220,78	735	202.627,34	594	124.104,53	120	74.598,73	-	-	18	3.924,08	3	-	-	130.267,94
		2010	215	79.695,21	449	24.634,36	379	24.392,29	70	242,07	-	-	-	-	-	-	-	31.091,31
		2011	411	250.022,01	967	85.184,00	651	44.821,35	226	40.280,14	-	-	90	82,51	-	-	-	45.891,82
		2012	210	152.971,78	448	67.536,97	124	11.032,43	112	19.906,71	-	-	212	36.597,83	-	-	-	16.316,47
		Jumlah	1.568	1.315.200	3.448	637.401,82	2.468	267.678,46	619	146.643,90	-	-	348	44.478,79	13	178.601	-	288.953,38
164	Prov. Jawa Barat	2008	140	114.916,55	210	99.652,59	114	96.436,19	16	1.199,67	-	-	80	2.016,73	-	-	-	96.439,20
		2009	104	7.212,28	159	4.422,82	123	1.487,84	34	2.926,53	-	-	2	8,45	-	-	-	2.775,14
		2010	73	16.480,40	183	9.192,87	165	8.141,44	17	669,98	-	-	1	381,45	-	-	-	9.847,80
		2011	100	128.725,58	226	3.367,57	170	3.101,26	53	266,31	-	-	3	-	-	-	-	3.101,26
		2012	105	514.048,57	262	82.429,97	45	50.138,95	38	30.900,80	-	-	179	1.390,22	-	-	-	216,45
			-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	522	781.383,38	1.040	199.065,82	617	159.305,68	158	35.963,29	-	-	265	3.796,85	-	-	-	112.379,85
			-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Kab. Bandung	2008	24	3.554,07	47	3.287,21	42	1.034,57	4	2.092,64	-	-	1	160,00	-	-	-	1.169,32
		2009	42	5.310,54	88	944,54	77	658,48	9	85,22	-	-	2	200,84	-	-	-	902,93
		2010	44	3.629,48	92	1.850,87	47	872,35	30	801,50	-	-	15	177,02	-	-	-	842,16

Halaman 32 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	16	2.415,56	34	2.157,87	25	1.517,21	9	640,66	-	-	-	-	-	3.107,31
		2012	51	9.452,27	131	8.328,15	18	4.602,34	18	3.053,47	95	672,34	-	-	-	4.644,34
		Jumlah	177	24.364,92	392	16.568,64	209	8.684,95	70	6.673,49	113	1.210,20	-	-	-	10.666,06
166	Kab. Bandung Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	38	4.060,89	73	4.060,88	71	339,69	2	3.721,19	-	-	-	-	-	339,69
		2010	31	1.967,48	84	1.967,47	77	1.762,51	7	204,96	-	-	-	-	-	1.762,51
		2011	28	2.023,82	75	2.023,81	67	1.467,24	7	380,96	1	175,61	-	-	-	1.447,54
		2012	26	63.744,91	64	857,56	41	416,05	8	-	15	441,51	-	-	-	274,00
		Jumlah	123	71.797,10	296	8.909,72	256	3.985,49	24	4.307,11	16	617,12	-	-	-	3.823,74
167	Kab. Bekasi	2008	8	1.003,24	15	580,55	13	580,55	1	-	1	-	-	-	-	580,55
		2009	31	16.648,38	61	15.023,30	36	9.829,12	20	5.194,18	5	-	-	-	-	11.075,98
		2010	23	7.604,34	41	5.337,35	25	2.281,84	16	3.055,51	-	-	-	-	-	3.840,85
		2011	25	1.705,31	53	1.599,75	28	366,51	25	1.233,24	-	-	-	-	-	-
		2012	31	17.803,57	69	17.172,50	44	3.310,89	23	13.861,61	2	-	-	-	-	-
		Jumlah	118	44.764,84	239	39.713,45	146	16.368,91	85	23.344,54	8	-	-	-	-	15.497,38
168	Kab. Bogor	2008	20	3.370,78	38	2.704,72	35	1.961,02	3	743,70	-	-	-	-	-	2.529,24
		2009	22	25.003,19	52	22.526,06	35	3.395,02	13	19.131,04	4	-	-	-	-	3.386,10
		2010	27	9.097,39	58	9.097,38	29	660,56	27	6.011,47	2	2.425,35	-	-	-	660,56
		2011	15	5.764,40	41	4.641,60	35	253,60	6	4.388,00	-	-	-	-	-	253,60
		2012	37	160.569,52	87	14.664,52	-	11,87	9	-	78	14.652,65	-	-	-	11,87
		Jumlah	121	203.805,28	276	53.634,28	134	6.282,07	58	30.274,21	84	17.078,00	-	-	-	6.841,37
169	Kab. Cianjur	2008	10	3.723,39	19	-	16	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		2009	15	1.227,76	24	882,50	23	882,50	1	-	-	-	-	-	-	-
		2010	18	1.520,79	34	956,11	30	956,11	4	-	-	-	-	-	-	1.311,51
		2011	26	44.556,90	49	26,02	41	26,02	7	-	1	-	-	-	-	104,18
		2012	22	2.024,19	60	1.800,59	29	217,97	28	1.582,62	3	-	-	-	-	-
		Jumlah	91	53.053,03	186	3.665,22	139	2.082,60	43	1.582,62	4	-	-	-	-	2.534,10
170	Kab. Cianjur	2008	49	4.763,10	88	2.757,51	39	306,86	32	1.267,21	17	1.183,44	-	-	-	1.958,94
		2009	37	5.875,61	73	5.875,60	5	431,68	14	2.484,80	54	2.959,12	-	-	-	431,68
		2010	39	7.750,02	76	3.095,72	31	570,44	33	2.525,28	12	-	-	-	-	1.771,14
		2011	24	15.954,88	65	1.614,23	19	312,86	23	819,45	23	481,92	-	-	-	381,98
		2012	21	1.489,43	42	1.386,69	24	708,80	16	677,89	2	-	-	-	-	708,80
		Jumlah	170	35.833,04	344	14.729,75	118	2.330,64	118	7.774,63	108	4.624,48	-	-	-	5.252,54

Halaman 33 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
171	Kab. Cirebon	2008	12	1.971,90	24	1.289,30	24	1.289,30	-	-	-	-	-	-	1.289,30
		2009	38	4.984,33	53	1.679,75	43	1.402,27	9	277,48	1	-	-	-	1.537,24
		2010	17	3.399,26	32	2.243,57	21	685,98	11	1.557,59	-	-	-	-	739,60
		2011	21	4.924,68	55	1.256,68	41	847,59	13	409,09	1	-	-	-	859,15
		2012	15	3.598,64	46	3.491,35	36	3.008,85	9	310,62	1	171,88	-	-	3.076,13
		Jumlah	103	18.878,81	210	9.960,65	165	7.233,99	42	2.554,78	3	171,88	-	-	7.501,42
172	Kab. Garut	2008	8	18.747,07	21	15.812,46	10	122,17	4	8.661,68	7	7.028,61	-	-	122,17
		2009	24	2.112,66	57	2.112,65	27	1.038,40	3	131,50	27	942,75	-	-	1.038,40
		2010	44	7.481,74	71	7.066,91	10	-	10	3.805,50	51	3.261,41	-	-	8,14
		2011	57	10.277,17	123	4.995,52	77	1.560,25	29	3.425,10	17	10,17	-	-	1.485,36
		2012	12	355,78	35	353,34	20	127,87	13	124,27	2	101,20	-	-	130,29
		Jumlah	145	38.974,42	307	30.340,88	144	2.848,69	59	16.148,05	104	11.344,14	-	-	2.784,36
173	Kab. Indramayu	2008	8	1.462,02	18	1.441,37	15	287,00	3	1.154,37	-	-	-	-	358,17
		2009	23	1.629,92	50	1.284,37	44	1.198,58	4	85,79	2	-	-	-	1.324,66
		2010	12	201,88	22	-	16	-	6	-	-	-	-	-	201,88
		2011	23	5.136,82	53	3.832,96	27	1.111,90	19	2.171,13	7	549,93	-	-	-
		2012	38	11.059,90	98	10.853,41	9	2,70	30	8.771,52	59	2.079,19	-	-	-
		Jumlah	104	19.490,54	241	17.412,11	111	2.600,18	62	12.182,81	68	2.629,12	-	-	1.884,71
174	Kab. Karangasem	2008	18	1.888,37	35	702,20	32	702,20	2	-	1	-	-	-	702,20
		2009	48	10.480,15	109	2.433,84	80	542,81	26	1.336,03	3	555,00	-	-	729,92
			-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00
		2010	14	629,28	28	438,18	11	6,96	14	120,52	3	310,70	-	-	210,45
		2011	43	7.041,92	105	6.194,23	12	-	15	3.384,89	78	2.809,34	-	-	177,27
		2012	30	5.960,30	62	5.948,13	5	1.357,24	31	2.580,27	26	2.010,62	-	-	-
		Jumlah	153	26.000,02	339	15.716,58	140	2.609,21	88	7.421,71	111	5.685,66	-	-	1.819,84
			-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00
175	Kab. Kuningan	2008	9	210,37	17	210,37	17	210,37	-	-	-	-	-	-	182,04
		2009	18	1.723,73	39	185,95	38	185,95	1	-	-	-	-	-	274,89
		2010	16	380,57	29	327,67	23	314,13	6	13,54	-	-	-	-	366,13
		2011	21	1.040,36	48	1.040,35	29	953,45	16	86,90	3	-	-	-	736,87
		2012	19	23.077,90	43	2.963,64	30	686,64	13	2.277,00	-	-	-	-	687,49
		Jumlah	83	26.432,93	176	4.727,98	137	2.350,54	36	2.377,44	3	-	-	-	2.247,42

Halaman 34 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
176	Kab. Majalengka	2008	8	127,75	18	127,75	18	127,75	-	-	-	-	-	-	-	127,75
		2009	21	2.540,23	49	1.144,79	44	1.054,52	5	90,27	-	-	-	-	-	1.065,73
		2010	21	772,52	38	119,69	18	119,69	20	-	-	-	-	-	-	119,69
		2011	15	1.816,15	31	1.754,15	23	647,45	8	1.106,70	-	-	-	-	-	709,45
		2012	10	219,07	24	219,07	11	209,75	9	9,32	4	-	-	-	-	289,75
		Jumlah	75	5.475,72	160	3.365,45	114	2.159,16	42	1.206,29	4	-	-	-	-	2.312,37
177	Kab. Purwakarta	2008	22	4.213,19	54	2.717,02	31	1.348,35	12	1.368,67	11	-	-	-	-	1.652,28
		2009	38	8.383,50	81	6.592,24	22	354,25	20	3.485,67	39	2.752,32	-	-	-	426,73
		2010	24	7.705,30	61	7.705,28	12	974,12	14	5.317,33	35	1.413,83	-	-	-	1.000,84
		2011	14	3.970,31	24	2.640,79	4	53,63	17	2.462,92	3	124,24	-	-	-	725,40
		2012	24	4.857,60	67	4.810,00	23	785,98	12	388,68	32	3.635,34	-	-	-	725,40
		Jumlah	122	29.129,90	287	24.465,33	92	3.516,33	75	13.023,27	120	7.925,73	-	-	-	4.530,65
178	Kab. Subang	2008	10	2.294,99	21	170,38	20	94,10	1	76,28	-	-	-	-	-	94,10
		2009	21	7.997,44	44	2.938,92	34	1.669,85	8	1.229,19	2	39,88	-	-	-	1.693,38
		2010	13	1.051,29	22	1.051,28	14	146,35	5	904,93	3	-	-	-	-	146,36
		2011	31	16.065,83	53	4.699,70	31	415,25	12	4.075,95	10	208,50	-	-	-	416,51
		2012	11	202,55	22	202,54	2	28,14	4	34,36	16	140,04	-	-	-	28,14
		Jumlah	86	27.612,10	162	9.062,82	101	2.353,69	30	6.320,71	31	388,42	-	-	-	2.378,49
179	Kab. Sukabumi	2008	38	1.217,06	61	617,94	49	367,93	11	218,13	1	31,88	-	-	-	367,93
		2009	39	7.180,33	84	5.035,36	52	4.400,69	28	487,55	4	147,12	-	-	-	4.314,98
		2010	14	563,41	19	203,49	15	153,42	4	50,07	-	-	-	-	-	153,42
		2011	32	4.033,50	89	3.136,58	66	2.005,69	23	1.130,89	-	-	-	-	-	2.764,07
		2012	15	1.699,04	31	1.699,03	19	649,52	8	355,06	4	694,45	-	-	-	842,17
		Jumlah	138	14.693,34	284	10.692,40	201	7.577,25	74	2.241,70	9	873,45	-	-	-	8.442,57
180	Kab. Sumedang	2008	13	2.614,23	22	2.583,54	11	424,66	10	2.158,88	1	-	-	-	-	424,66
		2009	35	1.413,44	64	1.038,94	34	186,07	25	852,87	5	-	-	-	-	186,07
		2010	11	1.644,88	18	717,37	1	-	12	553,08	5	164,29	-	-	-	-
		2011	31	4.663,26	99	4.034,60	49	1.547,99	39	2.486,61	11	-	-	-	-	1.553,26
		2012	19	3.966,70	52	388,20	24	51,19	20	224,59	8	112,42	-	-	-	51,19
		Jumlah	109	14.305,51	255	8.762,65	119	2.209,91	106	6.276,03	30	276,71	-	-	-	2.215,18
181	Kab. Tasikmalaya	2008	27	1.075,94	40	657,57	32	521,92	8	135,65	-	-	-	-	-	531,63
		2009	8	37,02	13	37,02	12	37,02	1	-	-	-	-	-	-	37,02
		2010	7	771,80	17	771,79	6	26,91	11	744,88	-	-	-	-	-	26,91

Halaman 35 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	62	14.092,85	158	5.857,81	41	305,47	35	3.264,70	82	2.287,64	-	-	304,48
		2011	10	1.471,72	22	596,71	-	30,00	1	178,26	21	388,45	-	-	30,00
		2012	114	17.449,33	250	7.920,90	91	921,32	56	4.233,49	103	2.676,09	-	-	930,04
	Jumlah														
182	Kota Bandung	2008	12	971,43	17	971,43	7	542,05	10	429,38	-	-	-	-	542,05
		2009	74	6.083,72	165	3.861,75	86	3.658,30	42	159,84	37	43,61	-	-	3.673,78
		2010	43	22.538,26	110	22.100,28	68	690,42	27	5.078,51	15	16.331,35	-	-	684,10
		2011	39	25.857,57	102	20.786,18	77	9.424,82	10	9.004,80	15	2.356,56	-	-	10.330,42
		2012	45	36.058,48	130	7.614,03	25	-	12	3.367,88	93	4.246,15	-	-	-
	Jumlah		213	91.509,46	524	55.333,67	263	14.315,59	101	18.040,41	160	22.977,67	-	-	15.230,35
183	Kota Banjar	2008	10	10.818,52	11	695,92	11	695,92	-	-	-	-	-	-	440,07
		2009	21	1.026,98	33	411,91	33	411,91	-	-	-	-	-	-	396,89
		2010	21	595,37	38	251,92	38	251,92	-	-	-	-	-	-	251,92
		2011	12	492,92	28	492,92	28	492,92	-	-	-	-	-	-	492,92
		2012	13	893,81	32	893,81	26	893,81	6	-	-	-	-	-	893,81
	Jumlah		77	13.827,60	142	2.746,48	136	2.746,48	6	-	-	-	-	-	2.475,61
184	Kota Bekasi	2008	22	29.057,44	42	1.491,49	34	1.141,50	7	349,99	1	-	-	-	1.611,04
		2009	46	3.278,80	70	356,01	41	285,94	16	70,07	13	-	-	-	285,94
		2010	20	6.844,04	34	6.317,53	6	4.702,68	18	799,15	10	815,70	-	-	1.614,85
		2011	32	3.901,61	71	3.291,90	25	26,26	28	2.755,67	18	509,97	-	-	26,26
		2012	24	2.096,37	64	602,88	20	-	41	602,88	3	-	-	-	-
	Jumlah		144	45.178,26	281	12.059,81	126	6.156,38	110	4.577,76	45	1.325,67	-	-	3.538,09
185	Kota Bogor	2008	16	1.627,24	29	1.256,80	21	111,00	-	-	8	1.145,80	-	-	193,14
		2009	9	933,56	22	842,78	21	842,78	1	-	-	-	-	-	842,78
		2010	33	4.023,55	58	1.137,34	51	567,93	7	569,41	-	-	-	-	580,89
		2011	22	19.300,60	65	9.357,44	44	1.291,43	19	8.066,01	2	-	-	-	1.291,70
		2012	30	3.279,96	97	2.481,68	13	603,97	11	201,21	73	1.676,50	-	-	407,38
	Jumlah		110	29.164,91	271	15.076,04	150	3.417,11	38	8.836,63	83	2.822,30	-	-	3.315,89
186	Kota Cimahi	2008	12	1.393,51	15	1.140,18	5	91,45	10	1.048,73	-	-	-	-	91,45
		2009	40	4.080,76	87	2.758,66	36	518,30	21	1.235,05	30	1.005,31	-	-	518,30
		2010	24	3.961,26	49	885,44	29	454,45	14	430,99	6	-	-	-	454,45
		2011	24	527,39	47	507,38	23	90,36	8	417,02	16	-	-	-	110,36
		2012	53	4.139,33	141	3.744,26	25	372,78	52	2.612,85	64	758,63	-	-	376,50
	Jumlah		153	14.102,25	339	9.035,92	118	1.527,34	105	5.744,64	116	1.763,94	-	-	1.551,06

Halaman 36 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
187	Kota Cirebon	2008	35	16.915,42	54	3.145,98	51	1.985,31	3	1.160,67	-	-	-	-	1.621,63
		2009	24	228,27	51	228,27	42	191,54	9	36,73	-	-	-	-	191,54
		2010	15	272,27	39	272,27	36	272,27	3	-	-	-	-	-	221,59
		2011	20	6.633,94	46	2.213,87	37	2.083,13	8	130,74	1	-	-	-	2.315,78
		2012	16	852,10	40	353,65	20	270,81	18	82,84	2	-	-	-	270,81
		Jumlah	110	24.902,00	230	6.214,04	186	4.803,06	41	1.410,98	3	-	-	-	4.621,35
188	Kota Depok	2008	12	2.309,48	26	742,02	26	742,02	-	-	-	-	-	-	704,54
		2009	37	14.608,29	74	10.980,89	71	10.817,82	3	163,07	-	-	-	-	1.650,51
		2010	12	3.385,69	23	419,92	17	419,92	5	-	1	-	-	-	352,47
		2011	7	24,12	11	24,12	9	24,12	2	-	-	-	-	-	24,12
		2012	11	775,95	25	775,95	20	775,95	5	-	-	-	-	-	805,29
		Jumlah	79	21.103,53	159	12.942,90	143	12.779,83	15	163,07	1	-	-	-	3.536,99
189	Kota Sukabumi	2008	18	7.882,88	36	700,75	33	654,27	3	46,48	-	-	-	-	654,27
		2009	22	3.300,22	51	1.555,10	37	477,77	13	1.077,33	1	-	-	-	297,13
		2010	25	1.014,73	57	950,40	34	166,45	23	783,95	-	-	-	-	166,56
		2011	67	5.089,66	163	2.403,63	117	1.765,00	46	638,63	-	-	-	-	1.434,66
		2012	27	2.031,84	71	734,37	23	462,09	17	168,15	31	-	-	-	463,59
		Jumlah	159	19.319,33	378	6.344,25	244	3.525,58	102	2.714,54	32	-	-	-	3.016,21
190	Kota Tasikmalaya	2008	39	5.110,16	95	3.756,00	80	1.716,33	3	17,08	12	2.022,59	-	-	1.725,85
		2009	23	3.924,36	47	1.555,18	29	712,75	15	818,88	3	23,55	-	-	695,99
		2010	7	940,91	14	940,91	1	1,50	12	939,41	1	-	-	-	-
		2011	22	521,82	56	521,81	11	39,50	34	245,47	11	236,84	-	-	-
		2012	19	559,52	39	559,52	14	559,52	22	-	3	-	-	-	559,52
		Jumlah	110	11.056,77	251	7.333,42	135	3.029,60	86	2.020,84	30	2.282,98	-	-	2.981,36
191	Prov. Jawa Tengah	2008	71	22.845,59	137	22.154,49	97	22.093,16	1	-	39	61,33	-	-	22.093,16
		2009	24	1.160,24	48	1.160,23	37	174,80	10	933,23	1	52,20	-	-	274,78
		2010	52	11.896,45	93	8.944,26	79	2.337,33	13	6.606,00	1	0,93	-	-	2.339,20
		2011	45	1.533,95	131	1.662,82	72	1.662,82	55	-	4	-	-	-	1.662,82
		2012	44	33.948,30	91	17.419,87	18	2.132,01	26	-	47	15.287,86	-	-	9.547,12
		Jumlah	236	71.384,53	500	51.341,67	303	28.400,12	105	7.539,23	92	15.402,32	-	-	35.917,08
192	Kab. Banjarnegara	2008	44	806,10	115	806,10	115	806,10	-	-	-	-	-	-	806,10
		2009	13	1.931,96	23	1.931,96	23	1.931,96	-	-	-	-	-	-	1.931,96
		2010	27	7.028,12	40	498,07	38	470,74	2	27,33	-	-	-	-	470,74

Halaman 37 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	29	5.672,01	53	5.664,00	48	5.177,20	5	486,80	-	-	-	-	5.206,09
		2012	30	3.556,86	80	152,32	77	152,32	3	-	-	-	-	-	152,32
		Jumlah	143	18.995,05	311	9.052,45	301	8.538,32	10	514,13	-	-	-	-	8.567,21
193	Kab. Banyumas	2008	15	5.303,77	43	5.303,76	41	3.939,19	2	1.364,57	-	-	-	-	3.939,19
		2009	16	1.516,64	38	658,25	38	658,25	-	-	-	-	-	-	658,25
		2010	20	263,68	36	184,81	36	184,81	-	-	-	-	-	-	263,68
		2011	29	3.266,10	58	2.185,58	49	2.169,57	9	16,01	-	-	-	-	2.412,93
		2012	6	287,77	15	-	11	-	4	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	10.637,96	190	8.332,40	175	6.951,82	15	1.380,58	-	-	-	-	7.274,05
194	Kab. Batang	2008	32	643,77	65	584,83	55	284,24	10	300,59	-	-	-	-	284,24
		2009	15	241,57	29	241,57	28	184,07	1	57,50	-	-	-	-	184,07
		2010	27	505,27	44	106,25	39	106,25	5	-	-	-	-	-	228,33
		2011	9	208,99	18	-	16	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	12	90,63	20	83,71	15	83,71	5	-	-	-	-	-	83,71
		Jumlah	95	1.690,23	176	1.016,36	153	658,27	23	358,09	-	-	-	-	780,35
195	Kab. Blora	2008	24	2.595,59	59	1.008,26	58	893,31	1	114,95	-	-	-	-	893,31
		2009	14	368,86	35	333,22	28	274,24	7	58,98	-	-	-	-	274,24
		2010	29	987,88	66	306,48	52	166,19	14	140,29	-	-	-	-	524,36
		2011	33	35,77	64	-	29	-	34	-	1	-	-	-	22,33
		2012	18	13.183,03	49	647,95	39	65,64	10	32,78	-	549,53	-	-	65,64
		Jumlah	118	17.171,13	273	2.295,91	206	1.399,38	66	347,00	1	549,53	-	-	1.779,88
196	Kab. Boyolali	2008	17	1.328,20	31	10,47	29	10,47	1	-	1	-	-	-	10,47
		2009	12	18.540,13	19	40,13	16	32,21	3	7,92	-	-	-	-	32,21
		2010	10	4.918,88	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	33	10.758,84	61	111,14	19	33,69	17	40,56	25	36,89	-	-	33,69
		2012	14	261,10	29	-	22	-	7	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	35.807,15	165	161,74	110	76,37	29	48,48	26	36,89	-	-	76,37
197	Kab. Brebes	2008	36	2.295,76	87	2.295,75	72	1.868,25	12	427,50	3	-	-	-	1.869,44
		2009	12	344,65	32	344,64	26	148,16	6	196,48	-	-	-	-	111,37
		2010	15	153,50	35	153,50	14	150,00	19	3,50	2	-	-	-	150,00
		2011	9	46,38	26	46,38	9	46,38	17	-	-	-	-	-	46,38
		2012	55	10.496,08	121	858,74	14	299,30	18	196,03	89	363,41	-	-	299,30
		Jumlah	127	13.336,37	301	3.699,01	135	2.512,09	72	823,51	94	363,41	-	-	2.476,49

Halaman 38 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
198	Kab. Cilacap	2008	20	13.897,24	39	13.897,24	38	13.460,24	1	437,00	-	-	-	-	-	13.460,24
		2009	44	854,06	99	854,06	97	745,56	2	108,50	-	-	-	-	-	745,56
		2010	20	7.731,65	36	7.731,64	34	180,34	2	7.551,30	-	-	-	-	-	180,34
		2011	51	2.415,83	104	2.416,59	99	2.416,59	4	-	1	-	-	-	-	2.415,83
		2012	38	2.365,48	107	1.624,09	28	1.556,41	9	56,68	70	11,00	-	-	-	274,87
		Jumlah	173	27.264,26	385	26.523,62	296	18.359,14	18	8.153,48	71	11,00	-	-	-	17.076,84
199	Kab. Demak	2008	21	2.462,46	43	627,18	41	627,18	2	-	-	-	-	-	-	627,18
		2009	14	320,21	42	320,20	32	392,1	9	280,99	1	-	-	-	-	392,1
		2010	24	933,73	37	933,73	32	829,17	4	104,56	1	-	-	-	-	829,17
		2011	21	315,39	61	315,38	46	285,74	11	29,64	4	-	-	-	-	285,74
		2012	15	1.729,03	33	1.671,48	14	1.495,95	19	132,63	-	42,90	-	-	-	1.548,44
		Jumlah	95	5.760,82	216	3.867,97	165	3.277,25	45	547,82	6	42,90	-	-	-	3.329,74
200	Kab. Grobogan	2008	18	4.502,73	34	4.156,93	27	1.610,00	6	2.546,93	1	-	-	-	-	1.610,00
		2009	26	11.506,85	54	4.348,47	44	2.972,30	7	1.376,17	3	-	-	-	-	2.972,30
		2010	14	405,26	44	137,91	12	101,67	27	36,24	5	-	-	-	-	101,67
		2011	16	1.070,19	34	537,88	22	455,60	11	82,28	1	-	-	-	-	455,60
		2012	29	8.706,21	73	8.386,29	14	0,84	12	8,385,45	47	8,385,45	-	-	-	76,39
		Jumlah	103	26.191,24	239	17.567,48	119	5.139,57	63	4.042,46	57	8,385,45	-	-	-	5.215,96
201	Kab. Jepara	2008	16	56,83	23	56,83	23	56,83	-	-	-	-	-	-	-	56,83
		2009	11	1.347,70	22	1.347,70	22	1.347,70	4	-	-	-	-	-	-	1.347,70
		2010	12	361,20	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	-	-	-	361,20
		2011	6	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	54	1.765,73	102	1.765,73	102	1.765,73	-	-	-	-	-	-	-	1.765,73
202	Kab. Karanganyar	2008	19	141,98	26	141,98	26	141,98	-	-	-	-	-	-	-	87,61
		2009	9	1.724,12	18	1.724,12	17	568,27	1	1.155,85	-	-	-	-	-	568,27
		2010	31	3.990,17	65	3.595,16	61	667,41	4	2.927,75	-	-	-	-	-	647,23
		2011	26	3.887,80	49	327,56	45	327,56	4	-	-	-	-	-	-	327,56
		2012	31	3.831,12	83	-	22	-	12	-	49	-	-	-	-	648,84
		Jumlah	116	13.575,19	241	5.788,82	171	1.705,22	21	4.083,60	49	-	-	-	-	2.279,51
203	Kab. Kebumen	2008	23	697,48	44	697,48	38	500,36	6	197,12	-	-	-	-	-	500,36
		2009	10	11.554,62	14	11.554,62	14	11.554,62	-	-	-	-	-	-	-	11.554,62
		2010	26	146,17	43	146,17	42	146,17	1	-	-	-	-	-	-	146,17
		2011	28	1.579,35	65	1.579,35	65	1.579,35	-	-	-	-	-	-	-	1.579,35
		2012	20	722,06	39	688,84	37	688,84	2	-	-	-	-	-	-	688,84
		Jumlah	107	14.699,68	205	14.666,46	196	14.469,34	9	197,12	-	-	-	-	-	14.469,34

Halaman 39 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	Kab. Kendal	2008	35	6.631,04	74	6.625,91	35	551,77	14	3.185,68	25	2.887,46	-	-	551,77
		2009	23	186.975,84	45	3.329,01	35	319,33	10	3.009,68	-	-	-	-	319,33
		2010	16	6.569,37	41	4.176,43	21	673,51	17	431,20	3	3.071,72	-	-	673,51
		2011	9	1.574,29	19	1.540,78	6	725,97	12	814,81	1	-	-	-	725,97
		2012	27	4.212,35	61	1.717,70	6	-	18	-	37	1.717,70	-	-	-
		Jumlah	110	205.962,89	240	17.389,83	103	2.270,58	71	7.442,37	66	7.676,88	-	-	2.270,58
205	Kab. Klaten	2008	12	1.327,39	35	289,41	33	283,23	2	6,18	-	-	-	-	515,53
		2009	8	1.314,96	22	-	12	-	10	-	-	-	-	-	-
		2010	32	8.513,99	64	2.974,53	33	7,05	30	2.967,48	1	-	-	-	7,05
		2011	26	2.306,34	49	-	20	-	29	-	-	-	-	-	-
		2012	26	10.008,17	61	9.989,64	11	4.693,10	23	-	27	5.296,54	-	-	4.693,10
		Jumlah	104	23.470,85	231	13.253,58	109	4.983,38	94	2.973,66	28	5.296,54	-	-	5.215,68
206	Kab. Kudus	2008	30	969,27	53	253,37	53	253,37	-	-	-	-	-	-	253,37
		2009	15	480,63	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	5,64
		2010	25	1.219,74	39	1.219,73	33	703,64	6	516,09	-	-	-	-	703,64
		2011	20	20.665,95	51	521,62	47	521,62	4	-	-	-	-	-	521,62
		2012	10	2.142,14	23	505,47	12	122,97	11	382,50	-	-	-	-	122,97
		Jumlah	100	25.477,73	193	2.500,19	172	1.601,60	21	898,59	-	-	-	-	1.607,24
207	Kab. Magelang	2008	42	290,26	85	290,25	37	48,76	48	241,49	-	-	-	-	48,76
		2009	12	166,61	32	166,61	26	139,59	6	27,02	-	-	-	-	149,51
		2010	21	991,87	41	991,86	35	724,76	5	267,10	1	-	-	-	724,76
		2011	19	9.891,29	36	2.842,92	17	2.621,68	19	221,24	-	-	-	-	2.621,68
		2012	43	11.065,61	105	219,04	23	91,80	45	-	37	127,24	-	-	97,85
		Jumlah	137	22.405,64	299	4.510,68	138	3.626,59	123	756,85	38	127,24	-	-	3.642,56
208	Kab. Pati	2008	29	5.448,34	78	1.069,01	73	1.069,01	5	-	-	-	-	-	1.069,01
		2009	24	2.965,37	51	241,77	47	241,77	4	-	-	-	-	-	241,77
		2010	12	1.137,31	28	1.137,31	22	1.137,31	6	-	-	-	-	-	1.137,31
		2011	14	836,67	34	791,72	24	388,12	8	403,60	2	-	-	-	388,12
		2012	18	1.762,32	46	1.238,68	5	1.096,64	19	133,91	22	8,13	-	-	1.097,53
		Jumlah	97	12.150,01	237	4.478,49	171	3.932,85	42	537,51	24	8,13	-	-	3.933,74
209	Kab. Pekalongan	2008	11	173,01	36	173,01	27	107,86	9	65,15	-	-	-	-	107,86
		2009	10	191,60	28	136,08	24	95,69	4	40,39	-	-	-	-	140,19
		2010	12	3.931,60	26	3.931,59	17	2.010,79	9	1.920,80	-	-	-	-	2.010,79

Halaman 40 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	28	593,61	51	70,49	29	70,49	22	-	-	-	-	-	-	427,48
		2012	16	388,77	27	-	19	-	8	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	5.278,59	168	4.311,17	116	2.284,83	52	2.026,34	-	-	-	-	-	2.686,32
210	Kab. Pemalang	2008	24	103,60	48	-	45	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	75,88	26	75,87	17	45,36	8	30,51	1	-	-	-	-	45,36
		2010	52	1.936,31	84	8,86	34	8,86	48	-	2	-	-	-	-	8,86
		2011	22	561,12	43	342,91	25	342,91	16	-	2	-	-	-	-	342,91
		2012	19	678,63	39	401,23	5	-	24	401,23	10	-	-	-	-	256,60
		Jumlah	131	3.355,54	240	828,87	126	397,13	99	431,74	15	-	-	-	-	653,73
211	Kab. Purbalingga	2008	8	1.827,71	21	532,27	18	408,35	2	123,92	1	-	-	-	-	408,35
		2009	10	1.476,07	16	1.476,07	10	1.132,08	4	343,99	2	-	-	-	-	1.132,08
		2010	44	480,86	75	510,40	68	214,96	7	295,44	-	-	-	-	-	214,96
		2011	16	587,50	35	587,50	28	587,50	7	-	-	-	-	-	-	587,50
		2012	37	11.831,35	87	1.881,60	10	45,00	21	-	56	1.836,60	-	-	-	45,00
		Jumlah	115	16.203,49	234	4.987,84	134	2.387,89	41	763,35	59	1.836,60	-	-	-	2.387,89
212	Kab. Purworejo	2008	25	3.457,21	49	3.457,20	32	1.582,89	8	1.769,31	9	105,00	-	-	-	1.544,16
		2009	12	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	261,69
		2010	25	837,40	43	437,21	38	37,55	5	399,66	-	-	-	-	-	206,20
		2011	26	995,24	54	77,71	38	51,87	16	25,84	-	-	-	-	-	535,15
		2012	25	754,02	60	594,53	12	-	13	594,53	35	-	-	-	-	159,48
		Jumlah	113	6.041,87	226	4.566,65	140	1.672,31	42	2.789,34	44	105,00	-	-	-	2.706,68
213	Kab. Rembang	2008	22	5.381,46	41	1.231,56	36	284,76	5	946,80	-	-	-	-	-	272,79
		2009	12	1.963,34	31	661,34	26	661,34	5	-	-	-	-	-	-	2.299,52
		2010	24	511,33	60	274,22	49	176,16	11	98,06	-	-	-	-	-	176,16
		2011	7	-	14	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		2012	24	355,91	67	5.075,48	39	1.566,27	13	3.507,11	15	2,10	-	-	-	1.566,27
		Jumlah	89	8.212,04	213	7.242,60	157	2.688,53	41	4.551,97	15	2,10	-	-	-	4.314,74
214	Kab. Semarang	2008	31	5.499,73	61	5.499,73	61	4.670,96	-	828,77	-	-	-	-	-	2.166,87
		2009	11	722,28	24	474,28	20	109,78	3	364,50	1	-	-	-	-	109,78
		2010	33	-	70	-	50	-	17	-	3	-	-	-	-	-
		2011	29	-	52	-	31	-	20	-	1	-	-	-	-	-
		2012	9	-	28	-	19	-	9	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	113	6.222,01	235	5.974,01	181	4.780,74	49	1.193,27	5	-	-	-	-	2.276,65

Halaman 41 - Lampiran 2

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
215	Kab. Sragen	2008	14	1.317,63	28	62,49	28	62,49	-	-	-	-	-	-	62,49
		2009	24	1.471,24	45	1.041,33	44	1.041,33	1	-	-	-	-	-	1.041,33
		2010	19	428,14	38	-	37	-	-	-	-	-	1	-	-
		2011	25	1.568,28	58	240,40	54	240,40	4	-	-	-	-	-	239,80
		2012	21	17.190,19	47	12.169,69	42	329,82	5	11.839,87	-	-	-	-	329,82
		Jumlah	103	21.975,48	216	13.513,91	205	1.674,04	10	11.839,87	-	-	1	-	1.673,44
216	Kab. Sukoharjo	2008	27	3.475,81	63	32,05	48	17,36	15	14,69	-	-	-	-	17,36
		2009	12	816,85	31	518,10	27	439,34	4	78,76	-	-	-	-	439,34
		2010	5	103,68	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	-	-	103,68
		2011	16	1.834,56	37	653,95	23	336,95	14	317,00	-	-	-	-	336,95
		2012	26	1.412,61	69	1.157,69	16	58,09	53	1.099,60	-	-	-	-	58,09
		Jumlah	86	7.643,51	212	2.465,47	126	955,42	86	1.510,05	-	-	-	-	955,42
217	Kab. Tegal	2008	21	3.860,12	43	2.341,74	18	223,82	17	495,15	8	1.622,77	-	-	132,26
		2009	26	12.915,11	76	12.891,08	14	143,16	35	12.124,15	26	623,77	1	-	143,16
		2010	12	1.236,16	30	1.236,16	3	696,73	4	539,43	23	-	-	-	696,73
		2011	23	3.919,54	42	3.619,84	7	460,36	17	3.094,38	18	65,10	-	-	438,25
		2012	26	1.363,45	66	1.049,59	4	117,30	24	562,85	38	369,44	-	-	123,98
		Jumlah	108	23.294,38	257	21.138,41	46	1.641,37	97	16.815,96	113	2.681,08	1	-	1.534,38
218	Kab. Temanggung	2008	10	112,70	21	112,70	20	55,00	1	57,70	-	-	-	-	55,00
		2009	11	626,54	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	10.188,59	43	10.174,05	41	9.834,86	2	339,19	-	-	-	-	9.849,40
		2011	20	105,69	30	-	29	-	1	-	-	-	-	-	21,14
		2012	28	396,91	60	419,12	54	217,66	6	201,46	-	-	-	-	218,17
		Jumlah	94	11.430,43	176	10.705,87	166	10.107,52	10	598,35	-	-	-	-	10.143,71
219	Kab. Wonogiri	2008	23	551,05	46	-	43	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	14	10.376,44	36	94,97	30	94,97	6	-	-	-	-	-	94,97
		2010	13	211,44	22	-	17	-	5	-	-	-	-	-	-
		2011	10	-	17	-	8	-	9	-	-	-	-	-	-
		2012	26	467,47	45	259,53	9	235,62	15	-	21	23,91	-	-	235,62
		Jumlah	86	11.606,40	166	354,50	107	330,59	38	-	21	23,91	-	-	330,59
220	Kab. Wonosobo	2008	25	1.192,74	51	907,65	47	805,38	4	102,27	-	-	-	-	810,33
		2009	19	5.476,28	31	15,98	18	15,98	13	-	-	-	-	-	15,98
		2010	31	8.822,20	71	8.245,25	42	6.184,71	25	2.059,52	3	1,02	1	-	6.195,60

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

Halaman 42 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	41	862,96	75	63,20	55	63,20	20	-	-	-	-	-	-	63,20
		2012	19	5.786,29	52	682,83	32	220,77	20	462,06	-	-	-	-	-	139,49
		Jumlah	135	22.140,47	280	9.914,91	194	7.290,04	82	2.623,85	3	1,02	1	-	-	7.224,60
221	Kota Magelang	2008	22	3.532,71	58	3.532,70	43	3.393,70	15	139,00	-	-	-	-	-	3.393,70
		2009	25	696,20	31	696,20	7	85,00	4	611,20	20	-	-	-	-	85,00
		2010	54	11.166,83	101	9.071,96	77	6.501,58	22	2.570,38	2	-	-	-	-	6.501,58
		2011	30	7.274,91	70	6.509,90	52	4.009,90	14	2.500,00	3	-	-	1	-	4.009,90
		2012	29	614,35	80	40,58	24	40,58	56	-	-	-	-	-	-	40,58
		Jumlah	160	23.285,00	340	19.851,34	203	14.030,76	111	5.820,58	25	-	-	1	-	14.030,76
222	Kota Pekalongan	2008	29	-	63	-	54	-	9	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	2.927,38	20	2.927,37	17	2.365,75	3	561,62	-	-	-	-	-	2.365,75
		2010	23	17.695,33	46	14.221,82	28	5.921,15	17	8.300,67	1	-	-	-	-	5.923,13
		2011	10	1.686,46	25	112,56	14	112,56	11	-	-	-	-	-	-	112,56
		2012	30	1.303,05	54	1.303,05	12	382,60	13	-	29	920,45	-	-	-	392,65
		Jumlah	101	23.612,22	208	18.564,80	125	8.782,06	53	8.862,29	30	920,45	-	-	-	8.794,09
223	Kota Salatiga	2008	18	205,75	26	205,75	23	205,75	2	-	1	-	-	-	-	205,75
		2009	11	316,21	25	354,68	24	316,21	1	38,47	-	-	-	-	-	316,21
		2010	30	15.291,92	55	15.291,92	39	14.892,88	15	399,04	-	-	1	-	-	14.892,88
		2011	12	1.962,75	37	1.962,75	26	1.746,80	11	215,95	-	-	-	-	-	1.746,80
		2012	28	1.215,42	72	6.912,28	17	137,88	46	6.771,12	9	3,28	-	-	-	765,32
		Jumlah	99	18.992,05	215	24.727,38	129	17.299,52	75	7.424,58	10	3,28	1	-	-	17.926,96
224	Kota Semarang	2008	23	4.599,47	72	4.599,46	63	4.400,71	8	4.158,75	1	-	-	-	-	440,71
		2009	39	1.920,55	66	1.920,54	34	1.157,65	15	739,47	17	23,42	-	-	-	1.157,65
		2010	24	6.074,37	46	5.396,28	38	2.020,57	6	3.375,71	1	-	1	-	-	2.045,37
		2011	40	1.501,81	143	1.512,91	85	1.490,69	42	22,22	16	-	-	-	-	1.490,69
		2012	27	5.278,65	44	3.160,72	13	23,43	11	3.137,29	20	-	-	-	-	23,43
		Jumlah	153	19.374,85	371	16.589,91	233	5.133,05	82	11.433,44	55	23,42	1	-	-	5.157,85
225	Kota Surakarta	2008	25	477,84	40	477,83	34	421,01	6	56,82	-	-	-	-	-	421,01
		2009	13	526,80	24	168,19	24	168,19	-	-	-	-	-	-	-	168,19
		2010	23	911,19	43	847,06	34	494,47	9	352,59	-	-	-	-	-	489,59
		2011	10	1.058,53	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00
		2012	13	217,04	27	20,13	19	20,13	8	-	-	-	-	-	-	204,84
		Jumlah	84	3.191,40	151	1.513,21	128	1.103,80	23	409,41	-	-	-	-	-	1.426,63

Halaman 43 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	Kota Tegal	2008	20	534,97	55	534,96	46	499,62	9	35,34	-	-	-	-	499,62
		2009	22	2.685,16	48	1.685,15	42	1.314,17	6	370,98	-	-	-	-	1.319,60
		2010	21	540,42	33	218,26	26	137,72	7	80,54	-	-	-	-	141,24
		2011	27	3.032,93	55	3.032,93	39	1.985,07	14	1.047,86	2	-	-	-	1.985,07
		2012	12	5.695,50	24	75,46	15	75,46	9	-	-	-	-	-	75,46
		Jumlah	102	12.488,98	215	5.546,76	168	4.012,04	45	1.534,72	2	-	-	-	4.020,99
227	Prov. D.I. Yogyakarta	2008	32	47,78	59	47,78	57	47,78	-	-	2	-	-	-	47,78
		2009	39	18.576,10	52	18.576,10	52	18.576,10	-	-	-	-	-	-	18.551,97
		2010	34	3.360,24	69	3.360,23	65	2.382,00	4	976,23	-	-	-	-	2.063,18
		2011	40	2.166,89	72	2.166,89	42	1.287,07	30	879,82	-	-	-	-	151,55
		2012	44	916,18	81	152,06	26	112,66	17	36,58	38	2,82	-	-	112,66
		Jumlah	189	25.067,19	333	24.303,06	242	22.405,61	51	1.894,63	40	2,82	-	-	20.927,14
228	Kab. Bantul	2008	42	638,58	76	638,58	76	638,58	-	-	-	-	-	-	638,58
		2009	20	3.612,00	23	3.611,99	17	2.018,33	4	1.593,66	2	-	-	-	2.018,33
		2010	53	3.213,74	75	2.771,25	70	1.962,25	3	-	-	-	2	815,00	1.962,25
		2011	32	1.879,88	66	1.879,87	60	390,40	6	1.489,47	-	-	-	-	390,40
		2012	12	1.902,35	20	633,74	12	632,83	8	0,91	-	-	-	-	632,83
		Jumlah	159	11.246,55	260	9.541,43	235	5.642,39	21	3.084,04	2	-	-	2	815,00
229	Kab. Gunung Kidul	2008	42	1.518,40	94	894,05	92	894,05	2	-	-	-	-	-	894,05
		2009	10	49,78	19	49,78	16	49,78	2	-	1	-	-	-	49,78
		2010	22	587,16	44	587,16	33	373,33	11	213,83	-	-	-	-	373,33
		2011	19	1.084,61	35	1.084,60	18	979,96	17	104,64	-	-	-	-	758,68
		2012	43	1.859,13	102	243,14	28	6,50	40	3,88	34	232,76	-	-	6,50
		Jumlah	136	5.099,08	294	2.858,73	187	2.303,62	72	322,35	35	232,76	-	-	2.082,34
230	Kab. Kulon Progo	2008	16	72,16	20	72,16	20	72,16	-	-	-	-	-	-	119,72
		2009	6	884.817,96	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	-	-	712,03
		2010	10	816,49	21	802,63	18	802,63	3	-	-	-	-	-	802,63
		2011	57	307,38	91	93,60	72	93,60	18	-	1	-	-	-	250,38
		2012	27	389,65	46	161,03	2	43,33	8	74,91	36	42,79	-	-	43,33
		Jumlah	116	886.403,64	194	1.841,45	128	1.723,75	29	74,91	37	42,79	-	-	1.928,09
231	Kab. Sleman	2008	28	3.507,83	67	3.507,83	67	3.507,83	-	-	-	-	-	-	3.507,83
		2009	36	22.602,85	53	22.602,84	51	22.478,93	2	123,91	-	-	-	-	22.478,93
		2010	41	172,92	72	172,92	70	46,27	2	126,65	-	-	-	-	46,27

Halaman 44 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	31	178,80	56	14,58	55	14,58	1	-	-	-	-	-	-	0,21
		2012	35	962,41	62	176,12	44	176,12	4	-	14	-	-	-	-	338,22
		Jumlah	171	27.424,81	310	26.474,29	287	26.223,73	9	250,56	14	-	-	-	-	26.371,46
232	Kota Yogyakarta	2008	12	1.212,46	21	1.212,46	20	1.200,16	1	12,30	-	-	-	-	-	1.200,16
		2009	33	41.460,43	45	41.460,43	39	19.389,34	6	22.071,09	-	-	-	-	-	-
		2010	40	1.081,10	85	1.048,67	76	29,17	9	1.019,50	-	-	-	-	-	29,17
		2011	28	10.399,94	45	6.138,54	27	187,47	16	2.304,31	2	3.646,76	-	-	-	187,47
		2012	36	218,30	60	173,71	10	4,54	21	169,17	29	-	-	-	-	4,54
		Jumlah	149	54.372,23	256	50.033,81	172	20.810,68	53	25.576,37	31	3.646,76	-	-	-	1.421,34
233	Prov. Jawa Timur	2008	104	7.374,66	157	855,94	99	855,94	5	-	-	-	-	-	-	875,08
		2009	47	3.295,77	76	651,50	71	651,50	5	-	-	-	-	-	-	711,18
		2010	47	24.917,84	77	17.287,79	68	16.984,21	9	303,58	-	-	-	-	-	23.836,85
		2011	89	6.592,59	181	4.231,06	120	3.536,75	59	694,31	2	-	-	-	-	3.539,79
		2012	28	73.701,70	63	1.916,87	46	1.916,87	17	-	-	-	-	-	-	1.916,87
		Jumlah	315	115.882,56	554	24.943,16	404	23.945,27	95	997,89	55	-	-	-	-	30.879,77
234	Kab. Bangkalan	2008	41	1.023,32	74	664,42	74	664,42	-	-	-	-	-	-	-	846,34
		2009	23	112,50	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	-	-	-	112,50
		2010	23	734,18	39	66,42	39	66,42	-	-	-	-	-	-	-	582,61
		2011	10	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	101	1.870,00	193	843,34	193	843,34	-	-	-	-	-	-	-	1.541,45
235	Kab. Banyuwangi	2008	97	5.782,90	192	4.693,48	169	2.024,04	18	2.656,15	5	11,29	-	-	-	2.329,96
		2009	22	4.719,64	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	-	-	-	17,59
		2010	50	921,36	111	910,55	109	773,04	2	137,51	-	-	-	-	-	783,85
		2011	30	10.576,31	105	1.079,93	75	555,49	28	524,44	2	-	-	-	-	562,43
		2012	16	1.056,11	32	846,04	21	-	10	846,04	1	-	-	-	-	-
		Jumlah	215	23.056,32	468	7.547,59	401	3.370,16	59	4.166,14	8	11,29	-	-	-	3.693,83
236	Kab. Blitar	2008	50	2.200,62	80	131,81	75	131,81	5	-	-	-	-	-	-	670,33
		2009	35	4.609,49	52	2.275,55	47	1.249,00	5	1.026,55	-	-	-	-	-	1.806,54
		2010	41	1.890,82	89	584,08	70	497,32	14	86,76	5	-	-	-	-	2.032,93
		2011	36	5.213,26	80	3.990,10	72	3.990,10	8	-	-	-	-	-	-	3.990,10
		2012	35	948,58	87	498,57	40	474,45	45	24,12	2	-	-	-	-	474,45
		Jumlah	197	14.862,77	388	7.480,11	304	6.342,68	77	1.137,43	7	-	-	-	-	8.974,35

Halaman 45 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
237	Kab. Bojonegoro	2008	57	7.360,13	82	7.109,34	80	1.098,96	2	6.010,38	10	11	12	13	14	15	16	
		2009	54	40.591,28	98	5.355,42	92	2.070,32	6	3.285,10	6	-	-	-	-	-	-	1.098,96
		2010	31	11.008,36	67	1.616,95	62	1.187,44	5	429,51	5	-	-	-	-	-	-	2.106,22
		2011	29	1.274,87	67	420,60	64	420,60	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1.900,86
		2012	13	25.579,38	33	1.468,85	21	759,44	12	709,44	12	-	-	-	-	-	-	662,91
		Jumlah	184	85.814,02	347	15.971,16	319	5.536,73	28	10.434,43	28	-	-	-	-	-	-	6.226,78
238	Kab. Bondowoso	2008	60	2.511,57	96	1.110,87	95	1.110,87	1	-	1	-	-	-	-	-	-	960,52
		2009	40	10.810,03	52	1.170,12	52	1.170,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,68
		2010	27	627,87	60	-	59	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	308,98
		2011	32	3.811,10	76	2.157,38	64	127,88	11	2.029,50	11	-	1	-	-	-	-	150,42
		2012	29	11.089,33	59	398,59	30	398,59	29	-	-	-	-	-	-	-	-	730,98
		Jumlah	188	28.849,90	343	4.836,96	300	2.807,46	42	2.029,50	42	-	1	-	-	-	-	2.390,58
239	Kab. Gresik	2008	48	801,34	84	463,05	80	463,05	3	-	3	-	1	-	-	-	-	703,56
		2009	17	276,77	37	276,77	30	201,77	4	75,00	4	-	3	-	-	-	-	201,77
		2010	20	4.592,09	43	4.336,77	38	4.261,73	5	75,04	5	-	-	-	-	-	-	4.438,44
			-	USD 126,50	-	USD 126,50	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	-	-	-	USD 121,85
		2011	36	3.528,50	88	3.526,50	66	2.904,97	21	621,53	21	-	1	-	-	-	-	3.106,87
		2012	12	454,84	31	454,84	18	419,84	13	35,00	13	-	-	-	-	-	-	420,12
		Jumlah	133	9.654	283	9.057,93	232	8.251,36	46	806,57	46	-	5	-	-	-	-	8.870,76
			-	USD 126,50	-	USD 126,50	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	-	-	-	USD 121,85
240	Kab. Jember	2008	87	32.644,71	176	29.660,78	161	10.184,65	15	19.476,13	15	-	-	-	-	-	-	10.953,10
		2009	39	8.511,14	107	7.649,51	60	936,27	46	6.713,24	46	-	1	-	-	-	-	936,27
		2010	46	796,11	106	382,35	92	205,99	13	101,87	13	-	1	74,49	-	-	-	502,63
		2011	25	6.456,43	58	182,56	41	7,93	17	174,63	17	-	-	-	-	-	-	88,16
		2012	14	149,80	24	149,80	12	112,63	12	37,17	12	-	-	-	-	-	-	112,63
		Jumlah	211	48.558,19	471	38.025,00	366	11.447,47	103	26.503,04	103	-	2	74,49	-	-	-	12.592,79
241	Kab. Jombang	2008	39	129,84	49	129,84	49	129,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,84
		2009	36	614,87	63	315,96	60	178,61	3	137,35	3	-	-	-	-	-	-	191,95
		2010	23	50,17	35	10,73	35	10,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,73
		2011	25	7.703,24	62	3.471,61	49	1.089,35	13	2.382,26	13	-	-	-	-	-	-	1.097,31
		2012	31	107,04	71	-	46	-	25	-	25	-	-	-	-	-	-	13,12
		Jumlah	154	8.605,16	280	3.928,14	239	1.408,53	41	2.519,61	41	-	-	-	-	-	-	1.442,95

Halaman 46 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
242	Kab. Kediri	2008	67	2.749,90	98	691,25	98	691,25	-	-	-	-	-	-	-	691,25
		2009	44	3.217,22	69	96,54	69	96,54	-	-	-	-	-	-	-	1.955,81
		2010	41	2.106,42	56	1.909,35	52	1.284,38	4	624,97	-	-	-	-	-	1.384,38
		2011	16	1.925,74	52	1.911,66	52	1.911,66	-	-	-	-	-	-	-	1.911,66
		2012	35	322,85	68	322,85	43	322,85	25	-	-	-	-	-	-	322,85
		Jumlah	203	10.322,13	343	4.931,65	314	4.306,68	29	624,97	-	-	-	-	-	6.265,95
243	Kab. Lamongan	2008	53	5.729,58	90	5.621,47	87	5.621,47	3	-	-	-	-	-	-	5.621,47
		2009	17	155,18	33	155,18	30	155,18	3	-	-	-	-	-	-	155,18
		2010	9	2.314,93	17	530,19	14	530,19	3	-	-	-	-	-	-	530,19
		2011	11	758,72	21	758,71	15	581,45	4	177,26	2	-	-	-	-	581,45
		2012	30	1.991,25	63	331,84	45	331,84	18	-	-	-	-	-	-	20,63
		Jumlah	120	10.949,66	224	7.397,39	191	7.220,13	31	177,26	2	-	-	-	-	6.908,92
244	Kab. Lumajang	2008	56	242,88	78	166,96	77	166,96	-	-	-	-	-	-	-	242,88
		2009	41	1.750,50	97	1.750,50	93	1.750,50	4	1.556,46	-	-	-	-	-	194,04
		2010	35	1.148,98	99	680,37	88	233,63	11	446,74	-	-	-	-	-	714,13
		2011	34	1.017,47	88	1.017,46	74	865,10	14	152,36	-	-	-	-	-	865,10
		2012	34	1.457,58	93	1.413,40	40	1.174,75	15	238,65	38	-	-	-	-	1.218,92
		Jumlah	200	5.617,41	455	5.028,69	372	2.634,48	44	2.394,21	39	-	-	-	-	3.235,07
245	Kab. Madiun	2008	57	1.358,51	94	212,82	94	212,82	-	-	-	-	-	-	-	212,82
		2009	28	241,50	47	241,50	46	241,50	1	-	-	-	-	-	-	253,36
		2010	35	2.044,35	64	506,65	63	471,80	1	34,85	-	-	-	-	-	471,80
		2011	26	8.986,11	58	7.584,36	47	7.517,49	11	66,87	-	-	-	-	-	7.971,09
		2012	15	10.914,56	39	1.747,24	19	201,50	20	1.545,74	-	-	-	-	-	201,50
		Jumlah	161	23.545,03	302	10.292,57	269	8.645,11	33	1.647,46	-	-	-	-	-	9.110,57
246	Kab. Magetan	2008	51	1.316,65	75	762,89	74	656,82	1	106,07	-	-	-	-	-	656,82
		2009	34	716,32	54	339,20	50	297,96	4	41,24	-	-	-	-	-	297,96
		2010	21	6.121,23	44	4.896,88	35	3.159,46	9	1.737,42	-	-	-	-	-	3.178,27
		2011	17	2.231,28	40	418,42	32	60,83	5	82,59	3	275,00	-	-	-	60,83
		2012	24	82,70	71	82,70	23	34,70	48	48,00	-	-	-	-	-	34,70
		Jumlah	147	10.468,18	284	6.500,09	214	4.209,77	67	2.015,32	3	275,00	-	-	-	4.228,58
247	Kab. Malang	2008	101	8.579,80	160	3.760,38	159	3.754,52	1	5,86	-	-	-	-	-	3.876,11
		2009	41	2.004,75	84	1.094,51	83	902,57	1	191,94	-	-	-	-	-	909,44
		2010	38	2.688,34	72	88,52	70	88,52	2	-	-	-	-	-	-	1.970,26

Halaman 47 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	47	2.820,75	101	228,62	98	228,62	3	-	-	-	-	-	228,62
		2012	33	197,61	66	142,01	41	142,01	25	-	-	-	-	-	132,21
		Jumlah	260	16.291,25	483	5.314,04	451	5.116,24	32	197,80	-	-	-	-	7.116,64
248	Kab. Mojokerto	2008	70	4.625,39	133	2.388,94	133	2.388,94	-	-	-	-	-	-	2.381,45
		2009	49	869,43	92	308,36	91	149,56	1	158,80	-	-	-	-	163,63
		2010	27	3.465,12	50	221,01	49	221,01	1	-	-	-	-	-	381,74
		2011	44	4.549,23	120	2.016,09	99	951,37	21	1.064,72	-	-	-	-	1.127,12
		2012	33	39.888,62	80	39.888,61	16	1.411,15	15	37.787,86	49	689,60	-	-	1.411,15
		Jumlah	223	53.397,79	475	44.823,01	388	5.122,03	38	39.011,38	49	689,60	-	-	5.465,09
249	Kab. Nganjuk	2008	25	14,46	38	14,46	36	14,46	2	-	-	-	-	-	14,46
		2009	42	881,58	67	881,58	60	728,53	7	153,05	-	-	-	-	728,53
		2010	29	1.269,14	56	1.197,74	42	997,62	14	200,12	-	-	-	-	997,62
		2011	24	295,59	56	295,59	36	295,59	20	-	-	-	-	-	295,59
		2012	10	210,60	28	210,60	14	210,60	14	-	-	-	-	-	210,60
		Jumlah	130	2.671,37	245	2.599,97	188	2.246,80	57	353,17	-	-	-	-	2.246,80
250	Kab. Ngawi	2008	53	5.097,86	71	2.381,05	48	1.903,41	23	477,64	-	-	-	-	1.903,41
		2009	19	2.828,29	30	588,91	26	588,91	4	-	-	-	-	-	588,91
		2010	16	1.046,93	38	1.040,67	18	703,33	13	192,52	7	144,82	-	-	703,33
		2011	25	2.446,70	65	1.045,83	41	269,44	21	776,39	3	-	-	-	269,44
		2012	28	3.072,38	71	1.052,44	10	329,41	51	329,41	10	276,32	-	-	446,71
		Jumlah	141	14.492,16	275	6.108,90	143	3.911,80	112	1.775,96	20	421,14	-	-	3.911,80
251	Kab. Pacitan	2008	34	1.927,39	55	462,28	54	370,87	1	91,41	-	-	-	-	669,55
		2009	17	428,44	22	428,44	22	428,44	-	-	-	-	-	-	428,44
		2010	33	1.856,08	46	1.840,42	46	1.840,42	-	-	-	-	-	-	1.840,42
		2011	31	161,09	67	62,62	60	9,00	7	53,62	-	-	-	-	9,00
		2012	6	-	20	-	13	-	7	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	121	4.375,00	210	2.793,76	195	2.648,73	15	145,03	-	-	-	-	2.947,41
252	Kab. Pamekasan	2008	41	2.961,62	62	2.839,04	43	2.587,94	10	251,10	9	-	-	-	2.609,10
		2009	34	2.394,18	64	2.384,98	56	1.949,51	8	435,47	-	-	-	-	1.958,71
		2010	14	3.369,52	31	3.024,52	27	864,90	4	2.159,62	-	-	-	-	1.209,90
		2011	12	666,76	24	666,76	22	665,37	2	1,39	-	-	-	-	665,37
		2012	23	148,66	53	148,66	19	148,66	29	-	5	-	-	-	148,66
		Jumlah	124	9.540,74	234	9.063,96	167	6.216,38	53	2.847,58	14	-	-	-	6.591,74

Halaman 48 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
253	Kab. Pasuruan	2008	103	58.149,20	195	35.019,57	190	6.342,13	5	28.677,44	-	-	-	-	6.344,71
		2009	28	989,79	62	736,21	62	736,21	-	-	-	-	-	-	745,80
		2010	31	574,75	61	48,13	61	48,13	-	-	-	-	-	-	305,14
		2011	31	1.624,23	82	1.624,23	75	1.037,97	7	586,26	-	-	-	-	1.037,97
		2012	26	5.111,66	73	332,40	67	314,16	6	18,24	-	-	-	-	378,07
		Jumlah	219	66.449,63	473	37.760,54	455	8.478,60	18	29.281,94	-	-	-	-	8.811,69
254	Kab. Ponorogo	2008	58	1.253,00	92	1.253,00	92	1.253,00	-	-	-	-	-	-	1.253,00
		2009	29	285,37	56	273,43	55	230,63	1	42,80	-	-	-	-	230,63
		2010	43	6.239,05	86	6.065,15	66	6.065,15	20	-	-	-	-	-	6.065,15
		2011	23	3.651,70	46	3.421,77	27	1.688,82	19	1.732,95	-	-	-	-	1.821,36
		2012	8	1.172,54	19	931,06	14	220,36	5	710,70	-	-	-	-	461,84
		Jumlah	161	12.601,66	299	11.944,41	254	9.457,96	45	2.486,45	-	-	-	-	9.831,98
255	Kab. Probolinggo	2008	47	2.705,22	86	1.439,49	72	140,63	13	1.298,86	1	-	-	-	221,49
		2009	25	173,01	36	130,53	31	106,04	5	24,49	-	-	-	-	148,51
		2010	25	1.157,91	50	3,75	42	-	8	3,75	-	-	-	-	938,53
		2011	35	10.496,86	84	229,18	80	229,18	4	-	-	-	-	-	229,18
		2012	14	370,82	48	296,24	38	296,24	9	-	1	-	-	-	296,24
		Jumlah	146	14.903,82	304	2.099,19	263	772,09	39	1.327,10	2	-	-	-	1.833,95
256	Kab. Sampang	2008	40	7.335,05	74	1.440,00	70	1.053,83	4	386,17	-	-	-	-	1.053,83
		2009	17	2.647,80	41	2.577,64	40	2.577,64	1	-	-	-	-	-	2.665,55
		2010	29	1.245,66	48	419,94	44	288,44	4	131,50	-	-	-	-	656,55
		2011	15	587,32	36	587,32	32	275,45	4	311,87	-	-	-	-	275,45
		2012	10	289,88	27	289,87	11	222,89	15	66,98	1	-	-	-	222,89
		Jumlah	111	12.105,71	226	5.314,77	197	4.418,25	28	896,52	1	-	-	-	4.874,27
257	Kab. Sidoarjo	2008	64	2.556,90	99	1.695,36	98	1.695,36	1	-	-	-	-	-	2.556,90
		2009	31	8.953,17	52	4.999,03	50	4.999,03	2	-	-	-	-	-	4.999,03
		2010	35	3.494,88	83	2.821,39	74	163,88	9	2.657,51	-	-	-	-	3.060,31
		2011	41	3.027,02	95	3.027,02	84	452,54	11	2.574,48	-	-	-	-	452,54
		2012	14	839,07	38	839,07	32	839,07	6	-	-	-	-	-	839,07
		Jumlah	185	18.871,04	367	13.381,87	338	8.149,88	29	5.231,99	-	-	-	-	11.907,85
258	Kab. Situbondo	2008	72	48.299,26	122	45.943,28	121	2.314,93	1	43.628,35	-	-	-	-	3.056,14
		2009	37	4.632,21	75	1.039,31	56	227,38	19	811,93	-	-	-	-	461,56
		2010	30	4.233,27	82	52,71	77	52,71	5	-	-	-	-	-	513,15

Halaman 49 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	36	497,79	87	484,68	67	407,11	18	77,57	2	-	-	-	407,11
		2012	22	118,98	84	82,91	50	69,96	34	12,95	-	-	-	-	153,89
		Jumlah	197	57.781,51	450	47.602,89	371	3.072,09	77	44.530,80	2	-	-	-	4.591,85
259	Kab. Sumenep	2008	33	1.660,01	51	473,25	33	294,28	14	178,97	4	-	-	-	296,10
		2009	15	409,79	25	409,79	21	159,83	4	249,96	-	-	-	-	159,83
		2010	24	17.347,11	47	17.314,28	36	17.155,71	9	127,80	2	30,77	-	-	17.188,53
		2011	9	0,33	22	0,33	14	0,33	8	-	-	-	-	-	0,33
		2012	12	833,96	18	833,96	9	-	9	833,96	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	20.251,20	163	19.031,61	113	17.610,15	44	1.390,69	6	30,77	-	-	17.644,79
260	Kab. Trenggalek	2008	51	2.389,92	89	1.371,78	87	871,78	2	500,00	-	-	-	-	871,78
		2009	21	180,33	34	180,32	31	47,24	3	133,08	-	-	-	-	47,24
		2010	50	1.639,28	90	1.639,27	69	461,51	17	1.177,76	4	-	-	-	458,48
		2011	29	107,47	70	107,47	49	107,47	20	-	1	-	-	-	107,47
		2012	20	474,43	51	196,99	24	17,43	27	179,56	-	-	-	-	17,43
		Jumlah	171	4.791,43	334	3.495,83	260	1.505,43	69	1.990,40	5	-	-	-	1.502,40
261	Kab. Tuban	2008	33	2.012,43	55	1.119,43	55	1.119,43	-	-	-	-	-	-	1.231,69
		2009	41	213,36	57	101,34	56	73,62	1	27,72	-	-	-	-	73,62
		2010	27	8.462,09	58	3.543,18	57	2.977,81	1	565,37	-	-	-	-	5.563,61
		2011	16	1.377,40	42	1.163,13	37	921,65	5	241,48	-	-	-	-	921,65
		2012	22	17.204,60	59	620,55	25	-	23	620,55	11	-	-	-	-
		Jumlah	139	29.269,88	271	6.547,63	230	5.092,51	30	1.455,12	11	-	-	-	7.790,57
262	Kab. Tulungagung	2008	48	2.079,00	89	1.739,92	89	1.739,92	-	-	-	-	-	-	2.079,00
		2009	25	1.822,44	41	1.710,31	41	1.710,31	-	-	-	-	-	-	1.710,31
		2010	37	3.314,27	69	1.018,84	68	1.018,84	1	-	-	-	-	-	1.018,84
		2011	27	396,68	69	396,68	65	396,68	4	-	-	-	-	-	397,53
		2012	40	653,19	104	269,59	65	269,59	3	-	36	-	-	-	439,22
		Jumlah	177	8.265,58	372	5.135,34	328	5.135,34	8	-	36	-	-	-	5.644,90
263	Kota Batu	2008	47	16.005,52	71	15.528,55	53	303,34	18	15.225,21	-	-	-	-	373,18
		2009	32	1.352,81	54	375,59	37	220,00	14	155,59	3	-	-	-	366,31
		2010	40	3.553,04	126	420,57	112	420,57	13	-	1	-	-	-	792,75
		2011	33	26.305,79	103	16.252,25	71	571,81	32	15.680,44	-	-	-	-	571,81
		2012	10	50,86	19	50,86	16	50,86	3	-	-	-	-	-	50,86
		Jumlah	162	47.268,02	373	32.627,82	289	1.566,58	80	31.061,24	4	-	-	-	2.154,91

Halaman 50 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
264	Kota Biltar	2008	53	4.023,07	80	540,44	80	540,44	-	-	-	-	-	-	669,29
		2009	14	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	162,54	53	39,09	53	39,09	-	-	-	-	-	-	39,09
		2011	27	148,15	48	148,15	46	148,15	2	-	-	-	-	-	160,50
		2012	19	307,12	41	37,10	37	37,10	4	-	-	-	-	-	15,98
		Jumlah	149	4.640,88	244	764,78	238	764,78	6	-	-	-	-	-	884,86
265	Kota Kediri	2008	70	4.449,56	103	1.569,67	103	1.569,67	-	-	-	-	-	-	1.990,57
		2009	33	3.774,69	50	2.674,61	45	1.266,80	5	1.407,81	-	-	-	-	1.266,80
		2010	24	3.514,79	48	3.453,38	44	3.453,38	4	-	-	-	-	-	3.453,38
		2011	41	1.497,24	113	245,40	97	245,40	15	-	1	-	-	-	245,40
		2012	24	1.017,26	64	1.017,26	56	883,71	8	133,55	-	-	-	-	883,71
		Jumlah	192	14.253,54	378	8.960,32	345	7.418,96	32	1.541,36	1	-	-	-	7.839,86
266	Kota Madiun	2008	40	3.353,02	57	496,73	54	496,73	3	-	-	-	-	-	496,73
		2009	33	1.857,48	58	738,24	57	611,17	1	127,07	-	-	-	-	611,17
		2010	18	1.829,99	38	1.790,90	38	1.790,90	-	-	-	-	-	-	1.824,55
		2011	24	1.985,28	57	193,31	41	193,31	16	-	-	-	-	-	193,31
		2012	7	-	16	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	9.025,77	226	3.219,18	197	3.092,11	29	127,07	-	-	-	-	3.125,76
267	Kota Malang	2008	52	532,81	67	367,59	67	367,59	-	-	-	-	-	-	396,17
		2009	30	394,39	37	1,44	33	1,44	4	-	-	-	-	-	52,05
		2010	31	1.332,16	46	6,97	46	6,97	-	-	-	-	-	-	1.057,18
		2011	30	1.641,08	91	904,29	72	904,29	19	-	-	-	-	-	904,29
		2012	14	2.678,06	34	2.606,49	33	2.606,49	1	-	-	-	-	-	2.606,49
		Jumlah	157	6.578,50	275	3.886,78	251	3.886,78	24	-	-	-	-	-	5.016,18
268	Kota Mojokerto	2008	46	16.105,60	81	1.725,56	74	1.725,56	3	-	4	-	-	-	1.740,64
		2009	41	8.272,28	68	319,64	65	319,64	3	-	-	-	-	-	338,34
		2010	28	849,55	58	820,70	57	820,70	1	-	-	-	-	-	820,70
		2011	12	-	22	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	8	204,43	20	21,95	20	21,95	-	-	-	-	-	-	224,89
		Jumlah	135	25.431,86	249	2.887,85	236	2.887,85	9	-	4	-	-	-	3.124,57
269	Kota Pasuruan	2008	73	3.722,85	114	585,71	110	366,52	3	219,19	1	-	-	-	494,00
		2009	44	8.905,59	100	6.022,73	77	4.671,09	23	1.351,64	-	-	-	-	4.926,09
		2010	31	309,17	64	261,00	54	92,27	10	168,73	-	-	-	-	140,43

Halaman 51 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	40	4.507,45	106	2.598,62	82	1.500,73	24	1.097,89	-	-	-	-	1.507,57
		2012	25	11.600,65	75	100,06	56	100,06	18	-	1	-	-	-	105,91
		Jumlah	213	29.045,71	459	9.568,12	379	6.730,67	78	2.837,45	2	-	-	-	7.174,00
270	Kota Probolinggo	2008	37	2.559,79	58	2.251,52	58	2.251,52	-	-	-	-	-	-	2.251,52
		2009	30	2.888,25	48	2.739,04	45	2.739,04	3	-	-	-	-	-	2.739,04
		2010	27	515,12	75	425,31	63	424,79	12	0,52	-	-	-	-	456,62
		2011	24	451,96	57	451,96	44	451,96	13	328,70	-	-	-	-	123,26
		2012	26	284,76	60	284,76	49	284,76	11	-	-	-	-	-	284,76
		Jumlah	144	6.699,88	298	6.152,59	259	5.823,37	39	329,22	-	-	-	-	5.869,60
271	Kota Surabaya	2008	62	1.276,27	126	190,53	123	190,53	3	-	-	-	-	-	1.262,94
		2009	43	1.269,42	73	698,05	54	575,50	15	122,55	4	-	-	-	1.152,98
		2010	80	5.762,96	173	3.781,81	103	1.356,07	68	2.425,74	2	-	-	-	3.458,26
		2011	22	75.942,07	49	2.036,42	36	1.896,42	12	140,00	1	-	-	-	1.896,42
		2012	12	21.822,90	28	3.637,18	10	2.380,76	18	1.256,42	-	-	-	-	2.380,76
		Jumlah	219	106.073,62	449	10.343,99	326	6.399,28	116	3.944,71	7	-	-	-	10.151,36
272	BPWS	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	2.180,46	31	1.589,53	28	708,92	3	880,61	-	-	-	-	718,48
		Jumlah	10	2.180,46	31	1.589,53	28	708,92	3	880,61	-	-	-	-	718,48
273	Prov. Banten	2008	29	360,29	66	331,95	49	326,07	2	-	15	5,88	-	-	354,41
		2009	61	17.040,45	141	16.199,61	81	10.572,12	46	5.627,49	14	-	-	-	11.412,96
		2010	23	6.579,92	46	6.473,34	30	6.444,86	4	-	12	28,48	-	-	6.551,44
		2011	31	4.654,72	55	3.643,82	36	3.050,86	9	592,96	10	-	-	-	4.113,17
		2012	46	8.827,55	91	6.709,97	33	2.761,35	10	-	48	3.948,62	-	-	3.016,65
		Jumlah	190	37.462,93	399	33.358,69	229	23.155,26	71	6.220,45	99	3.982,98	-	-	25.448,63
274	Kab. Lebak	2008	38	950,64	68	911,62	49	311,34	11	581,84	4	18,44	4	-	311,34
		2009	16	1.154,38	45	1.154,38	42	888,53	2	265,85	-	-	1	-	888,53
		2010	27	1.968,96	56	1.865,10	49	1.487,56	7	377,54	-	-	-	-	1.546,22
		2011	32	1.692,42	50	1.501,55	40	774,48	5	727,07	5	-	-	-	965,35
		2012	53	14.126,44	103	14.020,14	29	714,44	8	13.234,64	66	71,06	-	-	712,27
		Jumlah	166	19.892,84	322	19.452,79	209	4.176,35	33	15.186,94	75	89,50	5	-	4.423,71

Halaman 52 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
275	Kab. Pandeglang	2008	25	2.893,34	49	2.869,33	10	802,77	38	2.066,56	1	-	-	-	808,82
		2009	42	327,41	75	323,09	33	105,37	23	112,90	19	104,82	-	-	109,69
		2010	24	417,21	51	363,77	24	6,02	26	357,75	1	-	-	-	59,45
		2011	35	1.541,49	48	818,71	12	137,30	9	254,65	27	426,76	-	-	806,57
		2012	26	5.210,68	53	5.000,74	33	965,58	15	1.829,89	5	2.205,27	-	-	965,58
		Jumlah	152	10.390,13	276	9.375,64	112	2.017,04	111	4.621,75	53	2.736,85	-	-	2.750,11
276	Kab. Serang	2008	42	2.060,37	82	1.993,81	64	982,98	18	1.010,83	-	-	-	-	1.001,25
		2009	31	2.325,02	68	1.985,74	36	500,82	29	329,22	3	1.155,70	-	-	473,50
		2010	43	906,94	94	856,28	32	30,01	23	826,27	39	-	-	-	28,01
		2011	26	1.684,79	42	1.651,08	19	289,11	12	1.214,70	11	147,27	-	-	423,03
		2012	31	4.393,52	64	4.392,24	23	1.256,04	38	3.073,80	3	62,40	-	-	1.144,33
		Jumlah	173	11.370,64	350	10.879,15	174	3.058,96	120	6.454,82	56	1.365,37	-	-	3.070,12
277	Kab. Tangerang	2008	85	57.310,26	159	3.886,13	145	3.722,90	14	163,23	-	-	-	-	4.643,39
		2009	52	7.196,53	108	5.732,68	88	3.973,09	12	1.759,59	8	-	-	-	5.060,34
		2010	15	49,71	28	49,71	25	49,71	3	-	-	-	-	-	49,71
		2011	41	2.895,38	70	2.481,77	42	1.979,62	28	502,15	-	-	-	-	2.381,27
		2012	27	2.823,67	46	1.942,58	35	1.794,75	10	147,83	1	-	-	-	1.794,75
		Jumlah	220	70.275,55	411	14.092,87	335	11.520,07	67	2.572,80	9	-	-	-	13.929,46
278	Kota Cillegon	2008	35	1.817,23	77	1.637,69	67	1.416,30	8	221,39	-	-	2	-	1.493,22
		2009	22	1.277,64	39	1.233,34	38	1.233,34	1	-	-	-	-	-	1.228,25
		2010	22	4.455,05	62	4.455,05	51	4.384,90	9	70,15	-	-	2	-	8.703,73
		2011	37	996,91	50	637,89	43	547,39	6	90,50	-	-	1	-	522,67
		2012	30	4.497,30	48	2.745,19	26	2.222,56	22	522,63	-	-	-	-	1.878,29
		Jumlah	146	13.044,13	276	10.709,16	225	9.804,49	46	904,67	-	-	5	-	13.826,16
279	Kota Serang	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	89,03	55	78,30	52	78,30	2	-	1	-	-	-	89,03
		2010	21	261,79	47	248,32	43	208,09	3	40,23	1	-	-	-	233,17
		2011	26	1.814,61	39	1.792,77	30	1.792,77	7	-	2	-	-	-	1.773,07
		2012	27	7.063,56	50	1.809,49	40	643,67	10	1.165,82	-	-	-	-	643,67
		Jumlah	98	9.228,99	191	3.928,88	165	2.722,83	22	1.206,05	4	-	-	-	2.738,94
280	Kota Tangerang	2008	25	837,87	41	4,35	41	4,35	-	-	-	-	-	-	917,51
		2009	50	3.126,69	89	2.045,85	84	1.689,78	5	356,07	-	-	-	-	1.937,74
		2010	13	2.504,92	35	1.319,65	34	550,38	1	769,27	-	-	-	-	1.498,61

Halaman 53 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	37	8.345,99	55	7.465,03	46	7.446,98	8	18,05	1	-	-	-	8.365,49
		2012	36	1.455,02	65	1.150,60	26	651,27	1	199,33	38	300,00	-	-	955,69
		Jumlah	161	16.270,49	285	11.985,48	231	10.342,76	15	1.342,72	39	300,00	-	-	13.675,04
281	Kota Tangerang Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	19	573,00	35	554,10	35	554,10	-	-	-	-	-	-	554,10
		2011	35	1.558,67	58	1.501,12	58	1.501,12	-	-	-	-	-	-	1.436,29
		2012	27	1.834,87	42	1.234,91	31	1.144,07	9	90,84	2	-	-	-	1.478,06
		Jumlah	81	3.966,54	135	3.290,13	124	3.199,29	9	90,84	2	-	-	-	3.468,45
282	Prov. Bali	2008	52	6.391,48	161	6.391,47	149	3.767,73	9	2.623,74	3	-	-	-	3.767,73
		2009	63	16.212,90	142	16.604,94	139	16.526,57	3	78,37	-	-	-	-	15.520,77
		2010	33	3.247,91	79	3.180,62	78	3.180,62	1	-	-	-	-	-	3.115,62
		2011	72	374.836,29	203	14.465,27	163	13.498,75	38	966,52	2	-	-	-	13.498,75
		2012	39	105.630,40	79	20.724,93	61	2.885,90	16	17.839,03	2	-	-	-	2.927,84
		Jumlah	259	506.318,98	664	61.367,23	590	39.859,57	67	21.507,66	7	-	-	-	38.830,71
283	Kab. Badung	2008	27	3.986,45	54	220,19	53	220,19	1	-	-	-	-	-	1.045,45
		2009	28	20.318,09	79	20.318,17	73	8.853,04	6	11.465,13	-	-	-	-	8.853,04
		2010	36	1.459,00	85	990,41	84	990,41	1	-	-	-	-	-	990,41
		2011	47	0,12	88	0,12	64	0,12	24	-	-	-	-	-	0,12
		2012	21	6.590,47	50	736,47	42	683,27	8	53,20	-	-	-	-	1.683,27
		Jumlah	159	32.354,13	356	22.265,36	316	10.747,03	40	11.518,33	-	-	-	-	12.572,29
284	Kab. Bangli	2008	13	304,30	31	304,30	31	304,30	-	-	-	-	-	-	304,30
		2009	55	760,00	108	760,00	87	572,04	20	187,96	1	-	-	-	572,04
		2010	12	280,59	34	280,54	22	376,2	5	242,92	7	-	-	-	376,2
		2011	59	3.340,56	154	1.538,61	81	44,01	66	1.437,42	7	57,18	-	-	44,01
		2012	31	1.964,60	99	381,08	75	253,19	23	16,53	1	111,36	-	-	253,19
		Jumlah	170	6.650,05	426	3.264,53	296	1.211,16	114	1.884,83	16	168,54	-	-	1.211,16
285	Kab. Buleleng	2008	38	2.024,23	71	2.024,23	68	1.946,88	3	77,35	-	-	-	-	1.946,88
		2009	20	153,01	80	153,00	70	34,88	10	34,88	-	-	-	-	118,12
		2010	102	2.478,94	247	608,62	211	341,71	35	266,91	1	-	-	-	797,23
		2011	55	6.327,36	238	5.356,37	146	16,55	86	5.338,16	6	1,66	-	-	16,55
		2012	33	3.286,15	96	2.107,30	41	2.048,13	54	59,17	1	-	-	-	2.048,13
		Jumlah	248	14.269,69	732	10.249,52	536	4.471,39	188	5.776,47	8	1,66	-	-	4.926,91

Halaman 54 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
286	Kab. Gianyar	2008	47	2.950,94	98	1.427,29	94	1.153,61	4	273,68	-	-	-	-	-	1.153,61
		2009	16	53,44	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	-	-	-	53,44
		2010	36	3.456,42	98	2.758,44	75	1.261,05	23	1.497,39	-	-	-	-	-	1.261,05
		2011	46	5.224,20	139	5.098,05	86	510,61	53	4.587,44	-	-	-	-	-	513,20
		2012	28	3.003,93	70	53,16	50	5,21	20	47,95	-	-	-	-	-	5,21
		Jumlah	173	14.688,93	439	9.390,38	339	2.983,92	100	6.406,46	-	-	-	-	-	2.986,51
287	Kab. Jember	2008	23	4.794,92	53	4.602,41	49	3.930,29	4	672,12	-	-	-	-	-	3.930,29
		2009	21	16.572,37	37	15.694,00	30	2.131,29	7	13.562,71	-	-	-	-	-	2.131,29
		2010	44	2.384,54	112	2.251,90	96	603,74	14	1.648,16	2	-	-	-	-	651,82
		2011	44	2.435,55	103	1.681,96	85	226,09	16	1.455,87	2	-	-	-	-	158,34
		2012	15	965,59	30	-	27	-	1	-	2	-	-	-	-	10,96
		Jumlah	147	27.152,97	335	24.230,27	287	6.891,41	42	17.338,86	6	-	-	-	-	6.882,70
288	Kab. Karangasem	2008	24	1.028,51	54	1.028,50	48	1.027,49	6	1,01	-	-	-	-	-	1.027,49
		2009	33	214,70	70	214,69	65	170,17	5	44,52	-	-	-	-	-	170,17
		2010	54	2.437,55	168	1.924,14	159	747,39	6	1.176,75	3	-	-	-	-	1.087,61
		2011	50	3.910,99	175	2.987,77	136	2.000,79	37	986,98	2	-	-	-	-	2.003,12
		2012	24	2.004,04	51	1.481,91	42	11,30	8	1.470,61	1	-	-	-	-	11,30
		Jumlah	185	9.595,79	518	7.637,01	450	3.957,14	62	3.679,87	6	-	-	-	-	4.299,69
289	Kab. Klungkung	2008	20	1.586,95	47	1.586,94	38	378,52	8	1.208,42	1	-	-	-	-	378,52
		2009	16	255,83	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	-	-	-	244,38
		2010	22	894,84	57	768,32	46	573,60	11	194,72	-	-	-	-	-	700,11
		2011	42	3.134,35	131	2.940,26	52	1.665,65	34	1.274,61	45	-	-	-	-	1.788,72
		2012	25	8.600,47	59	267,18	38	24,15	16	219,79	5	23,24	-	-	-	86,17
		Jumlah	125	14.472,44	331	5.768,55	209	2.836,32	71	2.908,99	51	23,24	-	-	-	3.197,90
290	Kab. Tabanan	2008	21	986,22	39	914,22	38	914,22	1	-	-	-	-	-	-	914,22
		2009	20	1.260,21	36	890,23	35	754,17	1	136,06	-	-	-	-	-	754,17
		2010	59	10.732,65	131	2.823,96	122	1.402,07	8	1.059,23	1	362,66	-	-	-	1.410,69
		2011	55	7.543,68	109	36,17	63	31,20	36	4,97	10	-	-	-	-	374,71
		2012	53	10.072,64	146	6.055,05	19	212,72	72	5.602,16	55	240,17	-	-	-	213,46
		Jumlah	208	30.595,40	461	10.719,63	277	3.314,38	118	6.802,42	66	602,83	-	-	-	3.667,25
291	Kota Denpasar	2008	48	17.336,02	123	4.896,45	121	4.896,45	2	-	-	-	-	-	-	4.896,45
		2009	67	21.700,21	135	10.476,17	130	9.516,44	5	959,73	-	-	-	-	-	11.805,77
		2010	39	11.003,88	82	749,88	80	749,88	2	-	-	-	-	-	-	751,08

Halaman 55 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veias)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	33	1.068,67	106	1.013,69	91	773,18	15	240,51	-	-	-	-	-	773,53
		2012	20	6.407,71	37	910,77	35	832,47	2	78,30	-	-	-	-	-	664,51
		Jumlah	207	57.516,49	483	18.046,96	457	16.768,42	26	1.278,54	-	-	-	-	-	18.891,34
292	Prov. Nusa Tenggara Barat	2008	75	10.275,31	160	10.219,23	118	9.806,22	31	147,81	11	265,20	-	-	-	9.806,22
		2009	23	3.908,44	51	3.908,43	20	3.428,85	29	479,58	2	-	-	-	-	3.428,85
		2010	56	9.047,95	112	8.013,23	71	5.645,05	22	2.368,18	18	-	1	-	-	5.645,05
		2011	68	1.691,59	157	1.691,58	113	290,86	40	1.400,72	4	-	-	-	-	290,86
		2012	76	315.233,73	258	4.644,49	201	1.250,57	46	3.153,47	7	-	4	240	-	1.250,57
		Jumlah	298	340.157,02	738	28.476,96	523	20.421,55	168	7.549,76	42	265,20	5	240	-	20.421,55
293	Kab. Bima	2008	8	86,14	15	86,13	13	44,97	2	41,16	-	-	-	-	-	44,97
		2009	14	247,54	23	247,53	18	66,50	5	181,03	-	-	-	-	-	66,50
		2010	15	126,68	27	126,68	16	70,17	8	56,51	3	-	-	-	-	70,17
		2011	26	246,10	48	246,10	30	155,79	9	155,79	9	-	-	-	-	90,31
		2012	25	1.522,92	75	1.522,91	40	146,89	34	1.376,02	1	-	-	-	-	146,89
		Jumlah	88	2.229,38	188	2.229,35	117	418,84	58	1.810,51	13	-	-	-	-	418,84
294	Kab. Dompu	2008	20	658,01	38	658,01	23	240,19	10	407,82	5	10,00	-	-	-	240,19
		2009	34	2.152,15	85	2.152,14	43	223,96	28	1.777,06	14	151,12	-	-	-	223,96
		2010	15	227,66	25	227,65	11	129,36	10	95,97	4	-	-	2	-	129,36
		2011	15	190,31	27	190,31	13	91,29	14	99,02	-	-	-	-	-	91,29
		2012	43	5.072,96	142	5.072,95	76	169,67	11	382,15	55	4.521,13	-	-	-	169,67
		Jumlah	127	8.301,09	317	8.301,06	166	854,47	73	2.762,02	78	4.682,25	-	-	-	854,47
295	Kab. Lombok Barat	2008	17	220,38	39	220,36	28	88,07	9	30,91	2	101,38	-	-	-	88,07
		2009	14	755,07	31	755,07	16	120,70	12	632,95	3	1,42	-	-	-	120,70
		2010	61	1.641,45	113	1.641,44	25	257,01	29	1.293,04	59	91,39	-	-	-	257,01
		2011	49	7.517,53	108	5.958,76	58	-	34	5.646,06	16	-	-	-	-	-
		2012	23	342,84	90	342,84	83	112,10	7	230,74	-	-	-	-	-	112,10
		Jumlah	164	10.477,27	381	8.918,47	210	577,88	91	7.833,70	80	194,19	-	-	-	577,88
296	Kab. Lombok Tengah	2008	32	2.514,14	55	2.514,13	18	73,98	6	2.404,24	31	35,91	-	-	-	73,98
		2009	40	22.051,54	81	21.931,53	54	21.606,70	18	324,83	9	-	-	-	-	21.606,70
		2010	39	3.610,92	89	3.610,91	49	2.756,61	25	854,30	15	-	-	-	-	2.756,61
		2011	63	383,54	107	383,54	7	58,15	19	88,14	81	237,25	-	-	-	58,15
		2012	28	1.990,42	91	1.527,61	32	1.221,44	23	234,50	36	71,67	-	-	-	1.221,44
		Jumlah	202	30.550,56	423	29.967,72	160	25.716,88	91	3.906,01	172	344,83	-	-	-	25.716,88

Halaman 56 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
297	Kab. Lombok Timur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2008	15	600,71	37	600,70	4	185,91	15	384,71	18	30,08	-	-	185,91
		2009	21	523,94	47	523,94	15	121,80	4	332,26	28	69,88	-	-	121,80
		2010	40	69,44	94	69,44	2	-	7	65,47	85	3,97	-	-	-
		2011	37	1.768,77	81	1.768,76	-	309,61	1	8,44	80	1.450,71	-	-	309,61
		2012	25	5.198,41	98	1.071,99	56	4,82	7	66,37	35	1.000,80	-	-	4,82
		Jumlah	138	8.161,27	357	4.034,83	77	622,14	34	857,25	246	2.555,44	-	-	622,14
298	Kab. Sumbawa	2008	16	351,74	27	158,40	22	35,43	5	122,97	-	-	-	-	35,43
		2009	19	1.131,43	39	1.131,43	34	551,90	5	579,53	-	-	-	-	551,90
		2010	13	313,36	22	313,36	19	307,86	3	5,50	-	-	-	-	307,86
		2011	25	10.534,10	33	1.415,55	28	354,54	4	791,55	1	269,46	-	-	354,54
		2012	13	737,32	46	737,31	45	535,59	-	-	1	201,72	-	-	535,59
		Jumlah	86	13.067,95	167	3.756,05	148	1.785,32	17	1.499,55	2	471,18	-	-	1.785,32
299	Kab. Sumbawa Barat	2008	11	196,61	23	196,61	16	60,53	5	136,08	2	-	-	-	60,53
		2009	36	1.227,16	96	867,56	67	648,18	25	219,38	4	-	-	-	648,18
		2010	32	359,46	62	287,46	46	169,44	14	118,02	2	-	-	-	169,44
		2011	26	305,52	52	305,52	14	201,90	37	103,62	1	-	-	-	201,90
		2012	18	400,00	48	400,00	36	200,00	12	200,00	-	-	-	-	200,00
		Jumlah	123	2.488,75	281	2.057,15	179	1.280,05	93	777,10	9	-	-	-	1.280,05
300	Kab. Lombok Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	171,65	26	171,65	22	148,65	4	23,00	-	-	-	-	148,65
		2011	26	825,06	60	825,06	50	556,60	10	268,46	-	-	-	-	556,60
		2012	25	28.117,34	85	1.184,37	59	239,29	8	521,77	18	423,31	-	-	239,29
		Jumlah	63	29.114,05	171	2.181,08	131	944,54	22	813,23	18	423,31	-	-	944,54
301	Kota Bima	2008	31	29.056,67	79	28.672,00	24	9.203,41	31	15.406,43	24	4.062,16	-	-	9.203,41
		2009	16	2.638,43	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-	-	-
		2010	24	1.225,50	46	1.225,49	2	30,40	1	450,06	43	745,03	-	-	30,40
		2011	18	2.253,29	35	2.253,28	8	587,01	3	1.610,41	24	55,86	-	-	587,01
		2012	28	1.065,73	122	727,11	69	193,74	14	376,43	39	156,94	-	-	193,74
		Jumlah	117	36.239,62	316	35.516,31	122	10.014,56	64	20.481,76	130	5.019,99	-	-	10.014,56
302	Kota Mataram	2008	6	39,99	13	39,99	11	39,99	2	-	-	-	-	-	39,99
		2009	16	295,49	31	295,49	30	295,49	1	-	-	-	-	-	295,49
		2010	69	909,19	159	888,78	115	778,74	11	107,89	33	2,15	-	-	778,74

Halaman 57 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	61	308,53	143	308,52	67	154,47	36	129,73	40	24,32	-	-	154,47
		2012	28	651,74	95	651,73	-	0,60	-	-	95	651,13	-	-	0,60
		Jumlah	180	2.204,94	441	2.184,51	223	1.269,29	50	237,62	168	677,60	-	-	1.269,29
303	Prov. Nusa Tenggara Timur	2008	73	27.250,42	130	7.967,29	87	220,20	33	4.754,08	10	2.993,01	-	-	220,20
		2009	56	19.036,00	113	2.164,26	72	541,17	14	1.623,09	27	-	-	-	541,17
		2010	81	9.021,14	154	8.166,85	112	550,67	20	1.037,73	21	6.578,45	1	-	550,67
		2011	66	8.105,05	157	2.508,34	22	597,69	82	1.162,36	53	748,29	-	-	597,69
		2012	20	9.725,93	59	9.123,18	7	-	52	8.110,15	-	1.013,03	-	-	-
		Jumlah	296	73.138,54	613	29.929,92	300	1.909,73	201	16.687,41	111	11.332,78	1	-	1.909,73
304	Kab. Alor	2008	19	9.689,98	43	9.611,31	34	2.713,69	6	6.897,62	3	-	-	-	2.713,69
		2009	27	7.839,41	55	6.109,57	29	1.468,51	21	4.641,06	5	-	-	-	1.468,51
		2010	35	1.160,85	79	527,91	39	252,97	12	248,75	28	26,19	-	-	252,97
		2011	36	5.988,41	88	2.628,13	26	514,02	31	879,38	31	1.234,73	-	-	514,02
		2012	27	1.903,37	79	1.903,36	-	26,24	5	265,88	74	1.611,24	-	-	26,24
		Jumlah	144	26.582,02	344	20.780,28	128	4.975,43	75	12.932,69	141	2.872,16	-	-	4.975,43
305	Kab. Belu	2008	8	513,75	16	513,75	15	509,98	1	3,77	-	-	-	-	509,98
		2009	29	948,74	62	948,73	28	104,54	31	844,19	3	-	-	-	104,54
		2010	56	2.130,84	149	2.084,87	66	1.207,80	53	294,78	30	582,29	-	-	1.207,80
		2011	32	199,86	80	116,61	30	-	13	14,41	37	102,20	-	-	-
		2012	20	6.656,33	41	154,77	32	-	9	154,77	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	10.449,52	348	3.818,73	171	1.822,32	107	1.311,92	70	684,49	-	-	1.822,32
306	Kab. Ende	2008	9	93,17	21	11,26	15	4,56	2	6,70	4	-	-	-	4,56
		2009	15	4.646,86	23	3.680,52	-	10,00	1	2.013,05	22	1.657,47	-	-	10,00
		2010	36	1.320,00	81	920,00	31	31,75	45	888,25	5	-	-	-	31,75
		2011	36	5.300,65	121	4.219,77	34	2.802,34	82	1.417,43	5	-	-	-	2.802,34
		2012	19	2.354,09	65	2.736,75	40	275,83	22	1.449,46	3	1.011,46	-	-	275,83
		Jumlah	115	13.714,77	311	11.568,30	120	3.124,48	152	5.774,89	39	2.668,93	-	-	3.124,48
307	Kab. Flores Timur	2008	16	15.270,45	22	14.841,63	7	462,55	4	986,00	11	13.393,08	-	-	462,55
		2009	21	664,27	49	196,92	22	36,94	16	159,98	11	-	-	-	36,94
		2010	23	12.393,86	56	1.205,12	19	67,37	31	1.137,75	6	-	-	-	67,37
		2011	23	2.069,89	49	1.712,98	-	-	-	-	49	1.712,98	-	-	-
		2012	22	1.620,94	61	662,38	31	62,30	27	600,08	3	-	-	-	62,30
		Jumlah	105	32.019,41	237	18.619,03	79	629,16	78	2.883,81	80	15.106,06	-	-	629,16

Halaman 58 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308	Kab. Kupang	2008	29	2.856,34	46	466,63	39	339,64	4	126,99	3	-	-	-	339,64
		2009	47	792,18	114	792,17	17	29,07	27	730,99	70	32,11	-	-	29,07
		2010	36	565,80	75	565,79	29	5,37	22	525,73	24	34,69	-	-	5,37
		2011	33	2.740,38	95	2.588,16	9	-	15	945,63	71	1.642,53	-	-	-
		2012	20	6.945,23	48	6.945,23	-	-	1	1.101,80	47	5.843,43	-	-	-
		Jumlah	165	13.899,93	378	11.357,98	94	374,08	69	3.431,14	215	7.552,76	-	-	374,08
309	Kab. Lembata	2008	11	73,31	23	73,30	21	31,94	1	41,36	1	-	-	-	31,94
		2009	14	1.340,31	23	1.340,31	17	-	6	1.340,31	-	-	-	-	-
		2010	41	6.052,90	113	4.104,84	49	681,43	57	3.423,41	7	-	-	-	681,43
		2011	24	6.956,47	46	1.276,41	6	41,61	22	869,27	18	365,53	-	-	41,61
		2012	18	7.004,41	54	1.247,55	2	-	26	1.020,39	6	227,16	-	-	-
		Jumlah	108	21.427,40	259	8.042,41	115	754,98	112	6.694,74	32	592,69	-	-	754,98
310	Kab. Manggarai	2008	14	953,41	29	953,41	26	953,41	1	-	2	-	-	-	953,41
		2009	33	1.088,75	83	1.088,74	60	178,38	17	520,36	5	390,00	1	-	178,38
		2010	18	2.858,89	42	2.543,10	37	408,89	4	-	-	-	1	2.134	408,89
		2011	21	885,98	57	466,96	19	103,74	15	310,98	23	52,24	-	-	103,74
		2012	21	6.351,70	79	721,52	51	61,99	26	659,53	2	-	-	-	61,99
		Jumlah	107	12.138,73	290	5.773,73	193	1.706,41	63	1.490,87	32	442,24	2	2.134	1.706,41
311	Kab. Manggarai Barat	2008	24	3.135,91	56	3.135,91	37	672,32	15	2.455,07	4	8,52	-	-	672,32
		2009	28	1.016,14	53	1.016,13	50	410,20	3	605,93	-	-	-	-	410,20
		2010	27	1.746,04	49	1.746,03	34	205,85	8	712,17	7	828,01	-	-	205,85
		2011	34	4.087,69	81	655,86	49	107,09	13	548,77	19	-	-	-	107,09
		2012	13	9.093,37	32	2.345,67	16	376,09	13	1.969,58	3	-	-	-	376,09
		Jumlah	126	19.079,15	271	8.899,60	186	1.771,55	52	6.291,52	33	836,53	-	-	1.771,55
312	Kab. Manggarai Timur	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	4.525,30	93	4.525,30	42	80,50	33	4.369,80	18	75,00	-	-	80,50
		2011	35	25.675,28	74	8.810,95	15	371,61	26	86,42	33	8.352,92	-	-	371,61
		2012	17	7.980,52	65	13.710,03	47	1.578,40	12	12.131,63	6	-	-	-	1.578,40
		Jumlah	82	38.181,10	232	27.046,28	104	2.030,51	71	16.587,85	57	8.427,92	-	-	2.030,51
313	Kab. Sabu Raijua	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 59 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	18	384,63	39	384,63	25	195,10	6	189,53	8	-	-	-	-	195,10
		2012	14	1.263,43	33	1.263,62	10	443,18	20	820,44	3	-	-	-	-	443,18
		Jumlah	32	1.648,06	72	1.648,25	35	638,28	26	1.009,97	11	-	-	-	-	638,28
314	Kab. Nagekeo	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	917,75	30	159,60	23	56,86	6	102,74	1	-	-	-	-	56,86
		2010	26	3.456,41	47	914,15	15	47,35	24	837,36	8	29,44	-	-	-	47,35
		2011	17	695,04	59	239,60	27	203,05	31	36,55	1	-	-	-	-	203,05
		2012	18	13.565,44	46	683,00	24	-	20	683,00	2	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	18.634,64	182	1.996,35	89	307,26	81	1.659,65	12	29,44	-	-	-	307,26
315	Kab. Ngada	2008	22	1.111,00	43	783,82	35	430,93	7	339,66	1	13,23	-	-	-	430,93
		2009	14	136,22	28	136,22	26	122,17	2	14,05	-	-	-	-	-	122,17
		2010	21	4.414,32	59	4.414,32	37	3.896,80	11	517,52	11	-	-	-	-	3.896,80
		2011	16	826,47	47	826,46	17	9,33	28	817,13	2	-	-	-	-	9,33
		2012	19	27.744,04	65	21.621,30	32	252,75	33	21.368,55	-	-	-	-	-	252,75
		Jumlah	92	34.232,05	242	27.782,12	147	4.711,98	81	23.056,91	14	13,23	-	-	-	4.711,98
316	Kab. Rote Ndao	2008	12	2.288,63	28	2.288,62	6	600,28	8	1.578,09	14	110,25	-	-	-	600,28
		2009	16	1.271,21	28	1.271,20	14	204,16	5	267,75	9	799,29	-	-	-	204,16
		2010	25	11.851,20	54	287,52	32	16,80	15	270,72	7	-	-	-	-	16,80
		2011	42	1.821,56	109	1.145,72	43	-	60	1.134,38	6	11,34	-	-	-	-
		2012	24	68.124,20	72	18.331,13	25	-	39	18.331,13	8	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	85.356,80	291	23.324,19	120	821,24	127	21.582,07	44	920,88	-	-	-	821,24
317	Kab. Sikka	2008	13	2.673,52	25	2.673,52	-	-	-	-	25	2.673,52	-	-	-	-
		2009	25	599,63	46	599,63	13	-	15	-	18	599,63	-	-	-	-
		2010	24	90,11	58	90,11	28	21,40	12	68,70	18	-	-	-	-	21,40
		2011	39	4.414,88	115	4.414,87	41	36,75	40	3.946,35	34	431,77	-	-	-	36,75
		2012	17	7.895,01	37	1.996,41	15	-	22	1.996,41	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	118	15.673,15	281	9.774,53	97	58,15	89	6.011,46	95	3.704,92	-	-	-	58,15
318	Kab. Sumba Barat	2008	7	106,41	12	10,40	9	10,40	3	-	-	-	-	-	-	10,40
		2009	37	1.284,30	85	1.282,58	64	1.029,80	21	252,78	-	-	-	-	-	1.029,80
		2010	36	10.680,09	72	783,93	43	529,90	26	254,03	3	-	-	-	-	529,90
		2011	42	668,07	89	668,06	61	68,07	16	225,32	12	374,67	-	-	-	68,07
		2012	19	4.166,88	60	4.166,88	32	410,77	24	3.756,11	4	-	-	-	-	410,77
		Jumlah	141	16.905,75	318	6.911,85	209	2.048,94	90	4.488,24	19	374,67	-	-	-	2.048,94

Halaman 60 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
319	Kab. Sumba Barat Daya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	51,17	24	25,80	9	25,80	4	-	11	-	-	-	25,80
		2010	22	871,02	45	600,56	36	334,59	4	265,97	5	-	-	-	334,59
		2011	28	46,490,57	61	3,596,74	61	191,08	5	510,30	56	2,895,36	-	-	191,08
		2012	23	469,30	72	436,88	27	388,94	38	20,90	7	27,04	-	-	388,94
		Jumlah	87	47,882,06	202	4,659,98	72	940,41	51	797,17	79	2,922,40	-	-	940,41
320	Kab. Sumba Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	23	5,754,56	46	680,89	24	46,19	18	634,70	4	-	-	-	46,19
		2010	26	7,044,42	62	837,33	31	315,15	29	496,64	2	25,54	-	-	315,15
		2011	18	213,91	50	73,90	24	3,67	24	70,23	2	-	-	-	3,67
		2012	16	277,84	47	157,10	24	30,06	20	7,93	3	119,11	-	-	30,06
		Jumlah	83	13,290,73	205	1,749,22	103	395,07	91	1,209,50	11	144,65	-	-	395,07
321	Kab. Sumba Timur	2008	13	532,97	27	489,32	25	193,64	2	295,68	-	-	-	-	193,64
		2009	66	3,184,90	143	1,559,27	133	1,478,39	10	80,88	-	-	-	-	1,478,39
		2010	38	2,334,38	88	2,334,37	70	2,332,18	13	-	5	-	-	2	2,332,18
		2011	40	1,928,74	112	1,841,53	84	1,269,78	26	538,10	1	-	1	34	1,269,78
		2012	20	56,727,23	58	95,03	51	68,89	7	26,14	-	-	-	-	68,89
		Jumlah	177	64,708,22	428	6,319,52	363	5,342,88	58	940,80	6	-	1	36	5,342,88
322	Kab. Timor Tengah Selatan	2008	35	2,884,60	66	1,325,41	8	140,51	15	331,71	43	853,19	-	-	140,51
		2009	42	2,078,60	73	1,061,24	12	185,02	10	570,48	51	305,74	-	-	185,02
		2010	40	4,121,29	78	619,83	34	18,67	20	383,79	24	217,37	-	-	18,67
		2011	25	39,00	63	39,00	-	-	-	-	63	39,00	-	-	-
		2012	16	34,256,97	40	4,339,70	4	108,77	28	4,230,93	8	-	-	-	108,77
		Jumlah	158	43,380,46	320	7,385,18	58	452,97	73	5,516,91	189	1,415,30	-	-	452,97
323	Kab. Timor Tengah Utara	2008	20	2,182,84	33	809,23	-	-	33	539,91	-	-	-	-	269,32
		2009	15	1,236,75	31	329,70	4	191,45	8	138,25	19	-	-	-	191,45
		2010	38	2,627,91	96	2,627,90	3	5,22	24	2,558,26	69	64,42	-	-	5,22
		2011	38	12,708,70	90	10,683,20	21	-	18	2,186,71	51	8,496,49	-	-	-
		2012	24	2,837,47	51	2,265,57	5	63,68	20	2,201,89	26	-	-	-	63,68
		Jumlah	135	21,593,67	301	16,715,60	33	529,67	103	7,625,02	165	8,560,91	-	-	529,67
324	Kota Kupang	2008	30	8,567,78	67	8,144,50	45	2,217,96	12	5,858,80	10	67,74	-	-	2,217,96
		2009	26	320,23	39	247,32	33	136,76	6	110,56	-	-	-	-	136,76
		2010	35	3,606,98	71	1,915,00	17	73,42	22	1,771,33	32	70,25	-	-	73,42

Halaman 61 - Lampiran 2

(nilai dalam juta Rp dan Ribu Valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	43	2.625,45	110	2.567,43	59	830,44	35	1.736,99	16	-	-	-	-	830,44
		2012	15	732,53	35	516,17	15	27,00	18	489,17	2	-	-	-	-	-
		Jumlah	149	15.852,97	322	13.390,42	169	3.285,58	93	9.966,85	60	137,99	-	-	-	3.258,58
325	Prov. Kalimantan Barat	2008	85	17.688,81	209	14.649,63	155	1.419,84	46	12.917,35	8	312,44	-	-	-	2.598,16
		2009	84	59.664,11	207	53.825,05	145	15.937,82	62	37.887,23	-	-	-	-	-	15.976,18
		2010	77	14.049,41	147	4.532,42	106	2.569,08	40	1.963,34	1	-	-	-	-	2.582,16
		2011	70	1.487,32	165	1.141,42	69	409,50	93	731,92	3	-	-	-	-	409,50
		2012	34	29.803,27	95	5.325,88	13	146,55	13	283,19	68	4.896,14	-	-	-	146,55
		Jumlah	350	122.692,92	823	79.474,40	489	20.482,79	254	53.785,03	80	5.208,58	-	-	-	21.712,55
326	Kab. Bengkayang	2008	37	8.542,47	92	7.719,61	65	6.230,38	26	1.489,23	1	-	-	-	-	6.230,38
		2009	29	187,66	62	187,65	35	137,14	24	50,51	3	-	-	-	-	145,98
		2010	12	646,70	30	646,69	17	546,30	13	100,39	-	-	-	-	-	554,30
		2011	23	1.037,11	78	1.019,04	16	66,36	58	952,68	4	-	-	-	-	56,32
		2012	15	2.378,77	45	616,08	5	-	40	616,08	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	12.792,71	307	10.189,07	138	6.980,18	161	3.208,89	8	-	-	-	-	7.039,90
327	Kab. Kapuas Hulu	2008	28	2.782,55	63	1.000,62	58	760,90	5	239,72	-	-	-	-	-	760,90
		2009	52	3.509,83	120	2.954,36	96	2.442,04	24	512,32	-	-	-	-	-	2.442,04
		2010	18	1.927,84	35	1.225,61	26	637,12	9	588,49	-	-	-	-	-	511,12
		2011	24	969,12	45	967,62	38	385,11	7	582,51	-	-	-	-	-	537,21
		2012	18	1.774,66	37	1.774,65	9	82,38	13	843,87	15	848,40	-	-	-	82,38
		Jumlah	140	10.964,00	300	7.922,86	227	4.307,55	58	2.766,91	15	848,40	-	-	-	4.333,65
328	Kab. Kayong Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	43	4.972,07	115	3.276,02	81	838,00	34	2.438,02	-	-	-	-	-	838,00
		2010	22	3.765,44	53	3.484,73	35	1.303,95	18	2.180,78	-	-	-	-	-	1.303,95
		2011	19	2.561,83	41	2.561,83	26	-	15	2.561,83	-	-	-	-	-	-
		2012	8	242,22	20	242,22	-	11,92	1	-	19	230,30	-	-	-	11,92
		Jumlah	92	11.541,56	229	9.564,80	142	2.153,87	68	7.180,63	19	230,30	-	-	-	2.153,87
329	Kab. Ketapang	2008	24	3.330,07	43	3.330,07	32	3.194,08	11	135,99	-	-	-	-	-	3.194,08
		2009	79	29.372,50	171	4.819,41	94	1.760,80	70	3.058,61	7	-	-	-	-	1.760,80
		2010	17	1.969,80	46	559,44	29	258,95	17	300,49	-	-	-	-	-	258,95
		2011	30	1.513,31	82	1.464,93	28	92,32	32	1.372,61	22	-	-	-	-	92,32
		2012	42	2.885,32	95	426,69	8	64,72	18	9,27	69	352,70	-	-	-	64,72
		Jumlah	192	39.071,00	437	10.600,54	191	5.370,87	148	4.876,97	98	352,70	-	-	-	5.370,87

Halaman 62 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
330	Kab. Kubu Raya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	27	763,36	56	720,37	56	720,37	-	-	-	-	-	-	720,37
		2011	17	38,86	28	38,86	26	38,86	2	-	-	-	-	-	38,86
		2012	26	28,71	58	-	9	-	44	-	5	-	-	-	-
		Jumlah	70	830,93	142	759,23	91	759,23	46	-	5	-	-	-	759,23
331	Kab. Landak	2008	24	2.882,24	66	1.776,99	59	1.220,09	7	556,90	-	-	-	-	181,64
		2009	33	2.456,20	72	2.456,19	53	1.586,93	15	869,26	4	-	-	-	1.655,75
		2010	20	2.406,23	42	2.406,22	30	504,18	12	1.902,04	-	-	-	-	498,98
		2011	25	4.965,54	64	4.965,54	56	4.185,54	8	780,00	-	-	-	-	4.185,54
		2012	22	764,67	50	-	30	-	20	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	124	13.474,88	294	11.604,94	228	7.496,74	62	4.108,20	4	-	-	-	6.521,91
332	Kab. Melawi	2008	49	15.306,66	107	14.718,68	40	2.708,88	58	12.009,80	9	-	-	-	2.708,88
		2009	29	2.699,31	56	1.109,38	21	138,44	24	903,87	11	67,07	-	-	138,44
		2010	29	2.258,57	60	2.258,57	25	33,87	35	2.224,70	-	-	-	-	33,87
		2011	36	5.057,27	82	4.755,23	20	111,79	27	4.629,39	35	14,05	-	-	111,79
		2012	18	433,87	28	433,86	-	7,50	1	23,49	27	402,87	-	-	7,50
		Jumlah	161	25.755,68	333	23.275,72	106	3.000,48	145	19.791,25	82	483,99	-	-	3.000,48
333	Kab. Pontianak	2008	36	8.137,96	80	7.279,39	64	200,36	16	7.079,03	-	-	-	-	200,36
		2009	36	1.552,08	78	859,01	62	105,66	15	753,35	1	-	-	-	105,66
		2010	23	1.946,18	51	1.946,18	36	126,12	12	1.820,06	3	-	-	-	126,12
		2011	14	-	25	-	15	-	9	-	1	-	-	-	-
		2012	21	1.293,55	45	1.293,55	6	790,49	37	503,06	2	-	-	-	790,49
		Jumlah	130	12.929,77	279	11.378,13	183	1.222,63	89	10.155,50	7	-	-	-	1.222,63
334	Kab. Sambas	2008	47	9.536,04	90	3.266,41	86	3.247,31	4	19,10	-	-	-	-	3.247,31
		2009	8	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	3.211,05	51	466,26	49	466,26	2	-	-	-	-	-	468,79
		2011	25	161,50	38	119,75	28	10,00	10	109,75	-	-	-	-	10,00
		2012	15	990,10	49	541,56	16	50,64	23	1,87	10	489,05	-	-	50,64
		Jumlah	119	13.898,69	248	4.393,98	199	3.774,21	39	130,72	10	489,05	-	-	3.776,74
335	Kab. Sanggau	2008	16	187,30	28	58,74	13	34,72	13	24,02	2	-	-	-	34,72
		2009	45	805,64	81	805,64	43	306,09	36	499,55	2	-	-	-	306,09
		2010	37	2.247,89	100	1.511,91	80	371,39	20	1.140,52	-	-	-	-	104,01

Halaman 63 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	18	543,86	38	543,85	32	90,91	6	452,94	-	-	-	-	-	104,01
		2012	8	3.288,52	23	3.288,52	7	-	14	3.288,52	2	-	-	-	-	-
		Jumlah	124	7.073,21	270	6.208,66	175	803,11	89	5.405,55	6	-	-	-	-	816,21
336	Kab. Sekadau	2008	47	9.597,75	134	6.481,44	107	3.176,72	25	3.304,72	2	-	-	-	-	3.200,46
		2009	36	987,39	76	766,02	61	407,32	12	193,32	3	165,38	-	-	-	381,71
		2010	30	3.234,11	60	3.234,10	42	320,07	14	1.221,60	4	1.692,43	-	-	-	619,57
		2011	24	965,38	52	755,66	23	194,99	27	551,51	3	9,16	-	-	-	194,99
		2012	10	2.285,18	24	2.225,57	7	-	7	1.217,22	10	1.008,35	-	-	-	-
		Jumlah	147	17.069,81	346	13.462,79	240	4.099,10	85	6.488,37	22	2.875,32	-	-	-	4.396,73
337	Kab. Sintang	2008	36	7.575,88	82	5.609,69	54	1.153,07	28	4.456,62	-	-	-	-	-	1.153,07
		2009	28	668,59	59	641,81	46	299,56	13	342,25	-	-	-	-	-	299,56
		2010	25	699,70	46	307,70	40	89,54	6	12,93	-	-	-	-	-	89,54
		2011	21	3.360,44	49	1.245,01	27	273,15	15	971,86	7	-	-	-	-	273,15
		2012	33	11.068,24	74	1.256,92	6	11,04	3	777,64	65	468,24	-	-	-	11,04
		Jumlah	143	23.372,85	310	9.061,13	173	1.826,36	65	6.561,30	72	468,24	-	-	-	1.826,36
338	Kota Pontianak	2008	36	997,59	70	997,59	42	198,44	28	799,15	-	-	-	-	-	750,16
		2009	70	26.259,86	136	24.245,72	98	2.092,24	37	22.153,48	1	-	-	-	-	1.917,82
		2010	25	1.827,59	44	826,87	41	419,13	3	407,75	-	-	-	-	-	526,13
		2011	44	6.018,13	94	5.244,24	45	2.554,42	47	2.689,82	2	-	-	-	-	2.554,42
		2012	17	34,27	24	28,07	9	4,02	-	-	15	-	-	-	-	4,20
		Jumlah	192	35.135,44	368	31.342,49	235	5.268,43	115	26.050,20	18	-	-	-	-	5.752,73
339	Kota Singkawang	2008	23	26,36	40	23,90	32	14,22	7	9,68	1	-	-	-	-	26,04
		2009	50	1.672,51	96	1.001,13	71	516,30	11	458,37	14	26,46	-	-	-	855,66
		2010	22	295,70	45	295,70	38	91,83	6	203,87	1	-	-	-	-	91,83
		2011	46	3.494,72	126	768,27	48	168,07	75	599,99	3	-	-	-	-	168,07
		2012	27	1.845,58	65	2.019,55	1	-	23	1.620,57	41	398,98	-	-	-	-
		Jumlah	168	7.334,87	372	4.108,55	190	790,42	122	2.892,48	60	425,44	-	-	-	1.141,60
340	Prov. Kalimantan Tengah	2008	55	12.217,57	121	10.669,23	79	10.094,43	39	574,80	3	-	-	-	-	10.178,71
		2009	64	11.935,61	112	11.935,60	77	10.519,39	35	1.416,21	-	-	-	-	-	10.893,03
		2010	64	7.281,91	154	7.281,90	132	6.934,78	20	347,12	-	-	-	-	-	6.934,78
		2011	83	9.550,91	144	9.550,91	111	7.201,11	30	2.349,80	3	-	-	-	-	7.201,11
		2012	27	1.363,14	65	1.339,06	23	410,96	38	130,39	4	797,71	-	-	-	410,96
		Jumlah	293	42.349,14	596	40.776,70	422	35.160,67	162	4.818,32	10	797,71	2	-	-	35.618,59

Halaman 64 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
341	Kab. Barito Selatan	2008	39	8.246,16	81	8.153,46	55	3.264,49	20	4.888,97	6	-	-	-	3.216,61
		2009	39	2.345,82	86	2.345,82	71	371,46	15	1.974,36	-	-	-	-	371,46
		2010	42	4.651,60	96	4.637,74	77	1.036,56	19	3.601,18	-	-	-	-	1.036,56
		2011	23	1.742,79	58	1.742,79	46	131,18	11	1.611,61	1	-	-	-	131,18
		2012	15	746,54	34	641,10	30	25,92	4	615,18	-	-	-	-	25,92
		Jumlah	158	17.732,91	355	17.520,91	279	4.829,61	69	12.691,30	7	-	-	-	4.781,73
342	Kab. Barito Timur	2008	45	9.108,40	99	5.499,54	71	2.200,58	16	782,81	12	2.516,15	-	-	2.200,58
		2009	25	5.144,19	63	5.144,19	43	4.398,25	7	745,94	13	-	-	-	4.398,25
		2010	47	6.747,51	121	6.610,58	58	4.325,84	31	2.322,72	32	52,02	-	-	4.325,84
		2011	38	3.958,68	125	3.919,88	69	701,53	39	3.218,35	17	-	-	-	701,53
		2012	38	3.381,46	100	2.734,11	28	78,54	39	2.624,53	33	31,04	-	-	78,54
		Jumlah	193	28.340,24	508	23.908,30	269	11.704,74	132	9.604,35	107	2.599,21	-	-	11.704,74
343	Kab. Barito Utara	2008	34	23.461,30	74	23.461,29	45	672,99	17	22.788,30	12	-	-	-	672,99
		2009	55	2.187,82	117	979,36	94	250,13	19	727,56	3	-	1	2	250,13
		2010	35	518,75	97	518,73	83	393,08	7	-	6	11,44	1	114	393,08
		2011	58	346,57	123	346,56	68	220,16	17	126,40	38	-	-	-	220,16
		2012	36	12.909,76	137	12.909,75	66	493,52	52	2.120,09	19	10.296,14	-	-	493,52
		Jumlah	218	39.424,20	548	38.215,69	356	2.029,88	112	25.762,35	78	10.307,58	2	116	2.029,88
344	Kab. Gunung Mas	2008	32	1.762,14	60	1.762,13	43	867,82	17	894,31	-	-	-	-	867,82
		2009	42	2.538,91	92	2.538,90	81	373,76	11	2.165,14	-	-	-	-	373,76
		2010	42	1.348,60	109	1.348,59	53	615,87	21	513,16	35	219,56	-	-	615,87
		2011	29	1.576,62	72	1.576,62	-	5,32	3	146,70	69	1.424,60	-	-	5,32
		2012	23	1.837,87	61	1.837,87	-	150,09	-	-	61	1.687,78	-	-	150,09
		Jumlah	168	9.064,14	394	9.064,11	177	2.012,86	52	3.719,31	165	3.331,94	-	-	2.012,86
345	Kab. Kapuas	2008	33	5.054,19	86	5.054,19	79	1.365,89	5	3.682,99	2	5,31	-	-	1.365,89
		2009	65	815,23	142	755,22	133	754,22	7	1,00	2	-	-	-	754,22
		2010	31	68,68	79	49,46	66	43,17	6	6,29	6	-	1	-	43,17
		2011	38	192,52	54	4,52	11	-	7	4,52	36	-	-	-	-
		2012	39	15.599,48	98	4.383,49	66	4.383,49	32	-	-	-	-	-	4.383,49
		Jumlah	206	21.730,10	459	10.246,88	355	6.546,77	57	3.694,80	46	5,31	1	-	6.546,77
346	Kab. Katingan	2008	24	2.279,10	44	2.279,10	34	882,03	9	1.397,07	1	-	-	-	504,64
		2009	36	5.972,07	86	5.972,07	40	924,44	41	5.047,63	5	-	-	-	924,31
		2010	32	3.392,85	82	3.392,84	59	1.434,43	22	1.958,41	1	-	-	-	1.404,08

Halaman 65 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2011	17	2.282,67	39	2.282,67	24	784,64	13	1.498,03	2	-	-	-	-	784,64
		2012	24	3.054,75	77	3.054,75	34	538,82	19	2.500,93	24	15,00	-	-	-	538,82
		Jumlah	133	16.981,44	328	16.981,43	191	4.564,36	104	12.402,07	33	15,00	-	-	-	4.156,49
347	Kab. Kotawaringin Barat	2008	21	221,57	45	221,57	43	138,27	2	83,30	-	-	-	-	-	138,27
		2009	69	22.896,26	140	15.285,69	139	15.285,69	1	-	-	-	-	-	-	15.285,69
		2010	56	1.861,14	137	1.861,13	128	1.362,45	9	498,68	-	-	-	-	-	1.362,45
		2011	29	726,00	58	726,00	58	726,00	-	-	-	-	-	-	-	726,00
		2012	38	757,55	91	26,50	34	26,50	2	-	55	-	-	-	-	26,50
		Jumlah	213	26.462,52	471	18.120,89	402	17.538,91	14	581,98	55	-	-	-	-	17.538,91
348	Kab. Kotawaringin Timur	2008	33	2.473,98	64	2.473,97	48	1.181,22	14	1.292,75	2	-	-	-	-	1.292,75
		2009	36	5.784,46	91	5.784,45	68	778,04	23	5.006,41	-	-	-	-	-	778,04
		2010	65	12.142,95	149	12.142,94	76	4.986,02	60	7.039,70	13	117,22	-	-	-	4.986,02
		2011	15	1.865,76	52	1.773,51	28	1.757,89	9	15,62	15	-	-	-	-	1.757,89
		2012	22	187,04	59	187,04	17	145,27	19	41,77	23	-	-	-	-	177,52
		Jumlah	171	22.454,19	415	22.361,91	237	8.848,44	125	13.396,25	53	117,22	-	-	-	8.993,69
349	Kab. Lamandau	2008	18	12.363,25	47	2.175,98	34	1.041,59	8	1.134,39	5	-	-	-	-	1.041,59
		2009	30	12.416,92	76	1.743,23	75	1.743,23	1	-	-	-	-	-	-	1.743,23
		2010	22	1.778,80	45	1.474,72	30	1.454,72	15	20,00	-	-	-	-	-	1.454,72
		2011	31	786,54	60	786,53	43	646,47	17	140,06	-	-	-	-	-	661,47
		2012	14	13.374,49	31	358,36	21	4,86	10	353,50	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	40.720,00	259	6.538,82	203	4.890,87	51	1.647,95	5	-	-	-	-	4.901,01
350	Kab. Murung Raya	2008	22	2.431,42	48	2.431,41	30	1.386,95	6	655,65	12	388,81	-	-	-	1.386,95
		2009	35	10.597,15	109	10.597,14	77	7.415,99	16	3.181,15	16	-	-	-	-	7.415,99
		2010	31	3.758,66	101	3.758,66	81	1.388,25	17	2.370,41	3	-	-	-	-	1.388,25
		2011	32	1.274,18	90	1.274,18	45	302,91	16	786,47	29	184,80	-	-	-	302,91
		2012	20	4.082,69	44	1.404,77	20	817,56	23	587,21	1	-	-	-	-	817,56
		Jumlah	140	22.144,10	392	19.466,16	253	11.311,66	78	7.580,89	61	573,61	-	-	-	11.311,66
351	Kab. Pulang Pisau	2008	13	2.252,49	23	2.252,49	19	174,40	4	2.078,09	-	-	-	-	-	174,40
		2009	58	3.225,23	114	3.225,22	71	2.274,92	31	911,13	12	39,17	-	-	-	2.274,92
		2010	38	1.247,13	82	1.247,13	53	656,02	28	591,11	1	-	-	-	-	737,52
		2011	13	302,79	30	302,79	21	147,51	8	25,00	-	-	-	-	-	147,51
		2012	17	628,08	34	628,08	22	254,10	11	373,98	1	-	-	-	-	254,10
		Jumlah	139	7.655,72	283	7.655,71	186	3.506,95	82	3.979,31	14	39,17	-	-	-	3.588,45

Halaman 66 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
352	Kab. Seruyan	2008	18	209,44	37	209,44	25	168,65	3	-	9	2,60	-	38	150,53	
		2009	40	5.579,07	102	5.579,07	32	3.099,20	64	2.464,37	6	-	-	16	3.099,20	
		2010	37	27.956,27	127	25.588,72	27	4.662,56	21	1.089,39	79	19.836,77	-	-	4.662,56	
		2011	41	32.971,67	94	32.971,66	47	297,78	29	18.321,41	18	14.352,47	-	-	297,78	
		2012	11	197,34	67	37.494,35	1	207,34	20	287,01	46	37.000,00	-	-	494,36	
		Jumlah	147	66.913,80	427	101.843,24	132	8.435,53	137	22.162,18	158	71.191,84	-	54	8.704,43	
353	Kab. Sukamara	2008	22	335,84	44	253,31	33	224,94	7	28,37	4	-	-	-	224,94	
		2009	61	4.237,46	60	2.333,93	33	639,33	18	1.694,60	9	-	-	-	639,33	
		2010	24	7.652,48	62	3.982,11	40	430,98	16	3.551,13	6	-	-	-	430,98	
		2011	24	2.087,18	60	159,92	39	120,26	21	39,66	-	-	-	-	120,26	
		2012	37	2.413,68	37	386,22	22	198,91	7	187,31	8	-	-	-	198,91	
		Jumlah	168	16.726,64	263	7.115,49	167	1.614,42	69	5.501,07	27	-	-	-	1.614,42	
354	Kota Palangkaraya	2008	51	3.693,73	98	3.023,85	43	2.875,88	48	16,36	7	131,61	-	-	2.948,19	
		2009	31	-	64	-	26	-	8	-	30	-	-	-	-	
		2010	36	13.625,32	108	13.605,32	36	458,01	67	13.147,31	5	-	-	-	458,01	
		2011	51	8.324,14	132	8.312,53	33	16,92	83	8.295,61	16	-	-	-	16,92	
		2012	23	504,99	52	504,98	33	222,04	19	282,94	-	-	-	-	222,40	
		Jumlah	192	26.148,18	454	25.446,68	171	3.572,85	225	21.742,22	58	131,61	-	-	3.645,52	
355	Prov. Kalimantan Selatan	2008	54	2.023,40	82	2.023,40	57	2.023,40	22	-	3	-	-	-	2.023,40	
		2009	49	6.361,73	74	6.361,73	68	6.361,73	6	-	-	-	-	-	6.361,73	
		2010	57	9.766,13	117	9.220,11	81	8.440,94	34	779,17	2	-	-	-	8.184,85	
		2011	44	6.631,88	95	6.631,87	25	3.252,87	70	3.379,00	-	-	-	-	3.252,87	
		2012	58	3.777,49	95	4.218,63	8	543,74	80	3.674,89	7	-	-	-	543,74	
		Jumlah	262	28.560,63	463	28.455,74	239	20.622,68	212	7.833,06	12	-	-	-	20.366,59	
356	Kab. Balangan	2008	32	216,28	60	216,28	60	216,28	-	-	-	-	-	-	216,28	
		2009	42	281,67	74	281,67	72	281,67	2	-	-	-	-	-	281,67	
		2010	15	132,86	35	132,86	32	98,50	3	34,36	-	-	-	-	98,50	
		2011	24	668,40	54	668,40	35	668,40	19	-	-	-	-	-	668,40	
		2012	20	539,27	46	539,26	14	518,38	32	20,88	-	-	-	-	518,38	
		Jumlah	133	1.838,48	269	1.838,47	213	1.783,23	56	55,74	-	-	-	-	1.783,23	

Halaman 67 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
357	Kab. Banjar	2008	43	2.216,56	74	2.216,56	64	1.952,44	10	264,12	12	-	14	15	-	1.952,44
		2009	23	4.173,08	30	4.173,08	27	3.798,08	3	375,00	-	-	-	-	-	3.798,08
		2010	34	19.821,65	65	19.821,64	52	19.765,51	13	56,13	-	-	-	-	-	19.765,51
		2011	46	380,45	98	380,45	65	380,45	24	-	9	-	-	-	-	380,45
		2012	23	1.423,13	57	1.423,12	22	483,72	18	-	17	939,40	-	-	-	484,01
		Jumlah	169	28.014,87	324	28.014,85	230	26.380,20	68	695,25	26	939,40	-	-	-	26.380,49
358	Kab. Barito Kuala	2008	29	5.035,10	51	4.354,59	45	1.279,04	6	3.075,55	-	-	-	-	-	1.279,04
		2009	13	2.863,14	21	2.863,13	19	1.153,41	2	1.709,72	-	-	-	-	-	1.153,41
		2010	29	8.097,54	60	7.923,07	51	593,72	9	7.329,35	-	-	-	-	-	593,72
		2011	24	15.778,45	51	15.778,45	22	332,61	29	15.445,84	-	-	-	-	-	332,61
		2012	12	10.469,26	21	10.469,26	9	10.469,26	12	10.469,26	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	107	42.243,49	204	41.388,50	146	3.358,78	58	38.029,72	-	-	-	-	-	3.358,78
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2008	15	744,69	19	744,68	15	179,85	4	564,83	-	-	-	-	-	179,85
		2009	11	3.742,43	22	3.742,42	20	3.507,67	2	234,75	-	-	-	-	-	3.507,67
		2010	21	461,27	30	461,27	22	431,58	5	29,69	3	-	-	-	-	431,58
		2011	13	1.049,33	29	1.049,32	27	130,27	1	130,27	1	919,05	-	-	-	130,27
		2012	11	199,33	22	199,33	17	199,33	4	-	1	-	-	-	-	199,33
		Jumlah	71	6.197,05	122	6.197,02	101	4.448,70	16	829,27	5	919,05	-	-	-	4.448,70
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2008	20	393,94	30	393,93	25	200,69	3	193,24	2	-	-	-	-	200,69
		2009	12	1.480,30	18	1.480,29	16	1.442,24	2	38,05	-	-	-	-	-	1.442,24
		2010	23	1.494,02	35	1.494,02	26	1.387,95	8	106,07	1	-	-	-	-	1.387,95
		2011	19	321,80	43	321,79	28	289,22	14	32,57	1	-	-	-	-	289,22
		2012	13	36,09	34	36,09	22	10,45	12	25,64	-	-	-	-	-	10,45
		Jumlah	87	3.726,15	160	3.726,12	117	3.330,55	39	395,57	4	-	-	-	-	3.330,55
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2008	19	2.203,48	39	2.203,48	38	2.203,48	1	-	-	-	-	-	-	2.203,48
		2009	19	754,13	35	754,13	34	754,13	1	-	-	-	-	-	-	754,13
		2010	8	277,47	11	277,47	10	277,47	1	-	-	-	-	-	-	277,47
		2011	14	1.123,95	40	1.123,95	24	1.123,95	16	-	-	-	-	-	-	1.123,95
		2012	18	9.302,89	48	7.779,72	14	766,71	18	6.449,03	16	563,98	-	-	-	800,02
		Jumlah	78	13.661,92	173	12.138,75	120	5.125,74	37	6.449,03	16	563,98	-	-	-	5.125,74

Halaman 68 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
362	Kab. Kotabaru	2008	21	4.812,69	46	4.812,68	31	326,98	12	4.485,70	3	-	-	-	326,98
		2009	12	65,96	18	65,96	15	-	3	65,96	-	-	-	-	-
		2010	54	2.236,38	109	2.236,38	36	976,32	66	1.260,06	7	-	-	-	976,32
		2011	25	3.878,77	66	3.878,75	23	108,46	41	3.751,82	2	18,47	-	-	108,46
		2012	18	3.573,69	39	3.573,68	20	1.684,05	19	1.889,63	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	14.567,49	278	14.567,45	125	3.095,81	141	11.453,17	12	18,47	-	-	1.411,76
363	Kab. Tabalong	2008	18	2.372,40	38	573,93	34	287,93	4	286,00	-	-	-	-	287,93
		2009	22	1.187,73	43	544,77	42	544,77	1	-	-	-	-	-	544,77
		2010	31	148,17	58	148,16	28	112,88	28	35,28	2	-	-	-	112,88
		2011	37	719,93	78	719,92	32	145,49	29	574,43	17	-	-	-	145,49
		2012	25	8.080,52	60	8.080,51	10	1.407,57	33	1.918,72	17	4.754,22	-	-	1.407,57
		Jumlah	133	12.508,75	277	10.067,29	146	2.498,64	95	2.814,43	36	4.754,22	-	-	2.498,64
364	Kab. Tanah Bumbu	2008	24	1.822,31	51	1.822,30	48	1.450,82	3	371,48	-	-	-	-	1.450,82
		2009	31	8.845,17	59	8.845,16	53	8.601,84	5	243,32	1	-	-	-	8.601,84
		2010	24	2.080,37	42	2.080,36	36	2.062,80	5	17,56	1	-	-	-	2.062,80
		2011	26	13.298,55	44	1.545,94	35	217,92	9	1.328,02	-	-	-	-	286,89
		2012	28	2.555,67	74	2.320,17	18	807,26	37	1.512,91	19	-	-	-	1.232,31
		Jumlah	133	28.602,07	270	16.613,93	190	13.140,64	59	3.473,29	21	-	-	-	13.634,66
365	Kab. Tanah Laut	2008	30	107.674,95	53	107.674,95	35	25.620,02	17	82.011,42	-	-	1	44	25.620,02
		2009	14	10.039,43	28	10.039,43	20	1.517,56	8	8.521,87	-	-	-	-	1.517,56
		2010	30	62.252,67	53	62.252,67	36	1.307,08	17	60.945,59	-	-	-	-	1.307,08
		2011	12	196,85	21	196,84	12	106,15	9	90,69	-	-	-	-	106,15
		2012	14	1.861,49	41	312,29	25	177,35	16	134,94	-	-	-	-	177,35
		Jumlah	100	182.025,39	196	180.476,18	128	28.728,16	67	151.704,51	-	-	1	44	28.728,16
366	Kab. Tapih	2008	39	30.209,91	56	30.209,91	48	15.486,41	8	14.723,50	-	-	-	-	15.486,41
		2009	12	4.646,74	17	4.646,74	16	1.035,28	1	3.611,46	-	-	-	-	1.035,28
		2010	13	342,61	20	342,60	18	310,18	2	32,42	-	-	-	-	310,18
		2011	38	227,14	62	227,13	40	212,61	6	14,52	16	-	-	-	212,61
		2012	17	6.848,55	38	6.848,54	-	3.943,48	-	-	38	2.905,06	-	-	3.943,48
		Jumlah	119	42.274,95	193	42.274,92	122	20.987,96	17	18.381,90	54	2.905,06	-	-	20.987,96

Halaman 69 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	367 Kota Banjarbaru	2008	30	825,61	55	825,61	8	549,74	10	275,87	10	-	14	-	15	16	597,68
		2009	14	67,00	24	67,00	24	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00
		2010	34	1.140,37	60	1.140,37	53	1.058,78	7	81,59	-	-	-	-	-	-	1.031,09
		2011	21	27,19	54	27,19	43	2,03	11	25,16	-	-	-	-	-	-	-
		2012	20	24.128,73	75	5.886,35	9	5.807,42	16	33,15	50	45,78	-	-	-	-	5.807,42
		Jumlah	119	26.188,90	268	7.946,52	166	7.484,97	42	415,77	60	45,78	-	-	-	-	7.503,19
368	Kota Banjarmasin	2008	40	387,32	68	387,32	56	121,19	12	266,13	-	-	-	-	-	-	121,19
		2009	51	1.429,07	59	1.429,06	48	1.361,57	11	67,49	-	-	-	-	-	-	1.361,57
		2010	36	190,39	72	190,39	43	190,39	29	-	-	-	-	-	-	-	190,39
		2011	29	2.489,19	55	2.489,18	35	314,96	17	2.138,03	3	36,19	-	-	-	-	314,96
		2012	20	233,21	60	233,21	13	-	47	233,21	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	176	4.729,18	314	4.729,16	195	1.988,11	116	2.704,86	3	36,19	-	-	-	-	1.988,11
369	Prov. Kalimantan Timur	2008	44	5.995,17	89	5.995,17	32	4.045,07	47	1.950,10	10	-	-	-	-	-	4.045,07
		2009	13	241,76	42	241,76	25	241,76	17	-	-	-	-	-	-	-	241,76
		2010	46	6.908,40	111	6.908,38	21	5.133,86	60	1.385,37	30	389,15	-	-	-	-	5.133,86
		2011	39	22.744,04	79	22.744,04	9	11.028,04	70	11.716,00	-	-	-	-	-	-	11.028,04
		2012	20	17.027,46	57	17.027,45	13	13.658,31	44	3.369,14	-	-	-	-	-	-	13.658,31
		Jumlah	162	52.916,83	378	52.916,80	100	34.107,04	238	18.420,61	40	389,15	-	-	-	-	34.107,04
370	Kab. Berau	2008	35	3.141,62	66	3.141,62	59	2.698,77	7	442,85	-	-	-	-	-	-	2.698,77
		2009	-	USD 1.262,72	-	1.262,72	-	USD 1.262,72	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.262,72
		2010	32	4.365,15	60	4.365,14	57	1.027,86	3	3.337,28	-	-	-	-	-	-	1.027,86
		2011	25	1.925,70	56	1.925,69	39	811,60	17	1.114,09	-	-	-	-	-	-	811,60
		2012	25	16.363,28	53	16.363,27	41	12.760,18	12	3.603,09	-	-	-	-	-	-	12.760,18
		Jumlah	135	33.880,63	267	33.880,63	209	24.283,52	58	9.597,07	-	-	-	-	-	-	24.283,52
			-	USD 8.129,97	-	USD 8.129,96	-	USD 1.267,22	-	USD 6.862,74	-	-	-	-	-	-	USD 1.267,22
371	Kab. Bulungan	2008	15	2.240,10	32	2.240,10	25	2.005,75	6	234,35	1	-	-	-	-	-	2.005,75
		2009	26	48.799,99	75	48.799,98	54	9.062,91	19	39.195,28	2	541,79	-	-	-	-	9.062,91
		2010	22	21.078,87	63	21.078,86	48	20.693,08	9	385,78	6	-	-	-	-	-	20.693,08
		2011	27	6.970,57	53	6.970,55	7	1.962,91	34	4.931,03	12	76,61	-	-	-	-	1.962,91
		2012	13	5.049,32	29	5.049,32	-	-	-	-	29	5.049,32	-	-	-	-	-
		Jumlah	103	84.138,85	252	84.138,81	134	33.724,65	68	44.746,44	50	5.667,72	-	-	-	-	33.724,65

Halaman 70 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
372	Kab. Kutai Barat	2008	20	5.496,61	38	5.496,61	32	5.496,61	6	-	-	-	-	-	-	5.496,61
		2009	14	8.718,38	33	8.718,38	27	154,91	6	8.563,47	-	-	-	-	-	154,91
		2010	15	13.513,64	45	13.513,64	33	683,02	11	12.830,62	1	-	-	-	-	683,02
		2011	19	3.297,41	34	3.297,41	30	1.563,13	3	1.734,28	1	-	-	-	-	1.563,13
		2012	17	688,39	40	688,39	31	208,98	9	479,41	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	85	31.714,43	190	31.714,43	153	8.106,65	35	23.607,78	2	-	-	-	-	7.897,67
373	Kab. Kutai Kartanegara	2008	74	377.241,37	180	377.241,37	62	31.653,96	114	345.587,41	4	-	-	-	-	31.653,96
			-	USD 2.250,34	-	2.250,34	-	-	-	USD 2.250,34	-	-	-	-	-	-
		2009	20	79.897,81	45	79.897,81	16	-	28	79.897,81	1	-	-	-	-	-
		2010	27	22.160,09	79	22.160,08	27	3.732,36	42	14.706,76	10	3.720,96	-	-	-	3.732,36
		2011	118	33.236,07	150	38.095,15	63	13.054,21	84	24.512,08	3	528,86	-	-	-	13.054,21
		2012	24	6.670,72	56	6.670,71	21	473,93	35	6.196,78	-	-	-	-	-	6.670,72
		Jumlah	263	519.206,06	510	524.065,12	189	48.914,46	303	470.900,84	18	4.249,82	-	-	-	55.111,25
			-	USD 2.250,34	-	USD 2.250,34	-	-	-	USD 2.250,34	-	-	-	-	-	-
374	Kab. Kutai Timur	2008	43	58.474,41	148	58.474,40	99	15.663,57	41	29.763,30	8	13.047,53	-	-	-	15.663,57
		2009	24	21.263,44	64	21.263,43	44	3.691,42	19	17.572,01	1	-	-	-	-	3.617,33
		2010	22	6.411,43	68	6.411,43	48	3.173,23	20	3.238,70	-	-	-	-	-	3.173,23
		2011	16	2.576,25	35	2.576,24	18	838,19	16	1.738,05	1	-	-	-	-	209,54
		2012	13	135.949,98	23	135.949,98	5	9.788,05	18	126.161,93	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	118	224.675,51	338	224.675,48	214	33.154,46	114	178.473,49	10	13.047,53	-	-	-	22.663,67
375	Kab. Malinau	2008	23	819,71	45	819,71	37	819,71	8	-	-	-	-	-	-	819,71
		2009	21	1.055,80	51	1.055,80	38	25,00	12	1.030,80	1	-	-	-	-	25,00
		2010	23	3.433,52	59	3.433,52	47	2.003,72	12	1.429,80	-	-	-	-	-	2.003,72
		2011	21	1.360,26	38	1.360,26	31	124,54	7	1.235,72	-	-	-	-	-	124,54
		2012	30	18.524,51	58	18.580,60	18	4.409,12	36	14.171,48	4	-	-	-	-	4.409,12
		Jumlah	118	25.193,80	251	25.249,89	171	7.382,09	75	17.867,80	5	-	-	-	-	7.382,09
376	Kab. Nunukan	2008	36	2.843,73	96	2.843,73	86	705,79	10	2.137,94	-	-	-	-	-	705,79
		2009	21	856,92	44	856,91	42	543,40	2	313,51	-	-	-	-	-	543,40
		2010	43	30.258,78	102	30.258,78	78	8.328,92	23	21.929,86	1	-	-	-	-	7.961,55
		2011	12	609,80	23	609,80	17	609,80	6	-	-	-	-	-	-	609,80
		2012	12	104,85	24	104,85	8	77,00	16	27,85	-	-	-	-	-	77,00
		Jumlah	124	34.674,08	289	34.674,07	231	10.264,91	57	24.409,16	1	-	-	-	-	9.897,54

Halaman 71 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
377	Kab. Paser	2008	16	3.286,96	34	3.286,96	8	2.937,19	3	349,77	-	-	14	15	-	2.937,19
		2009	48	18.421,75	152	18.201,62	96	8.481,12	46	9.720,50	10	-	-	-	-	8.481,12
		2010	14	535,28	31	535,28	25	535,28	6	-	-	-	-	-	-	4.735,28
		2011	10	459,04	27	459,03	20	76,57	7	382,46	-	-	-	-	-	76,86
		2012	31	8.331,05	61	8.331,05	22	356,88	33	7.974,17	6	-	-	-	-	414,34
		Jumlah	119	31.034,08	305	30.813,94	194	12.387,04	95	18.426,90	16	-	-	-	-	16.644,79
378	Kab. Penajam Paser Utara	2008	22	1.064,29	49	1.064,29	46	976,11	3	88,18	-	-	-	-	-	976,11
		2009	18	5.925,45	43	182,45	40	182,45	3	-	-	-	-	-	-	182,45
		2010	33	11.298,67	72	11.298,66	57	5.867,19	13	5.431,47	2	-	-	-	-	5.867,19
		2011	21	727,74	64	727,73	48	374,82	16	352,91	-	-	-	-	-	374,82
		2012	17	4.796,61	32	3.678,21	19	287,86	13	3.390,35	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	111	23.812,76	260	16.951,34	210	7.688,43	48	9.262,91	2	-	-	-	-	7.400,57
379	Kab. Tana Tidung	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	2.722,47	55	2.722,46	18	622,92	14	2.099,54	23	-	-	-	-	622,92
		2011	26	2.411,27	68	2.411,26	28	337,92	19	2.073,34	21	-	-	-	-	337,92
		2012	13	5.439,28	23	5.102,66	-	-	-	-	23	5.102,66	-	-	-	-
		Jumlah	64	10.573,02	146	10.236,38	46	960,84	33	4.172,88	67	5.102,66	-	-	-	960,84
380	Kota Balikpapan	2008	29	3.542,88	53	3.542,88	48	3.016,88	5	526,00	-	-	-	-	-	2.752,03
		2009	41	3.875,16	67	3.824,01	56	3.805,29	10	18,72	1	-	-	-	-	3.856,44
		2010	26	-	52	-	41	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	34	-	29	-	4	-	1	-	-	-	-	-
		2012	16	4.234,23	23	4.234,22	8	2.688,64	15	1.545,58	-	-	-	-	-	187,25
		Jumlah	130	11.652,27	229	11.601,11	182	9.510,81	45	2.090,30	2	-	-	-	-	6.795,72
381	Kota Bontang	2008	17	815,33	31	815,33	28	815,33	3	-	-	-	-	-	-	815,33
		2009	58	11.509,96	140	11.509,95	95	5.418,59	45	6.091,36	-	-	-	-	-	5.418,59
		2010	10	4.517,48	22	4.517,48	11	2.794,15	11	1.723,33	-	-	-	-	-	2.794,15
		2011	34	7.577,63	86	7.577,63	49	7.150,43	37	427,20	-	-	-	-	-	7.150,43
		2012	14	760,99	34	760,98	16	187,93	18	573,05	-	-	-	-	-	187,93
		Jumlah	133	25.181,39	313	25.181,37	199	16.366,43	114	8.814,94	-	-	-	-	-	16.366,43

Halaman 72 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
382	Kota Samarinda	2008	37	41.835,22	86	41.835,22	20	12.065,07	37	29.770,15	29	-	-	-	12.065,07	
		2009	73	115.813,95	145	115.813,95	42	3.778,70	77	103.196,78	23	8.691,92	3	147	3.770,89	
		2010	23	18.439,06	62	18.439,06	29	2.623,50	32	15.815,56	1	-	-	-	2.623,50	
		2011	44	11.384,84	104	11.384,84	52	40,00	15	1.379,08	37	9.965,76	-	-	40,00	
			-	USD 2.115,61	-	2.115,61	-	-	-	-	-	USD 2.115,61	-	-	-	
		2012	20	59.934,77	38	1.149,99	16	330,50	19	258,05	3	561,44	-	-	330,50	
		Jumlah	197	247.408	435	188.623,04	159	18.837,77	180	150.419,62	93	19.219,12	3	147	18.829,96	
			-	USD 2.115,61	-	USD 2.115,61	-	-	-	-	-	USD 2.115,61	-	-	-	
383	Kota Tarakan	2008	33	11.303,59	63	11.303,58	53	10.519,51	5	416,75	5	367,32	-	-	10.519,51	
		2009	20	1.765,20	52	1.765,19	37	1.493,65	14	269,54	1	-	-	-	1.493,65	
		2010	17	334,15	41	334,15	32	334,15	9	-	-	-	-	-	334,15	
		2011	39	8.607,42	74	8.607,41	27	2.167,94	40	6.439,47	7	-	-	-	2.199,48	
		2012	12	1.094,41	32	1.062,23	17	106,23	14	-	1	-	-	-	106,23	
		Jumlah	121	23.102,77	262	22.114,56	166	14.621,48	82	7.125,76	14	367,32	-	-	14.653,02	
384	Prov. Sulawesi Utara	2008	40	4.184,30	63	4.184,29	30	712,75	11	1.043,52	22	2.428,02	-	-	712,75	
		2009	20	3.313,34	49	3.313,33	38	2.950,64	10	362,69	1	-	-	-	2.950,64	
		2010	18	2.175,36	45	2.175,36	23	1.874,34	14	301,02	8	-	-	-	1.874,34	
		2011	87	40.449,36	193	14.879,49	118	5.298,80	66	2.385,12	9	7.195,57	-	-	3.438,11	
		2012	45	14.208,43	137	1.563,08	61	807,63	9	488,57	67	266,88	-	-	4,82	
		Jumlah	210	64.330,79	487	26.115,55	270	11.644,16	110	4.580,92	107	9.890,47	-	-	8.980,66	
385	Kab. Bolaang Mongondow	2008	24	3.157,69	43	284,77	33	143,61	5	76,16	5	65,00	-	-	143,61	
		2009	35	762,34	57	762,34	45	426,67	6	261,14	6	74,53	-	-	426,67	
		2010	26	2.867,55	51	2.867,54	12	411,92	8	747,34	31	1.708,28	-	-	411,92	
		2011	37	2.221,41	88	2.221,40	34	102,64	30	1.945,80	24	172,96	-	-	102,64	
		2012	69	11.688,21	180	5.201,90	28	-	35	4.702,39	117	499,51	-	-	-	
		Jumlah	191	20.697,20	419	11.337,95	152	1.084,84	84	7.732,83	183	2.520,28	-	-	1.084,84	
386	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	8	197,82	22	197,82	10	95,30	12	102,52	-	-	-	-	95,30	
		2011	20	3.631,42	47	3.631,41	15	19,23	18	81,54	14	3.530,64	-	-	-	
		2012	43	6.109,18	122	3.884,00	44	217,21	22	1.562,84	56	2.103,95	-	-	156,24	
		Jumlah	71	9.938,42	191	7.713,23	69	331,74	52	1.746,90	70	5.634,59	-	-	251,54	

Halaman 73 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	400,09	9	400,09	-	322,55	1	60,80	8	16,74	-	-	322,55
		2011	14	8.722,41	24	9.444,33	9	5.945,45	13	2.647,83	2	851,05	-	-	5.945,45
		2012	31	5.924,54	77	4.871,58	25	395,16	46	4.476,42	6	-	-	-	395,16
		Jumlah	49	15.047,04	110	14.716,00	34	6.663,16	60	7.185,05	16	867,79	-	-	6.663,16
388	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	5.728,02	23	5.728,01	15	3.941,47	8	1.786,54	-	-	-	-	3.035,31
		2010	14	1.926,78	26	1.926,77	20	948,54	6	978,23	-	-	-	-	946,94
		2011	15	5.051,81	29	5.051,80	5	401,24	19	4.650,56	5	-	-	-	-
		2012	30	7.717,64	82	4.121,64	34	383,85	24	2.048,80	24	1.688,99	-	-	383,85
		Jumlah	73	20.424,25	160	16.828,22	74	5.675,10	57	9.464,13	29	1.688,99	-	-	4.366,10
389	Kab. Minahasa	2008	63	961,37	113	961,37	57	961,37	25	-	31	-	-	-	946,37
		2009	12	1.103,51	21	1.103,50	13	799,49	6	295,37	2	8,64	-	-	799,49
		2010	31	658,54	61	658,54	34	527,60	16	130,94	11	-	-	-	351,60
		2011	13	416,38	38	416,38	7	347,62	1	68,76	30	-	-	-	347,62
		2012	59	2.177,85	151	1.610,68	-	-	103	1.065,81	48	544,87	-	-	-
		Jumlah	178	5.317,65	384	4.750,47	111	2.636,08	151	1.560,88	122	553,51	-	-	2.445,08
390	Kab. Minahasa Selatan	2008	29	3.597,88	52	3.597,87	12	349,54	12	2.674,70	28	573,63	-	-	349,54
		2009	11	3.428,68	21	3.428,68	3	90,76	8	3.337,92	10	-	-	-	-
		2010	10	409,57	22	409,57	11	64,00	1	64,00	10	345,57	-	-	-
		2011	30	31.686,38	85	31.686,38	26	406,70	59	31.279,68	-	-	-	-	406,70
		2012	45	6.941,00	95	4.346,53	34	561,65	60	3.784,88	1	-	-	-	561,65
		Jumlah	125	46.063,51	275	43.469,03	86	1.408,65	140	41.141,18	49	919,20	-	-	1.317,89
391	Kab. Minahasa Tenggara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	4.130,54	38	3.657,91	21	178,39	11	3.403,63	6	75,89	-	-	178,39
		2010	20	14.731,72	64	14.731,70	7	970,91	3	2.649,64	54	11.111,15	-	-	-
		2011	23	32.323,13	61	15.484,10	6	165,51	6	2.940,56	55	12.378,03	-	-	165,51
		2012	31	35.453,56	89	7.291,51	-	-	-	-	89	7.291,51	-	-	-
		Jumlah	92	86.638,95	252	41.165,22	28	1.314,81	20	8.993,83	204	30.856,58	-	-	343,90

Halaman 74 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
392	Kab. Minahasa Utara	2008	22	28.330,15	40	1.093,55	12	498,58	24	594,97	4	-	-	-	498,58
		2009	12	27.104,09	25	1.971,92	10	347,20	12	1.624,72	3	-	-	-	347,20
		2010	18	3.878,07	39	354,91	3	240,11	3	114,80	33	-	-	-	202,13
		2011	26	8.879,23	65	3.476,11	5	573,57	31	1.148,19	29	1.754,35	-	-	573,57
		2012	47	14.611,39	112	6.729,27	-	-	-	-	112	6.729,27	-	-	-
		Jumlah	125	82.802,93	281	13.625,76	30	1.659,46	70	3.482,68	181	8.483,62	-	-	1.621,48
393	Kab. Kepulauan Sangihe	2008	22	568,21	50	568,20	36	412,81	4	112,79	10	42,60	-	-	412,81
		2009	13	12.324,52	24	12.324,52	23	8.616,96	1	3.707,56	-	-	-	-	8.489,85
		2010	25	1.187,31	49	1.187,31	19	643,57	5	543,74	25	-	-	-	643,57
		2011	18	1.201,74	46	1.201,73	33	175,68	8	1.026,05	5	-	-	-	175,68
		2012	19	6.054,15	58	1.739,13	18	5,00	38	1.653,02	2	81,11	-	-	5,00
		Jumlah	97	21.335,93	227	17.020,89	129	9.854,02	56	7.043,16	42	123,71	-	-	9.726,91
394	Kab. Kep. Siau Tagulandang Baro	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	6.840,92	23	6.840,91	13	3.160,02	10	3.680,89	-	-	-	-	3.160,02
		2010	11	1.248,62	29	1.248,62	20	626,53	8	608,35	1	13,74	-	-	626,53
		2011	14	2.010,22	37	2.010,21	12	855,25	25	1.154,96	-	-	-	-	855,25
		2012	13	828,88	35	48,04	22	31,59	9	16,45	4	-	-	-	31,59
		Jumlah	49	10.928,64	124	10.147,78	67	4.673,39	52	5.460,65	5	13,74	-	-	4.673,39
395	Kab. Kepulauan Talaud	2008	27	9.105,46	53	9.105,45	2	6.291,52	5	111,85	46	2.702,08	-	-	8.330,72
		2009	23	25.322,48	44	25.322,47	15	24.676,21	17	646,26	12	-	-	-	24.676,21
		2010	18	16.599,99	61	16.599,98	28	1.958,87	18	2.992,57	15	13.411,54	-	-	1.958,87
		2011	19	6.224,38	40	6.224,37	17	458,96	15	5.765,41	8	-	-	-	458,96
		2012	35	6.911,90	82	6.420,73	45	809,04	28	5.611,69	9	-	-	-	809,04
		Jumlah	122	64.164,21	280	63.673,00	107	32.431,60	83	15.127,78	90	16.113,62	-	-	34.470,80
396	Kota Bitung	2008	35	16.690,04	54	11.353,33	51	9.529,15	3	1.824,18	-	-	-	-	9.529,15
		2009	29	1.360,96	49	1.360,96	35	173,02	13	1.187,94	1	-	-	-	173,02
		2010	17	681,33	51	681,32	41	620,80	10	60,52	-	-	-	-	620,80
		2011	44	552,45	93	552,44	21	167,19	13	257,75	59	127,50	-	-	167,19
		2012	23	13.476,29	54	134,92	3	-	8	-	43	134,92	-	-	-
		Jumlah	148	32.761,07	301	14.082,97	151	10.490,16	47	3.330,39	103	262,42	-	-	10.490,16

Halaman 75 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
397	Kota Kotamobagu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	333,84	21	333,83	6	259,80	3	74,03	12	-	-	-	-	259,80
		2010	18	3.286,89	46	3.286,88	21	1.254,12	22	2.032,76	3	-	-	-	-	1.254,12
		2011	31	1.725,91	58	1.725,91	37	343,17	12	817,58	9	565,16	-	-	-	343,17
		2012	15	3.439,49	41	1.469,39	11	457,10	11	949,34	19	62,95	-	-	-	-
		Jumlah	74	8.786,13	166	6.816,01	75	2.314,19	48	3.873,71	43	628,11	-	-	-	1.857,09
398	Kota Manado	2008	29	3.562,36	58	2.587,97	18	404,15	9	1.201,65	31	982,17	-	-	-	404,15
		2009	8	5.661,98	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	-	-	-	77,16
		2010	22	13.315,21	56	9.986,28	35	138,79	15	1.264,63	6	8.582,86	-	-	-	92,29
		2011	67	1.334.659,67	169	10.544,04	88	1.030,13	47	752,68	34	8.761,23	-	-	-	1.009,63
		2012	34	88.025,81	78	6.489,15	-	-	-	-	78	6.489,15	-	-	-	-
		Jumlah	160	1.445.225,03	375	35.269,42	142	1.650,23	72	3.218,96	161	30.400,23	-	-	-	1.583,23
399	Kota Tomohon	2008	37	4.974,61	69	4.974,60	53	4.234,63	9	739,97	7	-	-	-	-	4.234,63
		2009	3	21.812,70	7	21.812,69	2	1.500,00	3	17.147,62	2	3.165,07	-	-	-	1.500,00
		2010	17	40.406,26	41	40.406,25	9	1.387,50	6	38.399,74	26	619,01	-	-	-	1.221,39
		2011	34	66.564,02	81	66.564,01	1	150,88	6	1.967,26	74	64.445,87	-	-	-	150,88
		2012	43	3.513,80	93	3.508,91	38	579,05	18	2.699,56	37	230,30	-	-	-	-
		Jumlah	134	137.271,39	291	137.266,46	103	7.852,06	42	60.954,15	146	68.460,25	-	-	-	7.106,90
400	Prov. Sulawesi Tengah	2008	21	909,01	44	182,31	26	78,17	12	104,14	6	-	-	-	-	78,17
		2009	38	20.599,62	98	20.599,62	30	2.052,02	62	18.547,60	6	-	-	-	-	2.052,02
		2010	55	6.020,09	161	5.146,36	130	1.187,83	27	3.958,53	4	-	-	-	-	1.203,61
		2011	76	17.784,48	150	8.818,45	37	6.776,23	106	2.042,22	7	-	-	-	-	749,39
		2012	25	20.361,29	30	2.389,78	3	536,94	27	1.852,84	-	-	-	-	-	669,60
		Jumlah	215	65.674,49	483	37.136,52	226	10.631,19	234	26.505,33	23	-	-	-	-	4.752,79
401	Kab. Banggai	2008	14	56,21	26	56,21	25	56,21	1	-	-	-	-	-	-	56,21
		2009	14	3.091,94	33	1.274,26	30	1.265,21	3	9,05	-	-	-	-	-	2.719,52
		2010	40	1.966,87	136	1.544,19	94	1.358,26	41	120,71	-	-	-	-	65	1.780,93
		2011	36	8.558,85	53	2.066,95	40	442,46	11	1.542,36	1	-	-	-	1	82
		2012	21	18.296,42	30	1.305,38	10	164,00	20	1.141,38	-	-	-	-	-	1.188,45
		Jumlah	125	31.970,29	278	6.246,99	199	3.286,14	76	2.813,50	1	-	-	-	2	6.187,57

Halaman 76 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
402	Kab. Banggai Kepulauan	2008	17	3.386,39	44	3.075,34	35	2.567,81	7	507,53	2	-	-	-	2.567,81	
		2009	16	4.038,37	50	3.233,27	34	2.985,09	14	248,18	2	-	-	-	2.985,16	
		2010	34	5.905,72	121	4.743,83	92	3.041,29	27	1.702,54	2	-	-	-	3.414,08	
		2011	34	2.884,46	61	2.637,10	31	1.118,32	14	1.518,78	16	-	-	-	1.297,71	
		2012	13	2.263,19	18	503,97	6	142,39	10	278,64	2	82,94	-	-	276,61	
		Jumlah	114	18.478,13	294	14.193,51	198	9.854,90	72	4.255,67	24	82,94	-	-	10.551,37	
403	Kab. Bul	2008	23	42.524,96	47	42.338,80	27	22.223,25	19	20.115,55	1	-	-	-	22.409,40	
		2009	38	11.310,73	114	10.802,59	88	5.275,52	23	5.527,07	3	-	-	-	5.281,01	
		2010	34	43.255,53	95	42.957,91	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	-	-	4.181,37	
		2011	20	15.151,69	24	14.351,82	8	6.779,10	14	7.572,72	2	-	-	-	6.533,80	
		2012	21	5.912,66	33	2.588,33	17	325,25	5	26,03	11	2.237,05	-	-	638,95	
		Jumlah	136	118.155,57	313	113.039,45	213	73.140,24	66	37.662,16	34	2.237,05	-	-	39.044,53	
404	Kab. Donggala	2008	24	3.367,60	53	3.367,60	32	2.140,73	20	1.226,87	1	-	-	-	2.140,73	
		2009	29	23.666,47	75	23.666,46	32	19.726,12	23	3.940,34	19	-	-	1	19.555,88	
		2010	42	6.846,96	118	6.396,70	66	4.555,16	44	1.841,54	8	-	-	-	4.555,16	
		2011	21	8.529,51	24	2.626,71	16	648,71	8	1.978,00	-	-	-	-	680,37	
		2012	15	4.205,49	21	1.430,54	11	199,77	5	211,70	5	1.019,07	-	-	2.077,81	
		Jumlah	131	46.616,03	291	37.488,01	157	27.270,49	100	9.198,45	33	1.019,07	1	-	29.009,95	
405	Kab. Morowali	2008	36	18.153,69	80	18.153,68	25	895,72	27	6.114,70	28	11.143,26	-	-	895,72	
		2009	28	5.905,53	78	5.760,15	15	2.508,19	43	3.251,96	20	-	-	-	2.508,19	
		2010	49	8.234,57	124	2.377,96	15	182,24	47	2.143,38	62	52,34	-	-	6.038,84	
		2011	26	1.811,52	27	1.519,98	11	94,16	15	1.109,19	1	316,63	-	-	163,75	
		2012	18	3.032,08	29	3.023,10	3	505,05	19	1.404,84	7	1.113,21	-	-	505,05	
		Jumlah	157	37.137,39	338	30.834,87	69	4.185,36	151	14.024,07	118	12.625,44	-	-	10.111,55	
406	Kab. Parigi Moutong	2008	37	6.427,02	74	6.427,02	50	5.638,62	19	788,40	5	-	-	-	5.432,29	
		2009	34	5.530,60	86	4.288,45	51	2.864,32	19	1.424,13	16	-	-	-	2.873,55	
		2010	41	6.281,11	125	1.998,23	98	1.199,53	22	723,91	5	74,79	-	-	1.199,53	
		2011	21	10.725,01	24	6.621,96	8	1.015,22	16	5.606,74	-	-	-	-	917,11	
		2012	8	3.478,25	11	3.361,79	-	1.364,89	8	1.507,34	3	489,56	-	-	1.364,91	
		Jumlah	141	32.441,99	320	22.697,45	207	12.082,58	84	10.050,52	29	564,35	-	-	11.787,39	

Halaman 77 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	407 Kab. Poso	2008	4	5.620,66	6	4.985,08	8	1.965,47	10	3.019,61	12	8	14	15	16	1.965,47
		2009	30	2.491,52	75	1.210,77	45	637,49	14	573,28	16	-	-	-	-	382,97
		2010	24	2.605,41	83	2.605,40	68	554,55	10	1.989,65	5	61,20	-	-	-	221,64
		2011	40	889,11	56	255,04	50	238,01	6	17,03	-	-	-	-	-	628,80
		2012	22	11.611,28	36	2.387,90	21	338,10	10	641,36	5	1.408,44	-	-	-	351,56
		Jumlah	130	23.217,98	288	11.444,19	206	3.733,62	48	6.240,93	34	1.469,64	-	-	-	3.550,44
408	Kab. Sigi	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	37	3.414,48	121	1.259,37	109	620,59	12	638,78	-	-	-	-	-	552,57
		2011	18	1.591,62	18	1.538,77	14	958,17	4	580,60	-	-	-	-	-	1.017,01
		2012	17	2.597,02	26	1.334,74	6	403,39	20	931,35	-	-	-	-	-	423,00
		Jumlah	72	7.603,12	165	4.132,88	129	1.982,15	36	2.150,73	-	-	-	-	-	1.992,58
409	Kab. Tojo Una-Una	2008	42	600,19	86	594,99	78	576,04	6	18,95	2	-	-	-	-	576,04
		2009	34	3.827,90	87	3.181,47	69	1.901,66	13	1.279,81	5	-	-	-	-	1.971,13
		2010	30	5.125,72	84	5.075,22	46	399,19	11	4.676,03	27	-	-	-	-	449,68
		2011	27	2.464,12	33	2.314,20	24	581,94	8	1.732,26	1	-	-	-	-	589,96
		2012	18	12.277,85	34	907,09	1	505,93	4	106,99	29	294,17	-	-	-	1.094,84
		Jumlah	151	24.295,78	324	12.072,97	218	3.964,76	42	7.814,04	64	294,17	-	-	-	4.681,65
410	Kab. Tolitoli	2008	28	4.184,42	61	3.318,43	28	559,83	25	2.758,60	8	-	-	-	-	559,83
		2009	61	3.260,64	159	3.087,57	8	888,40	27	491,23	124	1.707,94	-	-	-	888,40
		2010	24	896,03	65	663,75	-	405,00	8	121,00	57	137,75	-	-	-	405,00
		2011	25	2.914,19	31	2.684,94	-	1.546,43	9	1.022,18	22	116,33	-	-	-	1.232,42
		2012	16	3.902,34	29	880,71	7	93,17	6	787,54	16	-	-	-	-	2.808,57
		Jumlah	154	15.157,62	345	10.635,40	43	3.492,83	75	5.180,55	227	1.962,02	-	-	-	5.894,22
411	Kota Palu	2008	47	1.661,54	109	1.621,99	47	692,18	25	780,37	37	149,44	-	-	-	601,12
		2009	44	1.854,45	116	1.645,02	84	873,91	31	771,11	1	-	-	-	-	896,32
		2010	24	3.397,80	90	686,91	62	538,52	23	148,39	5	-	-	-	-	555,52
		2011	26	4.116,98	34	2.856,98	12	1.098,82	16	140,45	6	1.617,71	-	-	-	1.483,81
		2012	16	686,97	38	299,20	10	132,91	10	166,29	18	-	-	-	-	479,74
		Jumlah	157	11.717,74	387	7.110,10	215	3.336,34	105	2.006,61	67	1.767,15	-	-	-	4.016,51

Halaman 78 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
412	Prov. Sulawesi Selatan	2008	89	41.740,13	212	35.078,34	131	1.758,67	50	31.468,58	31	1.851,09	-	-	-	1.758,67
		2009	30	10.736,98	93	10.736,94	74	9.337,00	17	660,25	2	739,69	-	-	-	9.337,00
		2010	70	19.457,24	161	18.085,99	104	5.294,10	41	12.791,89	16	-	-	-	-	5.294,10
		2011	63	106.142,08	149	34.871,16	80	4.306,03	52	22.719,34	13	7.151,24	4	695	-	4.306,03
		2012	52	5.633,01	65	5.633,01	26	3.586,37	3	-	36	2.046,64	-	-	-	3.586,37
		Jumlah	304	183.709,44	680	104.405,44	415	24.282,17	163	67.640,06	98	11.788,66	4	695	-	24.282,17
413	Kab. Bantaeng	2008	13	1.662,91	25	1.662,90	1	325,17	5	840,48	12	497,25	7	-	-	325,17
		2009	18	954,44	49	954,43	15	194,64	9	156,11	25	603,68	-	-	-	194,64
		2010	22	533,46	55	533,45	2	171,90	5	188,22	48	173,33	-	-	-	171,90
		2011	37	1.175,81	82	902,91	3	504,98	2	288,43	77	109,50	-	-	-	504,98
		2012	25	1.551,97	74	1.497,35	12	382,08	25	1.094,96	37	20,31	-	-	-	382,08
		Jumlah	115	5.878,59	285	5.551,04	33	1.578,77	46	2.568,20	199	1.404,07	7	-	-	1.578,77
414	Kab. Barru	2008	13	1.045,08	25	960,53	21	934,53	3	26,00	1	-	-	-	-	934,53
		2009	18	3.734,05	35	3.577,01	20	1.973,19	14	1.603,82	1	-	-	-	-	1.973,19
		2010	17	3.497,61	31	3.420,83	16	2.527,01	11	893,82	4	-	-	-	-	2.527,01
		2011	18	2.095,34	35	723,51	25	220,91	10	502,60	-	-	-	-	-	220,91
		2012	28	1.568,64	61	1.568,64	16	83,93	24	46,65	21	1.438,06	-	-	-	83,93
		Jumlah	94	11.944,72	187	10.250,52	98	5.739,57	62	3.072,89	27	1.438,06	-	-	-	5.739,57
415	Kab. Bone	2008	39	9.612,60	66	2.475,35	12	1.600,49	12	874,86	42	-	-	-	-	1.600,49
		2009	17	553,70	37	553,70	12	260,22	12	293,48	13	-	-	-	-	260,22
		2010	30	952,08	100	313,90	27	271,29	60	19,51	13	23,10	-	-	-	271,29
		2011	16	561,25	33	511,41	28	458,17	5	53,24	-	-	-	-	-	458,17
		2012	24	64.466,37	61	2.065,67	25	814,56	19	78,01	17	1.173,10	-	-	-	814,56
		Jumlah	126	76.146,00	297	5.920,03	104	3.404,73	108	1.319,10	85	1.196,20	-	-	-	3.404,73
416	Kab. Bulukumba	2008	41	1.804,07	90	1.804,07	60	734,48	30	1.069,59	-	-	-	-	-	734,48
		2009	21	8.397,41	43	5.469,53	21	863,42	22	4.606,11	-	-	-	-	-	863,42
		2010	14	84,50	26	84,50	14	-	12	84,50	-	-	-	-	-	-
		2011	15	5.908,58	35	347,00	32	153,32	3	193,68	-	-	-	-	-	153,32
		2012	14	1.197,43	33	1.197,43	8	207,08	25	990,35	-	-	-	-	-	207,08
		Jumlah	105	17.391,99	227	8.902,53	135	1.958,30	92	6.944,23	-	-	-	-	-	1.958,30

Halaman 79 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	417 Kab. Enrekang	2008	4	1.292,77	6	1.037,21	8	509,18	10	525,03	12	3	14	15	16	509,18
		2009	15	695,08	29	695,07	10	380,75	9	314,32	10	-	-	-	-	380,75
		2010	19	943,23	38	636,52	16	497,05	22	139,47	-	-	-	-	-	497,05
		2011	27	106,90	64	106,89	23	93,03	40	13,86	1	-	-	-	-	93,03
		2012	15	2.330,68	46	2.330,67	14	1.695,79	23	556,94	9	77,94	-	-	-	1.695,79
		Jumlah	95	5.368,66	215	4.806,36	83	3.175,80	109	1.552,62	23	77,94	-	-	-	3.175,80
418	Kab. Gowa	2008	20	815,16	45	533,16	25	372,90	16	160,26	3	-	1	-	-	372,90
		2009	21	1.300,97	59	1.066,53	42	355,43	16	711,10	1	-	-	-	-	355,43
		2010	27	1.910,76	50	1.225,28	29	1.103,91	14	-	7	121,37	-	-	-	1.103,91
		2011	29	3.100,76	54	237,22	34	237,22	11	-	9	-	-	-	-	237,22
		2012	9	759,46	15	759,46	9	564,49	6	194,97	-	-	-	-	-	564,49
		Jumlah	106	7.887,11	223	3.821,65	139	2.633,95	63	1.066,33	20	121,37	1	-	-	2.633,95
419	Kab. Jeneponto	2008	50	12.488,99	114	4.090,95	58	547,57	38	2.420,58	18	-	-	-	-	547,57
		2009	27	15.199,64	79	13.946,36	53	764,39	24	7.465,67	2	5.000,00	-	715	-	764,39
		2010	21	8.766,38	60	6.417,49	13	1.098,00	19	4.798,54	28	520,95	-	-	-	1.098,00
		2011	26	3.054,65	80	3.005,94	35	198,69	15	1.939,51	30	867,74	-	-	-	198,69
		2012	19	2.935,62	54	931,82	1	106,82	2	85,97	51	739,03	-	-	-	106,82
		Jumlah	143	42.445,28	387	28.392,56	160	2.715,47	98	16.711,27	129	8.250,52	-	715	-	2.715,47
420	Kab. Luwu	2008	43	8.368,50	92	6.716,97	37	899,27	43	5.261,09	12	556,61	-	-	-	899,27
		2009	19	3.755,13	46	3.754,66	20	853,28	18	2.894,08	8	7,30	-	-	-	853,28
		2010	26	524,33	80	524,32	24	115,58	40	268,40	16	140,34	-	-	-	115,58
		2011	16	592,58	37	592,57	22	348,03	10	82,70	5	161,84	-	-	-	348,03
		2012	25	9.206,16	62	7.393,56	9	3.813,58	48	3.579,98	5	-	-	-	-	3.813,58
		Jumlah	129	22.446,70	317	18.982,08	112	6.029,74	159	12.086,25	46	866,09	-	-	-	6.029,74
421	Kab. Luwu Timur	2008	27	21.193,99	63	20.379,95	57	19.678,39	6	582,08	-	-	-	119	-	19.678,39
		2009	17	4.405,66	48	4.405,66	44	1.232,19	4	3.173,47	-	-	-	-	-	1.232,19
		2010	11	1.153,88	36	1.093,82	32	1.076,43	1	17,39	1	-	2	-	-	1.076,43
		2011	26	101,09	65	101,09	62	101,09	1	-	1	-	1	-	-	101,09
		2012	10	36.982,44	20	14.994,43	16	1.873,60	4	13.120,83	-	-	-	-	-	1.873,60
		Jumlah	91	63.837,06	232	40.974,95	211	23.961,70	16	16.893,77	2	-	3	119	-	23.961,70

Halaman 80 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
422	Kab. Luwu Utara	2008	24	1.158,92	49	1.158,91	34	597,95	13	560,96	2	-	-	-	597,95
		2009	16	2.415,63	32	2.415,61	15	401,71	12	143,96	4	35,55	1	1.834	401,71
		2010	22	870,00	68	870,99	34	439,83	28	431,16	6	-	-	-	439,83
		2011	30	289,39	73	289,38	29	262,27	42	263,11	2	-	-	-	262,27
		2012	29	8.601,75	64	1.215,36	37	893,15	21	322,21	6	-	-	-	893,15
		Jumlah	121	13.336,69	286	5.950,25	149	2.358,91	116	1.721,40	20	35,55	1	1.834	2.358,91
423	Kab. Maros	2008	38	2.368,46	67	2.368,45	39	721,94	28	1.646,51	-	-	-	-	721,94
		2009	43	5.354,75	99	5.354,74	37	312,38	39	4.496,13	23	546,23	-	-	312,38
		2010	53	7.102,63	136	7.102,62	35	258,38	71	6.448,35	30	395,89	-	-	258,38
		2011	63	81.023,53	183	44.051,97	79	448,89	97	43.573,08	7	30,00	-	-	448,89
		2012	35	20.146,37	79	3.096,28	19	1.136,21	47	1.960,07	13	-	-	-	1.136,21
		Jumlah	232	115.995,74	564	61.974,06	209	2.877,80	282	58.124,14	73	972,12	-	-	2.877,80
424	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2008	24	4.955,52	38	2.420,62	19	1.528,36	14	558,17	5	334,09	-	-	1.528,36
		2009	16	827,09	28	827,09	3	167,29	13	659,80	12	-	-	-	167,29
		2010	22	3.281,65	47	3.281,64	27	2.384,48	17	897,16	3	-	-	-	2.384,48
		2011	29	31.324,80	68	31.299,79	34	31.135,99	10	149,75	24	14,05	-	-	31.135,99
		2012	10	637,42	34	637,42	9	14,20	9	623,22	16	-	-	-	14,20
		Jumlah	101	41.026,48	215	38.466,56	92	35.230,32	63	2.888,10	60	348,14	-	-	35.230,32
425	Kab. Pinrang	2008	26	1.530,59	26	1.325,52	16	228,34	7	507,59	3	589,59	-	-	228,34
		2009	19	1.373,19	46	1.356,77	40	1.116,59	5	240,18	1	-	-	-	1.116,59
		2010	17	1.500,03	40	1.035,85	25	702,80	12	333,05	3	-	-	-	702,80
		2011	30	4.351,01	90	891,44	37	72,40	47	205,69	6	613,35	-	-	72,40
		2012	12	1.751,83	33	1.751,82	25	1.670,07	8	81,75	-	-	-	-	1.670,07
		Jumlah	104	10.506,65	235	6.361,40	143	3.790,20	79	1.368,26	13	1.202,94	-	-	3.790,20
426	Kab. Kepulauan Selayar	2008	30	7.299,35	69	7.299,33	46	1.173,20	11	5.277,86	12	848,27	-	-	1.173,20
		2009	28	4.420,18	84	4.420,18	53	1.541,24	31	2.878,94	-	-	-	-	1.541,24
		2010	32	3.451,58	76	3.451,57	27	3.177,32	44	3.177,32	5	-	-	-	274,25
		2011	32	8.170,00	83	5.295,73	56	2.037,93	23	3.257,80	4	-	-	-	2.037,93
		2012	17	22.057,08	53	454,38	32	130,07	19	324,31	2	-	-	-	130,07
		Jumlah	139	45.398,19	365	20.921,19	214	5.156,69	128	14.916,23	23	848,27	-	-	5.156,69

Halaman 81 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
427	Kab. Sidenreng Rappang	2008	17	8.115,21	29	2.693,47	18	986,35	11	1.707,12	-	-	14	15	-	986,35
		2009	20	5.914,86	38	1.952,31	22	573,57	14	1.378,74	1	-	1	-	1	573,57
		2010	28	6.036,84	56	1.974,23	31	1.954,38	10	19,85	12	-	3	-	3	1.954,38
		2011	22	1.850,20	64	1.719,44	53	1.259,99	11	459,45	-	-	-	-	-	1.259,99
		2012	11	1.776,02	41	1.195,09	18	1.184,63	23	10,46	-	-	-	-	-	1.184,63
		Jumlah	98	23.693,13	228	9.534,54	142	5.958,92	69	3.575,62	13	-	4	-	4	5.958,92
428	Kab. Sinjai	2008	22	1.078,87	57	618,87	19	15,30	29	311,68	9	291,89	-	-	-	15,30
		2009	17	853,72	47	853,72	14	-	24	853,72	9	-	-	-	-	-
		2010	25	1.224,09	75	1.101,45	47	679,22	20	422,23	7	-	1	-	1	679,22
		2011	25	8.586,15	72	817,44	62	690,94	7	126,50	3	-	-	-	-	690,94
		2012	21	1.509,78	59	888,13	18	304,54	31	496,11	10	87,48	-	-	-	304,54
		Jumlah	110	13.252,61	310	4.279,61	160	1.690,00	111	2.210,24	38	379,37	1	-	1	1.690,00
429	Kab. Soppeng	2008	11	639,26	30	639,26	18	272,72	9	366,54	3	-	-	-	-	272,72
		2009	17	3.137,60	47	2.919,10	30	777,72	15	2.141,38	2	-	-	-	-	777,72
		2010	15	1.151,85	45	1.106,11	28	700,31	16	405,80	1	-	-	-	-	700,31
		2011	13	180,40	33	180,39	16	175,43	17	4,96	-	-	-	-	-	175,43
		2012	13	4.568,45	32	4.568,44	10	858,32	20	3.648,62	2	61,50	-	-	-	858,32
		Jumlah	69	9.677,56	187	9.413,30	102	2.784,50	77	6.567,30	8	61,50	-	-	-	2.784,50
430	Kab. Takalar	2008	23	2.589,80	47	2.589,79	2	717,43	8	1.282,21	37	590,15	-	-	-	717,43
		2009	15	7.918,09	39	7.918,08	10	6.281,16	2	807,61	27	829,31	-	-	-	6.281,16
		2010	32	2.113,94	67	2.023,94	2	123,57	2	103,57	63	1.796,80	-	-	-	123,57
		2011	20	13.772,83	63	13.192,40	26	263,35	32	12.837,75	5	91,30	-	-	-	263,35
		2012	21	4.556,81	48	3.194,17	4	2.317,51	35	876,66	9	-	-	-	-	2.317,51
		Jumlah	111	30.951,47	264	28.918,38	44	9.703,02	79	15.907,80	141	3.307,56	-	-	-	9.703,02
431	Kab. Tana Toraja	2008	16	2.979,99	37	2.979,99	13	20,28	14	921,68	10	2.038,03	-	-	-	20,28
		2009	18	854,95	45	854,95	11	307,33	15	547,62	19	-	-	-	-	307,33
		2010	27	2.022,52	74	592,22	12	15,00	34	577,22	28	-	-	-	-	15,00
		2011	22	1.271,66	78	1.271,65	-	215,13	5	98,08	73	958,44	-	-	-	215,13
		2012	20	1.130,94	57	1.045,26	21	856,24	30	189,02	6	-	-	-	-	856,24
		Jumlah	103	8.260,06	291	6.744,07	57	1.413,98	98	2.333,62	136	2.996,47	-	-	-	1.413,98

Halaman 82 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
432	Kabupaten Toraja Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	17	1.187,63	31	1.187,62	23	514,70	8	672,92	-	-	-	-	514,70	
		2011	17	3.629,51	37	1.237,01	22	448,52	15	788,49	-	-	-	-	448,52	
		2012	16	3.555,56	34	566,18	19	203,62	15	362,56	-	-	-	-	203,62	
		Jumlah	50	8.372,70	102	2.990,81	64	1.166,84	38	1.823,97	-	-	-	-	1.166,84	
433	Kab. Wajo	2008	15	766,51	29	766,51	23	111,61	5	654,90	1	-	-	-	111,61	
		2009	12	559,63	18	559,63	7	199,12	10	360,51	1	-	-	-	199,12	
		2010	44	4.087,83	128	4.072,09	108	3.046,12	20	1.025,97	-	-	-	-	3.046,12	
		2011	12	422,22	39	422,21	35	80,70	3	341,51	-	-	1	-	80,70	
		2012	25	37.629,16	64	28.994,47	34	2.755,64	8	643,56	22	25.595,27	-	-	2.755,64	
		Jumlah	108	43.465,35	278	34.814,91	207	6.193,19	46	3.026,45	24	25.595,27	1	-	6.193,19	
434	Kota Makassar	2008	19	3.530,73	54	3.525,73	14	405,60	19	2.564,53	21	555,60	-	-	405,60	
		2009	39	5.803,23	81	1.624,58	13	-	50	1.624,58	18	-	-	-	-	
		2010	63	33.824,55	162	28.722,94	67	10.412,35	66	18.111,13	28	199,46	1	-	10.412,35	
		2011	33	49.409,13	77	45.006,97	22	867,29	51	44.139,68	4	-	-	-	867,29	
		2012	20	3.119,27	54	929,48	28	716,84	25	212,64	1	-	-	-	716,84	
		Jumlah	174	95.686,91	428	79.809,70	144	12.402,08	211	66.652,56	72	755,06	1	-	12.402,08	
435	Kota Palopo	2008	12	7.057,83	26	6.210,86	4	2.696,15	11	3.514,71	11	-	-	-	2.696,15	
		2009	15	2.885,04	46	2.857,19	18	620,96	22	1.513,29	6	722,94	-	-	620,96	
		2010	19	989,16	62	989,16	37	80,66	23	908,50	2	-	-	-	80,66	
		2011	30	12.965,64	105	12.965,63	62	2.177,17	41	10.724,07	2	64,39	-	-	2.177,17	
		2012	40	19.292,98	91	6.766,35	24	982,27	36	3.862,99	31	1.921,09	-	-	982,27	
		Jumlah	116	43.190,65	330	29.789,19	145	6.557,21	133	20.523,56	52	2.708,42	-	-	6.557,21	
436	Kota Parepare	2008	15	2.442,98	17	2.048,98	13	686,12	4	1.362,86	-	-	-	-	686,12	
		2009	18	2.532,76	24	920,30	20	640,55	4	279,75	-	-	-	-	640,55	
		2010	32	4.843,30	72	2.269,20	59	1.602,08	13	667,12	-	-	-	-	1.602,08	
		2011	26	1.366,90	60	1.223,89	30	677,79	24	546,10	6	-	-	-	677,79	
		2012	28	516,87	58	516,86	-	3,45	1	-	57	513,41	-	-	3,45	
		Jumlah	119	11.702,81	231	6.979,23	122	3.609,99	46	2.855,83	63	513,41	-	-	3.609,99	

Halaman 83 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		16	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
437	Prov. Sulawesi Tenggara	2008	101	29.651,52	269	11.521,53	121	3.585,23	69	3.503,37	79	4.432,93	-	-	-	1.319,66
		2009	91	104.949,67	245	32.945,18	111	10.835,99	80	15.989,36	54	6.115,43	-	-	4	8.012,44
		2010	69	36.176,67	200	29.370,16	89	14.184,73	94	15.185,43	17	-	-	-	-	6.606,21
		2011	49	21.703,90	127	4.762,42	45	2.215,28	37	2.547,14	45	-	-	-	-	2.868,90
		2012	34	90.921,40	101	6.540,33	60	608,27	22	769,36	19	5.162,70	-	-	-	608,27
		Jumlah	344	283.403,16	942	85.139,62	426	31.429,50	302	37.994,66	214	15.711,06	-	-	4	19.415,48
438	Kab. Bombana	2008	31	24.176,23	91	20.482,29	43	11.091,52	43	9.390,77	5	-	-	-	-	2.295,37
		2009	58	102.230,88	183	79.353,27	1	41.090,26	1	1.949,17	181	36.313,84	-	-	-	3.911,12
		2010	25	74.986,39	80	71.394,63	2	45.157,65	9	17.463,04	69	8.773,94	-	-	-	44.871,21
		2011	48	22.480,52	142	20.764,33	-	153,04	5	14.216,90	137	6.394,39	-	-	-	153,04
		2012	23	68.863,68	27	15.059,02	-	88,68	4	14.124,43	23	845,91	-	-	-	88,68
		Jumlah	185	292.737,70	523	207.053,54	46	97.581,15	62	57.144,31	415	52.328,08	-	-	-	51.319,42
439	Kab. Buton	2008	36	6.948,29	86	3.721,21	64	2.613,83	21	1.107,38	1	-	-	-	-	2.613,83
		2009	17	4.383,36	47	190,50	38	99,22	9	91,28	-	-	-	-	-	99,22
		2010	22	6.128,75	50	1.675,43	28	515,34	18	1.160,09	4	-	-	-	-	515,34
		2011	20	3.300,08	44	3.166,43	6	147,77	16	3.018,66	22	-	-	-	-	147,77
		2012	41	9.721,29	79	3.354,28	8	41,82	23	230,61	48	3.081,85	-	-	-	41,82
		Jumlah	136	30.481,77	306	12.107,85	144	3.417,98	87	5.608,02	75	3.081,85	-	-	-	3.417,98
440	Kab. Buton Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	26	30.565,34	72	5.801,54	32	2.824,84	6	697,42	34	2.279,28	-	-	-	3.540,31
		2010	29	23.743,19	92	23.743,17	72	21.899,46	10	854,07	10	989,64	-	-	-	22.474,30
		2011	32	7.257,86	70	4.856,41	1	1.574,34	5	2.173,38	64	1.108,69	-	-	-	1.574,34
		2012	34	8.206,96	72	7.278,75	-	12,29	5	106,22	67	7.160,24	-	-	-	19,77
		Jumlah	121	69.773,35	306	41.679,87	105	26.310,93	26	3.831,09	175	11.537,85	-	-	-	27.608,72
441	Kab. Kolaka	2008	79	19.263,51	232	11.168,00	148	4.763,20	49	5.888,16	35	516,64	-	-	-	8.828,14
		2009	39	19.783,73	76	1.736,61	52	298,58	16	954,15	8	483,88	-	-	-	247,22
		2010	29	20.707,69	73	5.211,28	38	2.042,23	32	3.169,05	3	-	-	-	-	1.725,63
		2011	31	77.348,57	95	19.426,05	54	1.253,08	19	15.416,44	22	2.756,53	-	-	-	1.253,08
		2012	44	12.091,11	137	979,85	26	24,55	32	72,12	79	883,18	-	-	-	24,55
		Jumlah	222	149.194,61	613	38.521,79	318	8.381,64	148	25.499,92	147	4.640,23	-	-	-	12.078,62

Halaman 84 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
442	Kab. Kolaka Utara	2008	38	18.290,72	124	16.942,97	82	3.024,28	35	12.568,09	7	1.350,60	-	-	-	3.024,28
		2009	49	19.819,26	152	19.091,46	83	1.767,53	27	4.501,56	42	12.822,37	-	-	-	1.767,53
		2010	21	1.669,51	54	1.669,50	31	61,96	21	1.501,25	2	106,29	-	-	-	61,97
		2011	32	12.534,29	97	8.244,79	65	4.325,62	30	3.827,63	2	91,54	-	-	-	4.325,62
		2012	24	4.269,89	58	3.495,46	41	1.755,50	17	1.739,96	-	-	-	-	-	1.804,65
		Jumlah	164	56.583,67	485	49.444,18	302	10.934,89	130	24.138,49	53	14.370,80	-	-	-	10.984,05
443	Kab. Konawe	2008	49	39.936,33	157	39.859,14	115	22.467,14	35	15.661,71	7	1.730,29	-	-	-	4.653,40
		2009	54	95.633,04	126	90.303,05	18	39.784,11	17	2.836,75	91	47.682,19	-	-	-	291,16
		2010	34	63.275,85	95	63.728,22	51	38.443,26	33	23.186,48	11	2.098,48	-	-	-	3.346,05
		2011	33	216.447,54	98	68.606,92	43	8.789,56	30	58.412,35	25	1.405,01	-	-	-	8.789,56
		2012	32	7.904,28	86	4.822,50	51	191,56	35	4.630,94	-	-	-	-	-	191,56
		Jumlah	202	423.197,04	562	267.319,83	278	109.675,63	150	104.728,23	134	52.915,97	-	-	-	17.271,73
444	Kab. Konawe Selatan	2008	21	9.507,47	54	8.783,82	33	1.677,68	17	7.091,14	4	15,00	-	-	-	1.677,68
		2009	52	12.283,46	150	9.594,56	66	1.641,03	28	7.925,95	56	27,58	-	-	-	1.641,03
		2010	34	7.775,96	97	7.807,92	34	5.205,08	19	2.588,62	44	14,22	-	-	-	5.141,98
		2011	35	4.325,20	78	1.260,02	39	47,92	24	1.168,96	15	43,14	-	-	-	243,12
		2012	16	4.898,88	37	1.605,93	19	1.009,02	14	596,91	4	-	-	-	-	1.009,03
		Jumlah	158	38.790,97	416	29.052,25	191	9.580,73	102	19.371,58	123	99,94	-	-	-	9.712,84
445	Kab. Konawe Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	11.469,90	93	8.732,36	8	2.643,39	24	5.672,42	61	416,55	-	-	-	942,87
		2010	36	28.732,91	123	24.175,67	19	7.155,24	46	17.020,43	58	-	-	-	-	4.750,02
		2011	36	22.528,26	143	16.205,07	3	7.672,21	8	5.335,60	132	3.197,26	-	-	-	3.807,43
		2012	32	17.281,52	90	15.036,90	28	975,17	26	7.320,55	36	6.741,18	-	-	-	975,67
		Jumlah	131	80.012,59	449	64.150,00	58	18.446,01	104	35.349,00	287	10.354,99	-	-	-	10.475,99
446	Kab. Muna	2008	59	17.019,30	147	15.622,61	66	5.400,77	64	6.137,76	17	4.084,08	-	-	-	4.064,54
		2009	22	17.289,30	63	4.800,67	27	1.100,35	33	3.700,32	3	-	-	-	-	1.226,72
		2010	45	56.003,02	131	55.739,50	46	2.598,52	23	15.580,17	62	37.560,81	-	-	-	2.598,52
		2011	29	2.407,66	91	2.281,51	-	409,02	4	635,22	87	1.237,27	-	-	-	409,02
		2012	56	3.961,47	145	1.719,95	2	0,15	35	528,82	108	1.190,98	-	-	-	0,15
		Jumlah	211	96.680,75	577	80.164,24	141	9.508,81	159	26.582,29	277	44.073,14	-	-	-	8.298,95

Halaman 85 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai				
447	Kab. Wakatobi	2008	16	3.397,90	34	3.397,90	25	868,91	10	11	11	12	13	14	15	16		
		2009	15	8.439,54	38	8.213,03	29	7.745,77	9	2.528,99	-	-	-	-	-	-	868,91	
		2010	45	3.462,02	104	3.001,39	46	953,54	11	258,14	47	1.789,71	-	-	-	-	-	9.763,67
		2011	34	39.949,56	99	21.482,94	60	595,61	37	20.887,33	2	-	-	-	-	-	-	955,63
		2012	22	113.935,17	44	1.315,86	17	35,43	27	1.280,43	-	-	-	-	-	-	-	590,16
		Jumlah	132	169.184,19	319	37.411,12	177	10.199,26	93	25.422,15	49	1.789,71	-	-	-	-	12.345,89	
448	Kota Bau-Bau	2008	47	8.962,47	108	5.341,54	50	4.134,73	19	286,28	39	920,53	-	-	-	-	-	2.248,65
		2009	23	12.848,89	50	12.848,88	36	11.704,29	7	144,59	7	1.000,00	-	-	-	-	-	8.381,16
		2010	21	17.831,44	50	7.849,92	27	2.053,33	16	5.796,59	7	-	-	-	-	-	-	2.028,83
		2011	42	3.474,68	103	2.246,50	43	196,65	52	2.049,85	8	-	-	-	-	-	-	192,95
		2012	40	10.556,66	94	8.639,75	18	208,21	56	8.378,73	20	52,81	-	-	-	-	-	274,71
		Jumlah	173	53.674,14	405	36.926,59	174	18.297,21	150	16.656,04	81	1.973,34	-	-	-	-	13.126,30	
449	Kota Kendari	2008	63	7.764,20	137	6.206,22	94	1.868,68	34	4.287,55	9	49,99	-	-	-	-	-	1.738,18
		2009	40	24.257,67	59	379,66	58	307,55	1	72,11	-	-	-	-	-	-	-	338,35
		2010	39	9.290,26	91	5.215,28	48	955,80	31	2.902,86	12	1.356,62	-	-	-	-	-	955,80
		2011	50	56.673,86	167	2.777,33	43	984,64	62	1.792,69	62	-	-	-	-	-	-	789,64
		2012	8	372.492,88	11	48,13	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	200	470.478,87	465	14.626,62	245	4.116,67	137	9.055,21	83	1.454,74	-	-	-	-	-	3.821,97
450	Prov. Gorontalo	2008	58	10.049,59	107	10.049,58	78	620,88	24	9.069,34	5	359,36	-	-	-	-	-	620,88
		2009	22	6.246,71	58	6.246,70	29	1.360,35	6	4.884,90	23	1,45	-	-	-	-	-	1.360,35
		2010	12	3.496,84	34	3.496,83	9	2.055,63	5	1.011,24	20	429,96	-	-	-	-	-	2.055,63
		2011	38	8.023,80	95	7.939,38	7	635,93	3	703,47	85	6.599,98	-	-	-	-	-	635,93
		2012	39	10.677,54	100	1.309,92	16	61,76	23	117,13	61	1.131,03	-	-	-	-	-	61,76
		Jumlah	169	38.494,48	394	29.042,41	139	4.734,55	61	15.632,19	194	8.521,78	-	-	-	-	4.734,55	
451	Kab. Boalemo	2008	24	2.539,23	66	2.539,22	59	802,35	4	1.632,04	3	104,83	-	-	-	-	-	802,35
		2009	33	163,60	85	163,59	4	129,59	45	34,00	36	-	-	-	-	-	-	129,59
		2010	37	1.557,96	108	1.557,96	19	268,46	70	311,28	19	978,22	-	-	-	-	-	268,46
		2011	10	151,91	26	151,91	13	70,03	11	35,00	2	46,88	-	-	-	-	-	70,03
		2012	28	2.829,92	61	2.712,93	16	53,25	3	2.065,08	42	594,60	-	-	-	-	-	53,25
		Jumlah	132	7.242,62	346	7.125,61	111	1.323,68	133	4.077,40	102	1.724,53	-	-	-	-	1.323,68	

Halaman 86 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
452	Kab. Bone Bolango	2008	17	226,29	42	226,27	24	75,48	11	142,48	7	8,31	-	-	-	75,48
		2009	70	9.993,01	189	9.986,85	153	3.998,36	21	4.213,73	15	1.174,76	-	-	-	3.998,36
		2010	29	10.467,99	76	2.416,61	52	408,58	11	950,54	13	1.057,49	-	-	-	408,58
		2011	11	1.496,15	25	1.496,14	17	199,18	5	1.063,97	3	232,99	-	-	-	199,18
		2012	47	6.832,85	146	2.482,79	13	22,15	2	327,13	131	2.133,51	-	-	-	22,15
		Jumlah	174	28.416,29	478	16.008,66	259	4.703,75	50	6.697,85	169	4.607,06	-	-	-	4.703,75
453	Kab. Gorontalo	2008	14	367,39	32	367,39	23	50,97	9	316,42	-	-	-	-	-	50,97
		2009	73	4.299,51	179	4.299,50	36	1.189,07	60	2.900,07	83	210,36	-	-	-	1.189,07
		2010	23	1.445,08	67	1.445,07	22	684,44	4	646,67	41	113,96	-	-	-	700,63
		2011	71	2.921,64	184	2.921,63	68	581,07	35	1.474,72	81	865,84	-	-	-	581,07
		2012	31	15.188,01	69	14.811,51	-	-	-	-	69	14.811,51	-	-	-	-
		Jumlah	212	24.211,63	531	23.845,10	149	2.505,55	108	5.337,88	274	16.001,67	-	-	-	2.521,74
454	Kab. Gorontalo Utara	2008	8	68,50	24	68,50	7	15,00	17	53,50	-	-	-	-	-	15,00
		2009	22	3.032,59	73	3.032,58	46	795,04	23	1.679,80	4	557,74	-	-	-	765,14
		2010	26	2.290,85	54	2.290,85	9	836,33	36	1.436,21	9	18,31	-	-	-	836,33
		2011	13	127,36	29	127,35	18	38,01	8	14,34	3	75,00	-	-	-	38,01
		2012	38	7.429,75	114	7.429,75	15	3,50	11	260,74	88	7.165,51	-	-	-	3,50
		Jumlah	107	12.949,05	294	12.949,03	95	1.687,88	95	3.444,59	104	7.816,56	-	-	-	1.657,98
455	Kab. Pohuwato	2008	26	4.022,34	57	4.022,34	45	1.526,83	8	2.491,01	4	4,50	-	-	-	1.526,83
		2009	34	8.414,00	93	8.413,99	65	6.627,00	9	1.174,56	19	612,43	-	-	-	6.627,00
		2010	18	629,01	49	629,01	37	200,44	10	428,57	2	-	-	-	-	200,44
		2011	17	5.883,92	50	5.883,92	37	597,51	7	5.286,41	6	-	-	-	-	597,51
		2012	17	3.695,53	39	2.178,94	22	5,93	7	2.039,24	10	133,77	-	-	-	5,93
		Jumlah	112	22.644,80	288	21.128,20	206	8.957,71	41	11.419,79	41	750,70	-	-	-	8.957,71
456	Kota Gorontalo	2008	56	11.122,60	117	11.194,06	79	1.699,46	19	8.742,65	19	751,95	-	-	-	1.699,46
		2009	64	2.179,39	129	2.392,15	56	220,67	37	1.030,06	36	1.141,42	-	-	-	220,67
		2010	58	2.725,09	136	2.919,55	57	77,44	13	801,67	66	2.040,44	-	-	-	77,44
		2011	30	3.744,42	103	3.744,41	64	273,39	18	3.044,77	21	426,25	-	-	-	273,39
		2012	35	11.922,81	80	5.022,80	20	-	20	-	40	5.022,80	-	-	-	-
		Jumlah	243	31.694,31	565	25.273,42	276	2.270,96	107	13.619,15	182	9.383,31	-	-	-	2.270,96

Halaman 87 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		16	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
457	Prov. Sulawesi Barat	2008	51	27.594,51	104	16.577,69	70	10.274,89	32	6.302,80	2	-	14	-	-	10.274,89
		2009	39	12.756,81	92	10.112,81	15	2.113,19	75	7.999,62	2	-	-	-	-	2.123,32
		2010	45	16.380,47	97	15.556,69	18	5.419,00	75	10.117,69	4	-	-	-	-	5.258,51
		2011	34	16.885,44	74	7.839,37	2	395,21	55	7.138,12	17	306,04	-	-	-	5.963,52
		2012	37	25.625,10	85	10.343,39	12	2.623,63	36	7.453,36	37	261,15	-	-	5	3.167,98
		Jumlah	206	99.242,33	452	60.409,95	117	20.825,92	273	39.011,59	62	567,19	-	-	5	26.788,22
458	Kab. Majene	2008	33	4.702,59	67	1.350,88	7	296,10	51	1.049,18	9	5,60	-	-	-	296,10
		2009	31	2.080,26	67	1.475,72	27	457,20	36	1.018,52	4	-	-	-	-	457,20
		2010	30	3.107,13	65	2.851,12	9	91,10	55	2.760,02	1	-	-	-	-	91,10
		2011	46	20.308,57	106	1.757,21	9	562,06	73	1.195,15	24	-	-	-	-	1.195,15
		2012	23	3.435,45	50	1.975,12	7	318,00	41	1.624,23	2	32,89	-	-	-	745,01
		Jumlah	163	33.634,00	355	9.410,05	59	1.724,46	256	7.647,10	40	38,49	-	-	-	3.508,27
459	Kab. Mamasa	2008	32	6.302,01	93	6.302,00	47	1.523,85	44	4.698,61	2	79,54	-	-	-	1.523,85
		2009	20	5.139,88	50	2.995,50	36	1.148,11	14	1.847,39	-	-	-	-	-	1.148,11
		2010	36	3.715,75	75	3.323,14	39	753,41	36	2.569,73	-	-	-	-	-	753,41
		2011	40	9.634,66	87	8.580,76	33	1.812,21	54	6.768,55	-	-	-	-	-	1.812,21
		2012	36	42.759,85	85	7.548,85	33	241,35	29	4.800,92	23	2.506,58	-	-	-	241,35
		Jumlah	164	67.552,15	390	28.750,25	188	5.478,93	177	20.685,20	25	2.586,12	-	-	-	5.478,93
460	Kab. Mamuju	2008	19	994,86	47	641,38	5	292,70	39	348,68	3	-	-	-	-	292,94
		2009	40	10.085,50	80	2.439,89	26	793,97	47	1.645,92	7	-	-	-	-	793,97
		2010	37	10.722,73	93	10.484,82	13	6.735,03	64	3.738,24	16	11,55	-	-	-	6.735,03
		2011	36	27.217,31	77	4.483,55	29	425,63	37	4.057,92	11	-	-	-	-	425,63
		2012	28	2.982,21	63	2.717,68	12	1.582,40	40	970,32	11	164,96	-	-	-	1.846,91
		Jumlah	160	52.002,61	360	20.767,32	85	9.829,73	227	10.761,08	48	176,51	-	-	-	10.094,48
461	Kab. Mamuju Utara	2008	27	8.507,58	61	8.248,74	40	4.605,84	21	3.642,90	-	-	-	-	-	4.605,84
		2009	39	6.224,50	90	6.023,70	34	1.262,56	53	4.637,59	3	123,55	-	-	-	1.262,56
		2010	31	5.309,58	72	5.309,57	8	203,17	21	4.460,41	43	645,99	-	-	-	285,64
		2011	35	8.138,25	75	6.346,99	9	319,91	35	4.620,34	31	1.406,74	-	-	-	2.189,86
		2012	23	3.660,66	45	2.380,52	5	755,53	26	1.039,58	14	476,57	-	-	109	1.273,79
		Jumlah	155	31.840,57	343	28.309,52	96	7.147,01	156	18.400,82	91	2.652,85	-	-	109	9.617,69

Halaman 88 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
462	Kab. Polewali Mandar	2008	26	12.578,92	56	10.186,44	30	3.960,88	25	6.195,08	1	30,48	-	-	3.960,88
		2009	40	8.088,13	86	7.970,77	28	1.191,60	53	6.779,17	5	-	-	-	1.191,60
		2010	46	13.569,80	98	13.569,79	17	1.567,48	55	11.739,22	26	263,09	-	-	1.567,48
		2011	23	3.976,11	51	2.591,01	34	545,91	17	2.045,10	-	-	-	-	782,20
		2012	29	19.115,91	64	5.358,32	41	252,22	9	4.569,87	14	536,23	-	-	523,34
		Jumlah	164	57.328,87	355	39.676,33	150	7.518,09	159	31.328,44	46	829,80	-	-	8.025,50
463	Prov. Maluku	2008	42	4.152,88	97	4.152,88	41	26,40	54	4.010,35	2	116,13	-	-	-
		2009	27	8.952,23	67	8.952,23	11	2.059,40	53	6.892,83	3	-	-	-	2.059,40
		2010	19	9.029,56	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-	-	-
		2011	29	9.314,32	117	3.707,45	8	-	39	1.348,44	70	2.359,01	-	-	-
		2012	57	23.661,96	158	23.661,95	27	224,71	35	3.267,31	96	20.169,93	-	-	223,34
		Jumlah	174	55.110,95	496	49.504,07	103	2.310,51	221	24.548,49	172	22.645,07	-	-	2.282,74
464	Kab. Buru	2008	22	2.932,08	59	2.932,07	35	1.266,78	15	1.663,10	9	2,19	-	-	251,50
		2009	29	776,13	75	776,13	38	18,82	21	621,74	16	135,57	-	-	8,58
		2010	26	1.485,83	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-	-	-
		2011	42	3.913,41	137	3.913,41	-	-	-	-	137	3.913,41	-	-	-
		2012	18	7.678,78	84	7.678,77	5	-	69	7.464,07	10	214,70	-	-	-
		Jumlah	137	16.786,23	429	16.786,21	97	1.285,60	157	11.234,74	175	4.265,87	-	-	260,08
465	Kab. Buru Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	19.685,67	77	21.980,64	3	-	37	17.425,36	37	4.555,28	-	-	-
		2011	31	34.109,31	159	34.109,31	-	-	-	-	159	34.109,31	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	57	53.794,98	236	56.089,95	3	-	37	17.425,36	196	38.664,59	-	-	-
466	Kab. Kepulauan Aru	2008	7	705,53	12	705,53	9	-	-	-	3	705,53	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	53	50.308,96	131	50.308,95	75	9,29	42	49.735,76	14	563,90	-	-	9,29
		2011	27	14.533,13	75	14.533,13	-	-	-	-	75	14.533,13	-	-	-
		2012	42	753.744,02	146	167.927,27	15	-	24	2.705,85	107	165.221,42	-	-	-
		Jumlah	129	819.291,64	364	233.474,88	99	9,29	66	52.441,61	199	181.023,98	-	-	9,29

Halaman 89 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	467 Kab. Maluku Tengah	2008	38	2.504,91	117	1.862,63	68	83,33	44	1.779,30	5	-	14	15	-	-	83,33
		2009	40	5.931,52	95	5.931,51	66	61,48	24	5.870,33	5	-	-	-	-	-	27,55
		2010	42	734,86	105	373,12	39	115,90	35	564,59	31	692,63	-	-	-	-	50,70
		2011	25	2.144,14	119	1.814,14	56	76,97	53	1.737,17	10	-	-	-	-	-	-
		2012	19	1.737,891,92	55	1.364,41	30	395,94	20	968,47	5	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	164	1.750.207,35	491	12.345,81	259	733,62	176	10.919,56	56	692,63	-	-	-	-	161,58
468	Kab. Maluku Tenggara	2008	28	2.175,68	69	2.175,67	44	46,40	22	1.433,82	3	695,45	-	-	-	-	46,40
		2009	32	5.057,83	99	5.057,82	54	393,72	40	4.664,10	5	-	-	-	-	-	393,72
		2010	49	7.026,64	135	3.822,53	72	478,39	49	3.344,14	14	-	-	-	-	-	475,33
		2011	21	2.361,91	88	2.311,44	32	480,85	41	1.122,21	15	708,38	-	-	-	-	-
		2012	32	9.737,88	103	16.650,98	28	8.325,49	66	8.325,49	9	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	162	26.359,94	494	30.018,44	230	9.724,85	218	18.889,76	46	1.403,83	-	-	-	-	915,45
469	Kab. Maluku Tenggara Barat	2008	27	4.046,74	58	4.049,37	30	183,92	18	3.122,35	10	743,10	-	-	-	-	183,92
		2009	23	6.114,24	63	4.127,42	22	2.226,27	36	1.526,15	5	375,00	-	-	-	-	2.226,27
		2010	17	1.298,42	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	-	-	-	-	281,11
		2011	39	13.870,64	116	818,20	36	26,04	44	-	36	792,16	-	-	-	-	26,04
		2012	23	6.113,26	86	6.004,94	35	-	33	854,24	18	5.150,70	-	-	-	-	-
		Jumlah	129	31.443,30	360	16.298,35	143	2.717,34	148	6.520,05	69	7.060,96	-	-	-	-	2.717,34
470	Kab. Maluku Barat Daya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	12.452,47	64	12.452,47	3	-	57	12.452,47	4	-	-	-	-	-	-
		2011	29	92.551,12	165	83.792,80	-	-	-	-	165	83.792,80	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	54	105.003,59	229	96.245,27	3	-	57	12.452,47	169	83.792,80	-	-	-	-	-
471	Kab. Seram Bagian Barat	2008	17	2.142,31	34	2.142,31	16	-	8	345,47	10	1.796,84	-	-	-	-	-
		2009	40	7.310,50	97	7.310,49	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	56	26.476,83	179	26.428,92	1	55,00	-	-	178	26.373,92	-	-	-	-	-
		2012	26	22.701,24	87	22.686,69	-	-	-	-	87	22.686,69	-	-	-	-	-
		Jumlah	139	58.630,88	397	58.568,41	39	55,00	46	5.863,34	312	52.650,07	-	-	-	-	-

Halaman 90 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
472	Kab. Seram Bagian Timur	2008	19	1.168,26	40	1.168,25	12	-	26	1.032,89	2	135,36	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	16.279,05	78	16.279,04	17	1.178,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	-	-
		2011	37	890.107,71	145	50.679,21	24	3.332,48	45	11.115,25	76	36.231,48	-	-	-
		2012	25	18.749,72	129	18.749,72	-	-	-	-	129	18.749,72	-	-	-
		Jumlah	109	926.304,74	392	86.876,22	53	4.511,14	123	20.543,22	216	61.821,86	-	-	-
473	Kota Ambon	2008	14	1.139,94	27	1.139,93	12	513,52	14	626,41	1	-	-	-	513,52
		2009	19	1.507,24	45	1.256,54	8	898,53	5	11,80	32	346,21	-	-	898,53
		2010	42	446,68	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	-	-
		2011	53	4.800,95	184	3.969,95	-	-	-	-	184	3.969,95	-	-	-
		2012	53	13.593,88	173	13.593,88	-	-	-	-	173	13.593,88	-	-	-
		Jumlah	181	21.488,69	518	20.406,98	30	1.412,05	23	717,20	465	18.277,73	-	-	1.412,05
474	Kota Tual	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	1.838,82	59	1.838,81	1	15,75	1	617,98	57	1.205,08	-	-	15,75
		2011	26	335.761,02	95	7.042,10	-	-	-	-	95	7.042,10	-	-	-
		2012	42	21.655,28	184	21.655,27	-	-	1	7.061,55	183	14.593,72	-	-	-
		Jumlah	94	359.255,12	338	30.536,18	1	15,75	2	7.679,53	335	22.840,90	-	-	15,75
475	Prov. Maluku Utara	2008	83	19.250,54	205	17.312,94	50	254,23	94	15.589,74	61	1.468,97	-	-	254,23
		2009	73	5.662,07	113	1.967,80	22	219,08	40	1.085,42	51	663,30	-	-	219,08
		2010	69	8.472,49	154	6.505,28	16	1.303,02	37	1.716,00	101	3.486,26	-	-	1.303,02
		2011	101	29.647,38	286	23.675,87	70	2.287,19	93	8.664,53	123	12.724,15	-	-	2.287,19
		2012	59	32.838,59	177	12.125,12	27	2.467,94	44	1.812,85	106	7.844,33	-	-	2.467,94
		Jumlah	385	95.871,07	935	61.587,01	185	6.531,46	308	28.868,54	442	26.187,01	-	-	6.531,46
476	Kab. Halmahera Barat	2008	37	19.428,41	93	5.037,73	69	1.062,64	24	3.975,09	-	-	-	-	1.062,64
		2009	49	25.601,08	80	15.624,07	44	7.272,26	35	8.214,46	1	137,35	-	-	6.957,26
		2010	41	12.942,09	122	12.257,44	52	2.698,6	70	11.987,58	-	-	-	-	2.698,6
		2011	37	1.417,27	98	1.417,27	39	455,08	44	604,10	15	358,09	-	-	509,78
		2012	37	8.019,44	89	5.804,89	21	102,43	24	100,00	44	5.602,46	-	-	102,43
		Jumlah	201	67.408,29	482	40.141,40	225	9.162,27	197	24.881,23	60	6.097,90	-	-	8.901,97

Halaman 91 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
477	Kab. Halmahera Selatan	2008	17	5.805,79	33	3.442,14	27	573,46	6	2.865,68	11	11	12	13	14	15	16	
		2009	43	10.701,47	103	8.034,23	53	61,08	25	7.409,00	25	564,15	25	564,15	-	-	-	573,46
		2010	45	22.531,06	80	19.310,26	34	182,22	29	18.991,89	16	136,15	16	136,15	1	-	-	182,22
		2011	66	25.180,72	150	18.760,10	16	1.077,56	13	7.876,83	121	9.805,71	-	-	-	-	-	1.077,56
		2012	37	19.521,59	105	14.378,11	-	-	-	-	-	105	14.378,11	-	-	-	-	-
		Jumlah	208	83.740,63	471	63.924,84	130	1.894,32	73	37.146,40	267	24.884,12	1	-	-	-	-	1.894,32
478	Kab. Halmahera Tengah	2008	25	6.751,21	61	4.647,75	42	1.957,85	17	2.581,07	2	108,83	-	-	-	-	-	1.957,85
		2009	50	19.093,86	122	13.585,61	44	186,29	21	3.096,93	57	10.302,39	-	-	-	-	-	186,29
		2010	30	11.922,34	82	9.893,14	27	4.539,39	43	5.326,75	12	27,00	-	-	-	-	-	4.539,39
		2011	43	12.742,62	92	6.748,56	37	774,19	55	5.974,37	-	-	-	-	-	-	-	2.052,19
		2012	59	31.350,64	180	30.679,91	1	-	2	-	177	30.679,91	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	207	81.860,67	537	65.554,97	151	7.457,72	138	16.979,12	248	41.118,13	-	-	-	-	-	8.735,72
479	Kab. Halmahera Timur	2008	18	2.593,30	40	2.593,29	35	1.015,81	5	1.577,48	-	-	-	-	-	-	-	1.015,81
		2009	51	16.470,94	108	14.104,44	67	1.490,16	37	12.614,28	3	-	-	-	1	-	-	1.490,16
		2010	48	19.787,29	116	14.999,17	51	342,99	55	12.478,61	10	2.177,57	-	-	-	-	-	342,99
		2011	96	51.264,29	264	33.195,63	13	4.211,62	43	4.376,74	208	24.607,27	-	-	-	-	-	4.211,62
		2012	41	2.531,89	134	1.889,98	13	304,24	11	147,09	110	1.438,65	-	-	-	-	-	322,12
		Jumlah	254	92.647,71	662	66.782,51	179	7.364,82	151	31.194,20	331	28.223,49	1	-	-	-	-	7.382,70
480	Kab. Halmahera Utara	2008	61	18.764,65	153	11.034,70	55	723,39	43	7.936,02	55	2.375,29	-	-	-	-	-	723,39
		2009	39	11.751,22	76	10.280,11	16	7.489,46	22	2.193,88	38	596,77	-	-	-	-	-	7.489,46
		2010	38	7.473,25	78	7.197,85	9	1.401,75	13	3.829,88	56	1.966,22	-	-	-	-	-	1.401,75
		2011	54	9.685,93	124	8.670,88	3	249,04	8	535,49	113	7.886,35	-	-	-	-	-	249,04
		2012	62	19.412,35	161	7.371,59	3	105,33	2	464,42	156	6.801,84	-	-	-	-	-	105,33
		Jumlah	254	67.087,40	592	44.555,13	86	9.968,97	88	14.959,69	418	19.626,47	-	-	-	-	-	9.968,97
481	Kab. Kepulauan Sula	2008	49	69.851,83	101	16.825,53	52	7.309,03	37	9.516,50	12	-	-	-	-	-	-	7.414,87
		2009	45	8.324,60	99	4.033,23	19	478,36	25	2.244,07	55	1.310,80	-	-	-	-	-	478,36
		2010	21	461,44	75	461,43	31	48,07	34	413,36	10	-	-	-	-	-	-	48,07
		2011	69	23.717,88	196	15.753,04	13	705,62	85	8.410,58	98	6.636,84	-	-	-	-	-	705,62
		2012	45	11.274,43	181	9.886,00	27	110,00	39	2.447,09	115	7.328,91	-	-	-	-	-	110,00
		Jumlah	229	113.630,18	652	46.959,23	142	8.651,08	220	23.031,60	290	15.276,55	-	-	-	-	-	8.771,92

Halaman 92 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
482	Kab. Pulau Morotai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	14	968,56	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-	-	-	
		2011	56	9.800,42	161	9.230,66	8	259,00	79	6.834,24	74	2.137,42	-	-	259,00	
		2012	79	14.984,51	160	8.521,64	-	207,12	47	4.579,45	113	3.735,07	-	-	207,12	
		Jumlah	149	25.753,49	352	18.720,86	8	466,12	126	11.413,69	218	6.841,05	-	-	466,12	
483	Kota Ternate	2008	65	13.000,59	123	5.384,69	75	1.442,22	30	3.250,48	18	691,99	-	-	1.442,22	
		2009	64	2.312,20	122	1.726,87	78	312,26	40	1.414,61	4	-	-	-	312,26	
		2010	41	852,01	64	814,24	29	155,68	35	658,56	-	-	-	-	155,68	
		2011	79	38.225,63	239	34.485,60	66	547,66	112	33.938,94	61	-	-	-	547,66	
		2012	48	925.196,24	130	28.484,05	35	957,59	24	4.812,96	71	22.713,50	-	-	957,59	
		Jumlah	297	979.586,67	678	70.896,45	283	3.415,41	241	44.075,55	154	23.405,49	-	-	3.415,41	
484	Kota Tidore Kepulauan	2008	35	5.085,20	84	4.594,72	74	4.472,88	8	121,84	2	-	-	-	4.472,88	
		2009	56	12.595,91	104	6.487,41	86	6.412,83	14	74,58	2	-	2	-	6.412,83	
		2010	50	15.921,27	115	531,84	85	126,52	24	405,32	6	-	-	-	126,52	
		2011	25	5.617,05	48	5.462,45	29	1.673,93	18	3.788,52	1	-	-	-	1.673,93	
		2012	46	14.594,07	143	5.378,67	41	2.153,27	22	2.049,09	80	1.176,31	-	-	2.153,27	
		Jumlah	212	53.813,50	494	22.455,09	315	14.839,43	86	6.439,35	91	1.176,31	2	-	14.839,43	
485	Prov. Papua	2008	45	61.486,48	63	20.030,45	32	4.724,97	31	15.305,48	-	-	-	-	6.706,23	
		2009	44	20.500,49	73	20.500,48	31	675,54	42	19.824,94	-	-	-	-	4.503,20	
		2010	55	114.815,93	105	105.306,25	46	11.025,98	56	94.280,27	3	-	-	-	11.025,98	
		2011	49	27.160,65	146	25.877,40	-	-	-	-	146	25.877,40	-	-	-	
		2012	25	115.156,54	80	27.058,35	-	-	-	-	80	27.058,35	-	-	-	
		Jumlah	218	339.120,09	467	198.772,93	109	16.426,49	129	129.410,69	229	52.935,75	-	-	22.235,41	
486	Kab. Asmat	2008	18	7.461,20	28	3.597,87	21	2.812,56	7	785,31	-	-	-	-	3.812,96	
		2009	12	943,42	29	943,42	22	437,59	7	505,83	-	-	-	-	795,05	
		2010	15	2.373,92	32	1.122,66	18	354,30	12	768,36	2	-	-	-	666,33	
		2011	9	268,05	15	268,04	7	165,77	7	102,27	1	-	-	-	165,77	
		2012	15	5.536,80	32	2.095,52	23	1.289,10	9	806,42	-	-	-	-	1.289,10	
		Jumlah	69	16.583,39	136	8.027,51	91	5.059,32	42	2.968,19	3	-	-	-	6.729,21	

Halaman 93 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
487	Kab. Biak Numfor	2008	4	254,31	21	174,30	17	129,30	4	45,00	12	13	14	15	16
		2009	24	6.850,55	51	7.318,30	31	5.935,07	20	1.383,23	-	-	-	-	130,37
		2010	17	8.941,99	43	4.956,06	16	587,95	8	3.713,86	19	654,25	-	-	4.131,10
		2011	44	15.253,65	91	14.385,77	27	7.873,46	4	6.303,61	60	208,70	-	-	118,53
		2012	34	4.592,95	52	3.231,46	-	-	-	-	52	3.231,46	-	-	934,64
		Jumlah	133	35.893,55	258	30.065,89	91	14.525,78	36	11.445,70	131	4.094,41	-	-	5.314,64
488	Kab. Boven Digoel	2008	15	414.494,34	29	289.179,46	17	220.718,24	11	68.461,22	1	-	-	-	5.914,62
		2009	21	78.848,50	44	65.956,03	32	56.712,99	11	9.243,04	1	-	-	-	2.275,00
		2010	12	212.664,63	26	2.888,07	13	1.615,97	12	1.272,10	1	-	-	-	386,65
		2011	24	90.032,34	38	85.879,52	8	73.183,36	22	12.145,26	8	550,90	-	-	1.492,46
		2012	30	12.484,68	59	4.197,97	-	-	-	-	59	4.197,97	-	-	-
		Jumlah	102	808.524,49	196	448.101,05	70	352.230,56	56	91.121,62	70	4.748,87	-	-	10.068,73
489	Kab. Dogiyai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	9.701,56	18	5.053,95	14	1.430,46	4	3.623,49	-	-	-	-	721,05
		2011	17	12.135,03	41	2.974,68	-	-	-	-	41	2.974,68	-	-	-
		2012	18	19.704,05	55	5.967,77	-	-	-	-	55	5.967,77	-	-	-
		Jumlah	48	41.540,64	114	13.996,40	14	1.430,46	4	3.623,49	96	8.942,45	-	-	721,05
490	Kab. Deiyai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	44.977,29	16	38.400,89	6	-	7	-	3	38.400,89	-	-	-
		2012	16	32.864,22	36	27.171,73	17	-	19	27.171,73	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	77.841,51	52	65.572,62	23	-	26	27.171,73	3	38.400,89	-	-	-
491	Kab. Intan Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	21.303,79	25	14.718,72	10	2.827,73	10	737,00	5	11.153,99	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	21.303,79	25	14.718,72	10	2.827,73	10	737,00	5	11.153,99	-	-	-

Halaman 94 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
492	Kab. Jayapura	2008	38	12.454,35	57	10.187,11	45	2.853,87	12	7.333,24	-	-	-	-	2.853,87
		2009	20	6.746,23	23	6.746,22	16	4.352,86	7	2.393,36	-	-	-	-	-
		2010	20	34.963,85	37	3.607,74	9	1.322,30	9	479,22	19	1.806,22	-	-	-
		2011	57	67.399,61	94	51.076,50	-	-	-	-	94	51.076,50	-	-	-
		2012	42	21.550,97	90	11.129,15	-	-	-	-	90	11.129,15	-	-	-
		Jumlah	177	143.115,01	301	82.746,72	70	8.529,03	28	10.205,82	203	64.011,87	-	-	2.853,87
493	Kab. Jayawijaya	2008	17	53.108,45	23	32.423,35	12	2.826,41	11	29.596,94	-	-	-	-	2.954,10
		2009	29	35.400,52	50	186.066,75	29	2.447,89	21	183.618,86	-	-	-	-	2.447,89
		2010	54	8.588,29	91	2.281,65	67	490,51	23	1.791,14	1	1.791,14	-	-	490,51
		2011	26	18.637,41	52	3.376,95	26	2.191,98	2	275,95	24	911,02	-	-	2.222,13
		2012	12	24.833,95	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	138	140.568,62	233	224.150,70	151	7.956,79	57	215.282,89	25	911,02	-	-	8.114,63
494	Kab. Keerom	2008	20	15.252,92	41	15.194,20	26	6.632,48	15	8.561,72	-	-	-	-	12.442,76
		2009	21	13.673,02	42	12.160,24	24	850,12	18	11.310,12	-	-	-	-	97.061,15
		2010	25	5.055,82	50	4.856,35	21	1.080,19	29	3.776,16	-	-	-	-	1.080,19
		2011	21	6.856,76	48	5.015,29	-	-	-	-	48	5.015,29	-	-	-
		2012	35	18.334,05	77	9.060,51	-	-	-	-	77	9.060,51	-	-	-
		Jumlah	122	59.172,57	258	46.286,59	71	8.562,79	62	23.648,00	125	14.075,80	-	-	110.584,10
495	Kab. Mappi	2008	12	110.315,88	27	104.937,66	20	104.181,08	7	756,58	-	-	-	-	-
		2009	8	522.539,36	23	21.003,20	19	21.000,05	4	3,15	-	-	-	-	-
		2010	18	24.256,47	29	18.537,58	16	14.347,43	13	4.190,15	-	-	-	-	-
		2011	8	9.783,78	15	8.909,49	10	2.943,12	5	5.966,37	-	-	-	-	-
		2012	14	17.357,90	25	4.605,68	-	-	-	-	25	4.605,68	-	-	-
		Jumlah	60	684.253,39	119	157.993,61	65	142.471,68	29	10.916,25	25	4.605,68	-	-	-
496	Kab. Merauke	2008	15	10.510,42	22	8.833,25	16	8.192,77	5	740,48	1	-	-	-	730,09
		2009	51	581.618,49	91	97.033,13	48	19.091,53	42	74.330,01	1	3.611,59	-	-	-
		2010	10	555.333,12	16	28.399,85	6	654,74	10	27.745,11	-	-	-	-	-
		2011	46	450.517,38	107	421.353,36	40	318,85	50	418.728,06	17	2.306,45	-	-	-
		2012	23	46.350,11	47	8.719,15	31	246,56	16	8.472,59	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	1.644.329,52	283	564.438,74	141	28.504,45	123	530.016,25	19	5.918,04	-	-	730,09

Halaman 95 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
497	Kab. Mimika	2008	12	1.551.507,99	30	1.154,12	23	959,91	10	194,21	7	194,21	-	-	14	15	16	914,00
		2009	21	1.108.818,27	39	79.563,25	27	71.320,73	12	8.242,52	12	8.242,52	-	-	-	-	-	3.115,84
		2010	40	147.335,89	54	33.682,21	30	32.077,26	15	1.604,95	15	1.604,95	9	-	-	-	-	578,76
		2011	9	5.778,73	17	2.467,86	7	2.445,79	9	22,07	9	22,07	1	-	-	-	-	1.505,48
		2012	25	14.375,03	42	3.901,09	2	1.619,28	10	835,50	10	835,50	30	1.446,31	-	-	-	1.584,28
		Jumlah	107	2.827.815,91	182	120.768,53	89	108.422,97	53	10.899,25	53	10.899,25	40	1.446,31	-	-	-	7.698,36
498	Kab. Nabire	2008	11	24.626,26	12	15.323,94	7	12.558,27	5	2.765,67	5	2.765,67	-	-	-	-	-	-
		2009	24	632.556,33	46	135.782,66	26	94.275,01	19	40.507,65	19	40.507,65	1	1.000,00	-	-	-	-
		2010	44	131.843,10	71	30.612,47	24	877,07	43	29.735,40	43	29.735,40	4	-	-	-	-	-
		2011	28	492.462,83	51	489.858,02	1	-	11	3.029,17	11	3.029,17	39	486.828,85	-	-	-	-
		2012	34	42.438,39	72	25.185,19	-	-	-	-	-	-	72	25.185,19	-	-	-	-
		Jumlah	141	1.323.926,91	252	696.762,28	58	107.710,35	78	76.037,89	78	76.037,89	116	513.014,04	-	-	-	-
499	Kab. Paniai	2008	19	36.477,27	29	34.985,26	15	19.789,92	10	14.613,32	10	14.613,32	4	582,02	-	-	-	19.789,92
		2009	11	9.431,24	22	8.515,63	10	956,99	12	7.556,64	12	7.556,64	-	-	-	-	-	956,99
		2010	27	69.118,69	51	56.982,35	19	47.218,47	19	9.688,32	13	75,56	13	75,56	-	-	-	47.218,47
		2011	17	14.906,11	33	14.476,40	-	-	-	-	-	-	33	14.476,40	-	-	-	-
		2012	26	24.320,75	61	24.111,35	7	-	5	-	5	-	49	24.111,35	-	-	-	-
		Jumlah	100	154.254,06	196	139.068,99	51	67.965,38	46	31.858,28	46	31.858,28	99	39.245,33	-	-	-	67.965,38
500	Kab. Pegunungan Bintang	2008	8	-	15	-	13	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	15.216,13	15	10.810,16	10	-	5	10.810,16	5	10.810,16	-	-	-	-	-	-
		2010	20	21.043,09	53	1.899,45	24	761,94	24	1.137,51	24	1.137,51	5	-	-	-	-	86,06
		2011	16	20.904,43	49	4.640,70	22	282,53	26	4.358,17	26	4.358,17	1	-	-	-	-	282,53
		2012	18	7.293,09	50	4.687,33	19	16,00	29	4.671,33	29	4.671,33	2	-	-	-	-	16,00
		Jumlah	70	64.456,74	182	22.037,64	88	1.060,47	86	20.977,17	86	20.977,17	8	-	-	-	-	384,59
501	Kab. Puncak	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10.373,89	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-	-
		2012	23	5.101,95	52	1.165,57	-	-	-	-	-	-	52	1.165,57	-	-	-	-
		Jumlah	33	15.475,84	77	11.539,46	7	-	8	10.115,34	8	10.115,34	62	1.424,12	-	-	-	-

Halaman 96 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
502	Kab. Puncak Jaya	2008	12	6.781,88	17	6.781,87	11	1.048,53	6	5.733,34	-	-	-	-	1.048,53	
		2009	24	43.014,16	52	40.046,31	31	6.510,82	16	33.083,23	5	452,26	-	-	6.510,82	
		2010	26	7.579,71	68	5.402,54	49	4.945,83	19	456,71	-	-	-	-	4.945,83	
		2011	8	1.533,90	23	1.533,90	15	1.492,77	8	41,13	-	-	-	-	1.492,77	
		2012	8	1.523,50	20	1.523,50	5	-	15	1.523,50	-	-	-	-	-	
		Jumlah	78	60.433,15	180	55.288,12	111	13.997,95	64	40.837,91	5	452,26	-	-	13.997,95	
503	Kab. Sarmi	2008	19	22.311,69	35	12.011,84	23	2.105,16	12	9.906,68	-	-	-	-	2.105,16	
		2009	16	39.357,05	32	25.532,50	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-	-	-	
		2010	23	45.148,55	48	45.148,55	-	-	-	-	48	45.148,55	-	-	-	
		2011	24	168.616,84	83	83.436,09	-	-	-	-	83	83.436,09	-	-	-	
		2012	17	5.773,71	43	5.773,71	-	-	-	-	43	5.773,71	-	-	-	
		Jumlah	99	281.207,84	241	171.902,69	40	4.061,21	27	33.483,13	174	134.358,35	-	-	2.105,16	
504	Kab. Supiori	2008	8	8.536,25	14	5.936,23	4	-	5	5.936,23	5	-	-	-	-	
		2009	22	8.078,24	53	7.734,26	27	1.623,50	25	6.110,76	1	-	-	-	25,00	
		2010	18	5.130,18	37	1.983,72	19	138,84	16	1.844,88	2	-	-	-	138,84	
		2011	19	2.846,93	59	2.053,73	21	381,91	3	1.564,98	35	106,84	-	-	-	
		2012	37	13.875,63	107	11.637,88	-	-	-	-	107	11.637,88	-	-	-	
		Jumlah	104	38.467,23	270	29.345,82	71	2.144,25	49	15.456,85	150	11.744,72	-	-	163,84	
505	Kab. Tolikara	2008	33	7.258,35	62	7.014,74	36	177,85	26	6.836,89	-	-	-	-	190,76	
		2009	18	17.919,42	32	17.473,02	15	-	17	17.473,02	-	-	-	-	-	
		2010	21	35.238,92	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-	-	-	
		2011	12	6.435,59	32	6.135,71	-	-	-	-	32	6.135,71	-	-	-	
		2012	17	12.615,91	44	2.831,56	-	-	-	-	44	2.831,56	-	-	-	
		Jumlah	101	79.468,19	213	68.693,95	54	177,85	61	54.900,03	98	13.616,07	-	-	190,76	
506	Kab. Waropen	2008	20	5.798,03	27	5.798,02	2	3.529,21	8	1.166,16	17	1.102,65	-	-	3.529,21	
		2009	33	185.918,11	74	185.870,11	15	751,64	31	156.696,79	28	28.421,68	-	-	865,64	
		2010	21	3.077,52	58	3.077,52	11	-	21	3.015,42	26	62,10	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	15	4.569,18	55	14.493,08	-	-	-	-	55	14.493,08	-	-	-	
		Jumlah	89	199.362,84	214	209.238,73	28	4.280,85	60	160.878,37	126	44.079,51	-	-	4.394,85	

Halaman 97 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
507	Kab. Yahukimo	2008	11	6.055,95	16	6.055,95	9	6.055,95	7	6.055,95	10	11	12	13	14	15	16
		2009	45	84.928,58	88	74.611,43	42	9.532,16	46	65.079,27	-	-	-	-	-	-	19.231,59
		2010	25	17.390,71	61	14.909,96	13	2.929,10	41	11.980,86	7	-	-	-	-	-	7.987,78
		2011	12	233.615,31	29	2.653,53	8	26,80	21	2.626,73	-	-	-	-	-	-	-
		2012	27	15.626,74	74	10.892,42	24	57,45	50	10.834,97	-	-	-	-	-	-	57,45
		Jumlah	120	357.617,29	268	109.123,29	96	12.545,51	165	96.577,78	7	-	-	-	-	-	27.276,82
508	Kab. Kepulauan Yapen	2008	18	6.457,91	30	5.184,95	-	-	-	-	-	-	30	5.184,95	-	-	-
		2009	23	35.236,61	46	34.704,51	16	3.005,25	20	29.255,92	10	2.443,34	-	-	-	-	567,86
		2010	17	32.456,24	53	25.863,00	29	3.693,21	22	22.169,79	2	-	-	-	-	-	299,08
		2011	12	13.780,10	31	6.189,24	19	1.091,99	12	4.837,92	-	-	-	259,33	-	-	197,28
		2012	40	48.654,46	77	1.516,44	11	1.516,44	19	1.516,44	47	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	110	136.587,32	237	73.458,14	75	7.790,45	73	57.780,07	89	7.887,62	-	-	-	-	1.064,22
509	Kab. Mamberamo Raya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	46.200,30	34	46.200,29	24	24.078,49	10	22.121,80	-	-	-	-	-	-	24.078,49
		2010	25	45.232,79	53	24.137,66	14	-	33	24.137,66	6	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	73	160.832,29	131	43.465,32	-	-	-	-	-	131	43.465,32	-	-	-	-
		Jumlah	116	252.265,38	218	113.803,27	38	24.078,49	43	46.259,46	137	43.465,32	-	-	-	-	24.078,49
510	Kab. Mamberamo Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	13.332,65	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	18	17.188,02	62	4.642,14	-	-	-	-	62	4.642,14	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	30.520,67	122	17.542,00	-	-	-	-	122	17.542,00	-	-	-	-	-
511	Kab. Nduga	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	22.143,42	16	11.882,70	13	5.065,55	3	6.817,15	-	-	-	-	-	-	519,00
		2011	20	10.713,73	60	10.713,73	-	-	-	-	60	10.713,73	-	-	-	-	-
		2012	24	115.068,74	77	30.478,08	25	-	46	21.661,31	6	8.816,77	-	-	-	-	-
		Jumlah	56	147.925,89	153	53.074,51	38	5.065,55	49	28.478,46	66	19.530,50	-	-	-	-	519,00

Halaman 98 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
512	Kab. Lany Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	7	4.555,27	20	4.238,84	-	-	-	-	20	4.238,84	-	-	-	
		2011	9	14.410,36	24	6.849,51	-	-	-	-	24	6.849,51	-	-	-	
		2012	25	13.688,70	93	10.243,29	-	-	-	-	93	10.243,29	-	-	-	
		Jumlah	41	32.654,33	137	21.331,64	-	-	-	-	137	21.331,64	-	-	-	
513	Kab. Yalimo	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	12	19.057,90	38	19.057,90	-	-	11	17.458,76	27	1.599,14	-	-	-	
		2010	14	2.060,03	43	2.060,03	26	700,00	11	1.297,99	6	62,04	-	-	700,00	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	20	3.512,79	70	2.094,49	-	-	-	-	70	2.094,49	-	-	-	
		Jumlah	46	24.630,72	151	23.212,42	26	700,00	22	18.756,75	103	3.755,67	-	-	700,00	
514	Kota Jayapura	2008	45	15.886,39	59	4.684,98	42	260,58	17	4.424,40	-	-	-	-	260,58	
		2009	16	3.662,17	29	3.554,45	18	2.835,65	11	730,95	-	-	-	-	2.835,65	
		2010	62	9.722,37	94	7.357,70	31	2.835,65	62	4.522,05	1	-	-	-	12.695,52	
		2011	59	19.062,42	120	19.224,86	-	-	-	-	120	19.224,86	-	-	-	
		2012	22	11.124,93	69	1.495,91	-	-	-	-	69	1.495,91	-	-	-	
		Jumlah	204	59.456,28	371	36.317,90	91	5.919,73	90	9.677,40	190	20.720,77	-	-	15.779,60	
515	Prov. Papua Barat	2008	39	15.142,58	75	15.142,58	29	-	14	1.875,21	32	13.267,37	-	-	-	
		2009	60	24.036,19	155	23.386,49	48	702,29	10	7.585,41	97	15.098,79	-	-	702,29	
		2010	43	62.240,94	131	55.561,16	39	611,50	10	262,85	82	54.686,81	-	-	611,50	
		2011	75	41.378,87	193	27.939,71	2	1.021,75	2	-	189	26.917,96	-	-	1.021,75	
		2012	26	505.247,60	74	87.928,19	27	226,91	33	5.501,37	14	82.199,91	-	-	226,91	
		Jumlah	243	648.046,19	628	209.958,13	145	2.562,45	69	15.224,84	414	192.170,84	-	-	2.562,45	
516	Kab. Fakfak	2008	34	2.417,68	66	1.014,62	34	78,47	18	936,15	14	-	-	-	78,47	
		2009	51	11.345,66	134	8.001,43	83	966,40	19	6.230,90	32	804,13	-	-	966,40	
		2010	28	6.501,73	63	4.376,17	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	-	-	63,14	
		2011	52	26.543,44	135	5.533,57	8	-	2	-	125	5.533,57	-	-	-	
		2012	24	1.490.886,24	84	58.608,87	-	-	-	-	84	58.284,49	-	-	324,38	
		Jumlah	189	1.537.697,75	482	77.534,66	140	1.432,39	42	7.307,54	300	68.794,73	-	-	1.432,39	

Halaman 99 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
517	Kab. Kaimana	2008	49	6.753,97	131	4.560,62	41	1.108,01	9	2.994,99	81	457,62	-	-	-	1.108,01
		2009	32	4.602,64	79	4.443,56	29	1.997,22	7	1.178,29	43	1.268,05	-	-	-	1.997,22
		2010	24	3.761,23	57	3.761,22	42	659,00	4	2.107,48	11	994,74	-	-	-	657,50
		2011	49	12.746,73	104	6.459,63	39	1.115,52	7	2.134,33	58	3.209,78	-	-	-	1.115,52
		2012	24	1.866,14	64	8.772,07	55	3.820,30	5	4.765,81	4	185,96	-	-	-	3.820,30
		Jumlah	178	29.730,71	435	27.997,10	206	8.700,05	32	13.180,90	197	6.116,15	-	-	-	8.698,55
518	Kab. Manokwari	2008	48	7.553,75	109	3.581,23	5	734,48	31	265,50	73	2.581,25	-	-	-	734,48
		2009	29	18.712,48	78	5.345,79	-	-	-	-	78	5.345,79	-	-	-	-
		2010	42	4.204,03	82	4.204,02	16	589,87	-	-	66	3.614,15	-	-	-	589,87
		2011	60	9.304,37	173	3.756,75	11	1.448,83	6	308,99	156	1.998,93	-	-	-	1.448,83
		2012	29	13.992,10	97	13.977,02	1	75,22	1	45,11	95	13.856,69	-	-	-	75,22
		Jumlah	208	53.766,73	539	30.864,81	33	2.848,40	38	619,60	468	27.396,81	-	-	-	2.848,40
519	Kab. Maybrat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	15.299,82	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	-	0,26
		2012	30	117.445,82	92	117.381,96	-	21,68	1	2.279,42	91	115.080,86	-	-	-	21,68
		Jumlah	58	132.745,64	158	128.721,17	-	21,94	5	2.285,40	153	126.413,83	-	-	-	21,94
520	Kab. Raja Ampat	2008	42	8.078,54	98	7.949,28	23	2.359,61	23	4.249,58	52	1.340,09	-	-	-	2.359,61
		2009	42	9.093,77	140	8.066,81	28	3.836,78	42	2.045,44	70	2.184,59	-	-	-	3.836,78
		2010	20	6.181,10	62	6.123,93	23	2.199,99	31	3.923,94	8	-	-	-	-	2.199,99
		2011	50	7.199,52	110	5.157,71	47	192,42	26	1.958,24	37	3.007,05	-	-	-	192,42
			-	USD 87,75	-	87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	-
		2012	21	8.099,47	74	13.607,11	38	1.427,80	5	7.612,38	31	4.566,93	-	-	-	1.427,80
		Jumlah	175	38.652,40	484	40.904,84	159	10.016,60	127	19.789,58	198	11.098,66	-	-	-	10.016,60
			-	USD 87,75	-	USD 87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	-
521	Kab. Sorong	2008	31	108.414,57	65	1.986,81	39	-	16	1.771,80	10	215,01	-	-	-	-
		2009	46	5.515,11	114	4.358,62	53	1.183,69	30	2.341,14	31	833,79	-	-	-	1.183,69
		2010	33	6.344,28	94	5.335,88	60	2.816,63	12	1.254,13	22	1.268,12	-	-	-	2.816,63
		2011	47	33.182,29	97	16.599,41	22	737,78	40	15.786,63	35	75,00	-	-	-	737,78
			-	USD 79,58	-	79,58	-	-	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-
		2012	25	12.470,57	72	11.923,40	22	456,83	25	1.440,72	24	10.025,85	1	-	-	456,83
		Jumlah	182	165.926,82	442	40.207,12	196	5.194,93	123	22.594,42	122	12.417,77	1	-	-	5.194,93
			-	USD 79,58	-	USD 79,58	-	-	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-

Halaman 100 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vabas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
522	Kab. Sorong Selatan	2008	31	15.937,77	59	15.099,46	30	7.663,29	7	5.489,76	22	1.946,41	-	-	7.663,29
		2009	31	29.464,62	81	1.928,96	55	196,16	19	1.732,80	7	-	-	-	196,16
		2010	23	2.508,00	55	2.076,79	2	1.470,85	4	527,90	49	78,04	-	-	1.470,85
		2011	33	9.126,66	98	8.071,43	40	1.356,44	24	5.449,88	34	1.265,11	-	-	1.356,44
		2012	15	4.342,50	49	4.332,50	-	1.319,57	3	706,29	46	2.306,64	-	-	1.319,57
		Jumlah	133	61.379,55	342	31.509,14	127	12.006,31	57	13.906,63	158	5.596,20	-	-	12.006,31
523	Kab. Tambora	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	5.337,32	66	1.666,40	34	272,78	11	923,52	21	470,10	-	-	272,78
		2012	20	6.525,33	77	6.130,83	23	217,28	29	532,24	25	5.381,31	-	-	217,28
		Jumlah	46	11.862,65	143	7.797,23	57	490,06	40	1.455,76	46	5.851,41	-	-	490,06
524	Kab. Teluk Bintuni	2008	32	8.237,26	118	8.237,26	69	2.039,03	48	6.198,23	1	-	-	-	2.039,03
		2009	51	10.142,47	171	10.142,47	81	2.038,53	90	8.103,94	-	-	-	-	2.038,53
		2010	25	10.125,92	66	10.125,91	32	2.756,58	34	2.832,93	-	4.536,40	-	-	2.756,58
		2011	34	8.206,13	95	3.291,97	9	509,38	11	558,17	75	2.224,42	-	-	509,38
			-	USD 223,92	-	USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-
		2012	22	20.662,93	72	20.662,92	23	660,54	16	12.751,12	33	7.251,26	-	-	660,54
		Jumlah	164	57.374,71	522	52.460,53	214	8.004,06	199	30.444,39	109	14.012,08	-	-	8.004,06
			-	USD 223,92	-	USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-
525	Kab. Teluk Wondama	2008	34	15.677,47	71	13.517,71	11	81,45	8	1.784,01	52	11.652,25	-	-	81,45
		2009	58	21.324,02	179	17.628,24	3	122,85	1	-	175	17.505,39	-	-	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	51	15.910,16	99	11.498,29	-	-	-	-	99	11.498,29	-	-	-
		2012	23	30.803,69	69	14.163,83	1	273,78	2	1.343,00	66	12.547,05	-	-	273,78
		Jumlah	166	83.715,34	418	56.808,07	15	478,08	11	3.127,01	392	53.202,98	-	-	478,08

Halaman 101 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	526 Kota Sorong	3	4	12.713,76	6	12.713,75	8	495,12	4	10.346,60	12	1.872,03	14	15	16	495,12
		2008	28	12.713,76	71	12.713,75	31	495,12	4	10.346,60	36	1.872,03	-	-	-	-
		2009	23	9.821,71	66	7.339,93	24	-	7	819,04	35	6.520,89	-	-	-	-
		2010	34	12.409,33	96	12.168,67	50	-	13	12.168,67	33	-	-	-	-	-
		2011	30	24.453,57	81	11.908,80	44	563,67	17	9.534,45	20	1.810,68	-	-	-	563,67
		2012	23	5.606,41	64	5.587,18	27	526,02	14	4.951,93	23	109,23	-	-	-	526,02
		Jumlah	138	65.004,78	378	49.718,33	176	1.584,81	55	37.820,69	147	10.312,83	-	-	-	1.584,81
		Total	74.510	54.303.851,84	171.976	18.803.770,29	93.233	5.019.077,00	42.957	8.899.446,09	35.693	4.693.336,22	93	191.910,98	-	4.390.829,85
			-	USD 24.713,69	-	USD 14.875,05	-	USD 1.774,25	-	USD 10.206,61	-	USD 2.894,19	-	-	-	USD 1.774,25
			-	SGD 353,52	-	SGD 353,52	-	SGD 217,79	-	-	-	SGD 135,73	-	-	-	SGD 217,79
		Total (Rp)	74.510	54.545.628,55	171.976	18.950.407,33	93.233	5.037.956,08	42.957	8.998.144,00	35.693	4.722.396,27	93	191.910,98	-	4.409.708,93

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUMN (Induk Perusahaan)															
1	PT PLN (Persero)	2008	9	5.989,29	15	5.989,29	9	5.989,29	6	-	-	-	-	-	5.989,29
		2009	12	2.791.122,28	20	1.844.357,89	16	1.828.695,34	2	15.662,55	-	-	2	-	1.828.976,06
		2010	20	11.382.154,37	26	19.701,47	17	16.701,47	8	3.000,00	-	-	1	-	16.701,47
		2011	-	USD 37,07	-	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	-	-	-	-	USD 37,07
		2012	82	41.040.706,28	146	243.003,43	46	45.489,08	84	197.514,35	12	-	4	-	41.852,43
		Jumlah	12	155.283,08	19	155.283,08	-	-	9	155.283,08	10	-	-	-	-
			-	USD 2.937,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 248,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	55.375.255,30	226	2.268.335,16	88	1.896.875,18	109	371.459,98	22	-	7	-	1.893.519,25
			-	USD 2.974,13	-	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	-	-	-	-	USD 37,07
			-	EUR 248,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Bukit Asam (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	16	176.878,82	22	64.392,82	20	64.392,82	2	-	-	-	-	-	72.474,58
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79
		2011	6	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	12	3.347.361,24	13	885,24	-	-	-	-	13	885,24	-	-	-
		Jumlah	34	3.524.240,06	42	65.278,06	25	64.392,82	4	-	13	885,24	-	-	72.474,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	338.370,96	9	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-
		2012	21	5.408,29	26	5.408,29	-	-	-	-	26	5.408,29	-	-	-
		Jumlah	29	343.779,25	35	5.408,29	8	-	-	-	27	5.408,29	-	-	-
			-	USD 2.160,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT Sarana Karya (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu dolar)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	825.373,58	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	675,00	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	15	31.690,80	35	1.032,93	-	-	-	-	35	1.032,93	-	-	-
		Jumlah	20	857.739,38	42	1.032,93	6	-	1	-	35	1.032,93	-	-	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	11	-	3	-	6	-	2	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	11	-	3	-	6	-	2	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	205.072,64	23	81.429,15	16	54,00	7	81.375,15	-	-	-	-	54,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	205.072,64	23	81.429,15	16	54,00	7	81.375,15	-	-	-	-	54,00
8	PT Pertamina (Persero)	2008	99	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	77	187.404,70	177	8.705,40	172	8.705,40	3	-	2	-	-	-	8.705,40
			-	USD 345.572,34	-	USD 32.489,22	-	USD 32.489,22	-	-	-	-	-	-	USD 32.489,22
		2010	83	105.291,13	139	14.771,81	134	2.625,00	4	12.146,81	1	-	-	-	2.625,00
		2011	61	6.472,82	88	-	67	-	17	-	4	-	-	-	-
		2012	129	8.004.125,49	255	85.485,52	-	-	-	-	255	85.485,52	-	-	-
			-	USD 68.973,93	-	USD 306,67	-	-	-	-	-	USD 306,67	-	-	-
		Jumlah	449	8.303.294,14	779	108.962,73	493	11.330,40	24	12.146,81	262	85.485,52	-	-	11.330,40
			-	USD 414.546,27	-	USD 32.795,89	-	USD 32.489,22	-	-	-	USD 306,67	-	-	USD 32.489,22
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	19	-	12	-	7	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	24	-	9	-	15	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	-	43	-	21	-	22	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 3

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	21	3.736,36	42	1.75,57	-	-	-	-	42	1.75,57	-	-	-
		Jumlah	21	3.736,36	42	1.75,57	-	-	-	-	42	1.75,57	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	1.20.162,34	42	91,84	24	91,84	18	-	-	-	-	-	91,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	25	38.405,04	50	1.313,84	-	-	-	-	50	1.313,84	-	-	-
		Jumlah	42	158.567,38	92	1.405,68	24	91,84	18	-	50	1.313,84	-	-	91,84
13	Perum Navigasi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2008	16	48.300,52	35	477,61	16	128,76	11	348,85	6	-	2	-	128,76
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	144.187,43	43	1.735,97	13	1.735,97	11	-	13	-	6	-	1.735,97
		2011	39	474.814,40	98	110.495,07	1	-	30	30.145,17	67	80.349,90	-	-	-
		2012	12	1.745.359,06	33	2.161,87	-	-	-	-	33	2.161,87	-	-	-
		Jumlah	83	2.412.661,41	209	114.870,52	30	1.864,73	52	30.494,02	119	82.511,77	8	-	1.864,73
15	Perum Damri	2008	5	22.904,47	9	43,64	1	43,64	5	-	3	-	-	-	43,64
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	22.904,47	9	43,64	1	43,64	5	-	3	-	-	-	43,64
16	Perum PPD	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Angkutan Sungai Darat dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

Halaman 4 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	60.311,07	40	679,22	-	-	-	-	40	679,22	-	-
		Jumlah	14	USD 67.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14	60.311,07	40	679,22	-	-	-	-	40	679,22	-	-
				USD 67.56										
19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	97.244,79	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	97.244,79	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-
20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	31.100,11	23	46,00	-	-	-	-	23	46,00	-	-
		Jumlah	11	31.100,11	23	46,00	-	-	-	-	23	46,00	-	-
21	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT Pelabuhan Nasional Indonesia (Persero)	2008	2	17,18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	416.073,26	35	123.452,15	16	3.916,08	11	119.536,07	8	-	-	-
		2010	16	82.196,12	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-	-
			-	USD 1,21	-	USD 1,21	-	USD 1,21	-	-	-	-	-	-
		2011	16	8.484,47	46	6.376,90	-	-	9	827,41	37	5.549,49	-	-
		2012	11	338.009,99	17	123,40	-	-	-	-	17	123,40	-	-
		Jumlah	66	844.781,02	127	130.018,45	28	3.982,08	22	120.363,48	77	5.672,89	-	-
				USD 1,21		USD 1,21		USD 1,21						
23	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu kelas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	PT Pengrukan Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-
			-	USD 8.83	-	USD 8.83	-	-	-	USD 8.83	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	CNY 896.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-
				USD 8.83		USD 8.83		-		USD 8.83		-			
				CNY 896.89		-		-		-		-			
25	PT Bina Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Indra Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Virama Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Amarta Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	361.570,57	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
			-	USD 29.327,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	361.570,57	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
			-	USD 29.327,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Istaka Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	13	117.642,73	20	1.387,21	-	-	-	-	20	1.387,21	-	-	-
		Jumlah	13	117.642,73	20	1.387,21	-	-	-	-	20	1.387,21	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vjas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	PT Nindya Karya (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	142.585,00	22	143.945,87	17	129.506,02	5	14.439,85	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	142.585,00	22	143.945,87	17	129.506,02	5	14.439,85	-	-	-	-	-
35	PT Hutama Karya (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	347.403,16	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-
		Jumlah	9	347.403,16	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-
36	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	211.647,70	26	121.925,04	26	121.925,04	-	-	-	-	-	-	26.222,85
			-	USD 11,502.93	-	USD 11,498.63	-	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	211.647,70	34	121.925,04	34	121.925,04	-	-	-	-	-	-	26.222,85
			-	USD 11,502.93	-	USD 11,498.63	-	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-
37	Perum Perumnas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	15	44.059,62	28	12.671,10	5	-	16	5.424,62	7	7.246,48	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	44.059,62	28	12.671,10	5	-	16	5.424,62	7	7.246,48	-	-	-
38	PT Brantas Abipraya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT Waskita Karya (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
40	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	618.980,55	18	605.439,69	12	563.231,57	6	42.208,12	-	-	-	-	563.231,57
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	-	47	-	27	-	20	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	618.980,55	65	605.439,69	39	563.231,57	26	42.208,12	-	-	-	-	563.231,57

Halaman 7 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	6	-	10	-	2	-	1	-	7	-	-	-	-
42	Perum LKBN Antara	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Perum Produksi Film Negara	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT Hotel Indonesia Natour	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	33.599,00	24	33.599,00	-	-	-	-	24	33.599,00	-	-	-
		Jumlah	12	33.599,00	24	33.599,00	-	-	-	-	24	33.599,00	-	-	-
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	26.646,73	12	5,60	2	5,60	1	-	9	-	-	-	5,60
		2011	-	USD 412,07	-	USD 412,07	-	USD 342,19	-	-	-	USD 69,88	-	-	USD 342
		2012	1	6.110,15	7	6.110,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	32.756,88	19	6.115,75	2	5,60	1	-	16	6.110,15	-	-	5,60
			-	USD 412,07	-	USD 412,07	-	USD 342,19	-	-	-	USD 69,88	-	-	USD 342
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	16	1.608.366,87	53	237.518,22	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-
		Jumlah	16	1.608.366,87	53	237.518,22	-	-	-	-	-	USD 1,128,68	-	-	-
			-	USD 48,315,24	-	USD 1,128,68	-	-	-	-	-	237.518,22	-	-	-
			-	USD 48,315,24	-	USD 1,128,68	-	-	-	-	-	USD 1,128,68	-	-	-
54	PT Pindad (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT Dahana (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2008	5	101.156,39	8	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-
			-	USD 13,800,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	24.932,17	16	21.215,40	8	1.288,27	7	19.646,42	1	280,71	-	-	-
		Jumlah	12	126.088,56	24	21.215,40	13	1.288,27	10	19.646,42	1	280,71	-	-	-
			-	USD 13,800,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT LEN Industri (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2008-2010 2011 2012 Jumlah	17	-	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2008-2009 2010 2011-2012 Jumlah	13	11.639,37	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2008-2009 2010 2011-2012 Jumlah	12	111.155,69	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
65	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2008-2009 2010 2011-2012 Jumlah	11	107.568,92	29	2.631,79	13	31,71	6	2.600,08	10	-	-	-	31,71
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2008-2011 2012 Jumlah	11	107.568,92	29	2.631,79	13	31,71	6	2.600,08	10	-	-	-	31,71
		2008-2011 2012 Jumlah	11	93.281,40	24	27.774,42	7	165,72	16	27.608,70	1	-	-	-	-
		Jumlah	11	93.281,40	24	27.774,42	7	165,72	16	27.608,70	1	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	17.059,73	19	7.446,13	14	5.460,92	2	432,79	-	-	3	1.552,42	-	53,39
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	17.059,73	19	7.446,13	14	5.460,92	2	432,79	-	-	3	1.552,42	-	53,39
68	PT Semen Kumpang (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	14.473,98	25	7.631,67	13	271,41	9	4.728,81	1	-	2	2.631,45	-	2.430,94
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-	-
		2012	12	68.026,63	44	68.026,63	-	-	-	-	44	68.026,63	-	-	-	-
		Jumlah	22	82.500,61	69	75.658,30	13	271,41	9	4.728,81	45	68.026,63	2	2.631,45	-	2.430,94
			-	-	-	-	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-	-
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	159.609,87	24	36.883,60	-	-	-	-	24	36.883,60	-	-	-	-
		Jumlah	9	159.609,87	24	36.883,60	-	-	-	-	24	36.883,60	-	-	-	-
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	15.722,54	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	1	1.003,23	-	65,00
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	USD 12.229,81	-	USD 0,00	-	-	-	-
		Jumlah	10	15.722,54	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	1	1.003,23	-	65,00
			-	-	-	-	-	-	-	USD 12.229,81	-	USD 0,00	-	-	-	-
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Cambrics Primmisima (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Nilai	Jml	Nilai	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
74	PT Industri Gelas (Persero)	2008	11	27.690,70	24	15.506,34	20	13.983,06	2	115,72	-	-	2	1.407,56	13.983,06		
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	11	27.690,70	24	15.506,34	20	13.983,06	2	115,72	-	-	2	1.407,56	13.983,06		
75	PT Garam (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	20	1.660,38	30	-	28	-	2	-	-	-	-	-	-		
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	20	1.660,38	30	-	28	-	2	-	-	-	-	-	-		
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	9	5.257,01	16	5.257,01	14	5.206,74	2	50,27	-	-	-	-	6.522,94		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	9	5.257,01	16	5.257,01	14	5.206,74	2	50,27	-	-	-	-	6.522,94		
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2009	9	119.850,94	9	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	-	-	-	-	25.918,06		
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	9	119.850,94	9	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	-	-	-	-	25.918,06		
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-		

Halaman 12 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	282.799,57	1.703,14	25	337,83	7	-	-	18	1.365,31	2	-	-	337,83
		2012	15	37.480,09	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
		Jumlah	39	320.279,66	1.703,14	63	337,83	7	-	-	29	1.365,31	2	-	-	337,83
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	85.411,65	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	85.411,65	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	95.252,44	2.998,64	17	2.998,64	7	-	-	-	-	-	-	-	2.998,64
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	95.252,44	2.998,64	17	2.998,64	7	-	-	-	-	-	-	-	2.998,64
87	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	66.938,27	66.938,27	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	66.938,27	66.938,27	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
88	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	121.595,00	46.273,03	10	-	-	17	46.273,03	4	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	121.595,00	46.273,03	10	-	-	17	46.273,03	4	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	Perum Perhutani	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	22	115.941,10	41	25.282,94	24	6.398,86	15	18.884,08	2	-	-	-	6.398,86
			-	USD 758.61	-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	209.293,05	39	132.604,15	23	-	13	132.604,15	3	-	-	-	-
		2012	14	134.489,41	30	45.493,16	-	-	-	-	30	45.493,16	-	-	-
		Jumlah	67	459.723,56	110	203.380,25	47	6.398,86	28	151.488,23	35	45.493,16	-	-	6.398,86
			-	USD 758.61	-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-	-
91	PT Inhutani I (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-
92	PT Inhutani II (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	26	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	9	-	14	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	27	-	40	-	22	-	17	-	1	-	-	-	-
93	PT Inhutani III (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	168.063,26	15	149.593,83	-	-	-	-	15	149.593,83	-	-	-
		Jumlah	12	168.063,26	15	149.593,83	-	-	-	-	15	149.593,83	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Inhutani V (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2008	1	185,24	1	185,24	1	185,24	-	-	-	-	-	-	185,24
		2009	11	15.485,88	24	27.827,84	22	25.175,00	1	2.652,84	-	-	1	-	25.175,00
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	40.614,23	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	56.285,35	41	30.145,84	23	25.360,24	1	2.652,84	16	2.132,76	1	-	25.360,24

Halaman 14 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
97	PT Pertani (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	-	1.976,30
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	-	1.976,30
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	3.521,13	37	569,51	-	-	36	502,96	1	66,55	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	3.521,13	37	569,51	-	-	36	502,96	1	66,55	-	-	-	-
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	-	447,58
			-	USD 4.010,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	-	447,58
			-	USD 4.010,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-	-
			-	USD 440,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 104.915,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-	-
			-	USD 440,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 104.915,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	PT Kertas Leces (Persero)	2008	6	258.194,04	6	13.166,40	5	10.698,10	1	2.468,30	-	-	-	-	10.698,10
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	258.194,04	6	13.166,40	5	10.698,10	1	2.468,30	-	-	-	-	10.698,10
104	Perum PNRI	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
105	Perum Peruri	2008	11	12.541,24	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	12.162,17	32	1.328,83	24	1.328,83	8	-	-	-	-	-	451,76
			-	EUR 212,87	-	EUR 24,20	-	EUR 24,20	-	-	-	-	-	-	EUR 24,20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	24.703,41	50	1.328,83	41	1.328,83	9	-	-	-	-	-	451,76
			-	EUR 212,87	-	EUR 24,20	-	EUR 24,20	-	-	-	-	-	-	EUR 24,20
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	-	41	-	30	-	7	-	-	-	4	-	-
		2010	4	-	8	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-
		2011	43	-	105	-	63	-	42	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	64	-	154	-	98	-	51	-	-	-	5	-	-
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	31	-	25	-	5	-	-	-	1	-	-
		2012	32	-	180	-	29	-	151	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	55	-	225	-	68	-	156	-	-	-	1	-	-

Halaman 16 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2008	30	1.012.302,00	76	371.855,48	72	371.855,48	4	-	-	-	-	-	-	562.885,48
		2009-2010	-	-	-	USD 13.125,00	-	USD 13.125,00	-	-	-	-	-	-	-	USD 13.125,00
		2011	17	-	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	47	1.012.302,00	112	371.855,48	106	371.855,48	6	-	-	-	-	-	-	562.885,48
			-	-	-	USD 13.125,00	-	USD 13.125,00	-	-	-	-	-	-	-	USD 13.125,00
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2008	14	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	48	-	84	-	58	-	26	-	-	-	-	-	-	-
		2012	204	409.679,70	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
		Jumlah	266	409.679,70	162	-	76	-	26	-	60	-	-	-	-	-
112	PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	1.858.989,87	10	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	562.885,48
		2012	7	7.280.577,43	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	9.139.567,30	25	-	5	-	5	-	15	-	-	-	-	-
113	PT Taspen (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	-	447.896,79
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	-	447.896,79
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	221.378,76	20	1.795,75	14	-	5	1.795,75	-	-	1	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	17	201.629,25	55	34.465,78	-	-	-	-	55	34.465,78	-	-	-	-
		Jumlah	25	423.008,01	75	36.261,53	14	-	5	1.795,75	55	34.465,78	1	-	-	-
115	PT Jasaraharja (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	104.289,83	37	-	28	-	9	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	104.289,83	37	-	28	-	9	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2008	28	80.043,42	47	98.658,18	42	8.522,60	4	90.106,73	-	-	1	28,85	8.522,60
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	22	-	10	-	12	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	40	80.043,42	69	98.658,18	52	8.522,60	16	90.106,73	-	-	1	28,85	8.522,60
117	PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT ASABRI (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	18	714.183,31	49	533.032,65	-	-	-	49	533.032,65	-	-	-	-
		Jumlah	18	714.183,31	49	533.032,65	-	-	-	49	533.032,65	-	-	-	-
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (PU) (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT Danareksa (Persero)	2008	4	438.247,26	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	238.590,20
		2009-2012	-	USD 48.464,81	-	USD 51.605,93	-	USD 23.493,68	-	USD 28.112,25	-	-	-	-	USD 20.352,55
		Jumlah	4	438.247,26	5	USD 51.605,93	3	USD 23.493,68	2	USD 28.112,25	-	-	-	-	238.590,20
			-	USD 48.464,81	-	USD 51.605,93	-	USD 23.493,68	-	USD 28.112,25	-	-	-	-	USD 20.352,55

Halaman 18 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	Perum Pegadaian (Persero)	2008-2010	5	85.395,54	5	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	-	-	-	-	5.096,51
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	85.395,54	17	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	12	-	-	-	5.096,51
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	4.031,19	12	2.845,14	4	2.845,14	8	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	4.031,19	12	2.845,14	4	2.845,14	8	-	-	-	-	-	-
126	PT PANN Multi Finance (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
		2010-2012	-	USD 570,077.23	-	USD 429,924.69	-	USD 429,924.69	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-
128	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	48	354.419,48	77	204.543,90	56	185.658,93	20	18.884,97	-	-	1	-	184.487,28
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	12	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-
		2012	14	526.942,94	47	89.243,21	32	69,59	15	89.173,62	-	-	-	-	49,43
		Jumlah	67	881.362,42	136	293.787,11	92	185.728,52	43	108.058,59	-	-	1	-	184.536,71
133	PT Survey Udara Penas (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2008	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	12.400,72	43	-	41	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	8.560,75	49	-	17	-	32	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	20.961,47	95	-	61	-	34	-	-	-	-	-	-
136	PT Sarinah (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	6.552,35	15	4.933,50	5	796,82	9	1.403,98	1	2.455,81	-	276,89	568,28
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	4.459,16	12	4.459,16	-	-	-	-	12	4.459,16	-	-	-
		Jumlah	11	11.011,51	27	9.392,66	5	796,82	9	1.403,98	13	6.914,97	-	276,89	568,28
137	PT Sucofindo (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	35	-	23	-	12	-	-	-	-	-	-
		2012	6	156.278,18	13	151.666,48	-	-	-	-	13	151.666,48	-	-	-
		Jumlah	17	156.278,18	48	151.666,48	23	-	12	-	13	151.666,48	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu dolar)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
138	PT Berdikari (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	-	21	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	-	21	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhandia Ghara Rekxa (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	24.379,75	32	24.379,75	-	-	-	-	-	32	24.379,75	-	-
		Jumlah	14	24.379,75	32	24.379,75	-	-	-	-	-	32	24.379,75	-	-
144	Perum Jasa Tirta II	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT PPA (Persero)	2008	9	1.570,56	9	1.570,56	6	1.570,56	1	-	-	-	-	2	-
		2009	7	USD 25,000.00	-	USD 25,000.00	-	-	-	USD 25,000.00	-	-	-	-	-
		2010	20	406,22	19	406,22	13	-	1	-	-	5	406,22	-	-
		2011	5	1.877,31	7	172,80	-	-	-	-	-	7	172,80	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	3.854,09	45	2.149,58	23	1.570,56	8	-	-	12	579,02	2	-
			-	USD 25,000.00	-	USD 25,000.00	-	-	-	USD 25,000.00	-	-	-	-	-
			2.582	99.406.452,82	4.619	7.277.447,57	2.213	4.304.920,38	985	1.284.229,83	1.376	1.681.396,96	45	6.900,40	4.406.314,71
			-	USD 1.384.911.78	-	USD 579.314.70	-	USD 510.911.69	-	USD 66.897.78	-	USD 1.505.23	-	-	USD 66.355.03
			-	EUR 469.83	-	EUR 24.20	-	EUR 24.20	-	-	-	-	-	-	EUR 24.20
			-	JPY 104.916.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	CNY 896.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUMN (Anak Perusahaan)															
146	PT Indonesia Power	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	28.019.115,68	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	28.019.115,68	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	79.904,01	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	79.904,01	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
		2010-2012	-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	-	-	-	-	-	USD 886.71
		Jumlah	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
			-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	-	-	-	-	-	USD 886.71
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiring	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT PelitaAir Service	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	81.741,51	11	81.741,51	-	-	-	-	11	81.741,51	-	-	-
		Jumlah	7	81.741,51	11	81.741,51	-	-	-	-	11	81.741,51	-	-	-

Halaman 22 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu dolar)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
154	PT Pelat Timah Nusantara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	10.188,86 USD 20.25	15	6.870,73 USD 20.25	14	6.870,73 USD 20.25	-	-	-	-	1	-	6.870,73 USD 20.25
		2010-2012 Jumlah	8	10.188,86 USD 20.25	15	6.870,73 USD 20.25	14	6.870,73 USD 20.25	-	-	-	-	1	-	6.871 USD 20.25
155	Dana Pensiun Perkebunan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	23.748,90	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	USD 9.47
		2012	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	33	23.748,90	40	-	39	-	1	-	-	-	-	-	USD 9.47
157	PT Pupuk Kujang	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	30.671,69	19	10.816,49	14	500,83	5	10.315,66	-	-	-	-	6.871,75
		2012	3	-	5	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	19	30.671,69	28	10.816,49	19	500,83	8	10.315,66	1	-	-	-	6.871,75
158	PT Petrokimia Gresik	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	17.076,15 USD 2.465.54	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
		2011	3	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	17.076,15 USD 2.465.54	12	USD 11.62	11	-	1	-	-	-	-	-	USD 11.62
159	PT Pupuk Kaltim	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	17.069,00 USD 39.202.66	23	-	20	-	3	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 23 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyotoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	6	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	17.069,00	37	-	34	-	3	-	-	-	-	-	-
			-	USD 39,202.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Dapensri	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	227.814,91	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	227.814,91	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
162	PT Rekayasa Industri	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	143.775,66	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	-	744,58
			-	USD 11,125.91	-	USD 12.61	-	USD 12.61	-	-	-	-	-	-	USD 12.61
			-	EUR 61.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	143.775,66	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	-	744,58
			-	USD 11,125.91	-	USD 12.61	-	USD 12.61	-	-	-	-	-	-	USD 12.61
			-	EUR 61.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	PT Mega Eltra	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	72.996,02	13	6.400,07	-	6.400,07	-	-	13	6.400,07	-	-	-
		Jumlah	7	72.996,02	13	6.400,07	-	6.400,07	-	-	13	6.400,07	-	-	-
164	Dana Pensiun BRI	2008	10	470,46	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	470,46
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	470,46	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	470,46

Halaman 24 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai			
			4	5	6	7	8	9	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	14	15	16	
165	PT BNI Cabang London	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	Dana Pensiun BNI	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	PT BNI Multifinance	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	PT BNI Securities	2008	12	18.458,11	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	-	-	18.085,54	
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	12	18.458,11	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	-	-	-	18.085,54
169	PT Bank Syariah Mandiri	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	PT Mandiri Sekuritas	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	Dana Pensiun Mandiri	2008	10	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	10	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			180	28.744.030,96	268	234.192,75	217	135.362,95	25	10.688,22	25	88.141,58	1	-	-	-	141.751,01	
			-	USD 53.701.07	-	USD 931.19	-	USD 931.19	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 940.66	
			-	EUR 117.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.762	128.150.483,78	4.887	7.511.640,32	2.430	4.440.283,33	1.010	1.294.918,05	1.401	1.769.538,54	46	6.900,40	-	-	4.548.065,72	
			-	USD 1.438.612.85	-	USD 580.245.89	-	USD 511.842.88	-	USD 66.897.78	-	USD 1.505.23	-	-	-	-	USD 67.295.69	
			-	EUR 587.31	-	EUR 24.20	-	EUR 24.20	-	-	-	-	-	-	-	-	EUR 24.20	
			-	JPY 104.916.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	CNY 896.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.762	142.082.519,53	4.887	13.122.928,06	2.430	9.390.113,97	1.010	1.941.819,58	1.401	1.784.094,11	46	6.900,40	-	-	5.199.125,04	
	Total (Rp)																	

Halaman 25 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BHMN															
173	BP Migas	2008	3	1.942,38	8	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	USD 11,250.02	12	USD 11,250.02	3	USD 11,250.02	9	USD 11,250.02	-	-	-	-	-
		2011	35	205.170.00	39	-	26	-	7	-	6	-	-	-	-
			-	USD 125,893.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
		Jumlah	53	207.112,38	68	-	36	-	17	USD 11,250.02	15	-	-	-	-
			-	USD 137,143.74	-	USD 11,250.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BHMN		53	207.112,38	68	-	36	-	17	USD 11,250.02	15	-	-	-	-
			-	USD 137,143.74	-	USD 11,250.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KKKS															
174	Badan Operasi Bumi Bumi Siak Pusak (BOB PT BSP) - Pertamina Hulu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	USD 436.03	8	USD 436.03	7	USD 436.03	1	-	-	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	12,76	7	12,76	3	12,76	4	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	USD 1,328.50	-	USD 1,328.50	-	USD 693.94	-	USD 634.56	-	-	-	-	-
			-	12,76	15	12,76	10	12,76	5	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1,764.53	-	USD 1,764.53	-	USD 1,129.97	-	USD 634.56	-	-	-	-	-
175	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) IMFK - PSC	2008	6	USD 2,828.70	6	USD 2,828.70	5	USD 2,828.70	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 33,878.11	8	USD 13,025.52	4	USD 450.10	4	12,575,42	-	-	-	-	-
		2012	8	USD 538.26	11	USD 538.26	-	-	-	-	11	USD 538.26	-	-	-
		Jumlah	20	USD 37,245.07	25	USD 16,392.48	9	USD 3,278.80	5	12,575,42	11	USD 538.26	-	-	-
176	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2008	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Halaman 26 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
177	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2008-2012	4	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
178	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 228,967.16	12	USD 1,211.84	4	USD 146.56	8	USD 1,065.28	-	-	-	-	-
		2012	11	USD 38,152.55	11	USD 38,152.55	-	-	-	-	11	USD 38,152.55	-	-	-
		Jumlah	21	USD 267,119.71	23	USD 39,364.39	4	USD 146.56	8	USD 1,065.28	11	USD 38,152.55	-	-	-
180	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Kallia (Korinci Baru) WK korinci	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	580.59	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	580.59	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Pearl Oil WK Tungkal	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 27 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
187	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2008	7	USD 2,785.97	11	USD 2,785.97	8	USD 2,785.97	3	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	USD 881,53	4	USD 881,53	4	USD 881,53	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	USD 3,667.50	15	USD 3,667.50	12	USD 3,667.50	3	-	-	-	-	-	-
188	Petroseilat Ltd. WK Selat Panjang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Premier Oil WK Naturna Sea A	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	-	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	-	-	1	-	-	-	-
190	Star Energy Ltd. WK Kakap	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	6.315,78	14	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.64	-	USD 431.74	-	-	-	USD 1,877.90	-	-	-
		Jumlah	9	6.315,78	14	-	4	-	1	-	9	-	-	-	-
			-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.64	-	USD 431.74	-	-	-	USD 1,877.90	-	-	-
191	Job (PSC) Costa Igi WK Gebang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 28 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	26.405,31	10	26.405,31	-	-	5	-	5	26.405,31	-	-	-
		Jumlah	8	26.405,31	10	26.405,31	-	-	5	USD 934,97	5	26.405,31	-	-	-
			-	USD 1,451,05	-	USD 1,451,05	-	-	-	USD 934,97	-	USD 516,08	-	-	-
197	Camarc Resource Canada WK Bawean	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd. WK South East Sumatera	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	5	USD 910,33	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	288,19	7	288,19	5	288,19	1	-	1	-	-	-	-
		2012	-	USD 2,726,72	-	USD 985,66	-	USD 215,27	-	-	-	USD 770,39	-	-	-
		Jumlah	12	288,19	12	288,19	10	288,19	1	-	1	-	-	-	-
			-	USD 3,637,05	-	USD 985,66	-	USD 215,27	-	-	-	USD 770,39	-	-	-
199	ConocoPhillips Indonesia Gräsik Ltd. WK Corridor PSC	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Kangean Energy/Indonesia WK Kangean	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 29 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	
1	204 Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimbau	2008	4	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2009	7	USD 150.17	7	USD 150.17	5	USD 38.26	2	USD 111.91	-	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	6	USD 518.20	8	USD 518.20	-	-	-	-	8	USD 518.20	-	-	-
		Jumlah	13	USD 668.37	15	USD 668.37	5	USD 38.26	2	USD 111.91	8	USD 518.20	-	-	-
205	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Petrochina Ltd. WK Bangko	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	USD 10.456,76	10	USD 7.455,80	3	USD 1.557,39	5	USD 5.898,41	2	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 10.456,76	10	USD 7.455,80	3	USD 1.557,39	5	USD 5.898,41	2	-	-	-	-
214	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 30 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
215	JOA (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	USD 36.11	8	USD 36.10	1	USD 7.02	-	-	7	USD 29.08	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 36.11	8	USD 36.10	1	USD 7.02	-	-	7	USD 29.08	-	-	-	-
216	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 8,053.11	8	USD 8,053.10	4	USD 82.19	-	-	4	USD 7,970.91	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 8,053.11	8	USD 8,053.10	4	USD 82.19	-	-	4	USD 7,970.91	-	-	-	-
219	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	USD 29,747.10	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	-	-	15	USD 29,471.54	-	-	-	-
		Jumlah	14	USD 29,747.10	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	-	-	15	USD 29,471.54	-	-	-	-
220	Selera - Merangin Dua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2008	6	651,22	6	651,22	6	651,22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	USD 43.98	-	USD 43.98	-	USD 43.98	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	411,94	10	411,94	4	-	4	USD 4,655.52	2	411,94	-	-	-	-
		2012	-	USD 4,994.55	-	USD 4,878.49	-	USD 208.38	-	-	-	USD 14.59	-	-	-	-
		Jumlah	16	1.063,16	16	1.063,16	10	651,22	4	USD 4,655.52	2	411,94	-	-	-	-
			-	USD 5,038.53	-	USD 4,922.47	-	USD 252.36	-	USD 4,655.52	-	USD 14.59	-	-	-	-

Halaman 31 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	222 Chevron Ind. WK Makassar Strait	2008-2012	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	223 Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	224 Energy Equity WK Sengkang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225 Impex WK East Kalimantan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	226 Kairaz Petroleum WK Bula Seram	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	227 Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	228 Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	229 Total E&P Indonesia WK Mahakam	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	13	32.323,38	13	32.323,38	8	676,52	2	2.748,23	3	28.898,63	-	-	-
			-	USD 4.411,37	-	USD 4.411,36	-	USD 235,53	-	-	-	USD 4,175,83	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 11,88	-	EUR 11,88	-	-	-	-	-	EUR 11,88	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	USD 1,279,46	12	USD 1,279,45	6	USD 411,28	5	USD 749,71	1	USD 118,46	-	-	-
		2012	7	USD 22,367,61	9	USD 12,367,61	-	-	-	-	9	USD 12,367,61	-	-	-
		Jumlah	31	32.323,38	34	32.323,38	14	676,52	7	2.748,23	13	28.898,63	-	-	-
			-	USD 28,058,44	-	USD 18,058,42	-	USD 646,81	-	USD 749,71	-	USD 16,661,90	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 11,88	-	EUR 11,88	-	-	-	-	-	EUR 11,88	-	-	-
	230 VICO WK Sanga-sanga	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 638,29	10	USD 638,29	10	USD 638,29	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	USD 638,29	10	USD 638,29	10	USD 638,29	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 32 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
231	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Tolli, Sulawesi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Tolli, Sulawesi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	USD 1.826.64	11	USD 1.826.63	3	USD 256.85	1	USD 624.67	7	USD 945.11	-	-	-
		Jumlah	7	USD 1.826.64	11	USD 1.826.63	3	USD 256.85	1	USD 624.67	7	USD 945.11	-	-	-
234	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	PT Pertamina EP	2008	7	USD 1.325.966.29	8	USD 1.325.966.29	5	USD 839.660.29	3	USD 486.306.00	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	40.091,22	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	USD 61.848.51	-	USD 61.848.51	-	USD 61.848.51	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	USD 6.640.59	10	USD 6.640.59	10	USD 6.640.59	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	USD 20.709.21	41	USD 20.709.21	36	USD 4.415.28	2	USD 16.293.93	-	-	-	-	-
			-	40.091,22	41	-	36	-	5	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1.415.164.60	-	USD 1.415.164.60	-	USD 912.564.67	-	USD 502.599.93	-	-	-	-	-
238	Benuo Taka WK Wailawi Block	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Tangguh - BP Berau	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
240	BP Muturi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 34 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan								
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jml	Nilai	10	11	Jml	Nilai	12	13	Jml	Nilai	14	15	16
OTORITA																					
246	Otorita Asahan	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	773.783,91	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	773.783,91	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1.440.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Otorita		10	773.783,91	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	26	773.783,91	-	-	-	-	-	-	-
				USD 1.440.21																	
	Total BHMN, KKKs, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita		358	1.119.208,53	456	836.391,22	213	1.628,69	88	2.748,23	155	832.014,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				USD 2.008.503,36		USD 1.566.406,39		USD 927.839,48		USD 541.100,40		USD 97.466,51									
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-									
				EUR 11.88		EUR 11.88		-		-		EUR 11.88									
	Total (Rp)		358	20.541.630,11	456	15.983.735,08	213	8.973.878,36	88	5.235.189,09	155	1.774.667,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

